

# S U N I K E P S P R O S P E K T U S

## JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")	: 10 Juni 2015	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 24 Juni 2015
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD ( <i>Cum-Right</i> )	: 24 Juni 2015	Tanggal awal perdagangan HMETD	: 24 Juni 2015
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 17 Juni 2015	Tanggal akhir perdagangan HMETD	: 1 Juli 2015
- Pasar Tunai	: 22 Juni 2015	Tanggal awal pelaksanaan HMETD	: 24 Juni 2015
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD ( <i>Ex-Right</i> )	: 18 Juni 2015	Tanggal akhir pelaksanaan HMETD	: 1 Juli 2015
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 18 Juni 2015	Tanggal akhir pembayaran dari pesanan efek tambahan	: 3 Juli 2015
- Pasar Tunai	: 23 Juni 2015	Tanggal awal penyerahan saham yang berasal dari HMETD	: 26 Juni 2015
Tanggal Terakhir Pencatatan Dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD ( <i>Recording Date</i> )	: 22 Juni 2015	Tanggal akhir penyerahan saham yang berasal dari HMETD	: 3 Juli 2015
Tanggal Distribusi HMETD	: 23 Juni 2015	Tanggal Penjatahan Pemahaman Saham Tambahan	: 6 Juli 2015
		Tanggal pengembalian uang pesanan saham tambahan yang tidak terpenuhi	: 8 Juli 2015

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



## PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.

Kegiatan Usaha:  
Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kantor Pusat : Gedung Waskita  
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia  
Telp. (021) 8508510 ext.620, 1910, 1710, Faks. (021) 8508506  
website. www.waskita.co.id, e-mail. waskita@waskita.co.id

Memiliki 2 (dua) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu) Kantor Divisi di Pekanbaru dan 1 (satu) Kantor Divisi di Denpasar

### PENAWARAN UMUM TERBATAS I ("PUT I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebesar 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebesar 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 36.852 (tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp5.297.572.390.000 (lima triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015, dimana pelaksanaannya akan ditetapkan berdasarkan PP No. 29 tanggal 3 Juni tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk.

Jika Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka sesuai Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta addendumnya seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan diserap oleh Pembeli Siaga. Perseroan akan mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel dalam PUT I ini pada BEI.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB") PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2015. DALAM HAL RUPS LB TERSEBUT TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 24 JUNI 2015 SAMPAI DENGAN 1 JULI 2015. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 24 JUNI 2015. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 1 JULI 2015 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 26,9% (DUA PULUH ENAM KOMA SEMBILAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN RISIKO PEMBAYARAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT DALAM BAB VI PADA PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PUT I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENETAPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT I INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

### PEMBELI SIAGA



PT Bahana Securities  
(Terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas  
(Terafiliasi)



PT Mandiri Sekuritas  
(Terafiliasi)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "Penawaran Umum Terbatas I" atau "PUT I") kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 446/WK/DIR/2015 pada tanggal 29 April 2015, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("Peraturan No. IX.D.1") dan Peraturan No. IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("Peraturan No. IX.D.2"), yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1, dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

**PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PUT I, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGERA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGERA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.**

**PROSPEKTUS HANYA DAPAT DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD") DAN SAHAM BIASA PERSEROAN YANG AKAN DITERBITKAN DARI PELAKSANAAN HMETD BELUM PERNAH DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN KETENTUAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933 BESERTA PERUBAHANNYA ATAU YURISDIKSI DI LUAR SELAIN INDONESIA. OLEH KARENA ITU, ORANG-ORANG DI AMERIKA SERIKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, HMETD MUNGKIN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN OLEH ORANG-ORANG DI LUAR WILAYAH INDONESIA DIMANA PENAWARAN ATAU PELAKSANAAN HMETD KE SAHAM DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DAN PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMENTASI HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN ORANG TERSEBUT TIDAK SAH.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
RINGKASAN .....	vii
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....	8
III. PERNYATAAN UTANG .....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	24
VI. RISIKO USAHA.....	43
VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.	45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	46
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	46
2. Riwayat Penawaran Umum Perseroan .....	46
3. Izin-Izin Terkait Kegiatan Usaha.....	47
4. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan .....	48
5. Pengurusan dan Pengawasan .....	50
6. Sumber Daya Manusia .....	59
7. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan .....	67
8. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak .....	68
9. Pernyataan Pada Entitas Asosiasi.....	73
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility – CSR).....	74
11. Struktur Organisasi.....	75
12. Aset.....	76
13. Asuransi .....	81
14. Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Afiliasi.....	83
15. Perjanjian-perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan .....	85
16. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak.....	148
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	152
1. Pendahuluan.....	152
2. Kegiatan Usaha Perseroan.....	154
3. Pemasaran .....	170
4. Pelanggan & Daya Saing .....	171
5. Bahan Baku.....	172
6. Teknologi Informasi .....	172
7. Persaingan .....	172
8. Prospek Usaha .....	173
9. Strategi Usaha .....	176
10. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG) .....	176
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”).....	176
12. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	177
X. EKUITAS .....	178
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	179
XII. PERPAJAKAN.....	180
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	182
XIV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	184
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	189
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	212
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	354
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	383
XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.....	388

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
BAE	Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam PUT I yang ditunjuk oleh Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BEI	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
DPS	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang dikeluarkan oleh BAE.
Efek	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
Efektif	berarti telah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM juncto Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2.
Entitas Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia.
EPC	Berarti <i>Engineering, Procurement and Construction</i> yang merupakan pekerjaan yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dengan melibatkan multi disiplin ilmu.
Harga Pelaksanaan	berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PUT I untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali.

---

Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HMETD	berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang Saham Lama untuk membeli Saham Baru.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011)). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
Pembeli Siaga	Berarti Pembeli Sisa Saham, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas, yang masing-masing akan membeli Sisa Saham dengan bagian yang sama.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	berarti pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan.
Penawaran Umum Terbatas I atau PUT I	berarti penawaran atas sebesar 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas antara 36.852 (tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD dan setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Peraturan No.IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan No. Kep.42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.D.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan No.IX.E.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan No.IX.E.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Peraturan No.X.K.4	berarti Peraturan Bapepam-LK No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/BL/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan No.VIII.G.12	Berarti Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.I.4	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
Peraturan No. IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan No. IX.I.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan No. X.K.4	Berarti Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Periode Perdagangan	berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Pernyataan Efektif	berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PUT I, dan diperolehnya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas PUT I Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan Pendaftaran	berarti pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka PUT I, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya.

Perseroan	Berarti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena: i. kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; atau ii. dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Entitas Anak.
Pihak Berelasi	Berarti, sesuai dengan PSAK 7, adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya a. Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang tersebut: - memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor; - memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau - personal manajemen manajemen kunci kunci entitas entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor b. Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika (salah satu); - Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu suatu kelompok usaha dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya. - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a). - Orang yang diidentifikasi dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan PUT I sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM <i>juncto</i> Peraturan No. IX.D.3. tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
Rupiah atau Rp	Berarti mata uang sah yang berlaku di Indonesia.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	Berarti Saham Biasa yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PUT I ini dalam jumlah sebesar 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.

Saham Lama	berarti saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
Sertifikat Bukti HMETD	berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan kepemilikan mereka atas HMETD yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan.
Suara	berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham dalam RUPS.
Tanggal Penjatahan	berarti tanggal dilakukannya penjatahan saham
Turnkey	Berarti proyek dimana Perseroan menyediakan jasa dan dana untuk pelaksanaan proyek, kemudian konsumen akan membayar kembali seluruh kewajibannya atas jasa dan dana yang telah dilakukan oleh Perseroan setelah pekerjaan diselesaikan dengan persyaratan konsumen menyerahkan Bank Garansi sebagai jaminan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

#### **SINGKATAN ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI**

PT CW	PT Citra Waspphutowa
PT JKT	PT Jasamarga Kualanamu Tol
PT KKDM	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT PMT	PT Prima Multi Terminal
PT WSE	PT Waskita Sangir Energi
PT WTR	PT Waskita Toll Road
PT WBP	PT Waskita Beton Precast
PT WKR	PT Waskita Karya Realty
PT PPTR	PT Pejagan Pematang Toll Road
PT WBW	PT Waskita Bumi Wira



# RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua informasi keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

## 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama “Volker Aanneming Maatschappij N.V.” yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2012 sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 57 tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua belas), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas) Nomor: 44 Tambahan Nomor: 61819, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor: 2 tanggal 03-02-2015 (tiga Februari dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0007316, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014741.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 4 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.41.00065 tanggal 3 September 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari hasil pelaksanaan opsi pembelian saham seri B sehubungan dengan Program MESOP sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, terakhir kali perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK NO. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan Akta Nomor: 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0928411 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, terakhir Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah sehubungan dengan hasil pelaksanaan opsi pembelian saham seri B sehubungan dengan Program MESOP, dengan akta Akta Nomor: 46 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0934821 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 26 Mei 2015.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, properti dan realty, jasa penyewaan, investasi, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi.

Perseroan melakukan perluasan kegiatan usaha dengan pengembangan pada bidang energi melalui pendirian PT WSE, pada bidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol melalui pendirian PT WTR, pada bidang precast melalui pendirian PT WBP dan pada bidang realty melalui pendirian PT WKR.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan berdomisili di Gedung Waskita, Jl. M.T.Haryono Kav.10, Cawang, Jakarta Timur.

## PENYERTAAN PERSEROAN PADA ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
<b>Entitas Anak</b>					
1.	PT Waskita Sangir Energi	Energi	85,00%	2013	belum beroperasi
2.	PT Waskita Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%	2014	belum beroperasi
3.	PT Waskita Beton Precast	Industri Pabrikasi	99,99%	2014	Sudah Beroperasi
4.	PT Waskita Karya Realty	Realti	99,99%	2014	belum beroperasi
<b>Entitas Asosiasi</b>					
1.	PT Waskita Bumi Wira	Pengoperasian dan Pengendalian Jalan Tol.	48,00%*	2014	belum beroperasi
2.	PT Citra Waspputowa	Pengusahaan Jalan Tol	12,50%	2006	belum beroperasi
3.	PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	15,00%	2014	belum beroperasi
4.	PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2014	belum beroperasi

Ket: \*) Persentase kepemilikan Perseroan melalui PT WTR

## STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pada saat prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,067553743
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,932446247
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000	100,00000000
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>	<b>100,00000000</b>

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

## PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Jenis Penawaran	: HMETD
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah)
Rasio Konversi	: 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas antara 36.852 (tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen)
Periode Perdagangan HMETD	: 24 Juni 2015 – 1 Juli 2015
Periode Pelaksanaan HMETD	: 24 Juni 2015 – 1 Juli 2015
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 24 Juni 2015
Pencatatan	: BEI

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT I dan sesudah dilaksanakannya PUT I, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Saham Seri A Dwiwarna						
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06755374	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93244625	4.603.775.673	460.377.567.300	33,93244625
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00000000</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.432.526.440	1.243.252.644.000	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>		<b>12.432.526.440</b>	<b>1.243.252.644.000</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Negara Republik Indonesia melaksanakan haknya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT I dan sesudah dilaksanakannya PUT I, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Saham Seri A Dwiwarna						
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06755374	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93244625	3.364.054.360	336.405.436.000	24,79499477
- Pembeli Siaga*	-	-	-	1.239.721.313	123.972.131.300	9,13745148
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00000000</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.432.526.440	1.243.252.644.000	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>		<b>12.432.526.440</b>	<b>1.243.252.644.000</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

## RIWAYAT PENAWARAN UMUM YANG PERNAH DILAKUKAN PERSEROAN

Riwayat Penawaran Umum Obligasi yang pernah dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Obligasi (Rp)	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
<b>PENERBITAN SURAT UTANG</b>					
Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Seri A	53.750.000.000	idBBB	3 tahun	19 November 2006	-
Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Seri B	46.250.000.000	idBBB	5 tahun	19 November 2008	-
Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Seri A	75.000.000.000	idA	3 tahun	5 Juni 2015	75.000.000.000
Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Seri B	675.000.000.000	idA	5 tahun	5 Juni 2017	675.000.000.000
PUB I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014	500.000.000.000	idA	3 tahun	18 November 2017	500.000.000.000
<b>Total</b>					<b>1.250.000.000.000</b>

Perseroan mendapatkan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 10 Desember 2012 atas Penyataan Pendaftaran No.1024/WK/DIR/2012 tanggal 25 Oktober 2012. Perseroan menawarkan kepada masyarakat atas 3.082.315.000 saham dan mencatatkan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia sebesar 9.632.236.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp380 per saham dengan nilai sebesar Rp1.171.279.700.000, pada tanggal 17 Desember 2012.

## 2. Rencana Penggunaan Dana

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil PUT I setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk membiayai pembangunan dan investasi jalan tol di Jawa dan Sumatera baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak dan pembangunan transmisi listrik di Sumatera.

Pengalihan dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung adalah dalam bentuk penyertaan modal.

## 3. Risiko Usaha

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Entitas Anak yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

### Risiko Usaha

1. Risiko Pembayaran
2. Risiko Kenaikan Harga Dan Ketersediaan Bahan Baku
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Perubahan Nilai Tukar Valuta Asing
6. Risiko Sosial & Politik
7. Risiko Berkurangnya Proyek Dari Pelanggan Berulang

### Risiko Investasi

Fluktuasi Harga Perdagangan Saham Baru

Manajemen telah mengungkapkan semua risiko berdasarkan bobot dampak risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan keuangan Perseroan.

## 4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (*Member Firm of RSM International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2013 dan 2012 tanpa paragraf tambahan, untuk tahun 2011 dengan paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011, dan 2010 tanpa paragraf tambahan.

### Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Total Aset	12.542.041	8.788.302	8.366.243	5.116.001	4.078.740
Total Liabilitas	9.693.211	6.404.865	6.359.168	4.495.780	3.628.551
Total Ekuitas	2.848.830	2.383.437	2.007.075	620.223	450.190

### Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan usaha	10.286.813	9.686.610	8.808.416	7.274.167	5.853.205
Beban pokok pendapatan	(9.177.917)	(8.775.914)	(8.076.158)	(6.610.973)	(5.276.903)
Laba bruto	1.108.896	910.696	732.258	663.194	576.302

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Laba bersih tahun berjalan	501.213	367.970	254.031	171.989	124.079
Laba komprehensif tahun berjalan	497.058	366.629	254.363	172.457	115.032
Laba bersih per saham dasar	51,90	38,20	38,14	9.554,96	6,893

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.

## 5. Keunggulan Bersaing

Peseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

- Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur Pemerintah dan luar negeri
- Pemain besar nasional dengan reputasi dan *customer base* yang luas
- Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas
- Melakukan diversifikasi usaha dengan sistem investasi
- Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat
- Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia
- Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam penyelesaian proyek dengan tepat waktu
- Memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi

## 6. Prospek Usaha

Seiring dengan bertambahnya permintaan terhadap industri konstruksi, sampai dengan tahun 2015 Pemerintah akan mempersiapkan dana sebesar Rp564 Triliun. Jumlah tersebut akan di alokasikan terhadap 5 sektor yang antara lain adalah Sumber Daya Air (SDA), Transportasi, Perumahan, Energi & Listrik, Pos & TI. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, MP3EI, Bappenas, Januari 2012).

Pertumbuhan infrastruktur tahun 2020 pada bidang transportasi seperti jalan tol dan jembatan di Indonesia diprediksikan akan mencapai 25% dari total semua proyek konstruksi. Infrastruktur pada bidang *railroad* dan *powerplant* (Energi & Listrik) menempati peringkat kedua dan ketiga dengan total nilai pertumbuhan mencapai 23% dan 17% sampai tahun 2020. Sehubungan dengan pertumbuhan tersebut, Pemerintah sudah mengalokasikan pendanaan terbesar pada pembangunan infrastruktur untuk sektor transportasi. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, Bappenas, Januari 2012).

Secara umum pada 2014, mayoritas pengusaha optimis pada kemajuan sektor konstruksi. Hal ini tercermin dari besaran nilai indeksinya dalam data Badan Pusat statistik (BPS) yang lebih besar dari 50, yaitu ditunjukkan dengan nilai indeks kondisi bisnis konstruksi mencapai 54,05 untuk kondisi bisnis dan prospek bisnis sebesar 63,12 pada pertengahan 2014.

Di sisi lain, berdasarkan data citradataconstruction.com, Indonesia bersiap tengah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Karna itu, perusahaan-perusahaan lokal dan asing mempersiapkan diri guna menyambut era tersebut. Sektor *commercial building* diprediksi mengalami kenaikan sekitar 9,2% dari tahun 2014. Begitupun dengan sektor *residential* diprediksi mengalami kenaikan sekitar 14,15% pada 2015 dibanding dengan 2014.

Pada sektor infrastruktur, program dari Pemerintahan baru yang akan membangun berbagai macam infrastruktur seperti pelabuhan dan dermaga yang memudahkan untuk pendistribusian barang via laut, waduk, jalan tol Trans Sumatera dan Sulawesi, MRT, Power Plant juga akan meramaikan pasar konstruksi pada masa mendatang.

Sektor infrastruktur diprediksi mengalami kenaikan sekitar 72% dari tahun 2014. Program infrastruktur ini juga terdapat dalam *blue print* MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), diperkirakan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintahan presiden Joko Widodo akan mengalokasikan dana sebesar Rp6.500 T per 5 tahun.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga bahan bangunan dan bahan-bahan lainnya. Namun banyak pengamat ekonomi yang optimis perekonomian Indonesia masih berada di jalur yang positif. Demikian juga para pelaku dunia properti juga optimis pada Pemerintahan baru yang berjanji akan memberikan kemudahan pada proses perizinan dan investasi bagi investor asing dan lokal.

## 7. Strategi Usaha Perseroan

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan Perseroan dalam hal pertumbuhan bisnis, penghematan biaya, serta pembuatan dan pembaharuan sistem, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

**a. Revitalisasi (2012)**

Membentuk sistem baru, diantaranya sistem informasi manajemen, sistem *Human Capital development*, sistem manajemen arus kas, sistem manajemen risiko, serta sistem manajemen proyek yang dapat mendukung pasar dan operasi.

**b. Pengembangan (2013 - 2014)**

Mengembangkan produk baru, diantaranya konstruksi yang berbasis kepada K3LMP dan *green construction*, proyek-proyek *engineering procurement construction* (EPC), serta proyek-proyek unggulan lainnya dengan didukung sistem dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan Perseroan.

**c. Realisasi (2015 – 2017)**

Memiliki arus kas operasi yang positif dengan didukung pertumbuhan penjualan yang baik dengan laba bersih yang melebihi dari industri sejenis.

## I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi, atas nama Perseroan, dengan ini melakukan PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan sebesar 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebesar 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 36.852 (tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksana sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp5.297.572.390.000 (lima triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu Rupiah). Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015, dimana pelaksanaannya akan ditetapkan berdasarkan PP No. 29 tanggal 3 Juni tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk.

Jika Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka sesuai Perjanjian Pembelian Sisa Saham beserta addendumnya seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan diserap oleh Pembeli Siaga. Perseroan akan mencatatkan seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel dalam PUT I ini pada BEI.

Memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru dalam PUT I ini seluruhnya berjumlah 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen).



### **PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**

#### **Kegiatan Usaha:**

Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan

#### **Berkedudukan di Jakarta Timur**

#### **Kantor Pusat :**

Gedung Waskita

Jl. MT Haryono Kav. 10 Cawang

Jakarta 133440, Indonesia

Telp. (021) 8508510 ext. 620, 1910, 1710

Faks. (021) 8508506

website. [www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)

e-mail. [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

Memiliki 2 (dua) Kantor Divisi di Jakarta, 1 (satu) Kantor Divisi di Pekanbaru dan 1 (satu) Kantor Divisi di Denpasar

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBAYARAN**



Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2012 sampai dengan saat ini sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 57 tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua belas), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas) Nomor: 44 Tambahan Nomor: 61819, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Nomor: 2 tanggal 03-02-2015 (tiga Februari dua ribu lima belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0007316, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014741.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 4 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.41.00065 tanggal 3 September 2015, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari hasil pelaksanaan opsi pembelian saham seri B sehubungan dengan Program MESOP sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, terakhir kali perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK NO. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan Akta Nomor: 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0928411 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, terakhir Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah sehubungan dengan hasil pelaksanaan opsi pembelian saham seri B sehubungan dengan Program MESOP, dengan akta Akta Nomor: 46 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0934821 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 26 Mei 2015

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,067553743
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,932446247
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000	100,00000000
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>	<b>100,00000000</b>



Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Mohamad Hasan	4.327.900	432.790.000	0,0436545
2. Arif Baharudin	5.587.700	558.770.000	0,0563619
3. M. Choliq	16.202.200	1.620.220.000	0,1634279
4. Nyoman Wirya. A	1.199.700	119.970.000	0,0121011
5. Desi Arryani	14.445.100	1.444.510.000	0,1457044
6. Agus Sugiono	3.796.500	379.650.000	0,0382944
7. Tunggul Rajagukguk	14.445.100	1.444.510.000	0,1457044
8. Adi Wibowo	14.341.600	1.434.160.000	0,1446604
<b>Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian</b>	<b>74.345.800</b>	<b>74.345.800.000</b>	<b>0,7499090</b>

#### PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Jenis Penawaran	: HMETD
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah)
Rasio Konversi	: 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas antara 36.852 (tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD
Dilusi Kepemilikan	: 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen)
Periode Perdagangan HMETD	: 24 Juni 2015 – 1 Juli 2015
Periode Pelaksanaan HMETD	: 24 Juni 2015 – 1 Juli 2015
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 24 Juni 2015
Pencatatan	: BEI

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh seluruh pemegang saham Perseroan, maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT I dan sesudah dilaksanakannya PUT I, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Saham Seri A Dwiwarna						
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B - Negara Republik Indonesia Seri B - Masyarakat*	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06755374	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374
	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93244625	4.603.775.673	460.377.567.300	33,93244625
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00000000</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.432.526.440	1.243.252.644.000	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>		<b>12.432.526.440</b>	<b>1.243.252.644.000</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015, dimana pelaksanaannya berdasarkan PP No. 29 tanggal 3 Juni tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya, Tbk.

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PUT I ini tidak dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan, kecuali pemegang saham Negara Republik Indonesia melaksanakan haknya dan apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.437 (empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh saham), PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.437 (empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh saham) dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.439 (empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan saham), maka struktur permodalan Perseroan sebelum PUT I dan sesudah dilaksanakannya PUT I, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Sebelum PUT I			Setelah PUT I		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Saham Seri A Dwiwarna						
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06755374	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93244625	3.364.054.360	336.405.436.000	24,79499477
- Pembeli Siaga*	-	-	-	1.239.721.313	123.972.131.300	9,13745148
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00000000</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000		12.432.526.440	1.243.252.644.000	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>		<b>12.432.526.440</b>	<b>1.243.252.644.000</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham dibawah 5%

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak ketiga dari tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 melalui BEI atau di luar bursa sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1. Para pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham HMETD yang ditawarkan pada PUT I ini dapat mengalami dilusi yang material terhadap persentase kepemilikan sahamnya sampai dengan 26,9%. Selisih pembulatan jumlah saham dengan HMETD yang diterbitkan (*odd-lot*) akan dikembalikan kepada Perseroan dan diserahkan kepada Pembeli Siaga untuk dijual.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada pemegang HMETD, yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan.

### Keterangan Singkat Tentang MESOP

MESOP merupakan opsi yang diberikan oleh Perseroan kepada manajemen yang terdiri dari dewan komisaris kecuali komisaris independen dan anggota direksi, pegawai level manager dan pegawai level supervisor dan staf, dimana Peserta Program MESOP akan diberikan opsi untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam kurun waktu tertentu pada harga tertentu yang telah ditetapkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan Pasar Modal. Opsi tersebut akan diberikan berdasarkan kriteria jabatan, prestasi dan masa kerja dari Peserta Program MESOP yang bersangkutan.

Dalam Akta No. 7 tanggal 5 November 2012 tentang program MESOP, Perseroan memberikan opsi untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan sebesar 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Peserta Program MESOP dapat menukarkan opsinya menjadi saham Perseroan dalam suatu periode tertentu yaitu 2 (dua) kali dalam satu tahun. Setiap hak opsi akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya.

Perseroan telah mengumumkan pelaksanaan program MESOP sebagai berikut:

Tahapan	Masa Laku Hak Opsi	Harga pelaksanaan Opsi (Rp)	Keterangan Seluruh Jumlah Hak Opsi	Keterangan Jumlah Hak Opsi yang belum terpakai
<b>Hak Opsi Tahap I</b>	November 2017	438	173.380.000 opsi	3.306.320 opsi
<b>Hak Opsi Tahap II</b>	November 2018	396	115.587.000 opsi	3.921.320 opsi
<b>TOTAL</b>			<b>288.967.000 opsi</b>	<b>7.227.640 opsi</b>

Hak opsi diterbitkan dengan masa laku (*Option Life*) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya dan akan dikenakan masa tunggu (*Vesting Period*) ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi.

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan No. I-A lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 yakni sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode pelaksanaan setiap tahun dengan ketentuan setiap periode pelaksanaan akan dibuka selama 30 (tiga puluh) hari Bursa. Program MESOP ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat Perseroan No.182/WK/Dir/2013 tanggal 22 Februari 2013 kepada PT Bursa Efek Indonesia dengan tembusan kepada OJK dan BAE, disebutkan sebagai berikut:

Tahun	MESOP	Tanggal Pelaksanaan
2014	Tahap I	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 18 Mei 2014
2014	Tahap I	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 1 November 2014
2015	Tahap I & II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 18 Mei 2015
2015	Tahap I & II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 1 November 2015
2016	Tahap I & II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 18 Mei 2016
2016	Tahap I & II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 1 November 2016
2017	Tahap I & II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 18 Mei 2017
2017	Tahap I & II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 1 November 2017
2018	Tahap II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 18 Mei 2018
2018	Tahap II	30 hari bursa dimulai sejak tanggal 1 November 2018

Apabila sisa opsi dalam program MESOP seluruhnya dilaksanakan pada periode pelaksanaan tahun 2015, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan MESOP secara proforma adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Setelah PUT I			Setelah PUT I dan Pelaksanaan Sisa MESOP		
	Nilai Nominal Rp.100,- per saham			Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>						
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
Saham Seri A Dwiwarna						
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001	1	100	0,00000001
Saham Seri B						
- Negara Republik Indonesia Seri B	8.963.697.886	896.369.788.600	66,06755374	8.963.697.886	896.369.788.600	66,03237710
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	24,79499477	3.364.054.360	336.405.436.000	24,78179306
- Pembeli Siaga*	1.239.721.313	123.972.131.300	9,13745148	1.239.721.313	123.972.131.300	9,13258637
- MESOP	-	-	-	7.227.640	722.764.000	0,05324346
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>13.567.473.560</b>	<b>1.356.747.356.000</b>	<b>100,0000000000</b>	<b>13.574.701.200</b>	<b>1.357.470.120.00</b>	<b>100,0000000000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>						
Seri A Dwiwarna	-	-	-	-	-	-
Seri B	12.432.526.440	1.200.797.069.800		12.425.298.800	1.242.529.880.000	
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.432.526.440</b>	<b>1.200.797.069.800</b>		<b>12.425.298.800</b>	<b>1.242.529.880.000</b>	

### Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Efek yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

#### 1. Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham Baru dengan ketentuan bahwa pemegang 100.000 (satu) Saham Lama mempunyai antara 36.852 (tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dalam rangka PUT I ini dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh) setiap saham.

#### 2. Pemegang HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah (i) para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS atau memiliki Saham Perseroan di rekening efek perusahaan efek/bank kustodian pada tanggal 22 Juni 2015 sampai

dengan pukul 16.00 WIB, dan yang HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (ii) pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau (iii) pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

### 3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan Sertifikat Bukti HMETD, yaitu mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 1 Juli 2015. Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa di mana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI, serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasehat investasi, manajer investasi, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00071/BEI/11-2013 perihal Perubahan Satuan Perdagangan dan Fraksi harga, satu satuan perdagangan HMETD ditetapkan sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di Pasar Negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap hari bursa dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated System ("JATS"), kecuali hari Jumat dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

### 4. Bentuk Dari Sertifikat Bukti HMETD

Ada 2 (dua) bentuk HMETD yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu :

- Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

### 5. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 1 Juli 2015.

### 6. Nilai HMETD

Nilai bukti HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya berlaku di pasar. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

#### Asumsi:

Harga pasar satu saham	: Rpa
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT I	: Rpr
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT I	: A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I	: R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT I	: A + R
Nilai Teoritis Saham Baru ex-HMETD	:

$$\frac{(Rpa \times A) + (Rpr \times R)}{(A + R)} = RpX$$

Maka nilai HMETD adalah = RpX – Rpr

#### **7. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

#### **8. Pecahan HMETD**

Berdasarkan Peraturan No. IX.D.1 bahwa dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada pemegang saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

#### **9. Lain-lain**

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas pemindahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

**DALAM KURUN WAKTU 12 (DUABELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT I INI, PERSEROAN TIDAK AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DILUAR YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI, KECUALI SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN OPSI BERDASARKAN *MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN* YANG TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil PUT I ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk membiayai pembangunan dan investasi jalan tol di Jawa dan Sumatera baik langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak dan pembangunan transmisi listrik di Sumatera.

Pengalihan dana kepada Entitas Anak Tidak Langsung adalah dalam bentuk penyertaan modal.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka PUT I dan PP No. 11 Tahun 2014 mengenai Pungutan oleh OJK, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,642% (nol koma enam empat dua persen) yang merupakan persentase dari seluruh penerimaan kotor hasil PUT I adalah sebagai berikut:

1. Biaya Jasa Penasehat Keuangan sekitar 0,031%
2. Biaya Jasa Pembeli Siaga sekitar 0,577%
3. Biaya Jasa Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal
  - a. Konsultan Hukum sekitar 0,007%
  - b. Kantor Akuntan Publik sekitar 0,002%
  - c. Notaris sekitar 0,002%
  - d. Biro Administrasi Efek sekitar 0,003%
4. Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI dan pendaftaran di OJK sebesar sekitar 0,020%

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPST Perseroan dan OJK secara periodik sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Penggunaan dana dari hasil PUT I akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I ini maka Perseroan harus terlebih dahulu (i) melaporkannya ke OJK disertai dengan alasan dan pertimbangannya, dan (ii) meminta persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi atau mengandung benturan kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan mengikuti Peraturan Nomor IX.E.1 dan Peraturan Nomor IX.E.2, dan pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

Adapun Penawaran Umum sebelumnya yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Perdana Saham Waskita Karya Tahun 2012, obligasi II Waskita Karya tahun 2012 dan PUB I tahap I tahun 2014 dimana seluruh dana yang diperoleh telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana. Realisasi penggunaan dana untuk Penawaran Umum Perdana Saham telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 dengan surat No. 862/WK/DIR/2014 tanggal 10 Oktober 2014, penggunaan dana obligasi II Waskita Karya tahun 2012 telah dilaporkan dengan surat No.321/WK/DIR/2014 tanggal 15 April 2014 dan penggunaan dana PUB I tahap I tahun 2014 telah dilaporkan dengan surat No.025/WK/DIR/2015 tanggal 14 Januari 2015.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan. Liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2014 seluruhnya berjumlah Rp9.693.212 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Per 31 Des 2014
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	
Pihak-pihak Berelasi	1.442.610
Pihak-pihak Ketiga	474.519
Utang Usaha	
Pihak-pihak Berelasi	87.469
Pihak-pihak Ketiga	2.484.327
Utang Bruto Kepada Subkontraktor	2.700.537
Utang Pajak	104.179
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	289.436
Beban Masih Harus Dibayar	98.728
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	46.349
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>7.728.154</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	
Pihak-pihak Berelasi	50.268
Pihak-pihak Ketiga	665.481
Utang Lain-lain Berelasi	3.652
Uang Obligasi	1.245.657
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	1.965.058
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>9.693.212</b>

#### Liabilitas Jangka Pendek

##### 1. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Saldo pinjaman bank jangka pendek Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.917.129.494.292, adapun rincian pinjaman bank jangka pendek Perseroan sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Phak-pihak Berelasi</b>	
Indonesia Eximbank	829.404
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	357.976
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	255.230
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>1.442.610</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>	
PT BPD Jabar dan Banten	174.519
PT Bank Panin Tbk	300.000
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>474.519</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.917.129</b>

Suku bunga per tahun:

Indonesia Eximbank	9,25%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,00%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,50%
PT BPD Jabar dan Banten	9,86%
PT Bank Panin Tbk	JIBOR + 3,00%
PT Bank UOB Indonesia	10,5)%

#### Indonesia Eximbank

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Export (KMKE) sebesar Rp900.000.000.000 sesuai surat No. PBD/SP3/18/2015 tanggal 18 Maret 2015. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo tanggal 27 Maret 2016.

Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) yang akan diterima dari proyek Upgrading Existing Suai Airport dari Ministry of Transport and Communication Government of the Democratic Republic of Timor Leste, proyek Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, dan proyek pembangunan terminal penumpang Bandara Husein Sastranegara Bandung dijamin atas utang bank Indonesia Eximbank. Serta tanah dan bangunan SHGB No. 592 a/n PT Waskita Karya (Persero) Tbk diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp5.153.000.000.

Total pinjaman kepada Indonesia Eximbank pada 31 Desember 2014 sebesar Rp829.700.000.000.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada bank; memperoleh pinjaman baru atas proyek yang telah dibiayai oleh bank; memperluas atau mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman; penggunaan fasilitas kredit selain daripada untuk tujuan pembiayaan fasilitas kredit; mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan; menjual atau memindahkan aset yang dijadikan jaminan; meminjamkan uang kepada siapapun, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal; bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan dan dievaluasi oleh Bank setiap periode.

#### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2014 sesuai dengan surat perjanjian No.CBG.CB1/SPPK.062/2013 tanggal 29 Oktober 2013. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. *Cash collateral* /Deposito Berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp8.448.200.000 yang telah diikat gadai.
- b. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan kantor cabang Pekanbaru, yang telah diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan (HT) dengan nilai Rp6.750.000.000.
- c. Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) per 31 Desember 2014 yang dijamin atas utang bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 5) adalah tagihan termin atas proyek tagihan termin atas proyek tagihan termin atas proyek Universitas Sebelas Maret, Proyek Waduk Gondang dan Proyek Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; memindahtangankan barang jaminan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijamin kepada pihak lain; menjaga rasio keuangan aset tetap yang akan diperoleh/dibeli oleh Perusahaan di kemudian hari, maka akan dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Perusahaan akan memprioritaskan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan afiliasinya untuk menjadi *arranger*, *underwriter*, dan lain-lain dalam hal perusahaan melakukan *corporate action* dalam rangka *raising fund* di dalam negeri.

Total pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 31 Desember 2014 sebesar Rp357.976.371.750.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt equity ratio* maksimal 4 (empat) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

#### **PT BPD Jabar dan banten Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sub limit *non cash loan* yang dapat digunakan untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), LC, dan Bank Garansi sebesar Rp250.000.000.000 sesuai surat Nomor: 286/Bdg-Kom/An/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 2 Pebruari 2015. Pada 31 Desember 2014 total pinjaman Perusahaan adalah sebesar Rp174.519.121.449.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; memindah tangankan agunan/tagihan termin; mengubah bentuk objek agunan kredit; memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama; mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dibiayai kepada pihak lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada kreditur dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan selain untuk kegiatan usaha sehari-hari; mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang, menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan yang sudah diserahkan sebagai Agunan kepada Kreditur selain dalam rangka memperdagangkan hasil produksi, meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Debitur; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban atas fasilitas kredit kepada pihak lain.



Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) per 31 Desember 2014 yang dijamin atas utang bank PT BPD Jabar dan Banten Tbk adalah yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Stadion Balikpapan Tahap III, Proyek Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket Banyu Urip 2) dan Proyek Gedung Kantor PGN Area Palembang.

### **PT Bank BNI (Persero) Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja Revolving Rp 200.000.000.000.
- b. Kredit Modal Transaksional Rp 800.000.000.000.
- c. Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing (SCF)* Rp 200.000.000.000.
- d. Bank Garansi Rp 3.000.000.000.000
- e. *Letter of Credit (L/C)* atau SKBDN USD40.000.000.

Berdasarkan surat No BIN/2.2/039/R tanggal 17 Maret 2014, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2014 dan jatuh tempo 26 Maret 2015. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Barang-barang stock telah diikat Fidusia Akta Nomor 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No C2-4831 HT.04.06.TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp8.268.049.363.
- b. Satu bidang tanah SHGB No.2001 tanggal 1 Juni 2006 dan berakhir haknya pada tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m2, terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan Sertifikat Hak Tanah (SHT) I No. 323.
- c. Satu bidang tanah SHGB No 724 tanggal 29 Maret 1988 s/d 1 Desember 2027 seluas 2.098 m2 terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, a.n. PT Waskita karya (Persero) Tbk senilai Rp1.500.000.000 sesuai dengan SHT No.397/T/1988 dan senilai Rp31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No.408/2004.
- d. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 s/d 20 April 2022, seluas 1.332 m2, terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, a/n PT Waskita Karya (Persero) Tbk Cabang NTB senilai Rp1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No.687/2007.
- e. Satu bidang tanah SHGB No. 01/Tanjung tanggal 13 Nopember 1987 s/d 13 Oktober 2027, seluas 1.095 m2, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp30.000.000 sesuai dengan S.Hip. No.3181 dan senilai Rp2.222.100.000 diikat SHT II No. 01057/2007.
- f. Satu Bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Oktober 1998 sampai dengan 19 Desember 2028 seluas 2.511 m2, terletak di Desa/Kelurahan Betung -Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera barat, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp651.430.000.
- g. Satu bidang tanah SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013, seluas 806 m2, terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp1.270.880.000 sesuai dengan SHT.I. No.3129/2001 dan senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT.II. No.1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033.
- h. Satu bidang tanah SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2036, seluas 1.004 m2, terletak di Desa Sungai Raya, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp464.850.000 sesuai dengan SHT.I.No. 356/2001 dan senilai Rp747.850.000 sesuai dengan SHT. II.No. 169/2007.
- i. Satu bidang tanah SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404 m2, terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Jawa Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp2.665.700.000 sesuai dengan SHT.I. No. 2952/2007.
- j. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m2, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kodya Surabaya, Jawa Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT.I No. 4772/2001 dan senilai Rp2.474.390.000 sesuai dengan SHT.II No. 2948/2007.
- k. Satu bidang tanah SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 25 Juni 2017, seluas 1.000 m2, terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp402.860.000 sesuai dengan SHT.I. No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT.II. No. 239/2007.
- l. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 24 Oktober 2017, seluas 595 m2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp49.260.000 sesuai dengan SHT.I.No. 374/2001 dan senilai Rp39.740.000 sesuai dengan SHT.II. No. 240/2007.
- m. Satu bidang tanah SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830 m2, terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp457.590.000 sesuai dengan SHT.I. No. 375/2001.
- n. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 April 2023, seluas 4.800 m2, terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp288.000.000 sesuai dengan SHT.I. No. 375/2001 dan senilai Rp602.410.000 sesuai dengan SHT.II. No. 238/2007.

- o. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp263.530.000, sesuai dengan SHT.I.No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT. II. No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033.
- p. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020, seluas 4.040 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp1.516.520.000, sesuai dengan SHT.I.No.2927/2001 dan senilai Rp994.180.000 sesuai dengan SHT.II.No. 1613/2007.
- q. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp3.404.000.000 sesuai dengan SHT.I. No. 2012/2007. Tanah yang dijamin termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada.
- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 (dua) unit Toyota New Camry tahun 2010, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Nomor (3) 18 tanggal 6 Pebruari 2012 senilai Rp404.000.000.
- s. Deposito Berjangka a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang ditempatkan di BNI senilai Rp5.469.000.000 Bilyet Deposito No. Seri AA 548877 tanggal 23 Nopember 2004 diikat secara gadai sesuai Perjanjian Gadai No. 2005.002 tanggal 29 April 2005.
- t. Deposito Berjangka a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang ditempatkan di BNI senilai Rp8.143.200.000 Bilyet Deposito No. Seri AB 621858 tanggal 15 Januari 2008/Gadai/002 tanggal 12 Pebruari 2008.
- u. Deposito Berjangka a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang ditempatkan di BNI senilai Rp2.215.733.745 Bilyet Deposito No. Seri PAA 0360531 dan PAA 0361348 sesuai Surat No. 538/BK/WK/2011 tanggal 27 Mei 2011.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali; menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt equity ratio* maksimal 8 (delapan) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada 31 Desember 2014 pinjaman ke PT Bank BNI (Persero) Tbk telah dilunasi.

#### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Transaksional sebesar Rp300.000.000.000 sesuai surat nomor R.II.170-ADK/DKR-2/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan fasilitas *non cash loan* Rp1.000.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan sebidang tanah SHGB No.655 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020 yang telah diikat Hak Tanggungan dengan nilai Rp16.186.000.000.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; mengajukan pernyataan kepailitan kepada pengadilan, menyewakan aset yang dijamin kepada bank; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2014 pinjaman ke PT Bank BRI (Persero) Tbk sebesar Rp255.229.949.478.

#### **PT Bank Panin Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Money Market* sebesar Rp300.000.000.000, dan Garansi Bank sebesar Rp100.000.000.000 dan fasilitas *foreign exchange* USD5.000.000 sesuai dengan surat No085/IBD/EXT/14 tanggal 18 Juni 2014. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Mei 2015.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada *financial covenant*; mengikatkan diri sebagai pinjaman terhadap pihak ketiga; membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada; membubarkan

atau melikuidasi Perusahaan; merubah bidang/jenis usahanya; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya (*surseance van betaling*); merubah bentuk hukum atau status hukum Perusahaan; merubah anggaran dasar Perusahaan; menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga; menyewakan/memindah tangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan; memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga; mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada; membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari; melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; memperbolehkan pemegang saham untuk menarik kembali modal yang telah disetor, menjaminkan atau menggadaikan saham Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: Pinjaman berbunga dibagi total ekuitas tidak melebihi 2,5 kali, EBITDA dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 2 kali dan aset lancar dibagi liabilitas lancar lebih besar 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2014 pinjaman ke PT Bank Panin Tbk sebesar Rp300.000.000.000.

Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) per 31 Desember 2014 yang dijaminan atas utang bank PT Bank Panin adalah Proyek Jaringan Transmisi Brastagi – Kutacane, Proyek Pelaksanaan Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Fase I, Proyek Gedung SKPD Kalimantan Utara, Proyek Jaringan Irigasi di Sangkub Kiri, Proyek PLTU Tenayan Paket I, Proyek PLTU Tenayan (Paket II), Proyek Menara Proteksi Indonesia dan Proyek Jalan Simpang Langgam – Langgam.

#### **PT Bank UOB Indonesia**

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit *Working Capital Loan* sebesar Rp300.000.000.000 sesuai dengan surat No 13/CPB/0283 tanggal 19 Desember 2013 dan fasilitas noncash Rp350.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014. Sampai dengan saat ini masih dalam proses perpanjangan perjanjian kredit.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: tidak mengubah bisnis Perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga ratarata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progres pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap perubahan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1,5 kali dan *current ratio* maksimal 1,0 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank. Pinjaman kepada PT Bank UOB Indonesia pada 31 Desember 2014 belum digunakan.

## 2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.571.795.443.930, adapun rincian berdasarkan jenis hutang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pemasok	1.518.140
Subkontraktor	709.763
Ventura Bersama	193.464
Sewa Alat	89.321
Upah Kerja	47.400
Lain-lain	13.709
<b>Jumlah</b>	<b>2.571.795</b>

Rincian saldo utang usaha sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak-Pihak Berelasi	
PT Wijaya Karya Beton	37.678
PT Aneka Gas Industri	1.335
PT Amarthakarya	597
PT Wijaya Karya Intrade	529
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	335
PT Pertamina Patra Niaga	328
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	88
Koperasi Waskita	13.083
Lain-lain	33.495
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>87.469</b>
Pihak-pihak Ketiga	
PT Adhimix Precast Indonesia	96.433
PT Sekasa Inti Perkasa	62.986
PT Hanil Jaya Metal	60.730
PT Master Steel	35.981
PT Indoperkasa Mandiri	32.836
PT Purnama Sejahtera	24.402
PT Bhirawa Steel	24.218
PT Cakra Tunggal Steel	23.634
PT Dwipratama Teknik	23.485
PT Krakatau Wajatama	20.122
PT Alrista Termulya	17.628
PT SCG Readymix Indonesia	17.623
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	17.533
PT Swamtri Panca Sunu	17.179
PT Mitra Pemuda	16.531
PT Multi Trading Pratama	16.282
PT Kingdom Indah	15.593
PT Jaya Sentrikon Indonesia	14.674
PT Bayu Maju Jaya	14.431
PT Waagner Biro Indonesia	14.334
PT Panata Bayu Nugraha	14.111
PT Agung Beton Persadautan	13.613
PT Megah Bangun Baja Semesta	13.397
PT Berdikari Pondasi Perdana	12.578
PT Putra Baja Deli	11.302
PT Anugerah Maha Karya	11.275
PT Grant Surya Multisarana	11.220
PT Motive Mulia	10.792
PT Naga Surya Indah	10.588
PT Interworld Steel Mills	10.450
PT Sinar Indahjaya Kencana	10.066
Lainnya (di bawah Rp 10 Miliar)	1.788.298
Jumlah Pihak-pihak Ketiga	2.484.327
Jumlah	2.571.795

### 3. Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga

Saldo utang bruto kepada subkontraktor Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp2.700.536.843.335, adapun rincian berdasarkan Divisi/Wilayah adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Divisi Gedung	1.046.408
Divisi Sipil	736.809
Divisi Regional I	222.122
Divisi Regional II	108.036
Divisi Regional III	173.168
Divisi Regional IV	70.457
Divisi EPC	58.621
PT Waskita Beton Precast	284.915
<b>Jumlah</b>	<b>2.700.537</b>

Utang bruto subkontraktor pihak ketiga berdasarkan pihak kreditur adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Berland Nusantara	89.943
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	85.507
PT Kridatama	80.707
PT Pakubumi	73.370
PT Dwiberkah Argakencana	60.154
PT WTJ Contractor Unipessoal	57.058
CV Brebes Putra	53.746
PT Bauer Pratama Indonesia	25.604
PT Cahaya Berlian	50.020
PT Jaido Metal Industries	44.211
PT Apora Indusma	41.867
PT The Master Steel	40.662
PT Pelita Maju Multiswakarsa	37.632
PT Aluphi Hijau Lumina	34.221
PT Panayata Bayunugraha	32.980
PT Kovalen Mining	28.976
PT Intiniaga Sukses Abadi	26.897
PT Wana Indah Asri	24.358
PT Dwi Pratama Teknik	24.328
PT Alstom Grid	20.993
PT Sendico Utama	19.916
PT Naga Surya Indah	19.693
PT Alma Cia Sejahtera	18.798
PT Krakatau Wajatama	18.509
PT Alwindo Nusantara	17.848
PT Graha Rejeki Santoso	17.379
PT Andalas Terang Nusantara	17.236
PT Galid Medan Perkasa	16.083
CV Sukses Jaya Mandiri	15.305
PT Karimun Megah Abadi	15.268
PT Suprajaya Duaribusatu	14.515
PT Uxil Alumindo Indonesia	14.450
PT Adhimix Precast Indonesia	13.962
Rico	13.902
CV Sejahtera Mandiri	13.092
PT Luxon Mandiri Elektrik	13.067
PT Acset Indonusa	11.879
PT Lianta Surya	11.762
PT Archiconasiando	11.758
PT Wijaya Karya Beton	11.655
PT Cahaya Metal Perkasa	11.394
PT Neksusindo	11.046
PT Swamitri Panca Sunu	10.733
CV Berkah Jaya	9.686
PT Berdikari Pondasi Perdana	9.238
PT Wiswani Karya Mandiri	9.176
PT Saawibawa	8.414
PT Makaetri Engineering	8.336
PT Ciakreasi Estetika	8.253
PT Basuki Ramanta Putra	8.202
PT Eurotech	8.156
PT Saeti Concretindo Wahana	8.077
PT Surya Pertiwi	8.016
PT Megah Bangun Baja Semesta	8.009
PT Bintang Perdana	7.963
PT Namora Cia Mas	7.903
PT Clarindo Djaya Semesta	7.756
PT Widodo Karya Sejahtera	7.685
PT Girikon Agung Nugraha	7.667
PT Pelitamaju Multiswakarsa	7.653
PT Dubron	7.618
PT Mondila Bersaudara	7.262
PT Bumiloka UMILOKA	7.252
PT Aremix Planindo	6.895

(dalam juta Rupiah)

PT Bayu Maju Jaya	6.744
PT Bilah Baja Makmur Abadi	6.678
PT Diastri Mandiri	6.671
PT Danatel	6.539
PT Melati Technofo Indonesia	6.434
PT Tata Kreasindojaya	6.268
PT Karya Nurindo Cemerlang Sakti	6.200
PT Dwiprakasatamajaya	6.100
PT Interindo Dutatekno	6.087
CV Wetang Mandiri	6.010
PT Sari Jati Adhitama	5.648
PT Farika Beton	5.559
PT Tunggal Jaya Steel	5.457
PT Innasah	5.126
PT Venus Ceramica International	5.073
CV Widodo Karya Sejahtera	5.066
PT Alrista Teramulya	5.047
Lain-lain di bawah Rp 5 Miliar	1.248.074
<b>Jumlah</b>	<b>2.700.537</b>

#### 4. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp104.179.396.734, adapun rincian berdasarkan jenis pajak yaitu sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Per 31 Desember 2014</b>
Pajak Penghasilan Pasal 21	8.082
Pajak Penghasilan Pasal 22	--
Pajak Penghasilan Pasal 23 – Wapu	2.041
Pajak Pertambahan Nilai	75.834
Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) – Final	10.614
Pajak Pertambahan Nilai – KSO	--
Pajak Kini Non Final	7.608
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	--
<b>Jumlah</b>	<b>104.179</b>

#### 5. Uang Muka Kontrak Jangka Pendek

Saldo uang muka kontrak jangka pendek Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp289.436.745.772, adapun rincian berdasarkan Divisi/Wilayah adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Divisi Gedung	73.040
Divisi Sipil	33.410
Divisi Regional I	64.330
Divisi Regional II	61.379
Divisi Regional III	10.020
Divisi Regional IV	4.924
Divisi EPC	26.781
Divisi Precast	15.553
<b>Jumlah</b>	<b>289.436</b>

Uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan pihak-pihak pemberi kerja sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pihak-pihak Berelasi	
PT Kapuk Naga Indah	17.138
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	14.296

*(dalam juta Rupiah)*

PT Rekayasa Industri (Persero)	11.957
PT Transmarga Jatim Pasuruan	5.105
Lain-lain dibawah Rp 5 Miliar	7.761
Jumlah Pihak-pihak Berelasi	56.256
Pihak-pihak Ketiga	
Pemerintah Daerah	60.129
Kementerian Pekerjaan Umum	36.092
PT Toba Pengembang Sejahtera	19.420
PT ITC Polonia	16.535
Telkom Property (PT graha Sarana Duta)	12.073
PT Hidro Rizki Ilahi	10.179
PT Sinergy Pecatu Indah	9.000
PT Putra Mataram Indah Wisata	8.701
PT Harmas Jalesveva	7.800
Mahkamah Agung Republik Indonesia	6.909
PT Hermes Realty Indonesia	6.566
PT Citra Abadi Mandiri	6.484
PT Sinoma Engineering Indonesia	6.053
PT Sentul City Tbk	5.745
Lain-lain dibawah Rp 5 Miliar	21.494
Jumlah Pihak-pihak Ketiga	233.179
Jumlah	289.436

#### 6. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp98.727.643.520, adapun rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut:

*(dalam juta Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Beban Umum	8.389
Beban Bunga Obligasi	11.438
Beban Kantor	23.177
Beban Pegawai	3.856
Beban Operasional Proyek	476
Beban Gedung	457
Lain-lain	50.934
Jumlah	98.727

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari operasional proyek adalah utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional proyek perusahaan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.

Beban bunga merupakan beban bunga obligasi yang belum dibayar per 31 Desember 2014 untuk periode tanggal 6 Desember sampai 31 Desember 2014 untuk Obligasi tahun 2012 dan untuk periode tanggal 18 November sampai dengan 31 Desember 2014 untuk Obligasi tahun 2014. Sedangkan per 31 Desember 2013 untuk periode 5 Desember sampai dengan 31 Desember 2013.

#### 7. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Saldo liabilitas jangka pendek lainnya Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp46.349.033.617, adapun rinciannya sebagai berikut:

*(dalam juta Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Jasa Produksi dan Tantiem	41.750
Iuran Dana Pensiun	3.052
Jamsostek	1.257
Jaminan Sewa Gedung	109
Lain-lain	181
Jumlah	46.349

Berdasarkan Risalah Rapat Direksi tanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian jasa produksi tahun 2014 kepada pegawai Perusahaan, estimasi jasa produksi kepada karyawan dan tantiem untuk Direksi tahun ditetapkan adalah sebesar Rp41.750.000.000. Berdasarkan Risalah Rapat Direksi tanggal 17 Desember 2013 tentang pemberian jasa produksi tahun 2013 kepada pegawai Perusahaan, estimasi jasa produksi kepada karyawan dan tantiem untuk Direksi tahun ditetapkan adalah sebesar Rp34.000.000.000.

## Liabilitas Jangka Panjang

### 1. Uang Muka Kontrak Jangka Panjang

Saldo uang muka kontrak jangka panjang Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp715.749.177.744, adapun rinciannya sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak-pihak Berelasi	
Waskita - Triniti	20.548
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12.795
PT Rekayasa Industri (Persero)	7.415
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	8.334
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	886
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	289
Jumlah Pihak-pihak Berelasi	50.268
Pihak-pihak Ketiga	
Republica Democratica De Timor Leste	168.416
Kementerian Pekerjaan Umum	167.771
Pemerintah - Pemerintah Daerah	52.050
PT Mardika Artha Upaya	34.365
PT Halla Mohana	24.091
Samsung C & T Corporation	18.149
PT Ade Pede Realty	10.372
PT Bangun Investa Graha	14.822
PT Bali Seminyak Resort	4.402
Perpustakaan Nasional RI	64.465
PT Bhumyamca	18.898
PT Sentul City Tbk	8.000
Universitas Sebelas Maret	17.343
PT P3MPI	17.745
PT Broadbiz Asia	5.803
PT Rezki Curah Prima	4.318
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	8.188
PT Hidro Rizki Ilahi	10.000
PT Banyu Daya Perkasa	8.257
PT Pardika Wisthi Sarana	6.027
PT Mega Pesanggrahan Indah	1.655
Lainnya (di bawah Rp 2 Miliar)	342
Jumlah Pihak-pihak Ketiga	665.481
<b>Jumlah</b>	<b>715.749</b>

### 2. Utang Lain-lain Berelasi

PT Waskita Toll Road (Entitas Anak) memiliki utang kepada PT Waskita Bumi Wira (Entitas Asosiasi) atas penggantian biaya *feasibility study*, dan biaya konsultan lainnya yang dibayarkan terlebih dahulu. Atas tagihan tersebut tidak dikenakan bunga.

### 3. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi Perseroan per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.245.656.603.967, adapun rinciannya sebagai berikut:



(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nominal	1.250.000
Biaya Emisi Obligasi	(5.969)
Akumulasi Amortisasi	1.626
Jumlah	1.245.657
Biaya Emisi Obligasi	5.929
Dikurangi : Akumulasi Amortisasi	(1.626)
Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi	4.303

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan No 20 tanggal 19 September 2014 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan No 26 tanggal 13 Oktober 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi Berkelanjutan I tahun 2014, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4%, senilai Rp 500.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwalianamanatan No. 11 tanggal 4 April 2012 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianamanatan No. 98 tanggal 26 April 2012 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan No. 58 tanggal 23 Mei 2012 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap" senilai Rp 750.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Jumlah pokok Obliasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah pokok Obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga Obligasi. Pembayaran bunga obligasi Seri A dan Seri B pertama akan dilakukan pada tanggal 5 September 2012. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2015 dan Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2017. Sedangkan untuk Obligasi berkelanjutan I tahun 2014 seri A akan jatuh tempo pada tanggal 10 Nopember 2017.

Biaya Emisi Obligasi sebesar Rp 5.928.957.306 diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo masa Obligasi II tahun 2017.

Berdasarkan pengumuman peringkat obligasi tanggal 13 Agustus 2014, PT PEFINDO memberikan peringkat efek Perusahaan idA (Single A) terhadap Obligasi II Seri A dan Seri B Tahun 2012 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Utang obligasi mencakup persyaratan tertentu antara lain:

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- *Debt to Equity* tidak lebih dari 3 : 1 (tiga koma lima berbanding satu), dan
- EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun.

#### Komitmen

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Hak Membeli Kembali atas Saham-saham PT Pejagan Pemalang Tol Road (PT PPTR) No 84 tanggal 27 Juni 2014 oleh Notaris Jose Dima Satria, notaris di Jakarta, disebutkan bahwa PT Global Selaras Dunia dan PT Rekatunggal Abadi masing-masing pemilik 1 lembar saham PT PPTR atau 0,01% dan 633.576 lembar atau 99,99% menjual dan mengalihkan saham-saham yang dimiliki kepada PT Waskita Tol Road dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01% dari kepemilikan saham pada PT PPTR sebesar nilai yang disepakati bersama.

PT Global Selaras Dunia dan PT Rekatunggal Abadi memiliki hak membeli kembali atas saham-saham tersebut selama jangka waktu beli yaitu sejak ditandatangani perjanjian jual beli bersyarat ini sampai dengan ulang tahun ketiga akta pengambilalihan saham.

2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Dengan Hak Untuk Membeli Kembali Atas Saham – Saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (PT KKDM) No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 oleh Notaris Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta, disebutkan bahwa PT Waskita Toll Road memiliki 447.188.659 lembar saham atau 60% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Tirtobumi Prakarsatama memiliki 111.600.309 lembar saham atau sebesar 14.97% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Citra Mandiri Sukses Sejati memiliki 89.437.732

lembar saham atau sebesar 12% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Indadi Utama memiliki 44.718.866 lembar saham atau sebesar 6% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Remaja Bangun Kencana memiliki 44.718.866 lembar saham atau sebesar 6% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7.650.000 lembar saham atau sebesar 1,03% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM.

PT Tirtobumi Prakarsatama, PT Citra Mandiri Sukses Sejati, PT Indadi Utama, dan PT Remaja Bangun Kencana memiliki hak membeli kembali atas saham-saham tersebut selama jangka waktu beli yaitu sejak ditandatangani perjanjian jual beli bersyarat ini sampai dengan ulang tahun ketiga akta pengambilalihan saham.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TANGGAL 25 MEI 2015 DAN YANG TERJADI SEJAK TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT DI ATAS SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERSEBUT DI ATAS SERTA SELAIN LIABILITAS DAN PERIKATAN YANG TERJADI DARI KEGIATAN USAHA NORMAL.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN, KECUALI PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2013, *COVERAGE RATIO* PERSEROAN DAN *DEBT RATIO* YANG DIPERSYARATKAN OLEH ECA. PERSEROAN TELAH MEREVIU PERJANJIAN ECA DAN MENYIMPULKAN BAHWA TERLAMPAUINYA BATASAN-BATASAN *FINANCIAL COVENANTS* TIDAK MENYEBABKAN PINJAMAN PERSEROAN MENJADI JATUH TEMPO SEKETIKA DAN TERUTANG.**

**ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011 dan 2010.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 yang diaudit oleh KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, auditor independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (*Member Firm of RSM International*), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Untuk tahun 2013 dan 2012 tanpa paragraf tambahan, untuk tahun 2011 dengan paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011, dan 2010 tanpa paragraf tambahan.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
<b>ASET</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan Setara Kas	1.675.283	1.119.694	2.183.783	583.188	354.926
Investasi Jangka Pendek	24.276	24.276	24.276	24.276	340.147
Piutang Usaha – Bersih	2.306.758	1.710.372	1.464.270	972.086	594.931
Piutang Retensi – Bersih	619.018	605.778	475.389	444.580	287.530
Piutang Lain-lain – Bersih	647.329	25.932	32.338	147.039	21.099
Persediaan	604.279	292.227	412.538	351.259	232.964
Tagihan Bruto Kepada Pelanggan - Bersih	4.270.520	3.312.277	2.759.169	1.706.360	1.653.275
Pajak dibayar di Muka	554.591	497.284	76.032	55.775	126.227
Uang Muka dan Dibayar di Muka	229.709	193.572	161.919	119.217	138.230
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	175.000	-	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	10.524.168	7.781.412	7.789.714	4.603.780	3.749.329
<b>Aset Tidak Lancar</b>					
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	175.000	175.000	175.000	-
Investasi Pada Ventura Bersama	727.645	334.271	116.483	36.131	65.356
Investasi Pada Entitas Asosiasi	7.315	8.392	7.826	7.315	6.732
Properti Investasi	-	15.107	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Lainnya	628.099	37.500	18.250	94.458	100.319
Aset Tetap - Bersih	621.792	415.440	239.934	192.399	152.124
Aset Lain-lain	33.023	21.180	19.036	6.918	4.880
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.017.873	1.006.890	576.529	512.221	329.411
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.542.041</b>	<b>8.788.302</b>	<b>8.366.243</b>	<b>5.116.001</b>	<b>4.078.740</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang Bank Jangka Pendek	1.917.129	874.808	1.171.853	1.204.968	1.011.280
Utang Usaha	2.571.795	2.291.267	2.002.816	1.661.714	900.294
Utang Bruto Kepada Subkontraktor	2.700.537	1.794.740	1.564.999	1.022.912	1.140.389
Utang Pajak	104.179	97.227	95.086	28.117	27.790
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	289.435	301.860	405.128	462.491	289.666
Beban Akrua	98.728	22.720	27.993	8.441	19.899
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	46.349	44.517	23.951	29.394	30.918
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.728.154	5.427.139	5.291.826	4.418.037	3.420.236

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	715.749	229.681	319.888	77.743	208.315
Utang Lain-lain Berelasi	3.652	-	-	-	-
Utang Obligasi - Bersih	1.245.657	748.045	747.454	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.965.058	977.726	1.067.342	77.743	208.315
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>9.693.211</b>	<b>6.404.865</b>	<b>6.359.168</b>	<b>4.495.780</b>	<b>3.628.551</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham					
Modal Dasar	972.750	963.224	963.224	654.992	654.992
Tambahan Modal Disetor	880.789	831.138	831.138	-	-
Opsi Saham	43.363	28.930	-	-	-
Saldo Laba					
Telah ditentukan penggunaannya	268.432	194.820	192.280	192.280	192.280
Belum ditentukan penggunaannya	685.591	368.090	22.893	(224.258)	(393.823)
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(7.956)	(3.800)	(2.460)	(2.791)	(3.259)
Jumlah yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2.842.970	2.382.402	2.007.075	620.223	450.190
Kepentingan Entitas Non Pengendali	5.860	1.035	-	-	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.848.830</b>	<b>2.383.437</b>	<b>2.007.075</b>	<b>620.223</b>	<b>450.190</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>12.542.041</b>	<b>8.788.302</b>	<b>8.366.243</b>	<b>5.116.003</b>	<b>4.078.741</b>

#### Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
Pendapatan usaha	10.286.813	9.686.610	8.808.416	7.274.167	5.853.205
Beban pokok pendapatan	(9.177.917)	(8.775.914)	(8.076.158)	(6.610.973)	(5.276.903)
<b>Laba bruto</b>	<b>1.108.896</b>	<b>910.696</b>	<b>732.258</b>	<b>663.194</b>	<b>576.302</b>
Bagian laba entitas ventura bersama	197.116	101.675	92.577	24.202	8.861
<b>Laba bruto setelah laba ventura bersama</b>	<b>1.306.012</b>	<b>1.012.371</b>	<b>824.835</b>	<b>687.395</b>	<b>585.163</b>
Beban penjualan	(25.516)	(23.894)	(18.618)	(13.140)	(16.330)
Beban umum dan administrasi	(405.043)	(316.290)	(266.102)	(225.156)	(185.713)
Pendapatan bunga	43.440	27.155	31.885	28.348	8.662
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs – bersih	(3.454)	20.508	2.113	(4.091)	(1.054)
Keuntungan penjualan aset tetap	-	231	81	128	2.884
Pendapatan lainnya	37.020	5.362	72.180	43.465	29.782
Beban lain-lain - Bersih	(13.076)	(18.545)	(17.846)	(31.916)	(34.172)
<b>Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan</b>	<b>939.383</b>	<b>706.898</b>	<b>628.528</b>	<b>485.033</b>	<b>389.222</b>
Beban Keuangan	(183.596)	(96.851)	(169.586)	(153.789)	(149.816)
Bagian laba entitas asosiasi	(185)	1.153	971	583	837
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>755.602</b>	<b>611.200</b>	<b>459.913</b>	<b>331.827</b>	<b>240.243</b>
Beban pajak penghasilan	(254.389)	(243.230)	(205.882)	(159.838)	(116.164)
<b>Lababersih tahun berjalan</b>	<b>501.213</b>	<b>367.970</b>	<b>254.031</b>	<b>171.989</b>	<b>124.079</b>
<b>Pendapatan komprehensif setelah pajak</b>					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(4.155)	(1.341)	332	468	(9.047)
<b>Laba komprehensif tahun berjalan</b>	<b>497.058</b>	<b>366.629</b>	<b>254.363</b>	<b>172.457</b>	<b>115.032</b>
<b>Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada:</b>					
Pemilik entitas Induk	501.531	368.060	-	-	-
Kepentingan Nonpengendali	(318)	(90)	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>501.213</b>	<b>367.970</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas Induk	497.375	366.719	-	-	-
Kepentingan Nonpengendali	(318)	(90)	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>497.058</b>	<b>366.629</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Laba bersih per saham dasar</b>	<b>51,90</b>	<b>38,20</b>	<b>38,14</b>	<b>9.554,96</b>	<b>6,893</b>

### Rasio Pertumbuhan dan Keuangan

Keterangan	31 Desember				
	2014	2013	2012	2011	2010
<b>Rasio Pertumbuhan</b>					
Total Aset (%)	42,71	5,04	63,53	25,43	32,80
Total Liabilitas (%)	51,34	0,72	41,45	23,90	32,67
Total Ekuitas (%)	19,53	18,75	223,61	37,77	33,92
Laba Rugi Komprehensif (%)	35,57	44,14	47,49	49,92	118,47
<b>Rasio Keuangan</b>					
Rasio Kas (x)	21,68	20,63	41,27	0,14	0,20
Rasio lancar (Current Ratio) (x)	1,36	1,43	1,47	1,04	1,10
Rasio utang terhadap ekuitas (DER) (x)	1,10	0,96	0,10	1,95	2,25
Rasio imbal hasil aset (ROA) (x)	5,49	4,19	3,04	0,03	0,03
Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) (x)	21,36	15,44	12,66	0,28	0,28
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (%)	107%	51%	81%	124%	170%
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas (x)	0,67	0,37	0,58	1,94	2,25
EBITDA terhadap beban bunga (x)	3,69	7,86	3,97	3,31	2,69

### Tingkat Persyaratan Rasio Dalam Perjanjian Utang

Keterangan	
<b>Indonesia Eximbank</b>	Tidak ada persyaratan rasio
<b>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 100%
<b>PT BPD Jabar dan Banten Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1,2x
DER	Maksimal 3,33x
DSCR	Minimal 100%
<b>PT Bank BNI (Persero) Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 8x
DSCR	Minimal 100%
<b>PT Bank BRI (Persero) Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
<b>PT Bank Panin Tbk</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 2,5x
DSCR	Minimal 2x
Pinjaman berbunga terhadap ekuitas	Maksimal 2,5x
EBITDA terhadap beban bunga	Minimal 2x
<b>PT Bank UOB Indonesia</b>	
Current ratio	Minimum 1x
DER	Maksimal 3x
DSCR	Minimal 1,5x

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, Auditor Independen, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, untuk tahun 2011 dengan paragraf penjelasan bahwa Perseroan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.*

### 1. UMUM

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Nomor : 57 tertanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24-10-2012 (dua puluh empat Oktober dua ribu dua belas), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31-05-2013 (tiga puluh satu Mei dua ribu tiga belas) Nomor: 44 Tambahan Nomor: 61819, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No.11 tanggal 13 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-05114.40.21.2014 tanggal 13 Agustus 2014 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0081504.40.80.2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No.09.04.1.41.00065 tanggal 3 September 2014, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari hasil pelaksanaan opsi pembelian saham seri B sehubungan dengan Program MESOP sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, terakhir kali perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK NO. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan Akta Nomor: 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0928411 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, terakhir Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah sehubungan dengan hasil pelaksanaan opsi pembelian saham seri B sehubungan dengan Program MESOP, dengan akta Akta Nomor: 46 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0934821 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 26 Mei 2015.

Komposisi permodalan dan struktur saham Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan sesuai dengan Akta Nomor: 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0928411 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU 3499092.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, dan akta Akta Nomor: 46 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0934821 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 26 Mei 2015, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,067553743
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,932446247
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,000000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000	<b>100,000000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>	<b>100,000000000</b>

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

## 2. Pandangan Manajemen

*Pandangan manajemen terhadap kondisi perekonomian dan kondisi pasar.*

Tahun 2014 dan tahun selanjutnya situasi politik dan ekonomi diharapkan tetap stabil, terlebih lagi Indonesia dikategorikan sebagai Negara dengan *Investment Grade* sehingga diharapkan investor asing maupun lokal menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan tingkat suku bunga kredit perbankan dan nilai tukar rupiah terhadap dollar, yang cenderung memberi kepastian kepada sector korporasi untuk melakukan investasi. Pasar industri sector Pemerintah (Pusat dan daerah) serta sector swasta (nasional dan asing) diharapkan akan lebih baik dibandingkan kondisi pasar pada tahun sebelumnya.

*Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, kondisi demografi pasar dan faktor lainnya.*

Arus globalisasi membawa pengaruh positif bagi masuknya modal asing, teknologi baru dan informasi. Disisi lain aturan-aturan baru dan *leading agency* member kemudahan masuknya konsultan asing dan kontraktor asing, sehingga menambah ketatnya persaingan dipasar industri konstruksi.

*Perubahan dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru atau perkembangan tim penjualan.*

Dalam kondisi tertentu perubahan dalam metode penjualan seperti perjanjian distribusi baru, Perseroan tidak mengalami kesulitan yang besar karena kita sudah mengantisipasi kondisi-kondisi yang terjadi pada masa transisi perubahan-perubahan tersebut.

*Perubahan yang terjadi pada kompetitor*

Adanya peningkatan jumlah perusahaan dari tahun ketahun mendorong peningkatan persaingan usaha. Jumlah kontraktor lokal maupun asing selalu berkembang dan berubah setiap tahunnya. Masuknya pinjaman pemerintah dari negara tertentu yang mensyaratkan harus bekerja sama kontraktor dari negara tersebut.

Pada industri konstruksi, kompetitor mulai beralih dari bisnis konstruksi yang konvensional, ke bisnis konstruksi yang tidak murni melaksanakan jasa konstruksi saja, mulai tahun 2010 Perseroan sudah mengembangkan proyek-proyek EPC.

*Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan Perseroan*

Dalam kondisi tertentu, Perseroan selama ini tidak mengalami kesulitan dalam perubahan harga, persoalan dengan pemasok, karena Perseroan menjamin dengan pembayarannya tepat waktu, sehingga Perseroan tidak berpengaruh pada nilai Penjualan Perseroan. Contohnya dengan melakukan kontrak payung, dan pembayaran dengan fasilitas *Supply Chain Financing* dan *Open Account Financing*.

*Pengaruh produk baru atau penarikan produk.*

Pengaruh produk baru atau penarikan produk dalam industri konstruksi tidak terlalu berpengaruh dengan perubahan produk karena dalam penawaran harga mengacu pada persyaratan teknis yang disepakati dalam kontrak, sehingga apabila ada perubahan produk, dapat menyesuaikan harga berdasarkan kondisi saat perubahan tersebut.

*Penggunaan Mata Uang Rupiah*

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, mata uang yang digunakan Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha Perseroan adalah dalam Rupiah dengan pertimbangan untuk menghindari adanya risiko fluktuasi kurs atau suku bunga dalam pembelian bahan baku.

### 3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing yang terjadi akan mempengaruhi pendapatan Perseroan karena untuk operasional Perseroan masih mendanai dana kerja dengan pinjaman bank
- Kebijakan fiskal seperti perubahan tariff pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu.
- Kebijakan infrastruktur seperti program percepatan pembangunan (MP3EI) akan berdampak pada meningkatnya pangsa pasar yang berpotensi meningkatkan nilai kontrak dan penjualan Perseroan

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut :

- Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dari supplier yang akan berakibat pada biaya produksi Perseroan.
- Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR/UMP dan Jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pekerja/pegawai Perseroan.

### 4. Analisa Keuangan

#### Analisis Laporan Laba Rugi

Tabel berikut menyajikan informasi rinci mengenai hasil operasional historis Perseroan:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pendapatan usaha	10.286.813	9.686.610	8.808.416
Beban pokok pendapatan	(9.177.917)	(8.775.914)	(8.076.158)
<b>Laba bruto</b>	<b>1.108.896</b>	<b>910.696</b>	<b>732.258</b>
<b>Laba bruto setelah laba ventura bersama</b>	<b>1.306.012</b>	<b>1.012.371</b>	<b>824.835</b>
Beban penjualan	(25.516)	(23.894)	(18.618)
Beban umum dan administrasi	(405.043)	(316.290)	(266.102)
Pendapatan bunga	43.440	27.155	31.885
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs – bersih	(3.454)	20.508	2.113
Keuntungan penjualan aset tetap	-	231	81
Pendapatan lainnya	37.020	5.362	72.180
Beban lain-lain – Bersih	(13.076)	(18.545)	(17.846)
<b>Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan</b>	<b>939.383</b>	<b>706.898</b>	<b>628.528</b>
Beban Keuangan	(183.596)	(96.851)	(169.586)
Bagian laba entitas asosiasi	(185)	1.153	971
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>755.602</b>	<b>611.200</b>	<b>459.913</b>
Beban pajak penghasilan	(254.389)	(243.230)	(205.882)
<b>Lababersih tahun berjalan</b>	<b>501.213</b>	<b>367.970</b>	<b>254.031</b>
<b>Pendapatan komprehensif setelah pajak</b>			
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan dalam valuta asing	(4.155)	(1.341)	332
<b>Laba komprehensif tahun berjalan</b>	<b>497.058</b>	<b>366.629</b>	<b>254.363</b>
<b>Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas Induk	501.531	368.060	-
Kepentingan Nonpengendali	(318)	(90)	-
<b>Jumlah</b>	<b>501.213</b>	<b>367.970</b>	<b>-</b>
Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas Induk	497.375	366.719	-
Kepentingan Nonpengendali	(318)	(90)	-
<b>Jumlah</b>	<b>497.058</b>	<b>366.629</b>	<b>-</b>
<b>Laba bersih per saham dasar</b>	<b>51,90</b>	<b>38,20</b>	<b>38,14</b>

#### a. Pendapatan Usaha

#### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013

Pendapatan Usaha Perseroan pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp10.286.813 juta dimana terjadi kenaikan sebesar 6,20% atau setara dengan Rp600.203 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp9.686.610 juta pada 31 Desember 2013. Kenaikan Pendapatan Usaha pada tahun 2014 disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan



dari penjualan *precast* sebesar Rp 675.378 juta. Sejak tahun 2013 Perseroan melakukan diversifikasi usaha melalui entitas anak dalam bidang produksi beton *precast* dan *ready mix*. Di tahun 2014 PT WBP (entitas anak) tersebut mendirikan 4 plant baru. Akibat dari pendirian 4 plant baru tersebut volume produksi meningkat sehingga terjadi kenaikan penjualan *precast*.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pendapatan Usaha Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp9.686.610 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 9,97% atau setara dengan Rp878.194 juta dibandingkan dengan pendapatan usaha sebesar Rp8.808.416 juta pada tahun 2012. Kenaikan Pendapatan Usaha pada tahun 2013 disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan jasa konstruksi dengan proporsi yang paling besar yaitu sebesar 8,53% atau setara dengan Rp751.500 juta.

**b. Beban Pokok Pendapatan**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp9.177.917 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 4,58% atau setara dengan Rp402.003 juta, dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp8.775.914 juta. Kenaikan beban pokok pendapatan tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan harga pokok produk beton sebesar 468,86% atau sebesar Rp541.122 juta, beban subkontraktor 6,48% atau setara dengan Rp169,303 juta. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penjualan konstruksi dan produk beton. Seperti diuraikan diatas, sejak tahun 2013 Perseroan melakukan diversifikasi usaha melalui entitas anak dalam bidang produksi beton *precast* dan *ready mix*. Di tahun 2014 PT WBP (entitas anak) tersebut mendirikan 4 plant baru sehingga terjadi kenaikan penjualan *precast*. Akibat dari kenaikan penjualan *precast* maka beban pokok pendapatan meningkat signifikan yang berasal dari beban pokok produksi beton *precast* dan *ready mix*.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp8.775.914 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 8,66% atau setara dengan Rp699.756 juta dibandingkan dengan beban pokok pendapatan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp8.076.158 juta. Kenaikan beban pokok pendapatan pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan beban jasa konstruksi terutama beban bahan baku sebesar 0,74% atau sebesar Rp28.165 juta.

**c. Laba (Rugi) Bruto Setelah Laba Ventura Bersama**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Laba (Rugi) Bruto Setelah Laba Ventura Bersama Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp1.306.012 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 29,01% atau setara dengan Rp293.461 juta, dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bruto Setelah Laba Ventura Bersama pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.012.371 juta. Kenaikan Laba (Rugi) Bruto Setelah Laba Ventura Bersama tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan porsi laba Perseroan atas ventura bersama terutama yang berasal dari proyek-proyek ventura bersama gedung. Di tahun 2013 PT Angkasa Pura memiliki program renovasi dan penambahan beberapa terminal bandara di Indonesia. Perseroan bersama perusahaan konstruksi lainnya membentuk ventura bersama dan memenangkan tender proyek PT Angkasa Pura tersebut.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Laba (Rugi) Bruto Setelah Laba Ventura Bersama Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.012.371 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 22,74% atau setara dengan Rp187.536 juta dibandingkan dengan Laba (Rugi) Bruto Setelah Laba Ventura Bersama pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp824.835 juta. Kenaikan Laba (Rugi) Bruto Setelah Laba Ventura Bersama pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan porsi laba Perseroan atas ventura bersama.

**d. Beban Penjualan**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Beban Penjualan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp25.516 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,79% atau setara dengan Rp1.622 juta, dibandingkan dengan Beban Penjualan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp23.894 juta. Kenaikan Beban Penjualan tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan biaya tender yang diikuti oleh Perseroan.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Beban Penjualan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp23.894 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 28,34% atau setara dengan Rp5.276 juta dibandingkan dengan Beban Penjualan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp18.618 juta. Kenaikan Beban Penjualan pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan biaya tender yang diikuti oleh Perseroan.

**e. Beban Umum dan Administrasi**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Beban Umum dan Administrasi Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp405.043 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 28,06% atau setara dengan Rp88.753 juta, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp316.290 juta. Kenaikan Beban Umum dan Administrasi tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan beban pegawai dan beban penyisihan piutang usaha. Seperti diuraikan diatas di tahun 2014 PT WBP (entitas anak) melakukan pengembangan melalui pembangunan 4 plant yang membutuhkan tenaga kerja baru untuk berproduksi. Selain itu, Perseroan juga mendirikan 2 entitas anak lainnya yang membutuhkan tenaga kerja baru. Peningkatan tenaga kerja tersebut menyebabkan kenaikan beban pegawai.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Beban Umum dan Administrasi Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp316.290 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 18,86% atau setara dengan Rp50.188 juta dibandingkan dengan Beban Penjualan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp266.102 juta. Kenaikan Beban Umum dan Administrasi pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan beban pegawai.

**f. Pendapatan Bunga**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pendapatan Bunga Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp43.440 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 59,97% atau setara dengan Rp16.285 juta, dibandingkan dengan Pendapatan Bunga pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp27.155 juta. Kenaikan Pendapatan Bunga tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga deposito. Kenaikan pendapatan bunga deposito tersebut disebabkan kenaikan tingkat suku bunga deposito berjangka yang signifikan di tahun 2014, semula suku bunga 2,5%-10,5% per tahun di 2013 menjadi 6,6%-10,5%.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pendapatan Bunga Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp27.155 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 14,83% atau setara dengan Rp4.730 juta dibandingkan dengan Pendapatan Bunga pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp31.885 juta. Penurunan Pendapatan Bunga pada tahun 2013 disebabkan oleh turunnya pendapatan bunga deposito.

**g. Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs – Bersih**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih Perseroan pada tahun 2014 adalah rugi sebesar Rp3.454 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 116,84% atau setara dengan Rp23.962 juta, dibandingkan dengan Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih pada tahun 2013 yaitu untung sebesar Rp20.508 juta. Penurunan Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih tahun 2014 disebabkan kenaikan signifikan atas penerimaan uang muka proyek dalam mata uang asing, dimana nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah meningkat pada tahun 2014.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih Perseroan pada tahun 2013 adalah untung sebesar Rp20.508 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 870,56% atau setara dengan Rp18.395 juta dibandingkan dengan Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih pada tahun 2012 yaitu untung sebesar Rp2.113 juta. Kenaikan Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih pada tahun 2013 disebabkan penerimaan piutang usaha dalam mata uang asing, dimana nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah meningkat pada tahun 2013.

**h. Keuntungan Penjualan Aset Tetap**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Keuntungan Penjualan Aset Tetap Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 100,00% atau setara dengan Rp231 juta, dibandingkan dengan Keuntungan Penjualan Aset Tetap pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp231 juta. Penurunan Keuntungan Penjualan Aset Tetap tahun 2014 disebabkan tidak adanya penjualan aset tetap pada tahun 2014.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Keuntungan Penjualan Aset Tetap Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp231 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 185,19% atau setara dengan Rp150 juta dibandingkan dengan Keuntungan Penjualan Aset Tetap pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp81 juta. Kenaikan Keuntungan Penjualan Aset Tetap pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan penjualan aset tetap ditahun 2013.

**i. Pendapatan Lainnya**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pendapatan Lainnya Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp37.020 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 590,41% atau setara dengan Rp31.658 juta, dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp5.362 juta. Kenaikan Pendapatan Lainnya tahun 2014 disebabkan keuntungan penjualan saham entitas asosiasi senilai Rp32.341 juta. Di tahun 2014 Perseroan memutuskan untuk melepas kepemilikan saham pada PT Ismawa Trimitra

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pendapatan Lainnya pada tahun 2013 adalah sebesar Rp5.362 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 92,57% atau setara dengan Rp66.818 juta dibandingkan dengan Pendapatan Lainnya pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp72.180 juta. Penurunan Keuntungan Penjualan Aset Tetap pada tahun 2013 disebabkan di tahun 2013 tidak terdapat keuntungan penjualan saham entitas asosiasi seperti di tahun 2012.

**j. Beban Lain-Lain – Bersih**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Beban Lain-Lain - Bersih Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp13.076 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 29,49% atau setara dengan Rp5.469 juta, dibandingkan dengan Beban Lain-Lain - Bersih pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp18.545 juta. Penurunan Beban Lain-Lain - Bersih tahun 2014 disebabkan oleh penurunan beban lain – lain KSO di tahun 2014. Penurunan tersebut disebabkan di tahun 2013 terdapat pegawai Perseroan yang ditempatkan di proyek KSO, sedangkan 2014 penempatan pegawai tersebut dikurangi.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Beban Lain-Lain - Bersih pada tahun 2013 adalah sebesar Rp18.545 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,92% atau setara dengan Rp699 juta dibandingkan dengan Beban Lain-Lain - Bersih pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp17.846 juta. Kenaikan Beban Lain-Lain - Bersih pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan beban dan denda pajak dan beban lain – lain KSO di tahun 2013.

**k. Beban Keuangan**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Beban Keuangan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp183.596 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 89,57% atau setara dengan Rp86.745 juta, dibandingkan dengan Beban Keuangan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp96.851 juta. Kenaikan Beban Keuangan tahun 2014 disebabkan oleh penambahan beban bunga obligasi atas obligasi baru pada tahun 2014. Di tahun 2014 Perseroan melakukan strategi pengembangan usaha melalui proyek konstruksi dengan sistem turnkey. Dalam membantu pendanaan Perseroan untuk proyek turnkey tersebut, Perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan I di tahun 2014.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Beban Keuangan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp96.851 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 42,89% atau setara dengan Rp72.735 juta dibandingkan dengan Beban Keuangan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp169.586 juta. Penurunan Beban Keuangan pada tahun 2013 disebabkan oleh penurunan bunga pinjaman bank, karena penurunan pinjaman bank.

**l. Bagian Laba Entitas Asosiasi**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Bagian Laba Entitas Asosiasi Perseroan pada tahun 2014 adalah rugi sebesar Rp185 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 116,05% atau setara dengan Rp1.338 juta, dibandingkan dengan Bagian Laba Entitas Asosiasi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.153 juta. Penurunan Bagian Laba Entitas Asosiasi tahun 2014 disebabkan oleh di tahun 2014 Perseroan menjual kepemilikan saham entitas asosiasi PT Ismawa kepada pihak ketiga, sehingga Perseroan tidak lagi mengakui bagian laba entitas asosiasi.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Bagian Laba Entitas Asosiasi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1.153 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 18,74% atau setara dengan Rp182 juta dibandingkan dengan Bagian Laba Entitas Asosiasi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp971 juta. Peningkatan Bagian Laba Entitas Asosiasi pada tahun 2013 disebabkan oleh kenakikan bagian laba entitas asosiasi dari PT Ismawa.

**m. Beban Pajak Penghasilan**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Beban Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp254.389 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 4,59% atau setara dengan Rp11.159 juta, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp243.230 juta. Peningkatan Beban Pajak Penghasilan tahun 2014 disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan melalui PT WBP (Entitas Anak). Seperti diketahui Dirjen Pajak mengenakan tarif pajak progresif sebesar 25% dari laba bersih perusahaan untuk industri manufaktur. Di tahun 2014, PT WBP mengalami peningkatan yang signifikan pada laba bersih sebagai akibat dari kenaikan volume penjualan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Beban Pajak Penghasilan Perseroan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp243.230 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 18,14% atau setara dengan Rp37.348 juta dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp205.882 juta. Peningkatan Beban Pajak Penghasilan pada tahun 2013 disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan yang berimplikasi dengan kenaikan beban pajak final.

**n. Selisih Kurs Penjabaran Laporan keuangan Dalam Valuta Asing**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp4.155 Juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 210 % atau setara dengan Rp2.814 Juta dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.341 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah 2014.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.340 Juta, dimana terjadi penurunan sebesar 504% atau setara dengan Rp1.673 Juta dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebesar Rp332 juta. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah ditahun 2013.

**Analisis Laporan Posisi Keuangan Aset**

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	1.675.283	1.119.694	2.183.783
Investasi Jangka Pendek	24.276	24.276	24.276
Piutang Usaha – Bersih	2.306.758	1.710.372	1.464.270
Piutang Retensi – Bersih	619.018	605.778	475.389
Piutang Lain-lain – Bersih	647.329	25.932	32.338
Persediaan	604.279	292.227	412.538
Tagihan Bruto Kepada Pelanggan - Bersih	4.270.520	3.312.277	2.759.169
Pajak dibayar di Muka	554.591	497.284	76.032
Uang Muka dan Dibayar di Muka	229.709	193.572	161.919
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	175.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	10.524.168	7.781.412	7.789.714

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	-	175.000	175.000
Investasi Pada Ventura Bersama	727.645	334.271	116.483
Investasi Pada Entitas Asosiasi	7.315	8.392	7.826
Properti Investasi	-	15.107	-
Investasi Jangka Panjang Lainnya	628.099	37.500	18.250
Aset Tetap - Bersih	621.792	415.440	239.934
Aset Lain-lain	33.023	21.180	19.036
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.017.873	1.006.890	576.529
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>12.542.041</b>	<b>8.788.302</b>	<b>8.366.243</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah Aset Perseroan adalah sebesar Rp12.542.041 juta atau terjadi peningkatan sebesar 42,71% atau setara dengan Rp3.753.738 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp8.788.303 juta. Pada tahun 2014, terdapat kenaikan jumlah aset lancar dibandingkan tahun 2013 sebesar 35,25% atau setara dengan Rp2.742.755 juta. Kenaikan aset lancar terdiri dari kenaikan kas dan setara kas yang berasal dari kenaikan arus kas operasi, kenaikan piutang usaha yang berasal dari kenaikan piutang dagang dari PT WBP, kenaikan piutang lain-lain terutama pinjaman yang diberikan kepada PT PPTR dari PT WTR (Entitas Anak) yang digunakan sebagai dana kerja dan kenaikan tagihan bruto terutama disebabkan kenaikan tagihan bruto yang berasal dari proyek kontruksi dengan sistem *turnkey*.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, jumlah Aset Perseroan adalah sebesar Rp8.788.303 juta atau terjadi peningkatan sebesar 5,04% atau setara dengan Rp422.059 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp8.366.244 juta. Pada tanggal 31 Desember 2013, terdapat penurunan jumlah aset lancar dari tahun 2012 sebesar 0,11% atau setara dengan Rp8.302 juta. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan kas dan setara kas sebesar 48,73% atau setara dengan Rp1.064.089 juta.

**a) Kas dan Setara Kas**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Kas dan Setara Kas Perseroan adalah sebesar Rp1.675.283 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 49,62% atau setara dengan Rp555.589 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.119.694 juta. Kenaikan kas dan setara kas terutama dikarenakan penempatan jumlah kas perseroan pada deposito berjangka mengalami kenaikan sebesar 33,74% atau setara dengan Rp258.608 juta. Kenaikan Kas dan Setara Kas berasal dari kenaikan arus kas operasional yang berasal dari penerimaan termin di tahun 2014.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Kas dan Setara Kas Perseroan adalah sebesar Rp1.119.694 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 48,73% atau setara dengan Rp1.064.089 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.183.783 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah kas pada 31 Desember 2013 sebesar Rp465 juta atau 31,38% karena jumlah kas pada 31 Desember 2012 adalah Rp1.482 juta dan jumlah kas pada 31 Desember 2013 sebesar Rp1.017 juta. Di samping itu, terdapat penurunan jumlah deposito berjangka baik untuk pihak – pihak berelasi maupun pihak ketiga. Pada 31 Desember 2013 jumlah deposito berjangka untuk pihak berelasi adalah Rp588.820 juta sedangkan pada posisi 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp664.000 juta. Oleh karena itu, terdapat penurunan jumlah deposito berjangka sebesar Rp75.180 juta atau sebesar 11,32%. Begitu juga untuk deposito berjangka bagi pihak ketiga, pada posisi 31 Desember 2013 sebesar Rp117.700 juta sedangkan pada posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp497.300 juta sehingga terdapat penurunan sebesar Rp557.300 juta atau sebesar 73,67%.

b) **Investasi Jangka Pendek**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Investasi Jangka Pendek Perseroan sama seperti posisi 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp24.276 juta. Dengan kata lain, tidak ada perubahan jumlah investasi jangka pendek Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Investasi Jangka Pendek Perseroan sama seperti posisi 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp24.276 juta. Dengan kata lain, tidak ada perubahan jumlah investasi jangka pendek Perseroan.

c) **Piutang Usaha – Bersih**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Piutang Usaha Perseroan adalah Rp2.306.758 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 34,87% atau setara dengan Rp596.386 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.710.372 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya piutang usaha jasa konstruksi pihak-pihak ketiga sebesar 82,25% atau setara dengan Rp665.479 juta. Hal ini disebabkan terdapat kenaikan piutang usaha atas transaksi penjualan beton *precast* dan *readymix* pada PT WBP (Entitas Anak).

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Piutang Usaha Perseroan adalah Rp1.710.373 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp246.103 juta atau setara dengan 16,81% dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp1.464.269 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang usaha jasa konstruksi kepada pihak ketiga sebesar 14,85% atau sebesar Rp91.882 juta. Selain itu, kenaikan piutang pada posisi 31 Desember 2013 disebabkan kenaikan piutang dagang menjadi Rp119.523 juta serta kenaikan piutang ventura bersama sebesar Rp59.775 juta atau sebesar 13,03% dibandingkan pada 31 Desember 2012 yaitu Rp458.909 juta.

d) **Piutang Retensi - Bersih**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Piutang Retensi Perseroan adalah Rp619.018 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,19% atau setara dengan Rp13.240 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp605.778 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2014, dan sesuai dengan perjanjian 5% dari nilai kontrak ditahan sebagai piutang retensi selama masa pemeliharaan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Piutang Retensi Perseroan adalah Rp605.778 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 27,45% atau setara dengan Rp130.389 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp475.389 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2013, dan sesuai dengan perjanjian 5% dari nilai kontrak ditahan sebagai piutang retensi sampai akhir periode pemeliharaan.

e) **Piutang Lain-Lain - Bersih**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Piutang Lain-Lain Bersih Perseroan adalah Rp64.733 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 149,62% atau setara dengan Rp38.801 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp25.932 juta. Peningkatan ini disebabkan peningkatan piutang bunga atas pinjaman yang diberikan PT WTR kepada PT PPTR.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Piutang Lain-Lain Bersih Perseroan adalah Rp25.932 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,81% atau setara dengan Rp6.406 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp32.338 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pelunasan piutang lain-lain.

f) **Persediaan**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Persediaan Perseroan adalah Rp604.279 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 106,78% atau setara dengan Rp312.052 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp292.227 juta. Peningkatan persediaan disebabkan oleh kenaikan persediaan aset real estat yaitu Proyek Perkantoran Cawang ditahun 2014 dan bahan baku konstruksi.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Persediaan Perseroan adalah Rp292.227 juta, dimana terjadi penurunan sebesar Rp120.331 juta atau setara dengan 29,16% dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp412.538 juta. Peningkatan persediaan disebabkan oleh kenaikan persediaan aset real estat yaitu Proyek Perkantoran Cawang ditahun 2014 dan bahan baku konstruksi.

g) **Tagihan Bruto Kepada Pelanggan – Bersih**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Tagihan Bruto Kepada Pelanggan – Bersih Perseroan adalah Rp4.270.520 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 28,93% atau setara dengan Rp958.243 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.312.276 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan realisasi progres pekerjaan dari proyek – proyek *turnkey* diantaranya proyek Pejagan Pemalang Toll Road dan proyek tol Becakayu di tahun 2014.

**31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Tagihan Bruto Kepada Pelanggan- Bersih Perseroan adalah Rp3.312.276 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 20,05% atau setara dengan Rp553.107 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.759.169 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan tagihan bruto kepada pihak berelasi yaitu PT Hotel Indonesia Natour (Persero) sebesar Rp115.215 juta atau sebesar 575,53% dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp54.580 juta atau sebesar 462,44%.

h) **Pajak Dibayar di Muka**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Pajak Dibayar di Muka Perseroan adalah Rp554.591 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 11,52% atau setara dengan Rp57.307 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp497.284 juta. Kenaikan pajak dibayar di muka berasal dari pajak pertambahan nilai masukan dan pajak dibayar dimuka pasal 23, atas peningkatan transaksi pembelian bahan baku dan subkontraktor. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan pendapatan usaha dan beban pokok pendapatan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pajak Dibayar di Muka Perseroan adalah Rp497.284 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 80,15% atau setara dengan Rp221.252 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp276.032 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pajak pertambahan nilai masukan.

i) **Uang Muka dan Dibayar di Muka**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Uang Muka dan Dibayar di Muka Perseroan adalah Rp229.709 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 18,67% atau setara dengan Rp36.137 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp193.572 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh pajak pertambahan nilai keluaran yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Uang Muka dan Dibayar di Muka Perseroan adalah Rp193.572 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 19,55% atau setara dengan Rp31.652 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp161.920 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya dibayar dimuka operasional.

j) **Investasi Pada Ventura Bersama**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Investasi Pada Ventura Bersama Perseroan adalah Rp727.645 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 117,68% atau setara dengan Rp393.374 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp334.271 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan setoran dana kerja ventura bersama dan porsi laba dari ventura bersama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pada tanggal 31 Desember 2013, Investasi Pada Ventura Bersama Perseroan adalah Rp334.271 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 186,97% atau setara dengan Rp217.787 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp116.484 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan setoran dana kerja ventura bersama dan porsi laba dari ventura bersama.

k) **Investasi Pada Entitas Asosiasi**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Investasi Pada Entitas Asosiasi Perseroan adalah Rp7.315 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,83% atau setara dengan Rp1.077 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp8.392 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi. Pada tahun 2014 Perseroan melepas kepemilikan saham di PT Citra Wasphutowa..

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pada tanggal 31 Desember 2013, Investasi Pada Ventura Bersama Perseroan adalah Rp8.392 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 7,23% atau setara dengan Rp566 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp7.826 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan kepemilikan saham pada entitas asosiasi.

l) **Properti Investasi**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Properti Investasi Perseroan adalah Rp0 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 100,00% atau setara dengan Rp15.107 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp15.107 juta. Pada tahun 2014, Perseroan melakukan perubahan peruntukkan atas Proyek Perkantoran Cawang yang semula peruntukannya untuk disewa menjadi untuk dijual, sehingga terjadi reklasifikasi dari Properti Investasi menjadi Persediaan Real Estat.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pada tanggal 31 Desember 2013, Properti Investasi Perseroan adalah Rp15.107 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp15.107 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp0 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan proyek properti investasi Cawang ditahun 2013.

m) **Investasi Jangka Panjang Lainnya**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Investasi Jangka Panjang Lainnya Perseroan adalah Rp628.099 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1.574,93% atau setara dengan Rp590.599 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp37.500 juta. Kenaikan kepemilikan investasi jangka panjang lainnya disebabkan aksi korporasi PT WTR (Entitas Anak) berupa akuisisi saham PT Pejagan Pemalang Toll Road dan PT Kresna Kusuma Dyandra Marga.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pada tanggal 31 Desember 2013, Properti Investasi Perseroan adalah Rp37.500 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 105,48% atau setara dengan Rp19.250 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp18.250 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh disebabkan oleh kenaikan kepemilikan investasi jangka panjang lainnya atas PT Citra Wasphutowa.



n) **Aset Tetap – Bersih**

**31 Desember 2014 dibandingkan dengan 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Aset Tetap – Bersih Perseroan adalah sebesar Rp621.792 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 49,67% atau sebesar Rp206.352 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perolehan investasi aset tetap baru sebesar Rp329.338 juta (sebelum akumulasi penyusutan), terdiri dari perolehan peralatan proyek *precast* dan peralatan proyek untuk konstruksi sebesar Rp281.206 juta, tanah sebesar Rp36.469 miliar, aset dalam pelaksanaan sebesar Rp 116.973 juta dan perlengkapan kantor sebesar Rp2.586 juta.

**31 Desember 2013 dibandingkan dengan 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Aset Tetap – Bersih Perseroan adalah sebesar Rp415.440 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 73,15% atau sebesar Rp175.506 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh perolehan investasi aset tetap baru sebesar Rp193.394 Juta (sebelum akumulasi penyusutan) dimana terdapat penambahan tanah, gedung, peralatan kantor dan peralatan proyek pada tahun 2013. Penambahan tanah senilai Rp16.997 juta, gedung senilai Rp8.384 juta, peralatan kantor senilai Rp2.515 juta dan peralatan proyek senilai Rp165.498 juta. Penambahan peralatan proyek tersebut untuk mendukung kenaikan jumlah proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.

o) **Aset Lain-lain**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Aset Lain-lain Perseroan adalah Rp33.023 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 55,92% atau setara dengan Rp11.843 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp21.180 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh perangkat lunak dan beban kontrak yang ditangguhkan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Aset Lain-lain Perseroan adalah Rp21.180 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 11,26% atau setara dengan Rp2.144 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2012 sebesar Rp19.036 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh perangkat lunak dan beban kontrak yang ditangguhkan.

**Liabilitas**

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Pinjaman Bank Jangka Pendek	1.917.129	874.808	1.171.853
Utang Usaha	2.571.795	2.291.267	2.002.816
Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga	2.700.537	1.794.740	1.564.999
Utang Pajak	104.179	97.227	95.086
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	289.435	301.860	405.128
Beban Masih Harus Dibayar	98.728	22.720	27.993
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	46.349	44.517	23.951
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	7.728.154	5.427.139	5.291.826
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	715.749	229.681	319.888
Utang Lain-lain Berelasi	3.652	-	-
Utang Obligasi – Bersih	1.245.657	748.045	747.454
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.965.058	977.726	1.067.342
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>9.693.211</b>	<b>6.404.865</b>	<b>6.359.168</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp9.693.211 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 51,34% setara dengan Rp3.288.346 juta dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp6.404.866 juta. Pada tahun 2014, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 42,40% setara dengan Rp2.301.014 juta, dari Rp5.427.139 juta pada tahun 2013 menjadi Rp7.728.154 juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan antara lain oleh kenaikan pinjaman bank jangka pendek sebesar 119,15%. Kenaikan pinjaman bank jangka pendek antara lain kepada Indonesia Eximbank sebesar 62,03% atau setara dengan Rp317.517 juta, pinjaman baru dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Panin masing-masing sebesar Rp255.230 juta dan Rp300.000 juta.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, total liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp6.404.866 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 0,72% setara dengan Rp45.697 juta dibandingkan dengan total liabilitas Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp6.359.168 juta. Pada tahun 2013, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 2,56% setara dengan Rp135.313 juta, dari Rp5.427.139 juta pada tahun 2012 menjadi Rp5.291.826 juta. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan antara lain oleh kenaikan utang usaha sebesar 14,40% atau setara dengan Rp288.452 juta, Tagihan Bruto Subkontraktor Pihak Ketiga sebesar 14,68% atau setara dengan Rp229.742 juta akan tetapi disisi lain pinjaman bank jangka pendek mengalami penurunan sebesar 25,35% atau setara dengan Rp297 juta.

a) **Pinjaman Bank Jangka Pendek**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Pinjaman Bank Jangka Pendek Perseroan adalah sebesar Rp1.917.129 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 119,15% setara dengan Rp1.042.321 juta dibandingkan dengan Pinjaman Bank Jangka Pendek Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp874.808 juta. Kenaikan pinjaman bank jangka pendek antara lain kepada Indonesia Eximbank sebesar 62,03% atau setara dengan Rp317.517 juta, pinjaman baru dari Bank Rakyat Indonesia dan Bank Panin masing-masing sebesar Rp255.230 juta dan Rp300.000 juta.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pinjaman Bank Jangka Pendek Perseroan adalah sebesar Rp874.808 juta dimana terjadi penurunan sebesar 25,35% setara dengan Rp297.045 juta dibandingkan dengan Pinjaman Bank Jangka Pendek Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp1.171.853 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pelunasan yang dilakukan oleh Perseroan atas utang bank jangka pendek kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Panin Tbk.

b) **Utang Usaha**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, utang usaha Perseroan adalah sebesar Rp2.571.795 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 12,24% atau setara dengan Rp280.528 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.291.268 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada supplier sebesar 22,49% atau setara dengan Rp278.780 juta, utang ventura bersama sebesar 11,30% atau setara dengan Rp19.646 juta. Peningkatan utang usaha secara keseluruhan disebabkan peningkatan produksi beton *precast* dan proyek-proyek konstruksi. Perseroan memiliki fasilitas *Supply Chain Financing* (SCF) dan *Open Account Facility* (OAF) dari bank kreditur, yang membayar utang usaha Perseroan kepada pihak ketiga. Adapun utang SCF dan OAF tersebut akan dilunasi oleh Perseroan dengan tenor 6 bulan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Utang Usaha Perseroan adalah sebesar Rp2.291.267 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,40% atau setara dengan Rp288.451 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.002.816 juta. Peningkatan terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pemasok sebesar 23,11% atau setara dengan Rp232.657 juta, utang usaha kepada subkontraktor sebesar 24,04% atau setara dengan Rp145.694 juta dan utang usaha kepada ventura bersama turun sebesar 36,53% atau setara dengan Rp100.027 juta. Peningkatan utang usaha ini secara keseluruhan disebabkan peningkatan proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan oleh Perseroan. Perseroan memiliki fasilitas *Supply Chain Financing* (SCF) dan *Open Account Facility* (OAF) dari bank kreditur, yang membayar utang usaha Perseroan kepada pihak ketiga.

c) **Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga Perseroan adalah sebesar Rp2.700.537 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 50,47% setara dengan Rp905.797 juta dibandingkan dengan Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp1.794.740 juta. Peningkatan ini terutama dikarenakan banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi belum ditagihkan kepada pihak Perseroan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga Perseroan adalah sebesar Rp1.794.740 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 14,68% setara dengan Rp229.741 juta dibandingkan dengan Utang Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp1.564.999 juta. Peningkatan ini terutama dikarenakan

banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak ketiga sudah di tagihkan kepada pihak Perseroan per 31 Desember 2012 dibandingkan dengan 31 Desember 2011.

d) **Uang Muka Kontrak Jangka Pendek**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Uang Muka Kontrak Jangka Pendek Perseroan adalah sebesar Rp289.435 juta dimana terjadi penurunan sebesar 4,12% setara dengan Rp12.425 juta dibandingkan dengan Uang Muka Kontrak Jangka Pendek Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp301.859 juta. Penurunan uang muka kontrak jangka pendek disebabkan penyelesaian proyek-proyek Perseroan di tahun 2014 sehingga uang muka kontrak yang diterima menjadi pengurang atas tagihan pada pemberi kerja.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pada tanggal 31 Desember 2013, Uang Muka Kontrak Jangka Pendek Perseroan adalah sebesar Rp301.859 juta dimana terjadi penurunan sebesar 25,49% setara dengan Rp103.268 juta dibandingkan dengan Uang Muka Kontrak Jangka Pendek Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp405.128 juta. Penurunan ini terutama dikarenakan dengan diselesaikannya proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.

e) **Beban Akrua**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Beban Akrua Perseroan adalah sebesar Rp98.728 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 334,54% setara dengan Rp76.008 juta dibandingkan dengan Beban Masih Harus Dibayar Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp22.720 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan diterima dimuka atas *precast* dan beban kantor.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pada tanggal 31 Desember 2013, Beban Akrua Perseroan adalah sebesar Rp22.720 juta dimana terjadi penurunan sebesar 18,84% setara dengan Rp5.273 juta dibandingkan dengan Beban Masih Harus Dibayar Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp27.993 juta. Penurunan ini disebabkan oleh beban kantor.

f) **Liabilitas Jangka Pendek Lainnya**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Perseroan adalah sebesar Rp46.349 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 4,12% setara dengan Rp1.832 juta dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Perseroan pada tahun 2013 sebesar Rp44.517 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh utang iuran dana pensiun dan jasa produksi.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012***

Pada tanggal 31 Desember 2013, Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Perseroan adalah sebesar Rp44.517 juta dimana terjadi peningkatan sebesar 85,87% setara dengan Rp20.566 juta dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Perseroan pada tahun 2012 sebesar Rp23.951 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang kepada pemberi kerja.

g) **Uang Muka Kontrak Jangka Panjang**

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013***

Pada tanggal 31 Desember 2014, Uang Muka Kontrak Jangka Panjang Perseroan adalah sebesar Rp715.749 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 211,63% atau setara dengan Rp486.067 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp229.682 juta. Kenaikan ini terutama dikarenakan Perseroan menerima uang muka atas proyek-proyek *multiyear* yang diperoleh tahun 2014 diantaranya proyek Bandara Suai di Timor Leste dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Uang Muka Kontrak Jangka Pendek Perseroan adalah sebesar Rp229.681 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 28,20% atau setara dengan Rp90.207 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp319.889 juta. Penurunan ini terutama dikarenakan dengan diselesaikannya proyek-proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.

h) **Utang Lain-lain Berelasi**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Utang Lain-lain Berelasi Perseroan adalah sebesar Rp3.652 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp3.652 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp0 juta. Kenaikan ini terutama dikarenakan kenaikan utang PT WTR (Entitas Anak) kepada PT Waskita Bumi Wira (entitas asosiasi).

i) **Utang Obligasi - Bersih**

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, Utang Obligasi - Bersih Perseroan adalah sebesar Rp1.245.657 juta, dimana terjadi kenaikan sebesar 66,52% atau setara Rp497.612 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp748.045 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan Perseroan melakukan aksi korporasi untuk mendanai sebagian kebutuhan dana atas proyek *turnkey* melalui penerbitan obligasi berkelanjutan I ditahun 2014 sebesar Rp 500 Miliar.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, Utang Obligasi - Bersih Perseroan adalah sebesar Rp748.045 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,08% atau setara dengan Rp591 juta dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp747.454 juta. Peningkatan ini terutama dikarenakan amortisasi biaya emisi obligasi.

**Ekuitas**

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2014	2013	2012
<b>EKUITAS</b>			
Modal Saham			
Modal Dasar	972.750	963.224	963.224
Tambahannya			
Modal Disetor	880.789	831.138	831.138
Opsional	43.363	28.930	-
Saldo Laba			
Telah ditentukan penggunaannya	268.432	194.820	192.280
Belum ditentukan penggunaannya	685.591	368.090	22.893
Komponen Ekuitas Lainnya			
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(7.956)	(3.800)	(2.460)
Jumlah yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2.842.970	2.382.402	2.007.075
Kepentingan Entitas Non Pengendali	5.860	1.035	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.848.830</b>	<b>2.383.437</b>	<b>2.007.075</b>

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013**

Pada tanggal 31 Desember 2014, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.848.830 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 19,53% atau setara Rp465.393 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp2.383.437 juta. Hal ini disebabkan antara lain pembagian deviden atas hasil usaha tahun 2013 sebesar Rp110.418 juta, pencatatan laba tahun berjalan sebesar Rp501.530 juta dan Penerimaan dari program pembelian saham untuk karyawan (MESOP).

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012**

Pada tanggal 31 Desember 2013, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.383.437 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 18,75% atau setara Rp376.362 juta dibandingkan tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp2.007.075 juta.

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 1.507,83% kali setara dengan Rp345.197 juta. Peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan.

### Analisa Laporan Arus Kas

Tabel berikut memuat ikhtisar Laporan Arus Kas Perseroan:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2014	2013	2012
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(88.710)	(385.213)	(187.871)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(1.082.453)	(378.580)	(27.668)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	1.727.982	(317.368)	1.814.918
Kenaikan bersih kas dan setara kas	556.819	(1.081.161)	1.599.379
Kas dan setara kas awal tahun	1.119.694	2.183.783	583.188
Keuntungan selisih kurs yang belum direalisasi	(1.229)	17.072	1.216
Kas dan setara kas akhir tahun	1.675.283	1.119.694	2.183.783

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp88.710 juta. Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp9.086.251 juta, penerimaan bunga giro dan deposito sebesar Rp44.670 juta, dan penerimaan restitusi pajak sebesar Rp193.005 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp8.599.051 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp246.993 juta, pajak sebesar Rp382.996 juta, dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp183.596 juta. Arus kas dari aktivitas operasi selama periode tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok, beban keuangan dan pajak.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp385.213 juta. Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp8.527.447 juta, penerimaan bunga giro dan deposito sebesar Rp10.083 juta, dan penerimaan restitusi pajak sebesar Rp114.754 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp8.291.615 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp 208.695 juta, pajak sebesar Rp440.336 juta, dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp96.851 juta. Arus kas dari aktivitas operasi selama periode tahun 2013 menunjukkan adanya penerimaan dana yang meningkat dari penerimaan dari pelanggan.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp187.871 juta. Arus kas masuk dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp7.483.968 juta, penerimaan bunga giro dan deposito sebesar Rp30.670 juta, dan penerimaan restitusi pajak sebesar Rp136.759 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga sebesar Rp7.216.588 juta, pembayaran kepada karyawan sebesar Rp157.166 juta, pajak sebesar Rp295.929 juta, dan pembayaran beban keuangan sebesar Rp169.586 juta. Arus kas dari aktivitas operasi selama periode tahun 2012 menunjukkan adanya penerimaan dana yang meningkat dari penerimaan dari pelanggan.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.082.453 juta. Arus kas masuk dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan dari ventura bersama sebesar Rp87.068 juta, dan penerimaan penjualan entitas asosiasi sebesar Rp39.583 juta, penerimaan dividen dari entitas asosiasi sebesar Rp1.150 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas investasi digunakan untuk penempatan investasi pada ventura bersama Rp 283.325 juta, perolehan aset tetap sebesar Rp 328.828 juta, dan penempatan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya sebesar Rp 598.099 juta. Arus kas untuk aktivitas investasi selama periode tahun 2014 menunjukkan adanya penerimaan dana yang meningkat untuk pencairan investasi jangka pendek – bersih.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp378.580 juta. Arus kas masuk dari aktivitas investasi berasal dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp231 juta, penerimaan dari ventura bersama sebesar Rp30.628 juta, dan penerimaan dividen dari entitas asosiasi sebesar Rp587 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas investasi digunakan untuk penempatan pada ventura bersama Rp146.741 juta, penambahan properti asosiasi sebesar Rp228.928 juta, penerimaan penjualan investasi pada entitas asosiasi dan investasi jangka panjang lainnya sebesar Rp15.107 juta, dan penempatan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya sebesar Rp19.250 juta. Arus kas untuk aktivitas investasi selama periode tahun 2013 menunjukkan adanya penerimaan dana yang meningkat untuk pencairan investasi jangka pendek – bersih.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp27.668 juta. Arus kas masuk dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan ventura bersama sebesar Rp49.125 juta, penerimaan penerimaan penjualan investasi pada entitas asosiasi dan investasi jangka panjang lainnya sebesar Rp117.931

juta dan hasil penjualan aset tetap sebesar Rp81 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas investasi digunakan untuk penambahan properti investasisebesar Rp81.697 juta dan penempatan pada ventura bersama Rp36.900 juta, dan pelepasan investasi asosiasi dan jangka panjang lainnya sebesar Rp76.208 juta. Arus kas untuk aktivitas investasi selama periode tahun 2012 menunjukkan adanya penerimaan dana yang meningkat untuk pencairan investasi jangka pendek – bersih.

#### **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.727.982 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp16.276.596 juta, Penerimaan utang obligasi sebesar Rp500.000 juta, Penerimaan setoran modal saham Rp 9.527 juta, Penerimaan tambahan setoran modal sebesar Rp49.652 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran pinjaman bank sebesar Rp14.994.274 juta, pembayaran emisi obligasi sebesar Rp3.100 juta dan pembayaran deviden tunai sebesar Rp110.418 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp317.368 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan pinjaman bank sebesar Rp15.298.731 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran pinjaman bank sebesar Rp15.595.777 juta dan pembayaran deviden tunai sebesar Rp20.323 juta.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.814.918 juta. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang obligasi sebesar Rp750.000 juta, penerimaan pinjaman bank sebesar Rp12.238.720 juta, penerimaan setoran modal saham sebesar Rp308.231 juta, dan penerimaan tambahan setoran modal sebesar Rp831.138 juta. Arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan digunakan untuk pembayaran biaya emisi obligasi Rp2.546 juta, pembayaran biaya emisi efek saham sebesar Rp31.910 juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp12.271.835 juta dan pembayaran program kemitraan dan bina lingkungan sebesar Rp6.880 juta.

#### **5. Pembelanjaan Modal**

Jumlah pembelanjaan modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, masing-masing sebesarRp1.858.185juta, Rp133.292 juta, Rp243.804 juta dan Rp81.696 juta.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari sebagian besar adalah dari hasil usaha dan sebagian lagi dari pinjaman bank.

Perseroan terus berusaha untuk menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam melakukan pembelanjaan modal, dimana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan melakukan proses tender yang terarah dan transparan.

Mengingat pembelian barang modal yang dilakukan Perseroan dalam bentuk investasi alat yang setiap pembeliannya selalu direncanakan dengan baik, maka Perseroan tidak mengalami masalah yang tidak sesuai dengan pembelian dan tujuannya. Adapun pengaruh pembelian barang modal tersebut dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

Perseroan tidak memiliki pengikatan untuk pembelian barang modal yg belum direalisasi.

#### **6. Imbal Hasil Investasi**

Imbal hasil investasi (ROA) menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing 0,04x, 0,04 x dan 0,03 x.

#### **7. Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal hasil ekuitas (ROE) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing 0,18x, 0,15x dan 0,3x. Pergerakan pada imbal hasil ekuitas adalah disebabkan oleh pergerakan pada jumlah ekuitas dan laba bersih Perseroan.

#### **8. Likuiditas**

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek, yang dapat dihitung dengan cara, yaitu rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Rasio kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing 0,22x, 0,21x dan 0,41x. Rasio lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing 1,36x, 1,43x dan 1,47x.

Perbaikan rasio kas dan rasio lancar Perseroan dari tahun 2012 sampai 2014 disebabkan oleh waktu collection period yang semakin singkat dan adanya peningkatan laba yang didapat Perseroan, yang menyebabkan naiknya akun kas dan setara kas, sehingga walaupun jumlah liabilitas jangka pendek meningkat, tetap diimbangi dengan kenaikan laba.

## 9. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar liabilitas-liabilitasnya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas, dan (ii) rasio hutang bersih terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang bersih (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar, setelah dikurangi dengan kas dan setara kas).

Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing 3,40x, 2,69x dan 3,17x. Rasio hutang bersih terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing adalah 0,90x, 0,96x dan 0,96x.

## 10. Manajemen Risiko

Perseroan senantiasa melakukan evaluasi atas rencana dan tindak lanjut analisa risiko yang dibuat oleh Unit Usaha serta melakukan pembahasan dengan manajemen Perseroan untuk mencari alternatif penyelesaian terbaik untuk risiko-risiko yang dihadapi unit usaha tersebut. Di bawah ini adalah mitigasi atas risiko-risiko usaha Perseroan, yaitu :

- 1) Mitigasi risiko pembayaran
  - Mensyaratkan adanya jaminan pembayaran untuk proyek *pre-financing* kepada *owner* berupa bank garansi dari bank pemerintah atau bank swasta yang kredibel dan bank garansi tersebut bersifat *irrevocable* dan *unconditional*
  - Menetapkan batasan maksimum piutang usaha yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan
  - Memastikan piutang usaha Perseroan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu
  - Memonitor umur dan pencairan piutang usaha
- 2) Mitigasi risiko kenaikan harga dan ketersediaan bahan baku
  - Kontrak-kontrak payung untuk material fabrikasi yang berskala besar seperti : besi beton, beton, aspal, semen, dll
  - Mengikat calon mitra untuk proyek-proyek yang sudah didapat dengan kontrak dan mengamankan klausul kontraknya dengan cara *back to back*
  - Memperhitungkan estimasi inflasi pada harga penawaran terutama pada kontrak yang tidak ada klausul eskalasinya
  - Mencantumkan klausul eskalasi dalam dokumen kontrak dengan pelanggan
  - Mengajukan eskalasi harga
  - Melakukan dan mengajukan *review* desain
- 3) Mitigasi risiko kebijakan pemerintah
  - Mengajukan klaim akibat ditangguhkannya penyelesaian pekerjaan
  - Perintisan proyek lain diluar target sebagai cadangan perolehan pendapatan usaha dan laba
  - Melakukan optimalisasi / *review* desain
  - Melakukan *hedging* untuk mengamankan nilai tukar mata uang rupiah terhadap valuta asing
- 4) Mitigasi risiko persaingan usaha
  - Menjalankan visi dan misi Perseroan yaitu menjadi perusahaan jasa konstruksi terbaik yang memberikan nilai tambah bagi stakeholders dengan meningkatkan nilai perusahaan yang kompetitif dan berkualitas dengan :
    - a. SDM yang kompeten
    - b. Sinergi dengan pelanggan, mitra kerja dan lembaga keuangan, serta
    - c. Berorientasi pada keselamatan, kesehatan dan peduli lingkungan
  - Menerapkan nilai budaya Perseroan yaitu *sustainable* (berkesinambungan), *agile* (*flexible*, adaptif), *fair* (adil, kesetaraan), *excellence* (biaya mutu waktu), *team work* (kerjasama lintas fungsi) dan *integrity* (jujur)
  - Dengan motto usaha : maju dengan karya bermutu yang artinya melangkah ke depan dengan produk dan jasa yang bermutu untuk menjadi *champion*
  - Menjalankan kebijakan Perseroan untuk selalu mengendalikan risiko terhadap keselamatan-kesehatan kerja, lingkungan, mutu dan pengamanan dengan cara menerapkan sistem manajemen waskita untuk memenuhi kepuasan *stakeholders*.
  - Melakukan optimalisasi dan review metode kerja untuk efisiensi dan efektivitas penyelesaian pekerjaan
  - Melakukan pengembangan usaha baru yang didahului dengan kajian *feasibility study* untuk memberikan value dan return yang semaksimal mungkin bagi Perseroan
  - Untuk memenangkan Persaingan dengan pesaing, Perseroan juga menetapkan kebijakan untuk mempertahankan kualitas pelayanan, menciptakan inovasi – inovasi baru dibidang rancang bangun dan metode pengerjaan proyek, membuka jaringan dengan melakukan kerjasama dengan investor untuk membantu pelanggan dalam mewujudkan proyeknya dan sinergi dengan entitas asosiasi untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas penyelesaian pekerjaan.
- 5) Mitigasi risiko perubahan nilai tukar valuta asing
  - Semaksimal mungkin melakukan transaksi dengan pihak ketiga dengan cara *back to back* sesuai mata uang dalam kontrak
  - Melakukan *hedging* untuk mengamankan nilai tukar mata uang rupiah terhadap valuta asing

- 6) Mitigasi risiko ekonomi
  - Perintisan proyek lain di luar target sebagai cadangan, termasuk yang ada dalam MP3EI (*masterplan* percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia)
  - Melakukan pengembangan usaha baru yang didahului dengan kajian *feasibility study* untuk memberikan *value* dan *return* yang semaksimal mungkin bagi Perseroan
  - Segmentasi pasar terbesar adalah proyek pemerintah, bumh/bumd dan loan
  - Dalam penyusunan target pendapatan usaha dan laba, Perseroan sudah mempertimbangkan kondisi ekonomi makro Indonesia seperti SBI, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi dan suku bunga SPN 3 bulan
- 7) Mitigasi risiko sosial & politik
  - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelanjutan dan kelancaran pekerjaan
  - Melakukan komunikasi dan koordinasi berkaitan dengan pembebasan lahan dan mengajukan kompensasi / klaim biaya atas keterlambatan pembebasan lahan
  - Mempekerjakan warga / penduduk lokal (sekitar proyek) sebagai *low skill employee*
  - Melibatkan subkontraktor/supplier lokal untuk melaksanakan pekerjaan penunjang
  - Melakukan sosialisasi pada instansi terkait dan masyarakat di sekitar proyek
  - Melakukan koordinasi dengan aparat desa, kecamatan dan kabupaten serta dengan aparat keamanan setempat
- 8) Mitigasi risiko berkurangnya proyek dari pelanggan berulang
  - Melakukan penetrasi pasar (pelanggan) baru
  - Bersinergi dengan Pelanggan dengan menawarkan alternatif model proyek EPC, Design & Built kepada Owner



## VI. RISIKO USAHA

Di samping informasi lain yang telah disajikan dalam Prospektus ini, risiko-risiko usaha berikut ini juga harus dijadikan pertimbangan oleh para investor. Setiap risiko yang dijelaskan di bawah ini dapat berdampak material pada bisnis Perseroan dan Entitas Anak, kondisi keuangan dan hasil operasi dan oleh karena itu dapat memiliki efek negatif pada harga perdagangan efek yang ditawarkan. Tambahan risiko dan faktor-faktor ketidakpastian yang saat ini tidak diketahui Perseroan atau yang saat ini dianggap tidak material oleh Perseroan, dapat memiliki efek negatif pada kondisi bisnis keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak telah mengurutkan risiko usaha sesuai dengan bobot risiko, dimulai dari risiko utama Perseroan.

### I. RISIKO-RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

#### 1) RISIKO PEMBAYARAN

Risiko pembayaran dapat terjadi akibat tertundanya / tidak terbayarnya tagihan proyek dari pemberi tugas (*Owner*) yang mengakibatkan meningkatnya *cost of fund* dan dapat menimbulkan piutang bermasalah sehingga dapat mengurangi laba Perseroan.

Walaupun Perseroan telah mengatur mengenai mekanisme pembayaran pekerjaan dalam kontrak antara Perseroan dengan pelanggan, akan tetapi tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran tepat waktu sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap arus kas dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko pembayaran lebih besar kepada pemberi tugas dari golongan swasta. Hal ini dikarenakan tidak adanya keterikatan yang Perseroan miliki seperti halnya hubungan Perseroan dengan pemberi tugas milik Pemerintah.

#### 2) RISIKO KENAIKAN HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

Dalam setiap proyek, Perseroan melakukan estimasi biaya yang mengacu kepada informasi dari pemasoknya serta berdasarkan pengalaman Perseroan sebelumnya. Tidak ada jaminan bahwa estimasi Perseroan maupun informasi yang diperoleh Perseroan adalah tepat. Dengan tenggang waktu pekerjaan berkisar antara satu hingga dua tahun terdapat risiko adanya faktor – faktor diluar kendali Perseroan yang dapat mempengaruhi estimasi biaya seperti kenaikan harga bahan baku konstruksi. Pada umumnya proyek-proyek yang diperoleh dari swasta mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah dan BUMN, hal tersebut disebabkan karena proyek – proyek swasta yang tidak menyediakan ruang bagi penyesuaian nilai kontrak apabila terdapat peningkatan beban kontrak.

Kenaikan harga bahan baku konstruksi dapat mengakibatkan meningkatnya biaya proyek, sehingga dapat mengurangi keuntungan Perseroan.

#### 3) RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH

Risiko ini dapat timbul untuk proyek-proyek yang berasal dari Pemerintah ataupun BUMN/BUMD yang akibat perubahan kebijakan Pemerintah ditangguhkan pelaksanaannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap tertundanya pekerjaan/proyek tersebut, sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan. Selain itu juga terdapat proyek-proyek yang berasal dari luar negeri dimana terdapat perbedaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat yang dapat membatasi lalu lintas dana antar negara sehingga mempengaruhi pendapatan dan arus kas masuk Perseroan.

#### 4) RISIKO PERSAINGAN USAHA

Persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi akan semakin tajam tidak saja dengan perusahaan nasional tetapi persaingan juga terjadi dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, sehingga hal ini dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

#### 5) RISIKO PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING

Perseroan saat ini memiliki proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri dan akan terus mengembangkan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi dengan menangani lebih banyak lagi proyek-proyek yang berlokasi di luar negeri. Untuk proyek-proyek tersebut Perseroan melakukan transaksi serta memiliki tagihan dan kewajiban dalam berbagai mata uang asing. Dengan adanya proyek-proyek tersebut Perseroan memiliki risiko nilai tukar apabila terdapat fluktuasi serta perubahan nilai tukar valuta asing terhadap mata uang Rupiah, yang selanjutnya dapat mempengaruhi pendapatan bersih Perseroan.

#### 6) RISIKO SOSIAL & POLITIK

Gejolak sosial & politik dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini dapat mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri. Apabila hal tersebut terjadi maka dapat mengurangi pekerjaan/proyek Perseroan sehingga dapat mengurangi pendapatan Perseroan, seperti adanya pergantian pejabat pemerintah, pembebasan tanah, demo yang dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi proyek.

## 7) RISIKO BERKURANGNYA PROYEK DARI PELANGGAN BERULANG

Penurunan atau tidak adanya usaha yang berulang (repetitif) dari pelanggan utama dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan. Walaupun Perseroan telah mempunyai hubungan baik dengan pelanggannya sehingga mendapat kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan lain oleh pelanggan tersebut, namun tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan menunjuk Perseroan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek yang akan dilaksanakan, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

## II. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM BARU

### FLUKTUASI HARGA PERDAGANGAN SAHAM BARU

Harga pasar saham baru dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan pasar modal dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor berikut ini dapat, diantaranya, meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan Saham Baru setelah PUT I:

- perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis;
- perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan, industri konstruksi atau Indonesia;
- perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri konstruksi;
- pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan;
- kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham baru;
- fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia;
- perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- perubahan dalam komitmen modal; dan
- penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan.

**MANAJEMEN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO BERDASARKAN BOBOT DAMPAK RISIKO YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Terdapat perpanjangan perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan PT Bank Panin berdasarkan "Surat Persetujuan Perpanjangan Fasilitas" No. 129/IBD/EXT/15 tanggal 12 Mei 2015, dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Mei 2016.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pertama kali sebagai perusahaan asing dengan nama "Volker Aaneming Maatschappij N.V." yang kemudian dinasionalisasi menjadi Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.62 Tahun 1961 pada tanggal 29 Maret 1961, serta diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.83 Tahun 1961 dan Tambahan Lembaran Negara No.2217, yang berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961, dan Perseroan pada saat itu berkedudukan di Jakarta.

Setelah dinasionalisasi Perseroan kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Waskita Karya berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 15 Maret 1973 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 50 tanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan surat keputusannya No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta dibawah No. No.3062 dan 3063 tanggal 27 Agustus 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tanggal 13 November 1973 Tambahan No. 822.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali dirubah, dengan perubahan terakhir dimuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana salinan aktanya sedang dalam proses pembuatan oleh notaris berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 30/Ket/Not/IV/2015 tanggal 24 April 2015 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian beberapa peraturan khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK NO. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak dan Entitas Asosiasi per tanggal 31 Desember 2014:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
<b>Entitas Anak</b>					
1.	PT Waskita Sangir Energi	Energi	85,00%	2013	belum beroperasi
2.	PT Waskita Toll Road	Pengusahaan Jalan Tol	99,99%	2014	belum beroperasi
3.	PT Waskita Beton Precast	Industri pabrikasi	99,99%	2014	sudah Beroperasi
4.	PT Waskita Karya Realty	Realti	99,99%	2014	belum beroperasi
<b>Entitas Asosiasi</b>					
1.	PT Waskita Bumi Wira	Pengoperasian dan Pengendalian Jalan Tol.	48,00%*	2014	belum beroperasi
2.	PT Citra Waspphotowa	Pengusahaan Jalan Tol	12,50%	2006	belum beroperasi
3.	PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	15,00%	2014	belum beroperasi
4.	PT Jasa Marga Kualanamou Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2014	belum beroperasi

Ket: \*) Persentase kepemilikan Perseroan melalui PT WTR

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan kegiatan usahanya dalam bidang Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selain pengungkapan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir pada akhir subbab ini.

### 2. Riwayat Penawaran Umum Perseroan

Riwayat Penawaran Umum Obligasi yang pernah dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Obligasi (Rp)	Rating	Tenor	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terhutang
<b>PENERBITAN SURAT UTANG</b>					
Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Seri A	53.750.000.000	idBBB	3 tahun	19 November 2006	-
Obligasi I Waskita Karya Tahun 2003 Seri B	46.250.000.000	idBBB	5 tahun	19 November 2008	-
Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Seri A	75.000.000.000	idA	3 tahun	5 Juni 2015	75.000.000.000
Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Seri B	675.000.000.000	idA	5 tahun	5 Juni 2017	675.000.000.000
PUB I Waskita Karya Tahap I Tahun 2014	500.000.000.000	idA	3 tahun	18 November 2017	500.000.000.000
				<b>Total</b>	<b>1.250.000.000.000</b>

Perseroan mendapatkan efektif dari Bapepam-LK pada tanggal 10 Desember 2012 atas Penyataan Pendaftaran No.1024/WK/DIR/2012 tanggal 25 Oktober 2012. Perseroan menawarkan kepada masyarakat atas 3.082.315.000 saham dan mencatatkan Penawaran Umum Perdana Saham di Bursa Efek Indonesia sebesar 9.632.236.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 380 per saham dengan nilai sebesar Rp 1.171.279.700.000,- pada tanggal 17 Desember 2012.

### 3. Izin-Izin Terkait Kegiatan Usaha

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha diatas khususnya dibidang jasa Konstruksi, Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 2000, dimana Perseroan telah memiliki izin usaha sebagai berikut:

- Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-001723-31723-3172-2-00049 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Emiten untuk daftar klasifikasi bidang Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, yang ditetapkan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 16 Juli 2015
- Surat Keputusan Dewan Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN) No: 22/KPTS/LPJK/D/II/2003 tentang penetapan akreditasi kepada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) sesuai dengan Nomor Registrasi yang tercatat pada Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) No. 2-3172-2-05-1-09-001723 dan memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sebagai berikut:

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Dimulai	Atas nama dan No. Registrasi	Tanggal Berakhir	Ditetapkan	Bidang Usaha
1	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 00284768	12 Desember 2013	atas nama Perseroan dengan No. Registrasi 2-3172-3-005-1-09-001723	12 Desember 2015	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Mekanikal
2	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 00284769	12 Desember 2013	atas nama Perseroan dengan No. Registrasi 2-3172-3-005-1-09-001723	12 Desember 2015	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Tata Lingkungan
3	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212109	20 Februari 2015	atas nama Perseroan dengan No. Registrasi 0-3172-006-1-09-001723	10 Desember 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Sipil
4	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0197925	23 Januari 2015	atas nama Emiten anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-06-005-1-09-001723	8 September 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Gedung
5	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0057680	26 Mei 2014	atas nama Perseroan dengan No. Registrasi 0-3172-06-005-1-09-001723	11 Desember 2015	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Gedung
6	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0197894	14 Januari 2015	atas nama Emiten anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-07-005-1-09-001723	8 September 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Bangunan Sipil
7	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212136	26 Februari 2015	atas nama Emiten anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-08-005-1-09-001723	6 November 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
8	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0212484	2 April 2015	atas nama Emiten anggota AKI dengan No. Registrasi 0-3172-09-007-1-09-001723	22 September 2017	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal
9	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 0070605	13 Juni 2014	atas nama Perseroan dengan No. Registrasi 0-3172-09-013-1-09-001723	7 Juli 2015	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, yang tergabung dalam asosiasi APNATEL	Mekanikal dan Elektrikal

Seluruh izin-izin terkait kegiatan usaha yang dimiliki dan dipenuhi oleh Perseroan tersebut di atas juga diharapkan dapat mendukung kinerja usaha Perseroan.

#### 4. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

##### Tahun 2013

Sesuai dengan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 29 tanggal 29 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-03143 tanggal 4 Februari 2013 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007396.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 4 Februari 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1135/L tanggal 28 Maret 2014 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 25 dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan realisasi hasil penawaran umum perdana saham Perseroan yang semula berjumlah 6.549.921.000 (enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu) saham dimana saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan 6.549.920.999 (enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp654.992.100.000,00 (enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu Rupiah) menjadi sejumlah 9.632.236.000 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu) saham dimana saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan 9.632.235.999 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp963.223.600.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	68,000005388
- Masyarakat*	3.082.315.000	308.231.500.000	31,999994601
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.632.236.000</b>	<b>963.223.600.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.367.764.000	1.636.776.400.000	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>16.367.764.000</b>	<b>1.636.776.400.000</b>	<b>100,00000000</b>

*\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%*

##### Tahun 2014

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 13 Agustus 2014, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-05114.40.21.2014 tanggal 13 Agustus 2014 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081504.40.80.2014 Tanggal 13 Agustus 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.41.00065 tanggal 3 September 2014, dimana para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang berasal dari hasil pelaksanaan opsi pembelian saham Seri B sehubungan dengan Program MESOP sebanyak 34.104.100 (tiga puluh empat juta seratus empat ribu seratus) saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nominal sebesar Rp3.410.410.000,00 (tiga miliar empat ratus sepuluh juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan meningkat dari 9.632.236.000 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu) saham dimana saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan 9.632.235.999 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp963.223.600.000,00 (sembilan ratus enam puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah).

juta enam ratus ribu Rupiah) menjadi 9.666.340.100 (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu seratus) saham dimana saham terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dan 9.666.340.099 (sembilan miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu sembilan puluh sembilan) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp966.634.010.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar enam ratus tiga puluh empat juta sepuluh ribu Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,00000001
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	67,76009256
-Dewan Komisaris dan Direksi:			
- Mohamad Hasan	1.838.800	183.880.000	0,01902271
- Agus Sugiono	10.000	1.000.000	0,00010345
- Masyarakat*	3.114.570.300	311.457.030.000	32,22078127
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.666.340.100</b>	<b>966.634.010.100</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.333.659.901	1.633.365.990.100	<b>100,000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>16.333.659.901</b>	<b>1.633.365.990.100</b>	<b>100,000</b>

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

## Tahun 2015

Bahwa pada tahun 2015 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terakhir sesuai dengan Akta Nomor: 46 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0934821 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11. Tahun 2015, tanggal 26 Mei 2015, para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Emiten yang merupakan realisasi hasil Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/MESOP) menjadi Negara Republik Indonesia memiliki sejumlah 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan sejumlah 6.549.920.999 (enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 654.992.099.900,00 (enam ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh sembilan ribu -sembilan ratus Rupiah), dan masyarakat sejumlah 3.364.054.360 (tiga miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 336.405.436.000,- (tiga ratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu Rupiah). Berdasarkan perubahan tersebut, komposisi dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A Dwiwarna	1	100	0,000000003846
Seri B	25.999.999.999	2.599.999.999.900	99,999999996154
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>2.600.000.000.000</b>	<b>100,000000000000</b>
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
Saham Seri A Dwiwarna			
- Negara Republik Indonesia Seri A	1	100	0,000000010

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Saham Seri B			
- Negara Republik Indonesia Seri B	6.549.920.999	654.992.099.900	66,067553743
- Masyarakat*	3.364.054.360	336.405.436.000	33,932446247
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>9.913.975.360</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00000000</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A Dwiwarna	-	-	-
Seri B	16.086.024.640	1.608.602.464.000	100,00000000
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>16.086.024.640</b>	<b>1.608.602.464.000</b>	<b>100,00000000</b>

\*) kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
1. Mohamad Hasan	4.327.900	432.790.000	0,0436545
2. Arif Baharudin	5.587.700	558.770.000	0,0563619
3. M. Choliq	16.202.200	1.620.220.000	0,1634279
4. Nyoman Wiryana A	1.199.700	119.970.000	0,0121011
5. Desi Arryani	14.445.100	1.444.510.000	0,1457044
6. Agus Sugiono	3.796.500	379.650.000	0,0382944
7. Tunggul Rajagukguk	14.445.100	1.444.510.000	0,1457044
8. Adi Wibowo	14.341.600	1.434.160.000	0,1446604
<b>Jumlah saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian</b>	<b>74.345.800</b>	<b>74.345.800.000</b>	<b>0,7499090</b>

## 5. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana salinan aktanya sedang dalam proses pembuatan oleh notaris berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 30/Ket/Not/IV/2015 tanggal 24 April 2015 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut :

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Mohamad Hasan
Komisaris	: Arif Baharudin
Komisaris Independen	: Muhammad Aqil Irham
Komisaris	: Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris Independen	: Viktor S. Sirait
Komisaris	: Raden Agus Sartono

### Direksi

Direktur Utama	: M. Choliq
Direktur Independen	: Tunggul Rajagukguk
Direktur	: Agus Sugiono
Direktur	: Desi Arryani
Direktur	: Adi Wibowo
Direktur	: Nyoman Wiryana Adnyana

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN. Sesuai Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: KEP-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan, Perseroan memiliki direksi tidak terafiliasi yang diangkat sesuai dengan Akta No.57 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dibawah No.AHU-54929.AH.01.02.Tahun 2012.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### Dewan Komisaris



**Mohamad Hasan**  
**Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun, Lahir di Bandung, 9 Mei 1953.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik di bidang Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1977; Magister bidang Hydraulic Engineering dari IHE Delft University, Belanda pada tahun 1980; dan Doktor bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bogor pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak bulan Oktober tahun 2012 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum (2012–2014). Komisaris Perseroan (Agustus 2012 – Oktober 2012), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum (2011-2012), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum (2010-2011), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Departemen Pekerjaan Umum (2008-2010), Direktur Direktorat Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum (2005-2008), Inspektur I, Inspektorat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003-2005), Direktur Bina Teknik, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (2001-2003), Kepala Sub-Direktorat Perencanaan Teknis, Direktorat Sumber Daya Air Wilayah Tengah, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (2001), Kepala Sub-Direktorat Pengembangan Sungai, Waduk & Danau, Direktorat Des Wilayah Tenggara (2000-2001), Kepala Bagian Program & Evaluasi Wilayah Tengah Biro Perencanaan (1999-2000), Kepala Sub-Direktorat Wilayah Tengah I Direktorat Bina Laksana Wilayah Tengah Pengairan (1997-1999), Kepala Sub-Direktorat Perencanaan Umum, Direktorat BPP (1994-1997), Staf Bank Dunia (1989-1994), Project Officer PIADP/SSPI (1986-1989), Deputy Chief Counterpart Study Irrigation (1983-1986), Project Officer di Dumoga (1979-1983), Counterpart Project di Dumoga (1978-1979).



**Arif Baharudin**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 48 Tahun, Lahir di Pogalan/Trenggalek, 21 Maret 1967.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1991. Master of Bussines Administration dibidang keuangan dari Daniels College of Business, University of Denver, Colorado, USA pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2011 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) (2013-sekarang), Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia *Infrastructure Fund*, Jakarta (2010–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Anggota *Board of Directors International Rubber Consortium Limited* (IRCo) Bangkok (2010-2012), Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2011 – 2013), Komisaris PT Kaltim Industrial Estate (2009-2012), Direktur Barang Milik Negara II, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (2009-2011), Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2008-2009); Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan (2006-2008).



**Muhammad Aqil Irham**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 46Tahun, Lahir di Kotabumi, 11 Desember 1969.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Aqidah dan Filsafat dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan, Lampung pada tahun 1992, Magister bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 2010 dan Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2015.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Dosen Mata Kuliah Sosiologi Politik Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2007-sekarang), Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan & Manajemen Pengembangan Komunitas di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001-sekarang), Lektor Kepala (IV/b) Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2014), Komisaris PT. Hotel Indonesia Natour (2013-2015), Lektor Kepala Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2009), Dosen Mata Kuliah Agama & Politik di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2008-2009), Pembantu Dekan III Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2003-2007), Lektor Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2003), Sekretaris Jurusan Sosiologi dan Politik Islam, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001-2013), Lektor Muda Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (2001), Asisten Ahli Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1999), Dosen Mata Kuliah Sosiologi Agama di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1997-1998), Asisten Ahli Madya Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1997), Staf Sub Bagian Umum Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung (1996), Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung (1995-2000), Staf Balai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung (1994), Sekretaris Pribadi Pembantu Rektor I, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung (1994).



**Danis Hidayat Sumadilaga**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 54 Tahun, Lahir di Jakarta, 28 Oktober 1960.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 1985, Magister bidang *Transportation and Highway Engineering* dari University of New South Wales, Australia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan (2014-sekarang), Kepala Pusat Komunikasi Publik (2013-2014), Kepala Pusat Pengolahan Data (2010-2013), Direktur Bina Teknik Ditjen Bina Marga (2007-2010), Kepala Subdit Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Kota Metropolitan Ditjen Bina Marga (2005-2007), Kepala Subdit Penganggaran dan KLN Ditjen Bina Teknik Ditjen Prasarana Wilayah (2001-2005), Analis Kebijakan Pada Asisten Deputy Urusan Jalan (1999-2001), Pemimpin Proyek Pembangunan Jalan Layang dan Jembatan Pasteur Cikapayang – Surapati (1998-1999), Pemimpin Bagian Proyek Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan Perkotaan Ditjen Bina Marga (1993-1998), Pengawas Teknik Bagian Proyek Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Kota (1992-1993), Project Officer Project Management Unit-RCUTP (1991-1992), Kasubsi Pengolahan Data Subdit Wilayah Timur (1991-1991), Pengawas Lapangan Proyek Ps.Minggu-Depok (1987-1988), Asisten Project Officer Project Management Unit-RCUTP (1985-1987), Staf Direktorat Pembinaan Jalan Kota (1985).



**Viktor S. Sirait**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, 41 Tahun, Lahir di Porsea-Toba Samosir, 17 Oktober 1974.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung, Bandung pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mitra Taruli Perkasa (2012-sekarang), Direktur Utama PT Hexindo Multi Utama (2011-sekarang), Project Manager PT Pharma Kasih Sentosa (2008-2010), Project Manager PT Maevi Citra Mandiri (2004-2008), Koordinator Project PT Prakarsa Enviro Indonesia (2002-2004), Staff Eksekutif Nasional WALHI (2000-2002).



**Raden Agus Sartono**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, 54Tahun, Lahir di Purworejo, 30 Oktober 1961.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1987. Magister bidang *Master of Business Administration* dari North Carolina, Amerika Serikat pada tahun 1993. Doktor bidang *Social Science and Economic* dari Innsbruck University, Austria pada tahun 2004.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2015 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Saat ini menjabat sebagai Deputy Menko Bidang Pendidikan, Agama, Pendidikan Tinggi dan Ristek, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014-sekarang), Komisaris Utama PT Barata Indonesia (Persero) (2013-sekarang), Anggota Komite Audit, Universitas Gadjah Mada (2013-sekarang), Profesor Keuangan: Capital Asset Pricing, Dividend Policy, & Financing Decision & Derivatives, Fakultas Bisnis & Pemerintah, University of Canberra, Australia (2008-sekarang), Deputy Menko Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2010-2014), Ketua Forum Education for All (EFA), Republik Indonesia (2010-2014), Dosen International Financial Management Program Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada (2010-2012), Dosen Financial Management Program Sarjanan dan Master of Business Administration, Universitas Gadjah Mada (2010-2012), Member of the South East Asia Minister of Education Organisation (SEAMEO) (2010-2010), Co-chair of Steering Committee of International Task Force on Teachers for EFA, UNESCO (2009-2011), Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2010), Pejabat Senior & Focal Point South East Asia Minister of Education Organisation (SEAMEO), Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2008-2010), Profesor Keuangan, Fakultas Bisnis & Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (2008-2010), Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2008-2009), Pendidikan & Kebudayaan Atase di Kedutaan Republik Indonesia, Canberra, Australia (2007-2008), Ketua Asosiasi Alumni Universitas Gadjah Mada, Cabang Canberra, Australia (2007-2008), Koordinator Proyek Pelatihan Analisis Kredit, Kerjasama antara Pusat Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada & PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (2006), Anggota Komite Investasi Reksa Dana Gadjah Mada, Kerjasama antara Manajemen Aset Niaga PT. Bank Niaga, Tbk & Universitas Gadjah Mada (2005-2006), Sekretaris Eksekutif dan Asisten Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi dan Keuangan, Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen Advance Financial Management di Program Master Manajemen, Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen Financial Management & International Finance di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (2004-2006), Dosen International Finance di Institusi Keuangan Leopold-Franzens University of Innsbruck, Austria (2003-2004), Direktur Eksekutif Small & Medium Enterprises Development Centre (SMEDC), Universitas Gadjah Mada (2000-2001), Sekretaris Proyek Quality for Undergraduate Education (QUE), Program Studi di Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Disponsori oleh The World Bank (1997-2001), Dosen Advance Financial Management di Program Master Manajemen Universitas Gadjah Mada (1995-2001), Dosen Investment & Portfolio Theory di Program Internasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (1999-2000), Dosen Investment & Portfolio Theory, Derivatives Instrument di Program Master Science Universitas Gadjah Mada (1998-2001), Dosen International Financial Management di Program Master Manajemen & Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1995-2000), Sekretaris Inter University Centre (IUC) Studi Ekonomi di Program Master Manajemen Universitas Gadjah Mada (1998-1999).

Direksi



**M. Choliq**  
**Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, 62 Tahun, lahir di Gresik, 12 Desember 1952.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana jurusan Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya pada tahun 1979. Magister Manajemen jurusan Manajemen Internasional dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2008 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2001-2006), Ketua Tim Pelaksana Privatisasi PT Adhi Karya (Persero) (2003-2004), Kepala Divisi Keuangan Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1999-2001), Manajer Treasury Divisi PTI&T Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1998-1999), Staf Penerbitan Obligasi II Merangkap Analisis Keuangan Divisi (1998-1999), Spesialis Bidang Investasi Pada Divisi POPU & Divisi P2U PT Adhi Karya (Persero) (1997-1998), Manajer Pengembangan Sistem Pada Divisi PTI&T PT Adhi Karya (Persero) (1997-1998), Kepala Divisi PTI&T Kantor Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1997-1998), Manajer Pengembangan Sistem Informasi Divisi SIM & T.K.Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1996-1997), Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen & Treasury PT Adhi Karya (Persero) (1996-1997), Kepala Biro Sistem Informasi Manajemen Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1995-1996), Kepala Bagian Jasa Konstruksi Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1994-1995), Kepala Bagian Manajemen Informasi Sistem Pusat PT Adhi Karya (Persero) (1993-1995), Kepala Bagian Pengendalian Jasa Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) (1991-1995), Kepala Biro Pengendalian PT Adhi Karya (Persero) (1991-1995), Wakil Kepala Biro RPP PT Adhi Karya (Persero) (1989-1991), Staff Biro Engineering PT Adhi Karya (Persero) (1987-1989), Bagian Teknik Unit usaha VIII Kalimantan Barat PT Adhi Karya (Persero) (1982-1986), Re Proyek Jalan AWCAS D.I. Ketapang PT Adhi Karya (Persero) (1981-1982), Kepala Proyek Jembatan Penghubung Stasiun PT Adhi Karya (Persero) (1980-1981), Re Proyek Jembatan Sungai Landak PT Adhi Karya (Persero) (1980-1981), Kepala Proyek PTPT Air Putih PT Adhi Karya (Persero) (1979-1980), Re Proyek Instalasi Pipa P.A.B PT Adhi Karya (Persero) (1979 -1980), Re Proyek Jembatan JAM SU KIAU PT Adhi Karya (Persero) (1979-1980).



**Tunggul Rajagukguk**  
**Direktur Keuangan (Independen)**

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun, lahir di Pematang Siantar, 28 Agustus 1962.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 1988. Magister Manajemen jurusan Keuangan dan Perbankan dari Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan (2011–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2009-2011), Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama; menangani Manajemen Risiko dan *Trade Finance* (2008-2009), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dengan jabatan terakhir *Senior Vice President*, Kepala Bagian Manajemen Kredit dan Properti, Sistem Prosedur dan Kepatuhan (2004-2007), BPPN dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President*, Kepala Divisi Verifikasi Data dan Konsolidasi, Sistem Prosedur dan Kepatuhan, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004), Bank Pesona Kriyadana (BBKU) dengan jabatan terakhir sebagai Kuasa Tim Pengelola Sementara, Kantor Pusat Operasional (1998-1999), Bank Utama dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager*, Kepala Sub Divisi Pengembangan Kredit, Divisi Pengembangan Usaha (1989-1998).





**Agus Sugiono**  
**Direktur Pengembangan & SDM**

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, lahir di Cirebon, 15 Oktober 1960.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1986. Magister bidang Manajemen dari Prasetiya Mulia Business School, Jakarta pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Pengembangan & Sumber Daya Manusia Perseroan (2014–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan (2013-2014), Kepala Departemen Produksi Kantor Pusat (2010-2013), Kepala Departemen Pemasaran Kantor Pusat (2004-2009), Deputy of General Manager Region II Jakarta dan Kalimantan (2002-2004), Kepala Cabang Sumatera Barat-Jambi Regional II (1998-2001), Kepala Bagian Pemasaran di Kantor Cabang I Medan (1995-1998), Quality Assurance Manager di Kantor Cabang I Medan (1995-1998), Kepala Proyek Sub Station and 150 KVA Transmission PLN Percut KIM di Kantor Cabang I Medan (1994-1995), Kepala Proyek Krueng Aceh Irigasi Paket 2 di Unit Aceh Cabang I (1993-1995), Kepala Proyek di Krueng Aceh Paket E-2 Flood Control Unit Aceh Cabang I (1992-1993), Kepala Proyek Irigasi Arakudo ICB-3 Medan (1990-1992), Kepala Proyek Irigasi Namu Simura-mura Medan (1988-1990), Staf Teknik di Proyek Irigasi Simalungun Kantor Cabang Medan (1987-1988). Staf Teknik Bah Bolon Flood Control di Cabang Medan (1987), Staf Teknik di Kantor Cabang Medan (1987).



**Desi Arryani**  
**Direktur Operasi I**

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, lahir di Jakarta, 29 Desember 1962.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada tahun 1987. Magister Management Prasetiya Mulya, Jakarta jurusan Manajemen Strategik pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Direktur Operasi I Perseroan (2013–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi II Perseroan (2011–2012), Kepala Divisi III – Jakarta (2010-2011), Kepala Divisi II – Jakarta (2009-2010), Kepala Divisi Sipil – Jakarta (2008-2009), Kepala Divisi III – Jakarta (2005-2008), Wakil Kepala Wilayah III – Surabaya (2002-2005), Kepala Cabang Nusa Tenggara Barat Wilayah VI di Mataram (1997-2001), Kepala Proyek Lanjutan Pembangunan Jalan Munggu – Nyanyi Kabupaten Tabanan (1996), Kepala Proyek Lanjutan Pembuatan Bak Penampungan Air Bantar Goyangan Kabupaten Klungkung (1996), Kepala Proyek Pembuatan Revetment Pantai Pengembangan di Negara Kabupaten Jembrana (1996), Kepala Proyek Pipa Nusa Penida 4 (1995), Kepala Proyek AB Guyangan 3 (1995), Kepala Proyek Lanjutan Pembangunan Bak Penampungan Air (1995-1995), Kepala Proyek Pipa Ubud (1994), Kepala Proyek Dermaga Perikanan Benoa (1994), Kepala Proyek Jembatan Tukad Ayung (1994), Kepala Proyek Pipa Nusa Penida 2 (1993), Kepala Proyek Dermaga 1800 m<sup>2</sup> Benoa (1992), Kepala Proyek Irigasi Nusa Penida 1 (1992), Kepala Proyek Dermaga 1400 m<sup>2</sup> Benoa (1992), Kepala Bagian Pemasaran Kantor Cabang IX di Denpasar (1991-1997), Kepala Proyek Talud Benoa (1991), Kepala Proyek Pekerjaan Penyempurnaan Irigasi Sabah Paket UU Buleleng (1991), Staff Teknik Kantor Cabang IX di Denpasar (1991), Staff Teknik/Engineering Proyek JIA Sukarno-Hatta Tahap II Cabang IV Jakarta (1989-1990), Staff Penganggaran Urusan Proyek Gedung (1987-1989).



**Adi Wibowo**  
**Direktur Operasi II**

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun, lahir di Yogyakarta, 4 April 1959.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Direktur Operasi II Perseroan (2012 – sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi I Kantor Divisi I (2008-2012), Wakil Kepala Divisi I Kantor Divisi Gedung (2007-2008), Kepala Bagian Pengendalian III Kantor Divisi I (2004-2007), Kepala Bagian Perintisan II Kantor Pusat Biro PPH (2002-2004), Kepala Bagian Perintisan III Kantor Pusat Biro PPH (2002), Kepala Bagian Pemasaran Kantor Wilayah V (2001-2002), Kepala Bagian Pemasaran Kantor Wilayah III (1998-2001), Kepala Proyek - Proyek Menara Proteksi (1997-1998), Kepala Proyek - Proyek Puri Ratna Sahid Jakarta (1996-1997), Kepala Proyek - Proyek Bored Pile, DiaphragmWall & Steel Manara (1995-1996), Kepala Proyek - Proyek BDN Center Jakarta (1995), Kepala Proyek - Proyek Westwood Tower & Apartemen Kedoya Jakarta (1995), Pelaksana Utama Proyek Gedung A, B dan Podium pada RIKOPERBI tahap I Jakarta (1992-1995), Kepala Seksi Teknik Adkon Proyek Shangri-La Hotel (1991-1992), Kepala Seksi Teknik Adkon Proyek Pelabuhan Tanjung Priok (1990-1991), Pelaksana Muda Proyek Gedung Instalasi Radio Metalurgi (RMI) (1989-1990), Pelaksana Muda Proyek JIA Tahap II (Tipe A) (1988-1989), Staf Teknik Proyek JIA Tahap II (Tipe A) (1988).



**Nyoman Wirya Adnyana**  
**Direktur Operasi III**

Warga Negara Indonesia, 51 Tahun, lahir di Singaraja, 23 September 1963.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana dibidang Teknik Sipil dari Universitas Udayana, Balipada tahun 1988. Magister bidang Manajemen dari Prasetya Mulia, Jakarta pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Operasi III Perseroan (2015–sekarang). Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Gedung (2014-2015), Kepala Divisi Regional II (2013-2014), Kepala Divisi VI (2011-2013), Asisten Direksi Bidang Operasional (2010-2011), Wakil Kepala Divisi II (2009-2010), Kepala Bagian Perintisan (2005-2008), Kepala Cabang Pemasaran (2005), Kepala Cabang Bagian Perintisan (2005-2006), Kepala Cabang Pemasaran (2002-2004), Kepala Bagian Perintisan I, Wilayah I (2001-2002), Kepala Bagian P3 Kantor Wilayah II (1999-2000), Kepala Bagian P3 Kantor Wilayah IV (1997-1998), Kepala Bagian Pemasaran Kantor Wilayah IV (1997), Kepala Proyek Bendung Sumi dan Perlengkapannya (1996-1997), Kepala Proyek Pengembangan Irigasi Desa Kabupaten Buleleng (1995-1996), Kepala Proyek Rehabilitasi Dermaga di Pelabuhan Celukan Bawang (1995-1996), Kepala Proyek Bendung Grogak Tahap II (1995-1996), Kepala Proyek Bendung Kambaniru (1992-1995), Kepala Proyek Jalan Amahai - Masohi - Pulau Seram (1991-1992), Kepala Proyek Jembatan Paket 43/1 (1990-1991), Kepala Proyek Jembatan Wai Kamal / Le Wai Tene Wai Ru (1989-1990), Kepala Proyek Jembatan Wai Noa – Ruata (1989-1990), Kepala Proyek Proja Jalan Makariki – Slaeman (1989-1990), Pelaksana Madya Proja Waepare - Larantuka Flores Timur (1988-1989).

### Remunerasi

Prosedur dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi pada 2014 dilakukan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Bentuk Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan (selain gaji) mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Remunerasi, yaitu gaji dan tunjangan lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp7.193.160.714, Rp5.304.714.286, dan Rp3.750.965.893, dan Direksi per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp17.934.714.286, Rp14.941.585.714 dan Rp10.792.772.666.

### Komite Audit dan Piagam Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi BUMN (“Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006”) dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-463/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

("Peraturan Bapepam dan LK no. IX.I.5"), berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.04/SK/WK/DK/2015 tanggal 28 April 2015, perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit. Komisaris Perseroan membentuk Komite Audit, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Viktor S Sirait  
Anggota : R Agus Sartono  
Anggota : Mohammad Danial, SE, Ak, MM  
Anggota : Agus Suparto, SE, Ak

Masa tugas Anggota Komite Audit adalah 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pengangkatan Komite Audit Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5.

**Mohammad Danial, SE, Ak, MM**

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, lahir di Jakarta 24 Juni 1962.

Menyelesaikan pendidikan Diploma 3 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), BPLK Departemen Keuangan RI Jakarta pada tahun 1984. Sarjana di bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1993. Sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Magister Manajemen jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Padjajaran pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2012 dengan masa jabatan 2 (dua) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Staf Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mucharam & Amron, Instruktur Manajemen Risiko untuk BSMR-BI PT Bintang CIBA Kreasi (BICKA), Anggota Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan (2010), Anggota Komite Audit PT Jakarta Propertindo (BUMD Provinsi DKI Jakarta), Anggota Komite Risiko & Asuransi Perseroan, Instruktur Manajemen Risiko untuk BSMR-BI PT Bintang CIBA Kreasi (BICKA), Staf Pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Muhamad Abadan (2006-2010), Direktur Keuangan PT Swabuana Cipta, Instruktur Manajemen Risiko Untuk Perbankan PT Bintang CIBA Kreasi (BICKA) (2005-2006), Staf Anggota Komite Audit PT Krakatau Steel (Persero) Cilegon (2004-2006), Koordinator Teknis Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Arifin Wirakusumah dan Rekan Jakarta (2003-2004), Direktur Keuangan PT Ainul Asep Abadi (2001-2003), Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Timur di Kupang (2000-2001), Ketua Tim Auditor – Deputi Bidang Pengawasan Perminyakan dan Gas Bumi BPKP Jakarta (1988-2000).

**Agus Suparto, SE, Ak**

Warga Negara Indonesia, 46 Tahun, lahir di Yogyakarta 31 Agustus 1967.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1993. Master of Business Administration dari International University of Japan (IUJ) pada tahun 1999.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak 2012 masa jabatan 2 (dua) tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Usaha Akuntan Publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan(2010-sekarang), Kepala Bidang Pemeriksaan Usaha Akuntan Publik, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan (2006-2010), Kepala Subdit Pemeriksaan Usaha Akuntan Publik, Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Departemen Keuangan (2002-2006), Staf Pemeriksa Subdit Pemeriksaan Direktorat Asuransi, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), Departemen Keuangan (1993-2002).

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan No. 03/SK/WK/DK/2007 tanggal 22 Mei 2007, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit sejak 2007 adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
4. Memastikan bahwa sudah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
5. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau terhadap hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris.
6. Mengidentifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi :
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perseroan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Laporan Manajemen, dan informasi lainnya
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

- Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal.
  - d. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
  - e. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit oleh auditor internal dan auditor eksternal.
  - f. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris.
  - g. Melaksanakan tugas serta kewajiban sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan.
  - h. Melaporkan kepada Komisaris sebagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
  - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

#### **Komite Risiko dan Asuransi**

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.05/SK/WK/DK/2015 tanggal 28 April 2015 mengenai Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Risiko dan Asuransi, susunan Komite Risiko dan Asuransi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	: M. Aqil Irham
Anggota	: Danis Hidayat Sumadilaga
Anggota	: Tjahjo Winarto
Anggota	: Afif Sulfa

Masa jabatan dari Komite Risiko dan Asuransi adalah 2 (dua) tahun sejak pengangkatan.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Risiko dan Asuransi adalah sebagai berikut:

- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah risiko yang mungkin terjadi.
- Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang jenis dan jumlah asuransi yang perlu ditutup oleh Perseroan.
- Mengikuti tahapan-tahapan proses Manajemen Risiko Perseroan yaitu Identifikasi, pengukuran, penanganan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pengungkapan risiko dan asuransi.
- Melaporkan hasil kegiatannya kepada Komisaris secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

#### **Afif Sulfa**

Warga Negara Indonesia, 48 Tahun, lahir di Palembang, 22 Oktober 1964.

Menyelesaikan pendidikan Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang pada tahun 1991. Magister di bidang Studi Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Anggota Komite Risiko dan Asuransi Perseroan sejak 2012. Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Training Tax Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 2012), sebelumnya menjabat sebagai ketua Jurusan Akuntansi FE UIN Jakarta (2009-2011), Tenaga Ahli pada Review Program Beasiswa S1 dan S2 Pendidikan Kelulusan Akuntansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Depdiknas (2009), Tenaga Ahli pada proyek pemilikan Rumah bagi MBR dengan sistem Keuangan Syariah pada Kementerian Perumahan Rakyat RI Jakarta (2007), Penasihat Akuntansi dan Pajak PT Ciptama Panca Tunggal Jakarta (2006), Wakil Dekan bidang FE-UIA Jakarta (2002), Kepala Administrasi dan Keuangan PT Ista Samudra Congo (1991), Auditor pada KAP Drs. Made Sudarma, Malang (1989)

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubungan dengan telah ditetapkannya POJK No.34 oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana yang diatur dalam POJK tersebut telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

#### **Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal**

Sesuai dengan Peraturan No. IX.1.7, maka berdasarkan surat keputusan direksi No.13/SK/WK/PEN/2011 tanggal 21 Juli 2011, Surat Keputusan Direksi No.28/SK/WK/PEN/2012 tanggal 26 September 2012, Surat Keputusan Direksi No.29/SK/WK/PEN/2012 tanggal 28 September 2012, surat Keputusan Direksi No.06/SK/WK/PEN/2014 tanggal 01 April 2014 serta Surat Keputusan Direksi No.46/SK/WK/PEN/2014 tanggal 23 Desember 2014 perihal Penetapan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Direksi Perseroan membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawas Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua	: Jonni Hutahaeen, sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern
Anggota	: Ir. Sunu Hartanto, sebagai Auditor Teknik I, Satuan Pengawasan Intern
	Ir. Budi Sulisty, sebagai Auditor Teknik II, Satuan Pengawasan Intern
	Dedi Suhatri Amir, S.E., sebagai Auditor Keuangan I, Satuan Pengawasan Intern
	Tata Taufik, S.E., sebagai Auditor Keuangan II, Satuan Pengawasan Intern
	Tyas Trichayani, S.E., sebagai Auditor Sistem Satuan Pengawasan Intern



Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan No. 20/SK/WK/2011 tanggal 24 Oktober 2011, Tanggung Jawab Tugas, dan Wewenang Unit Audit Internal sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal sejak 2011 adalah:

1. Menyusun program kerja audit tahunan (PKAT) dan *schedule* pelaksanaan audit.
2. Melakukan audit atas kegiatan usaha secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan di unit bisnis/unit kerja.
3. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dengan tembusan kepada Komisaris.
4. Membuat konsep petunjuk tindak lanjut untuk diteruskan ke Direktur Utama.
5. Secara berkala membuat Laporan Rangkuman (register) Tindak Lanjut Hasil Audit operasional dari Auditee.
6. Sebagai counterpart kegiatan audit eksternal dan mengkoordinir hasil tindak lanjut dari auditee.
7. Melaksanakan kegiatan strategis lainnya yang terkait dengan pengawasan intern.

Bahwa sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Emiten sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Shaam Tahunan No. 83 tanggal 24 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana salinan aktanya sedang dalam proses pembuatan oleh notaris berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 30/Ket/Not/IV/2015 tanggal 24 April 2015 sehingga belum diberitahukan atau dimohonkan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Dewan Komisaris Emiten belum mengangkat jabatan Ketua Komite Audit.

### Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan No.IX.I.4 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 35/SK/WK/PEN/2014 tertanggal 13 Oktober 2014 perihal Penetapan Pejabat Struktural dan Fungsional Anak Perusahaan dan Unit Kerja/Bisnis di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Perseroan telah mengangkat Antonius Yulianto Nugroho sebagai Sekretaris Perusahaan.

Fungsi jabatan Sekretaris Perusahaan adalah membantu Direktur Utama dalam Menyelenggarakan kegiatan dibidang Tata Usaha Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Pengelolaan Gedung Kantor Pusat, dan Perlengkapan Perusahaan.

Bidang tugas Sekretaris Perusahaan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun alamat Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

**Antonius Yulianto T.N**  
 Gedung Waskita  
 Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia  
 Telp. (021) 8508510  
 Faks. (021) 8508506  
 Email: anton@waskita.co.id

## 6. Sumber Daya Manusia

### Perseroan

#### Menurut Jenjang Pendidikan

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Strata 1 & 2	696	632	563
Diploma (D3)	154	150	153
SLTA dan sederajat	275	295	309
<b>Jumlah</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	14	16	16
Wakil Kepala Divisi	4	3	1
Kepala Cabang	11	13	13
Staf Ahli	13	3	4
Kepala Bagian Pusat, Wilayah Divisi Proyek	67	65	68
Kepala proyek tipe A / B / C	149	147	140
Kepala Lapangan Proyek	32	37	28
Kepala Seksi Proyek	208	173	158
Pelaksana Proyek	164	183	192
Staf	456	432	383
Masa Persiapan Pensiun	1	5	22
<b>Jumlah</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

### Menurut Jenjang Usia

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
46 - 55 tahun	424	389	363
36 - 45 tahun	286	310	352
26 - 35 tahun	312	258	210
19 - 25 tahun	103	120	100
<b>Jumlah</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

### Menurut Status Kompetensi

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Teknik	848	817	781
Non Teknik	277	260	244
<b>Jumlah</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

Catatan:

- Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

### Menurut Status Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Pegawai Tetap	556	489	454
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	395	410	378
Pegawai Tidak Tetap	174	178	193
<b>Jumlah</b>	<b>1.125</b>	<b>1.077</b>	<b>1.025</b>

Catatan:

- Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

### WSE

### Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2014
Strata1& 2	5
Diploma (D3)	-
SMU dan sederajat	2
SLTP dan SD	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	3
Pelaksana Proyek	1
Staf	3
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

### Menurut Jenjang Usia

Keterangan	2014
> 55 tahun	-
46 - 55 tahun	2
36 - 45 tahun	2
26 - 35 tahun	1
18 - 25 tahun	2
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

### Menurut Status Kompetensi

Keterangan	2014
Teknik	2
Non Teknik	5
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

### Menurut Status Kontrak

Keterangan	2014
Pegawai Tetap	3
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-
Pegawai Tidak Tetap	4
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

## WTR

### Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2014
Strata1& 2	7
Diploma (D3)	-
SMU dan sederajat	-
SLTP dan SD	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	6
Pelaksana Proyek	-
Staf	1
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

### Menurut Jenjang Usia

Keterangan	2014
> 55 tahun	-
46 - 55 tahun	4
36 - 45 tahun	2
26 - 35 tahun	1
18 - 25 tahun	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

### Menurut Status Kompetensi

Keterangan	2014
Teknik	5
Non Teknik	2
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

*Catatan:*

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

### Menurut Status Kontrak

Keterangan	2014
Pegawai Tetap	7
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-
Pegawai Tidak Tetap	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

*Catatan:*

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

## WBP

### Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2014
Strata1& 2	31
Diploma (D3)	1
SMU dan sederajat	2
SLTP dan SD	-
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	16
Pelaksana Proyek	6
Staf	12
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

### Menurut Jenjang Usia

Keterangan	2014
> 55 tahun	1
46 - 55 tahun	14
36 - 45 tahun	3
26 - 35 tahun	13
18 - 25 tahun	3
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

### Menurut Status Kompetensi

Keterangan	2014
Teknik	24
Non Teknik	10
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

*Catatan:*

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

### Menurut Status Kontrak

Keterangan	2014
Pegawai Tetap	21
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	9
Pegawai Tidak Tetap	4
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>

*Catatan:*

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.

### WKR

### Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2014
Strata1& 2	3
Diploma (D3)	1
SMU dan sederajat	-
SLTP dan SD	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

### Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	2014
Kepala Departemen dan Kepala Divisi	2
Pelaksana Proyek	-
Staf	2
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

### Menurut Jenjang Usia

Keterangan	2014
> 55 tahun	1
46 - 55 tahun	1
36 - 45 tahun	1
26 - 35 tahun	1
18 - 25 tahun	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

### Menurut Status Kompetensi

Keterangan	2014
Teknik	2
Non Teknik	2
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah engineering, misalnya teknik sipil, arsitektur atau mesin.
- ii. Pegawai Non Teknik adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya adalah non engineering misalnya manajemen, hukum, akuntansi, atau K3LM.

### Menurut Status Kontrak

Keterangan	2014
Pegawai Tetap	4
Pegawai Tetap Unit Kerja/Bisnis	-
Pegawai Tidak Tetap	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>

**Catatan:**

- i. Pegawai Tetap (PT) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, yang pengelolaan dan pembinaannya secara langsung dilakukan oleh Kantor Pusat.
- ii. Pegawai Tetap Unit (PTU) adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit Bisnis, yang pengelolaan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Unit Bisnis.
- iii. Bahwa pegawai seluruh WKR merupakan pegawai milik Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 19/SK/WK/PEN/2013 tentang Penempatan Pegawai Unit Kerja/Bisnis & MT 2013-1 tanggal 30 April 2013, Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 20/SK/WK/PEN/2014 tentang Penempatan Temporor Management Trainee 2014 tanggal 27 Juni 2014, dan Keputusan Direksi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk No. 26/SK/WK/PEN/2012 tentang Mutasi Penempatan Pegawai Unit Kerja/Bisnis tanggal 30 Agustus 2012, serta pegawai outsourcing dari PT. Daya Mitra Sarana berdasarkan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja No. 02/P/WKR-DMS/2015 tanggal 2 Januari 2015.

### Kompensasi, Program Kesejahteraan dan Fasilitas

Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan tetap dan kontrak (*outsourcing/honorer*).

Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut :

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK);
- Fasilitas kesehatan (*Medical Check Up*)
- Penggantian Biaya Perawatan kesehatan;
- Asuransi Jiwasraya Dana Pesangon
- Asuransi Dana Pensiun (DPLK)
- Tunjangan pajak penghasilan;

- Tunjangan Pendidikan;
- Tunjangan lokasi;
- Tunjangan tempat tinggal;
- Tunjangan Jabatan;
- Tunjangan Kehadiran;
- Tunjangan Khusus;
- Tunjangan keahlian;
- Tunjangan ketrampilan;
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR);
- Bantuan duka kematian;
- Bantuan Biaya telepon karyawan tertentu;
- Bantuan Pakaian Seragam kerja;
- Rekreasi bersama (*Family Gathering*);
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Jasa produksi sesuai dengan kinerja pegawai;
- Bonus;
- Uang Cuti Besar dan Cuti Tahunan;
- Bantuan kupon makan siang

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas karyawan Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku. Sedangkan Kompensasi untuk Komisaris dan Direksi kewenangannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN dan kuasa yang diberikan oleh RUPS yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin meningkat dimasa mendatang. Untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Materi-materi yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas organisasi, meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan profesionalisme kerja serta membangun sikap mental positif dan mengembangkan daya intelektual pribadi. Secara umum pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan Perseroan bertujuan untuk meningkatkan *"technical and behavioral competencies"*.

### **Pendidikan**

Merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan bergelar (S1, S2 dan S3) didalam negeri maupun luar negeri dengan beasiswa dari Perseroan maupun biaya sendiri. Selama tahun 2014 Perseroan telah mengirimkan 2 orang pegawai untuk menyelesaikan program pendidikan bergelar (S2) di luar negeri dan 16 orang pegawai untuk program pendidikan S1, S2, dan S3 di dalam negeri.

#### **1. Sertifikasi**

Merupakan proses standarisasi kompetensi secara profesional untuk para pegawai dibidangnya masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Perseroan (sertifikasi internal) dan Organisasi Profesi Non Pemerintah (sertifikasi external). Sertifikasi internal yang dilakukan Perseroan untuk tahun 2014 dilakukan untuk bidang-bidang keuangan, proyek dan pelaksana. Sedangkan sertifikasi external diikuti sebanyak 112 pegawai untuk perpanjangan dan pembuatan baru 25 jenis Sertifikasi Keahlian dan Sertifikasi Keterampilan yang dikeluarkan oleh LPJK bekerja sama dengan: HAMKI, HAKI, HATTI, HATHI, KNIBB, K3 KONSTRUKSI, ISI, BNSP, AKLI, HPJI dan lain-lain.

#### **2. Pelatihan**

Merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan. Pelatihan-pelatihan tersebut terdiri dari: orientasi pegawai, *Project Management Body of Knowledge*, manajemen Konstruksi, *Micro Soft Project*, *Value Engineering*, *Construction Drawing*, *Scaffolding*, *Power Plant*, *Power Plant Construction*, *Pipeline construction*, Prosedur-prosedur Perseroan, *Human Capital Management*, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan, Mutu dan Pengamanan, PSAK 50 & 55, Pajak, FIDIC, *Construction Contract Management*, *Financial Management*, *Contractor Risk Management*, *Lead Auditor*, ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa, *Effective Supervisory Management*, *Couching and Counselling*, *Treasury Management*, *Good Corporate Governance*, Pasar Modal, *Negotiation Skill*, *Marketing Plan for Sustainable Competitive*, *Comprehensive Enterprise Risk Management*, *Company Strategic Planning*, *Business Strategic*, *Customer Relationship Management*, *Effective Presentation*. Pada tahun 2014 telah diselenggarakan 7 jenis pelatihan bidang teknik, 84 jenis pelatihan bidang non teknik untuk berbagai jenjang jabatan dengan total jumlah peserta sebanyak 2.334 orang.

### 3. Pengembangan

Merupakan rangkaian program pembelajaran bagi pertumbuhan individu untuk membantu pegawai tumbuh dan berkembang sehingga organisasi selalu siap dalam lingkungan usaha yang kompetitif. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan wawasan, teknologi dan pandangan-pandangan yang baru dalam mempersiapkan pegawai pada jabatan yang akan diproyeksikan kepadanya. Program pengembangan yang dilakukan Perseroan meliputi *Leadership Development Program for Superintendent, Project manager, Junior manager, Middle Manager and Directorship program*. Materi didalam pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan kepada para peserta mengenai praktek-praktek kepemimpinan. Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta mampu menunjukkan sikap dan perilaku sebagai seorang pemimpin yang efektif. Pada tahun 2014, jumlah pegawai yang mengikuti program ini sebanyak 302 orang.

#### Program Management Trainee

Kemajuan organisasi Perseroan semakin hari semakin meningkat, hal ini tentu saja perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dalam jumlah yang memadai. Sejak tahun 2003, Perseroan telah memulai program *Management Trainee (MT)* yang diselenggarakan secara terpusat dan dikoordinasikan oleh Departemen dan Sistem. Sasaran program MT yaitu tersedianya pegawai berkualitas dalam memenuhi kebutuhan perkembangan organisasi serta untuk melanjutkan regenerasi dalam organisasi.

Peserta program MT yang telah diterima akan diberikan pembekalan untuk langsung ditempatkan dalam proyek. Mereka diberikan program orientasi dan on the job training untuk mengenal sistem, prosedur dan budaya yang ada di Perseroan. Program orientasi dilakukan secara in class maupun melalui outward bound dan pengenalan disiplin secara militer. Selanjutnya mereka akan ditempatkan secara temporer di Unit Kerja/Bisnis selama +/- 5 bulan untuk melihat dan belajar sistem dan prosedur yang telah dipelajari dalam masa orientasi. Perseroan juga melakukan pemantauan dan mentoring, serta evaluasi terhadap pegawai baru dalam on the job training. Selama masa orientasi dan on the job training, para pegawai baru tersebut diberikan penilaian kinerja untuk penetapan diangkat atau tidaknya sebagai pegawai Perseroan.

Berikut rincian jumlah peserta program MT dari tahun sebelumnya:

Angkatan	Jumlah Peserta
2003	13 orang
2004	8 orang
2005	13 orang
2007	24 orang
2008	31 orang
2009	41 orang
2010	64 orang
2011	106 orang
2012	-
2013	93 orang
2014	48 orang

#### Ketenagakerjaan

Adapun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor	Masa Berlaku
1	Perseroan	No.KEP. 186/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2013	20 Desember 2013 s/d 19 Desember 2015

#### Serikat Pekerja

Tenaga kerja Perseroan tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Waskita yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Waskita tertanggal 10 November 1998, yang telah didaftarkan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur No. 107/W26-K5/04/XII/K/1998 Tentang Pendaftaran Serikat Pekerja di Tingkat Perusahaan tertanggal 10 Desember 1998.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki pembatasan atas tenaga kerja asing.

#### Keterangan Tenaga Kerja Asing

Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang tenaga kerja asing yaitu:

Nama TKA	Warga negara	Jabatan	Paspor		IMTA		KITAS	
			No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga	No.	Berlaku Hingga
Paningbatan Allan Austria	Philippina	Quality Control Manager	EB4502430	19-01-2017	KEP.30366/MEN/B/IMTA/2014	07-07-2015	2C11JC0265-N	07-07-2015



### Pengembangan dan Penerapan Sistem

Perseroan terus menerus mengembangkan dan meningkatkan sistem pengelolaan manajemen yang semakin baik dengan penerapan standar-standar yang bersifat internasional maupun regulasi baru. Dari tahun ke tahun Perseroan selalu melakukan monitoring dalam penerapan sistem Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; Sistem Manajemen Pengamanan sesuai regulasi yang diberlakukan sejak tahun 2007 yaitu Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 24 tahun 2007 dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang telah diimplementasikan pada seluruh Unit Kerja/Bisnis. Kegiatan-kegiatan berbagi pengalaman dalam praktek implementasi standar ini telah memperkaya wawasan dan meningkatkan program selanjutnya serta dengan semangat "kaizen" yaitu untuk terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan.

Melalui kegiatan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang terencana dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan dan memenuhi persyaratan jabatan. Dengan semakin meningkatnya kualitas pegawai diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan produktivitas Perseroan. Perseroan senantiasa menempatkan SDM sebagai faktor utama dalam menggerakkan organisasi, oleh karena itu berbagai macam kegiatan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan telah dilaksanakan dalam upaya menjaga dan meningkatkan semangat serta motivasi yang tinggi.

Disamping meningkatkan kemampuan pegawai, Perseroan juga melengkapi peralatan kerja yang semakin baik agar dalam melaksanakan tugas-tugas penting organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien, sesuai tuntutan dalam sistem yang diadopsi, yaitu mempergunakan semua sumber daya sesuai dengan peruntukannya dan menjaganya agar dapat berproduksi secara optimal.

### 7. Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Pengawasan

Diagram Kepemilikan Perseroan Dengan Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Pemegang Saham Perseroan



## Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Entitas Anak

Berikut ini hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak:

Nama	Perseroan	WSE	WTR	WBP	WKR
Mohamad Hasan	KU	-	-	-	-
Muhammad Aqil Irham	KI	-	-	-	-
Viktor S. Sirait	KI	-	-	-	-
Raden Agus Sartono	K	-	-	-	-
Arif Baharudin	K	-	-	-	-
Danis Hidayat Sumadilaga	K	-	-	-	-
M. Choliq	DU	-	-	-	-
Tunggul Rajagukguk	DI	-	-	KU	K
Agus Sugiono	D	-	K	K	-
Nyoman Wiryadnyana	D	-	-	-	-
Desi Arryani	D	-	-	-	-
Adi Wibowo	D	-	-	-	KU
Eman Surahman	-	DU	-	-	-
Yuswar Ibrahim	-	D	-	-	-
Maulana Muhammad Al Hafes	-	K	-	-	-
Herwidiakto	-	-	DU	-	-
Feri Purwandi Seno	-	-	D	-	-
Mokh. Sadali	-	-	D	-	-
Hendrianto Notoesogondo	-	-	KU	-	-
Sapto Santoso	-	-	-	DU	-
Jarot Subana	-	-	-	D	-
Haris Gunawan	-	-	-	D	-
Syafril Nasution	-	-	-	-	-
Darma Putra Wati	-	-	-	-	-
Didit Oemar Prihadi	-	-	-	-	DU
Luki Theta Handayani	-	-	-	-	D
Bambang Budiono	-	-	-	-	D
Deddy Jevri Sitorus	-	-	-	K	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	K	: Komisaris
KI	: Komisaris Independen	DU	: Direktur Utama
D	: Direktur	DI	: Direktur Independen

## 8. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak

### 1. PT Waskita Sangir Energi ("WSE")

#### *Pendirian dan Kegiatan Usaha*

WSE didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 11 Juli 2013 di hadapan Fatiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah menerima pengesahan badan hukum dari Kemenkumham No. AHU-40852.AH.01.01.tahun 2013 tanggal 26 Juli 2013. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000876.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0003619.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006281.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.37361 tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar WSE, maksud dan tujuan WSE adalah melakukan usaha dibidang energi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan,WSE masih dalam tahap pengembangan.

WSE memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 05652-05/PM/1.824.271 tanggal 30 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Pemprov DKI Jakarta.

#### **WSE beralamat di :**

Gedung Waskita, Lt.6, JL.MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

No. Telp: 021 8515550, Faksimili: 021 8515510

### Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham WSE No. 85 tanggal 30 Juni 2014, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris WSE pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Eman Surahman  
Direktur : Yuswar Ibrahim

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Maulana Muhammad Al Hafes

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 13 tanggal 19 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000876.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-0003619.AH.01.03.Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006281.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.04.1.46.37361 tanggal 2 September 2013, struktur permodalan WSE dan susunan pemegang saham WSE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	167.056	167.056.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	35.500	35.500.000.000	85,00%
- PT Shalawat Power	6.264	6.264.000.000	15,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>41.764</b>	<b>41.764.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting WSE yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WSE pada dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 KAP Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 20 Pebruari 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 18 Juli 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2014	2013
Jumlah Aset	81.053	29.626
Jumlah Liabilitas	42.007	22.725
Jumlah Ekuitas	39.046	6.901
Pendapatan Operasional	--	-
Beban Operasional	2.329	700
Laba (Rugi) Operasional	(2.329)	(700)

Total Aset pada 31 Desember 2014 sebesar Rp81.053 juta meningkat sebesar 173,6% jika dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan total aset disebabkan karena peningkatan aset tetap. Total liabilitas 31 Desember 2014 sebesar Rp42.007 juta meningkat sebesar 84,86% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013. Kenaikan liabilitas disebabkan karena meningkatnya utang usaha. Total Ekuitas 31 Desember 2014 sebesar Rp39.046 juta, meningkat sebesar 465,8% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013. Peningkatan ekuitas disebabkan karena meningkatnya tambahan modal saham yang disetor oleh pemegang saham.

Sampai saat prospektus ini diterbitkan, WSE belum beroperasi sehingga belum memiliki Pendapatan, dikarenakan masih tahap pembangunan proyek. WSE menargetkan proyek tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun sehingga bisa beroperasi dan menghasilkan pendapatan operasional. Total Beban Operasional 31 Desember 2014

sebesar Rp2.329 juta meningkat sebesar 232,71% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp700 juta yang disebabkan karena meningkatnya beban operasional WSE seperti meningkatnya beban pegawai (adanya perekrutan pegawai), beban perjalanan dinas ke proyek, beban sewa kantor, beban umum seperti beban tenaga ahli, appraiser, notaris, dan akuntan, serta beban lainnya. Total rugi per 31 Desember 2014 sebesar Rp2.329 juta meningkat sebesar 232,71% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2014. Peningkatan rugi tahun berjalan ini disebabkan karena meningkatnya Beban Operasional WSE.

## 2. PT Waskita Toll Road (“WTR”)

### *Pendirian dan Kegiatan Usaha*

WTR didirikan berdasarkan Akta No. 62 tanggal 19 Juni 2014 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah menerima pengesahan badan hukum dari Kemenkumham No.AHU-14734.40.10.2014 tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No.37 tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan No.AHU-04738.40.21.2014 tanggal 24 Juli 2014.

WTR melakukan usaha dibidang pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, WTR masih dalam tahap pengembangan.

WTR memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 1428/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 tertanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur, yang wajib untuk melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 2 Maret 2020.

### **WTR beralamat di :**

JL.MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.  
No. Telp: 021-851556  
Faksimili: 021-850854

### *Pengurus dan Pengawas*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M. Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0934472 tanggal 25 Mei 2015, serta telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3508938. AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015, Susunan Direksi dan Dewan Komisaris WTR pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Dono Parwoto
Direktur	:	Yoga Nusantara
Direktur	:	Mokh. Sadali

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	:	Hendriato Notoesoegono
Komisaris	:	Agus Sugiono

### *Struktur Permodalan dan Pemegang Saham*

Berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.37 tanggal 24 Juli 2014 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Kemenkumham No. AHU-04738.40.21.2014 tanggal 24 Juli 2014, struktur permodalan WTR dan susunan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	1.200.000	1.200.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	399.999	399.999.000.000	99,99%
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0.01%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	400.000	400.000.000.000	100%
<b>Saham Dalam Portepel</b>	800.000	800.000.000.000	

### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting WTR yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WTR per tanggal 31 Desember 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 5 Pebruari 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>31 Desember 2014</b>
Jumlah Aset	646.023
Jumlah Liabilitas	243.765
Jumlah Ekuitas	300.144
Pendapatan Operasional	-
Beban Operasional	(1.259)
Laba (Rugi) Operasional	(1.259)

### **3. PT Waskita Beton Precast (“WBP”)**

#### **Pendirian dan Kegiatan Usaha**

WBP didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-29347.40.10.2014 tanggal 14 Oktober 2014. Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 60 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-12316.40.20.2014 tanggal 5 Desember 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0127430.40.80.2014 tanggal 5 Desember 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.46.40288 tanggal 26 Januari 2015.

WBP melakukan usaha di bidang industri pabrikan dan telah beroperasi sejak pendirian.

WBP telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 01294-05/PB/P/1.824.271 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta yang wajib didaftar ulang pada tanggal 29 Oktober 2019

WBP beralamat di :

Gedung Graha Dirgantara, Jl. Protokol Halim Perdana Kusuma No.8, Jakarta 13610.

Telepon: 021-29838020

Faksimili: 021-29838025

#### **Pengurus dan Pengawas**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 1 tanggal 6 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Komisaris WBP adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama : Sapto Santoso  
Direktur : Jarot Subana  
Direktur : Haris Gunawan

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Tunggal Rajagukguk  
Komisaris : Agus Sugiono  
Komisaris : Deddy Jevri Sitorus

#### **Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 60 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan WBP dan susunan pemegang saham WBP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	100.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	24.999	24.999.000.000	99,99
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	25.000	25.000.000.000	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	75.000	75.000.000.000	

#### ***Ikhtisar Data Keuangan Penting***

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting WBP yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WBP per tanggal 31 Desember 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal 5 Februari 2015.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2014
Jumlah Aset	1.202.607
Jumlah Liabilitas	500.441
Jumlah Ekuitas	702.166
Pendapatan Operasional	641.931
Beban Operasional	(495.226)
Laba (Rugi) Operasional	141.902

#### **4. PT Waskita Karya Realty (“WKR”)**

##### **Pendirian dan Kegiatan Usaha**

WKR didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-34282.40.10.2014 tanggal 13 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117923.40.80.2014 tanggal 13 November 2014, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.68.40566 tanggal 13 Januari 2015. Perubahan Anggaran Dasar terakhir sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 6 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000414.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 dan telah melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-0001807.AH.01.03. Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003083.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.68.40566 tanggal 13 Januari 2015.

WKR melakukan usaha di bidang industri real estat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, WKR belum beroperasi.

WKR telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 407/24.1.0/31.75.00.000/1.824.271/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.

WKR beralamat di :

Gedung Waskita Lt.2, Jl. MT. Haryono Kav.10 RT 011/ RW 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Telepon: 021-8505049

Faksimili: 021-8198070

## Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 16 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Komisaris WKR adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Didit Oemar Prihadi  
 Direktur : Luki Theta Handayani  
 Direktur : Bambang Budiono

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Adi Wibowo  
 Komisaris : Tunggul Rajagukguk

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS No. 6 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0000414.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 dan telah melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat No. AHU-0001807.AH.01.03. Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003083.AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09.04.1.68.40566 tanggal 13 Januari 2015 struktur permodalan WKR dan susunan pemegang saham WKR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	820.000	820.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
- Perseroan	204.999	204.999.000.000	99,99
- Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	205.000	205.000.000.000	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	75.000	75.000.000.000	

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting WKR yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan WKR per tanggal 31 Desember 2014 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan tertanggal Februari 2015.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2014
Jumlah Aset	204.608
Jumlah Liabilitas	180
Jumlah Ekuitas	204.428
Pendapatan Operasional	0
Beban Operasional	0
Laba (Rugi) Operasional	(686)

## 9. Penyertaan Pada Entitas Asosiasi

Perseroan melakukan investasi di bidang infrastruktur kepada perusahaan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Tahun Penyertaan
PT Waskita Bumi Wira	Pengoperasian dan Pengendalian Jalan Tol	48,00%*	2014	belum beroperasi
PT Citra Waspputowa	Pengusahaan Jalan Tol	12,50%	2006	belum beroperasi
PT Prima Multi Terminal	Perdagangan dan Jasa	15,00%	2014	belum beroperasi
PT Jasamarga Kualanamu Tol	Pengusahaan Jalan Tol	15,00%	2014	belum beroperasi

\* Penyertaan tidak langsung yang diperoleh dari PT WTR

## 10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*)

Sebagai BUMN, Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka menjalin kemitraan dan membina lingkungan. Kementerian BUMN telah memberikan arahan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang pada intinya bertujuan untuk memandu pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN. Perseroan telah mengembangkan PKBL menjadi Program Kemitraan dengan bantuan Pinjaman Modal Kerja, Hibah dan Biaya Operasional serta Program Bina Lingkungan.

Pada tahun 2014, 2013 dan 2012 Perseroan menyisihkan dana untuk unit PKBL sebesar Rp7.361.149.650, Rp0 (Tidak Ada), Rp 6.869.567.764, realisasi anggaran lintas unit PKBL dapat dirinci sebagai berikut:

- Program Kemitraan pada tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp3.680.574.825, Rp0 (Tidak Ada) dan Rp3.439.783.882.
- Program Bina Lingkungan pada tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp3.680.574.825, Rp0 (Tidak Ada) dan Rp3.429.783.882.

Pengadaan pinjaman tambah modal usaha kepada 183 mitra binaan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp8.835.800.000. Pengadaan pinjaman tambah modal usaha kepada 283 mitra binaan tahun 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp2.322.500.000 dan Rp5.437.500.000.

- Hibah berupa pameran pada tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp46.520.000, Rp25.700.000 dan Rp80.905.000.
- Realisasi operasional pada tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp259.035.347, Rp127.373.137 dan Rp141.588.170.
- Realisasi program Bina Lingkungan pada tahun 2014, 2013 dan 2012 adalah sebesar Rp3.456.347.319, Rp1.474.639.964 dan Rp1.255.527.000.

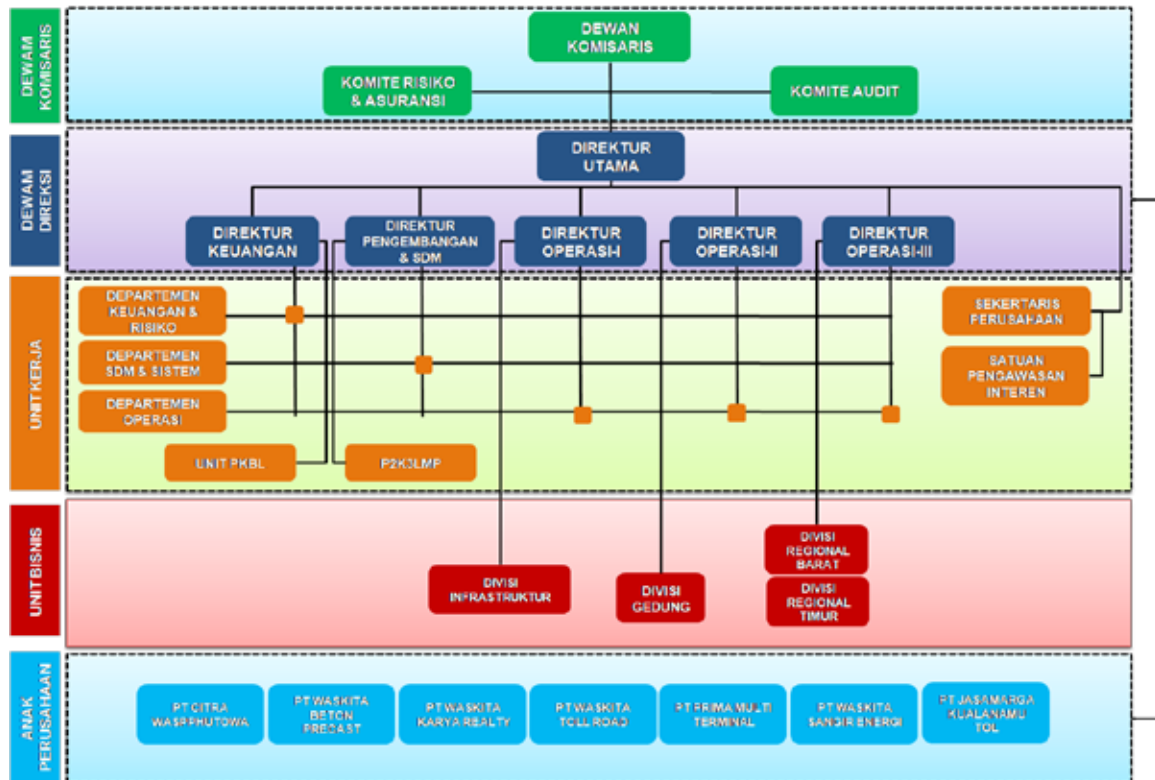
Perseroan juga peduli dan berpartisipasi aktif dalam mitigasi musibah, antara lain dalam “Waskita Peduli Gempa”, dengan mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian dan obat-obatan. Selain itu, secara rutin pada bulan puasa Perseroan menyelenggarakan acara buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada yatim piatu yang berada di sekitar Perseroan. Untuk menambah iman dan taqwa para pegawai dan warga di sekitar Perseroan, setiap bulan diadakan acara pengajian dan oikumene. Perseroan juga mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk meminimalkan kebisingan, jalan kotor, debu, atau hal-hal yang mengganggu ketenangan masyarakat sekitar akibat pelaksanaan proyek, Perseroan selalu berupaya meningkatkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan. Dalam upaya ini, Perseroan telah mendapatkan Sertifikat OHSAS 18001:2007. Disamping itu pada tahun 2011, Perseroan juga melalui unit PKBL telah merealisasikan Program Bina Lingkungan adalah bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, dan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sampai dengan Desember 2014, Perusahaan juga melalui unit PKBL telah merealisasikan Program Bina Lingkungan adalah bantuan bencana alam seperti, banjir di DKI Jakarta dan Tangerang, Erupsi Gunung Sinabung di Medan, dan Erupsi Gunung Kelud di Kediri Jawa Timur, bantuan Pendidikan dan Pelatihan berupa peralatan penunjang aktivitas pendidikan seperti Komputer, Proyektor, bantuan Prasarana Umum seperti pembuatan lapangan volley desa sodong di Banten, penyediaan sarana air bersih empat desa di Lampung, bantuan Sarana Ibadah seperti, Pembangunan Masjid, Gereja, Puradan Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan seperti program Bedah Rumah di Provinsi Banten.

Tanggung jawab sosial perusahaan diwujudkan dengan kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan dengan usaha kecil untuk mengangkat usaha kecil yang merupakan mayoritas usaha di Indonesia, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Demikian pula dengan bina lingkungan sebagai realisasi kepedulian Perseroan terhadap lingkungan hidup yang sehat.



## 11. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



### Sistem Pelimpahan Wewenang Perusahaan

#### 1. Dewan Direksi :

Pada prinsipnya semua pelaksanaan tugas dan wewenang Direksi merupakan tanggung jawab kolegal semua anggota Direksi, sehingga pembagian tugas dan wewenang merupakan alat untuk mencapai pengelolaan dan pengurusan Perseroan yang efektif sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan 07/SK/WK/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perseroan, maka tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

- a. *Direktur Utama* mempunyai tugas dan wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, membawahi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Sekretariat Perusahaan (Sekper).
- b. *Direktur Keuangan* mempunyai tugas dan wewenang :
  1. Melaksanakan pengelolaan di bidang, keuangan, risiko dan akuntansi, perusahaan modal, perencanaan, pengendalian serta pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
  2. Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada dibawahnya.
  3. Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya.
  4. Melakukan pengawasan anak perusahaan
  5. Melakukan pengelolaan unit PKBL.
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- c. *Direktur Pengembangan & SDM* mempunyai tugas dan wewenang :
  1. Melakukan kajian pengembangan bisnis dengan membuat analisis portfolio pengembangan usaha Perseroan, mulai rencana investasi (proyek) dari masing-masing Direktorat, membuat usulan skala prioritas, hingga mempresentasikan dan mendiskusikannya dengan BOD.
  2. Membuat usulan kepada Komisaris dan atau Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan terkait investasi usaha.
  3. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sistem, dan TI.
  4. Melakukan pengawasan Anak Perusahaan
  5. Melakukan pembinaan dan menilai kinerja Departemen yang ada dibawahnya.
  6. Melakukan pengelolaan P2K3LMP
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- d. *Direktur Operasi I* mempunyai tugas dan wewenang :
  1. Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.
  2. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan investasi dibidang Jalan Tol, Beton Precast dan Energi.
  3. Melakukan pengawasan Anak Perusahaan
  4. Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

- e. *Direktur Operasi II mempunyai tugas dan wewenang :*
1. *Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.*
  1. *Melakukan kajian pengembangan bisnis dan investasi dibidang Realty.*
  2. *Melakukan pengawasan anak perusahaan*
  3. *Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.*
  4. *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.*
- e. *Direktur Operasi III mempunyai tugas dan wewenang :*
1. *Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi, serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya.*
  2. *Melakukan pengawasan anak perusahaan*
  3. *Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis/Unit Kerja terkait fungsinya.*
  4. *Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.*

## 12. Aset

### Tanah

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bidang tanah dengan sah, sebagai berikut:

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	Lokasi/Surat Ukur / Gambar Situasi
1	SHGB No. 724, tanggal 29 Maret 1988	2.098	1 Desember 2027	Perseroan	Jl. Jend. MT Haryono No. 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7602/1982 tanggal 7 Oktober 1982
2	SHGB No. 772, tanggal 31 Maret 1989	3.650	19 Desember 2028	Perseroan	Jl. Jend. D.I Pandjaitan No. 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7601/1982 tanggal 7 Oktober 1982
3	SHGB No.592 tanggal 30 Mei 2009	3.155	11 Mei 2026	Perseroan	Ciputat, Kab. Tangerang, Banten sesuai dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 7/Ciputat/2006 tanggal 12 Mei 2006
4	SHGB No. 2001 tanggal 1 Juni 2006	5.798	1 Juni 2036	Perseroan	Desa Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Kabupaten Banda Aceh sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 09/2006 tanggal 30 Mei 2006
5	SHGB No. 2, tanggal 15 Februari 1988	17.340	15 Februari 2018	Perseroan	Desa Kali Jaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 9858/1987 tanggal 29 November 1987
6	SHGB No. 655, tanggal 27 Mei 2003	1.535	8 Mei 2033	Perseroan	Desa Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 168/ Braga/2003 Tgl. 24 April 2003.
7	SHGB No. 1, Tanggal 7 Januari 1992	4.040	28 Desember 2020	Perseroan	Desa Cileunyi Wetan, Kec. Ujungberung, Kab. Bandung, Jawa Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10170/1990 tanggal 19 Oktober 1990
8	SHGB No. 82, Tanggal 20 Oktober 1988	2.013	13 April 2028	Perseroan	Desa Kalirungkut, Kec. Rundut, Kota Surabaya, Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2856 tanggal 20 Juni 1988
9	SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006	1.404	23 November 2026	Perseroan	Desa Jemur Wonosari, Kec. Wonosobo, Kota Surabaya Jawa Timur sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 738/Jemur Wonosari/2006 tanggal 11 September 2006
10	SHGB No. 9, Tanggal 27 Maret 2002	10.909	26 Maret 2022	Perseroan	Desa kwala Tanjung, Kec. Sei Suke Kab. Asahan, Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 05/ Kwala Tanjung/2001 tanggal 23 Oktober 2001
11	SHGB No. 7, tanggal 18 Februari 1993	806	7 Februari 2033	Perseroan	Desa Belakan Olo, Kec. Padang Barat, Kotamadya Padang, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.102 tanggal 28 April 1992
12	SHGB No. 4, Tanggal 10 November 1988	2.511	10 November 2018	Perseroan	Desa Batung Tebal, Kec. Lubuk Begalung, Kab.Padang Pariaman, Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ukur/ Gambar Situasi No. 212 tanggal 22 Januari 1980
13	SHGB No. 302, tanggal 6 Februari 1999	1.385	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 15/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998
14	SHGB No. 303, Tanggal 6 Februari 1999	1.410	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 16/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998
15	SHGB No. 304, Tanggal 6 Februari 1999	1.295	6 Februari 2019	Perseroan	Desa Rintis, Kec. Limapuluh, Kab. Pekanbaru, Riau sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 17/Rintis/1998 tanggal 3 Desember 1998
16	SHGB No.162, Tanggal 7 Oktober 1999	6.980	7 Oktober 2019	Perseroan	Desa Sungai Selincah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 79/s.selincah/1999 tanggal 20 September 1999

No.	No. dan Tanggal Sertifikat	Luas (M <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak	Pemegang Hak	Lokasi/Surat Ukur / Gambar Situasi
17	SHGB No. 01, tanggal 13 November 1987	1.095	13 Oktober 2027	Perseroan	Desa tanjung Baru, kec. Sukarame, Kab. Bandar Lampung, Lampung sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2019/1987 tanggal 16 September 1987
18	SHGB No. 02, tanggal 16 Desember 2004	77.109	15 Desember 2034	Perseroan	Desa Sungai Lais, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 01/sungai lais/2004 tanggal 16 Desember 2004
19	SHGB No. 436, tanggal 1 Maret 1988	1.004	tahun 2028	Perseroan	Desa Sei Raya, Kec. Sei Raya, Kab. Pontianak, Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 7735/1986 tanggal 16 September 1986
20	SHGB No. 60, tanggal 17 Juni 1995	390	17 Mei 2015	Perseroan	Desa Kuripan, Kec. Banjar Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.1249/1994 tanggal 8 Agustus 1994
21	SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007	1.250	26 Januari 2027	Perseroan	Desa Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar Bali sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00224/Sumerta/2006 tanggal 7 Desember 2006
22	SHGB No. 2, tanggal 24 Mei 1997	600	24 Mei 2027	Perseroan	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2341/1997 tanggal 12 Mei 1997
23	SHGB No. 3, Tanggal 13 Desember 1989	1.200	13 Desember 2019	Perseroan	Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung Bali, sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 10327/1989 tanggal 30 November 1989
24	SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003	1.332	20 April 2022	Perseroan	Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 820/AMS/2003
25	SHGB No. 69, 20 Februari 1998	1.495	19 Februari 2018	Perseroan	Desa Ampenan Selatan, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 387/1976 tanggal 18 Oktober 1976
26	SHGB No. 2, tanggal 25 Juni 1997	1.000	25 Juni 2017	Perseroan	Desa Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 270/1996 tanggal 3 Februari 1996
27	SHGB No. 24, Tanggal 24 Oktober 1997	595	24 Oktober 2017	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 1100/1996 tanggal 7 Mei 1996
28	SHGB No. 13, Tanggal 22 Juli 1993	4.830	22 Juli 2023	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 813/1987 tanggal 23 Desember 1987
29	SHGB No. 14, Tanggal 22 Juli 1993	4.800	22 Juli 2023	Perseroan	Desa Oesapa, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, NTT sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 806/1987 tanggal 2 Desember 1987
30	SHGB No. 482, tanggal 17 Maret 1998	3.053	17 Maret 2028	Perseroan	Desa Negeri Lama, Kec. Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Maluku sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo.119/1997 tanggal 5 Februari 1997
31	SHGB No. 541, Tanggal 27 Agustus 1992	2.000	27 Agustus 2017	Perseroan	Desa Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 2727 tanggal 13 Oktober 1980
32	SHGB No. 337, tanggal 15 April 1998	2.508	15 April 2028	Perseroan	Desa Lepo-Lepo, Kec. Mandenga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 806/1994 tanggal 7 Juli 1994
33	SHGB No.548, tanggal 17 Januari 2007	1.881	17 Januari 2027	Perseroan	Desa Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Kota Medan Sumatera Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo.01/Lalang/ 2007
34	SHGB No. 781, tanggal 31 Januari 1990	165	31 Januari 2029	Perseroan	Desa Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 2728 tanggal 13 Oktober 1989
35	SHGB No. 24, tanggal 11 Juni 1993	276	25 Mei 2033	Perseroan	Desa Tikala Ares, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 260/1993 tanggal 6 Maret 1993
36	SHGB No. 5378, tanggal 7 September 1993	1.661	7 September 2013	Perseroan	Desa Rappocini, Kec. Tamalate, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Ukur/Gambar SituasiNo. 1245 tanggal 3 Maret 1993
37	SHGB No. 20403, Tanggal 11 Desember 2014	168	2 Desember 2034	Emiten	Desa Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat UkurNo. 01557/2012 tanggal 11 September 2012
38	SHGB No. 00032 tanggal 22 Januari 2015	70.099	16 Januari 2045	Emiten	Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sesuai dengan surat ukur No. 11/Cibatu/2015 tanggal 11 Januari 2015

Keterangan:

\*) Bahwa sampai dengan tanggal Uji Tuntas Aspek Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Emiten tanggal 4 November 2014, Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 18 Agustus 2014 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makasar atas SHGB No. 5378 tanggal 7 September 1993 atas nama Emiten dan yang terletak di Desa Rappocini, Kec. Tamalate, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan yang mana telah habis masa berlaku hak nya, sedang dilakukan pengurusan perpanjangan jangka waktu.

Perseroan menguasai secara sah atas tanah-tanah yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

No.	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Status Tanah
1.	Akta Jual Beli Tanah No. 263/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	2.137	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.2960/ Ex.Kel.Pegadungan
2.	Akta Jual Beli Tanah No. 264/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	3.306	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/ Ex.Kel.Pegadungan
3.	Akta Jual Beli Tanah No. 265/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	3.303	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/ Ex.Kel.Pegadungan
4.	Akta Jual Beli Tanah No. 266/JB/MA/1991 yang dibuat di hadapan Drs. Satibi Darwis, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat	2.946	Kalideres, Jakarta Barat	Hak Milik Adat No. C.964/ Ex.Kel.Pegadungan

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, berdasarkan Surat Keterangan No. 7/PPAT/ZA/VII/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Zainal Abidin, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 4 November 2014 atas tanah-tanah yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat yang dikuasai Perseroan tersebut di atas sedang dilakukan pengurusan sertifikatnya dan diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2015.

Tanah yang dikuasai oleh WSE adalah sebagai berikut:

No.	Akta Pengalihan	Nama Pemilik Sebelumnya	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Lokasi Tanah
1.	Pengikatan Silih Rugi No. 1 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Same Widodo	11.498	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
2.	Pengikatan Silih Rugi No. 2 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Juhardin	10.297	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
3.	Pengikatan Silih Rugi No. 3 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Busriyal	4.506	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
4.	Pengikatan Silih Rugi No. 4 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Rusdi A.	586	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
5.	Pengikatan Silih Rugi No. 5 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Syafril	5.093	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
6.	Pengikatan Silih Rugi No. 6 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Roslan	5.000	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
7.	Pengikatan Silih Rugi No. 7 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Mahyunar	9.177	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
8.	Pengikatan Silih Rugi No. 8 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Jumaldri	6.870	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
9.	Pengikatan Silih Rugi No. 9 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Roki Eka Saputra	3.235	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W

10.	Pengikatan Silih Rugi No. 10 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Buyuang Ali	3.763	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
11.	Pengikatan Silih Rugi No. 11 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	M. Dasrullah	45.294	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
12.	Pengikatan Silih Rugi No. 12 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Jamar	24.299	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
13.	Pengikatan Silih Rugi No. 13 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Silis Efendi	7.268	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
14.	Pengikatan Silih Rugi No. 14 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Haji Yarman	1.852	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
15.	Pengikatan Silih Rugi No. 15 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Mad Dalip	12.404	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
16.	Pengikatan Silih Rugi No. 18 tanggal 3 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Nyonya Erna	36.776	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
17.	Pengikatan Silih Rugi No. 19 tanggal 3 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Hermawan Doni	14.614	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
18.	Pengikatan Silih Rugi No. 73 tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Atasril	1.780	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
19.	Pengikatan Silih Rugi No. 5 tanggal 5 November 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Mad Dalip	8.976,8	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
20.	Pengikatan Silih Rugi No. 6 tanggal 5 November 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Amrah Udin	598	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
21.	Pengikatan Silih Rugi No. 28 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	M. Dasrullah	19.099	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
22.	Pengikatan Silih Rugi No. 29 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Same Widodo	2.174	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
23.	Pengikatan Silih Rugi No. 39 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Erdi Putra	5.061,754	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W
24.	Pengikatan Silih Rugi No. 40 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Betrisnawati B., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Solok Selatan	Samsuarnis	2.360	Prov. Sumatera Barat, Kab. Solok Selatan, Kec. Sangir, Nagari Lubuk Gadang Tmur, Jorong Letter W

## Bangunan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bangunan, sebagai berikut:

No.	Bangunan	Lokasi	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )
1	Bangunan Gedung Kantor (Kantor Pusat)	Jalan Biru Laut No. 10 RT 009/03 Kelurahan Cipinang Cipedak Jakarta Timur	12.289
2	Bangunan Gedung Kantor	Jalan Biru Laut No. 10A RT 009/03 Kelurahan Cipinang Cipedak Jakarta Timur	1.170
3	Bangunan Kantor	Jalan Asia Afrika No. 55 Bandung, Jawa Barat	824



4	Bangunan Kantor	di Jalan Patriot, Kel. Lalang Kec. Kedan Sunggal, Medan, Sumatera Utara	544
5	Bangunan Kantor	di Jalan Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru, Riau	319
6	Bangunan Mess Pegawai	Jalan Dr. Sutomo No. 96 Pekanbaru, Riau	216
7	Bangunan Kantor	Jl. A. Yani No. 19, Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat	538,54
8	Bangunan Kantor	Jalan Pangeran Antasari Tanjung Baru Kecamatan Sukarame Bandar Lampung, Lampung	256
9	Bangunan	Jalan Imam Bonjol Desa Suka Jaya Kecamatan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat	340
10	Bangunan Kantor	di Jalan A.P Petta Rani Makassar, Sulawesi Selatan	180
11	Bangunan Workshop	Jalan Takdir (Jalan Jurusan Transmigrasi), Bulurokeng, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan;	458
12	Bangunan Kantor	Jalan Mayjend S.Parman No. 28 Kendari, Sulawesi Tenggara	912
13	Bangunan Rumah	Jl. Balaikota No. 5 Kecamatan Wenang Manado, Sulawesi Utara	76.214
14	Bangunan Kantor	Jalan Banteng No. 2, Denpasar, Bali	216
15	Bangunan Kantor	Jalan Adi Sucipto Sui Raya No. 1 Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat	320
16	Bangunan Gudang	Jalan Langko No. 50 Mataram, Nusa Tenggara Barat	225
17	Bangunan	Jalan Leo Watimena Kecamatan T. Amb. Baguala, Ambon, Maluku	351
18	Bangunan Workshop	Jalan Eitari II RT 0036/RW 011 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	280
19	Bangunan Kantor	Jalan Jemursari Selatan II/2-2A, Surabaya, Jawa Timur	1.398
20	Bangunan Kantor	di Jalan Kuripan No. 5, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	390
21	Bangunan Rumah Tinggal	Jl. Timor-Timur No.116, Kupang, Nusa Tenggara Barat	208

#### **Kendaraan Bermotor, Kendaraan Berat, dan Alat-Alat Berat**

##### **Kendaraan Bermotor [waskita/weco to confirm]**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh 39 unit kendaraan bermotor beroda empat dan WSE memiliki 2 unit kendaraan bermotor beroda empat.

##### **Kendaraan Berat**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 48 unit kendaraan berat, berupa *dumpruck*.

##### **Alat-Alat Berat dan Peralatan- Peralatan**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 497 unit alat-alat berat dan Peralatan-Peralatan, sebagai berikut:

No.	Jenis	Jumlah
1	Aggregate Plant	1
2	Alat Ukur	1
3	Asphalt	31
4	Bar Bender & Bar Cutter	4
5	Batching Plant	9
6	Besi Siku	2
7	Crane Tadano	1
8	Compressor	5
9	Channel dan Pipa Kotak	10
10	Cross brace	7
11	Bulldozer	13
12	Excavator	13
13	Gantry	3
14	Generator Set	31
15	Hollow	21
16	Jack Base	3
17	Tower Crane	21
18	Mobil Crane	6
19	Motor Grader	6
20	Mesin Spun Pile	1
21	Non Cetakan	39
22	Pipa Stell Support	2
23	Roller	2
24	Sheefoot Roller	6
25	Stell	8

26	Stone Crusher	13
27	Cone Crusher	3
28	Jaw Crusher	2
29	Roller	18
30	Wheel Loader	21
31	Bar Bender	4
32	Batching Plant	7
33	Boiler	4
34	Cetakan	49
35	Concrete	4
36	Converter	2
37	Grantry Crane	5
38	Mobil Concrete Pump	1
39	Scaffolding	50
40	Slipform	2
41	Stressing	4
42	Theodolt	1
43	Total Station	1
44	Truck Mixer	16
45	ADJUSTABEL FORKHEA FOR BEAM B, CANTILEVER & VERTIKAL STANDAR	1
46	Alat Stressing dan Cetakan	5
47	SWR	1
48	Truck Crane	1
49	Truck Trailer	1
50	Vertikal Standar	1
51	Vibratory	4
52	Agregad Blanding	1
53	Air Compressor	2
54	AMP AZP 800	1
55	Besi CNP	3
56	Channel	2
57	Diafragma	1
58	Hoisting Winch	1
59	Jembatan Timbang	2
60	JOINT PILE	1
61	Kanal	5
62	MESIN UJI TEKAN BETON	1
63	Trolley	3
64	PASSANGER HOIST	1
65	PNEUMATIC COMPACTOR	1
66	PERALATAN PROYEK GOL I	1
67	SQUARE PILE	1
68	Timbangan	2
69	WATER TANGKER	1
<b>Total</b>		<b>497</b>

### 13. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan jumlah yang memadai.

No.	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Berlaku Hingga	Jumlah Pertanggung (Rp ribuan)	Penanggung No Polis
1.	Kebakaran	Bangunan yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 96, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Riau	1 Agustus 2015	Rp1.679.300	Asuransi Himalaya Pelindung/ PST.0101/2014-00351
2.	Gempa Bumi	Bangunan yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 96, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Riau	1 Agustus 2015	Rp1.679.300	Asuransi Himalaya Pelindung/ PST.0105/2014-00080
3.	Kebakaran	Bangunan yang terletak di Jl. Laksamana RE Martadinata No. 24, Kel. Ciputat, Kab. Tangerang, Banten	12 Maret 2015	Rp539.800	Asuransi Tri Pakarta/10701011400878

4.	Gempa Bumi	Bangunan yang terletak di Jl. Teuku Tjik Kuta Karang, Kuta Alam, Banda Aceh, D.I. Aceh	1 Agustus 2015	Rp764.300	Asuransi Tri Pakarta / 10701021400093
5.	Kebakaran	Bangunan yang terletak di Jl. Teuku Tjik Kuta Karang, Kuta Alam, Banda Aceh, D.I. Aceh	1 Agustus 2015	Rp764.300	Asuransi Tri Pakarta / 10701011400907
6	All-Risk	<p>Beberapa bangunan yang terletak pada beberapa lokasi, dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Jl. M.T.Haryono kav. Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;</li> <li>(2) Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa-Barat</li> <li>(3) Jl. Panyawungan, Blok Pasirtukul Kulon, Kel. Cileunyi Wetan, Bandung, Jawa Barat</li> <li>(4) Jl. Jend. A. Yani. No. 19., Padang – Sumatera Barat</li> <li>(5) Jl. Jemursari Selatan II/22A, Kel. Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur</li> <li>(6) Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur.</li> <li>(7) Jl. Timor-Timur No.116, Kupang, Nusa Tenggara Barat;</li> <li>(8) Jl. Eltari, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Barat;</li> <li>(9) Jl. Hayam Wuruk No. 191, Denpasar Timur, Denpasar, Bali;</li> <li>(10) Jl. Langko No. 50, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat;</li> <li>(11) Jl. Balaikota No. 22, Kel. Tikala Ares, Kec. Wanang, Manado, Sulawesi Utara;</li> <li>(12) Jl. Adi Sucipto Km.1, Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat;</li> <li>(13) Jl. Pangeran Antasari No. 114, Kel. Tanjung baru, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung;</li> <li>(14) Jl. Padang By Pass, Kel. Betung Tebal, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat</li> </ol>	1 Agustus 2015	Rp36.394.000	Asuransi Tri Pakarta / 10701041400133
	Gempa Bumi	<p>Beberapa bangunan yang terletak pada beberapa lokasi, dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Jl. M.T.Haryono kav. Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;</li> <li>(2) Jl. M.T.Haryono kav. Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur;</li> <li>(3) Jl. Imam Bonjol No.52, Desa Kalijaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa-Barat;</li> <li>(4) Jl. Jend. A. Yani No. 19, Padang – Sumatera Barat;</li> <li>(5) Jl.Panyawungan, Blok Pasirtukul Kulon, Kel. Cileunyi Wetan, Bandung, Jawa Barat;</li> <li>(6) Jl. Jemursari Selatan II/22A, Kel. Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur;</li> <li>(7) Jl. Raya Kalirungkut, Surabaya, Jawa Timur;</li> <li>(8) Jl. Timor-Timur No.116, Kupang, Nusa Tenggara Barat;</li> <li>(9) Jl. Eltari, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Barat;</li> <li>(10) Jl. Hayam Wuruk No. 191, Denpasar Timur, Denpasar, Bali;Jl. Langko No. 50, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat;</li> <li>(11) Jl. Balaikota No.22, kel.Tikala Ares, Kec.Wanang, Manado, Sulawesi Utara</li> <li>(12) Jl. Adi Sucipto Km. 1, Sungai Raya, Pontianak, Kalimantan Barat.</li> <li>(13) Jl.Pangeran Antasari No.114, Kel.Tanjung Baru, Kec.Sukarane, Kota Bandar Lampung, Lampung;</li> <li>(14) Jl. Jend. A. Yani. No. 19., Padang – Sumatera Barat;</li> <li>(15) Jl.Padang By Pass, Kel.Betung Tebal, Kec.Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat.</li> </ol>	1 Agustus 2015	Rp36.255.110	Asuransi Tri Pakarta / 10701021400094
	Kendaraan Bermotor	<p>8 (delapan) unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Toyota Camry, Tahun 2010 dengan No. Pol. B 945 BS;</li> <li>ii. Toyota Camry, Tahun 2010 dengan No. Pol. B 725 BS;</li> <li>iii. Toyota Camry, Tahun 2010 dengan No. Pol. B 970 BS;</li> <li>iv. Toyota Camry, Tahun 2010 dengan No. Pol. B 981 BS;</li> <li>v. Toyota Camry, Tahun 2010 dengan No. Pol. B 755 BS;</li> <li>vi. VW Caravelle, Tahun 2012 dengan No. Pol. B 2127 RFS;</li> <li>vii. Toyota Kijang Innova, Tahun 2005 dengan No. Pol. B 8368 NK;</li> <li>viii. Toyota Camry, Tahun 2012 dengan No. Pol. B 2357 RFS.</li> </ol>	1 April 2016	Rp3.563.000.000	Asuransi Asoka Mas / 1010020115010583



Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan – perusahaan asuransi tersebut diatas dan manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap yang bersangkutan.

#### 14. Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang samasebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi Pemerintah yaitu pihak yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini didefinisikan dalam ruang lingkup Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari Perseroan.

Rincian akun yang terkait dengan transaksi pihak-pihak afiliasi berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Keterangan	2014
<b>Aset</b>	
Kas dan Setara kas	783.487.707.884
Piutang Usaha	832.159.176.754
Piutang Retensi	221.781.483.775
Piutang Lain-lain	54.643.053.568
Tagihan Bruto	1.525.225.402.563
Aset Ventura Bersama	129.725.775.791
<b>Jumlah</b>	
<b>Liabilitas</b>	
Utang Bank	1.442.610.372.843
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang	50.267.698.667
<b>Jumlah</b>	
<b>Pendapatan</b>	
Pendapatan Usaha	2.801.322.841.092

Berikut ini adalah pihak-pihak afiliasi Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2014:

Pihak-pihak Afiliasi	Transaksi	2014
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	571.597.322.578
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Investasi Jangka Pendek	8.448.200.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tagihan Bruto	13.825.530.839
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Utang Bank	357.976.371.750
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Uang Muka Jangka Panjang	886.363.636
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pendapatan Usaha	66.414.074.154
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	443.946.914.749
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Investasi Jangka Pendek	15.827.933.745
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	325.162.077.565
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Utang Bank	255.229.949.478
PT Bank Exim Indonesia	Kas dan Setara Kas	2.162.645.461
PT Bank Exim Indonesia	Utang Bank	829.404.051.615
PT Bank Syariah Mandiri (Persero)	Kas dan Setara Kas	44.330.641
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	15.702.416.889
PT Angkasa Pura II (Persero)	Tagihan Bruto	25.223.115.833
PT Angkasa Pura II (Persero)	Pendapatan Usaha	71.841.043.261
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	Piutang Usaha	26.260.305.600
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	Tagihan Bruto	16.467.837.642
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Piutang Retensi	14.679.896.278
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Tagihan Bruto	12.799.348.781
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pendapatan Usaha	91.999.645.198
PT Jasa Marga Bali Tol	Piutang Retensi	17.606.966.363
PT Jasa Marga Bali Tol	Tagihan Bruto	48.968.176.099
PT Leces (Persero)	Piutang Usaha	86.707.725.121
PT Leces (Persero)	Piutang lain-lain	9.092.268.560
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Piutang Usaha	40.543.487.015
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Piutang Retensi	24.748.429.029

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Tagihan Bruto	89.185.514.438
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Pendapatan Usaha	260.677.928.824
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Usaha	120.385.986.139
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Retensi	27.730.645.669
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Tagihan Bruto	88.943.956.264
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Uang Muka Jangka Panjang	12.795.177.382
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Pendapatan Usaha	148.924.567.020
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Piutang lain-lain	34,764,604,218
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Tagihan Bruto	600.003.720.995
PT Pejagan Pemalang Toll Road	Pendapatan Usaha	600.003.720.995
PT Semen Padang (Persero)	Tagihan Bruto	75.587.337.455
PT Semen Padang (Persero)	Pendapatan Usaha	74.750.156.804
PT Trans Marga Jateng	Piutang Retensi	79.641.938.106
PT Trans Marga Jateng	Tagihan Bruto	19.863.818.558
PT Trans Marga Jateng	Pendapatan Usaha	19.369.502.826
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Tagihan Bruto	32.986.232.121
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pendapatan Usaha	40.534.694.184
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Tagihan Bruto	35.978.088.761
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	Pendapatan Usaha	435,989,142,733
PT Transmarga Jatim Pasuruan	Piutang Usaha	17.012.684.634
PT Transmarga Jatim Pasuruan	Piutang Retensi	12.419.572.371
PT Transmarga Jatim Pasuruan	Tagihan Bruto	21.255.111.828
PT Transmarga Jatim Pasuruan	Pendapatan Usaha	86.170.150.073
PT Rekayasa Industri (Persero)	Piutang Usaha	19.767.340.499
PT Rekayasa Industri (Persero)	Piutang Retensi	10.619.643.434
PT Rekayasa Industri (Persero)	Tagihan Bruto	68.984.134.954
PT Rekayasa Industri (Persero)	Uang Muka Jangka Panjang	7.414.970.000
PT Rekayasa Industri (Persero)	Pendapatan Usaha	127.313.917.488
PT Angkasa Pura I (Persero)	Pendapatan Usaha	15.390.201.882
PT Angkasa Pura Hotel	Tagihan Bruto	49.333.352.741
PT Angkasa Pura Hotel	Pendapatan Usaha	70.827.059.606
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Tagihan Bruto	38.973.870.992
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Uang Muka Jangka Panjang	288.636.364
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Pendapatan Usaha	128.212.244.668
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	Tagihan Bruto	14.441.805.828
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	Pendapatan Usaha	23.096.743.831
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Tagihan Bruto	13.397.614.311
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Uang Muka Jangka Panjang	8.334.493.553
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Pendapatan Usaha	23.370.601.091
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	175.000.000.000
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Piutang lain-lain	332.833.466
PT PN III	Tagihan Bruto	12.046.160.344
PT PN III	Pendapatan Usaha	12.046.160.344
PT Istaka Karya (Persero)	Piutang Lain-lain	75.144.307.748
Koperasi PT Waskita Karya	Piutang Lain-lain	94.072.547
Koperasi PT Waskita Karya	Utang Usaha	13.082.864.365
JO Waskita Karya - Trinit	Piutang Usaha	15.799.723.216
JO Waskita Karya - Trinit	Tagihan Bruto	159.511.463.577
JO Waskita Karya - Trinit	Uang Muka Jangka Panjang	20.548.057.732
JO Waskita Karya - Trinit	Pendapatan Usaha	269.866.023.577
JO Kawahapejaya Indonesia	Piutang Usaha	31.662.926.384
JO Kawahapejaya Indonesia	Tagihan Bruto	85.849.612.073
JO Kawahapejaya Indonesia	Pendapatan Usaha	196.302.064.769
JO Waskita-PP-HK	Pendapatan Usaha	18.486.473.500
JO Waskita-Hutama	Pendapatan Usaha	10.913.311.187
PT Citra Wasphutowa	Investasi Jangka Panjang Lainnya	50.000.000.000
PT Wijaya Karya Beton	Utang Usaha	37.678.005.520
PT Aneka Gas Industri	Utang Usaha	1.334.671.482
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Utang Usaha	335.289.669
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Utang Usaha	88.079.702
PT Amarta Karya	Utang Usaha	597.070.995
PT Pertamina Patra Niaga	Utang Usaha	328.490.962
PT Wijaya Karya Intrade	Utang Usaha	529.039.341

## 15. Perjanjian-perjanjian Penting yang dilakukan Perseroan

Dibawah ini adalah ringkasan perjanjian-perjanjian konstruksi dan perjanjian kredit yang dilakukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Manfaat dan Dampak yang diperoleh Perseroan dari adanya perjanjian penting dan/atau perjanjian sejenis lainnya (termasuk didalamnya perpanjangan/pengakhiran perjanjian).

### Manfaat:

1. Sebagai Dasar hukum dan Panduan bagi para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya;
2. Memberikan batasan hak dan kewajiban para pihak;
3. Memberikan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian yang akan terjadi dikemudian hari sebagai akibat pelaksanaan kontrak;
4. Memberikan solusi terhadap masalah yang akan terjadi;
5. Mengamankan hak-hak Perseroan;
6. Memberikan perlindungan hukum dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usahanya;
7. Mengetahui hak dan kewajiban para pihak.

### Dampak:

1. Perjanjian memberikan perlindungan hukum mengenai tugas dan tanggung jawab para pihak sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat/kesepakatan para pihak;
2. Tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan usaha Perseroan;
3. Memberikan kepastian hukum bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
4. Menjamin iklim kegiatan usaha perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

Perjanjian-perjanjian berikut adalah perjanjian berjenis konstruksi dan perjanjian kredit yang masih berlaku atau masih mengenakan kewajiban bagi Perseroan:

### A. Perjanjian-perjanjian Konstruksi antara Emiten dengan pihak terafiliasi:

1. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan No. 85/KONTRAK-DIR/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali dengan Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Ruas Porong-Gempol) Paket-3 B: STA 42+650 – STA. 44+386.5 Addendum V No. 85/KONTRAK-DIR/2012 tanggal 21 November 2014

Para Pihak	:	Pihak pertama	:	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
		Pihak kedua	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Tujuan	:	Merubah Kontrak Pembangunan Relokasi Jalan Tol Surabaya-Gempol (Ruas Porong-Gempol) Paket-3 B: STA 42+650 – STA. 44+386.5.		
Nilai Kontrak	:	Harga termasuk PPN: Rp.290.291.570.000,00 (Dua ratus sembilan puluh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).		
Jangka Waktu	:	Jangka waktu pengerjaan adalah 506 (Lima ratus enam) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja dan masa pemeliharaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara yaitu sejak 20 Januari 2015.		
Pilihan Hukum	:	Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		
Pilihan Forum	:	Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.		

2. Kerja Konstruksi Harga Satuan Proyek Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah.  
Nomor : HK.02.03/BL.IX/498677.02/APBN/2012/01  
Tanggal : 17 Juli 2012  
Para Pihak : Pihak Pertama : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JMP Jembatan Bentang Tengah  
Pihak Kedua : Kemitraan/KSO antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk berdasarkan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. 3A/KSO/WK/DII/2012 tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. 03A.ADD/KSO/WK/DVII/2012 tanggal 10 Juli 2012.  
Tujuan Proyek : Pembangunan Jembatan Merah Putih.

- Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN :Rp.416.758.148.000,00 (Empat ratus enam belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah). Pembayaran dilakukan secara Sertifikat Bulanan (MC).
- Jangka Waktu : Jangka Waktu Pengerjaan adalah 870 (Delapan ratus tujuh puluh) hari, terhitung sejak ditetapkannya Syarat-Syarat Khusus Kontrak yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian Paket Kerja Konstruksi Normalisasi Ciliwung Paket-2 (Kontrak Harga Satuan).
- Nomor : HK.02.03/PPKSP-SVNT PJSACC/XII/337.1
- Para Pihak : Pihak Pertama : Satuan Kerja NVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Ciliwung Cisadane  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk – PT Utama Karya (KSO)
- Tanggal : 3 Desember 2013
- Tujuan Proyek : Pemilihan Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung Paket-2 melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- Nilai Kontrak : Rp.298.620.388.000,00 (Dua ratus sembilan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 1260 (Seribu dua ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Perjanjian Kerja Konstruksi Gabungan *Lump Sump* dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kostruksi Pelebaran Jalan Bulu (Batas Provinsi Jateng) Batas Kota Tuban.
- Nomor : KU.03.01/3172/498631.23/2012
- Tanggal : 20 Juli 2012
- Para Pihak : Pihak Pertama : Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Divisi IV Cabang Jatim.
- Tujuan Proyek : Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dan Layanan Pemeliharaan.
- Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp.178.624.341.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 880 (Delapan ratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan masa pemeliharaan 1.095 hari mulai dari 25 November 2014 sampai dengan 23 November 2017.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Perjanjian Kontrak Jasa Pemborongan Konstruksi (Harga Satuan) Paket SB-1 Pembangunan Bendung Gerak Sembayat.
- Nomor : HK0203-BS.07/2011-057
- Tanggal : 15 Desember 2011
- Para Pihak : Pihak Pertama : Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai II, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bengawan Solo Balai Besar Wilayah sungai Bengawan Solo

- Pihak Kedua : KSO Brantas Abipraya – PT Waskita Karya  
(Persero) Tbk – PT Wijaya Karya
- Tujuan Proyek : Pembangunan Bendung Gerak Sembayat.  
 Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp.528.102.849.000,00 (Lima ratus dua puluh delapan miliar seratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah).  
 Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 1530 (Seribu lima ratus tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).  
 Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.  
 Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Perjanjian Kontrak (Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar.  
 Nomor : HK.02.03-An/PPK.PB II/Gondang/14  
 Tanggal : 3 Mei 2013  
 Para Pihak : Pihak Pertama : Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, SNVT Pembangunan Bendungan Bengawan Solo.  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero)Tbk  
 Tujuan Proyek : Pembangunan Waduk Gondang di Kabupaten Karanganyar.  
 Nilai Kontrak : Harga Termasuk PPN: Rp.617.280.000.000,00 (Enam ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah).  
 Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 1440 (seribu empat ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).  
 Pilihan Hukum : Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia  
 Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
7. Perjanjian Kerja (Kontrak Tahun Jamak) Paket A-4 Pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat.  
 Nomor : 602.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI/2012  
 Tanggal : 21 November 2012  
 Para Pihak : Pihak Pertama : Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
 Tujuan : Pengerjaan Pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat.  
 Nilai Kontrak : Rp.341.010.475.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu miliar sepuluh juta empat ratus tujuh lima ribu Rupiah).  
 Jangka Waktu : Jangka Waktu Pengerjaan adalah 1095 (Seribu sembilan puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 21 November 2012 berlaku hingga 21 November 2015.  
 Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.  
 Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
8. Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, Sta 6+092 s/d Sta 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan Sta 0+000 s/d Sta 2+200, dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai Bypass  
 Nomor : 004/SPP-JBT/2012  
 Tanggal : 8 Februari 2012  
 Para Pihak : Pihak Pertama : PT Jasamarga Bali Tol.  
 Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero).  
 Tujuan Proyek : Pekerjaan Jasa Pemborongan Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa Paket 4, Sta 6+092 s/d Sta 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan Sta 0+000 s/d Sta 2+200.  
 Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN : Rp.459.637.148.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah).  
 Jangka Waktu : Jangka waktu pengerjaan adalah 420 (empat ratus dua puluh) hari

- terhitung sejak tanggal Mulai Kerja serta masa pemberitahuan cacat mutu selama 1195 (seribu seratus sembilan puluh lima) hari sejak waktu penyelesaian pekerjaan
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia
9. Perjanjian Pekerjaan Kontrak Berbasis Kinerja Paket Peningkatan Jalan Ruas Ciasem-Pamanukan.
- Nomor : KU.03.08/APBN-KBK/PJN-KCP/Pen.JIn CIA-PMK/IV/11/92
- Tanggal : 25 April 2011
- Para Pihak : Pihak Pertama : PPK Pelaksanaan Jalan Nasional Karawang-Cikampek-Pamanukan SKNV Tertentu Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Barat.
- Pihak Kedua : KSO PT Waskita Karya – PT Indah Karya
- Tujuan Proyek : Pekerjaan Konstruksi KBK Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Ruas Ciasem-Pamanukan.
- Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN : Rp.106.958.242.000,00 (Seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)
- Jangka Waktu : Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan adalah 1000 (Seribu) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai Kerja, Waktu Layanan Pemeliharaan 460 (Empat ratus enam puluh) hari kalender dan Masa Jaminan/Garansi selama 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.
- Pilihan Hukum : Musyawarah untuk Mufakat.
- Pilihan Forum : Tempat kedudukan kediaman yang tetap.
10. Perjanjian Pemborongan Concrete works & Architectural Works PUSRI-IIB Palembang, Sumatera Selatan No. P2B-00-10-CT-010-R tanggal 4 Juli 2013 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kedua.
- Nomor : P2B-00-10-PO-005-R
- Tanggal : 9 Mei 2014
- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Rekayasa Industri.
- Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Tujuan Proyek : Concrete works & Architectural Works.
- Nilai Kontrak : Harga tidak termasuk PPN : Rp.156.500.000,00 (Seratus lima puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah bulan ke-30 (Tiga puluh) dari overall PUSRI-IIB project schedule atau sampai dengan 31 Juli 2015.
- Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
11. Perjanjian No. 016300.PK/LG.01.00/SBU1/2014 tanggal 5 Februari 2014 oleh dan antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
- Nomor : 016300.PK/LG.01.00/SBU1/2014
- Tanggal : 5 Februari 2014
- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
- Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Tujuan Proyek : Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Area Palembang.
- Nilai Kontrak : Rp.56.810.000.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta Rupiah)
- Jangka Waktu : 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Pilihan Hukum : Musyawarah untuk Mufakat.
- Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

12. Perjanjian Pemborongan *Concrete works & Architectural Works* PUSRI-IIB Palembang, Sumatera Selatan No. P2B-00-10-CT-010-R tanggal 4 Juli 2013 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kedua.
- Nomor : P2B-00-10-PO-005-R  
Tanggal : 9 Mei 2014  
Para Pihak : Pihak Pertama : PT Rekayasa Industri.  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.  
Tujuan Proyek : *Concrete works & Architectural Works*.  
Nilai Kontrak : Harga tidak termasuk PPN :Rp.156.500.000,00 (Seratus lima puluh enam miliar lima ratus juta Rupiah).  
Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah bulan ke-30 (Tiga puluh) dari *overall PUSRI-IIB project schedule* atau sampai dengan 31 Juli 2015.  
Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia  
Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
13. Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan tol Pejagan- Pemalang Seksi I : STA 270+000- STA 284+250 No. 01/KJP/PPTR/2014 tanggal 25 Agustus 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Pejagan Pemalang Tol Road sebagai Pihak Pertama  
PT Waskita Karya (persero) Tbk sebagai pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan tol Pejagan- Pemalang seksi I.
- Nilai Perjanjian : Rp. 1.235.392.350.955,60 (satu triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh lima koma enam puluh Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
- Jangka Waktu : terhitung sejak ditandatangani kontrak oleh para pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara serah terima akhir (FHO) hasil pekerjaan selama 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari. Dan dengan jangka waktu masa pemeliharaan pekerjaan adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima akhir (FHO) sampai dengan ditandatanganinya berita acara serah terima masa pemeliharaan.
- Tujuan Perjanjian : pekerjaan pembangunan jalan tol pejagan- Pemalang seksi I.
- Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:
- 1) Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kontrak.
  - 2) Berhak meminta kepada pihak kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan.
  - 3) Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
  - 4) Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam kontrak ini.
- Pihak kedua sebagai berikut:
- 1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini.
  - 2) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah diterima dari pihak pertama.
  - 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan pekerjaan sebatas yang diakibatkan oleh kesalahan pihak kedua.
  - 4) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.

Penyelesaian Sengketa: Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam tempo 30 (tiga puluh) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

14. Surat perjanjian kontrak Harga satuan No. HK.02.03/SNVT/PJSA-NT.II/PKSDA-I/223/XI/2014 tentang paket pekerjaan kontruksi pembangunan waduk atau bendungan Raknamo di kabupaten Kupang (Multi Years) tanggal 26 November 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK : 1) Kementerian pekerjaan umum sebagai pihak pertama  
2) PTWaskita Karya (Persero) Tbk sebagai pihak kedua.

Objek Perjanjian : paket pekerjaan kontruksi pembangunan waduk atau bendungan Raknamo di kabupaten Kupang (Multi Years)

Nilai Perjanjian : Rp.710.610.540.000,00 (tujuh ratus sepuluh miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.

Jangka Waktu : masa berlaku kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) hari. Dan masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

Tujuan Perjanjian : pekerjaan kontruksi pembangunan waduk atau bendungan Raknamo di kabupaten Kupang (Multi Years)

Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kedua
- 2) Meminta laporan- laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua.
- 3) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak kedua untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah di tetapkan kepada pihak kedua.

Pihak kedua sebagai berikut:

- 1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pertama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak pertama
- 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri secara periodik kepada pihak pertama.
- 5) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.

Penyelesaiansengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).

15. Kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) No. 01/SPP-KKDM/XI/2014 tanggal 28 November 2014, dengan ketentuan sebagai berikut:



- Para Pihak : 1) PT Kresna Kusuma Dyandra Marga sebagai Pihak Pertama  
2) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK SEBAGAI PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : Kontrak Jasa Pemborongan pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang- Kampung Melayu (Becakayu)
- Nilai Perjanjian : Rp.1.284.476.179.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN.
- Jangka Waktu : masa berlaku kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani kontrak selama 1.095 (seribu sembilan puluh lima) hari. Dan masa pemeliharaan dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari
- Tujuan Perjanjian : pekerjaan pembangunan Jalan Tol Bekasi- Cawang- Kampung Melayu (Becakayu)
- Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:  
1) Berhak atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua.  
2) Berhak meminta kepada pihak kedua setiap saat untuk melaksanakan pekerjaan.  
3) Berkewajiban melakukan serah terima lahan dalam rangka pelaksanaan.  
4) Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tempat waktu.  
Pihak kedua sebagai berikut:  
1) Pihak kedua berhak menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak  
2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pertama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak  
3) Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu.  
4) Melaksanakan seluruh perbaikan terhadap cacat mutu dari pekerjaan serta penyempurnaan pekerjaan dalam masa pemeliharaan.
- Penyelesaian sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).
16. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 5/SPP/WK-PTP/KSO/2014 tanggal 19 November 2014, dalam Proyek Pembangunan gedung Brooklyn Suite, Soho, Office, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) KSO Waskita Trinita sebagai Pihak Pertama  
2) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : paket pekerjaan struktur, Arsitektur, Plumbing, Mekanikal, Elektrikal dan Equipment atas proyek Pembangunan Gedung Brooklyn Suite, Soho, Office Alam Sutera- Tangerang.
- Nilai Perjanjian : Rp. 591.800.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta Rupiah) sudah termasuk pajak untuk PPN dan PPh.
- Jangka Waktu : Durasi masa Pelaksanaan adalah 660 (enam ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) dan masa pemeliharaan adalah 1 (satu) tahun atau 365 hari kalender terhitung sejak penerbitan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.

Tujuan Perjanjian : Pembangunan gedung Brooklyn Suite, Soho, Office di Alam Sutera Tangerang.

Hak dan Kewajiban : Pihak Pertama sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama menjamin keakuratan semua data dan informasi yang diberikan kepada pihak kedua.
- 2) Pihak pertama hanya bertanggung jawab untuk biaya- biaya perijinan baru pln, telkom, pdam, imb, selain itu perijinan berkaitan dengan pihak kedua merupakan tanggung jawab pihak kedua.

Pihak Kedua Sebagai Berikut:

- 1) Pihak kedua tidak boleh mengalihkan sebagian dan atau seluruh pekerjaan tanpa persetujuan pihak pertama.
- 2) Pihak kedua harus menjaga keamanan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup paket pekerjaan baik diluar maupun di dalam proyek dengan segala resiko dan biayanya.

Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

17. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/WASKITA-YODYA/2014 tanggal 12 Agustus 2014 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal penumpang bandara husein sastaranegara Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT YODYA KARYA (PERSERO) PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Yoda Karya (persero) dengan Nama KSO Waskita Yodya.

Nilai Perjanjian : nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :

- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
- 2) Pembukuan KSO Waskita Yodya telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang di tunjuk oleh DD KSO Waskita Yodya.
- 3) Telah diselesaikannya kewajiban KSO Waskita Yodya.
- 4) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
- 5) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian ini.

Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Terminal Penumpang Bandara Husein Sastranegara Bandung

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama dalam kontribusi dan partisipasi proyek adalah untuk pekerjaan struktur, arsitektur dan mekanikal elektrik
- 2) Pihak kedua adalah untuk pekerjaan perencanaan.
- 3) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing-masing pihak.
- 4) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa:  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

18. Perjanjian Kerjasama Operasi No.03/WASKITA-BRANTAS/2013 tanggal 3 Juli 2013, dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Terminal Selatan beserta fasilitas penunjangnya di Bandar Udara Juanda Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (persero) dengan Nama KSO Waskita Brantas.
- Nilai Perjanjian : nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Pembukuan KSO Waskita Yodya telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang di tunjuk oleh DD KSO Waskita Brantas.  
3) Telah diselesaikannya kewajiban KSO Waskita Brantas.  
4) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
5) Para Pihak bersepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Terminal Penumpang Bandara Husein Sastranegara Bandung
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
1) Para pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian lingkup pekerjaannya masing-masing.  
2) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.  
3) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
19. Perjanjian KSO terpadu tanggal 17 Maret 2014, tentang pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jakarta Selatan (RSUD Pasar Minggu), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (persero) Tbk dengan Nama KSO Wika Waskita.
- Nilai Perjanjian : nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani para pihak sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.
- Tujuan Perjanjian : pekerjaan Kontruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit Jakarta Selatan (RSUD Pasar Minggu)
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
- 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa :

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

20. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 02/KSO/Waskita-Brantas JO/2012 tanggal 29 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Pandanduri Di kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan kerjasama Operasi Waskita Brantas JO

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :

- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
- 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
- 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
- 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama sebanyak 51 %
- 2) Pihak Kedua sebanyak 49 %

Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bendungan Pandanduri Di kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat

Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
- 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaian Sengketa:

Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari . Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

21. Surat Perjanjian Kerja No. KU.08.03/PPK.13/0207.1/2013 tanggal 2 Juli 2013 dalam rangka pelaksanaan pembangunan Underpass Simpang Patal - Pusri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) KSO Emiten dan PT. Ricky Kencana Sukses Mandiri sebagai Penyedia  
2) Ir Harunnurasyid yang bertindak untuk dan atas nama satker pelaksanaan jalan metropoitan Palembang sebagai ppk.

Objek Perjanjian : pembangunan Underpass Simpang Patal - Pusri

Jangka Waktu : penyelesaian pekerjaan selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender.

- Nilai Perjanjian : Rp 104.695.319.000,- (seratus empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu Rupiah)
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pembangunan Underpass Simpang Patal - Pusri
- Hak dan Kewajiban : PPK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:  
 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan penyedia;  
 2) Meminta laporan secara periodik tentang pekerjaan penyedia;  
 3) Membayar pekerjaan sesuai kesepakatan.  
 Penyedia Mempunyai Hak Dan Kewajiban Untuk:  
 1) Menerima pembayaran;  
 2) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik;  
 3) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal;  
 4) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai jadwal;
- Penyelesaian Sengketa :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

22. Surat Perjanjian Konsorsium tanggal 3 Desember 2012 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan tahap 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak : 1) PTwaskita karya (persero) tbk. Sebagai pihak pertama.  
 2) PTwijaya karya (persero) tbk pihak kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan konsorsium WIKA WASKITA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
 2) Telah diselesaikannya kewajiban Konsorsium  
 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
 1) Pihak pertama sebanyak 67 %  
 2) Pihak Kedua sebanyak 33 %
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan tahap 1
- HAK DAN KEWAJIBAN: Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:  
 1) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing- masing pihak.  
 2) Apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- PENYELESAIANSENGKETA :  
 Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari .apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).

23. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 03/WASKITA-HUTAMA/2013 tanggal 9 Desember 2013 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung di Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK	:	1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA. 2) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) SEBAGAI PIHAK KEDUA.
Objek Perjanjian	:	pembentukan KSO WASKITA-HUTAMA
Jangka Waktu	:	perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila : 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir. 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak. 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
Nilai Perjanjian	:	ditentukan oleh para pihak
Tujuan Perjanjian	:	dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Normalisasi Kali Ciliwung di Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta.
hak dan kewajiban	:	para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut: 1) para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing- masing pihak. 2) apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
penyelesaiansengketa	:	setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).

24. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/KSO/BAP-WK/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 dalam Rangka pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo DAM Merapi (14 Buah), dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK	:	1). PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) SEBAGAI PIHAK PERTAMA. 2) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK SEBAGAI PIHAK KEDUA
Objek Perjanjian	:	pembentukan KSO PT Waskita karya (persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya
Jangka Waktu	:	perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila : 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir. 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak. 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
Nilai Perjanjian	:	Pihak Pertama Sebesar 51 % Pihak Kedua sebesar 49 %

- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka pekerjaan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bangunan Sabo DAM Merapi (14 Buah).
- Hak Dan Kewajiban: para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaiansengketa : setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari .apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).
25. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/WK-PP-WIKA/KSO/XI/2012 tanggal 26 November 2012 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah Di Kota Ambon- propinsi Maluku, dengan ketentuan sebagai berikut:
- PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-PP-WIKA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Merah Putih Bentang Tengah Di Kota Ambon- propinsi Maluku.
- Hak Dan Kewajiban: para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
  - 2) apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaiansengketa : setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari .apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).
26. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WASHUTAWI-KSO/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 dalam Rangka Proyek Pembangunan Kontruksi Runway Bandar Udara Samarinda baru Kalimantan Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:
- PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.

- 2) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK KEDUA.
- 3) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) SEBAGAI PIHAK KETIGA.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO WASKITA-HUTAMA-WIKA
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Proyek Pembangunan Kontruksi Runway Bandar Udara Samarinda baru Kalimantan Timur.
- Hak Dan Kewajiban: para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebankan kepada masing- masing pihak.
  - 2) apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.
- Penyelesaiansengketa : setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).
27. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 5/BAP-WASKITA-WIKA.KSO/KSO/II/12 tanggal 2 Januari 2012 dalam rangka pekerjaan pembangunan Bendungan Gerak Sembayat, Gresik, Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:
- PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.
- 2) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK KEDUA.
- 3) PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO) SEBAGAI PIHAK KETIGA.
- Objek Perjanjian : pembentukan KSO PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Wijaya Karya (persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (persero)
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pekerjaan pembangunan Bendungan Gerak Sembayat, Gresik, Jawa Timur.



Hak Dan Kewajiban: para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
- 2) apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaiansengketa : setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari .apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).

28. *Joint Operation* tanggal 15 Mei 2011 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan tahap 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : 1) SHANGHAI CONTRUCTION (GRUP) GENERAL COMPANY SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK KEDUA.  
3) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PIHAK KETIGA

Objek Perjanjian : pembentukan KSO SCG dan WIKA & WASKITA

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak

Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan tol Cileunyi- Sumedang- Dawuan tahap 1.

hak dan kewajiban: para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.
- 2) apabila terjadi pekerjaan tambah kurang pada lingkup pekerjaan para pihak dan menjadi tanggung jawab para pihak.

Penyelesaiansengketa : setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari .apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).

## B. Perjanjian-perjanjian Non- Konstruksi antara Emiten dengan pihak terafiliasi

1. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Parkir antara PT Nindya Karya (Persero) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 291/SEKPER/GD/12/2014 tanggal 2 Desember 2014 dengan ketentuan sebagai berikut.

Para Pihak : Pihak Pertama : PT Nindya Karya (Persero)  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Tujuan Perjanjian	:	Sewa Menyewa Lahan Parkir seluas 625m <sup>2</sup> (Enam ratus dua puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jl. Madrasah 11 No. 3 RT.007 RW 10, Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.
Nilai Kontrak	:	Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah).
Jangka Waktu	:	sampai dengan 31 Desember 2015.
Pilihan Hukum	:	Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
Pilihan Forum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), wilayah Jakarta Timur.

2. Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Gedung Waskita Kav. 10 No. L.06/SEWA/WK/2014 tanggal 26 Maret 2014 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Waskita Sangir Energi sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan di Gedung PT. Waskita Karya No. L.01/AM.I/SEWA/WK/2014 tanggal 9 Juni 2014 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Waskita Sangir Energi yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Pihak Kedua	:	PT Waskita Sangir Energi.
Tujuan Proyek	:	Sewa menyewa ruangan sebesar 32 m <sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi) terletak di lantai 6 di Gedung Waskita Kav. 10.		
Nilai Kontrak	:	Biaya Sewa sebesar Rp.1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) per bulan. Biaya Pelayanan sebesar Rp.1.184.000,00 (satu juta seratus delapan puluh empat ribu Rupiah) per bulan.		
Jangka Waktu	:	15 (lima belas) bulan.		
Hak dan kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak dan kewajiban pihak pertama           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan jasa dan melakukan pekerjaan dengan keahlian dan kehati-hatian menurut standar dan prinsip teknis yang berlaku.</li> <li>b) Mematuhi dan menjamin pekerjaan tersebut memenuhi peraturan perundang-undangan, perijinan, kebiasaan, tata tertib, dan syarat-syarat lain yang berkaitan.</li> <li>c) Menjamin setiap personil yang dipekerjakan adalah mampu, cakap, teliti, mempunyai keahlian dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing.</li> <li>d) Menyediakan mobilisasi dan demobilisasi, akomodasi, transportasi, makanan dan pengobatan untuk semua personil atas biaya sendiri.</li> <li>e) Mempertahankan kelangsungan asuransi untuk semua personil.</li> <li>f) Membayar upah, gaji, dan tunjangan personil secara teratur dan wajar tanpa dikaitkan dengan penerimaan dana oleh kontraktor dari pemberi pekerjaan.</li> </ol> </li> <li>2. Hak dan kewajiban pihak kedua           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Wajib membayar kepada kontraktor epc biaya design, pengadaan dan penyelesaian pekerjaan dan perbaikan cacat.</li> <li>b) Membayar semua pajak yang diharuskan.</li> </ol> </li> </ol>		

PENYELESAIAN PERKARA: Perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam waktu 14 (empat belas) sejak dimulainya musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan diselesaikan melalui dan berdasarkan peraturan dan prosedur penyelesaian bani (badan arbitrase nasional Indonesia) di Jakarta.

3. Perjanjian sewa menyewa ruangan di gedung waskita nomor: L.19/SEWA/WK/2014 tanggal 30 September 2014 antara PT. Waskita Karya dengan PT. Waskita Sangir Energi yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut.

Para pihak	:	pihak pertama	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
		Pihak kedua	:	PT Waskita Sangir Energi.
Tujuan proyek	:	Sewa menyewa ruangan sebesar 32 m <sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi) terletak di lantai 4 (empat) di Gedung Waskita.		
Nilai kontrak	:	Biaya Sewa sebesar Rp.1.856.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah) per bulan.		

- Jangka waktu : 1 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2015.
- Hak dan kewajiban : 1. Hak dan kewajiban pihak pertama
- a) Bertanggung jawab atas pengelolaan gedung dan fasilitasnya.
  - b) Mengasuransikan gedung, mesin, peralatan dan fasilitas umum lainnya dari gedung waskita.
  - c) Bertanggung jawab atas perbaikan-perbaikan yang diperlukan terhadap ruangan-ruangan yang disewa.
  - d) Melakukan perbaikan setelah menerima surat pemberitahuan dari pihak kedua.
  - e) Menyediakan tempat lain yang sesuai apabila terjadi kerusakan gedung yang mengakibatkan pihak kedua harus mengosongkan ruangan yang disewanya.
  - f) Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang-barang pihak kedua.
2. Hak dan kewajiban pihak kedua
- a) Wajib membayar sewa pada waktu yang disepakati.
  - b) Wajib menyerahkan kembali ruangan yang disewa dalam keadaan kosong dan kondisi semula pada waktu sewa dimulai.
  - c) Bertanggung jawab atas kerusakan dan kecelakaan di dalam ruang sewa.
  - d) Wajib memelihara dengan baik seluruh ruangan.
  - e) Membayar biaya perubahan ruangan atas permintaan pihak kedua yang disetujui pihak pertama.
  - f) Membayar semua pajak yang diharuskan.
- Cara pembayaran : dibayar di muka untuk setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10.
- Penyelesaian perkara : perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam waktu 14 (empat belas) sejak dimulainya musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka perselisihan diselesaikan melalui dan berdasarkan peraturan dan prosedur penyelesaian sengketa (badan arbitrase nasional indonesia) di jakarta.

### C. Perjanjian-perjanjian Non- Konstruksi antara Emiten dengan pihak tidak terafiliasi

1. Perjanjian jual beli bersyarat dengan hak membeli kembali atas saham-saham PT Pejagan Pemalang Toll Road No. 84 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para pihak : 1) PT Global Selaras Dunia dan PT Rekatunggal Abadi sebagai penjual.  
2) Emiten dan PT Waskita Toll Road sebagai pembeli.

Objek Perjanjian : Seluruh saham yang telah dikeluarkan PPTR yaitu sebanyak 633.577 (enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) lembar saham.

Jangka Waktu : 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017.

Tujuan Perjanjian : Penjualan seluruh saham PPTR oleh Penjual kepada Pembeli dengan diberikan hak opsi membeli kembali untuk Penjual atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penjual.

Harga Pembelian : a. Pada saat pembelian oleh Pembeli dari Penjual adalah sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah);  
b. Harga pembelian kembali saham dari Pembeli oleh Penjual atau pihak lain yang ditunjuk Penjual akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak dengan dasar penjumlahan dari perhitungan sebagai berikut:
  - (i) Nilai harga saham yang disepakati Para Pihak;
  - (ii) Seluruh hutang Badan Layanan Umum (BLU) yang dibayar oleh Pembeli melalui PPTR termasuk semua biaya pengadaan tanah tambahan (jika ada) serta biaya pengurusan dan biaya penyelesaian perkara atas tuntutan lahan dari masyarakat atau pihak ketiga (jika ada);

- (iii) Nilai konstruksi yang sudah ditetapkan Para Pihak;
- (iv) Seluruh biaya yang telah dikeluarkan atau dibayar atau dilunasi Pembeli melalui PPTR termasuk biaya konsultan pengawas dan konsultan lainnya;
- (v) Biaya operasi jalan tol dan investasi capital expenditure untuk pengoperasian jalan tol dengan memperhitungkan pendapatan PPTR termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan jalan tol yang dibayar atau dilunasi Pembeli melalui PPTR sebagaimana diwajibkan dalam PPJT dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- (vi) Seluruh biaya *cost of money* sehubungan dengan beban bunga pada angka (ii) sampai dengan angka (v) di atas;
- (vii) Seluruh biaya pembebasan/penggantian pengadaan tanah dalam rangka perusahaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang Seksi III dan IV yang telah dikeluarkan oleh Pembeli melalui PPTR apabila disyaratkan dan/atau diperintahkan dan/atau ditugaskan oleh instansi Pemerintah yang berwenang.

Syarat pelaksanaan

Hak Opsi : Pelaksanaan Hak Opsi Pembelian Kembali dapat dilakukan apabila telah diperolehnya/terpenuhinya hal-hal tersebut dibawah ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak opsi dilaksanakan dalam jangka waktu perjanjian;
- b. Diperolehnya keputusan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PPTR yang menyatakan bahwa semua ketentuan didalam anggaran dasar PPTR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan dilaksanakan yang memberi persetujuan kepada Pembeli, bahwa saham-saham mereka di PPTR dapat dijual kepada Penjual atau pihak lain yang ditunjuk oleh RA Penjual, dan Pembeli telah menolak hak istimewa untuk mendapatkan prioritas membeli saham-saham yang ditawarkan pemegang saham lainnya.
- c. Diperolehnya persetujuan korporasi Pembeli (baik Emiten dan WTR) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pembeli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan rencana melepaskan atau menjual aset hak atas saham di PPTR kepada Penjual atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penjual.
- d. Pelaksanaan proses pengambilalihan saham-saham dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) Tentang Perseroan Terbatas telah dilaksanakan oleh masing-masing PPTR, pihak Penjual maupun Pembeli.
- e. Diperolehnya surat persetujuan dari Badan Pemerintah yang menyatakan memberi persetujuan kepada PPTR dan kepada Pembeli sebagai pemegang saham PPTR dapat menjual atau mengalihkan seluruh saham-sahamnya kepada Penjual atau pihak lain yang ditunjuk Penjual.
- f. Menyerahkan dokumen aset harta bergerak dan dokumen aset harta tetap PPTR yang akurat dan tidak menyesatkan.

Hak Dan Kewajiban :

1) Hak Dan Kewajiban Penjual

- a. Hak Penjual
  - (i) Melaksanakan hak opsi pembelian atas saham yang menjadi objek perjanjian dalam jangka waktu perjanjian;
  - (ii) Menerima pembayaran harga saham dari pembeli.
- b. Kewajiban penjual
  - (i) Memperoleh segala persetujuan yang diperlukan dalam rangka pengalihan saham kepada pembeli maupun dalam rangka pelaksanaan hak opsi pembelian saham kembali
  - (ii) Menjamin kepada pihak pembeli bahwa seluruh saham yang dijual tidak berada dalam sengketa, sitaan dan bermasalah dan seluruh persyaratan dan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (iii) Mengalihkan saham kepada pembeli;
  - (iv) Setelah dilakukannya pembayaran harga saham oleh pembeli penjual wajib mempersiapkan secara sistematis daftar dokumen dan inventaris.

2) Hak dan kewajiban pembeli

- a. Hak pembeli
  - (i) Menerima pengalihan saham yang menjadi objek perjanjian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian ini;

- (ii) Menerima pembayaran harga saham apabila penjual melaksanakan hak opsi pembelian saham kembali.
- b. Kewajiban pembeli
  - (i) Dalam hal penjual melaksanakan hak opsi pembelian kembali, pembeli wajib menjamin penjual atau pihak yang ditunjuk oleh penjual bahwa seluruh saham tidak berada dalam sengketa, sitaan dan bermasalah dan seluruh persyaratan dan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diperoleh.
  - (ii) Memperoleh segala persetujuan yang diperlukan dalam rangka pembelian saham dari penjual maupun dalam rangka pelaksanaan hak opsi pembelian kembali;
  - (iii) Melakukan pembayaran harga saham;
  - (iv) Selama jangka perjanjian, pembeli menjamin memberikan hak kepada pihak pertama untuk menunjuk dan menempatkan 1 (satu) orang dalam jabatan direksi dan 1 (satu) orang dalam jabatan komisaris dalam kepengurusan PPTR.

Penyelesaian

Sengketa : Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka dalam tingkat pertama dan terakhir akan diselesaikan melalui prosedur dan aturan dari Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, transaksi Jual Beli Bersyarat dengan Hak Membeli Kembali atas saham-saham PPTR bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak tergolong transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT. Global Selaras Dunia dan PT. Rekatunggal Abadi selaku penjual saham-saham PPTR, dan transaksi tersebut juga bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 karena transaksi tersebut nilainya tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Emiten.

**D. Perjanjian-perjanjian Konstruksi antara Emiten dengan pihak tidak terafiliasi:**

1. Nama : Perjanjian/Kontrak Kerja Konstruksi untuk Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Graving Dock dan Pengembangan Dermaga Noahtu Bandar Lampung  
Nomor : 1129/Sperj/DRU-WK/VI/2013  
Tanggal : 25 Juni 2013  
Para Pihak : Pihak Pertama : PT Daya Radar Utama  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk  
Tujuan Proyek : Pembangunan Graving Dock dan Pengembangan Dermaga Noahtu Bandar Lampung.  
Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp.267.793.882.463,00 (Dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah).  
Jangka Waktu : Jangka waktu pekerjaan adalah 915 (Sembilan ratus lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Mulai Pekerjaan sesuai Sub-Klausula 8.1 termasuk didalamnya Masa Pemberitahuan Cacat Mutu adalah 365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari terhitung sejak Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan sesuai dengan Sub-Klausula 10.1.  
Pilihan Hukum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.  
Pilihan Forum : Tidak ditentukan dalam Perjanjian, mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Nama : Perjanjian Kontrak Jasa Pendorongan Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo Tahap I Ruas Semarang-Bawen seksi II : Ungaran-Bawen Paket VI: Lemah Ireng-Bawen (STA. 21+825-22+840) No. TMJ.KJP/XI/2011/021 tanggal 20 november 2011 yang telah diubah beberapa kali sebagaimana diubah terakhir kali oleh Perubahan kelima No. TMJ.KJP/XI/2011/012 tanggal 8 April 2013.  
Nomor : TMJ.KJP/XI/2011/021 yang diubah dengan No. TMJ.KJP/XI/2011/012  
Tanggal : 20 November 2011  
Para Pihak : Pihak Pertama : PT Trans Marga Jateng.  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya (Persero) Tbk.  
Tujuan : Merubah beberapa klausul dalam Surat Perjanjian Kontrak Jasa

- Pemborongan Pekerjaan Pembangunan jalan Tol Semarang-Solo Tahap I Ruas Semarang-Bawen seksi II : Ungaran-Bawen Paket VI: Lemah Ireng-Bawen (STA. 21+825-22+840).
- Nilai Kontrak : Harga termasuk PPN: Rp.302.687.242.000,00 (Tiga ratus dua miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan untuk Operasional adalah 671 (Enam ratus tujuh puluh satu) dan Pekerjaan setelah Operasional adalah 732 (Tujuh ratus tiga puluh dua) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja atau berlaku sampai dengan 31 Oktober 2013. Jangka waktu masa pemeliharaan adalah selama 1095 (seribu sembilan puluh lima) hari kalender setelah penyelesaian seluruh pekerjaan.
- Pilihan Hukum : Musyawarah untuk mufakat dengan jangka waktu penyelesaian 60 (enam puluh) hari kalender.
- Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Semarang.
3. Nama : Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Paket Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek *One Belpark*. Komplek Admiralty Residence, Jl. RS. Fatmawati No. 01, Jakarta Selatan.
- Nomor : 058/SPP/HJ-PDLB/LGL/10/2013
- Tanggal : 7 Oktober 2013
- Para Pihak : Pihak Pertama : PT Harmas Jalesveva.  
Pihak Kedua : PT Waskita Karya(Persero) Tbk.
- Tujuan Proyek : Melaksanakan Paket Pekerjaan Proyek *One Belpark*.
- Nilai Kontrak : Harga sudah termasuk PPN, Bea Masuk, Hak Patent. Biaya Testing, Pph dan Biaya lain-lain : Rp.164.000.000.000,00 (Seratus enam puluh empat miliar Rupiah).
- Jangka Waktu : Jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 444 (Empat ratus empat puluh empat) hari kalender terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang Tender atau sejak Serah Terima Lahan. Masa Pemeliharaan untuk proyek ini adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak tanggal pekerjaan selesai.
- Pilihan Hukum : Mengikuti Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Pilihan Forum : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. 06 tanggal 21 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Munyati Sullam, S.H., M.A, Notaris di Jakarta Barat dalam rangka pengembangan Tanah di Lokasi Segi 8 Darmi Jalan Ray Darmo Permai III Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak : 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai pihak Pertama.  
2) PT Darmo Permai Pihak Kedua.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Darmo Permai dengan Nama KSO Waskita Darmo Permai.
- Nilai Perjanjian : Para pihak sepakat memberikan kontribusi penyertaan modal awal sebagai berikut:  
Pihak Pertama sebanyak 51 % atau sebesar Rp. 217.317.375.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).  
Pihak Kedua sebanyak 49 % atau sebesar Rp. 208.795.125.000,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani akta ini oleh Para Pihak dan berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan dengan telah abis masa pemeliharaan pekerjaan atau telah diselesaikan setiap dan seluruh hak dan kewajiban para pihak atau berdasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.

- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pengembangan tanah di Lokasi Segi 8 Darmi Jalan Ray Darmo Permai III Surabaya menjadi sebuah proyek properti antara lain berupa Apartemen, SOHO, Office, Rukan dan Food and Beverage beserta kelengkapan prasarananya.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak wajib menunjuk konsultan quantity surveyor (konsultan QS);
  - 2) Para pihak melalui kso waskita darmo permai memberikan peranan dan tanggung jawab sebagai kordinator marketing produk kso waskita darmo permai;
  - 3) Para pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian atas proyek kso.
- Penyelesaian Sengketa :  
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari .Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyarawah maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
5. Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) No. 31 tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan Bambang Suwondo, S.H., Notaris di Tangerang yang telah di rubah terakhir dengan Amandemen II No. 001/KSO-AMD/WK/D.R/2014, No. 002/PTP-WK/KSO-AMD/VIII/2014, tanggal 23 April 2013, dalam rangka pengembangan Tanah di Lokasi Kawasan Alam Sutera Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut:
- PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT PERINTIS TRINITI PROPERTI PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Perintis Trinitis Properti dengan Nama KSO Waskita Trinitis.
- Nilai Perjanjian : Para pihak sepakat memberikan kontribusi penyertaan modal awal sebagai berikut:
- 1) Pihak Pertama sebanyak 51% atau sebesar Rp. 76.576.500.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh enam juta lima ratus ribu Rupiah)
  - 2) Pihak Kedua sebanyak 49% atau sebesar Rp. 73.573.500.000,000 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah).
- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani akta ini oleh Para Pihak dan berakhir apabila pelaksanaan pekerjaan proyek KSO telah selesai dengan dibuktikan dengan telah abis masa pemeliharaan pekerjaan atau telah diselesaikan setiap dan seluruh hak dan kewajiban para pihak atau berdasarkan pada kesepakatan tertulis para pihak untuk mengakhiri perjanjian ini.
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pengembangan Tanah di Lokasi Kawasan Alam Sutera Tangerang menjadi sebuah proyek properti antara lain berupa Apartemen, SOHO, dan Komersil Retail beserta dengan sarana dan prasarananya.
- Hak dan kewajiban : para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
- 1) Para pihak bertanggung jawab secara penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian atas proyek kso.
  - 2) Para pihak sepakat untuk dapat membeli sisa unit yang belum terjual dengan bagian sesuai dengan porsi dan pembayaran secara tunai sesuai harga yang telah disepakati.

- 3) Para pihak sepakat dan mengikatkan diri bahwa pembagian keuntungan atau kerugian di bebaskan kepada masing-masing pihak.

**PENYELESAIANSENGKETA :**

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

6. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 001/WASKITA-ARKONIN/2013 tanggal 10 Mei 2013, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Design & Build renovasi terminal internasional menjadi domestik di bandar udara ngurah Rai Bali, dengan ketentuan sebagai berikut :

- PARA PIHAK :**
- 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.
  - 2) PT ARKONIN PIHAK KEDUA.

**Objek Perjanjian:** pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Arkonin dengan Nama KSO Waskita Arkonin.

**Nilai Perjanjian :** nilai ditentukan atas kesepakatan para pihak.

**Jangka Waktu :** perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :

- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
- 2) Pembukuan KSO Waskita Arkonin telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang di tunjuk oleh KSO Waskita Arkonin.
- 3) Telah diselesaikannya kewajiban KSO Waskita Arkonin.
- 4) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
- 5) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

**Tujuan Perjanjian :** dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Design & Build renovasi terminal internasional menjadi domestik di bandar udara ngurah Rai Bali.

**HAK DAN KEWAJIBAN :** PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.
- 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

**PENYELESAIANSENGKETA :**

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).



7. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/SP-KSO/WK-FEBERCO/XII-2010 tanggal 23 Desember 2010, yang telah diubah terakhir dengan Addendum No. 09 tanggal 19 Desember 2014 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT FEBERCO PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT FEBERCO dengan Nama Konsorsium : PT Waskita Karya (persero)- PT FEBERCO joint Operation.

Jangka Waktu : sampai dengan tanggal 22 Desember 2015

Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 60% atau sebesar Rp. 14.383.506.000,00 (empat belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam ribu Rupiah).  
2) Pihak Kedua sebanyak 40% atau sebesar Rp. 9.589.005.000,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh sembilan lima Rupiah).

Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan Pembanguna Transmisi 150 kV Curup- Pulau BAAI Section 3 (paket Cp-03).

HAK DAN KEWAJIBAN : PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:  
1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.  
2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

**PENYELESAIAN SENGKETA :**

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

8. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WK-RKSM/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan Under Pass Simpang Patal –Pusri Palembang Sumatera Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT RICKY KENCANA SUKSES MANDIRI PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Ricky Kencana Sukses Mandiri dengan nama Waskita Ricky Kencana KSO

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
 1) Pihak pertama sebanyak 70 %  
 2) Pihak Kedua sebanyak 30 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan Under Pass Simpang Patal –Pusri Palembang sumatera Selatan
- HAK DAN KEWAJIBAN : PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:  
 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.  
 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

**PENYELESAIAN SENGKETA :**

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

9. Perjanjian Kerjasama Operasi No. 01/KSO/WK-SK/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013, dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan kebayakan- Simpang, Aceh dengan ketentuan sebagai berikut :

- PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
 2) PT ANDESMONT SAKTI PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Andesmont Sakti dengan Nama Waskita-Andesmon JO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
 1) Pihak pertama sebanyak 60 %  
 2) Pihak Kedua sebanyak 40%
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan jalan kebayakan- Simpang, Aceh
- HAK DAN KEWAJIBAN : PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:  
 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.  
 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

**PENYELESAIAN SENGKETA :**

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14

(EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

10. Perjanjian Kerjasama Operasi Perjanjian kerjasama operasi tanggal 17 Desember 2010, tentang Proyek pekerjaan tanah tahap III perbaikan tanah dan Aeronautical pavement Runway pembangunan bandar udara medan Baru (paket 4), dengan ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT YASA PATRIA PERKASA PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Yasa Patria Perkasa dengan nama KSO Waskita Yasa

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 70 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 30%

Tujuan Perjanjian : Proyek pekerjaan tanah tahap III perbaikan tanah dan Aeronautical pavement Runway pembangunan bandar udara medan Baru (paket 4)

HAK DAN KEWAJIBAN: PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:  
1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.  
2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

**PENYELESAIAN SENGKETA :**

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

11. Perjanjian kerjasama operasi N0.03/KSO/WK/DREG.III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pelebaran Jalan lembar-sekotong-pelangan, Kab. Lombok Barat NTB, dengan ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT LOMBOK INFRASTRUKTUR PERKASA PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dengan nama Waskita LIP, JO

- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Kontribusi dan Partisipasi : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:
- 1) Pihak pertama sebanyak 51 %
  - 2) Pihak Kedua sebanyak 49 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pelebaran Jalan lembar-sekotong-pelangan, Kab. Lombok Barat NTB.
- HAK DAN KEWAJIBAN : PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:
- 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.
  - 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.
- PENYELESAIAN SENGKETA :  
 SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).
12. Perjanjian kerjasama operasi N0.01/KSO/WK/DREG.III/2014 tanggal 27 Februari 2014, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan padolo di kab. Bima, NTB, dengan ketentuan sebagai berikut :
- PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
 2) PT LOMBOK INFRASTRUKTUR PERKASA PIHAK KEDUA.
- Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dengan nama Waskita LIP, JO
- Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :
- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
  - 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
  - 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
  - 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
- Kontribusi dan Partisipasi : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:
- 1) Pihak pertama sebanyak 51 %
  - 2) Pihak Kedua sebanyak 49 %
- Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan padolo di kab. Bima, NTB.

HAK DAN KEWAJIBAN: PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.
- 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

PENYELESAIAN SENGKETA :

setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat paling lama 14 (empat belas) hari .apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui badan arbitrase nasional indonesia (bani).

13. Perjanjian kerjasama operasi N0.04/KSO/WK/DREG.III/2014 tanggal 22 Mei 2014 dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jalan Gerung di Kota Mataram, NTB, dengan ketentuan sebagai berikut :

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT LOMBOK INFRASTRUKTUR PERKASA PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Waskita Karya (persero) Tbk dengan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dengan nama Waskita LIP, JO

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Kontribusi dan partisipasi : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 51 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 49 %

Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan pekerjaan penggantian jembatan padolo di kab. Bima, NTB.

HAK DAN KEWAJIBAN: PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.
- 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

PENYELESAIAN SENGKETA :

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

14. Perjanjian Konsorsium tanggal 8 Juni 2012 dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan prasarana Pertambangan Batubara Tahap 1 di Kalimantan Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT JAKARTA PRIMA CRANES PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan konsorsium Waskita JPC

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 67,75 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 32,25%

Tujuan Perjanjian : dalam rangka pelaksanaan proyek Pembangunan prasarana Pertambangan Batubara Tahap 1 di Kalimantan Tengah

HAK DAN KEWAJIBAN: PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:  
1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.  
2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

**PENYELESAIAN SENGKETA :**

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

15. Perjanjian Konsorsium tanggal 21 Mei 2014 dalam rangka Pelaksanaan Proyek Kompleks Pabrik Gula Rafinasi Konawe Selatan di Konawe Selatan, Sulawesi Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT INDO SUTECH SEJAHTERA PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan konsorsium waskita atau Indo Sutech

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :  
1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.  
2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO  
3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.  
4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Nilai Perjanjian : para pihak mengambil porsi sebagai berikut:  
1) Pihak pertama sebanyak 58 %  
2) Pihak Kedua sebanyak 42 %

Tujuan Perjanjian : dalam rangka Pelaksanaan Proyek Kompleks Pabrik Gula Rafinasi Konawe Selatan di Konawe Selatan, Sulawesi Tengah.

HAK DAN KEWAJIBAN: PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.
- 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

PENYELESAIAN SENGKETA :

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

16. Perjanjian kerjasama Operasi tanggal 22 April 2011 dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLTU Rote 2x3 MW di NTT, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK : 1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA.  
2) PT ZUG INDUSTRY TIMUR PIHAK KEDUA.

Objek Perjanjian : pembentukan KSO ZUG Waskita JO

Jangka Waktu : perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila :

- 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir.
- 2) Telah diselesaikannya kewajiban KSO
- 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak.
- 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.

Nilai Perjanjian : ditentukan oleh para pihak

Tujuan Perjanjian : dalam Rangka Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLTU Rote 2x3 MW di NTT

HAK DAN KEWAJIBAN: PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK.
- 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.

PENYELESAIAN SENGKETA:

SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

17. Surat Perjanjian Konsorsium tanggal 15 Desember 2010 dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Malinau 2x3 MW (Netto) dikalimantan Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK	:	1) PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK. SEBAGAI PIHAK PERTAMA. 2) PT PAL INDONESIA PIHAK KEDUA.
Objek Perjanjian	:	pembentukan konsorsium Pal Waskita Karya
Jangka Waktu	:	perjanjian ini di mulai berlaku sejak ditandatangani dan berakhir apabila : 1) Pelaksanaan proyek telah selesai termasuk masa pemeliharaannya serta telah diterimanya pembayaran terakhir. 2) Telah diselesaikannya kewajiban Konsorsium 3) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing- masing pihak. 4) Atas persetujuan bersama antara para pihak dalam perjanjian.
Nilai Perjanjian	:	para pihak mengambil porsi sebagai berikut: 1) Pihak pertama sebanyak 70 % 2) Pihak Kedua sebanyak 30 %
Tujuan Perjanjian	:	dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Malinau 2x3 MW (Netto) dikalimantan Timur
HAK DAN KEWAJIBAN:		PARA PIHAK SEPAKAT DAN MEMILIKI KEWAJIBAN SEBAGAI BERIKUT: 1) PARA PIHAK SEPAKAT DAN MENGIKATKAN DIRI BAHWA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN DI BEBANKAN KEPADA MASING-MASING PIHAK. 2) APABILA TERJADI PEKERJAAN TAMBAH KURANG PADA LINGKUP PEKERJAAN PARA PIHAK DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK.
PENYELESAIAN SENGKETA:		SETIAP PERSELISIHAN YANG MUNGKIN TIMBUL SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PERJANJIAN INI AKAN DISELESAIKAN DENGAN MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PALING LAMA 14 (EMPAT BELAS) HARI .APABILA PERSELISIHAN TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA MUSYARAWAH MAKA PARA PIHAK SEPAKAT MENYELESAIKAN MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI).

#### D. Perjanjian-perjanjian Pembiayaan antara Perseroan dengan Bank:

##### 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")

- a. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian kredit Modal Kerja No. KP.COD/033/PK-KMK/2002 tertuang dalam Akta No.22 tanggal 15 Agustus 2002 dibuat dihadapan Neneng Mursiyati, S.H., pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat dari Bank Mandiri No. TOP.CRO/CLA.706/ADD/2014 tanggal 12 November 2014 Perihal Addendum XVI (Keenambelas) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: KP.COD/033/PK-KMK/2002 Akta Nomor 22 tanggal 15 Agustus 2002 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;

Ketentuan-ketentuan dan sarat-syarat dalam perjanjian kredit:

Limit kredit	:	Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Jenis kredit	:	Kredit Modal Kerja
Sifat kredit	:	Revolving
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja dalam rangka membiayai proyek-proyek konstruksi
Jangka waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2015
Suku bunga	:	10% (sepuluh persen) per tahun dari limit Fasilitas Kredit dibayarkan secara proporsional.
Denda:		2% (dua persen) per tahun diatas tingkat suku bunga fasilitas kredit ini atas setiap keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit.



- Agunan :
- a. Aset Tidak Tetap : (i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp43.438.383.837,- (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
- (ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada/yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp1.922.845.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).
- (iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp846.888.119.000,- sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.
- (iv) Dana Deposito sebesar Rp5.226.000.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.
- (v) Dana Deposito sebesar Rp3.222.200.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.
- b. Aset Tetap : 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:
- 1) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana

- diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
- 2) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 3) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.314.100.000,-, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.761.900.000,-, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp1.674.000.000,- sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan Fasilitas Kredit diluar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi, kecuali jika tidak melewati 300% (tiga ratus persen) *Debt Equity Ratio* maka cukup melakukan pemberitahuan kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian;
- c. Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk para pemegang saham;
- d. Mengikat diri sebagai Penanggung Hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/asset Emiten kepada pihak lain;
- e. Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dengansyarat agunan tersebut diganti dengan yang sejenis dan/atau nilai yang setara serta dpat dibebani dengan hak jaminan;
- f. Menjual atau memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaan/asset;
- g. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;
- h. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi pinjaman Emiten kepada pemegang saham ataupun hutang afiliasi group usaha;
- i. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada pesahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal daripada harga pasar atau menjual dibawah harga pasar;
- j. Mengerjakan proyek turn key untuk proyek yang dibiayai oleh bank.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus Emiten dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Emiten dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri.
- b. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (sisnis utama) yang sejenis dengan Emiten. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan

dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Emiten; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.

- c. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Emiten dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - d. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
  - e. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Emiten akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- b. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit Non Cash Loan dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. KP.COD/005/PK-NCL/2002 tanggal 15 Agustus 2002 Nomor 23, yang dibuat di hadapan Neneng Nursiyati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperbaharui dengan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. KP.CRO/013/PNCL/2007 tanggal 12 November 2007 Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Ny. Toety Junarto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali pada Perjanjian No. TOP.CRO/CLA.705/ADD/2013 tanggal 12 November 2014 Perihal Addendum XIII (Ketiga belas) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor: KP.CRO/013/PNCL/2007 Akta Nomor 10 tanggal 12 November 2007 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup,, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Plafon	:	Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)
Sifat fasilitas	:	<i>Revolving</i>
Tujuan	:	
Penggunaan	:	Untuk penerbitan Bank Garansi, Letter Of Credit, dan SKBDN sublimit TR, serta SCF
Jangka Waktu	:	: 1 (satu) tahun 15 November 2014 sampai dengan 15 November 2015.
Agunan	:	Dikaitkan dengan jaminan seluruh fasilitas pinjaman Perseroan termasuk barang yang dibiayai/ dibeli dengan fasilitas Non Cash Loan.

Fasilitas Kredit NCL ini terdiri atas:

**Bank Garansi (BG) sublimit dari NCL**

Limit	:	eqv. Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)
TujuanPenggunaan	:	Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Jaminan Pembayaran Counter Guarantee, jaminan penanguhan bea masuk ( <i>custom Bons</i> )
Provisi	:	a. Untuk BG Tender 0,75% p.a. b. Untuk BG lainnya 0,85% p.a.
Jangka waktu	:	dapat lebih lama dari underlying dokumennya.

**Letter of Credit (L/C) dan SKBDN switchable dari Bank Garansi**

Limit	:	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
TujuanPenggunaan	:	a. Pembukaan LC/SKBDN antara lain secara <i>at sight, usance, UPAS</i> dan SBLC b. Penerbitan SKBDN dalam valuta rupiah dan valuta asing
Provisi	:	a. Pembukaan LC.SKBDN 0.75% p.a. b. Komisi Akseptasi 1.00% p.a.
Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun 15 November 2014 sampai dengan 15 November 2015.

Agunan : *Cross default* dan *Joint collateral* dengan fasilitas kredit lainnya, termasuk barang yang dibiayai/dibeli dengan fasilitas *Non Cash Loan*

**Fasilitas Supply Chain Financing (SCF) sub limit dari fasilitas Non Cash Loan**

Limit : Rp 1.006.000.000.000,- (satu triliun enam miliar Rupiah)  
 Sifat : *Uncommitted* dan *Revolving*  
 Tujuan/Penggunaan : Pembiayaan *Supply Chain Financing (SCF) Supplier/Sub Kontraktor* atas dasar akseptasi *invoice* dengan rincian  
 a. Pembiayaan proyek umum dibatasi sebesar Rp 550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh miliar Rupiah). Pembiayaan proyek Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dibatasi sebesar Rp 456.000.000.000,- (empat ratus lima puluh enam miliar Rupiah)  
 Provisi : Tarif pembelian tagihan supplier sesuai tarif yang berlaku pada saat transaksi.  
 Jangka waktu : sejak 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2015  
 Tenor : Maksimal 180 hari.

**Fasilitas Trust Receipt (T/R) merupakan sublimit dari fasilitas LC/SKBDN**

Limit : Rp115.000.000.000,- (seratus lima belas miliar Rupiah)  
 Sifat Plafond : *Uncommitted, Advised* dan *Revolving*  
 Tujuan/Fasilitas : menampung kewajiban Impor/SKBDN yang jatuh tempo.  
 Tenor perTransaksi : Maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari termasuk tenor L/C /SKBDN.  
 Suku Bunga : Sesuai ketentuan suku bunga *Trust Receipt* yang berlaku di Mandiri.  
 Provisi : 1,00% p.a. dari nilai *Trust Receipt*, dan dibayar pada saat *Trust Receipt* efektif.  
 Agunan :  
 c. Aset Tidak Tetap : (i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp43.438.383.837,- (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).  
 (ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp1.922.845.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).

- (iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp846.888.119.000,- sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (Cessie) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.
- (iv) Dana Deposito sebesar Rp5.226.000.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.
- (v) Dana Deposito sebesar Rp3.222.200.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.

- d. Aset Tetap : 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:
- 4) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 5) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 6) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukkannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.314.100.000,- , sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.761.900.000,-, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp1.674.000.000,- sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010

Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan Fasilitas Kredit diluar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi, kecuali jika tidak melewati 300% (tiga ratus persen) Debt Equity Ratio maka cukup melakukan pemberitahuan kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian;
- c. Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk para pemegang saham;
- d. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Emiten kepada pihak lain;
- e. Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dengan syarat agunan tersebut diganti dengan yang sejenis dan/atau nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
- f. Menjual atau memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaan/asset;
- g. Melakukan pengambilalihan atau peleburan dengan pihak ketiga lainnya atau mendirikan anak perusahaan baru;
- h. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau memionta penundaan pembayaran hutang kepada instansi berwenang;
- i. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi pinjaman perusahaan Emiten kepada pemegang saham, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar;
- j. Melunasi hutang afiliasi group usaha maupun hutang subordinasi.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus Emiten dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Emiten dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri.
  - b. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (sisnis utama) yang sejenis dengan Emiten. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Emiten; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - c. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Emiten dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - d. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
    - k. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Emiten akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- c. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No. KP.CRO/026/PK-KMK/2007 sebagaimana termuat dalam Akta No.11 tanggal 12 November 2007 dibuat dihadapan Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat dari Mandiri No.TOP.CRO/CLA.704/ADD/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Addendum IX (Kesembilan) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Transaksional No: KP.CRO/026/PK-KMK/2007, Akta Nomor 11 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Limit Kredit | : | Rp765.000.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima miliar Rupiah)                      |
| Jangka Waktu | : | 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2015 |

Jenis/ Sifat Kredit	:	Kredit Modal Kerja Revolving dengan pola penarikan transaksional atas dasar adanya kontrak proyek.
Tujuan Pergunaan	:	Tambahan modal kreja untuk mendukung pelaksanaan proyek Jasa Konstruksi a/d SPK/Kontrak, khusus untuk proyek-proyek di dalam negeri, baik untuk proyek baru (proyek yang belum pernah diajukan pembiayaannya) maupun untuk membiayai proyek yang pernah diajukan/dibiayai sebelumnya oleh KMK Transaksional dan telah dilunasi, sepanjang masih terdapat sisa kontrak/sisa termijn lebih besar dari 50% dari nilai kontrak bruto. Proyek-proyek yang dapat dibiayai tersebut termasuk untuk proyek Joint Operation yang menjadi porsi Perseroan.
Suku bunga	:	a. 10% (sepuluh persen) per tahun dibayar bulanan, setiap tanggal 23. Tingkat bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku pada bank. b. Suku bunga dapat ditentukan saat dilakukan Penarikan Kredit.
Denda	:	3% (tiga persen) per tahun diatas tingkat suku bunga fasilitas kredit atas setiap keterlambatan pembayaran Baki Debet Pokok dan/atau bunga.
Penarikan & Pelunasan	:	a. Besarnya penarikan kredit: 1) Proyek APBN/APBD/BUMN maksimum 40% dari nilai kontrak bruto. 2) Proyek swasta maksimum 30% dari nilai kontrak bruto. 3) Proyek <i>turnkey</i> maksimum 70% dari net project cost. b. Pelunasan kredit berasal dari termijn yang diperoleh dari proyek-proyek yang dikerjakan.
Agunan	:	
e. Aset Tidak Tetap	:	(i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp43.438.383.837,- (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah). (ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada/ yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan

fidusia sebesar Rp1.922.845.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).

- (iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp846.888.119.000,- sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (*Cessie*) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (*Cessie*) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.
- (iv) Dana Deposito sebesar Rp5.226.000.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.
- (v) Dana Deposito sebesar Rp3.222.200.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.

- f. Aset Tetap : 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:
- 7) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 8) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 9) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.314.100.000,- , sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.761.900.000,-, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp1.674.000.000,- sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010



Pembatasan :

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Emiten tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menggunakan Fasilitas Kredit diluar tujuan penggunaan Fasilitas Kredit;
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi, kecuali jika tidak melewati 300% (tiga ratus persen) *Debt Equity Ratio* maka cukup melakukan pemberitahuan kepada Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah kejadian;
- c. Memberikan pinjaman baru kepada siapapun juga termasuk para pemegang saham;
- d. Mengikat diri sebagai Penanggung Hutang terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan harta kekayaan/asset Emiten kepada pihak lain;
- e. Memindahtangankan agunan, kecuali yang menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dengan syarat agunan tersebut diganti dengan yang sejenis dan/atau nilai yang setara serta dapat dibebani dengan hak jaminan;
- f. Menjual atau memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaan/asset;
- g. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi;
- h. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang;
- i. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman dan/atau melunasi pinjaman perusahaan Emiten kepada pemegang saham;
- j. Melunasi hutang afiliasi group usaha maupun utang subordinasi.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- f. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus Emiten dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Emiten dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri.
  - g. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (sisnis utama) yang sejenis dengan Emiten. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Emiten; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - h. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Emiten dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
  - i. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
  - j. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Emiten akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- d. Perseroan telah memperoleh Fasilitas kredit Jasa Pelayanan Transaksi Treasury Line dari Mandiri sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Treasury Line No. KP.CRO/058/PFL/2010 tanggal 29 September 2010 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, yang kemudian diubah terakhir kali dengan Surat dari Mandiri No.TOP.CRO/CLA.703/ADD/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Addendum IV (Keempat) atas Perjanjian Treasury Line Nomor: KP-CRO/058/PFL/2010 tanggal 29 September 2010 tentang Perpanjangan Jangka, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Limit Kredit : National amount sebesar USD 2,000,000. (dua juta dollar Amerika Serikat).

Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan 14 Nove mber 2015.

Jenis/	:	
Sifat Kredit	:	Forex Line
Tujuan	:	Untuk transaksi Treasury ( <i>Foreign Exchange, Spot, Today, Tom, Forward, Swap dan option</i> ) dalam rangka hedging kewajiban/penerimaan valuta asing yang dikaitkan dengan kewajiban/penerimaan Kontrak Valuta Asing dan transaksi LC impor sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Mandiri.
Margin Deposit	:	0% (nol persen).
<i>Underlying Transaction</i>	:	Dokumen transaksi yang dibuka melalui Mandiri.
Tenor Transaksi	:	Maksimal 6 (enam) bulan.
Lain-lain	:	Tarif <i>ForexLine</i> dan ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mandiri.
Agunan	:	
g. Aset Tidak Tetap	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Seluruh persediaan barang milik Perseroan yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10244 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 18 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 24 tanggal 29 September 2010 yang dibuat di hadapan Putri Kusumaningrum, S.H., selaku Notaris pengganti dari Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-129.AH.05.02.TH.2011/P tanggal 1 Februari 2011 dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp43.438.383.837,- (empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh Rupiah).</li> <li>(ii) Seluruh piutang/tagihan Perseroan kepada pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan proyek-proyek Perseroan yang pengerjaannya dibiayai oleh Mandiri, termasuk proyek yang sedang dikerjakan baik sekarang ada/ yang sedang dikerjakan maupun yang ada dikemudian hari yang telah diikat, sebagaimana ternyata pada Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-10425 HT.04.06.TH.2002/STD tanggal 22 November 2002 dengan perubahannya yang terakhir diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 5 tanggal 14 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Lolani Kurniati Irdham-Idroes, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp1.922.845.000.000,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta Rupiah).</li> <li>(iii) Seluruh omzet kontrak proyek yang dan telah diikat dengan nilai obyek jaminan fidusia sebesar Rp846.888.119.000,- sebagaimana ternyata dalam Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (<i>Cessie</i>) Akta No.13 tanggal 12 April 2006 dan perubahannya sebagaimana ternyata dalam Perubahan Pemberian Jaminan Pemindahan Dan Penyerahan Hak (<i>Cessie</i>) Akta No.16 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat oleh dan dihadapan Ny. Toety Juniarto, S.H., Notaris di Jakarta.</li> <li>(iv) Dana Deposito sebesar Rp5.226.000.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AA 499030 dengan No. Rekening 006-0203021641 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2003 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No.KP-COD/001/PGD/2003 tertanggal 13 Maret 2003.</li> </ul>

- (v) Dana Deposito sebesar Rp3.222.200.000,- sebagaimana tercantum dari Surat Deposito Berjangka No. Seri AB 130803 dengan No. Rekening 006-02-0421717-2 atas nama Perseroan, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, Automatic Roll Over, yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2005 oleh Mandiri Kantor Cabang Jakarta DI Panjaitan, yang telah diikat gadai sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Gadai Deposito No. PGD.COD/006/2005 tertanggal 4 April 2005.
- h. Aset Tetap : 3 (tiga) bidang tanah, seluruhnya terletak di Provinsi Riau, Kotamadya Pekanbaru, Kecamatan Limapuluh, Desa/Kelurahan Rintis, dan tercatat atas nama Perseroan, terdiri dari:
- 10) HGB No.302/Rintis, seluas 1.385 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 15/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 11) HGB No.303/Rintis, seluas 1.410 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 16/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019;
  - 12) HGB No.304/Rintis, seluas 1.295 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3 Desember 1998 No. 17/Rintis/1998, sertifikat tertanggal 6 Februari 1999 dan berakhir haknya tanggal 6 Februari 2019.

Demikian berikut segala sesuatu yang telah atau dikemudian hari didirikan diatas tanah-tanah tersebut, yang menurut sifat dan peruntukkannya atau berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tidak bergerak. Atas ketiga tanah tersebut telah diikat dengan rincian sebagai berikut:

- Hak Tanggungan peringkat II (ke dua) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.314.100.000,-, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2471/2002 tertanggal 20 Desember 2002;
- Hak Tanggungan peringkat III (ke tiga) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp2.761.900.000,-, sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan No. 2078/2006 tertanggal 15 Mei 2006;
- Hak Tanggungan Peringkat IV (Ke empat) untuk kepentingan Mandiri dengan nilai pembebanan sebesar Rp1.674.000.000,- sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan No. 1144/2010

Pembatasan :

Dalam Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit PT Bank Mandiri (Perser) diatur pembatasan yang mana tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memindahtangankan barang jaminan.
- b. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi kecuali financial covenant berupa DER (a.d interest bearing) tidak melebihi 300% cukup memberitahukan kepada bank selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah kejadian.
- c. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijaminkan kepada Bank Mandiri kepada pihak lain.

Memberitahukan secara tertulis kepada Mandiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjaid hal-hal sebagai berikut:

- k. Melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan dan/atau perubahan susunan pengurus perusahaan dan/atau perubahan struktur permodalan perusahaan dan/atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak menyebabkan Pemerintah RI tidak menjadi pemegang saham pengendali Waskita dan/atau tidak menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank.
- l. Melakukan penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain dengan *core business* (sisnis utama) yang sejenis dengan Emiten. Dalam hal penyertaan dilakukan pada perusahaan-perusahaan dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Emiten; atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Mandiri, maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- m. Melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Emiten dan tidak menyebabkan pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri. Untuk peleburan dengan pihak ketiga tetap dipersyaratkan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.
- n. Melakukan ekspansi usaha dan/atau investasi baru serta membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada yang tidak mengakibatkan pelanggaran *financial covenant*.
  - d. Mengadakan RUPS yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan, permodalan serta susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham mayoritas. Dalam hal kegiatan korporasi yang dilakukan oleh Emiten akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham pengendali dari Pemerintah RI dan atau mengakibatkan adanya pelanggaran *financial covenant* yang dipersyaratkan oleh Mandiri maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Mandiri.

Saldo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp357.976 juta. Sehubungan dengan pembatasan dari Mandiri berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, dimana Perseroan wajib meminta pemberitahuan kepada Mandiri apabila menerima pinjaman dari pihak lain.

## 2. PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ("BNI")

- a. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015 yang dituangkan ke dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (13) 012/KPI/PK/2005 tanggal 24 Maret 2105 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum Kredit : Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)

Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja

Keperluan : Pembiayaan modal kerja

Jangka waktu: 27 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2016

Suku bunga : 10% (sepuluh persen) p.a. setiap saat sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di BNI.

Jaminan :

- a. Barang-barang Stock telah diikat FEO Notariil No.5 tanggal 13 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Tuti K. Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.C2-4831 HT.04.06.TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 berupa material on site pada proyek-proyek yg dijaminan kepada Bank BNI berupa besi, genteng/asbes, pump buster, kayu papan/kaso/balok, perlengkapan lantai, perlengkapan listrik, pipa, scaffolding, semen, perlengkapan water heater/wastafel, dan lain-lain dengan nilai obyek penjaminan sebesar Rp.8.268.049.363,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tiga Rupiah);
- b. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.2001, yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2006 dan berakhir haknya pada tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.09/2006 tanggal 30 Mei 2006, yang terletak di Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, terdaftar atas nama Emiten, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut

- baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.5.191.600.000,00(lima miliar seratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.323 tanggal 20 April 2007;
- c. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.724, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 1988 dan berakhir haknya tanggal 02 Desember 2007 (telah diperpanjang s/d 1 Desember 2027), seluas 2.098 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.7602/1982 tanggal 7 Oktober 1982, yang terletak di Desa/Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Emiten, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hipotik I senilai Rp.1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.397/T/1988 tanggal 27 September 1988 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.31.000.000.000,00(tiga puluh satu miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.408/2004 tanggal 10 Maret 2004;
- d. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.38, yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2003 dan berakhir haknya tanggal 20 April 2022, seluas 1.332 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.820/AMS/2003 tanggal 27 Maret 2003, yang terletak di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kotamadya Mataram, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, terdaftar atas nama Emiten, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.1.332.000.000,00(satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No.687/2007 tanggal 30 April 2007;
- e. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.01/Tanjungbaru, yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 1987 dan berakhir haknya tanggal 13 Oktober 2027, seluas 1.095 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.2019/1987 tanggal 16 September 1987, yang terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Kabupaten/Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama Emiten, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat dibebani Hipotik I senilai Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.3181 tanggal 13 September 1989 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.2.252.100.000,00(dua miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.01057/2007 tanggal 16 April 2007 dengan nilai total jaminan sebesar Rp.2.282.100.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta seratus ribu Rupiah);
- f. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.772, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 1989 dan berakhir haknya tanggal 20 Desember 2008 (telah diperpanjang s/d 20 Desember 2028), seluas 3.650 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.7601/1982 tanggal 7 Oktober 1982, yang terletak di Desa/Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Emiten, berikut segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hipotik I senilai Rp.1.000.000.000,00(satu miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.597/T/1995 tanggal 29 September 1995 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.31.000.000.000,00(tiga puluh satu miliar Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.407/2004 tanggal 10 Maret 2004;
- g. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.4, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 1988 dan berakhir haknya tanggal 10 November 2018, seluas 2.511 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.212 tanggal 22 Januari 1980, yang terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat dibebani Hak Tanggungan I senilai Rp.651.430.000,00(enam ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.3130/2001 tanggal 5 Desember 2001;

- h. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.7, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Februari 1993 dan berakhir haknya tanggal 7 Februari 2033, seluas 806 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.102 tanggal 28 April 1992, yang terletak di Kelurahan Belakan-Olo, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp.1.270.880.000,00(satu miliar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.3129/2001 tanggal 5 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.460.020.000,00(empat ratus enam puluh juta dua puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.1151/2007 tanggal 16 April 2007;
- i. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.436, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 1988 dan berakhir haknya tanggal 19 Juni 2036, seluas 1.004 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.7735/1986 tanggal 16 September 1986, yang terletak di Desa/ Kelurahan Sungai Raya, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp 464.850.000,- (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.365/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp747.850.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.169/2007 tanggal 20 April 2007;
- j. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.1085, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2006 yang berakhir haknya tanggal 23 November 2026, seluas 1.404 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.738/Jemur Wonosari/2006 tanggal 11 September 2006, yang terletak di Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.2.665.700.000,00(dua miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2952/2007 tanggal 30 April 2007;
- k. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.82, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1988 dan berakhir haknya tanggal 13 April 2028, seluas 2.013 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.2856 tanggal 20 Juni 1988, yang terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.2.027.710.000,00(dua miliar dua puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.4772/2001 tanggal 6 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.2.474.390.000,00(dua miliar empat ratus tujuh puluh empat tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.2948/2007 tanggal 30 April 2007;
- l. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No. 2, yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 1997 berakhir haknya tanggal 25 Juni 2017, seluas 1.000 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.270/1996 tanggal 3 Februari 1996 berakhir haknya 25 Juni 2017, yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.402.860.000,00(empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.390/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.636.540.000,00(enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.239/2007 tanggal 30 Mei 2007;
- m. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No. 24, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 1997 dan berakhir haknya 24 Oktober 2017, seluas 595 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.1100/1996 tanggal 7 Mei 1996, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah

- tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.49.260.000,00(empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.374/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.39.740.000,00(tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.240/2007 tanggal 30 Mei 2007;
- n. 1 (satu) bidang tanah Sertifikat HGB No.13, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1993 dan berakhir haknya 22 Juli 2023, seluas 4.830 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.813/1987 tanggal 23 Desember 1987, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.457.590.000,00(empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.375/2001 tanggal 13 Desember 2001;
- o. 1 (satu) bidang tanah HGB No.14, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 1993 dan haknya 22 Juli 2023, seluas 4.800 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.806/1987 tanggal 23 Desember 1987 berakhir, yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.288.000.000,00(dua ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.375/2001 tanggal 13 Desember 2001; Sertifikat HGB No.13 dan 14 tersebut diatas secara bersama-sama dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.602.410.000,00(enam ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) sesuai sertifikat Hak Tanggungan II No.238/2007 tanggal 30 Mei 2007;
- p. 1 (satu) bidang tanah HGB No.24, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 1993 dan berakhir haknya 25 Mei 2013, seluas 276 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.260/1993 tanggal 6 Maret 1993, yang terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kotamadya Manado, Provinsi Sulawesi Utara, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.263.530.000,00(dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.737/2001 tanggal 12 Desember 2001 dan Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.121.670.000,00(seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.667/2007 tanggal 21 Mei 2007;
- q. 1 (satu) bidang tanah HGB No.30, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Januari 1988, seluas 1.250m<sup>2</sup> sebagaimana berakhir haknya 26 Januari 2027, yang terletak di Desa Sumerta , Kecamatan Denpasar Timur, Provinsi Bali, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.3.404.000.000,00(tiga miliar empat ratus empat juta Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2012/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.18.705.400.000,00(delapan belas miliar tujuh ratus lima juta empat ratus ribu Rupiah) sesuai dengan Cf. Surat Keterangan No. 44/ket/XII/2014 yang telah ditandatangani SKMHT No.254 tanggal 24 Desember 2014;
- r. 1 (satu) bidang tanah HGB No.1, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 1992, seluas 4.040 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No.10174/1990 tanggal 19 Oktober 1990 berakhir haknya 28 Desember 2020, yang terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Emiten, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut baik yang telah ada maupun yang akan ada yang menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai barang-barang tidak bergerak, beserta segala turutan-turutannya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp.1.516.520.000,00(satu miliar lima ratus enam belas juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I No.2927/2001 tanggal 3 Desember 2001 dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat II senilai Rp.994.180.000,00(sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan II No.1613/2007 tanggal 17 April 2007;

- s. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 (dua) unit Toyota New Camry tahun 2010 diikat FEO (Fidusia) Notariil sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan No. (3) 18 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Isyana Wisnuwardhani, Sadjarwo, S.H., Notaris di Jakarta dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-001717 HT.04.06.TH.2004/STD tanggal 10 Maret 2004, yang telah dilakukan perubahan dengan Addendum Perjanjian Fidusia No. (3) 18 tertanggal 6 Februari 2012;
- t. Persedian SJF No. C2-4831.HT.04-06.TH.2001/NTSD diikat FEO (Fidusia) Notariil sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas persedian SJF di Jakarta dan didaftarkan di kantor Pendaftaran Fidusia di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. No. C2-4831.HT.04-06.TH.2001/NTSD tanggal 10 Maret 2004, yang telah ditetapkan dalam akta No. 5 tanggal 13 Agustus 1998.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
  - b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
    - Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
    - Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
    - Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
    - Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
  - c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseoran maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - i. Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - ii. Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  - e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
  - f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- b. Perseroan telah memperoleh Fasilitas Garansi Bank dari BNI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.004/KPS/PPGB/2010 tanggal 18 Juni 2010 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23Maret 2015 perihal PerpanjanganFasilitas Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:

Maksimum	:	Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)
Keperluan	:	Untuk keperluan penjaminan tender/uang muka/ pelaksanaan/pemeliharaan/pembayaran proyek-proyek swasta/pemerintah/bantuan luar negeri.
Bentuk/Sifat	:	Plafond/ Revolving
Jangka Waktu	:	27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016
Marginal Deposit	:	0% (nol persen).



- Jaminan : *Cross collateral* dengan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015;

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
  - b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
    - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
    - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
    - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
    - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
  - c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - ii. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - (1) Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - (2) Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - iv. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  - e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
  - f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- c. Perseroan telah memperoleh Fasilitas LC/SKBDN dari BNI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit* No.116 tanggal 24 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23Maret 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit yang dituangkan ke dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter Of Credit* No. (3) 002/BIN/PPLC/2012 tanggal 24 Maret 2015,dengan ketentuan sebagai berikut:

- Maksimum : USD40,000,000,000 (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat)
- Keperluan : LC/SKBDN/SBLC  
Untuk pengadaan barang kebutuhan proyek yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri (SKBDN) dan dapat juga dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan (SBLC).  
Jangka waktu tiap LC/SKBDN tidak melebihi 360 hari dan untuk SBLC sesuai dengan jangka waktu dokumen yang menjadi dasar penerbitan.
- Bentuk/sifat : LC/SKBDN  
Sight atau Usance atau Upas
- Syarat Penggunaan : Mengajukan permohonan perbitan LC/SKBDN/SBLC dengan melampirkan dokumen berupa Purchase Order atau surat

- pemesanan barang atau dokumen lainnya yang mendukung penerbitan LC/SKBDN/SBLC dimaksud.
- Jangka Waktu : 24 Juli 1992 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016
- Provisi/Fee/ Charges : a. Opening L/C / SKBDN Fee sebesar 0,125% (nol koma satu dua lima persen) per tahun, dihitung dari nominal L/C yang dibuka minimal USD 50.00 (lima puluh dollar amerika serikat).  
 b. *Acceptance L/C* / SKBDN Fee sebesar 0,0625% (nol koma enam dua lima persen) dari nominal, minimal USD 30.00 (tiga puluh dollar amerika serikat).  
 c. Ketentuan tarif dapat berubah untuk disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku di BNI.
- Jaminan : *Cross collateral* dengan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:  
 a. Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015;  
 b. Akta Perjanjian Kredit No.004/KPS/PPGB/2010 tanggal 18 Juni 2010 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23Maret 2015 perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :

Tanpa pemberitahuan tertulis kepada BNI, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan melunasi fasilitas kredit.
  - b. Menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik Perseroan dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali:
    - i. Menjual atau mengalihkan aset dengan ketentuan yang bersifat *arm's length* dan dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
    - ii. Menjual atau dengan cara lain mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe, sifat dan kualitasnya.
    - iii. Menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material.
    - iv. Menjual atau mengalihkan aset yang sudah tidak berguna atau tidak dipakai lagi dengan ketentuan yang bersifat *arm's length*.
  - c. Mengubah usaha yang sekarang dijalankan/diusahakan oleh Perseroan yang dapat menimbulkan akibat material, kecuali dipersyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Melakukan peleburan, penggabungan, pemisahan, pembubaran Perseroan maupun rekonstruksi (tindakan korporasi) selain daripada hal berikut:
    - i. Reorganisasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tidak memiliki akibat material.
    - ii. Tindakan korporasi dengan anggota lain dalam Group dengan ketentuan bahwa tindakan korporasi tersebut dilakukan dengan syarat:
      - (1) Perseroan akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*) dan akan memiliki status hukum yang sama setelah dilakukan tindakan korporasi.
      - (2) Tidak ada akibat material setelah terjadinya tindakan korporasi.
    - iii. Tindakan korporasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - iv. Pemisahan dimana saudara menjadi pemegang saham mayoritas.
  - e. Mengubah anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material.
  - f. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang kepada instansi yang berwenang.
- d. Perseroan telah memperoleh Fasilitas KMK *Open Account Facility* (OAF) dari BNI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.005/BIN/PK/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir kali melalui Surat No. BIN/2.2/048/R tanggal 23 Maret 2015 yang dituangkan pada Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (4) 005/BIN/PK/2012 tanggal 24 Maret 2015 yang dan Perjanjian Pemberian Fasilitas

OAF No. 05/BIN/PK/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang keduanya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup yang kemudian dilakukan pembaharuan berdasarkan Pembaharuan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Supply Chain Financing Dengan Skim Open Account Financing No. BIN/004/PKS/2015 tanggal 24 Maret 2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Maksimum : Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) ditambah maksimum sebesar Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) sehingga total maksimum menjadi sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
- Keperluan : Pembiayaan invoice/tagihan supplier/subkontraktor yang telah diakseptasi oleh Perseroan
- Tingkat bunga, provisi Dan biaya administrasi : Tingkat bunga (diskonto), Provisi dan biaya administrasi ditetapkan oleh BNI secara berkala
- Jangka Waktu : Fasilitas maksimum Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2016.  
Fasilitas maksimum Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2015.
- Jaminan : *Cross collateral* dengan perjanjian-perjanjian kredit sebagai berikut:
- a. Perjanjian Kredit No.012/KPI/PK/2005 tanggal 29 April 2005 yang dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat BNI No: BIN/2.2/049/R tanggal 23 Maret 2015;
  - b. Akta Perjanjian Kredit No.004/KPS/PPGB/2010 tanggal 18 Juni 2010 dibuat secara dibawah tangan dan bermaterai cukup sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23Maret 2015 perihal PerpanjanganFasilitas Kredit.
  - c. Akta Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit* No.116 tanggal 24 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Surat No. BIN/2.2/049/R tanggal 23Maret 2015 perihal PerpanjanganFasilitas Kredit.
- Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Pihak Pertama akan menyediakan informasi dan keterangan/data/dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemberian fasilitas Supply Chain Financing dengan Skim OAF ("SCF/OAF");
  - 2) Pihak Pertama akan menyampaikan invoice kepada Pihak Kedua platform FSCM dan atas penyampaian dimaksud;
  - 3) Jika Mitra Pihak Pertama memenuhi syarat yang ada pada Pihak Kedua, Pihak Pertama memebrikan persetujuan, wewenang dan instruksi kepada Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran invoice;
  - 4) Pihak pertama wajib melakukan pembayaran pelunasan atas invoice;
  - 5) Menyediakan dana pada rekening Pihak Pertama yang dipindahbukukan ke Rekening Escrow minimal sejumlah nilai invoice yang telah dibiayai.
  - 6) Keterlambatan pendudukan kewajiban Pihak Pertama yang tertunggak dikarenakan kelalaian Pihak Pertama akan dikenakan denda mengacu pada suku bunga Kredit Modal Kerja ditambah 5% (lima persen) p.a. untuk Rupiah dan 2 % (dua persen) p.a. untuk valuta asing, proposional dengan waktu keterlambatan pembayaran.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- 1) Pihak Kedua akan memberikan konfirmasi penerimaan invoice kepada pihak pertama;
- 2) Pihak Kedua akan memproses dan membukukan ke Rekening Mitra pada hari yang sama, sepanjang Invoice yang disampaikan melalui platform FSCM diterima paling lambat pk 15.00 WIB dengancatatan Limit Fasilitas mecukupi.
- 3) Pihak kedua berhak menyetuju atau menolak sebagian atau seluruh permohonan Fasilitas SCF/OAF melalui Platform FSCM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua, termasuk perpanjangan atau perubahannya;
- 4) Berhak melakukan konfirmasi dan penelitian terhadap kebenaran data termasuk melakukan peninjauan langsung kepada Pihak Pertama ataupun pihak ketiga lainnya terkait kelayakan pemberian SCF/OAF.
- 5) Wajib memberikan informasi kepada Pihak Pertama menyangkut persyaratan dan hal yang harus dipenuhi oleh Pihak Pertama berkaitan dengan permohonan SCF/OAF;
- 6) Pihak Kedua akan memproses setiap permohonan SCF/OAF yang telah mendapatkan akseptasi Pihak Pertama dan kelengkapan persyaratan yang terpenuhi;
- 7) Pihak kedua akan melakukan pembayaran invoice kepada Mitra Pihak Pertama yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia;
  - b. Merupakan rekanan resmi yang dibuktikan dengan Dokumen Kontrak;
  - c. Memperoleh Rekomendasi dari Pihak Pertama
  - d. Terdaftar dalam daftar mitra pihak pertama;
  - e. Sesuai ketentuan yang berlaku di pihak kedua.
- 8) Pada tanggal jatuh tempo invoice, maka Pihak Kedua akan mendebet Rekening Escrow;

Pada 31 Desember 2014 pinjaman ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dilunasi. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan secara tidak langsung melalui pemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM.

### 3. PT BANK PANIN Tbk ("PANIN")

Perseroan telah mendapat fasilitas kredit dari Panin sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 002/FIT-MM/LEG/06 tanggal 23 Mei 2006 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang kemudian diubah terakhir kali melalui Surat No. 129/IBD/EXT/15 tanggal 12 Mei 2015 Perihal Fasilitas Pinjaman Money Market dan Bank Garansi oleh dan antara Perseroan dan Panin yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.

Fasilitas-fasilitas yang didapat dari Panin adalah:

1. Pinjaman Money Market
 

Plafond	:	Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
Tujuan	:	Modal kerja umum
Sifat Fasilitas	:	<i>Revolving</i>
Jatuh Tempo	:	24 Mei 2016
Jangka Waktu Pinjaman	:	1 bulan, atau 3 bulan untuk setiap penarikan pinjaman. Jangka waktu masing-masing pinjaman tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas.
Suku Bunga	:	- Jangka waktu pinjaman 1 bulan : JIBOR 1 bln + 2,5% per tahun. - Jangka waktu pinjaman 3 bulan : JIBOR 1 bln + 3,00% per tahun.

- LPS Rate yang digunakan adalah tingkat bunga penjamin simpanan dalam Rupiah untuk Bank Umum yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan berlaku pada tanggal penarikan pinjaman.
- Denda : 5% pertahun di atas tingkat suku bunga pinjaman yang berlaku.
2. Fasilitas Bank Garansi
- Plafond : Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang merupakan sub limit dari Fasilitas Pinjaman Money Market dan secara agregat outstanding Fasilitas Pinjaman Money Market dan Bank Garansi maksimum sebesar Rp Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).
- Tujuan : Jaminan pembayaran uang muka proyek, jaminan keikutsertaan tender proyek, jaminan retensi proyek dan jaminan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
- Sifat Fasilitas : *Revolving*
- Jatuh Tempo : 24 Mei 2016
- Jangka Waktu BG : Maksimum 6 bulan
3. Fasilitas Transaksi Valuta Asing
- Plafond : USD 5.000.000,- (lima juta dollar amerika serikat)
- Tujuan : Menunjang kebutuhan operasional Emiten akan valuta asing yang timbul sehubungan adanya beberapa proyek di luar negeri yang sedang dan akan dikerjakan dalam denominasi USD.
- Jenis Transaksi Valas : *Valuta Today, Tomorrow and Spot*
- Jatuh Tempo : 24 Mei 2016
- Denda Keterlambatan : - 2% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban kewajiban dalam mata uang USD.  
- 4% per bulan atas setiap keterlambatan pembayaran kewajiban dalam mata uang Rupiah.
- Kondisi kedua fasilitas
- Jaminan :  
Fidusia atas piutang dan/atau tagihan yang timbul dari kontrak proyek yang sudah ada dengan nilai minimal 100% dari pokok pinjaman.
- Pembatasan (*Negative covenants*) :
- Sebelum semua pokok pinjaman serta bunga dan biaya-biaya lain yang terhutang dilunasi, maka Emiten berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercantum dibawah ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Panin:
- Menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada financial covenant. Bila tidak melanggar, Emiten cukup memberi pemberitahuan tertulis kepada Panin selambatnya 14 hari setelah diterimanya pinjaman atau kredit baru tersebut;
  - Mengikatkan diri sebagai penjamin (*Borg*) terhadap pihak ketiga;
  - Membubarkan atau melikuidasi perusahaan;
  - Merubah bidang/jenis usahanya;
  - Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutangnya (*surseance van betaling*);
  - Merubah bentuk hukum atau status hukum perusahaan;
  - Merubah anggaran dasar perusahaan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perubahan anggaran dasar selain Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha cukup dilakukan pemberitahuan tertulis kepada Panin selambatnya 14 hari setelah dilaksanakan perubahan anggaran dasar dimaksud;
  - Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga;
  - Menyewakan/memindah tangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan baik barang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - Memindahtangankan perusahaan dalam bentuk apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga;
  - Membayar hutangnya kepada pemegang saham dan atau para peseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari;

- l. Melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham;
- m. Memperbolehkan pemegang saham untuk:
  - (1) menarik kembali modalnya yang telah disetor;
  - (2) menjaminkan atau menggadaikan saham perusahaan.

Khusus untuk hal-hal dibawah ini cukup dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Panin selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan:

- a. merubah susunan pengurus
- b. membagikan deviden perusahaan
- c. membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada
- d. mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada

Sehubungan dengan pembatasan dari Panin berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, dimana Emiten telah mendapat persetujuan tertulis dari Panin berdasarkan Surat Nomor 1610/WK/DIR/2015 tanggal 15 April 2015.

Saldo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp300.000 juta.

#### 4. PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (“BRI”)

1. Emiten telah memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi dari BRI sebagaimana tertuang dalam Akta perjanjian kredit Modal Kerja Konstruksi No. 36 tanggal 11 Juni 2010 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Surat No. R.II.100-ADK/DKR-2/04/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Penawaran Putusan Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK dan Surat No. R.II.124-ADK/DKR-2/04/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Pemberitahuan Putusan Kredit, dengan Ketentuan-ketentuan dan sarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas	:	Rp.800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar Rupiah)
Jenis Kredit	:	KMK Konstruksi Plafond
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja untuk membiayai proyek yang dikerjakan oleh Emiten sehubungan dengan adanya proyek/ pekerjaan pembangunan, baik untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan proyek-proyek di luar pemerintah dan BUMN atas persetujuan BRI dalam hal ini Divisi Bisnis BUMN BRI. Besarnya maksimum kredit untuk masing-masing proyek dihitung sesuai rumus pada KMK transaksional.
Sifat/bentuk kredit	:	Pseudo R/K Maks Co tetap. (Hasil pembayaran dari proyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit BRI harus digunakan untuk menurunkan baki debit kredit dan dapat ditarik kembali untuk keperluan pembiayaan proyek lain dengan persetujuan BRI dalam hal ini Divisi Bisnis BUMN BRI).
Jangka Waktu	:	Plafond Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) sejak 10 Juni 2014 s/d penandatanganan akad kredit. Plafond Rp 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar sejak penandatanganan akad kredit sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.
Suku bunga	:	10,00% (sepuluh persen) per tahun, reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
Provisi	:	0,50% (nol koma lima nol persen) dari plafond kredit.
Penalty Rate	:	2% p.a. (dua persen annum) diatas suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga.
Agunan	:	
1. Agunan Pokok		
a.		Proyek-proyek yang dikerjakan Emiten sesuai dengan proyek yang dibiayai BRI minimal mengcover 120% (seratus dua puluh persen);
b.		Proyek-proyek dimaksud diserahkan kepada BRI secara cession dengan nilai sebesar Rp.1.700.000.000.000,00 (satu trilyun tujuh ratus miliar Rupiah) yang telah dituangkan dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan (Cession) sebagai Jaminan tanggal 3 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang diubah dengan akta Perubahan Pemberian Jaminan No. 9 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., Notaris di Jakarta.

2. Agunan Tambahan

Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 655/Braga, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25 April 2003, Nomor 168/Braga/2003, seluas 1.535 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Baraga, atas nama Emiten yang telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp 16.186.000.000,- (enam belas miliar seratus delapan puluh enam juta Rupiah) sesuai dengan SHT Peringkat I No. 8952/2010 tanggal 30 September 2010 dan Peringkat II (dua) sebesar Rp.1.713.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga belas juta Rupiah);

Pembatasan (Negative Covenant) :

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Emiten tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Emiten sendiri.
- b. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau sesuatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada afiliasinya.
- c. Menyewakan asset yang dijaminan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha.
- d. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

2. Emiten telah memperoleh Fasilitas Bank Garansi interchangeable dengan KMKI/PJI dari BRI sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. 5 tanggal 3 Desember 2010 dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah Surat No. R.II.100-ADK/DKR-2/04/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Penawaran Putusan Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK dan Surat No. R.II.124-ADK/DKR-2/04/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Pemberitahuan Putusan Kredit, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas	:	sebesar Rp.2.000.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Plafond BG dan KMKI/PJI bersifat interchangeable, sehingga total outstanding penggunaan KMKI/ PJI ditambah BG tidak boleh melampaui maksimum plafond sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Untuk fasilitas BG ditetapkan maksimal penggunaan sampai dengan Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Untuk fasilitas KMKI/PJI ditetapkan maksimal penggunaan sampai dengan Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar dengan maksimal fasilitas PJI sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
Jenis Kredit	:	BG/KMKI/PJI
Agunan	:	Terkait dengan fasilitas KMK Konstruksi

a. Ketentuan Bank Garansi (BG):

Plafond BG	:	Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)
Keperluan Bank Garansi	:	digunakan untuk penerbitan jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan jaminan pemeliharaan.
Jangka Waktu	:	Plafond Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) sejak 10 Juni 2014 s/d penandatanganan akad kredit. Plafond Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) sejak penandatanganan akad kredit sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.
Tenor	:	sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan Bank Garansi dapat dilayani dengan tenor lebih dari 1 tahun sepanjang didukung oleh kontrak kerja yang mensyaratkan hal tersebut dan telah mendapat persetujuan Divisi Bisnis BUMN BRI.
Provisi	:	- Tender dan Advanced Payment Bond: 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan. - Performance dan Maintenance Bond: 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.

- Bank Garansi lainnya : 0,50% dari nilai BG yang diterbitkan.
- Besarnya provisi minimal untuk BG Rp.100.000,00(seratus ribu Rupiah)

b. Ketentuan KMKI:

Plafond KMKI	:	Maksimum Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah)
Jenis Pinjaman	:	Kredit Modal Kerja Impor
Keperluan KMKI	:	untuk memback up fasilitas PJI dan menampung LC/SKBDN yang telah jatuh tempo atau tidak terbayar.
Jangka Waktu	:	sejak 10 Juni 2015 samapi dengan 10 Juni 2016.
Tenor	:	sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan KMKI dapat dilayani dengan tenor lebih maksimal 180 hari.
Provisi	:	0,75% (nol koma tujuh lima persen) dari plafond kredit, dibayarkan secara proporsional

c. Ketentuan Pengangguhan Jaminan Impor(PJI)

Plafond PJI	:	Maksimum Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
Jenis Pinjaman	:	PJI
Keperluan KMKI	:	PJI digunakan untuk pembelian barang dalam rangka proyek yang dikerjakan Emiten baik dari luar negeri (dengan menggunakan L/C) maupun dalam negeri (menggunakan SKBDN).
Jangka Waktu	:	sejak 10 Juni 2015 samapi dengan 10 Juni 2016.
Tenor	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sight, sejak pembukaan L/C / SKBDN sampai dengan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak barang atau dokumen tiba.</li> <li>- usance, sejak pembukaan LC / SKBDN sampai dengan jatuh tempo wesel impor dengan maksimal 180 hari sejak B/L date.</li> </ul> <p>Sepanjang availability period belum jatuh tempo, setiap penerbitan KMKI dapat dilayani dengan tenor lebih maksimal 180 hari.</p>
Provisi	:	1,8% (satu koma delapanpersen) minimal USD 50 (lima puluh Dollar Amerika Serikat)

Pembatasan (Negative Covenant) :

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Emiten tidak diperkenankan, antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit diri Emiten sendiri.
- b. Menyewakan asset yang dijaminan di BRI kepada pihak lain, kecuali untuk operasional usaha.
- c. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

3. Emiten telah memperoleh Fasilitas Bill Purchase Line dari BRI sebagaimana tertuang Surat No. R.II.100-ADK/DKR-2/04/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Penawaran Putusan Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK dan Surat No. R.II.124-ADK/DKR-2/04/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Pemberitahuan Putusan Kredit, dengan Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Jumlah Fasilitas	:	Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah)
Jenis Kredit	:	Commercial Line
Tujuan Penggunaan	:	Batas Penggunaan Pengambilalihan Hak Tagih (Bill Purchase Financing) sub-kontraktor, supplier, dan mandor kepada Emiten.
Sifat/bentuk kredit	:	Committed Line.
Jangka Waktu	:	berlaku sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.
Suku bunga	:	10,00% (sepuluh persen) per tahun, reviewable setiap saat sesuai ketentuan suku bunga pinjaman yang



	berlaku di BRI. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan tertulis dan bersifat mengikat.
Provisi	: 0,50% (nol koma lima nol persen) dari plafond kredit.
Penalty Rate	: 2% p.a. (dua persen annum) diatas suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga.
Agunan	: Tagihan Sub-Kontraktor, Supplier dan Mandor kepada Emiten pada saat Pengambilalihan Hak Tagih Atas dasar Non LC

## 5. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN Tbk (“BJB”)

Perseroan memperoleh fasilitas kredit Modal Kerja sub *limit non cash loan* yang dapat digunakan untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN), LC, dan Bank Garansi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 94 tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Dr. Hj. Yenni Yunithwati Rukmana, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 30 April 2015 yang dibuat dihadapan Indra Meidi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Jenis Kredit	: KMKK stand by Loan ( <i>Unsecured Loan</i> ) Sub Limit Non Cash Loan (berlaku substitutif)
Non Cash Loan Marginal Deposit 0%	: Dapat dipergunakan sebagai sarana disposisi kredit untuk transaksi sebagai berikut: 1. SKBDN 2. L/C 3. Bank Garansi
Sifat Kredit	: Revolving dengan Proyek yang berbeda
Plafond Kredit	: Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan	: - Modal Kerja Usaha Jasa Konstruksi dan pengadaan untuk proyek yang sumber dananya berasal dari APBN/ APBD/ BUMN/ BUMD. - Penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)/ LC/ Bank Garansi.
Jangka Waktu	: sejak tanggal 8 Februari 2015 sampai dengan 8 November 2015
Suku Bunga Kredit	: 10% (sepuluh persen) p.a. efektif <i>Floating Rate subject to review Bank</i> .
Agunan	: Fidusia atas tagihan temijn proyek APBN/APBD/BUMN/ BUMD senilai Rp.312.500.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) yang akan diikat Fidusia senilai Rp.312.500.000.000,00 (tiga ratus dua bela miliar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 74 tanggal 27 Februari 2015 yang dibuat dihadapan DR. Hajjah Yenni Yunithawati Rumana, S.H., Notaris di Bandung.

Pembatasan (*Negative Covenant*) :  
Memberitahukan secara tertulis kepada BJB selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadi hal-hal berikut:

- Debitur melakukan spin off, penyertaan modal baru pada perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-persusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang sejenis dengan Debitur.
- Debitur melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan *core business* yang sejenis dengan Debitur.

Tanpa pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

- Dalam hal spin off, penyertaan dilakukan pada perusahaan lain dengan *core business* (bisnis utama) yang berbeda dengan Debitur atau penyertaan/ investasi pada perusahaan-perusahaan baru tersebut menyebabkan pelanggaran financial covenant yang dipersyaratkan oleh Bank.
- Untuk penggabungan dan peleburan dengan pihak ketiga.
- Memindah tangganan agunan/tagihan termijn.

- d. Mengubah bentuk dan atau tata susunan objek agunan kredit.
- e. Memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama/sejenis, kecuali dalam transaksi usaha yang wajar.
- f. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Emiten yang dibiayai kepada pihak lain.
- g. Mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.
- h. Meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Emiten, yang dapat menghambat pada kewajiban pembayaran kepada BJB.
- i. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban Emiten atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

#### 6. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (“EXIM BANK”)

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 22 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 066/ADDPK/03/2015 tanggal 23 Maret 2015, termasuk sublimit Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Exim Bank No. 23 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., *Master of Public Administration*, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Penjaminan Indonesia Exim Bank No. 069/ADDPK/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	max. Rp 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) termasuk sublimit Fasilitas Penjaminan Exim Bank dengan limit maksimal sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Fasilitas max. Rp 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) merupakan satu kesatuan dengan sublimit Fasilitas Penjaminan Exim Bank maksimal sebesar Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Kredit Modal Kerja Ekspor
Sifat Fasilitas	:	<i>Revolving Transaksional</i>
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan modal kerja dan/atau Jaminan Indonesia Eximbank untuk proyek luar negeri atau pun proyek dalam negeri yang terkait atau menunjang perdagangan internasional (ekspor).
Jangka Waktu	:	1 (satu) terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 s.d 27 Maret 2016
Suku Bunga	:	9,25% (sembilan koma dua lima persen)per tahun.

Agunan :

- a. Fidusia piutang milik Debitur atas kontrak yang dibiayai dan/atau dijamin oleh Kreditur minimal sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari total plafond atau sebesar Rp 1.080.000.000.000,- (satu triliun delapan puluh miliar rupiah);
- b. Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp 5.153.000.000,- (lima miliar seratus lima puluh tiga juta Rupiah) atas 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut dan segala sesuatu yang dikemudian hari akan ada atau melekat pada atau berdiri di atas bidang tanah tersebut yaitu:
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00592/Ciputat atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 12 Mei 2006 No. 7/Ciputat/2006 seluas 3.155 m<sup>2</sup> (tiga ribu seratus lima puluh lima meter persegi) terdaftar atas nama Perseroan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 28.04.14.01.00554 yang ibyek Hak Tanggungannya meliputi seluruh bangunan yang ada diatas tanah tersebut dan segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut, baik sekarang atau dikemudian hari ada yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dapat dianggap sebagai barang tidak bergerak.

Pembatasan (*Negative Covenant*):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Exim Bank, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Exim Bank bahwa nilai jaminan yang diserahkan oleh Perseroan kepada Exim Bank belum mencukupi, kecuali kewajiban timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan Exim Bank.

- b. Melakukan akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut Kebijakan Pemerintah.
- c. Menggunakan Fasilitas Kredit selain daripada yang telah ditentukan dalam tujuan penggunaan fasilitas pada perjanjian kredit ini.
- d. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
- e. Menjual atau memindahkan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan yang sudah diserahkan sebagai jaminan kepada Exim Bank.
- f. Meminjamkan uang kepada siapa pun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan.
- g. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

**Kewajiban Perseroan:**

Perseroan menyampaikan secara tertulis kepada Eximbank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham yang acaranya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi usaha, penyertaan modal atau pembelian saham kepada perusahaan lain, sejauh tidak merubah bisnis inti perusahaan.
- b. Mengubah Anggaran Dasar atau mengubah status perseroan.
- c. Membagikan dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga dan dalam jumlah berapa pun juga kepada pemegang sahamnya kecuali dalam rangka meningkatkan struktur permodalan perusahaan.
- d. Mengubah atau memperbolehkan struktur permodalannya diubah.
- e. Mengubah komposisi pemegang saham Perseroan dan pengurusnya (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris).

Saldo per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 829.404 juta. Sehubungan dengan pembatasan dari Eximbank berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, Perseroan telah mendapat persetujuan tertulis kepada Eximbank berdasarkan Surat dari Eximbank No. BS.0215/PBD/09/2014 tanggal 9 September 2014.

- a) Emiten memperoleh fasilitas Kredit Investasi Ekspor sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Ekspor No. 50 tanggal 23 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	Fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 771.178.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta Rupiah). Fasilitas Kredit Investasi IDC ( <i>Interest During Construction</i> ) sebesar Rp 78.822.000.000,- (tujuh puluh delapan ratus dua puluh dua juta Rupiah). Total limit fasilitas Kredit yang diterima adalah sebesar RP 850.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah).
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas Kredit Investasi
Sifat Fasilitas	:	Non Revolving fasilitas Kredit Investasi dan Fasilitas Kredit Investasi IDC ( <i>Interest During Construction</i> )
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan pembangunan Ruas Jalan Tol Pejagan-Pemalang yang dimiliki oleh PT. Pejagan Pemalang Tol Road ("PPTR")
Jangka Waktu	:	Fasilitas Kredit Investasi diberikan maksimal 10 (sepuluh) tahun termasuk <i>Grace Period</i> 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian. Fasilitas Kredit Investasi IDC diberikan maksimal 2 (dua) tahun sejak tanggal perjanjian.
Suku Bunga	:	10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun.
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Gadai atas seluruh saham yang diterbitkan PPTR baik yang ada saat ini maupun yang akan dikeluarkan dikemudian hari.</li> <li>2) Tanda tangan Perjanjian Pengalihan Hak PPJT (Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol atau Hak Konsesi Pengusahaan Jalan Tol, sebagaimana berdasarkan Akta</li> </ul>

Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Pejagan-Pemalang No. 5 tanggal 7 Juli 2011 jo. Akta Amandemen I No. 5 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Pejagan – Pemalang tanggal 19 September 2014 yang keduanya dibuat dihadapan Rina Utami Djauhari, S.H., Notaris di Jakarta.

- 3) Fidusia atas proceed dari ganti rugi Pemerintah yang terkait dengan proyek sebagaimana berdasarkan Addendum I Perjanjian Pemberitahuan Dukungan Pemerintah (PPDP) tanggal 11 September 2014 jo. Perjanjian PPDP No. 03/KU.08.01/PPDP/SK DDPPTJT/V/2011 dan Perjanjian Dukungan Pemerintah tanggal 18 Mei 2011 dan PPDP NO. 04/KU.08.01/PPDP/DDPPTJT/IV2013 serta surat/dokumen terkait dengan nilai penjaminan sebesar Rp 7.332.337.018 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan belas Rupiah).
- 4) *Banker's Clause* atas asuransi yang terkait dengan proyek.
- 5) Fidusia atas pendapatan jalan tol yang ditampung dalam *Collection Account/Escrow Account* yang terkait dengan proyek, yang saat ini senilai Rp 0,- (nol Rupiah) dan nantinya akan dilakukan pengikatan secara bertahap setelah Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang telah beroperasi, sampai mencapai Nilai Penjaminan sebesar RP 2.706.076.000.000,- (dua triliun tujuh ratus enam miliar tujuh puluh enam juta Rupiah).
- 6) Fidusia atas aset yang dibeli dengan fasilitas kredit ini termasuk namun tidak terbatas pada kantor, mess, kendaraan atau alat berat, sepanjang pembebanan atas aset tersebut diperbolehkan dalam PPJT dan disetujui BPJT.
- 7) Gadai atas minimal 30% saham yang diterbitkan WTR, baik yang ada saat ini maupun yang akan dikeluarkan dikemudian hari.

*Pembatasan (Negative Covenant):*

Selama Emiten masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Exim Bank, Emiten dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan kepemilikan saham PPTR.
- b. Melakukan perubahan kepemilikan atas hak konsesi.

Selama Emiten masih memiliki kewajiban membayar kepada Exim Bank dan/atau selama jangka waktu perjanjian kredit ini, maka tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu, Emiten dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran fasilitas kredit.
- b. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas sebagian atau seluruh hak atas harta kekayaan Emiten selain untuk kegiatan usaha sehari-hari, kecuali menurut kebijakan Pemerintah.
- c. Memperoleh pinjaman baru yang mengakibatkan Emiten menjadi berhutang baik secara langsung ataupun tidak langsung kecuali dalam rangka transaksi usaha yang lazim.
- d. Dalam hal Emiten merupakan badan usaha, melunasi hutang kepada pemegang saham atau pesero pengurus, dan/ atau pesero komanditer sebelum kewajiban kepada bank lunas.
- e. Mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Emiten dinyatakan pailit atau dalam keadaan penundaan pembayaran hutang atau mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar Emiten dinyatakan pailit atau diletakkan dalam keadaan penundaan pembayaran hutang.
- f. Bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan emiten kepada pihak lain sepanjang menurut pertimbangan bank exim bahwa nilai jaminannya belum mencukupi, kecuali kewajiban tersebut timbul untuk fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Exim.
- g. Menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Emiten yang sudah diserahkan sebagai agunan kepada Bank Exim.
- h. Melakukan transaksi dengan suatu pihak tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara di luar kebiasaan dagang yang ada.
- i. Meminjamkan uang kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya.
- j. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/ atau kewajiban Emiten atau fasilitas kredit kepada pihak lain.

- k. Menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Emiten atas fasilitas kredit kepada pihak lain.
- l. Melakukan pengikatan yang akan berdampak terhadap terhambatnya kewajiban Emiten kepada Bank Exim

#### 7. PT BANK UOB INDONESIA (“UOB”)

Perseroan memperoleh fasilitas Kredit sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan IV Terhadap Perjanjian Kredit tanggal 20 April 2015 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan rincian fasilitas-fasilitas sebagai berikut:

Plafond	:	max. Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)
Jenis Fasilitas	:	Fasilitas PC, LC, SKBDN, dan BG yang masing-masing tidak melebihi Rp 200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah)
Tujuan Penggunaan	:	Fasilitas PC untuk pembiayaan kontrak dan Fasilitas LC, SKBDN, dan BG untuk keperluan Modal Kerja.
Jangka Waktu	:	jatuh tempo pembayaran pada tanggal 19 Desember 2015
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fidusia atas Tagihan Piutang sebagaimana pemebrian jaminan diberikan dengan akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta;</li><li>• Jaminan gadai atas SPA sebagaimana jaminannya diberikan dengan akta Pemberian Jaminan Gadai atas Rekening tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta;</li><li>• Pemberian jaminan kuasa untuk mencairkan dana yang ada di SPA sebagaimana pemberian jaminan kuasanya diberikan dengan Kuasa Mencairkan Rekening tanggal 10 April 2013 yang dibuat di hadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta;</li></ul>

#### Pembatasan (Negative Covenant):

Selama Perseroan masih memiliki kewajiban membayar kepada UOB, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang;
- b. Melakukan penggabungan usaha, akuisisi, peleburan atau pemisahan usaha kecuali konsolidasi atau merger antara Debitur dengan subsidiarinya;
- c. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
- d. Menggadaikan saham perusahaan Debitur;
- e. Melakukan penerbitan obligasi atau surat hutang di dalam maupun di luar Pasar Modal yang melanggar ketentuan Rasio Keuangan, namun apabila tidak melanggar ketentuan Rasio Keuangan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit dari UOB cukup dilakukan pemberitahuan kepada UOB;
- f. Mengalihkan Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak manapun;
- g. Mengikatkan diri sebagai penjamin/penganggung kepada pihak lain;
- h. Menerima pinjaman yang mengakibatkan dilanggarnya Ratio Keuangan;
- i. Melakukan perubahan anggaran dasar yang meliputi perubahan kepemilikan;
- j. Mengalihkan, menjaminkan dan menyewakan harta kekayaan debitur.

Sehubungan dengan pembatasan dari UOB berdasarkan fasilitas-fasilitas kredit sebagaimana diungkapkan diatas, Emiten telah mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada UOB berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan No. 1611/WK/DIR/2015 tanggal 15 April 2015.

#### 8. PT BANK CIMB TBK (“CIMB”)

Perseroan memperoleh fasilitas penerbitan obligasi melalui Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 11 tanggal 4 April 2012 yang dibuat dihadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notari Jakarta Selatan No. 04/MPDN.JKT.SELATAN/CT/II/2012 tanggal; 29 Februari 2012, pengganti dari Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya 2012 Nomor 98 tanggal 26 April 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah terkahir kali dengan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 58 tanggal 23 Mei 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Nilai Obligasi	:	<p>seluruh jumlah Pokok Obligasi adalah sebesar Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari seri Obligasi yaitu:</p> <p>Obligasi Seri A, dengan jumlah okok sebesar Rp 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).</p> <p>Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp 675.000.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).</p>
Tujuan Penggunaan	:	<p>a. sekitar 54% (lima puluh empat persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian pinjaman dari Indonesia Eximbank, PT Bank Panin Tbk dan PT Bank BNI (Persero);</p> <p>b. sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka perumbuhan Perseroan berupa <i>property development</i>, yaitu pengembangan lahan Perseroan di Daerah Cawang untuk pembangunan <i>office building, bussines center</i> dan apartemen.</p> <p>c. Sekitar 33% (tiga puluh tiga persen) akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja permanen termasuk proyek yang bersifat <i>turnkey</i>, yaitu proyek yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan sesuai kontrak perjanjian dan akan dibayar kembali dan akan dibayar kembali oleh pihak owner sejumlah nilai yang telah disepakati di dalam kontrak perjanjian.</p>
Jangka Waktu	:	<p>Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 3 (tiga) tahun pada tanggal 5 Juni 2015.</p> <p>Obligasi Seri B akan jatuh tempo pada 5 (lima) tahun pada tanggal 5 Juni 2017.</p>
Suku Bunga	:	<p>Obligasi Seri A, sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen).</p> <p>Obligasi Seri B, sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun.</p>
Jaminan	:	<p>nilai jaminannya adalah sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi berupa jaminan fidusia berupa Piutang Performing sebesar Rp 2.140.971.026.541,- (dua triliun seratus empat puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu Rupiah) berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Fidusia (piutang) Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 86 tanggal 30 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan III Akta Jaminan Fidusia (Piutang) Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 No. 16 tanggal 14 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.</p>

**Pembatasan (*Negative Covenant*):**

Selama Emiten masih memiliki kewajiban membayar kepada CIMB, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CIMB, Emiten dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan pengeluaran obligasi atau instrument hutang lain yang sejenis yang jumlah jaminannya lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
- b. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan
- c. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate gurantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari total Ekuitas Perseroan kecuali :
  - i) jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada supplier Perseroan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan :
  - ii) jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar;

Total ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Perseroan dikurangi dengan aktiva tidak berwujud (*iritangible asset*)

- d. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
- e. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
- f. Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
- g. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali :
  - 1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah :
    - a) konstruksi;
    - b) perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
    - c) jasa konsultasi;
    - d) fabrikasi;
    - e) perdagangan umum;
    - f) *property* dan *realty*.
  - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
  - 3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
- h. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi.
- i. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham kepada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas utama Perseroan dan pinjaman kepada karyawan, koperasi, dan yayasan karyawan Perseroan.
- j. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berkelanjutan I Waskita Karya Tahap 1 tahun 2014 No. 20 tanggal 19 September 2014 yang telah dirubah terakhir dengan akta Perubahan 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berkelanjutan I Waskita Karya Tahap 1 tahun 2014 No. 26 tanggal 13 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Para Pihak :
  - 1) PT Waskita Karya (persero) Tbk. sebagai Emiten.
  - 2) PT Bank CIMB Niaga Tbk. Pihak Wali Amanat.
- Objek Perjanjian : Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi berkelanjutan I Waskita Karya Tahap 1 tahun 2014
- Nilai Perjanjian : Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)
- Jangka Waktu : Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Emisi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Hak dan Kewajiban : Para pihak sepakat dan memiliki kewajiban sebagai berikut:
  - 1) Emiten  
Emiten memiliki pembatasan-pembatasan bahwa Emiten tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - a. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau kekayaan Emiten yang ada pada saat maupun dimasa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan perjanjian perwaliamanatan.
    - b. Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada

pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% dari total ekuitas Emiten kecuali :

- i. Jaminan perusahaan tersebut diberikan kepada Supplier Emiten berkaitan dengan kegiatan usaha
  - ii. Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar
- Total Ekuitas yang disesuaikan adalah Total Ekuitas Emiten dikurangi dengan Aktiva tidak berwujud.
- c. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham emiten
  - d. Mengurangi modal dasar dan modal disetor emiten
  - e. Mengadakan Penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya emiten atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha emiten kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi obligasi dalam perjanjian perwalianamanatan ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus dan dalam hal emiten bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan memadai untuk menjamin pembayaran obligasi;
  - f. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali :
    - i. Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten, yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam perjanjian perwalianamanatan ini adalah :
      1. Kontruksi;
      2. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
      3. Jasa Konsultasi;
      4. Fabrikasi;
      5. Perdagangan Umum;
      6. Property dan realty.
    - ii. Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau Privatisasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
    - iii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
  - g. Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) yang laporan keuangannya tidak terkonsolidasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang diperoleh Emiten dari pihak ketiga yang bukan Afiliasi;
  - h. Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Emiten dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan emiten.
  - i. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh emiten kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada pengadilan niaga.

Emiten berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi;
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good funds) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat



- pada hari yang sama;
- c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, EMITEN lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Emiten wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.2.b di atas secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
  - d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umum;

2) Wali Amanat

Hak Wali Amanat sebagai berikut :

- a. meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. memegang kuasa untuk mewakili Pemegang Obligasi dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi, termasuk melakukan penuntutan hak-hak Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemegang Obligasi dimaksud;
- c. menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/default. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten;
- d. menolak permintaan untuk diselenggarakannya RUPO yang diajukan oleh Pemegang Obligasi atau Emiten, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan;
- e. menerima fotokopi bukti penyetoran dari Emiten sehubungan dengan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada hari yang sama saat dilakukan pembayaran tersebut.

Kewajiban Wali Amanat sebagai berikut:

- a. memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung termasuk melakukan peninjauan lapangan;
- b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- c. mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi penurunan hasil Pemeringkat Obligasi, jika hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak mampu melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan tindakan tersebut baru dapat dilakukan oleh Wali Amanat apabila Wali Amanat telah menerima surat dari Emiten yang melampirkan bukti hasil pemeringkatan tersebut;

memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi

## 16. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dan/atau tercatat dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, arbitrase, tata usaha negara maupun perburuhan, kecuali atas perkara-perkara sebagai berikut:

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materii/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
1.	Perkara No. 498/XII/ARB-BANI/2012 antara PT Waskita Karya Divisi II ("Pemohon") melawan Dipl. Ing. John Wirawan selaku Pribadi maupun selaku Direktur Utama CV Jaya Wahana Lestari ("Termohon").	Pemohon	Rp.1.485.088.600,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) yang merupakan hak Pemohon terkait Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Sub Pelaksana Konstruksi Proyek Tol Semarang-Bawen Seksi III, No.: 14/SPPP/WK/D. II/2012 tanggal 14 Maret 2012.	BANI dalam amar putusannya memerintahkan Termohon mengembalikan Uang Muka sebesar Rp.742.544.300,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat tiga ratus Rupiah). Termohon mengajukan Pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Semarang. Tanggal 23 Januari 2014 Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan amar menolak seluruh permohonan termohon. Termohon mengajukan kasasi, saat ini masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung.
2.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan horisontal dan vertikal pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara antara Panitia (Terlapor I), PT Waskita Karya (Persero) (Terlapor II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Terlapor III) dalam register KPPU No 04/KPPU-L/2012.	Pelapor	Putusan KPPU menyatakan bahwa Terlapor I (PT. Waskita Karya (Persero) Tbk) untuk membayar denda sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah).	KPPU memutuskan bahwa Terlapor, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp.3.168.820.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu Rupiah) dan menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp.4.475.525.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Para Terlapor mengajukan keberatan atas Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 pada tanggal 10 Mei 2013. Fatwa Mahkamah Agung No. 01/Pen/Pdt.Sus/2014 tanggal 1 April 2014 yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 pada tanggal 10 Mei 2013, dengan No Perkara 01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim yang mana pihak Termohon adalah KPPU, Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 ("Turut Termohon I"), dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk ("Turut Termohon II").  Telah dikeluarkan Putusan Keberatan terhadap Putusan KPPU tanggal 21 Mei 2015 dengan Putusan Menyatakan Batal demi Hukum Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya. Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Terlapor.

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materii/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
3.	Perkara No. 208/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim antara PT Albok Boiler Industri ("Penggugat") melawan Konsorsium Pal-Waskita ("Tergugat"), PT BPD SumselbabelCabang Jakarta ("TurutTergugat I"), PT JasaraharjaPutera("Turut TergugatII").	Tergugat	Atas pemutusan kontrak pekerjaan olehTergugat terhadap Penggugat pada Proyek PLTU Malinau 2x3 MW,Total Kerugian Materil sebesar Rp.22.807.555.500,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah). Total Kerugian moril sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) sehubungan dengan Proyek PLTU Malinau 2x3 MW.	Pada Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hingga saat ini masih menungguputusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.
4	Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.: 15/PDT.G/2014/PN-LP antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan Yasa Patria Perkasa ("Penggugat") melawan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru ("Tergugat").	Penggugat	Rp.168.471.023.440,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya yang merupakan ganti rugi materil maupun immaterial sehubungan dengan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru.	Berkaitan tentang wanprestasi yang dilakukan tergugat terkait pembayaran penyesuaian harga (eskalasi), pembiayaan biaya Pajak Galian C, pembayaran biaya percepatan dan kerugian perhitungan bunga pada Proyek Paket Jasa Pemborongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar UDara Medan Baru (Paket 4) yang mengakibatkan kerugian materiel dan immateriel sejumlah Rp.168.471.023.440,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah). Putusan PN Lubuk Pakam tanggal 23 Oktober 2014 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu menghukum Tergugat membayar Rp. 97.383.218.000,- (sembilan tujuh Miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Bahwa Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 9 Desember 2014, dan posisi saat ini adalah proses menunggu Putusan Pengadilan Tinggi.

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materil/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
5.	Perkara No. 16/PDT.G/2014/PN.LBB antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam ("Tergugat").	Penggugat	Rp. 2.150.080.000,- (Dua miliar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu Rupiah) terkait hak pembayaran Sisa Termin atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Tahun Jamak) No. 04/SC/PRP/DPUK-AG/XI/2007, yang dibuat antara Pemohon dengan Termohon tanggal 19 November 2007 serta Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;	<p>Tanggal 12 Agustus 2010 BANI mengeluarkan Pendapat yang mengikat (Binding Opinion) mengenai masalah aspek kontraktual tentang Pemblokiran Termijn Kontraktor atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat pada Pekerjaan Pembangunan Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2007 yang diajukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) dengan kesimpulan Bahwa Dana sebesar Rp 2,150,080,000 (dua miliar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu rupiah) yang selama ini ditahan adalah merupakan hak Penyedia Jasa (PT. Waskita Karya (Persero)). Dengan demikian, Penyedia Jasa berhak untuk menerima dana tersebut dan Pengguna Jasa (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam) wajib membayarkannya kepada Penyedia Jasa (PT. Waskita Karya (Persero));</p> <p>Pada tanggal 23 Oktober 2013, Waskita melakukan Somasi (Teguran) secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Agam dan sampai sekarang belum ada jawaban perihal somasi tersebut, sehingga Pihak Penggugat, mengajukan gugatan ke PN Lubuk Pakam.</p> <p>Telah dikeluarkan putusan Dari PN Lubuk Basung pada tanggal 13 Mei 2015 dengan putusan Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Termin sebesar Rp. 2.150.080.000 kepada Penggugat. Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Tergugat.</p>
6.	Perkara No. 627/XI/ARB-BANI/2014 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Pemohon") melawan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari ("Termohon").	Pemohon	Rp. 36.646.444.340,55 (Tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh empat koma lima puluh lima puluh lima Rupiah) yang merupakan Tagihan Termin tidak dibayar dan hal-hal lainnya atas Kontrak No.29/IV/KONTR/DKB/2010 yang dibuat antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 16 Juli 2010, sebagaimana diubah terakhir kali dengan AddendumKontrak KetigaNo.0293/ADD3/IV/KONTR/DKB/2012 tanggal 25 Juni 2012.	<p>Berkaitan dengan Tagihan progress 70,57% (Termin ke IV) yang belum dibayarkan oleh Termohon, Sisa progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan disepakati, Nilai progress pekerjaan tambah yang sudah disepakati, Nilai progress pekerjaan Bouxit, Nilai perhitungan (opname) material Proyek , Denda Keterlambatan per tanggal 30 September 2014 pada Proyek Pengurukan Lahan PT. DOK &amp; Perkapalan Kodja BAHARI (Persero) di Distrik Kabil Batam.</p> <p>Telah dikeluarkan Putusan dari BANI tanggal 22 Mei 2015 dengan putusan menghukum Termohon untuk membayar tagihan Termin IV sebesar 26.260.304.200,- kepada Pemohon. Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Termohon.</p>

No.	Perkara	Kedudukan Emiten	Nilai Tuntutan Materii/Perkara (dalam Rupiah atau ditentukan lain)	Keterangan
7.	Perkara No. 44/PDt.G.2015/PN.Pbr antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pengguna Anggaran ("Tergugat").	Penggugat	Rp. 8.458.275.593,58 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh delapan Rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan dan kerugian Immateriil kepada Penggugat, uang sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar Rupiah) yang merupakan hak Penggugat sesuai Surat Perjanjian Harga Satuan Program Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid Nomor : 630/SPHS/PEMB-TM/38/2012, tanggal 9 April 2012.	Berkaitan dengan Tagihan progress pekerjaan yang belum dibayar, Denda keterlambatan pekerjaan, Biaya Advokat, dan Retensi pada Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid.  Posisi sampai saat ini adalah masih proses sidang dengan Agenda sidang terakhir adalah Pemeriksaan Bukti Tergugat.
8.	Perkara No. 7/PDT.G/2015/PN.Tpg antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran ("Tergugat").	Penggugat	Rp. 12.445.532.527,52 (Dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh koma lima puluh dua Rupiah) sudah termasuk beban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan dan kerugian immateriil sebesar Rp.25.000.000.000,00 ( <i>Dua puluh lima miliar Rupiah</i> ) yang merupakan Penyesuaian Harga (Eskalasi) atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Nomor:8.07/SPPP/DPU/MYKEPRI/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum Kesembilan Kontrak Eskalasi SPPP, Nomor : B.07.i/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007, tanggal 15 Desember 2011	Berkaitan dengan Penyesuaian Harga (Eskalasi), Denda Keterlambatan Pembayaran, Biaya Pengacara dan Bunga atas Proyek Pekerjaan Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Provinsi Kepulauan Riau ("Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre").  Posisi sampai saat ini masih proses sidang dengan Agenda sidang terakhir adalah Kesimpulan.

Selain dari yang telah disebutkan diatas, Perseroan tidak memiliki perkara lain yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan di kemudian hari atau mempengaruhi rencana Penawaran Umum Terbatas I.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak tidak terlibat perkara perdata, pidana, tata usaha Negara, kepailitan, arbitrase dan hubungan industrial di lembaga peradilan terkait yang berwenang.

## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### 1. Pendahuluan

Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi, yang meliputi prasarana transportasi, gedung, konstruksi industri, bangunan sumber daya air dan ketenagaan dan rancang bangun. Perseroan juga menyewakan peralatan konstruksi untuk menunjang kegiatan. Selain itu Perseroan memiliki jasa realty dan penyewaan gedung.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang konstruksi, Perseroan memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam program Pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana sipil umum bagi pelayanan masyarakat sejak tahun 1960-an. Beberapa proyek-proyek penting yang dikerjakan Perseroan antara lain Proyek Jembatan Sungai Musi di Palembang dan Proyek Gedung Conefo (sekarang Gedung MPR/DPR RI) yang dikerjakan tahun 1960-an, Proyek Jalan di DKI Jakarta, Proyek Jalan Lintas Kalimantan. Proyek Irigasi Jatiluhur yaitu Saluran Induk Tarum Barat Karawang - Jakarta. Proyek PAM bantuan Perancis di Pontianak. Banjarmasin dan Manado, Proyek UNTEA di Biak, Sorong dan Manokwari, Bandar Udara Pal Merah Jambi, Bandara El Tari di Kupang.

Perseroan juga telah menyelesaikan beberapa proyek prestisius yang di antaranya dilakukan melalui kerja sama dengan kontraktor asing, seperti Bandara Internasional Soekarno Hatta, Reaktor serba guna Siwabessy dan PLTU Muara Karang Jakarta. Dalam teknologi pembangunan jembatan, Perseroan telah menyelesaikan jembatan beton Jembatan Rajamandala sungai Citarum, Jembatan Rantau Berangin sungai Kampar dan Jembatan Bareleng.

Sejak tahun 1974 Perseroan telah mengerjakan beberapa bangunan gedung tinggi seperti hotel berbintang antara lain Hotel Kartika Chandra, Hotel Sahid Jaya, Hotel Hyatt Aryaduta di Jakarta. Hotel Danau Toba Medan, Hotel Kawanua City Manado, Hotel Ambarukmo Yogyakarta dan Samudra Beach Hotel di Pelabuhan Ratu Jawa Barat, serta bangunan tinggi perkantoran seperti Gedung Arthaloka. Gedung Kosgoro, Gedung Lemigas di Jakarta. Sedangkan pada era tahun 1990 Perseroan telah menyelesaikan proyek-proyek gedung bertingkat seperti Gedung Bank Indonesia di Jakarta, Wisma Kota BNI, Graha Niaga dan Hotel Shangrila.

Sampai Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperluas kegiatan usahanya dalam bidang Jasa Konstruksi, Industri, Realty dan Perdagangan. Kegiatan usaha utama Perseroan sejak pendirian sampai saat ini adalah Jasa Konstruksi.

Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Gedung Waskita, Jalan MT. Haryono Kavling Nomor 10 Cawang. Seluruh unit kerja berlokasi di Gedung Waskita, sedangkan kantor divisi yang berlokasi di Gedung Waskita adalah Divisi Infrastruktur dan, Divisi Gedung.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 4 kantor divisi yang tersebar hampir diseluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sejalan dengan usaha Perseroan untuk memberikan layanan terbaik, Perseroan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 versi 2000 yang diharapkan akan meningkatkan mutu layanan serta kepuasan pelanggan.

Perseroan telah meraih berbagai macam penghargaan sebagai wujud dari keberhasilan Perseroan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta keahlian dalam bidangnya. Adapun berbagai penghargaan maupun sertifikasi yang diperoleh, sebagai berikut:

No.	Penghargaan/Sertifikasi	Prestasi/Uraian	Lembaga	Tahun
<b>Penghargaan</b>				
1	Financial Management Award	Financial Management	Asian Institute of Management dan World Executive's Digest	1991
2	BUMN & CEO Award	BUMN terbaik	Kementerian BUMN	2003
3	Penghargaan Kinerja Konstruksi Indonesia	Kategori Irigasi & Jaringan atas Proyek Berjalan Dam Tilong	Departemen Pemukiman, Prasarana dan Wilayah	2004
4	Penghargaan Kinerja Konstruksi Indonesia	Kategori Bangunan Bertingkat Rendah atas Proyek Berjalan Masjid Agung Tuban	Departemen Pemukiman, Prasarana dan Wilayah	2004
5	BUMN & CEO Award	BUMN terbaik di sektor Konstruksi	Kementerian BUMN	2004
6	Indonesia Quality Award	BUMN Terbaik	Malcolm Baldrige	2005
7	BUMN & CEO Award	BUMN Terbaik Kedua	Kementerian BUMN	2005
8	Penghargaan atas kerjasama penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern	Penerapan program SPI dlm pelaporan seluruh jenis pajak	Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan	2005
9	Penghargaan Bupati Aceh Barat	Pembangunan Perumahan daerah bencana Tsunami	Bupati Aceh Barat	2006

No.	Penghargaan/Sertifikasi	Prestasi/Uraian	Lembaga	Tahun
10	Penghargaan IQA	Keikutsertaan dalam membangun kinerja ekselen korporasi Indonesia	Indonesian Quality Award (IQA)	2006
11	BUMN & CEO Award	BUMN Terbaik	Kementerian BUMN	2006
12	Penghargaan I Karya Konstruksi berkualitas, Kategori Bangunan Teknik Sipil	Proyek Jembatan Pasupati, Bandung	Asosiasi Kontraktor Indonesia	2006
13	Penghargaan Kategori Bangunan Bertingkat, Kelompok 3	Proyek Plaza Ambarukmo Yogyakarta	Asosiasi Kontraktor Indonesia	2006
14	Piagam Penghargaan Business Review	Mencapai nominasi kategori sistem manajemen K3 terbaik (6 besar)	Business Review	2006
15	Good Performance IQA Award	Good Performance	Indonesian Quality Award (IQA)	2007
16	10 Year Quality Award pada acara "The 8th SGS Annual Quality Network Conference"	10 year quality award	Societe Generale de Surveillance	2009
17	Pelopor Pelaksana Terowongan	Pada pekerjaan Diversion Tunnel Jatigede	Asosiasi Kontraktor Indonesia	2011
18	Penghargaan Pekerjaan Konstruksi Indonesia	Kategori Metode Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum	2011
19	BUMN Terbaik	BUMN terbaik dalam Progres Pekerjaan di Bidang Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum	2012
20	Karya Konstruksi Indonesia Award	Pelaksanaan Bangunan Instalasi Pengolahan Air di Proyek Petanu	Karya Konstruksi Indonesia	2013
21	Persatuan Insinyur Indonesia	Besarnya jumlah tenaga ahli yang menjadi anggota PII	Persatuan Insinyur Indonesia	2013
22	Persatuan Insinyur Indonesia	Besarnya jumlah tenaga ahli yang telah menjadi insinyur profesional	Persatuan Insinyur Indonesia	2013
23	Penghargaan K3	Penghargaan Kecelakaan Nihil	Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	2014
24	Anugerah Seabad Indonesia 2045	Perusahaan peninggalan Belanda yang masih beroperasi	Pusat Data Bisnis Indonesia	2014
25	Penghargaan IFAWPCA	Silver Medal untuk proyek Padamaran II	International Federation of Asian and Wstern Pacific Contractors' Associations	2014
26	Indonesian Creativity and Best Leader Award 2014	Perusahaan BUMN Terbaik	Yayasan Indonesia Creativity	2014
27	Penghargaan dari Walikota Pekanbaru	Zero accident pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk Kota Pekanbaru	Walikota Pekanbaru	2014
28	Anugerah Seabad Indonesia 2045	Entitas Andalan Indonesia Incorporated Memimpin ASEAN Incorporated 2045	Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia	2014
29	Penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia	Zero accident	dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia	2014
30	Konstruksi Indonesia 2014	Piagam Penghargaan Pemenang II Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia	Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia	2014
31	BUMN Web Awards 2014	2014 Kategori Metode Konstruksi Nominator BUMN Web Awards 2014	BeritaSatu.com	2014
32	Anugerah Perusahaan Tbk Indonesia 2014	Peringkat ke-5 Good Corporate Governance	Majalah Economic Review.	2014
33	Anugerah Perusahaan Tbk Indonesia 2014	Peringkat ke-3 Bidang: Konstruksi Bangunan Kelompok Properti dan Real Estate	Majalah Economic Review	2014
34	Anugerah Perusahaan Tbk Indonesia 2014	Perusahaan Konstruksi Bangunan Terekspansif	Majalah Economic Review	2014



No.	Penghargaan/Sertifikasi	Prestasi/Uraian	Lembaga	Tahun
<b>Sertifikasi</b>				
1	OHSAS 18001 : 1999	K3	Societe Generale de Surveillance	1999
2	ISO 9001 : 2000	Manajemen Mutu	Societe Generale de Surveillance	2000
3	ISO 14001 : 2004	Lingkungan	Societe Generale de Surveillance	2004
4	Sertifikat Proyek Konstruksi Jalan Tol Terbaik	Proyek Jalan Tol Cipularang tahap II, Preled-Drangdan	PT Jasa Marga (Persero)	2006
5	Menerima sertifikat OHSAS 18001:2007. No : ID05/0629	K3	Societe Generale de Surveillance	2007
6	Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3L	K3 KEMENTERIAN	Sucofindo	2007 & 2011
7	ISO 9002:1994	Sistem Manajemen Mutu	SGS (Societe Generale de Surveillance)	1995
8	ISO seri 9001:2000	Sistem Manajemen Mutu	SGS (Societe Generale de Surveillance)	2003
9	ISO 9001:2008	Sistem Manajemen Mutu	SGS (Societe Generale de Surveillance)	2009
10	OHSAS 18001:1999	Occupational Health & Safety Assessment Series	SGS (Societe Generale de Surveillance)	2005
11	OHSAS 18001:2007	Occupational Health & Safety Assessment Series	SGS (Societe Generale de Surveillance)	2008
12	ISO 14001:2004	Environmental Management System	SGS (Societe Generale de Surveillance)	2006
13	SMK3 Permenaker NO.5 Tahun 1996	Sistem Manajemen K3	Sucofindo	2008
14	SMK3 PP RI NO. 50 Tahun 2012	Sistem Manajemen K3	Sucofindo	2014
15	SMP Perkap No 24 Tahun 2007	Sistem Manajemen Pengamanan	Mabes Polri (Sucofindo)	2012
16	Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Menteri Tenaga Kerja dan Transformasi Republik Indonesia	2014
17	Sertifikat Karya Konstruksi Indonesia 2014	atas karya konstruksi "Metode Kerja Percepatan Instalasi Traveller Underslung pada Jembatan Cable Stayed dengan Multi Pylon"	Kementerian Pekerjaan Umum Badan Pembinaan Konstruksi.	2014
18	ISO 9001:2008	Quality Management System	Lloyd's Register Indonesia	2014

## 2. Kegiatan Usaha Perseroan

### a. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Konstruksi. Dalam menjalankan usahanya dan melalui keahlian tenaga kerjanya dan kemampuan multi-disiplinnya. Perseroan menyediakan berbagai jasa dan memberikan solusi kepada kliennya untuk setiap tahapan kegiatan proyek yang dimiliki oleh klien.

Adapun kontribusi penjualan masing-masing unit usaha Perseroan terhadap total pendapatan usaha Perseroan tahun 2010–2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Pendapatan Usaha	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember									
	2014		2013		2012		2011		2010	
	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%	Pendapatan usaha	%
Jasa Konstruksi	9.483.889,77	92,20	9.559.122,61	98,68	8.807.622,95	99,99	7.266.061,81	99,89	5.842.303,97	99,81
Sewa Gedung	317,86	0,00	260,43	0,00	792,80	0,01	996,58	0,01	901,19	0,02
Properti*	-	-	-	-	-	-	660,00	0,01	10.000,00	0,17
Penjualan Precast*	802.605,65	7,80	127.227,27	1,31	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	6.448,25	0,09	0,00	0,00
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>10.286.813,28</b>	<b>100,00</b>	<b>9.686.610,31</b>	<b>100,00</b>	<b>8.808.415,75</b>	<b>100,00</b>	<b>7.274.166,64</b>	<b>100,00</b>	<b>5.853.205,16</b>	<b>100,00</b>

\*sudah menjadi entitas anak pada tahun 2015

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, divisi *precast* dan divisi properti telah menjadi Entitas Anak yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.



### **Jasa Konstruksi**

Perseroan fokus pada bidang usaha utamanya, yaitu jasa konstruksi. Jasa konstruksi yang diberikan oleh yaitu pekerjaan sipil, meliputi konstruksi jalan, jembatan, jalan kereta api, bangunan pelabuhan laut dan udara, bangunan pengairan (bendungan, dam, saluran irigasi), bangunan ketenagaan (PLTA, PLTU, PLTN). Pengalaman dan keahlian Perseroan dalam ikut serta dalam pembangunan prasarana perhubungan darat, laut dan udara diikuti juga dengan langkah-langkah inovasi, seperti:

- Bandara Kualanamu, Medan
- Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh
- Bandara Tempuling, Riau
- Bandara Pattimura, Ambon
- Bandara Wolter Monginsidi, Kendari
- Bandara Juanda, Surabaya
- Jalan Tol Cipularang, Jawa Barat
- Jalan Tol Semarang – Bawen, Semarang
- Jalan Tol Penjaringan Seksi 1 (JORR W1) , Jakarta
- Jalan Tol Manyaran Jatingaleh, Semarang
- Jalan Tol Cinere-Jagorawi seksi 1, Jakarta
- Busway Koridor VII (Kp. Melayu – Kp. Rambutan)
- Busway Koridor VIII (Lebak Bulus – Harmoni)
- Bendung Nipah, Madura
- Bendung Jatigede, Jawa Barat
- Bendung Karet Jatibarang, Jawa Barat
- Banjir Kanal Timur Paket 2.2, Jakarta
- Bali Beach Conservation, Bali
- Denpasar Sewerage Development Project, Bali
- Gedung BPK, Jakarta
- Gedung World Class, Universitas Indonesia, Jakarta
- Jembatan Layang Blok M - Antasari, Jakarta
- Jembatan Layang Muara Angke, Jakarta
- Kuta Sahid Lifestyle, Denpasar
- Menara Suara Merdeka, Semarang
- Menara Dang Merdu, Riau
- Menara Al-Burj, Dubai
- Jembatan Suramadu, Surabaya-Madura
- Jembatan Layang Pasupati, Bandung
- Normalisasi Sungai Kaligarang, Semarang
- Bendung Jatibarang, Semarang
- Jalan Tol Nusa Dua, Bali
- Pematangan Lahan Krakatau Steel, Banten

### **Sewa Gedung**

Perseroan memiliki usaha Sewa Gedung atas gedung perkantoran yang dimilikinya, yaitu Gedung Waskita yang berlokasi di Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta 13340, Indonesia. Sewa gedung dilakukan kepada pihak-pihak baik Internal maupun Eksternal Perseroan. Penyewaan internal dilakukan kepada masing-masing kantor divisi. Sedangkan penyewaan eksternal dilakukan kepada pihak di luar Perseroan.

### **Realty**

Merupakan salah satu kegiatan Perseroan dalam melakukan kegiatan penjualan tanah kavling dan rumah siap huni di Perumahan Bukit Dipgoro, Semarang, Griya Taman Asri, Jogjakarta. Selanjutnya, sejak Agustus 2012 usaha Properti Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Realty. Divisi tersebut menangani pekerjaan pengembangan tanah meliputi pengadaan tanah, perijinan, perencanaan, pemasaran, pembangunan sampai dengan operasional gedung. Tahap awal Divisi Realty akan mengoptimalkan aset Perseroan, melakukan kerjasama optimalisasi aset Perseroan lain serta mengembangkan properti di lahan yang strategis diantaranya:

- Optimalisasi aset Jl. M.T Haryono Kav. No. 10 A – Cawang, Jakarta Timur  
Luas tanah adalah sebesar 3.650 m<sup>2</sup>, dimiliki oleh Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai Perkantoran, Apartemen atau Kondotel.
- Pengembangan tanah di Sutera Boulevard, Alam Sutera – Serpong, Tangerang  
Luas tanah adalah sebesar 10.000 m<sup>2</sup>, belum dimiliki oleh Perseroan tetapi sedang dalam proses pengadaan sehingga akan berstatus milik Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai Ruko, Perkantoran, Apartemen atau Kondotel.
- Pengembangan tanah di Darmo Permai, Surabaya.  
Luas tanah sebesar 34109 m<sup>2</sup> belum dimiliki oleh Perseroan tetapi sedang dalam proses pengadaan sehingga akan berstatus milik Perseroan. Perseroan berencana untuk mengembangkan tanah tersebut sebagai perkantoran, ruko, apartemen atau condotel, dan F&B.

Perseroan memiliki kompetensi dalam pembangunan khusus untuk pemasaran. Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pihak profesional untuk operasional gedung.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, divisi realty telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Karya Realty yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

### Precast

Perseroan telah memiliki produksi Beton Precast dari unit usaha Divisi Sipil pada proyek Jalan Tol Tanjung Benoa, Unit usaha ini dianggap sebagai awal bisnis Perseroan Beton ke depan. Melihat besarnya kebutuhan Perseroan akan Beton Precast dan meningkatnya kebutuhan pasar, sehingga harus meningkatkan serta kemampuan teknologi Perseroan yang memadai untuk meningkatkan produksi dan kualitas Beton Precast, untuk keperluan tersebut Perseroan bermaksud untuk mengembangkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal.

Divisi Precast berkedudukan di Jakarta melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang Pemasaran, Produksi, Design dan Pengembangan, Ekspedisi Precast. Divisi Precast dibentuk pada tahun 2013. Pada saat ini Divisi Precast memproduksi Girder, Spun Pile, Box Culvert.

Divisi Precast telah mendukung pengerjaan pada proyek antara lain tol Nusa Dua-Bali, Jembatan Kapuk Naga Indah-Jakarta, Jembatan Gempol-Pasuruan, Jalan Tol Porong-Gempol-Pasuruan, Normalisasi Kali Pesanggrahan-Jakarta, Drainase Banyu Urip-Surabaya.

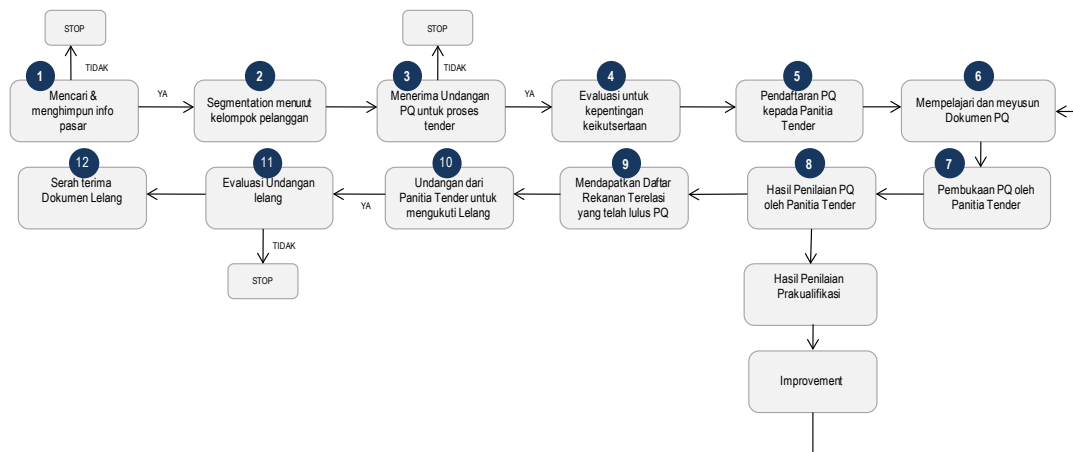
Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, divisi precast telah menjadi Entitas Anak PT Waskita Beton Precast yang penjelasannya dapat dilihat pada bab keterangan tentang Perseroan, sub bab keterangan singkat mengenai entitas anak.

### b. Proses Bisnis Perseroan

Proses Bisnis pada Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Perseroan dibagi menjadi 3 Proses Kunci, yaitu Proses Pemasaran Prakuualifikasi (PQ), Proses Pemasaran Lelang, Proses Produksi. Proses tersebut dapat dijabarkan dengan skema sebagai berikut:

#### 1) Jasa Konstruksi

##### i. Proses Pemasaran Prakuualifikasi (PQ)



Sumber: Perseroan, tahun 2014

#### Keterangan:

##### 1. Mencari & menghimpun Info Pasar :

Mencari & mendata semua informasi pasar industri konstruksi melalui sumber eksternal atau internal seperti:

- a. Sumber eksternal, yaitu dari Project info provider (contoh: BCI), Media cetak, Master Plan Kawasan, Blue Book prospektif pelanggan, Internet, Networking, Konsultan, dan media lainnya,
- a. Sumber Internal, yaitu dari Market survey, Pelanggan saat ini.

##### 2. Segmentation

Mengelompokkan informasi pasar kemudian menetapkan sesuai pasar/kelompok pelanggan & pelanggan industri

##### 3. Menerima Undangan PQ

undangan PQ adalah undangan untuk mengikuti prakuualifikasi dalam proses tender

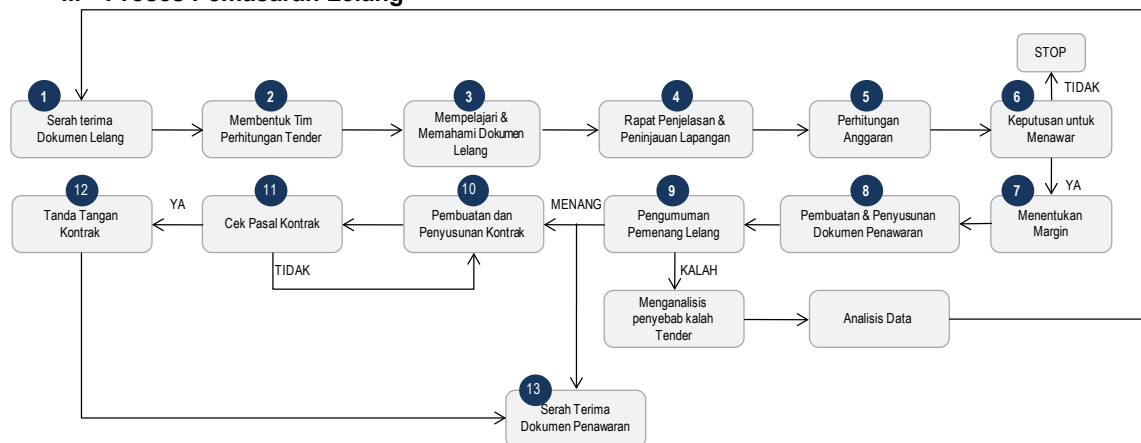
##### 4. Evaluasi

Undangan PQ dievaluasi untuk keikutsertaannya dengan mengevaluasi :

kemampuan Perseroan, keuangan, kelayakan proyek dan pelanggan/owner yang akan dilelang

5. **Pendaftaran PQ**  
Pendaftaran Perseroan untuk mengikuti PQ
6. **Mempelajari & menyusun dokumen PQ**
  - mempelajari isi dokumen PQ yang terdiri dari aplikasi-aplikasi yang menunjukkan kemampuan Perseroan, keuangan, personil dan peralatan.
  - menyusun aplikasi tersebut, dokumen buku berikut bukti-bukti yang ada seperti pengalaman/referensi proyek, kontrak, SKA & SKT, laporan keuangan dan kepemilikan alat.
7. **Pembukaan PQ**
  - Dokumen PQ yang sudah disusun disampaikan pada owner dan batas waktu yang sudah ditentukan
  - Dibuka oleh panitia lelang/pengadaan barang/jasa
8. **Hasil penilaian PQ**
  - Setelah dievaluasi oleh Panitia dengan kriteria yang sudah ditentukan akan dinilai, isian prakualifikasi Perseroan untuk menentukan lulus tidaknya Perseroan menjadi Rekanan terseleksi.
9. **Daftar Rekanan Terseleksi**  
Yaitu rekanan yang sudah mengikuti PQ dan dinyatakan lulus/memenuhi kualifikasi yang disyaratkan
10. **Undangan Lelang**  
Undangan lelang dari panitia pengadaan barang/jasa untuk mengikuti proses lelang
11. **Evaluasi Undangan lelang**  
Melakukan evaluasi atas pevelangan yang akan diikuti. Bila sudah sesuai, akan dilakukan pengambilan dokumen lelang
12. **Serah terima Dokumen Lelang**  
Dokumen lelang terdiri dari Instruksi kepada peserta lelang, syarat umum dan khusus, syarat teknis/spesifikasi, Bill of Quantity, Gambar, Addendum (bila ada)

## ii. Proses Pemasaran Lelang



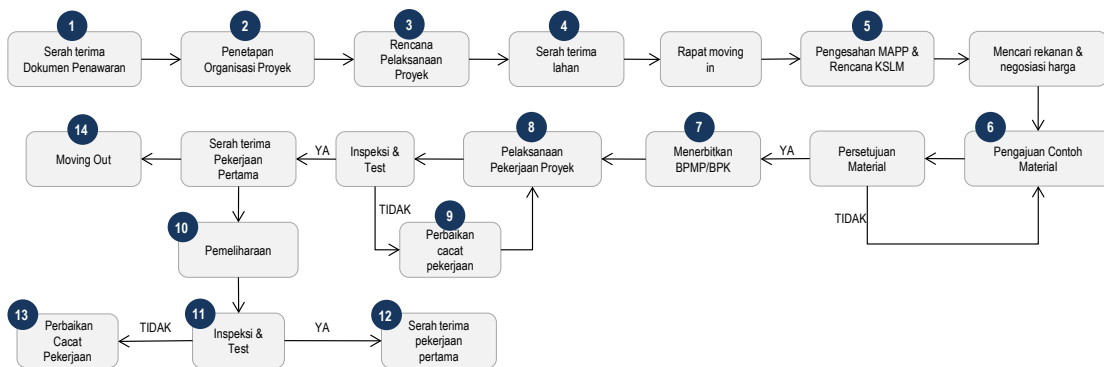
Sumber: Perseroan, tahun 2014

### Keterangan:

1. **Serah terima Dokumen Lelang**  
Dokumen lelang terdiri dari :
  - Instruksi kepada peserta lelang
  - syarat umum dan khusus
  - syarat teknis/spesifikasi
2. **Membentuk Tim Tender** untuk menangani proses lelang. Perseroan menunjuk tim tender yang akan mempersiapkan, menyusun dokumen teknis, Dokumen administrasi dan dokumen penawaran
3. **Mempelajari & memahami dokumen Lelang**, dengan cara:
  - Instruksi kepada peserta lelang
  - syarat umum dan khusus
  - syarat teknis/spesifikasi
  - Bill of Quantity
  - Gambar
  - Addendum (bila ada)
  - Membuat pertanyaan jika kurang jelas
4. **Rapat penjelasan & peninjauan Lapangan**  
Rapat penjelasan yang dilakukan oleh Panitia Lelang kepada peserta lelang berkaitan dengan dokumen lelang & gambar dilakukan juga peninjauan lokasi dengan penjelasan oleh panitia, juga dilakukan tanya jawab baik tertulis maupun lisan
5. **Perhitungan Anggaran**  
Menghitung harga penawaran proyek yang mengacu kepada dokumen lelang serta kondisional lapangan dengan menyusun price cost (bahan, upah, subkontraktor, Material, alat dan metode konstruksi), serta indirect cost (persiapan/penyelesaian, biaya Umum & Administrasi, biaya bank)
6. **Keputusan untuk menawar**  
Yaitu keputusan yang dilakukan apabila dalam terhitung Direct Cost & Indirect Cost harga sudah tinggi sehingga tidak dapat memenuhi harga dari Owner/Pagu
7. **Menentukan margin**  
Apabila diputuskan tetap menawar maka disusunlah harga DC & IDC ditambah margin (keuntungan perusahaan)

8. **Pembuatan dan penyusunan Dokumen Penawaran**  
Menyusun dokumen penawaran/lelang yang terdiri dari dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen penawaran harga
9. **Pengumuman Pemenang lelang**
  - setelah pemasukan penawaran, Panitia Lelang membuka dokumen penawaran masing-masing peserta lelang kemudian dilakukan evaluasi teknis dan harga penawaran harga
  - Panitia akan mengumumkan pemenang penawaran lelang sesudah dievaluasi
10. **Pembuatan dan penyusunan kontrak**
  - setelah memenangkan tender/lelang maka akan disiapkan dan disusun kontrak dengan Owner yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.  
Jika kalah maka akan dievaluasi mengapa terjadi kalah untuk improvement kedepan.
11. **Cek Pasal-pasal kontrak**  
Bagian administrasi kontrak akan melakukan/meneliti pasal-pasal dalam kontrak untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak
12. **Tanda tangan Kontrak**  
Penandatanganan kontrak pekerjaan yang berisikan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan proyek/pekerjaan
13. **Serah terima Dokumen Kontrak**  
Dokumen Kontrak diserahkan dari Kepala Bagian Anggaran kepada Tim Proyek diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian

### iii. Proses Produksi



Sumber: Perseroan, tahun 2014

#### Keterangan:

1. **Serah terima Dokumen Kontrak**  
Dokumen Kontrak diserahkan dari Kepala Bagian Anggaran kepada Tim Proyek diketahui oleh Kepala Bagian Pengendalian
2. **Penetapan Tim Proyek**  
Tim Proyek yang terdiri dari Kepala Proyek dan personilnya, ditentukan berdasarkan surat keputusan dengan rincian sbb:
  - Proyek Type A & Type B ditetapkan oleh Direksi atas usulan Unit Bisnis
  - Proyek Type C ditetapkan oleh unit Bisnis.
3. **Rencana Pelaksanaan Proyek**
  - Dibuat Oleh Kepala Proyek / calon Kepala Proyek bersama Kepala Bagian Pengendalian
  - Waktu setelah = Penawaran terendah /Negosiasi + yg dipastikan proyek didapat/SPK / SPP
  - Setelah Serah terima Dokumen penawaran & dokumen kontrak (dari proses pemasaran/lelang)
  - Mempelajari dan membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan : Dokumen Kontrak, Spesifikasi, Gambar & dokumen lainnya yang menjadi referensi.
  - Survey ulang lokasi wajib dilaksanakan lebih detail kondisi lapangan + ketersediaan sumber daya.
  - Menghitung ulang volume seluruh pekerjaan berdasarkan gambar for construction dan dokumen kontrak (spesifikasi). Perhitungan tersebut dibandingkan BOQ
  - PROYEK - EPC= Engineering Procurement Construction
  - Design and Build menunjuk Perencana Konstruksi (DRW)
  - NOMER - AB = Unit Bisnis mengajukan permintaan No.ABDep. Produksi dengan melampirkan Copy Kontrak
  - Apabila sifat pekerjaan sangat penting untuk dilaksanakan sebelum kontrak UB meminta ijin kerja ke Direktur Produksi lampiran.Copy SPK)
  - APP dibuat oleh Kepala Proyek, diperiksa Kepala Bagian Pengendalian /disetujui Kepala Unit Bisnis
4. **Serah Terima Lahan dari Owner**
  - Mulai waktu pelaksanaan > 1 minggu / setelah serah terimalahan /IMB, MK jaminan pelaksanaan,Rapat Moving In
  - Membahas kondisi kontrak dan menetapkan sasaran proyek serta program-program pencapaiannya.
  - Membahas Rencana Penataan lapangan, urutan/tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan metode konstruksinya (Mapping Process).
  - Menyamakan persepsi tentang kondisi yang disepakati pada saat penawaran/tender, material atau produk yang digunakan, peralatan dan tenaga kerja serta cara pengadaannya.
  - Membahas Rencana Anggaran Proyek sebagai alih informasi dari Anggaran Penawaran/ Lelang.
  - Untuk mendapatkan keputusan-keputusan tentang wewenang dan tanggung jawab pengadaan material/ produk maupun Sub Kontraktor.
  - Menetapkan KPI.

5. Mengesahkan MAPP & Rencana K3LMP  
Pengesahan MAPP (Master Anggaran Pelaksanaan Proyek) harus mendapat persetujuan sbb:
  - Untuk Proyek Gedung dan Sipil Tipe (A,B & C1) disetujui oleh Direksi, untuk tipe (C2 dan C3) disetujui oleh Unit Bisnis
  - Pada proyek EPC (tanpa batas) disetujui oleh Direksi.
6. Pengajuan Contoh Material
  - Pengajuan contoh Material (yang sudah diseleksi) dilakukan dengan menunjukkan material yang akan dipakai sesuai dengan spesifikasi kepada Manajemen Konstruksi untuk mendapat persetujuan
  - Jika contoh material ditolak maka perlu mengajukan kembali contoh material yang lain yang setara dengan spesifikasi.
7. Menerbitkan SPMP/SPK  
Jika dalam mengajukan contoh/sample material penawaran disetujui maka langkah selanjutnya dengan menerbitkan surat pemesanan Material/surat perintah kerja.
8. Pelaksanaan Pekerjaan Proyek (Proses Produksi)
  - Fasilitas Lapangan Sementara (Temporary Site Facilities).
  - Fasilitas Lapangan Sementara terdiri dari (antara lain) :
    - Kantor Lapangan
    - Gudang
    - Kantor Pemberi Tugas/Konsultan/Pengawas
    - Pagar Proyek
    - Pos Jaga
    - Jalan Kerja
    - Lokasi Muster Point
    - Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
    - Penempatan Rambu-Rambu K3LMP
  - Pengadaan alat konstruksimengacu pada Prosedur Perseroan di bidang Procurement

**Program Pelaksanaan Proyek terdiri dari :**

- a. Program Pelaksanaan Bulanan, Program ini penyusunannya diturunkan dari Rencana Pelaksanaan Proyek (Project Construction Plan)
- b. Program Pelaksanaan Mingguan, Program ini dibuat secara rinci sebagai penjabaran dari Program Pelaksanaan Bulanan
- c. Implementasi Pelaksanaan Proyek
- d. RAPAT KOORDINASI UNIT BISNIS  
Rapat Koordinasi terdiri dari :
  - Rapat Koordinasi tingkat Proyek
  - Rapat koordinasi tingkat Unit Bisnis
- e. Rapat koordinasi antara Unit Bisnis - Pusat  
Peserta Rapat koordinasi antara Unit Bisnis dengan Direktur
  - a. Direktur Operasi
  - b. Kepala Departemen
  - c. Kepala/Wakil Unit Bisnis
  - d. Pejabat lain yang diperlukan
- f. Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan  
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan meliputi :
  - a. Pengendalian Progres/Pendapatan Usaha (PU)
  - b. Pengendalian Beban Kontrak (BK)
  - c. Pengendalian Waktu Pelaksanaan
  - d. Pengendalian Cash Flow / EVA (Analisa Trend Laporan Keuangan)
  - e. Pengendalian K3L
- g. Pengendalian Progres Pelaksanaan Pekerjaan
- h. Pengendalian Progres Pelaksanaan mengacu pada beberapa tolok ukur antara lain sebagai berikut :
  - Jadwal pelaksanaan pekerjaan
  - Metode konstruksi/Engineering
  - Kegiatan pendukung
  - Pengawasan (supervisi)
- i. Pengendalian Beban Kontrak
- j. Pengendalian Proses Produksi sesuai K3LMP
- k. Pengendalian Kontrak Konstruksi
- l. Pengendalian Likuiditas
- m. Penanganan Proyek Bermasalah
- n. Hubungan Kerja Dengan Mitra Usaha
- o. Upaya Pengamanan Terhadap Klausul Kegagalan Bangunan
- p. Upaya Pengamanan Terhadap Klausul Peran Masyarakat
- q. Pekerjaan Crash Program
- r. Peninjauan Ke Proyek
- s. Pelaporan
- t. Kajian Metode Konstruksi Dan Kasus Di Proyek
- u. Penyerahan Pekerjaan Kepada Pengguna Jasa

9. Perbaikan Cacat Pekerjaan

Jika ada cacat dalam pekerjaan maka segera dibuat berita acara untuk dilakukan perbaikan

10. Pemeliharaan

Setelah serah terima Pertama PHO maka dilakukan masa pemeliharaan sesuai dengan waktu pada dokumen Lelang/Kontrak

11. Inspeksi & Test

Inspeksi & Test dilakukan setelah serah terima pertama untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang di dan tidak ada yg cacat/rusak

12. Serah terima Pekerjaan ke dua

Setelah serah terima kedua FHO maka dilakukan masa pemeliharaan sesuai dengan waktu pada dokumen Lelang/Kontrak

13. Perbaikan Cacat Pekerjaan

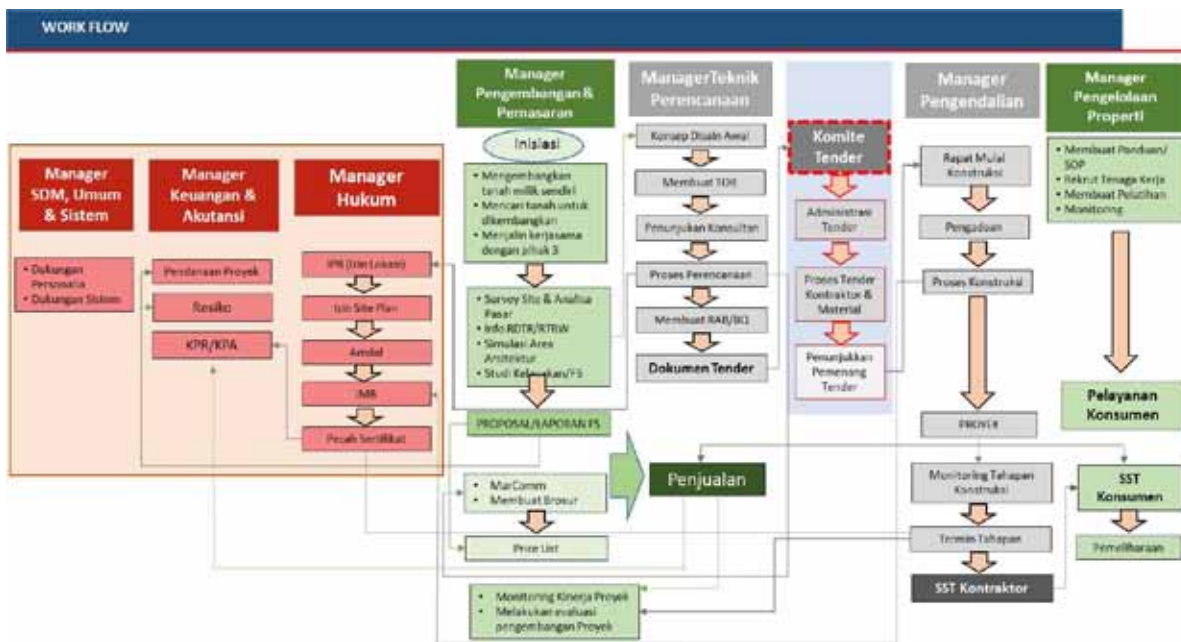
Jika ada pekerjaan yang cacat maka sesuai dengan ketentuan pada kontrak harus dilakukan perbaikan sesuai spesifikasi.

14. Moving Out

Jika semua kegiatan pekerjaan telah selesai maka segera dilakukan Moving out yang mencakup sbb:

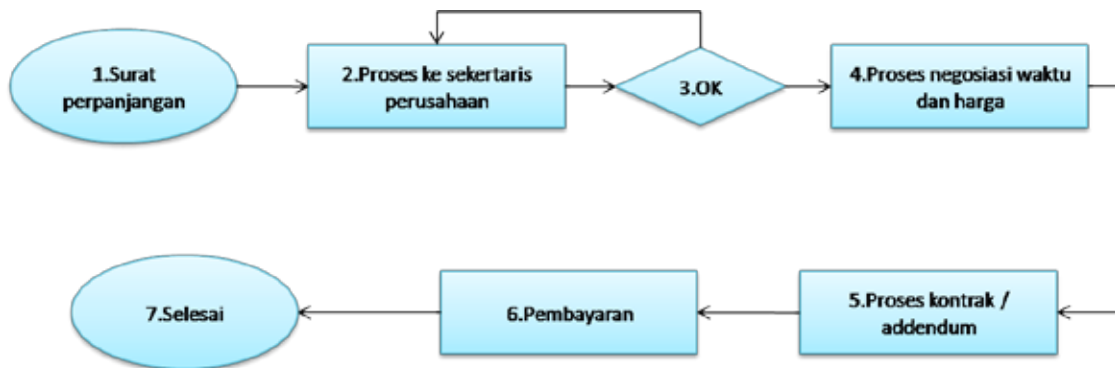
- Memberikan gambaran proses pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir (Mapping Process).
- Menyampaikan hal-hal penting, antara lain:
  - Masalah yang terjadi, penyebab dan cara penyelesaian maupun dampak yang ditimbulkan
  - Upaya-upaya yang dilakukan serta nilainya, dalam memanfaatkan peluang bagi keuntungan Perseroan
  - Data dan informasi biaya pelaksanaan, harga satuan pekerjaan tertentu (misalnya, harga final per m<sup>2</sup> untuk pekerjaan gedung) dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kegiatan pemasaran maupun pelaksanaan yang akan datang.
- Referensi pekerjaan untuk Perseroan dan referensi pengalaman kerja untuk Tim Proyek.
- Memberikan suatu kesimpulan dan masukan tentang karakteristik proyek, pemberi kerja/pengguna jasa, perencana konstruksi, pengawas pekerjaan, quantity surveyor, maupun mitra usaha sebagai pengalaman operasional yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemasaran dan Operasional.
- Berita Acara Serah Terima Dokumen Keuangan Proyek Selesai.
- Evaluasi KPI.

2) Realty



(sumber: Perseroan)

### 3) Jasa Sewa Gedung

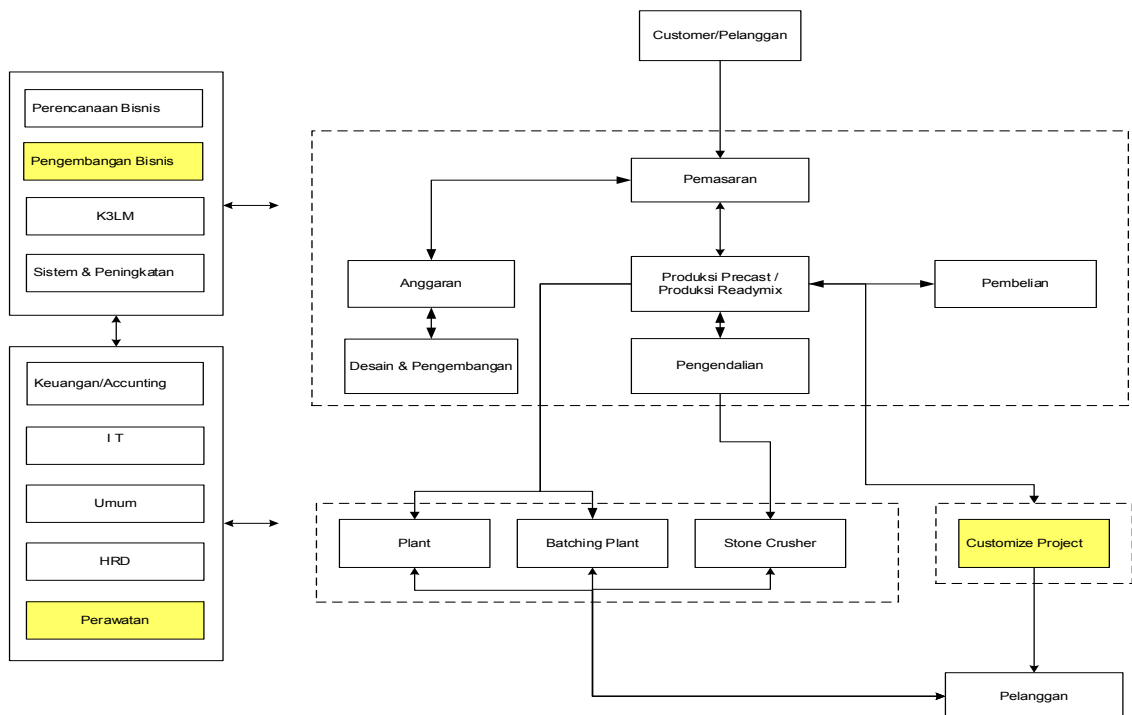


(sumber: Perseroan)

Keterangan:

1. Surat Pengajuan/ Perpanjangan Kontrak Sewa Ruang dari Pihak Ekstern & Intern ditujukan ke Sekertaris Perusahaan (Sekper)
2. Disposisi dari Sekper
3. Apabila ok lanjut dan apa bila tidak di buat surat tidak diperpanjang
4. Apabila diperpanjang, lanjut ke proses negosiasi jangka waktu dan harga
5. Apabila semua setuju dibuat Kontrak/ Adendum
6. Penerimaan pembayaran sesuai kontrak
7. Selesai

### 4) Precast



(sumber: Perseroan)

## **Bisnis Proses Waskita Beton Precast**

Bisnis Proses Waskita Beton Precast terbagi menjadi 2 Proses Utama, yaitu : Proses Pemasaran dan Proses Produksi.

### 1. Proses Pemasaran

- Menerima informasi adanya kebutuhan permintaan dari pelanggan melalui surat permintaan barang seperti quotation, telp dan email dari calon pelanggan atau mendapatkan potensi prospek order secara pro aktif dengan menghubungi calon pelanggan baik melalui surat dan kunjungan ke calon pelanggan.
- Melakukan tinjauan terhadap kebutuhan permintaan dari pelanggan seperti jenis barang, jenis pelanggan, schedule, produk, volume, lokasi pengiriman, delivery date & sistem pembayaran.
- Memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis produk yang diminta. Proses pemastian permintaan dilihat dari :
  - Gambar (Precast)
  - Schedule
  - Spesifikasi Gambar
  - Volume
  - Lokasi Pengiriman
  - Delivery Date
  - Sistem Pembayaran
  - Surat permintaan barang dari calon pelanggan
  - Dokumen Tender (apabila menggunakan proses lelang)

Jika Kelengkapan permintaan tidak lengkap maka dilakukan konfirmasi ulang ke pelanggan baik eksternal maupun internal.

- Kesiapan Moulding (Cetakan) – Design ( D&P ) / Fisik

Apabila hasil tinjauan order **tidak memenuhi**, selanjutnya diinformasikan ke pelanggan. (Yang memutuskan berdasarkan Kriteria diatas adalah Manajer Pemasaran, Direktur Teknik & Operasi dan Direktur Utama)

Apabila hasil tinjauan order **memenuhi**, maka selanjutnya memutuskan sifat order apakah kontrak atau retail kemudian dilakukan proses perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi) oleh Bagian Anggaran sebagai dasar untuk pengajuan harga ke pelanggan.

- Perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi)  
Perhitungan HPP Produk akan disesuaikan dengan karakteristik dari order, dengan kategori :
  - Spesifikasi sudah jelas (**Mengacu ke Prosedur Penanganan & Perancangan**)
  - Desain belum ditetapkan oleh pelanggan (**Mengacu ke Pengembangan Produk Baru**)
  - Mempertimbangkan *value engineering* (**Mengacu ke Prosedur Review Desain Produk**)
  - Pembuatan Job Mix berdasarkan mutu beton yang disyaratkan (**Mengacu ke Prosedur Job Mix Manajemen**)
  - Penetapan margin
- Berdasarkan penawaran harga kepada pelanggan, selanjutnya dilakukan klarifikasi & negosiasi dengan pelanggan. Proses klarifikasi & negosiasi dapat dilakukan lebih dari satu kali. Apabila hasil klarifikasi & negosiasi Tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap HPP, Merevisi HPP & melakukan negosiasi ulang.
- Purchase Order & Perjanjian Kontrak  
Hasil kesepakatan negosiasi diproses dan dituangkan dalam purchase order (**Untuk Kriteria Pembelian Bersifat Retail**) dan Kontrak (**Untuk Kriteria Pembelian Bersifat Kontrak**) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam bentuk Perjanjian Kontrak

**Kriteria kontrak**, terdiri dari :

- Perencanaan Pembuatan Mock-Up khusus untuk produksi non standar
- Mengakomodasi bentuk produk yang *customize* maupun yang standart

- Serah terima dokumen Kontrak ke Pelanggan dan Bagian Produksi

### 2. Bagian Produksi

- Serah terima dokumen Kontrak.  
Purchase Order & perjanjian kontrak selanjutnya diserahkan ke Bagian Produksi Precast/Readymix dalam bentuk **BASTD (Berita Acara Serah Terima Dokumen)** dari bagian Pemasaran sebagai dasar penerbitan PMO (Perintah Mengerjakan Order) ke Plant/Batching Plant yang akan memproduksi order tersebut. **BASTD** tersebut terdiri dari :
  - PO (*Purchase Order*) / SPM (Surat Pesanan Material) / Kontrak
  - Gambar
  - Metode Kerja (*jika ada*)



- Spesifikasi
- Schedule
- HPP

Jika dokumen atau Kriteria diatas tidak lengkap, bagian Produksi akan menunda proses penerbitan PMO (Perintah Mengerjakan Order) atau mengembalikan dokumen tersebut ke bagian Pemasaran untuk dilengkapi.

- Perencanaan Produksi  
Bagian Produksi membuat perencanaan produksi berdasarkan masukan dari data harian & mingguan dari Plant/Batching Plant.
- Melakukan peninjauan dan verifikasi terhadap jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah material yang tersedia, jumlah waktu kerja yang tersedia, jumlah hasil (quantity) produksi yang sedang berjalan, kesiapan alat, tipe produk dan jumlah ketidaksesuaian produk yang diinformasikan dari Plant/Batching Plant.

Apabila dari hasil verifikasi kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan permintaan order baru dan progress produksi yang berjalan maka harus dilakukan peninjauan perencanaan produksi kembali.

- Menetapkan perencanaan produksi dan Plant/Batching Plant yang akan memproduksi oleh Manager Produksi dengan membuat Perintah Mengerjakan Order (PMO)
- Mendistribusikan perencanaan produksi yang telah disahkan dan PMO ke Plant/Batching Plant yang akan memproduksi.

### c. Kegiatan Usaha Berdasarkan Tipe Kerjasama

Berdasarkan tipe kerjasama, terdapat 4 jenis usaha yang dilakukan oleh Perseroan, diantaranya:

#### i. Kontrak Biasa

Jasa yang ditawarkan oleh Perseroan umumnya berupa Kontrak Biasa. Dalam hal ini, Perseroan melakukan pekerjaannya berdasarkan 3 (tiga) jenis kontrak sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- (1) *Lump Sum*, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati (gambar, spesifikasi, schedule, dll) dalam jangka waktu tertentu dengan *jumlah harga yang pasti dan tetap*, yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pengguna jasa membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah ditetapkan.
- (2) *Unit Price*, yaitu kontrak pengadaan barang/ jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan *harga satuan yang pasti dan tetap* untuk setiap unsure/ satuan pekerjaan dg spesifikasi tertentu. Volume pekerjaan hanya bersifat sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran/ perhitungan bersama atas volume pekerjaan yg benar benar dilaksanakan oleh penyedia jasa.
- (3) *Design & Build*, yaitu suatu kontrak proyek dimana pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan diborongkan kepada satu penyedia jasa (perencana ditunjuk oleh kontraktor, bukan oleh pengguna jasa) atau kepada suatu badan kerjasama antara perencana dan kontraktor.

#### ii. Kerja Sama Operasi (KSO)

Perseroan juga melakukan kerjasama operasi dengan pihak lain sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan sebuah proyek. Kerjasama operasi adalah suatu bentuk kerja sama dengan *partner / mitra KSO*, yang tujuannya untuk mendapatkan sinergi yang optimal terkait dengan kompetensi teknis maupun non teknis dalam rangka mendapatkan proyek dan pelaksananya, sehingga Perseroan memperoleh nilai tambah berupa laba, transfer teknologi serta pengalaman.

Adapun pertimbangan untuk melakukan kerjasama operasi adalah karena faktor teknologi yang relatif baru dan belum dikuasai, serta faktor sumber daya (manusia, alat dan keuangan) yang dimiliki Perseroan untuk penyelesaian proyek tersebut.

Rincian proyek yang melibatkan kerjasama operasi dengan nilai proyek diatas Rp50 miliar sampai dengan 31 Desember 2014 antara lain adalah sebagai berikut:

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp juta)	Porsi Perseroan (Rp juta)	Partner Kerjasama	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Tanjung Priok Access Road Construction Project (Phase 2) Package 3 Section E-2A: (Sta 6+142-Sta 8+062.5) Cilincing, Simpang Jampae	1.040.085	624.051	Kajima Corporation	2011	2014
Pembangunan Bendung Gerak Sembayat (Pekerjaan Sipil)	528.103	174.274	PT Brantas Abipraya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	2011	2016
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sampit 2 x 25 MW (Netto)	989.186	49.459	PT Citicon Adhi Nugraha, PT Wetles Energi Nusantara	2011	2014
Bendungan Pandanduri	392.765	200.310	Brantas Abi Praya	2012	2014
Sabo Dam Merapi (7 buah)	212.390	44.012	Brantas Abi Praya	2014	2014
Perpanjangan Dermaga Peti Kemas Semarang	211.090	69.660	Wijaya Karya	2013	2014
Jalan Lembar – Sekotong – Pelangan – Lb Poh 2	48.450	24.709	Lombok Infrastruktur Perkasa	2014	2014
Civil Work of Jabung Headworks (Barrage)	158.072	80.617	Brantas	2014	2016
PDAM Tanah Grogot	186.894	89.672	Sinar Intan Papua Permai	2012	2015
Jalan Gerung – Mataram 4	66.032	33.676	Lombok Infrastruktur Perkasa	2014	2014
Jembatan Merah Putih Bentang tengah	378.871	253.844	Wijaya Karya	2012	2014
AP II Terminal 3 Pier 2	4.275.000	1.928.931	Wika, PP, Hyundai. Jaya Teknik	2013	2015
Package No.04: Ipuh – Bantal Roads	169.943	101.970	Daya Mulia Turangga	2014	2016
Jalan Galing Aruk Kalbar RCP03	197.500	197.500	Yasa Patria Perkasa	2013	2015
Bandara Juanda Tahap II	340.255	272.205	Brantas	2013	2014
Bandara SSK II Lanjutan	147.718	76.437	Wijaya Karya	2013	2015
Interior Bandara Ngurah Rai	247.832	241.636	Arkonin Baraga	2013	2014
Pengembangan Prasarana batubara – Muara Teweuh	559.411	371.952	JPC	2012	2014
PLTU Rote 2x3 MW	131.958	79.175	ZUG	2012	2014
Normalisasi Kali Ciliwung-Cisdane	271.473	138.284	HK	2013	2017
Tol Depok-Antasari (Paket 1)	1.222.661	415.704	PP, HK	2014	2016
Tol Depok-Antasari (Paket 2)	640.841	217.886	PP, HK	2014	2017
Bandara Samarinda Baru	683.117	263.955	HK - WIKA	2014	2016
Bandara Husein	127.182	127.182	Yodya	2014	2015
RSUD Ps. Minggu Jakesel (JO-Wika)	209.204	125.523	Wika	2014	2015
T3	4.702.500	304.431	Kawahapejaya	2013	2015
PLTU Malinau 2x3 MW	137.799	137.799	PAL	2010	2014
Irigasi Batang Sinamar (3.200 Ha)	245.681	147.409	Lombok	2014	2018

### iii. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Perseroan melakukan investasi di bidang infrastruktur kepada 4 (empat) perusahaan di bawah ini:

Investasi pada Perusahaan Asosiasi	Tempat Kedudukan	Persentase Kepemilikan
PT Citra Waspphotowa	Jakarta	12,50%
PT Prima Multi Terminal	Jakarta	15,00%
PT Waskita Bumi Wira	Jakarta	48,00%
PT Jasa Marga Kualanamu Tol	Jakarta	15,00%

### iv. Proyek Turnkey

Proyek *turnkey* merupakan proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dimana seluruh biaya konstruksi ditanggung terlebih dahulu oleh Perseroan sesuai kontrak perjanjian dan akan dibayar kembali oleh pihak *owner* sejumlah nilai yang telah disepakati didalam kontrak perjanjian.

Nama dan Lokasi Proyek	Nilai proyek (Rp juta)	Tahun Dimulai	Tahun Penyelesaian
Proyek jalan tol Pejagan Pemalang	1.412.042	2014	2016
Proyek jalan tol Becakayu	1.167.706	2014	2017

### d. Kegiatan Usaha berdasarkan Divisi

Perseroan menyelesaikan proyek-proyek dalam kontraknya melalui divisi-divisi. Pada Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan Nomor : 07/SK/WK/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan, Perseroan membagi 4 (empat) Unit Bisnis, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Divisi Infrastruktur

Divisi Infrastruktur berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan perusahaan dalam bidang pemasaran dan produksi untuk pekerjaan proyek sipil yang pendanaannya berasal dari investasi Perseroan dan proyek-proyek EPC.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan Divisi I dengan nilai kontrak diatas Rp100 miliar, antara lain:

**i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Infrastruktur dengan nilai diatas Rp100 miliar (2010–2014)**

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Civil Works Package A & C - Indocement P.14	181.094	Citeureup	SINOMA	2013	2015
2	Genyem - PLTA (Jo -> Non.JO)	469.824	PAPUA	PLN	2008	2015
3	JALAN TOL SEMARANG-BAWEN PAKET 2	581.387	JATENG	Trans Marga Jateng	2009	2012
4	TOL SEMARANG-BAWEN PAKET III	161.061	JATENG	Trans Marga Jateng	2011	2012
5	BANDARA KUALANAMU	320.287	JATENG	Dephub	2011	2012
6	JALAN TOL BENOA 2	314.424	BALI	Jasa Marga Bali Tol	2012	2013
7	JALAN TOL BENOA 4	438.872	BALI	Jasa Marga Bali Tol	2012	2013
8	TOL SEMARANG-BAWEN PAKET VI	287.468	JATENG	Trans Marga Jateng	2011	2013
<b>TOTAL</b>		<b>2.754.418</b>				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp2.754.418 juta.

**iii. Proyek yang sedang berjalan Divisi Infrastruktur dengan nilai diatas Rp100 miliar**

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	JALAN TOL GEMPOL-PORONG PAKET 3B	306.397	JATIM	Jasa Marga	2013	2014
2	Pengemb. Prasarana Batubara - Muara Teweh	506.633	KALTENG	SWASTA	2012	2015
3	DERMAGA NOAHU LAMPUNG	235.882	LAMPUNG	SWASTA	2013	2015
4	TOL GEMPOL-PASURUAN	284.347	JATIM	Jasa Marga	2013	2014
5	Pengemb. Pusri II-B - (Civil, Arch & ME Works)	156.500	Palembang	Rekin (PLN)	2013	2015
6	JEMBATAN MERAH PUTIH BENTANG TENGAH	271.541	AMBON	PU Dirjen. Bina Marga	2012	2015
7	PLTU Malinau 2x3 MW	137.799	KALTIM	PLN	2010	2015
8	JALAN AKSES TANJUNG PRIOK E2	440.201	JATENG	Kementrian PU	2012	2015
9	BENDUNG GERAK SEMBAYAT-GRESIK	164.058	JATIM	Kementrian PU	2011	2016
10	JEMBATAN AJI TULUR - JEJANGKAT	340.928	KALTIM	DPU Bina Marga	2012	2015
11	JALAN TOL PEJAGAN-PEMALANG SEKSI II	556.168	JATENG	PT. WTR	2014	2016
12	JALAN TOL PEJAGAN-PEMALANG SEKSI I	1.123.084	JATENG	PT. WTR	2014	2016
13	PEMBANGUNAN WADUK GONDANG	561.164	JATENG	Kementrian PU	2014	2018
14	BENDUNGAN RAKNAMO, NTT	646.010	NTT	KEMENTRIAN PU	2014	2019
15	TOL DEPOK-ANTASARI (PAKET 1)	415.704	JABAR	PT. JASA MARGA	2014	2016
16	JALAN TOL BECAKAYU	1.167.706	DKI	PT. KKDM	2014	2017
17	Pabrik gula & Rafinansi - Salim Group	311.000	NTT	PT. PLN Kantor Pusat	2011	
18	TOL DEPOK-ANTASARI (PAKET 2)	217.886	JABAR	PT. JASA MARGA	2014	2016
19	JALAN TOL CIAWI-SUKABUMI SEKSI I	115.909		PT. TRANS JABAR	2015	
<b>TOTAL</b>		<b>7.958.914</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Infrastruktur dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp7.958.914 juta.

## 2) Divisi Gedung

Divisi Gedung berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang Pemasaran dan Produksi, untuk proyek gedung. Beberapa bangunan tingkat tinggi yang telah diselesaikan Divisi I seperti :

- Gedung perkantoran: Plaza Mandiri dengan 31 lantai, Graha Niaga (Niaga Tower) dengan 30 lantai, Gedung Bank Indonesia dengan 25 lantai, Wisma BNI Kota dengan 46 lantai, Gedung Perhutani Semarang, Gedung Bank Indonesia Batam;
- Hotel Shangri-la berbintang lima dengan 31 lantai dan 680 kamar, hotel Sheraton berbintang lima di Surabaya, hotel Aryaduta berbintang lima, hotel Kartika Chandra berbintang empat.;
- Apartemen dan Mal Ambassador di lokasi segitiga emas Jakarta, apartemen Taman Kemayoran dengan 6 super blok terdiri dari 19 hingga 25 lantai, apartemen Kedoya Elok dengan 2 menara dan Apartemen Sejahtera di Yogyakarta dan Surabaya.

Sedangkan fasilitas umum yang dibangun antara lain Masjid Al Akbar di Surabaya yang pada saat itu merupakan mesjid terbesar di Asia Tenggara dengan luas 26.624 meter persegi diatas lahan seluas 11 hektar, Plaza Senayan, Mal Galaxy Surabaya, Rumah Sakit Pasar Rebo, Kampus IPB, Auditorium Universitas Gajah Mada.

Adapun proyek yang telah dan saat ini sedang diselesaikan Divisi Gedung dengan nilai kontrak diatas Rp100 miliar, antara lain:

### i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Gedung dengan nilai diatas Rp100 miliar (2010–2014)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	King Abdullah Financial Distric Riyadh	361.153	Riyadh	Bin Ladin	2010	2011
2	Menara Suara Merdeka	149.912	Semarang	PT. Merdeka Sandy Surya	2011	2012
3	Fas Rekre & Olahraga Boker	126.849	Jakarta	Pemda DKI	2007	2009
4	King Saud University Riyadh - KSA ( techno valley )	194.150	Riyadh	Bin Ladin	2010	2010
5	Gedung RS USU	317.258	Medan	Depdiknas/USU	2009	2011
6	Hotel Santika	149.545	Medan	PT. Graha Santika Dyandra	2010	2011
7	IPDN Sulsel 2011	114.260	Makasar	Depdagri	2011	2011
8	Menara Dang Merdu	242.166	Pekan Baru	Bank Riau	2010	2012
9	Hotel Sahid Kuta	255.713	Bali	PT. Indonesian Paradise	2010	2012
10	World Class UI Package 3	292.000	Jakarta	UI	2011	2012
11	Bandara Sepinggan Balikpapan	117.887	Kaltim	AP1	2011	2012
12	Basko Grand Mall	118.182	Pekanbaru	PT. Basko Green	2011	2012
13	Apartemen Gunawangsa	105.262	Surabaya	PT. Gunawangsa Investindo	2011	2012
14	Paket 1.09 Saudi Arabia	201.716	Riyadh	Bin Ladin	2012	2013
15	Gedung PU Pekanbaru	191.267	Pekanbaru	Dinas PU	2011	2013
16	RSUD Tangerang	111.725	Jakarta	Pemkot Banten	2013	2013
17	Manhattan Square	148.409	Jakarta	PT. Sumber Mesin Raya	2012	2013
18	Bandara Juanda Surabaya	419.686	Surabaya	AP1	2011	2013
19	Bandara Udara Samarinda Baru	189.892	Samarinda	PEMDA KALTIM	2012	2013
20	Lanj. Stadion Balikpapan	385.095	Balikpapan	PEMDA KALTIM	2012	2013
21	Diklat BNPB	100.777	Bogor	BNPB	2013	2013
22	RSCM (Gd. Puskes Ibu & Anak)	127.471	Jakarta	Depkes	2013	2013
23	INA Putri Bali	361.000	Bali	PT. Hotel Indonesia Natour	2012	2014
24	Interior Bandara Ngurah Rai	282.337	Bali	AP1	2013	2014
25	Bandara Juanda Tahap II	312.281	Jakarta	AP1	2013	2014
26	Tj. Priok (Power House Pelindo)	123.677	Jakarta	Pelindo	2013	2014
27	Urbana Cinere	324.436	Jakarta	Swasta	2012	2015
28	Jeddah Flyover	130.603	Jeddah	Bin Laden	2013	2014
29	CIPINANG INDAH MALL	126.335	Jakarta	PT. Inti Utama Dharma Raya	2011	2015
<b>TOTAL</b>		<b>6.081.046</b>				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Gedung adalah sekitar Rp6.081.046 juta.

### iii. Proyek yang sedang berjalan Divisi Gedung dengan nilai diatas Rp100 miliar

No	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Hotel Grand Inna Putri Bali (lanjutan)	122.485	Bali	Swasta	2014	2015
2	Apartemen Sentul City	107.400	Bogor	Sentul City	2013	2014
3	Perbaikan Exterior & Interior Gd. Pelindo	134.741	Jakarta	Pelindo	2013	2014
4	Woodland Residence	366.332	Jakarta	UIN	2012	2015
5	Gedung LKPP	111.759	Jakarta	LKPP	2013	2014
6	Ancol Double Decker	193.000	Jakarta	Pemkot DKI	2014	2015
7	Bandara Husein	127.182	Bandung	AP II	2014	
8	Paragon II Hotel dan Apartm	331.859	Jakarta	PT. Broadbiz Asia	2012	2015
9	One Bell Park	149.091	Jakarta	PT. Harmas Jalasveva	2013	2015
10	RSUD Ps. Minggu Jaksel (JO-Wika)	125.523	Jakarta	Pemprov DKI	2014	2015
11	Gedung Utama MA	162.882	Jakarta	MA	2013	
12	Royal Olive	326.372	Jakarta	Swasta	2013	2014
13	APII Terminal 3 Pier 2	1.815.379	Jakarta	AP2	2013	
14	Gd. Infomedia Bandung	159.716	Bandung	Telkom Property	2014	2015
15	UNS (IDB)	155.250	Solo	Kemendikbud	2014	2015
16	Alam Sutera	538.010	Tangerang	WK-Trinita	2013	
17	Menara Proteksi (RS Hermina)	118.300	Jakarta	Swasta	2014	2015
18	Stadion Balikpapan	545.000	Balikpapan	Pemprov Kaltim	2014	2016
19	Cilandak Estate	193.000	Jakarta	Swasta	2014	2015
20	Perpustakaan Nasional	390.695	Jakarta	Kemendikbud	2014	2016
21	Gianneti	212.727	Jakarta	PT. Bangun Investa Graha	2013	2015
22	Sopo Del	477.274	Jakarta	Swasta	2014	
23	Sentul City ( Ars)	121.000	Jakarta	Swasta	2014	2015
24	Belitung Highland Resort	121.625	Babel	Swasta	2014	
25	Jakarta Box Tower	206.000	Jakarta	Mardhika Wisthi	2014	2015
26	Frontage Surabaya	1.440.663	Surabaya	Swasta	2014	
27	Rajawali Apartemen	140.909	Palembang	Swasta	2014	
28	Lansekap APII T3 Soeta	153.875	Jakarta	AP II	2015	
29	BASKO (Amandemen)	266.531	Jakarta	Swasta		
30	T3 (incl. Pek induk)	304.431	Jakarta	AP II		
31	Sanctuary Bitung Apartemen	275.438			2015	
32	Regitha Apartemen	220.000	Bandung	Swasta	2014	
33	Grande Volare, Jababeka	180.242			2015	
34	Apt. Darmo	628.888	Surabaya	Swasta	2014	
<b>TOTAL</b>		<b>10.923.579</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Gedung adalah sekitar Rp10.923.579 juta.

### 3) Divisi Regional Barat

Divisi Regional Barat berkedudukan di Pekanbaru dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi, untuk :

- (1). Proyek sipil
- (2). Proyek gedung konvensional

#### i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Regional Barat dengan nilai diatas Rp100 miliar (2010-2014)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	PELEBARAN TOL JAGORAWI	116.357	JABAR	PT. Jasa Marga	2011	2011
2	JALAN TOL CINERE-JAGORAWI	237.590	DKI	Translingkar Kita Jaya	2009	2011
3	PEMATANGAN LAHAN KRAKATAU STEEL	581.535	BANTEN	PT Krakatau Steel	2011	2012
4	JALAN MABAK BLOK M	219.750	DKI	PU DKI	2010	2012
5	BOJONEGORO BARRAGE (PACKAGE 1)	186.869	JATENG	Kementrian PU	2008	2012
6	SIMPANG SUSUN PENJARINGAN	229.092	DKI	PT Multi Artha Pratama	2011	2012

7	PENINGKATAN JALAN CIASEM - PAMANUKAN	113.559	JABAR	Kementrian PU	2011	2012
8	REHAB & REKON SABO DAM PAKET 1	137.297	DIY	Kementrian PU	2012	2012
9	NORMALISASI KALI GARANG-SEMARANG	132.115	JATENG	Kementrian PU	2009	2012
10	JATIGEDE	412.171	JABAR	PU SDA	2007	2013
11	JORR-W2	177.658	DKI	MLJ	2012	2013
12	DRAINASE BANYU URIP-SURABAYA	195.036	JATIM	Dirjend. Cipta Karya	2011	2013
13	SABO DAM MERAPI (14 BUAH)	108.202	DIY	Kementrian PU	2013	2013
14	DERMAGA VI PT. KBS	162.589	BANTEN	PT. KBS	2012	2013
15	CITARUM PAKET V	217.990	JABAR	Kementrian PU	2011	2013
16	DERMAGA 208 TJ. PRIOK	108.210	DKI	PT. PELINDO II	2012	2014
17	CAR TERMINAL TANJUNG PRIOK	147.959	DKI	PT. PELINDO II	2013	2014
18	WADUK JATIBARANG-SEMARANG	162.066	JATENG	Kementrian PU	2009	2014
19	JL ARTERI BANDARA SOETA-CILEDUG SEKSI I	130.852	BANTEN	KONSORSIUM STA 11	2014	2014
20	JALAN BULU-TUBAN	166.931	JATIM	Dirjend. Bina Marga	2012	2014
21	REHAB. TAMBAK GARAM KAB. INDRAMAYU	176.497	JABAR	Kementrian PU	2012	2014
22	Irigasi Sei Ulak Deras (PIRIM) - AMS 11	116.602	Jambi	PPK Irigasi SNVT P/JPA Sumatra VI Propinsi Jambi	2009	2015
23	FO MERAK	172.317	BANTEN			
<b>TOTAL</b>		<b>4.409.245</b>				

Total nilai kontrak proyek yang telah selesai dikerjakan oleh Divisi Regional I dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp4.409.245 juta.

### iii. Proyek yang sedang berjalan Divisi Regional Barat dengan nilai diatas Rp100 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN I	323.577	DKI	DPU Pengairan	2011	2014
2	FLY OVER DAN GROUND ROAD TERMINAL 3 SOETTA	206.395	BANTEN	KAWAHAPEJAYA IND. KSO	2014	2014
3	JEMBATAN KAPUK NAGA INDAH	258.241	DKI	PT. Mandara Permai	2013	2014
4	Jalan dan Jembatan Pesisir Karimun	107.883	Kepri	Dinas PU Kabupaten Karimun	2013	2015
5	FO PEGANGSAAN	158.919	DKI	PT. Citra Abadi Mandiri	2013	2015
6	Reklamasi Pantai DKB Batam	131.302	Kepri	PT. DKB	2010	2012
7	Jembatan Siak IV & Jalan Akses (35%)	139.267	Riau	Dinas PU Propinsi Riau	2010	2011
8	Gedung Indarung VI Paket CC-1	153.900	Sumbar	PT. Semen Padang	2014	2015
9	Hotel Tangram & Sadira Pekanbaru	152.000	Riau	PT. Halla Mohana	2014	2015
10	Bendung & Jaringan Irigasi D.I Belutu	141.110	Sumut	PPK Irigasi dan Rawa I SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera II Balai Wilayah Sungai Sumatera II	2014	2016
11	Upper Structure ITC Polonia	122.727	Sumut	PT. ITC CBD Polonia	2014	2015
12	Package No. 04 : Ipuh - Bantal Roads (60%)	101.970	Bengkulu	Kementerian Pekerjaan Umum, Dirjen Bina Marga, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Satker PJN Wilayah I Provinsi Bengkulu, PPK-1 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Batas Sumbar – Sebelat dan Sekitarnya	2014	2016
13	JALAN AKSES KALIBARU	202.791	DKI	PT. PELINDO II	2014	2015
14	NORMALISASI KALI CILIWUNG-CISADANE	138.284	DKI	Kementrian PU	2013	2017

15	Jalan Sp. Rukis - Tanjung Kemuning (Package :13)	266.091	Bengkulu	PPK / Pejabat Pembuat Komitmen 06, (Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Manna – Bandar Lampung dan sekitarnya)	2014	2016
16	BANDARA SAMARINDA BARU	263.955	KALTIM	PEMDA KALTIM	2014	2016
17	JALAN LAYANG ADAM MALIK	230.277	DKI	PEMPROF DKI	2014	2016
18	AKSESIBILITAS & DUCTING UTILITY BANDARA SOETA	253.482	DKI	PT. ANGKASA PURA II	2015	2016
19	Irigasi Batang Sinamar (3.200 Ha) (60%)	147.409	Sumbar	Kemen PU Dirjen SDA SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera V Prop. Sumatera Barat	2014	2018
20	Gedung Kantor SKPD Pemkot Pekanbaru (Multiyears)	180.829	Riau	Dinas Perumahan Permukiman dan Cipta Karya Kota Pekanbaru	2015	2017
21	INFRASTRUKTUR BANK MANDIRI WIJAYA KUSUMA	109.091	DKI	BANK MANDIRI	2014	2015
22	Bangunan Fasilitas Kapal Selam (Submarine Building Facilities) PT. PAL Indonesia (Persero)	288.545	JATIM	PT PAL	2015	2016
<b>TOTAL</b>		<b>4.078.044</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Regional Barat dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp4.078.044 juta.

#### 4) Divisi Regional Timur

Divisi Regional Timur berkedudukan di Denpasar dan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi, untuk :

- (1). Proyek Sipil
- (2). Proyek Gedung Konvensional

#### i. Proyek yang telah diselesaikan Divisi Regional II dengan nilai diatas Rp100 miliar (2010-2014)

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	Sipil dan Jembatan Sungai Jayo	236.696	Kalsel	PT. Tapin Coal Terminal	2011	2012
2	Jalan Pontianak - Tayan	188.083	Pontianak	Dinas PU	2009	2013
3	Perkantoran Kab. Paser	105.237	Paser	Dinas PU Paser	2011	2013
4	Pelabuhan Sangatta	247.273	Sangatta	Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika	2011	2014
<b>TOTAL</b>		<b>777.288</b>				

Total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Regional II dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp777.288 juta.

#### iii. Proyek yang sedang berjalan Divisi Regional II dengan nilai diatas Rp50 miliar

No.	Nama proyek	Nilai kontrak total (dalam juta)	Lokasi	Pemberi kerja (owner)	Waktu pelaksanaan	
					Mulai	Selesai
1	ESS-06	200.526	Sulsel	Dir Jen BM	2012	2015
2	Jalan dan Jembatan Pangkalanbun	129.783	Kotawaringin lama	Dinas PU Kota Waringin Barat	2013	2015
3	JALAN HABEMA-MUGI (MYC)	275.985	PAPUA	DPU Bina Marga	2012	2015
4	Bendung Akelamo	102.700	Malut	PU SDA	2013	2015
5	Upgrading of Existing Suai Airport	643.066	TL		2014	2015
6	Bendungan Teritip Balikpapan	225.834	Balikpapan	Kementrian PU Dirjen SDA	2014	2016
7	Galing-Tanjung, Tanjung-Aruk Roads	217.250	Sambas	Bina Marga	2013	2015

8	Jalan & Jembatan Oecusse Paket I (Design & Build)	501.871	TL		2014	2016
9	Pelabuhan Sisi Darat Penajam	264.486	Penajam	Dinas Perhubungan	2014	2017
10	Jalan Tj. Selor - Tj. Palas - Sekatak (Section 1)	172.700	Bulungan	DPU Prov. Kaltim	2014	2016
11	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Segmen 5)	248.786	Balikpapan	PU CK	2015	2016
<b>TOTAL</b>		<b>2.982.988</b>				

Saat ini total nilai kontrak proyek yang sedang dikerjakan oleh Divisi Regional II dengan nilai proyek diatas Rp100 miliar adalah sekitar Rp2.982.988juta.

### 3. Pemasaran

Perseroan melakukan pemasaran secara desentralisasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Divisi dan Unit usaha. Di bidang usaha jasa konstruksi, kegiatan pemasaran baru dapat terlaksana apabila pengguna jasa telah menaruh "kepercayaan" kepada pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan sifat jasa konstruksi menawarkan sesuatu yang belum berwujud dengan suatu harga, kualitas dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Proses produksi dalam bentuk pengerjaan proyek dilaksanakan di tempat pengguna jasa berdasarkan kontrak yang disepakati bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Guna mengintensifkan usaha-usaha pemasaran, Perseroan menerapkan program *Offensive Marketing* dan *Defensive Marketing*. *Offensive Marketing* adalah usaha-usaha untuk mendapatkan proyek dari pelanggan baru. Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Unit usaha dan Divisi, dengan tingkat margin yang relatif kecil. *Defensive Marketing* adalah usaha-usaha pemasaran untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada agar tetap menggunakan jasa yang ditawarkan Perseroan.

Hasil dari usaha ini biasanya berupa pekerjaan tambah, *repeat order*, baik melalui pemilihan langsung maupun penunjukan langsung tanpa melalui proses tender. Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh Divisi dan menghasilkan margin relatif lebih besar.

Dalam kaitannya untuk memperoleh suatu proyek. Perseroan mengumpulkan informasi mengenai proyek-proyek yang Potensial melalui informasi yang didapatkan dari konsultan, lembaga keuangan, BUMN, Pemerintah Daerah, BPKM pusat maupun daerah, juga pengumuman dari media massa.

#### Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran meliputi seluruh Indonesia yang dibagi dalam 1 Divisi Sipil, 1 Divisi EPC, 1 Divisi Gedung dan 4 Divisi Regional yang mencakup Area Divisi:

Nama Divisi	Area Pemasaran	Keterangan
Divisi Infrastruktur	Seluruh Indonesia	tidak ada batasan
Divisi Gedung	DKI, Banten dan Jawa Barat	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
	Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan luar Jawa	Nilai kontrak > Rp 150 miliar
	Luar Negeri selain Timor Leste	Tidak ada batasan nilai kontrak
Divisi Regional Barat	Seluruh Sumatera & Jawa untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
	Seluruh Sumatera & Jawa (kecuali DKI, Banten & Jawa Barat) untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar
Divisi Regional Timur	Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
	Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar

#### Sistem Penjualan dan Saluran Distribusi

Kegiatan pemasaran dan distribusi Perseroan:

- Melakukan perintisan kepada calon pemberi kerja secara kontinyu dan periodik untuk mendapatkan informasi pasar yang akurat
- Meningkatkan *networking* kepada seluruh *Stake Holder* maupun Konsultan untuk mendapatkan informasi pasar Pemerintah, Swasta dan Luar Negeri
- Melakukan kegiatan dengan mengikuti *event* regional atau nasional dalam bentuk pameran atau seminar
- Mencari info pasar dari pemberitaan atau publikasi mengenai prospek proyek dari media cetak dan elektronik untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan diambil Perseroan khususnya dalam proses mengikuti tender
- Mengikuti proses prakualifikasi, lelang, sampai dengan penanda tangan kontrak



#### 4. Pelanggan & Daya Saing

##### Segmen Pasar

Segmen pasar dibagi dalam beberapa segmen yaitu, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), Pemerintahan Daerah, Swasta dalam Negeri dan Luar Negeri.

##### Komposisi Segmen Kontrak Baru

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2010		2011		2012		2013		2014	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pemerintah	3.107,97	56,4	5.328,05	54,54	6.853,55	55,89	4.566,39	34,29	7.894	34,86
BUMN/D	623,61	11,32	2.212,89	22,65	2.727,79	22,3	3.623,71	27,21	8.811	38,91
Swasta	1779,19	32,28	2228,2	22,81	2.672,00	21,7	5.127,19	38,50	5.940	26,23
Total	5.510,77	100,00	9.769,14	100,00	12.263,34	100,00	13.317,29	100,00	22.645	100,00

##### Pelanggan Berulang

Perseroan juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan klien-kliennya. Hal ini terbukti dengan banyaknya order pengerjaan proyek yang diberikan oleh pihak yang sama. Sejak tahun 2010 sampai dengan 31 Desember 2014, Perseroan telah menyelesaikan antara lain :

No	Jumlah Proyek	Pemberi Proyek
1	374	Pekerjaan Umum
2	295	Pemda
3	89	Pemerintah-Non PU
4	32	Krakatau Steel-Posko
5	28	Angkasa Pura
6	18	PT PLN (Persero)
7	17	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
8	12	Pelindo
9	10	Kementerian Perhubungan
10	8	Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia
11	10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
12	7	PT Semen Padang
13	7	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
14	4	PT Pertamina (Persero)
15	3	PT Brantas Adipraya
16	3	Transmarga JP
17	3	Pupuk Sriwijaya
18	3	Gunadarma
19	2	Kajima
20	2	Bin Laden

##### Pendapatan dari Pelanggan Berulang

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kementerian Pekerjaan Umum	1.130.802	2.299.952	2.408.180	1.694.185	1.539.210	3.339.283
Pemerintah Daerah	1.061.381	197.833	740.706	1.683.243	2.262.683	2.740.735
Total Pelanggan Berulang	2.192.183	2.497.785	3.148.886	3.377.428	3.801.893	6.080.018
Total Pendapatan Usaha	4.490.876	5.853.205	7.274.167	8.808.416	9.686.610	10.286.813
% Pelanggan Berulang terhadap Pendapatan Usaha	48,81	42,67	43,29	38,34	39,25	59,10

##### Daya Saing

Proyek-proyek yang didapat Perseroan adalah berasal dari lelang dan penunjukan. Berikut tabel mengenai perkembangan kontrak yang diperoleh oleh Perseroan dari tahun 2010 – 2014 :

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Tender Diiikuti	24.886,88	42.013,65	48.039,88	63.484,38	65.259,89
Tender Dimenangkan	5.510,77	9.962,45	12.263,83	13.317,29	22.645,28
Daya Saing (%)	22,14	23,71	25,53	20,98	34,70

## 5. Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan oleh Perseroan sebagian besar berasal dari material Lokal (berkisar antara 75%-85%), sedang sisanya Impor (khususnya Peralatan Mekanikal & Elektrikal). Biaya bahan baku yang berasal dari pemasok, dalam struktur Beban Kontrak (*cost structure*) Perseroan adalah sebesar 30%-40%, yang pengadaannya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Pengadaan Material (SPM) untuk jangka waktu tertentu. Banyaknya pemasok yang tersedia, menguntungkan Perseroan untuk mendapatkan bahan baku sehingga Perseroan selama ini tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok tertentu.

## 6. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas usaha khususnya dalam dunia konstruksi.

Perkembangan teknologi informasi memperlihatkan munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi. Manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan teknologi informasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- Mudah mencari informasi pasar konstruksi.
- Mudah mencari informasi perkembangan teknologi konstruksi.
- Mudah untuk mengembangkan database vendor ke luar negeri.
- Sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan dan mitra kerja melalui publikasi web Perusahaan.

Dalam usaha mengembangkan Perseroan yang didasari atas rencana pengembangan konsep kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kinerja pegawai, efisiensi dan efektifitas kerja serta pengenalan produk baru, dibutuhkan penerapan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga rencana pengembangan Perseroan dapat terealisasi dan berjalan dengan baik.

Sejalan dengan rencana tersebut, Perseroan telah merancang bagian terpenting dari sistem informasi Perseroan yaitu pengembangan aplikasi dan pembangunan perangkat keras yang baru, sesuai perkembangan teknologi informasi, sebagai berikut :

- Proses dokumentasi digital untuk dokumen Perseroan (Akte Pendirian dan Perubahan, SBU, SKA, Pengalaman Pekerjaan, Laporan Keuangan, SDM) yang dapat di akses oleh Unit Bisnis dengan ditempatkan di Jaringan FTP Perseroan.
- Aplikasi Disposisi Surat yang digunakan untuk mendistribusikan surat-surat Perseroan secara elektronik dan mail intranet dengan menggunakan Outlook.
- Penggunaan program Aplikasi Keuangan dalam proses migrasi dari WKAK menjadi ERP (Microsoft Dynamics) yang terintegrasi dengan aplikasi SDM, Pemasaran dan Produksi.
- Penggunaan program Aplikasi Risiko (SIM Manrisk) untuk memperoleh informasi pengukuran risiko Perseroan.
- Memanafaat fasilitas internet dengan membuat Web Perseroan ([www.waskita.co.id](http://www.waskita.co.id)) sebagai media promosi agar dapat diakses oleh pelanggan secara global, sebagai media informasi tata kelola Perusahaan (Publish Laporan Keuangan dan kegiatan lainnya antara lain GCG Index Level, Program CSR Perseroan, dll.) dan sebagai media komunikasi langsung pelanggan dengan Perseroan.

## 7. Persaingan

Batasan proyek yang dapat diambil oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

### Divisi Infrastruktur

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Indonesia	tidak ada batasan

### Divisi Gedung

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
DKI, Banten dan Jawa Barat	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan luar Jawa	Nilai kontrak > Rp 150 miliar
Luar Negeri selain Timor Leste	Tidak ada batasan nilai kontrak

### Divisi Regional Barat

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Sumatera & Jawa untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
Seluruh Sumatera & Jawa (kecuali DKI, Banten & Jawa Barat) untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar

## Divisi Regional Timur

Daerah Operasi	Batasan Nilai Kontrak
Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek sipil	Nilai kontrak > Rp 50 miliar
Seluruh Kalimantan, Bali, NTB, Timor Leste, Sulawesi, Maluku & Papua untuk proyek gedung	Nilai kontrak Rp 50-150 miliar

Untuk klasifikasi usaha bersifat general terdiri dari 2 ( dua ) klasifikasi yaitu :

- Berdasarkan Perlem No. 2 tahun 2013 klasifikasi B1 ( peralihan ), dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M
- Berdasarkan Perlem No. 10 tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, dengan tabel sebagai berikut :

No	Klasifikasi	Nilai Proyek
1	Kelas B (Besar)	≥ Rp10 Miliar
2	Kelas M (Menengah)	Rp1 Miliar s/d Rp10 Miliar
3	Kelas K (Kecil)	<Rp1 Miliar

Saat ini Perseroan berada pada klasifikasi B. Persaingan dalam Industri Jasa konstruksi cukup tajam karena jumlah pesaing sekitar 125 perusahaan klasifikasi B di seluruh Indonesia. Persaingan tersebut menjadi semakin ramai dengan masuknya kontraktor-kontraktor asing untuk mengikuti tender-tender ICB (*International Competitive Biding*) pada proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Walau demikian, tidak mudah bagi suatu perusahaan untuk masuk dalam usaha jasa konstruksi klasifikasi B karena dibatasi oleh penguasaan teknologi, padat modal dan penguasaan serta penguasaan pasar tingkat tinggi. Jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam industri yang sama dengan Perseroan, maka Perseroan berada di papan (Sumber: Biro Pusat Statistik, 2011).

Perseroan memahami bahwa persaingan dalam penjualan di industri konstruksi di Indonesia sangatlah ketat. Namun dengan keahlian dan pengalaman yang telah dimilikinya, Perseroan yakin memiliki posisi kuat dalam persaingan. Hal ini terutama didukung dengan keunggulan bersaing Perseroan diantaranya *cost structure* yang sangat kompetitif, tenaga kerja yang ahli serta pengalaman khusus yang dimiliki Perseroan dalam beberapa jenis proyek seperti pembangunan bandara.

Berikut ini adalah beberapa perusahaan konstruksi besar yang antara lain menjadi pesaing Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Pesaing dalam hal
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
2	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
3	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa Konstruksi	Penjualan
4	PT Hutama Karya (Persero)	Jasa Konstruksi	Penjualan

Dengan adanya persaingan di industri konstruksi, sesuai dengan data olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS, Perseroan meyakini bahwa pangsa pasar Perseroan pada tahun 2014 adalah sebesar 1,07% yaitu diperbandingkan antara pasar yang diperoleh Perseroan dengan pasar potensial konstruksi yang informasinya tersedia untuk umum, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Potensial Pasar Konstruksi*)	661.000	715.200	768.053	818.514	982.217
Realisasi Perolehan Perseroan	5.511	9.963	12.264	13.324	22.645
(%)	0,83	1,39	1,59	1,62	2,30

Catatan: \*) Data merupakan hasil olahan internal Perseroan dengan sumber dari BPS

## 8. Prospek Usaha

Seiring dengan bertambahnya permintaan terhadap industri konstruksi, sampai dengan tahun 2015 Pemerintah akan mempersiapkan dana sebesar Rp564 Triliun. Jumlah tersebut akan di alokasikan terhadap 5 sektor yang antara lain adalah Sumber Daya Air (SDA), Transportasi, Perumahan, Energi & Listrik, Pos & TI. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, MP3EI, Bappenas, Januari 2012).

Pertumbuhan infrastruktur tahun 2020 pada bidang transportasi seperti jalan tol dan jembatan di Indonesia diprediksikan akan mencapai 25% dari total semua proyek konstruksi. Infrastruktur pada bidang railroad dan powerplant (Energi & Listrik) menempati peringkat kedua dan ketiga dengan total nilai pertumbuhan mencapai 23% dan 17% sampai tahun 2020. Sehubungan dengan pertumbuhan tersebut, Pemerintah sudah mengalokasikan pendanaan terbesar pada pembangunan infrastruktur untuk sektor transportasi. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, Bappenas, Januari 2012).

Alokasi pendanaan untuk sarana transportasi seperti jalan, jembatan dan Tol memperoleh nilai alokasi tertinggi dengan total Rp313,78 triliun sampai dengan tahun 2015. Pendanaan kedua terbesar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pada sektor Sumber Daya Air (SDA) dengan total alokasi pendanaan sebesar Rp102,81 triliun. Sisa pendanaan akan dialokasikan ke sektor perumahan, energi & listrik dan Pos & Teknologi Informasi dengan total rata-rata sampai tahun 2015 sebesar Rp54,22 Triliun. (Sumber: Data alokasi pendanaan pembangunan, Bappenas, Januari 2012).

Secara keseluruhan, proyek dari pemerintah masih memiliki daya tarik yang cukup kuat. Jenis layanan proyek sipil didorong terus untuk tumbuh serta melakukan investasi sumber daya baru (khususnya peralatan konstruksi), sedangkan proyek Gedung masih dalam kategori pertumbuhan yang cukup selektif. Produk layanan utama Perseroan adalah Gedung dan Sipil, serta EPC. Ketiga jenis produk layanan tersebut ditawarkan pada dua jenis pasar utama yaitu Pemerintah dan Swasta. Perseroan masih harus selektif dan mengukur risiko terhadap proyek-proyek dari swasta pada bidang gedung dan sipil.

Secara umum pada 2014, mayoritas pengusaha optimis pada kemajuan sektor konstruksi. Hal ini tercermin dari besaran nilai indeksinya dalam data Badan Pusat statistik (BPS) yang lebih besar dari 50, yaitu ditunjukkan dengan nilai indeks kondisi bisnis konstruksi mencapai 54,05 untuk kondisi bisnis dan prospek bisnis sebesar 63,12 pada pertengahan 2014.

Di sisi lain, berdasarkan data citradataconstruction.com, Indonesia bersiap tengah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Karna itu, perusahaan-perusahaan lokal dan asing mempersiapkan diri guna menyambut era tersebut. Sektor *commercial building* diprediksi mengalami kenaikan sekitar 9,2% dari tahun 2014. Begitupun dengan sector residential diprediksi mengalami kenaikan sekitar 14,15% pada 2015 dibanding dengan 2014.

Pada sektor infrastruktur, program dari Pemerintahan baru yang akan membangun berbagai macam infrastruktur seperti pelabuhan dan dermaga yang memudahkan untuk pendistribusian barang via laut, waduk, jalan tol Trans Sumatera dan Sulawesi, MRT, Power Plant juga akan meramaikan pasar konstruksi pada masa mendatang.

Sektor infrastruktur diprediksi mengalami kenaikan sekitar 72% dari tahun 2014. Program infrastruktur ini juga terdapat dalam *blue print* MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), diperkirakan untuk mewujudkan hal tersebut pemerintahan presiden Joko Widodo akan mengalokasikan dana sebesar Rp6.500 T per 5 tahun.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipastikan akan berdampak pada kenaikan harga bahan bangunan dan bahan-bahan lainnya. Namun banyak pengamat ekonomi yang optimis perekonomian Indonesia masih berada di jalur yang positif. Demikian juga para pelaku dunia properti juga optimis pada Pemerintahan baru yang berjanji akan memberikan kemudahan pada proses perizinan dan investasi bagi investor asing dan lokal.

### **Keunggulan Bersaing**

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

#### **a. Memiliki posisi yang menguntungkan dalam penggarapan potensi dari proyek infrastruktur Pemerintah**

Sebagai BUMN di bidang konstruksi, Perseroan memiliki posisi yang solid dalam mendapatkan proyek-proyek infrastruktur besar yang direncanakan oleh Pemerintah seperti MP3EI, jalan tol, infrastruktur pelabuhan dan Bandar udara, pembangkit listrik dan proyek-proyek lainnya. Sejak tahun 1980an, Perseroan selalu mendapatkan proyek-proyek unggulan dari Pemerintah, seperti Proyek Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarna-Hatta dan Bandar Udara Juanda (2001), Jembatan Pasupati dan Suramadu (2005), serta Bendungan Jatigede (2009), Burj View Dubai, ADFC Tower Dubai, Legend Plaza Dubai, King Abdullah Financial District Riyadh (2010), Dredging & Embankment Krakatau Steel (2011), Diversion Tunnel Jatigede (2012), serta Jembatan Kelok 9 dan Jalan Tol Bali Mandara (2013).

#### **b. Pemain besar nasional dengan reputasi dan customer base yang luas**

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi dengan pendapatan usaha dari sektor konstruksi yang terbesar di Indonesia (Sumber : Data laporan keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi yang tercatat di BEI, Desember 2013). Perseroan juga telah mendapatkan berbagai macam penghargaan dalam usahanya dari lembaga-lembaga yang ada di dalam maupun luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki keahlian dan reputasi yang baik di bidangnya.

Tingginya pendapatan usaha tersebut juga didukung oleh customer base Perseroan yang luas; terdiri dari instansi pemerintah, BUMN dan pihak swasta (dalam negeri dan luar negeri). Perseroan senantiasa menjalin hubungan harmonis dengan klien sehingga banyak dari klien tersebut yang menjadi repeat customers dalam 6 tahun terakhir.

**c. Memiliki produk unggulan dan produk yang berkualitas**

Perseroan memiliki beberapa produk unggulan yang membantu dalam pelaksanaan proyek-proyeknya, diantaranya Pembangunan Bandara, Dermaga, Bendungan, *Tunnel*, Jalan Tol, *Fly-over* dan Jembatan Bentang Panjang. Konsumen menuntut penyelesaian pekerjaan dengan waktu *delivery* lebih cepat dan mutu pelaksanaan yang lebih baik. Dalam hal itu, Perseroan dapat mengungguli pesaing-pesaing lainnya dengan pengalaman yang dimilikinya dalam pembangunan proyek-proyek tersebut.

Untuk menunjang kinerja Perseroan dalam menciptakan produk dengan kualitas yang bermutu, Perseroan menerapkan proses standar dengan sistem ISO 14001 : 2004 (*environmental management system*), ISO 9001: 2000 (quality management system), dan OHSAS 18001 : 2007 (*Health and Safety Management System*), serta Sertifikat Audit Sistem Manajemen Pengamanan (Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa).

**d. Melakukan diversifikasi usaha dengan sistem investasi**

Beberapa proyek yang sedang dirintis untuk program investasi antara lain :

1. Proyek Jalan Tol Pematang – Pejagan di Jawa Tengah
2. Proyek Jalan Tol Krian – Legundi Bunder di Jawa Timur
3. Proyek Jembatan Penajam di Kalimantan Timur
4. Proyek PLTU Karang Kates Kesamben di Jawa Timur
5. Proyek Jalan Tol Kualanamu di Medan, Sumut
6. Proyek Terminal Curah Cair Kuala Tanjung di Sumatera Utara
7. Proyek PLTM Sangir di Sumatera Barat

**e. Pertumbuhan pendapatan yang stabil dan daya saing yang meningkat**

Pendapatan Perseroan terus menunjukkan angka yang bertumbuh dan stabil. Segmen usaha konstruksi mengalami kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun sebagai dampak positif atas penerapan strategi peningkatan margin pendapatan melalui *cost reduction program*, kegiatan EPC, serta pengingkatan sistem kerja internal secara menyeluruh.

Perseroan juga secara konsisten berupaya untuk meningkatkan daya saingnya, hal ini terbukti dari persentase tender yang dimenangkan dari tahun ke tahun. Perseroan terus mendapatkan proyek-proyek besar setiap tahunnya untuk mencapai target RKAP tahunan yang telah ditentukan.

**f. Desentralisasi organisasi dan jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas di seluruh Indonesia**

Perseroan telah melakukan reorganisasi dalam rangka melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan struktur organisasi yang ada sebelumnya. Dengan adanya struktur organisasi baru ini, Perseroan dapat mewujudkan sistem desentralisasi dan pemberdayaan Divisi yang dibagi berdasarkan pekerjaan dan wilayah geografis yang lebih spesifik. Beberapa manfaat reorganisasi yang dilakukan Perseroan antara lain:

- Memiliki unit usaha di setiap provinsi di Indonesia dan di Luar Negeri (Jeddah), dengan minimum personil.
- Pendelegasian proses pengambilan keputusan kepada Divisi.
- Masing-masing Divisi menangani proyek di daerahnya serta Divisikhusus (Gedung dan Sipil yang menangani proyek-proyek diatas Rp250 miliar).
- Lebih selektif mendapatkan proyek-proyek prefinancing (didukung dengan Jaminan Pembayaran).

Selain itu, Perseroan memiliki wilayah produksi dan jaringan informasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia, serta Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dengan cabang di 33 lokasi di dunia, Perseroan mendapatkan cakupan pasar yang lebih luas.

**g. Memiliki manajemen dan tenaga kerja yang ahli dan dapat diandalkan dalam penyelesaian proyek dengan tepat waktu**

Manajemen Perseroan adalah orang-orang yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi dalam bidang konstruksi. Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memiliki kapabilitas yang tinggi, fit, proper, profesional dan memiliki global mindset.

Sumber daya manusia adalah aspek yang sangat penting bagi Perseroan. Untuk itu, Perseroan senantiasa mengembangkan keahlian tenaga kerjanya dengan pengembangan dan, pelatihan dan memiliki Sertifikat Keahlian (SKA). Sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif diwujudkan dengan penerapan beberapa program, seperti rekrutmen Management Trainee (MT), Beasiswa bagi pegawai untuk mengikuti program S2 dalam dan luar negeri, Program Merit System, dan menjalankan *sharing knowledge* maupun program pengembangan kepemimpinan.

## 9. Strategi Usaha

Dalam mewujudkan tercapainya tujuan Perseroan dalam hal pertumbuhan bisnis, penghematan biaya, serta pembuatan dan pembaharuan sistem, Perseroan melaksanakan strategi sebagai berikut:

### a. Revitalisasi (2012)

Membentuk sistem baru, diantaranya sistem informasi manajemen, sistem *Human Capital development*, sistem manajemen arus kas, sistem manajemen risiko, serta sistem manajemen proyek yang dapat mendukung pasar dan operasi.

### b. Pengembangan (2013 - 2014)

Mengembangkan produk baru, diantaranya konstruksi yang berbasis kepada K3LMP dan *green construction*, proyek-proyek *engineering procurement construction* (EPC), serta proyek-proyek unggulan lainnya dengan didukung sistem dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan Perseroan.

### c. Realisasi (2015 – 2017)

Memiliki arus kas operasi yang positif dengan didukung pertumbuhan penjualan yang baik dengan laba bersih yang melebihi dari industri sejenis.

## 10. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG)

Perseroan merupakan badan usaha milik negara yang menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dalam bidang industri konstruksi. Dalam kegiatan sehari-hari, kebijakan itu dijalankan sesuai dengan budaya Perseroan yang disingkat IPTE*x* (*Integrity, Professionalism, Teamwork, Excellence*) dan Prinsip *Good Corporate Governance* yang disingkat TARIF (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness*).

Proses bisnis Perseroan ditentukan oleh pegawai berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi, serta sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri. Di dalam proses bisnis ini para pegawai bekerja secara profesional dan telah digariskan oleh organ perusahaan, yaitu RUPS, komisaris, Komite, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Tata kelola perusahaan atau GCG diterapkan Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Dan Permen 09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Permen PER-01/MBU/2011. Prosedur di bidang tata kelola perusahaan dan prosedur di bidang etika dan perilaku (*code of conduct*) telah diterbitkan Perseroan dengan tujuan memastikan bahwa seluruh Komisaris, Direksi dan pegawai Perseroan memiliki persepsi yang sama dalam menerapkan GCG di seluruh aspek operasional Perseroan. Selain itu dibuat berbagai kebijakan dan standar etika untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing. Komitmen untuk mengikuti dan mematuhi kebijakan dan standar etika yang tercantum dalam kedua prosedur tersebut dituangkan dalam formulir yang ditandatangani oleh seluruh pegawai. Dewan Komisaris mendorong terciptanya etika perilaku di Perseroan, memperjuangkan kepentingan Perseroan, mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi perihal kebijakan dan pengurusan perusahaan, memantau efektifitas penerapan dan menetapkan ukuran untuk penilaian tersebut.

## 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (“AMDAL”)

Perseroan dalam melaksanakan proyek-proyeknya selalu mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004, sehingga polusi yang dihasilkan proyek selalu masih berada dalam batas aman atau dibawah NAB (Nilai Ambang Batas) yang diijinkan. Kepatuhan terhadap pelaksanaan manajemen lingkungan ini juga dipakai dalam penilaian karya pegawai yang tertuang dalam salah satu item KPI (*Key Performance Indicator*).

Sejak tahun 2012, Perseroan juga telah menjadi anggota dari GBCI (*Green Building Council Indonesia*), sehingga diharapkan pelaksanaan proyek yang berwawasan hijau terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan proyek berwawasan hijau ini (*Go Green Construction*), disamping mengacu pada Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004 juga memperhatikan AMDAL yang dibuat oleh pemberi kerja sebelum proyek dilaksanakan. Segala hal yang dituangkan dalam AMDAL untuk melestarikan lingkungan hidup dilaksanakan sepenuhnya oleh semua proyek dan diawasi oleh pengawas pekerjaan dan pemberi kerja (*Owner*).

Proses Audit Internal dan Audit eksternal terhadap pelaksanaan AMDAL dilakukan secara rutin dan oleh institusi yang bertaraf Internasional terutama untuk audit eksternal. Setiap tahun ratusan AMDAL dilaksanakan di seluruh proyek, sesuai dengan jumlah perolehan proyek dan selama ini selalu memenuhi persyaratan yang diminta.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di kantor pusat Perseroan telah memperoleh Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) Operasional Gedung Perkantoran sesuai dengan Surat No. 1193/DPPL/-1.774.151 tanggal 28 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang menyebutkan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan usaha sebagaimana dipaparkan dalam DPPL kegiatan usaha Perseroan tergolong kegiatan yang tidak berdampak penting dan atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan laporan Pelaksanaan DPPL

yang mana terakhir kali dilakukan sesuai dengan Surat No. 006/WK/SP/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal Laporan Pelaksanaan DPPL Gedung Kantor Pusat Semester II 2014.

Perseroan memiliki Izin untuk menyimpan secara sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dituangkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 76/B-3/2013 yang dikeluarkan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tanggal 1 November 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 November 2016 Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). Dalam hal ini, Perseroan diwajibkan melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur DKI Jakarta u.p. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta dan Walikota Administrasi Jakarta Timur Kepala Kantor Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Perseroan telah melakukan pelaporan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan Surat No. 147/WK/SP/2015 tanggal 17 April 2015 Perihal Laporan Realisasi Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Adapun jenis limbah yang dihasilkan Perseroan antara lain toner/tinta printer bekas, baterai bekas, kaleng tinner/cat, bohlam bekas/mati, oli mesin bekas. Penanganan atas limbah-limbah tersebut adalah dengan cara dimusnahkan, dikirimkan ke PT Wahana Pamunah Limbah Indonesia untuk diangkut ke fasilitas pengolahan, mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*).

## **12. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Perseroan telah memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri oleh Perseroan berupa:

- a. Sertifikat Paten No. IDP0031392 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 26 Juli 2012, dengan tanggal pendaftaran adalah 29 Agustus 2007 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, atas invensi dengan judul "Sistem Peralatan Bekisting Gelincir Terowongan" dengan Nama Pemegang Paten adalah Perseroan;
- b. Sertifikat Paten No. IDP0023301 yang dikeluarkan oleh Direktur Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 21 April 2009, dengan tanggal pendaftaran adalah 1 Desember 2006 dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pendaftaran, atas invensi dengan judul "Sistem dan Peralatan Payung Elektrik" dengan Nama Pemegang Paten adalah PT Mega Cipta Sentra Persada, Perseroan, dan PT Cipta Intra Sarana Inti Tama secara bersama-sama;
- c. Sertifikat Merek No. IDM000029288 yang dikeluarkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 8 Februari 2005 yang berlaku selama 10 (sepuluh tahun) sejak tanggal penerimaan permohonan yaitu tanggal 29 Agustus 2003, atas Merek "Waskita" dengan nama pemegang merek terdaftar adalah Perseroan;  
Bahwa sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan pembaharuan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut diatas berdasarkan permohonan pendaftaran merek tanggal 15 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh direktur merek.
- d. Surat Pendaftaran Ciptaan No.024536 yang dikeluarkan oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2004, dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal pengumuman yaitu pada tanggal 22 Desember 2000, dengan Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas nama Perseroan.

Perseroan tidak memiliki/menguasai Hak atas Kekayaan Intelektual yang diperoleh dari pihak lain.

## X. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012.

Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, Auditor Independen, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan sehubungan dengan adanya reklasifikasi beberapa akun dan penambahan pengungkapan dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (Member Firm of RSM International), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2014	2013
Modal Saham		
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 pada 31 Des 2014, 2013, dan 2012 dan Nilai Nominal Rp26.655 pada 31 Des 2011		
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 25.999.999.999 Saham Seri B pada 31 Des 2014, 2013 dan 2012 dan 20.000.000 Saham Seri B pada 31 Des 2011		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 9.632.325.999 Saham Seri B pada 30 Juni 2014 dan 31 Des 2013, dan 2012, dan 180.000 Saham Seri A dan 17.820.000 Saham Seri B pada 31 Des 2012	972.750	963.224
Tambahan Modal Disetor	880.789	831.138
Opsi Saham	43.363	28.929
Saldo Laba		
Telah ditentukan penggunaannya	268.432	194.820
Belum ditentukan penggunaannya	685.591	368.090
Komponen Ekuitas Lainnya	(7.956)	(3.800)
Jumlah yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	2.842.970	2.382.401
Kepentingan Entitas Non Pengendali	5.860	1.035
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.848.830</b>	<b>2.383.437</b>

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, tidak ada perubahan struktur dan komposisi modal saham Perseroan yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2014.

Apabila PUT I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014, maka proforma ekuitas setelah dikurangi biaya emisi pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor - Bersih	Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Opsi saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2014	972.750	880.789	-	43.363	954.023	2.848.830
Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 jika diasumsikan terjadi hal-hal berikut pada tanggal tersebut:	365.350	4.932.222	-	-	-	5.297.572
- PUT I kepada para pemegang saham Perseroan ini dengan jumlah sebanyak 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham dan seluruh HMETD yang ditawarkan seluruhnya diambil oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 setelah dikurangi biaya emisi						
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2014 setelah PUT I	1.338.100	5.813.011	-	43.363	954.023	8.146.402



## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen Perseroan dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Perseroan telah memiliki kebijakan dividen untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, dengan memperhatikan kinerja dan posisi keuangan.

Perseroan akan membayarkan dividen dalam bentuk kas (Rupiah). Pemegang saham pada tanggal pencatatan untuk memperoleh dividen (*recording date*) akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tabel dibawah ini menyajikan pembayaran dividen historis oleh Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana Saham:

Tahun Fiskal Pembayaran	Jumlah yang Dibayarkan (Rp juta)	Jumlah dividen kas per saham	Payout ratio	Tanggal pengumuman	Tanggal pembayaran
2015	100.306.102.480	10,311697	20%	26 April 2015	28 Mei 2015
2014	110.417.994.794	11,4633813	30%	28 Maret 2014	19 Mei 2014
2013	20.322.503.326	2,12	30%	22 April 2013	29 Mei 2013

Para pemegang saham baru yang berasal PUT I ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Dalam hal *negative covenant*, Perseroan tidak memiliki pembatasan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi pembagian dividen Perseroan.

## XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih metode pembayaran berdasarkan 0,5% Pajak Penghasilan yang bersifat final, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai pasal 17 Undang-undang No. 36 tahun 2008.
4. Berdasarkan Pasal 23.a.1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang berasal dari saham, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
5. Berdasarkan Pasal 17.2.c Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 4 (2) sebesar 10% dan bersifat final.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maka penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari wajib pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 ini merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ./2009 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form - DGT 1) atau Lampiran III (Form - DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. Form-DGT 2 yang telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang dari negara mitra P3B berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai. Pada saat ini, bea meterai dikenakan sebesar Rp6.000 untuk transaksi di atas Rp1.000.000 dan sebesar Rp3.000 untuk transaksi dibawah Rp1.000.000. Bea meterai ini terhutang pada saat dokumen dipergunakan.

Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Per 31 Desember 2014, Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan seluruh kewajiban pajaknya sebagai berikut:

*(dalam miliar Rupiah)*

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pajak Penghasilan Pasal 29	-
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	10.614
Pajak Penghasilan Pasal 21	8.083
Pajak Penghasilan Pasal 25	384

**CALON PEMESAN HMETD DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PUT I INI.**

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik**            **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**  
Jl. Mampang Prapatan VIII No. R25B  
Jakarta 12790  
Telp : (021) 7975542, 7989085, 70641138  
Faks : (021) 7996851  
Nomor STTD                         : 304/PM/STTD-AP/2002atas nama Drs. Dadang Mulyana.  
Tanggal STTD                        : 25 April 2013  
Pedoman Kerja                     : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)  
Nama & Nomor Asosiasi           : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 879  
Surat Penunjukan                 : No.L.20/P/WK/2014 tanggal 2 Juli 2014

Tugas Pokok:                   Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

**Konsultan Hukum**        **Weclaw Office**  
Jl. Blora No. 31, Menteng  
Jakarta 10310  
Telp : (021) 3917444  
Fax : (021) 3917440  
Nomor STTD                         : 361/PM/STTD-KH/2001 atas nama Teddy Ardhika Wardana, S.H., LL.M.  
Tanggal STTD                        : 6 April 2001  
Pedoman Kerja                     : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005  
Nama& Nomor Asosiasi           : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.200125  
Surat Penunjukan                 : No. 308/WK/Dir/2015 tanggal 2 April 2015

Tugas Pokok:                   Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

**Notaris**                        **Fathiah Helmi, S.H.**  
Gedung Graha Irama , Lantai 6, Ruang 6C  
Jalan HR Rasuna Said Kav. 1-2  
Jakarta 12950  
Telp : (021) 5290 7304, 5290 7305, 5290 7306  
Faks: (021) 526 1136  
Nomor STTD                         : 02/STTD-N/PM/1996  
Tanggal STTD                        : 12 Februari 1996  
Pedoman Kerja                     : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia  
Nama& Nomor Asosiasi           : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958  
Surat Penunjukan                 : No. 309/WK/Dir/2015 tanggal 2 April 2015

Tugas Pokok: Tugas pokok Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PUT I ini sesuai dengan Saham sehubungan dengan PUT I ini sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

**Biro Administrasi Efek**      **PT Datindo Entrycom**  
Puri Datindo, Wisma Sudirman  
Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35  
Jakarta 10220  
Telp     : (021) 570 9009, 570 8912  
Faks     : (021) 570 9026, 570 8914  
Nomor STTD                 : Kep 16/PM/1991  
Tanggal STTD                : 19 April 1995  
Pedoman Kerja               : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK  
Nama & Nomor Asosiasi     : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Surat Penunjukan            : 25/WK/TPW/2012

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Terbatas I ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PUT I sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## XIV. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk No.7 tanggal 4 Juni 2015 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk No.23 tanggal 9 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara Perseroan dan PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

Jika Saham Baru tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa tersebut pada harga penawaran sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham akan dibeli oleh PT Bahana Securities sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.437 (empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh saham), PT Danareksa Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.437 (empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh saham) dan PT Mandiri Sekuritas sebanyak-banyaknya sebesar 413.240.439 (empat ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan saham).

### A. PT BAHANA SECURITES (“BS”)

#### *Riwayat Singkat*

PT Bahana Securities adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta No.58 tanggal 26 Juli 1989, dibuat dihadapan Soebagio Ronoatmodjo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI melalui Surat Keputusan No.C-2-8857. HT.01.01. Th.89 tanggal 19 September 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 6 tanggal 21 Januari 1992 Tambahan No. 245. Anggaran dasar tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir berdasarkan akta No.5 tanggal 7 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Hadijah, S.H. Perubahan terakhir tersebut telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.10-36291 tertanggal 11 November 2011 dengan Daftar Perseroan No.AHU-0091284.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 11 November 2011.

#### *Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha*

Kegiatan utama BS adalah sebagai perusahaan sekuritas yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek (baik untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa atau komisioner) serta kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### *Pengurus dan Pengawasan*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 24 tanggal 25 April 2014 dibuat di hadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-06489.40.22.2014 tanggal 5 Mei 2014 adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Eko Yuliantoro  
Komisaris : Hari Gursida

#### **Direksi**

Direktur Utama : Andi Irawan Sidharta  
Direktur : Wiwit Gusnawan  
Direktur : Natalia Surjadiputra  
Direktur : Novita Lubis  
Direktur : Feb Sumandar

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	248.000	248.000.000.000	99,20%
2. Koperasi Karyawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	2.000	2.000.000.000	0,80%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000.000.000</b>	

## Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	880.454	672.875	886.882
Jumlah Liabilitas	500.353	330.410	593.636
Jumlah Ekuitas	380.101	342.465	293.245
Pendapatan Usaha	220.655	225.535	178.063
Laba Usaha	60.733	76.510	26.347
Laba komprehensif Tahun Berjalan	37.636	49.220	41.524

## B. PT DANAREKSA SEKURITAS (“DS”)

### Riwayat Singkat

PT Danarekxa Sekuritas didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 1 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tanggal 13 Maret 2013 dibuat dihadapan Masjuki, S.H., pengganti dari Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No.AHU-AH.01.10-22011 tanggal 04 Juni 2013.

### Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan DS adalah berusaha dalam bidang perdagangan surat berharga.

DS dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek;
- Bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek;
- Bertindak sebagai Pedagang Efek;
- Bertindak sebagai Penasehat Investasi; dan
- Melakukan kegiatan-kegiatan investasi pada privat equity.

### Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi DS sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 32 tanggal 26 Mei 2015 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0935310 tanggal 28 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bondan Pristiwandana  
 Komisaris : Albertus Magnus Irwan Satya Utama

#### Direksi

Direktur Utama : Marciano Hersondrie Herman  
 Direktur : Erizal  
 Direktur : Iman Hilmansah  
 Direktur : Ermawati Agustina  
 Direktur : Sujadi  
 Direktur : Jempino Ngabdi  
 Direktur : Budi Susanto

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Danareksa (Persero)	499.999.000	499.999.000.000	99,999
2. PT Reksatama Dinamika	1.000	1.000.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000.000</b>	

## Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah Aset	1.243.367	980.380	1.144.562
Jumlah Liabilitas	524.420	298.031	449.288
Jumlah Ekuitas	718.947	682.349	695.275
Pendapatan Usaha	299.885	251.463	179.321
Laba (Rugi) Usaha	82.182	74.722	6.308
Laba (Rugi) komprehensif	74.097	37.074	11.848

## C. PT MANDIRI SEKURITAS ("MS")

### Riwayat Singkat

PT Mandiri Sekuritas didirikan berdasarkan akta tanggal 09-12-1991 Nomor: 01, yang dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana Hukum dahulu Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 28-12-1991 Nomor: C2-8206.HT.01.01.TH.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18-02-1992, Nomor: 14, Tambahan Nomor: 724/1992.

Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan akta tertanggal 22-06-2012 Nomor 30, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum, tersebut, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 13-08-2012 Nomor AHU-AH.01.10-29950.

### Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan kegiatan usaha MS adalah berusaha dalam bidang perusahaan efek dengan izin usaha nomor: No. KEP-12/PM/1992 dan No. KEP-13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.

### Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MS terakhir berdasarkan Cover Note No.107/NOT/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum dan Susunan Direksi terakhir berdasarkan akta tertanggal 30-04-2014, nomor : 63, yang dibuat dihadapan Notaris Lenny Janis Ishak Sarjana Hukum, adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama  
dan Independen : Darwin Cyril Noerhadi  
Komisaris : Panji Irawan  
Komisaris : Alexandra Askandar

#### Direksi

Direktur Utama : Abiprayadi Riyanto  
Direktur : Iman Rachman  
Direktur : Laksono Widito Widodo  
Direktur : C. Paul Tehusjarana  
Direktur : I Nyoman Gede Suarja



### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 141 tanggal 28-12-2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	638.499.999	638.499.999.000	99,999
2. Koperasi Karyawan PT. Bank Mandiri Tbk	1	1.000	0,001
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>638.500.000</b>	<b>638.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>361.500.000</b>	<b>361.500.000.000</b>	

### Ikhtisar Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014	2013	2012
Jumlah aset	2.382.573	2.416.152	1.736.555
Jumlah liabilitas	1.370.320	1.464.295	863.957
Jumlah ekuitas	1.012.252	951.857	872.598
Jumlah pendapatan usaha	701.616	613.168	447.574
Laba usaha	153.618	153.236	66.709
Laba bersih	86.752	93.107	28.552
Laba bersih yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	86.721	93.083	28.528
Kepentingan nonpengendali	31	24	24
Laba komprehensif tahun berjalan	88.336	84.977	138.665
Laba komprehensif yang diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	88.305	84.951	138.641
Kepentingan nonpengendali	31	26	24

### D. POKOK-POKOK PERJANJIAN KESANGGUPAN PEMBELIAN SISA SAHAM

Perseroan menawarkan sebesar 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebesar 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham. Pemegang Saham Perseroan yakni Negara Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015.

Jika Saham Baru ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru yang tersisa akan diserap oleh Pembeli Siaga sejumlah 1.239.721.313 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tiga belas) Saham Baru, dengan ketentuan:

- Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham yang melakukan pemesanan lebih dari haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat HMETD berdasarkan hak yang telah dilaksanakan;

- Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sisa Saham Baru sebagaimana diuraikan di atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - i. Disepakatinya harga pelaksanaan oleh dan antara Perseroan dan Pembeli Siaga;
  - ii. Ditandatanganinya perubahan atas Perjanjian oleh Perseroan dan Pembeli Siaga;
  - iii. Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui dilakukannya Penawaran Umum Terbatas I dan pengeluaran Saham Baru kepada Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tersebut;
  - iv. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tersebut telah menjadi efektif; dan
  - v. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan dan izin yang diperlukan dan telah melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I dan mengeluarkan dan menyerahkan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I tersebut.

PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas telah menyatakan kesanggupan dan memiliki dana yang cukup untuk bertindak sebagai pembeli siaga.

<b>PARA PEMBELI SIAGA MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN</b>
---

---

## XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Ref. No. : 211/WECO/TAW-FF-APS/VI/2015

Jakarta, 9 Juni 2015

Kepada Yth,  
**PT Waskita Karya (Persero), Tbk**  
Gedung Waskita  
Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang  
Jakarta 13340, Indonesia

U.p.: **Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS I  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TAHUN 2015 DENGAN HAK MEMESAN EFEK  
TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, **Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.** *partner* dari dan karenanya untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum **WECOLAW Office**, berkantor di Jalan Blora No. 31, Jakarta 10310, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM-LK**") di bawah pendaftaran No. 361/PM/STTD-KH/2001 tertanggal 6 April 2001 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan No. 200126 dan telah ditunjuk oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Emiten**") sesuai dengan surat penunjukan tanggal 2 April 2015 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Emiten, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "Pendapat Hukum") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") PT Waskita Karya (Persero) Tbk Kepada Pemegang Saham Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") (selanjutnya disebut sebagai "Penawaran Umum Terbatas I Waskita") sebesar 3.653.498.200 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) Saham Biasa Atas Nama Seri B atau sebesar 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUT I dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham Setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB berhak atas 36.852 (tiga puluh

enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT I ini adalah sebesar Rp5.297.572.390.000 (lima triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah). Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*), hasil pecahan tersebut akan dijual oleh Emiten dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Emiten.

Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Waskita, Pemegang Saham Emiten yakni Pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PUT I ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 yang direvisi melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015, dimana pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya Tbk tertanggal 3 Juni 2015.

Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, Emiten dan PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas (selanjutnya disebut "**Para Pembeli Siaga**"), telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. No. 7 tanggal 4 Juni 2015 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. No. 23 tanggal 9 Juni 2015, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembelian Sisa Saham**"). Para Pembeli Siaga telah menyanggupi untuk mengambil seluruh sisa Saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham Emiten pada Harga Pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham dengan jumlah porsi masing-masing sebagai berikut:

No.	Pembeli Siaga	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham
1.	PT Danareksa Sekuritas	413.240.437	599.198.633.650,00
2.	PT Bahana Securities	413.240.437	599.198.633.650,00
3.	PT Mandiri Sekuritas	413.240.439	599.198.636.550,00

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, agar Penawaran Umum Terbatas I dapat dilaksanakan, pernyataan pendaftaran harus terlebih dahulu mendapat efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
2. Pada bulan November 2014, Emiten telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahun 2014 kepada masyarakat dan sehubungan dengan hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan hukum sebagaimana dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum sesuai surat Ref.No. 214/WECO/ TAW-FF-LSW-DP-AP-BM /XI/2014 dan Ref. 215/WECO/ TAW-FF-LSW-DP-AP-BM /XI/2014 keduanya tanggal 4 November 2014 yang telah disampaikan kepada Emiten dan ditembuskan kepada Otoritas JAsa Keuangan (“OJK”) (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten**” dan **Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten**).
3. Pendapat Hukum dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Waskita ini adalah terhitung sejak periode setelah Pendapat Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa:
  - a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan dan penawaran umum melalui Bursa Efek serta pasar modal di Indonesia.
  - b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Emiten dokumen-dokumen tersebut ini adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum.
5. Dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya, kepemilikan, perubahan kepemilikan saham dan permodalan, perijinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian material yang mengikat Emiten, pemeriksaan atas perkara yang melibatkan Emiten untuk periode sejak Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten sampai dengan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Terbatas I Waskita sesuai dengan surat kami Ref. No. : 193/WECO/TAW-FF-APS/V/2015 Tanggal 26 Mei 2015.

Selain itu, kami juga telah melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen-dokumen hukum atas penyertaan/kepemilikan Emiten terhadap anak-anak perusahaan (selanjutnya

- disebut sebagai “**Anak Perusahaan**”), dimana laporan keuangan Anak Perusahaan tersebut dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Emiten dan/atau kepemilikan Emiten sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih.
6. Selanjutnya kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat atas beberapa fasilitas-fasilitas usaha Emiten guna mendapatkan gambaran nyata secara fisik tentang usaha dan kegiatan Emiten. Pemeriksaan demikian, kecuali dinyatakan secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, tidak berarti bahwa kami memberikan pendapat atau dapat diartikan bahwa Emiten secara hukum memiliki dan/atau menguasai fasilitas usaha tersebut.
  7. Pendapat Hukum dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor KEP. 04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

#### **ASUMSI, PEMBATAAN DAN KUALIFIKASI**

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi, pembatasan dan kualifikasi, sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum Penawaran Umum Terbatas I Waskita ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Terbatas I Waskita ini adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum Penawaran Umum Terbatas I Waskita ini dan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Terbatas I Waskita adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Terbatas I Waskita ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Emiten adalah benar dan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atas kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.

4. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan dan dilaksanakan sesuai kerangka hukum negara Republik Indonesia sehingga dan karenanya tidak dimaksudkan untuk dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
5. Bahwa sehubungan dengan perjanjian-perjanjian konstruksi yang dibuat Emiten dalam rangka menjalankan usahanya, dalam memberikan Pendapat Hukum atas Emiten kami hanya mendasarkan pemeriksaan acak atas perjanjian konstruksi standar baku yang diberikan Emiten kepada kami, dimana pemeriksaan tersebut diambil dengan kriteria nilai kontrak/perjanjian sekurang-kurangnya sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah) sampai dengan nilai tertinggi kontrak yang diperoleh Emiten.
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Emiten yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Emiten menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.
7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi Aspek Hukum Emiten terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan Emiten sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
8. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Emiten dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Waskita ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

## PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Emiten dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Emiten adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pertama kali dengan nama "*Volker Aannemig Maatschappij N.V*" yang kemudian dinasionalisasi menjadi perusahaan negara



dengan nama “Perusahaan Negara (P.N.) Waskita Karja” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1961 kemudian diubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tertanggal 15 Maret 1973 yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 50 tertanggal 8 Agustus 1973, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama “PT Waskita Karya” dan didirikan secara sah berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas dan Industri Konstruksi.

2. Anggaran Dasar Emiten telah beberapa kali diubah dan setiap perubahan anggaran dasar Emiten telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas, Anggaran dasar Emiten telah disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang -Rencana Dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 85 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0928411 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Emiten, maksud dan tujuan Emiten adalah bergerak dalam bidang konstruksi, untuk dapat mencapai maksud dan tujuan tersebut, Emiten dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Maksud dan tujuan Emiten adalah berusaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Emiten dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
    1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
      - (A). Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi;
        - (1). Pekerjaan Sipil dan Gedung (seluruh sektor Pembangunan);
          - a. Drainase dan Jaringan Pengairan;

- b. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
  - c. Jalan dan Jembatan Kereta Api;
  - d. Gedung, Pabrik dan Bangunan Industri;
  - e. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah;
  - f. Reklamasi dan Pengerukan;
  - g. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (*Break Water* dan Talud);
  - h. Perumahan dan Pemukiman;
  - i. Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
  - j. Pembukaan Areal/Transmigrasi;
  - k. Bendung, Bendungan dan Terowongan;
  - l. Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;
  - m. Interior;
  - n. Pengeboran;
  - o. Pengupasan termasuk *land clearing*;
  - p. Penggalian/Penambangan;
  - q. Pekerjaan Pancang;
  - r. Tambang dan Pembangkit;
  - s. Pertamanan;
  - t. Pekerjaan Sipil dan Gedung Lainnya.
- (2). Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan dan instalasi :
- a. Kelistrikan dan pembangkit;
  - b. Tata udara /AC dan Pelindung Kebakaran;
  - c. Transmisi dan Distribusi Kelistrikan;
  - d. Pemasangan Alat Angkut;
  - e. Pemasangan Fasilitas Produksi;
  - f. Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai;
  - g. Lift dan Escalator;
  - h. Industri dan Pembangkit;
  - i. Termal/Bertekanan;
  - j. Minyak/Gas/Geotermal/Energi/Air;
  - k. Kontrol dan Instrumentasi;
  - l. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lainnya.
- (3). Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk Jaringan dan Instalasi;
- a. Sinyal dan telekomunikasi Kereta api;
  - b. Sentral telekomunikasi;
  - c. Telekomunikasi;
  - d. Pemasangan Telekomunikasi;
  - e. Pemancara Radio Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut.
- (4). Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan.
- (B). Jasa Pertambangan;

- (C). Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction: EPC*) dalam bidang:
    - (1). Perminyakan;
    - (2). Agro industri;
    - (3). Kelistrikan;
    - (4). Telekomunikasi.
  - (D). Petrokimia; Rancang Bangun (*Design and Build*);
  - (E). Building Manajemen;
  - (F). Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
  - (G). Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
  - (H). Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
  - (I). Penyewaan peralatan konstruksi;
  - (J). Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
  - (K). Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang :
    - (1). Prasarana dan sarana dasar (*infrastruktur*);
    - (2). Industri.
  - (L). Ekspor Impor;
  - (M). Perdagangan umum;
  - (N). *System Development*;
  - (O). Pengelolaan Kawasan;
  - (P). Pengembangan:
    - (1). Properti;
    - (2). Realty.
2. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha untuk :
- (A). Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
  - (B). Melakukan usaha dibidang agro industri;
  - (C). Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

Bahwa Maksud dan Tujuan Perseroan Emiten sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 anggaran dasar Emiten telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Pada tanggal pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan telah menjalankan dan telah melingkupi kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan serta tidak menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Emiten.

4. Emiten berhak dan dapat menjalankan usaha-usaha dan aktivitas-aktivitasnya terutama di bidang Konstruksi, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar dan izin-izin operasional yang dimilikinya untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada izin-izin operasional dan/atau perizinan pendukung lainnya yang hingga tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usahanya serta telah memenuhi ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Khusus dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya di bidang konstruksi Emiten telah memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 1-001723-31723-3172-2-00049 tanggal 25 Februari 2015 atas nama Emiten untuk daftar klasifikasi bidang Bangunan Gedung, Bangunan Sipil, Instalasi Mekanikal dan Elektrikal, yang ditetapkan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang berlaku sampai dengan 16 Juli 2015.

5. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, Emiten telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Emiten adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.2.600.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus milyar Rupiah) yang terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam milyar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Disetor Penuh : Rp.972.750.420.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dan 9.727.504.204 (sembilan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat ribu dua ratus empat) Saham Seri B, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah).

8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Mei 2015 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Seri A (Dwi Warna) @Rp.100,00	Saham Seri B @Rp.100,00	Nilai Nominal (Rp.,00)	Persentase (%)
Pemerintah Republik Indonesia	1	-	100	0,001
Masyarakat	-	6.549.920.999	654.992.099.900	66,06
	-	3.364.054.360	336.405.436.000	33,93
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>9.913.975.359</b>	<b>991.397.536.000</b>	<b>100,00</b>

Bahwa atas struktur permodalan Emiten yang terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkan yang telah disetor penuh dan pengalihan-pengalihan saham sejak pendirian adalah benar dan sah serta berkesinambungan, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku serta telah sesuai dengan anggaran dasar dan telah berlaku efektif seluruhnya. Seluruh modal yang ditempatkan dan diambil bagian tersebut, telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Emiten.

Bahwa pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% adalah hanya Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten pada Pasal 5 dijelaskan bahwa saham seri A Dwiwarna memiliki hak yang sama dengan saham seri B, kecuali atas hak-hak istimewa yang hanya dimiliki oleh saham seri A Dwiwarna yaitu sebagai berikut:

- a. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Menyetujui perubahan anggaran dasar termasuk perubahan modal;
- c. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
- d. Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, kewajiban untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah tersedia.

9. Setiap pemilik saham Emiten yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Emiten, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Emiten sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Emiten yang dimilikinya.

10. Bahwa Penawaran Umum Terbatas I Waskita ini hanya dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi seluruh ketentuan anggaran dasar Emiten serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di pasar modal dan peraturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Jo. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Jo. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2005 tentang Tatacara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) atas rencana PUT I, Emiten memerlukan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat dan atas hal tersebut Emiten telah memperoleh persetujuan sesuai dengan berdasarkan Surat No. PW/06681/DPR RI/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Hasil Pembahasan rencana Right Issue 3 (tiga) BUMN Terbuka (Tbk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya Tbk. Emiten juga telah memperoleh Surat Menteri Keuangan No. S-62/MK.06/2015 tanggal 28 Januari 2015 Perhal Rekomendasi Program Tahunan Privatisasi Tahun 2015, Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. S-29.I/M.EKON/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 Perihal Arahan Komite Privatisasi Atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2015, Surat Menteri BUMN No. S-221/MBU/04/2015 tanggal 24 April 2015 Perihal Penetapan Lembaga/ Profesi Penunjang Right Issue PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, Surat Menteri BUMN No. S-224/MBU/04/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Penetapan Kisaran Harga Pelaksanaan (*Exercise Price*), Kisaran Jumlah Lembar Saham yang diterbitkan dan Kisaran Rasio, Konversi dalam Rangka Right Issue PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Surat Menteri BUMN No. S-316/MBU/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 Perihal Penetapan Harga Pelaksanaan (*Exercise Price*) Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. Selain dari pada itu Emiten juga memerlukan persetujuan para pemegang saham Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Emiten yang rencananya akan diadakan pada tanggal 10 Juni 2015.
11. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Emiten adalah sebagai berikut :

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama	:	Mohamad Hasan
Komisaris Independen	:	Viktor S. Sirait
Komisaris Independen	:	M. Aqil Irham
Komisaris	:	Arif Baharuddin
Komisaris	:	R. Agus Sartono
Komisaris	:	Danis Hidayat Sumadilaga

**DIREKSI**

Direktur Utama	:	Muhammad Choliq
Direktur	:	Tunggul Rajagukguk
Direktur	:	Nyoman Wirya Adnyana
Direktur	:	Desi Arryani
Direktur	:	Agus Sugiono
Direktur	:	Adi Wibowo

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Emiten tersebut telah diangkat secara sah oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Emiten telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 14 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

**SEKRETARIS PERUSAHAAN**

Bahwa pada tanggal Pendapat Hukum ini, Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten telah menunjuk Antonius Yulianto T.N., S.E., selaku Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 35/SK/WK/PEN/2014 tertanggal 13 Oktober 2014.

**PIAGAM KOMITE AUDIT DAN KOMITE AUDIT**

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No:Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Emiten No. 03/SK/WK/DK/2007 tentang Penetapan "*Audit Committee Charter*" Emiten oleh Dewan Komisaris Emiten pada tanggal 22 Mei 2007.

Bahwa Emiten telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No:Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 04/SK/WK/DK/2015 tanggal 28 April 2015, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Viktor S. Sirait
Anggota	:	R. Agus Sartono
Anggota	:	Mohammad Danial
Anggota	:	Agus Suparto

### **PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL**

Bahwa Emiten telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Emiten tanggal 26 Juli 2013 dengan persetujuan Dewan Komisaris Emiten.

Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi No. 13/SK/WK/PEN/2011 tanggal 21 Juli 2011, Surat Keputusan Direksi No.28/SK/WK/PEN/2012 tanggal 26 September 2012 dan Surat Keputusan Direksi No.29/SK/WK/PEN/2012 tanggal 28 September 2012, dan surat Keputusan Direksi No.06/SK/WK/PEN/2014 tanggal 01 April 2014 serta Keputusan Direksi No. 46/SK/WK/PEN/2014 tanggal 23 Desember 2014, Direksi Emiten membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawas Internal. Adapun susunan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Kepala Satuan Pengawas Intern	:	Jonni Huahaeen
Auditor Teknik I	:	Sunu Hartanto
Auditor Teknik II	:	Budi Sulisty
Auditor Sistem Satuan	:	
Pengawasan Intern	:	Tyas Tricahyani
Auditor Keuangan I	:	Dedi Suhartri Amir
Auditor Keuangan II	:	Tata Taufik

### **KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Bahwa Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten tidak membentuk secara khusus Komite Nominasi dan Komite Remunerasi, akan tetapi Dewan Komisaris Emiten telah menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Emiten memiliki penyertaan yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
  - a. **PT Citra Waspphutowa ("CW")**, yang bergerak di bidang perusahaan jalan tol, sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah) atau merupakan 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh CW.
  - b. **PT Pejagan Pemalang Toll Road ("PPTR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang, sejumlah 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.490.500,00 (empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) atau merupakan



0,01 % (nol koma nol satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPTR.

- c. **PT Prima Multi Terminal (“PMT”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, sejumlah 26.100 (dua puluh enam ribu seratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.26.100.000.000,00 (dua puluh enam miliar seratus juta Rupiah) atau merupakan 15% (lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PMT.
- d. **PT Jasa Marga Kualanamu Tol (“JMKL”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar Rupiah) atau merupakan 15% (lima belas persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh JMKL.

Selain itu, Emiten memiliki penyertaan yang sah pada Anak Perusahaan sebagai berikut:

- a. **PT Waskita Sangir Energy (“WSE”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, sejumlah 35.500 (tiga puluh lima ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 85% (delapan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WSE.
- b. **PT Waskita Toll Road (“WTR”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, pekerjaan pelaksanaan konstruksi, pekerjaan mekanikal elektrikal sejumlah 399.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.399.999.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WTR.

WTR mempunyai penyertaan saham yang sah secara langsung pada perusahaan sebagai berikut:

- **PPTR**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang, sejumlah 399.999 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.399.999.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPTR.
- **PT Waskita Bumi Wira (“WBW”)**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 7.500 (tujuh

ribu lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) atau merupakan 48% (empat puluh delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBW.

- **PT Kresna Kusuma Dyandra Marga ("KKDM")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol sejumlah 447.188.659 (empat ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 447.188.659.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) atau merupakan 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh KKDM.
- c. **PT Waskita Beton Precast ("WBP")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha perdagangan umum dan jasa, sejumlah Rp. 617.571.000.000,00 (enam ratus tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WBP.
- d. **PT Waskita Karya Realty ("WKR")**, perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha konstruksi, sejumlah Rp.24.999.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) atau merupakan 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh WKR.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai uji tuntas aspek hukum kami, penyertaan oleh Emiten pada Anak Perusahaan tersebut adalah sah dan benar serta didukung oleh dokumen kepemilikan yang sah serta telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Emiten dan Anggaran Dasar masing masing Anak Perusahaan tersebut dan saham-saham yang dimiliki Emiten maupun Anak Perusahaan tidak sedang dalam penjaminan dan terkait dalam suatu perkara apapun serta tidak sedang berada dalam status penyitaan apapun.

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, masing-masing Anak Perusahaan, adalah suatu badan hukum yang telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan usahanya. Sesuai uji tuntas aspek hukum kami, masing-masing Anak Perusahaan telah melaksanakan kewajibannya menurut anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal perubahan anggaran dasar, struktur permodalan dan peralihan sahamnya, serta pengurus, dan sehubungan pemenuhan kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran, ketenagakerjaan, perizinan lingkungan hidup serta kepemilikan harta kekayaan dari masing-masing Anak Perusahaan. terkecuali belum di penuhi kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran sebagai berikut:

1. a. Kewajiban PPTR untuk memperbaharui Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, pengurus PPTR dapat diancam Pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana setinggi-tingginya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Surat Keterangan No. 16/Ket/Not/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PPTR sedang melakukan proses pengurusan perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- b. Kewajiban PPTR untuk melaporkan secara berkala tiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan RKL-RPL. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 71 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengusaha atau pengurus yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.
2. Kewajiban WBP untuk memiliki Peraturan Perusahaan.

Bahwa atas belum dimilikinya Peraturan Perusahaan maka sesuai dengan pasal 188 Undang Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, WBP dapat dikenakan dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan bukti tanda terima tanggal 15 Mei 2015 dan Surat Pernyataan Direksi WBP tanggal 26 Mei 2015, WBP sedang melakukan proses pengurusan perolehan pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.

3. Kewajiban KKDM untuk melaporkan secara berkala tiap 6 (enam) bulan atas pelaksanaan RKL-RPL. Bahwa atas belum dipenuhinya kewajiban tersebut sesuai dengan pasal 71 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pengusaha atau pengurus yang tidak melaporkan hasil pelaksanaan RKL dan RPL akan dikenakan sanksi administratif yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan, atau pencabutan Izin Lingkungan.

Bahwa dengan sedang dilakukannya proses pemenuhan atas izin-izin tersebut diatas maka sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan hal tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha masing-masing Anak Perusahaan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan surat pernyataan masing-masing direksi dari Anak Perusahaan, masing-masing Anak Perusahaan tidak terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan masing-masing Anak Perusahaan dan/atau anggota Komisaris dan Direksi masing-masing Anak Perusahaan.

14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, pemilikan dan/atau penguasaan Emiten dan Anak Perusahaan atas harta kekayaannya, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, peralatan serta harta kekayaan lainnya adalah sah dan dilindungi oleh dokumen-dokumen pemilikan dan penguasaan yang sah, kecuali atas bidang-bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5378 tanggal 7 September 1993 atas nama Emiten yang terletak di Desa Rappocini, Kec. Tamalate, Kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, yang mana telah habis masa berlakunya dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses perpanjangan masa berlakunya.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, pemilikan dan penguasaan oleh Emiten dan Anak Perusahaan atas harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, peralatan, alat dan kendaraan berat serta hak kekayaan intelektual tidak sedang berada dalam status penyitaan dalam bentuk apapun, kecuali atas beberapa bidang tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor milik Emiten saat ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang telah diikat dengan perjanjian penjaminan tersendiri. Bahwa atas penjaminan yang dilakukan oleh Emiten tersebut tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa apabila diasumsikan harta kekayaan yang dijadikan jaminan di eksekusi pada saat ini oleh para kreditur maka hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha/operasional Emiten.

16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami, harta kekayaan yang dimiliki oleh Emiten dan Anak Perusahaan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dan dalam jumlah serta jangka waktu yang memadai.
17. Emiten dan Anak Perusahaan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan Anak Perusahaan menjadi pihak di dalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya dan tidak melanggar anggaran dasar Emiten dan/atau Anak Perusahaan, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Emiten dan Anak Perusahaan serta tidak

saling bertentangan dengan perjanjian-perjanjian lain dimana Emiten dan/atau Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik. Kecuali atas perjanjian yang dilakukan oleh WTR dengan PPTR terkait hutang piutang yang belum dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Emiten dan Anak Perusahaan menjadi pihak didalamnya tersebut, Penawaran Umum Terbatas I Waskita yang dilakukan Emiten tidak bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali atas perjanjian pemberian fasilitas kredit Emiten dari PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank Pan Indonesia Tbk, yang mana untuk rencana pengeluaran saham-saham baru dalam Emiten, diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur-kreditur dimaksud dan sehubungan dengan hal tersebut Emiten telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk sesuai dengan Surat No. 1610/WK/DIR/2015 tanggal 15 April 2015 dan dari PT Bank UOB Indonesia sesuai dengan surat No. 15/CPB/0074 tanggal 27 April 2015.

18. Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Terbatas I Waskita ini, Emiten telah membuat dan menandatangani perjanjian sebagai berikut :

1. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk No. 99 tanggal 28 April 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Datinto Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE")
2. Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. No. 7 tanggal 4 Juni 2015, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Penawaran Umum Terbatas I Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk. No. 23 tanggal 9 Juni 2015, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Emiten dengan PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

Perjanjian yang dibuat oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I Waskita tersebut diatas adalah sah dan mengikat Emiten dan para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan dan ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan anggaran dasar Emiten serta peraturan perundangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.

19. Bahwa dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I Waskita, sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk membiayai investasi jalan tol di Jawa dan Sumatera baik langsung maupun tidak langsung dan pembangunan transmisi listrik di Sumatera.

Setiap penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Waskita akan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Apabila Emiten bermaksud merubah penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Emiten dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Emiten dan/atau anggota Komisaris dan Direksi Emiten, kecuali atas perkara-perkara sebagai berikut:
- a. Perkara No. 498/XII/ARB-BANI/2012 antara PT Waskita Karya Divisi II ("Pemohon") melawan Dipl. Ing. John Wirawan selaku Pribadi maupun selaku Direktur Utama CV Jaya Wahana Lestari ("Termohon") dengan nilai tuntutan materil sebesar Rp 1.485.088.600,- (satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) terkait Proyek Jalan Tol Semarang - Bawen Seksi III, yang dalam amar putusannya BANI memerintahkan Termohon mengembalikan uang muka sebesar Rp 742.544.300,- (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus Rupiah). Termohon mengajukan Pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Semarang. Tanggal 23 Januari 2014 Pengadilan Negeri mengeluarkan amar menolak seluruh permohonan Termohon. Pada saat ini proses Kasasi ke Mahkamah Agung.
  - b. Perkara Keberatan KPPU No.01/Pdt.KPPU/2013/PN.Jkt.Tim, berdasar Fatwa Mahkamah Agung No. 01/Pen/Pdt.Sus/2014 tanggal 1 April 2014 yang menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk terhadap Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 pada tanggal 10 Mei 2013, yang mana pihak Termohon adalah KPPU, Panitia Pengadaan Barang/Jasa APBD Lingkup Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 ("Turut Termohon I"), dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk ("Turut Termohon II"). ). Telah dikeluarkan Putusan Keberatan terhadap Putusan KPPU tanggal 21 Mei 2015 dengan Putusan Menyatakan Batal demi Hukum Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2012 Tanggal 26 April 2012 dengan segala akibat hukumnya. Bahwa Terlapor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berhak untuk mengajukan upaya hukum. Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Terlapor.

- c. Perkara No. 208/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim antara PT Albok Boiler Industri ("Penggugat") melawan Konsorsium Pal-Waskita ("Tergugat") dalam gugatan menyatakan dengan Total Kerugian Materil sebesar Rp 22.807.555.500 (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dan Total Kerugian Moril sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) akibat pemutusan kontrak pada Proyek PLTU Malinau 2x3 MW oleh Tergugat, yang pada Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hingga saat ini masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.
- d. Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 15/PDT.G/2014/PN-LP antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. dan Yasa Patria Perkasa ("Penggugat") melawan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru ("Tergugat") dengan nilai tuntutan kerugian materil dan immateril sejumlah Rp 168.471.023.440,- (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh Rupiah) Berkaitan tentang wanprestasi yang dilakukan Tergugat terkait pembayaran penyesuaian harga (eskalasi), pembiayaan biaya Pajak Galian C, pembayaran biaya percepatan dan kerugian perhitungan bunga pada Proyek Paket Jasa Pendorongan Pekerjaan Tanah Tahap III, Perbaikan Tanah dan Aeronautical Pavement Runway Pembangunan Bandar Udara Medan Baru (Paket 4). Putusan PN Lubuk Pakam yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp. 97.383.218.000 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu Rupiah). Penggugat menyatakan Banding, dan posisi sampai saat ini adalah menunggu Putusan Pengadilan Tinggi.
- e. Perkara 16/PDT.G/2014/PN.LBB antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam ("Tergugat") di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat atas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Sport Centre Bukik Bunian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan nilai gugatan atas sisa pembayaran termijn sebesar Rp 2.150.080.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta delapan puluh ribu Rupiah). Telah dikeluarkan putusan Dari PN Lubuk Basung pada tanggal 13 Mei 2015 dengan putusan Menghukum Tergugat untuk membayar sisa Termin sebesar Rp. 2.150.080.000 kepada Penggugat. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Tergugat telah mengajukan Banding secara lisan.
- f. Perkara No. 627/XI/ARB-BANI/2014 antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Pemohon") dan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ("Termohon) atas Kontrak Pekerjaan Pengurukan Lahan PT. DOK & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) di Distrik Kabil Pulau Batam berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan Termohon terkait tagihan termin yang tidak dibayar, sisa progress pekerjaan yang sudah



dilaksanakan dan disepakati, nilai progress pekerjaan tambah yang sudah disepakati, progress pekerjaan bauxit, dan nilai perhitungan (opname) material Proyek Denda Keterlambatan dengan nilai gugatan sebesar Rp. 36.646.444.340,55 (tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh koma lima puluh lima Rupiah). Telah dikeluarkan Putusan dari BANI tanggal 22 Mei 2015 dengan putusan menghukum Termohon untuk membayar tagihan Termin IV sebesar 26.260.304.200 kepada Pemohon. Bahwa Terlapor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berhak untuk mengajukan upaya hukum. Sampai saat ini masih menunggu upaya hukum dari Termohon.

- g. Perkara No. 44/Pdt.G.2015/PN.Pbr antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Propinsi Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pengguna Anggaran ("Tergugat") pada Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jembatan Teluk Masjid Propinsi Riau atas Tagihan progress pekerjaan yang belum dibayar, Denda keterlambatan pekerjaan, Retensi dengan nilai gugatan sebesar Rp. 8.458.275.593,58 (delapan miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma lima puluh delapan Rupiah). Posisi sampai saat ini adalah masih proses sidang dengan Agenda sidang terakhir adalah Pemeriksaan Bukti Tergugat.
- h. Perkara No. 7/PDT.G/2015/PN.Tpg antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ("Penggugat") melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau cq Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran ("Tergugat") pada Proyek Pembangunan Masjid Raya dan Islamic Centre Propinsi Kepulauan Riau atas Eskalasi, dan Denda keterlambatan pekerjaan dengan nilai gugatan sebesar Rp. 12.534.461.200,55 (dua belas miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus koma lima puluh lima Rupiah). Posisi sampai saat ini masih proses sidang dengan Agenda sidang terakhir adalah Kesimpulan.

Bahwa atas perkara-perkara tersebut diatas tidak memiliki dampak negatif secara langsung dan/atau tidak mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten.

21. Sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan pembayaran yang melibatkan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga Jakarta. Sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan kepada kami, tidak terdapat perkara permohonan pembubaran Emiten dan tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana Emiten berkedudukan.



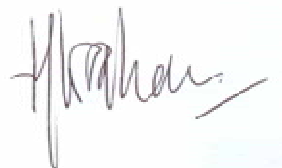
22. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, maka pendapat hukum kami sebagaimana termaktub dalam surat kami Ref. No. : 194/WECO/ TAW-FF-APS /V/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Terbatas I PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2015 dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,  
**WECOLAW Office**



**Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M.**  
No. 361/PM/STTD-KH/2001

## **XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN**

**PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2014 DAN 2013  
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk dan ENTITAS ANAK/  
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER  
RELATING TO  
THE RESPONSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014 AND 2013  
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk and SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name   | : | Ir. M. Choliq, MM   |
| Alamat kantor/Office Address                                 | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340                                       |
| Alamat domisili sesuai KTP/<br>Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Batu Merah II Kav. 6, RT 007/002, Pejaten Timur,<br>Pasar Minggu, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Phone Number                                   | : | 021- 7996642  |
| Jabatan/Position   | : | Direktur Utama/President Director   |
| 2. Nama/ Name  | : | Ir. Tunggul Rajagukguk, MM  |
| Alamat kantor/Office Address                                 | : | Jl. MT Haryono Kav. No. 10 Cawang Jakarta 13340                                       |
| Alamat domisili sesuai KTP/<br>Domicile as stated in ID Card | : | Jl. Pendidikan II E/62-63 RT 003/014, Duren Sawit<br>Jakarta Timur                    |
| Nomor Telepon/ Phone Number                                  | : | 021- 8508510  |
| Jabatan/Position   | : | Direktur Keuangan/Finance Director  |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*state that :*

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;*
2. *The consolidated financial statements have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in consolidated financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*  
b. *The consolidated financial statements do not contain any misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and*
4. *We are responsible for internal control system within the Company and its subsidiary.*

*This statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 25 Mei 2015/May 25, 2015

Direktur Utama /  
President Director

Direktur Keuangan /  
Finance Director

M. Choliq

Tunggul Rajagukguk

**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. R.4.1/125/05/2015

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan  
Direksi  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komperensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

*The original report included herein are in Indonesian Language.*

**Independent Auditor's Report**

Report No. R.4.1/125/05/2015

**The Shareholders, Boards of Commissioners and  
Directors  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2014, and the consolidated statements of comprehensive income, consolidated statements of changes in equity and consolidated statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Management's responsibility for the consolidated financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Auditor's responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.*



**dbsd&a****Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**  
Registered Public AccountantsLicense number :  
Minister of Finance : Kep-127/KM.1/2013  
Cabang Jakarta Selatan  
Jl. Mampang Prapatan VIII No. R.25B  
Jakarta 12790 Indonesia  
Phone : (62-21) 7975542, 7989085, 70641138  
Fax : (62-21) 7996851  
E-mail : kapdbsd\_cabjks@cbn.net.id

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Hal lain**

Laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 7 Februari 2014.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness on the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

**Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2014, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Other matter**

*The consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiary dated December 31, 2013 and for the year then ended, which is presented as quantitative information disclosed comparative for whole figures reported on the consolidated financial statements dated December 31, 2014 and for the year then ended, audited by other auditors has stated opinion without modification the financial statements on the date of February 7, 2014.*

**dbsd&a**

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**  
Registered Public Accountants

License number :  
Minister of Finance : Kep-127/KM.1/2013  
Cabang Jakarta Selatan  
Jl. Mampang Prapatan VIII No. R 25B  
Jakarta 12790 Indonesia  
Phone : (62-21) 7975542, 7989085, 70641138  
Fax : (62-21) 7996851  
E-mail : kapdbsd\_cabjks@cbn.net.id

Kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. R.4.1/016/02/2015 tanggal 6 Februari 2015 atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas untuk mencakup perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian. Seperti diungkapkan pada catatan 54 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Entitas Anak mereklasifikasi beberapa akun. Menurut pendapat kami, penyesuaian penyajian kembali tersebut wajar dan telah diterapkan dengan semestinya. Kami tidak melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013, dan laporan posisi keuangan tanggal 1 Januari 2013/31 Desember 2012, selain dampak penyesuaian penyajian kembali tersebut, dan oleh karenanya, kami tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan posisi keuangan tersebut, secara keseluruhan.

Laporan audit diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan penawaran umum terbatas Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Audit kami laksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan yang terlampir pada lampiran 1 sampai 4 disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian pokok yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian pokok, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian pokok secara keseluruhan.

*We have released the Independent Auditor's Report No. R.4.1/016/02/2015 dated February 6, 2015 on the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2014. The Company has restated the consolidated financial statements mentioned above to include the changes and additional disclosures in the note 54 notes to the consolidated financial statements. As disclosed in Note 54 to the consolidated financial statements, the Company and its Subsidiaries restated accounts. In our opinion, such restatement adjustments are appropriate and have been properly applied. We did not audit the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2013, and the statement of financial position as of January 1, 2013/December 31, 2012, other than with respect to such restatement adjustments, and accordingly, we do not express an opinion on those consolidated financial statements and statement of financial position referred above, taken as a whole.*

*Audit report issued with the purpose to be included in the prospectus in connection with the Registration Statement for Right Issue in Indonesia Stock Exchange, and are not intended and are not permitted to be used for other purposes.*

*Our audit conducted to express an opinion on these consolidated financial statements. Additional information is attached in appendix 1 to 4 are presented for purposes of additional analysis and is not a part of the basic consolidated financial statements are required according to the Financial Accounting Standards in Indonesia. Additional information has been the object of our auditing procedures applied in the audit of the basic consolidated financial statements, and in our opinion, is presented fairly, in all material respects, the consolidated financial statements relating to the subject as a whole.*

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK/  
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS  
DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI**

**Dadang Mulyana, CA, CPA**

Nomor Register Akuntan Publik : AP. 0394 / Registered Number of Public Accountant: AP. 0394

25 Mei 2015 / May 25, 2015





**RSM AAJ**  
Audit • Tax • Advisory

**Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto**

Nomor/Number : R/024.AGA/mgn.2/2014

Kantor Akuntan Publik  
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto  
RSM AAJ Associates  
Plaza ASIA, 10<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12193 - Indonesia  
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350  
www.rsm-aaassociates.com

### Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/  
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

#### PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

#### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("the Company") and its subsidiary, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2013, and the consolidated statement of comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.*

#### Management's responsibility for the consolidated financial statements

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

#### Auditor's responsibility

*Our responsibility is to express an opinion on the consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Auditing Standard established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.*

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

#### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

#### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Waskita Karya (Persero) Tbk and its subsidiary as of December 31, 2013, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

**Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto**



**Maurice Ganda Nainggolan**  
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0147/  
Public Accountant License Number: AP.0147

Jakarta, 7 Februari / February 7, 2014



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Per 31 Desember 2014 dan 2013 dan  
1 Januari 2013/31 Desember 2012  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2014 and 2013 and  
January 1, 2013/December 31, 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2014 Rp	2013 Rp	1 Jan 2013/ 31 Des 2012/ Jan 1, 2013/ Dec 31, 2012*) Rp	
<b>ASET</b>					<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>					<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan Setara Kas	2.d, 2.g, 2.s, 3, 48, 50	1.675.283.272.031	1.119.694.010.726	2.183.783.098.228	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	2.e, 4	24.276.133.745	24.276.133.745	24.276.133.745	Short-Term Investments
Piutang Usaha					Accounts Receivable
Pihak-pihak Berelasi					Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 7.748.255.674, Rp 7.748.255.674 dan Rp. 3.859.427.446)</i>	2.g, 2.i, 5, 48, 50	832.159.176.754	901.253.562.349	857.072.216.150	<i>(Net of allowance for impairment losses as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 7.748.255.674, Rp 7.748.255.674 and Rp. 3.859.427.446, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga					Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 20.718.167.026, Rp 21.018.167.026 dan Rp. 20.767.000.159)</i>	2.g, 5	1.474.599.220.935	809.119.783.209	607.197.604.777	<i>(Net of allowance for impairment losses as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 20.718.167.026, Rp 21.018.167.026 and Rp. 20.767.000.159, respectively)</i>
Piutang Retensi					Retention Receivables
Pihak-pihak Berelasi					Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 633.868.682, Rp 582.732.318 dan Rp. 488.244.169)</i>	2.g, 2.h, 2.i, 6, 48, 50	221.781.483.775	169.351.405.807	145.666.855.182	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 633.868.682 and Rp 582.732.318 Rp. 488.244.169, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga					Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 24.853.072.166, Rp 10.979.157.852 dan Rp. 12.092.752.307)</i>	2.g, 2.h, 6	397.236.046.660	436.426.866.952	329.722.130.433	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 24.853.072.166, Rp 10.979.157.852 and Rp. 12.092.752.307, respectively)</i>
Piutang Lain Lain Jangka Pendek					Other Receivables Short Term
Pihak-pihak Berelasi					Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil)</i>	2.g, 2.i, 7a, 48	12.299.258.510	2.821.916.547	30.032.355.937	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga	2.g, 7a	10.089.881.358	23.110.295.840	2.305.658.489	Third Parties
Persediaan					Inventories
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp 378.727.364 dan Rp. 2.802.733.157)</i>	2.k, 8	604.279.265.976	292.226.654.318	412.538.363.464	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, Rp 378.727.364 and Rp. 2.802.733.157, respectively)</i>
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Jangka Pendek					Gross Amount Due from Customers Short Term
Pihak-pihak Berelasi					Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil)</i>	2.g, 2.i, 2.l, 9a, 48, 50	1.442.130.580.567	1.083.452.352.377	879.342.546.622	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga					Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil)</i>	2.g, 2.i, 9a	2.451.544.875.217	2.145.743.116.214	1.801.623.891.700	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, respectively)</i>
Pajak Dibayar di Muka	10.a	554.591.396.734	497.284.212.750	276.032.203.979	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	2.j, 11	229.709.462.098	193.572.457.296	161.919.595.591	Advances and Prepayments
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	2.g, 12	175.000.000.000	--	--	Held-to-Maturity Financial Assets
Jumlah Aset Lancar		<u>10.104.980.054.360</u>	<u>7.698.332.768.130</u>	<u>7.711.512.654.297</u>	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	2.g, 12	--	175.000.000.000	175.000.000.000	Held-to-Maturity Financial Assets
Investasi Pada Entitas Asosiasi	2.e, 2.g, 14	7.314.904.399	8.391.719.214	7.825.767.785	Investment in Associates
Piutang Lain Lain Jangka Panjang					Other Receivables Long Term
Pihak-pihak Berelasi					Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 75.144.307.748, Rp 75.144.307.748 dan Rp. 47.552.388.629)</i>	2.g, 2.i, 7b, 48	42.343.795.058	--	--	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 75.144.307.748, Rp 75.144.307.748 and Rp. 47.552.388.629, respectively)</i>
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Jangka Panjang					Gross Amount Due from Customers Long Term
Pihak-pihak Berelasi					Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 5.058.797.015, Rp 5.058.797.015, dan Rp 4.128.279.970)</i>	2.g, 2.i, 2.l, 9a, 48, 50	83.094.821.996	15.537.320.597	--	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 5.058.797.015, Rp 5.058.797.015 and Rp 4.128.279.970, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga					Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 72.323.935.184, Rp 18.711.661.837 dan sebesar Rp 11.606.458.192)</i>	2.g, 2.i, 9b	293.749.233.904	67.543.025.307	78.202.138.897	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 72.323.935.184, Rp 18.711.661.837 and Rp 11.606.458.192, respectively)</i>
Aset Ventura Bersama					Joint Ventures Assets
Pihak-pihak Berelasi	2.i, 2.w, 13, 48	129.725.775.791	86.522.119.653	42.958.282.193	Related Parties
Pihak-pihak Ketiga	2.w, 13	597.918.829.942	247.749.169.378	73.525.361.652	Third Parties
Properti Investasi	2.l, 16	--	15.107.359.107	--	Investment Properties
Investasi Jangka Panjang Lainnya	2.g, 2.f, 15	628.099.473.502	37.500.000.000	18.250.000.000	Other Long-Term Investments
Aset Tetap					Fixed Assets
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 249.545.814.672, Rp 212.345.234.374 dan Rp. 160.672.476.972)</i>	2.m, 17	621.791.835.556	415.439.953.161	239.933.622.514	<i>(Net of accumulated depreciation as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 249.545.814.672, Rp 212.345.234.374 and Rp. 160.672.476.972, respectively)</i>
Aset Lain-lain	2.n, 18	33.022.620.340	21.179.803.073	19.036.260.700	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>2.437.061.290.488</u>	<u>1.089.970.469.490</u>	<u>654.731.433.741</u>	Total Non Current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><b>12.542.041.344.848</b></u>	<u><b>8.788.303.237.620</b></u>	<u><b>8.366.244.088.038</b></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>

\*) Disajikan kembali, lihat Catatan 54/Restated, see Note 54

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Per 31 Desember 2014 dan 2013 dan  
1 Januari 2013/31 Desember 2012  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2014 and 2013 and  
January 1, 2013/December 31, 2012  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2014 Rp	2013 Rp	1 Jan 2013/ 31 Des 2012/ Jan 1, 2013/ Dec 31, 2012*) Rp	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang Bank Jangka Pendek					Short-Term Bank Loans
Pihak-pihak Berelasi	2.g, 2.i, 19, 48, 50	1.442.610.372.843	775.057.780.977	822.776.203.700	Related Parties
Pihak-Pihak Ketiga	2.g, 19	474.519.121.449	99.750.000.000	349.077.277.915	Third Parties
Utang Usaha					Accounts Payable
Pihak-pihak Berelasi	2.g, 2.i, 20, 48, 50	87.468.737.059	65.118.372.950	41.708.785.424	Related Parties
Pihak-pihak Ketiga	2.g, 20	2.484.326.706.871	2.226.149.143.612	1.961.106.631.985	Third Parties
Utang Bruto Subkontraktor Pihak ketiga	2.g, 2.p, 21	2.700.536.843.335	1.794.739.896.979	1.564.997.856.733	Gross Amount Due to Third Parties Subcontractors
Beban Akrual	23	47.793.610.483	22.720.456.222	27.993.453.168	Accrued Expenses
Utang Pajak	2.u, 10.b	104.179.351.411	97.227.415.293	95.086.201.879	Taxes Payables
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	2.g, 22	289.435.745.772	301.858.934.306	405.128.300.805	Advances on Short-Term Contract
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	24	97.283.066.654	44.517.408.520	23.951.446.633	Other Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>7.728.153.555.876</u>	<u>5.427.139.408.859</u>	<u>5.291.826.158.242</u>	Total Current Liabilities
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					<b>NON CURRENT LIABILITIES</b>
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang					Advances on Long-Term Contract
Pihak-pihak Berelasi	2.g, 2.i, 27, 48, 50	50.267.698.667	53.651.216.655	93.378.356.335	Related Parties
Pihak-Pihak Ketiga	2.g, 27	665.481.479.077	176.030.912.945	226.510.505.054	Third Parties
Utang Lain-lain Berelasi	26	3.652.128.645	--	--	Other Payable - Related Parties
Utang Obligasi - Bersih	1.c, 2.g, 2.y, 25	1.245.656.603.967	748.044.637.281	747.453.839.713	Bonds Payables - Net
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>1.965.057.910.356</u>	<u>977.726.766.881</u>	<u>1.067.342.701.102</u>	Total Non Current Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<u>9.693.211.466.232</u>	<u>6.404.866.175.740</u>	<u>6.359.168.859.344</u>	<b>Total Liabilities</b>
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITY</b>
Modal Saham					Share Capital
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012					Capital Stock - Rp 100 par Value per Share for December 31, 2014, 2013 and 2012, respectively
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 25.999.999.999 Saham Seri B pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012					Authorized Capital - 1 share of Dwi Warna Serie A and 25,999,999,999 shares of Serie B in December 31, 2014, 2013 and 2012
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 9.727.504.265 Saham Seri B pada 31 Desember 2014, 9.632.325.999 Saham Seri B pada 31 Desember 2013 dan 9.632.325.999 Saham Seri B pada 31 Desember 2012					Subscribed and Fully Paid Capital - 1 share of Dwi Warna Serie A and 9,727,504,265 shares of Serie B for December 31, 2014, 9,632,325,999 shares of Serie B for December 31, 2013 and 9,632,325,999 shares of Serie B for December 31, 2012
Tambahan Modal Disetor	30	880.789.372.316	831.137.834.545	831.137.834.545	Additional Paid-in Capital
Opsi Saham	31	43.362.737.418	28.929.895.523	--	Share Options
Saldo Laba	32				Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya		268.432.270.328	194.820.273.829	192.279.960.913	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya		685.591.262.445	368.090.741.292	22.893.575.038	Unappropriated
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	2.s	(7.955.710.852)	(3.800.530.108)	(2.459.741.802)	Exchange Difference From Financial Statements Translation
Jumlah yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk		<u>2.842.970.352.155</u>	<u>2.382.401.815.081</u>	<u>2.007.075.228.694</u>	Amount Attributable to Owners of the parent
Kepentingan Entitas Non Pengendali	1.b, 40	5.859.526.461	1.035.246.799	--	Non Controlling Interest
Jumlah Ekuitas		<u>2.848.829.878.616</u>	<u>2.383.437.061.880</u>	<u>2.007.075.228.694</u>	Total Equity
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<u>12.542.041.344.848</u>	<u>8.788.303.237.620</u>	<u>8.366.244.088.038</u>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

\*) Disajikan kembali, lihat Catatan 54/Restated, see Note 54

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI  
KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
COMPREHENSIVE INCOME  
For the Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2014 Rp	2013 Rp	
Pendapatan Usaha	2.q, 2.t, 33, 48, 50	10.286.813.284.004	9.686.610.301.864	Revenue
Beban Pokok Pendapatan	2.q, 34	(9.177.916.819.076)	(8.775.913.964.997)	Cost of Revenue
<b>Lab a Bruto</b>		<b>1.108.896.464.928</b>	<b>910.696.336.867</b>	<b>Gross Prof</b>
Pendapatan Bersih Ventura Bersama Konstruksi	2.q, 2.t, 35	197.115.673.963	101.674.838.947	Net Revenue of Construction Joint Venture
<b>Lab a Bruto Setelah Ventura Bersama</b>		<b>1.306.012.138.891</b>	<b>1.012.371.175.814</b>	<b>Gross Profit After Joint Venture</b>
Beban Penjualan	2.q, 36	(25.515.527.498)	(23.894.204.238)	Selling Expense
Beban Umum dan Administrasi	2.q, 36	(405.043.121.161)	(316.290.449.124)	General and Administrative Expense
Pendapatan Bunga		43.440.081.356	27.154.660.984	Interest Income
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	2.q, 2.s	(3.454.169.963)	20.507.937.029	Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	17	--	231.278.047	Gain on Sale of Fixed Assets
Pendapatan Lainnya	38	37.019.667.482	5.362.489.105	Other Income
Beban Lain-lain - Bersih	39	(13.075.647.154)	(18.544.572.015)	Other Expenses - Net
<b>Lab a Sebelum Pajak dan Beban Keuangan</b>		<b>939.383.421.953</b>	<b>706.898.315.602</b>	<b>Income Before Tax and Financial Charge</b>
Beban Keuangan	2.r, 37	(183.596.366.642)	(96.850.836.990)	Financial Charge
Bagian Lab a Bersih Entitas Asosiasi	2.e, 14	(185.095.601)	1.153.156.256	Equity in Net Income of Associate
<b>Lab a Sebelum Pajak</b>		<b>755.601.959.710</b>	<b>611.200.634.868</b>	<b>Income Before Tax</b>
Beban Pajak Penghasilan	2.u, 10.c	(254.389.167.647)	(243.230.405.572)	Income Tax Expense
<b>Lab a Bersih Tahun Berjalan</b>		<b>501.212.792.063</b>	<b>367.970.229.296</b>	<b>Net Income for the Year</b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lain</b>				<b>Other Comprehensive Income</b>
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	2.s	(4.155.180.744)	(1.340.788.306)	Exchange Difference From Financial Statements Translation
<b>Lab a Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>497.057.611.319</b>	<b>366.629.440.990</b>	<b>Total Comprehensive Income</b>
<b>LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL NET INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik Entitas Induk		501.530.512.401	368.059.982.496	Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	1.b, 40	(317.720.338)	(89.753.201)	Non-Controlling Interest
<b>JUMLAH</b>		<b>501.212.792.063</b>	<b>367.970.229.295</b>	<b>TOTAL</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik Entitas Induk		497.375.331.657	366.719.194.190	Owners of the Parent
Kepentingan Nonpengendali	1.b, 40	(317.720.338)	(89.753.201)	Non-Controlling Interest
<b>JUMLAH</b>		<b>497.057.611.319</b>	<b>366.629.440.989</b>	<b>TOTAL</b>
<b>LABA PER SAHAM</b>	41	<b>51,90</b>	<b>38,20</b>	<b>EARNINGS PER SHARE</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk DAN SUBSIDIARIES**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
31 Desember 2014, 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
For the Years Ended  
December 31, 2014, and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Saham/ Shares Capital	Tambahkan Modal Disetor/Additional Paid in Capital	Opsi Saham / Share Option	Saldo Laba / Retained Earnings		Sesuai Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing/ Exchange Difference From Financial Statements Translation	Jumlah/	Kepentingan Non Pengendali/ Non - Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
				Dienantikan Appropriated	Belum Dienantikan Unappropriated					Total
				Rp	Rp					Rp
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2012</b>	963.223.600.000	831.137.834.545	-	192.279.960.913	22.893.575.038	215.173.535.951	(2.459.741.802)	2.007.075.228.694	<b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2012</b>	
Carangan Umum	32	-	-	2.540.312.916	(2.540.312.916)	-	-	-	General Reserves	
Dividen Tunai	32	-	-	-	(20.322.503.326)	(20.322.503.326)	-	(20.322.503.326)	Cash Dividend	
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	368.059.982.496	368.059.982.496	-	(89.753.201)	Net Income For The Period	
Kepentingan Non Pengendali	40	-	-	-	-	-	-	1.125.000.000	Non Controlling Interest	
Sesuai Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	2s	-	-	-	-	-	(1.340.788.306)	(1.340.788.306)	Exchange Difference From Financial Statements Translation	
Opsi Saham	-	-	28.929.895.523	-	-	-	28.929.895.523	-	Stock Option	
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2013</b>	963.223.600.000	831.137.834.545	28.929.895.523	194.820.273.829	368.090.741.292	562.911.015.121	(3.800.530.109)	2.922.401.815.081	<b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2013</b>	
Carangan Umum	32	-	-	-	73.611.996.499	(73.611.996.499)	-	-	General Reserves	
Opsi Saham	-	-	14.432.841.895	-	-	-	-	14.432.841.895	Stock Option	
Sesuai Modal Saham dari Messop	-	49.651.537.771	-	-	-	-	-	59.178.358.271	Paid in Capital from Stock Option	
Dividen Tunai	32	-	-	-	(110.417.994.749)	(110.417.994.749)	-	(110.417.994.749)	Cash Dividend	
Kepentingan Non Pengendali	40	-	-	-	-	-	-	5.142.000.000	Non Controlling Interest	
Laba Bersih Periode Berjalan	-	-	-	-	501.530.512.401	501.530.512.401	-	(317.720.338)	Net Income For The Period	
Sesuai Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	2s	-	-	-	-	-	(4.155.180.744)	(4.155.180.744)	Exchange Difference From Financial Statements Translation	
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2014</b>	972.730.420.500	880.793.372.316	43.362.137.418	268.432.270.328	665.391.262.445	954.023.532.773	(7.955.710.852)	2.942.970.552.155	<b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014</b>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
For the Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2014 Rp	2013 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari Pelanggan		9.086.251.090.052	8.527.446.848.333	Receipt from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(8.599.050.752.268)	(8.291.615.452.927)	Payment to Suppliers and Third Parties
Pembayaran Kepada Karyawan		(246.993.162.142)	(208.694.640.645)	Payment to Employees
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka		44.669.581.253	10.083.104.850	Interest Income from Current Account and Time Deposit
Penerimaan Restitusi Pajak	10.e	193.004.815.427	114.753.703.161	Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Beban Keuangan	37	(183.596.366.642)	(96.850.836.990)	Payment for Financial Charges
Pembayaran Pajak		(382.995.527.779)	(440.335.518.292)	Payment for Taxes
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(88.710.322.099)	(385.212.792.510)	Net Cash Used in Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari Ventura Bersama	13	87.067.589.420	30.628.463.140	Receipt from Joint Ventures
Penempatan pada Ventura Bersama	13	(283.325.232.158)	(146.741.269.379)	Placement of Joint Ventures
Hasil Penjualan Aset Tetap		--	231.278.047	Receipt from Sale of Fixed Assets
Perolehan Aset Tetap	17	(328.828.488.221)	(228.927.964.687)	Acquisition of Fixed Assets
Pencairan Investasi Jangka Pendek		--	--	Receipt from Short Term Investments
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi	14	1.149.844.769	587.204.824	Receipt of Dividend from Associates Entity
Perolehan Properti Investasi	16	--	(15.107.359.107)	Acquisition of Investment Properties
Penempatan Investasi Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya		(598.099.473.502)	(19.250.000.000)	Placement of Investment on Associates and Long Term Investments
Pelepasan Penyertaan Pada Entitas Asosiasi		39.583.000.000	--	Discharge of Investment on Associate Entity
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1.082.452.759.692)	(378.579.647.162)	Net Cash Used in Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran Emisi Obligasi		(3.100.233.842)	--	Bonds Issuance Costs
Penerimaan Utang Obligasi		500.000.000.000	--	Receipt from Bonds Payable
Penerimaan Pinjaman Bank		16.276.595.683.317	15.298.731.492.298	Receipt from Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank		(14.994.273.970.004)	(15.595.777.192.936)	Payment of Bank Loans
Penerimaan Setoran Modal Saham	29	9.526.820.500	--	Receipt from Share Capital Issuance
Penerimaan Tambahan Setoran Modal	30	49.651.537.771	--	Receipt from Paid in Capital
Pembayaran Dividen Tunai	32	(110.417.994.749)	(20.322.503.326)	Payment of Cash Dividend
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		1.727.981.842.993	(317.368.203.964)	Net Cash Provided by (Used for) Financing Activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		556.818.761.202	(1.081.160.643.636)	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KEUNTUNGAN SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI</b>		(1.229.499.897)	17.071.556.134	<b>UNREALIZED GAIN ON FOREIGN EXCHANGE RATE</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>		1.119.694.010.726	2.183.783.098.228	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	2.d, 3	<u>1.675.283.272.031</u>	<u>1.119.694.010.726</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun terdiri dari:</b>				<b>Cash and Cash Equivalents at End of the Year consist of:</b>
Kas		1.055.562.542	1.017.088.856	Cash on Hand
Bank		649.099.709.489	352.156.921.870	Cash in Banks
Deposito Berjangka		1.025.128.000.000	766.520.000.000	Time Deposits
<b>Jumlah</b>		<u>1.675.283.272.031</u>	<u>1.119.694.010.726</u>	<b>Total</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**1.a. Pendirian dan Informasi Umum**

Perusahaan Negara Waskita Karya didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1961, dari perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1970 status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT Waskita Karya (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyadi, S.H. Akta Perseroan Terbatas tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan surat keputusan Nomor: 4.a.5/310/3 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 13 Nopember 1973, Tambahan Berita Negara Nomor 91.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 Agustus 2014, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No. AHU – AH.051114.40.21.2014 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014. Perubahan anggaran dasar terakhir tersebut antara lain berkaitan dengan peningkatan modal, yaitu modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

**1.b. Entitas Anak**

Perusahaan memiliki kepemilikan langsung lebih dari 50% saham entitas anak dan/atau mempunyai kendali atas manajemen entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut :

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)	Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)
PT Waskita Sangir Energi	Jakarta	Energi/ Energy	Dalam Tahap Pengembangan / Development Stage	85	81.053.241.722	(2.119.459.737)	7.147.985.372	(598.354.670)

**1. GENERAL**

**1.a. Establishment and General Information**

The State Owned Company Waskita Karya (the 'Company') was established on January 1, 1961 based on Government Regulation No. 62 year 1961, from a foreign company named "Volker Aanemings Maatschappij NV" which nationalized by the Government of Republic of Indonesia.

According to Government Regulation No. 40 year 1970, the Company's status was changed from Perusahaan Negara (PN) into Perseroan (Persero). Furthermore, the Company was named PT Waskita Karya (Persero) in accordance with the deed of Limited Liability Corporation No. 80 dated March 15, 1973 of Kartini Mulyadi, S.H. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on August 20, 1973 in his Decree No.4.a.5/3/310/3 and stated on State Gazette of the Republic of Indonesia No. 82 on November 13, 1973, Supplement No. 91.

The Company's Articles of Association has been amended for several times, most recently by amendment of the Deed No.11 on August 13, 2014 of Fathiah Helmi, S.H, Public Notary in Jakarta, and was approved by Ministry of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in its Decree No. AHU – AH.051114.21.2014 year 2014 dated August 13, 2014. The most recently amendment of the Company's articles of association is related to capital increase, Subscribed and Paid up Capital of the Company.

**1.b. Subsidiaries**

The Company has 50% direct and indirect ownership interest in subsidiaries and/or has the control of the subsidiaries management which are consolidated as follow :

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. GENERAL (Continued)**

**1.b. Entitas Anak (Lanjutan)**

**1.b. Subsidiary (Continued)**

Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	31 Desember/ December 31, 2014		31 Desember/ December 31, 2013	
					Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)	Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)
PT Waskita Toll Road	Jakarta	Jalan Tol/ Toll Road	Dalam Tahap Pengembangan / Development Stage	99,99	646.023.564.264	2.258.416.376	--	--
Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	31 Desember/ December 31, 2014 Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)	31 Desember/ December 31, 2013 Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)
PT Waskita Beton Precast	Jakarta	Industri Pabrikasi/ Manufacturing Industry	Dalam Tahap Pengembangan / Development Stage	99,99	1.202.607.464.432	140.304.835.496	--	--
Entitas Anak/ Subsidiary	Domisili/ Domiciled	Jenis Usaha/ Nature of Business	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	31 Desember/ December 31, 2014 Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)	31 Desember/ December 31, 2013 Jumlah Aset/ Total Assets	Jumlah Laba (Rugi) Bersih/ Total Net Income (Loss)
PT Waskita Karya Realty	Jakarta	Real Estat/ Real Estate	Dalam Tahap Pengembangan / Development Stage	99,99	204.608.454.015	(572.001.241)	--	--

Pendirian PT Waskita Sangir Energi (Entitas Anak) sesuai dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H, No. 22 tanggal 11 Juli 2013. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-40852.AH.01.01.Tahun 2013.

*The establishment of PT Waskita Sangir Energi (Subsidiary) based on notarial deed No. 22 dated July 11, 2013 of notary Fathiah Helmy, S.H. This amendment obtained approval by the Minister of Justice and Human Rights through decision letter No. AHU-40852.AH.01.01. 2013 Year.*

Pendirian PT Waskita Toll Road (Entitas Anak) sesuai dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H, No. 66 tanggal 19 Juni 2014. Akta Pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-14734.40.11.2014 tanggal 25 Juni 2014.

*The establishment of PT Waskita Toll Road (Subsidiary) based on notarial deed No. 66 dated Juni 19, 2014 of notary Fathiah Helmy, S.H. This amendment obtained approval by the Minister of Justice and Human Rights through decision letter No. AHU-14734.40.11.2014 dated June 25, 2014.*

Pendirian PT Waskita Beton Precast (Entitas Anak) sesuai dengan akta Notaris Fathiah Helmi, SH, No 10 tanggal 7 Oktober 2014. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-29347.40.10.2014.

*The establishment of PT Waskita Beton Precast (Subsidiary) based on notarial deed No. 10 dated October 7, 2014 of notary Fathiah Helmi, SH. This amendment obtained approval by the Minister of Justice and Human Rights through decision letter No. AHU-29347.40.10.2014.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.b. Entitas Anak (Lanjutan)**

Pendirian PT Waskita Karya Realty (Entitas Anak) sesuai dengan akta Notaris Fathiah Helmi, SH, No 27 tanggal 16 Oktober 2014. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan No. AHU-34282.40.10.2014.

**1.c. Penawaran Umum Efek Perusahaan**

**Saham**

Pada tanggal 10 Desember 2012 Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-14012/BL/2012.

Pada tanggal 17 Desember 2012 sesuai surat nomor : S-08414/BEI.PPJ/12-2012 PT Bursa Efek Indonesia menyetujui penawaran efek PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Bursa Efek Indonesia kepada masyarakat atas 3.082.315.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 380 per saham.

Dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum kepada masyarakat tersebut sebesar 6,25% atau sebanyak 192.644.000 saham biasa atas nama baru dijatahkan kepada karyawan perusahaan melalui program penjatahan saham untuk pegawai Perusahaan (*Employee Stock Allocation/ESA*).

Pada tanggal 19 Desember 2012 seluruh saham Perusahaan sebanyak 9.632.236.000 saham telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

**Obligasi**

Perusahaan telah menerbitkan obligasi senilai sebesar Rp 750.000.000.000 tahun 2012 dan Rp 500.000.000.000 pada tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :

**1. GENERAL (Continued)**

**1.b. Subsidiary (Continued)**

*The establishment of PT Waskita Karya Realty (Subsidiary) based on notarial deed No. 27 dated October 16, 2014 of notary Fathiah Helmi, SH. This amendment obtained approval by the Minister of Justice and Human Rights through decision letter No. AHU-34282.40.10.2014.*

**1.c. Public Offering of the Company's Securities**

**Shares**

*On December 10, 2012, the Company received an effective notification from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam-LK) with the letter No. S-14012/BL/2012.*

*On December 17, 2012, according to the letter No. S-08414/BEI.PPJ/12-2012, PT Bursa Efek Indonesia agreed to the public offering of PT Waskita Karya (Persero) Tbk on Jakarta Stock Exchange to the public for 3.082.315.000 of common stock with the par value of Rp 100 per share and the offering price of Rp 380 per share.*

*From the number of shares offered in the public offering of 6.25% or 192,644,000 of new ordinary shares is allocated to the employees through the allocation of shares to employees of the Company (Employee Stock Allocation / ESA).*

*On December 19, 2012, a total of 9.632.236.000 shares of the Company were listed on the Indonesian Stock Exchange.*

**Bonds**

*The Company has issued bonds amounted to Rp 750,000,000,000 in 2012 and Rp 500,000,000,000 in 2014, are as follows :*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.c. Penawaran Umum Efek Perusahaan (Lanjutan)**

<b>Nomor / Number</b>	<b>Obligasi / Bonds</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	<b>Tahun / Years</b>	<b>Tanggal Penerbitan / Date of Issuance</b>	<b>Tanggal Jatuh Tempo / Due Date</b>	<b>Status / Status</b>
1	Seri A / Serie A	75.000.000.000	3	5 Juni 2012 / June 5, 2012	5 Juni 2015 / June 5, 2015	Belum Lunas / Outstanding
2	Seri B / Serie B	675.000.000.000	5	5 Juni 2012 / June 5, 2012	5 Juni 2017 / June 5, 2017	Belum Lunas / Outstanding
3	Berkelanjutan I / Continuing Bonds	500.000.000.000	3	10 Nop 2014 / Nov 10, 2014	10 Nop 2017 / Nov 10, 2017	Belum Lunas / Outstanding

**1.d. Bidang Usaha**

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), rancang bangun (*Design and Build*), layanan jasa konsultasi manajemen, *building* manajemen, pabrikan bahan dan komponen bangunan, pabrikan komponen dan peralatan konstruksi, pabrikan barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor-impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, *system development*, layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan dan pengembangan realty.

**1. GENERAL (Continued)**

**1.c. Public Offering of the Company's Securities  
(Continued)**

**1.d. The Scope of Business**

*In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objectives of the Company are to execute and support the Government policy and programs in economic area and national development in general, specifically in construction industry, fabrication, rental services, agent services, investment, agro industry, trading, zone management, increase ability in the field of construction services, information technology, and tourism and developer with implementation in good corporate governance.*

*In order to achieve the objectives, the Company is engaged in following activities Construction execution work, mining services, integrated Engineering, Procurement, and Construction (EPC), Design and Build, management consultant service, building management, building components and raw material fabrication, component and construction tools fabrication, fabrication of metals, woods, rubber, and plastic fabrication, leasing on construction equipments, agent for raw materials, building components and construction equipment, investment and/or business management in area of basic facility and infrastructure and industry, performing activities in agro industry field, export-import, general trading, region management, system development, service in information technology and tourism and realty development.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.d. Bidang Usaha (Lanjutan)**

Kegiatan usaha Perusahaan yang saat ini telah dijalankan Perusahaan adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*.

**1.e. Organisasi**

**Struktur Organisasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 18 April 2013, menetapkan 6 (enam) anggota Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yaitu seorang Direktur Utama dan 5 (lima) Direktur, dengan pembagian tugas sesuai Keputusan Direksi No. 06/SK/WK/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Wilayah Kerja Sesuai Keputusan Direksi No. 15/SK/WK/2014 tanggal 12 Nopember 2014 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Struktur Organisasi Perusahaan berbasis Unit Bisnis. Unit Bisnis mempunyai fungsi pemasaran sampai dengan fungsi produksi. Jumlah Unit Bisnis sebanyak 7 Divisi, sebagai berikut:

**1. GENERAL (Continued)**

**1.d. The Scope of Business (Continued)**

*The Company's current business activities, is construction activities and integrated Engineering, Procurement and Construction (EPC) work.*

**1.e. Organization**

**Organization Structure**

*According to the Decree of State Ministry of State Owned Enterprise (SOE) in General Meeting of Shareholders of PT Waskita Karya (Persero) dated April 18, 2013, appointed 6 (six) directors of the Company consist of a President Director and 5 (five) directors, with segregation of duties in accordance with the Decree of Directors No.06/SK/WK/2014 dated March 28, 2014.*

*Work Areas According to the Decision Letter of Director No. 15/SK/WK/2014 dated November 12, 2014 regarding to the Changes of the Company's Organizational Structure of PT Waskita Karya (Persero) Tbk, the Organizational Structure is based on Business Unit. The Business Unit has its function of marketing function up to production function. The Business Unit have 7 (seven) Divisions, as follows:*

<b>Unit Bisnis/ Business Unit</b>	<b>Wilayah Operasi/ Work Areas</b>	<b>Kedudukan/ Location</b>
Divisi Sipil/ <i>Civil Division</i>	Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk seluruh proyek sipil lokasi di Jabodetabek dan Banten dengan nilai kontrak > Rp 50 Milyar, Pulau Jawa dengan nilai kontrak > Rp 150 Milyar dan luar Jawa dengan nilai kontrak > Rp 250 Milyar.  <i>Operational area covers the whole of Indonesia based in Jakarta, to perform its activities in the marketing's area to production for the entire civil project in Jabodetabek and Banten with the contract value &gt; Rp 50 Billion, Java with the contract value &gt; Rp 150 Billion and outside Java with the contract value &gt; Rp 250 Billion.</i>	Jakarta

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

1.e. Organisasi (Lanjutan)

1.e. Organization(Continued)

Struktur Organisasi (Lanjutan)

Organization Structure (Continued)

<u>Unit Bisnis/ Business Unit</u>	<u>Wilayah Operasi/ Work Areas</u>	<u>Kedudukan/ Location</u>
Divisi Gedung/ Building Division	<p>Daerah operasional meliputi seluruh Indonesia dan luar negeri (kecuali Timor Leste) berkedudukan di Jakarta dengan melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk seluruh proyek gedung lokasi di Jabodetabek dan Banten dengan nilai kontrak &gt; Rp 50 Milyar, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan luar jawa dengan nilai kontrak &gt; Rp 150 Milyar dan Luar Negeri selain Timor Leste tidak ada batasan.</p> <p><i>Operational area covers the whole of Indonesia and abroad (except East Timor), domiciled in Jakarta to perform its activities in the marketing's area to production for the entire building project in in Jabodetabek and Banten with the contract value &gt; Rp 50 Billion, Central Java, DIY, East Java and Outside Java with the contract value &gt; Rp 150 Billion and Overseas except Timor Leste with no restriction.</i></p>	Jakarta
Divisi EPC/ EPC Division	<p>Melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran <i>Engineering</i> dan <i>Procurement</i> proyek-proyek EPC, sedangkan kegiatan produksi proyek C dilakukan oleh unit bisnis lain dengan nilai kontrak sebesar &gt; Rp 50 Milyar.</p> <p><i>Conducting the Company's activity in the marketing engineering and procurement of the EPC project, while production activity C's project is performed by other business unit with the contract value &gt; Rp 50 Billion.</i></p>	Jakarta
Divisi Regional II/ Regional I Division	<p>Daerah operasi meliputi seluruh Sumatera berkedudukan di Pekanbaru. Melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk proyek Sipil kecuali yang ditangani oleh Divisi Sipil dengan nilai kontrak Rp 50 Milyar - Rp 250 Milyar, proyek Gedung kecuali yang ditangani oleh Divisi Gedung dengan nilai kontrak Rp 50 Milyar - Rp 150 Milyar.</p> <p><i>Operational area covers the whole of Sumatera, based in Pekanbaru. To perform its activities in the production area to the marketing up to production for Civil project except those handled by the Civil Division with the contract value of Rp 50 - Rp 250 Billion, Building project except those handled by Building Division with the contract value of Rp 50 - Rp 150 Billion.</i></p>	Pekanbaru

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 DAN ENTITAS ANAK  
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 AND SUBSIDIARIES  
 NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
 For The Years Ended  
 December 31, 2014 and 2013  
 (Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

1.e. Organisasi (Lanjutan)

1.e. Organization(Continued)

Struktur Organisasi (Lanjutan)

Organization Structure (Continued)

<u>Unit Bisnis/ Business Unit</u>	<u>Wilayah Operasi/ Work Areas</u>	<u>Kedudukan/ Location</u>
Divisi Regional II/ <i>Regional II Division</i>	<p>Daerah operasi meliputi seluruh Kalimantan, berkedudukan di Balikpapan. Melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk proyek Sipil kecuali yang ditangani oleh Divisi Sipil dengan nilai kontrak Rp 50 - Rp 250 Milyar, proyek Gedung kecuali yang ditangani oleh divisi Gedung dengan nilai kontrak Rp 50 - 150 Milyar.</p> <p><i>Operational area covers the whole of Kalimantan, based in Balikpapan. To perform its activities in the production area to the marketing up to production for Civil project except those handled by the Civil Division with the contract value of Rp 50 - Rp 250 Billion, Building project except those handled by Building Division with the contract value of Rp 50 - 150 Billion.</i></p>	<i>Balikpapan</i>
Divisi Regional III/ <i>Regional III Division</i>	<p>Daerah operasi meliputi Bali, NTB, NTT dan Luar Negeri (Timor Leste), berkedudukan di Denpasar. Melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi untuk proyek Sipil kecuali yang ditangani oleh Divisi Sipil dengan nilai kontrak Rp 50 - Rp 250 Milyar, proyek Gedung kecuali yang ditangani oleh Divisi Gedung dengan nilai kontrak Rp 50 - Rp 150 Milyar, Luar Negeri (Timor Leste) tidak ada batasan.</p> <p><i>Operational area covers Bali, NTB, NTT and abroad (Timor Leste), based in Denpasar. To perform its activities in the production area to the marketing up to production for Civil project except those handled by the Civil Division with the contract value of Rp 50 - Rp 250 Billion, Building project except those handled by Building Division with the contract value of Rp 50 - Rp 150 Billion, and Overseas (Timor Leste) with no restriction.</i></p>	<i>Denpasar</i>
Divisi Regional IV/ <i>Regional IV Division</i>	<p>Melaksanakan kegiatan Perusahaan dalam bidang pemasaran sampai dengan produksi dengan daerah operasi dan batasan limit di pulau Jawa (selain Jabodetabek dan Banten) untuk proyek Sipil dan Gedung dengan nilai kontrak &gt; Rp 50-150 Milyar, Sulawesi, Maluku, Papua untuk proyek Sipil dengan nilai kontrak Rp 50 - Rp 250 Milyar dan Sulawesi, Maluku, Papua untuk proyek gedung dengan nilai kontrak Rp 50 - Rp 150 Milyar.</p> <p><i>To perform its activities in the production area to the marketing up to production for operation area and restriction limit in Java (except Jabodetabek and Banten) for Civil and Building project with the contract value &gt; Rp 50 - Rp 150 Billion, Sulawesi, Maluku and Papua for the Civil project with the contract value Rp 50 - Rp 150 Billion and Sulawesi, Maluku and Papua for the Building project with the contract value of Rp 50 - Rp 150 Billion .</i></p>	<i>Makassar</i>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1. GENERAL (Continued)**

**1.f. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan**

**1.f. The Composition of Board of Commissioners,  
Directors and Employees**

Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Composition were of the Company's management as of December 31, 2014 and 2013 as follows:

**31 Desember/December 2014 dan/and 31 Desember/December 2013**

Komisaris Utama	Mohamad Hasan	President Commissioner
Komisaris Independen	Iwan Nursyirwan Diar Kohirin Suganda Saputra	Independent Commissioner
Komisaris	Satya Arinanto	Commissioner
Komisaris	Arif Baharudin	Commissioner
Komisaris	Imam Majdi Achid	Commissioner
Direktur Utama	M. Choliq	President Director
Direktur	Tunggul Rajagukguk	Director
Direktur	Didi Triyono	Director
Direktur	Desi Arryani	Director
Direktur	Adi Wibowo	Director
Direktur	Agus Sugiono	Director

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Structure of the Company's Audit Committee as of December 31, 2014 and 2013 were as follows:

**31 Desember/December 2014 dan/and 31 Desember/December 2013**

Ketua	Iwan Nursyirwan Diar	Head
Anggota	Arif Baharudin Mohammad Danial Agus Suparto	Members

Susunan Komite Risiko dan Asuransi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Structure of Risk and Insurance Committee as of December 31, 2014 and 2013 were as follows:

**31 Desember/December 2014 dan/and 31 Desember/December 2013**

Ketua	Kohirin Suganda Saputra	Head
Anggota	Satya Arinanto Tjahyo Winarto Afif Sulfa	Members

Susunan Ketua Satuan Pengendalian Intern dan Sekretaris Perusahaan 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Structure Head of Internal Control and Corporate Secretary as of December 31, 2014 and 2013 were as follows:

**31 Desember/December 2014 dan/and 31 Desember/December 2013**

Ketua SPI	M. Noor Utomo	Head of Internal Control
Sekretaris Perusahaan	Antonius Yulianto T N/Munib Lusianto	Corporate Secretary

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.f. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan  
(Lanjutan)**

Komisaris diangkat melalui Keputusan Para Pemegang Saham Nomor Kep-134/MBU/2011 dan S-2004/PPA/DU/2011 tanggal 15 Juni 2011, Kep-241/MBU/2011 dan KEP-PS-07/PPA/1111 tanggal 29 Nopember 2011, SK-382/MBU/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dan Keputusan RUPST sesuai akta No. 65 oleh Fathiah Helmi, S.H. tanggal 18 April 2013.

Direksi diangkat melalui Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia Nomor Kep-135/MBU/2011 dan S-2005/PPA/DU/0611 tanggal 15 Juni 2011, SK-233/MBU/2012 dan KEP-PS-06/PPA/0612 tanggal 19 Juni 2012 dan Keputusan RUPST sesuai akta No. 65 oleh Fathiah Helmi, S.H. tanggal 18 April 2013.

Komite Audit diangkat melalui Surat Keputusan Komisaris Nomor 04/SK/WK/DK/2012 tanggal 26 Nopember 2012.

Komite Risiko dan Asuransi diangkat melalui Surat Keputusan Komisaris Nomor 05/SK/WK/DK/2012 tanggal 26 Nopember 2012 mengenai penggantian anggota Komite Risiko dan Asuransi.

Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) diangkat melalui Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 28/SK/WK/PEN/2012 tanggal 26 September 2012.

Pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilakukan penggantian Sekretaris Perusahaan yang semula Haris Gunawan digantikan oleh Antonius Yulianto melalui Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 36/SK/WK/PEN/2014.

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris pada 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 7.193.160.714 dan Rp 5.304.714.286.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. GENERAL (Continued)**

**1.f. The Composition of Board of Commissioners,  
Directors and Employees (Continued)**

*The Commissioners were appointed through the Decision Letter of the Shareholder of Kep-134/MBU/2011 and S-2004/PPA/DU/2011 dated June 15, 2011, No. Kep-241/MBU/2011 and KEP-PS-07/PPA/1111 dated November 29, 2011, SK-382/MBU/2012 dated Oktober 25, 2012 and the resolution of Annual General Meeting of Shareholders according to the deed No. 65 of Fathiah Helmi, S.H. dated April 18, 2013.*

*The Directors were appointed by the Decision Letter of the Minister of SOE of the Republic of Indonesia No.KEP-135/MBU/2011 and S-2005/PPA/DU/0611 dated June 15, 2011, SK-233/MBU/2012 and KEP-PS-06/PPA/0612 dated Juni 19, 2012 and the resolution of Annual General Meeting of Shareholder according to the deed No. 65 of Fathia Helmi, S.H. dated April 18, 2013.*

*Audit Committee was appointed by the Decision Letter of Commissioners No. 04/SK/WK/DK/2012 dated November 26, 2012.*

*Risk and Insurance Committee was appointed by the Decision Letter of Commissioners No. 05/SK/WK/DK/2012 dated November 26, 2012 regarding the replacement of Risk and Insurance's Committee members.*

*Head of Internal Control Division was appointed by the Decision Letter of Directors PT Waskita Karya (Persero) Tbk No. 28/SK/WK/PEN/2012 dated September 26, 2012.*

*On October 13, 2014, there was a change of Corporate Secretary, whom formerly Haris Gunawan replaced by Antonius Yulianto through a decision of the Directors of PT Waskita Karya (Persero) Tbk Number: 36/SK/WK/PEN/2014.*

*The total remuneration have been received by Board of Commissioners December 31, 2014 and 2013 were amounted to Rp 7,193,160,714 and Rp 5,304,714,286.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.f. Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (Lanjutan)**

Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Direksi pada 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing Rp 17.934.714.286 dan Rp 14.941.585.714. Disamping itu pada tahun 2014 dan 2013 Dewan Direksi masing-masing menerima 15.339.000 dan 66.648.000 lembar saham atau setara 16% dan 38,44% dari opsi saham.

Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing sebesar 1.148 dan 1.097 orang per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (tidak diaudit).

**1. GENERAL (Continued)**

**1.f. The Composition of Board of Commissioners, Directors and Employees (Continued)**

Total remuneration have been received by Board of Directors December 31, 2014 and 2013 were amounted to Rp 17,934,714,286 dan Rp 14,941,585,714, respectively. In 2014 dan 2013, Board of Directors have been received 15,339,000 and 66,648,000 shares or equivalent 16% and 38.44% from share option, respectively.

The Company has average number of 1.148 and 1,097 employees as of December 31, 2014 and 2013 (unaudited).

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**2.a. Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013, telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yaitu pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII. G.7 lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

**2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun aset tetap yang telah dinilai kembali (*revaluasi*) di tahun 2000, investasi dalam efek tertentu yang dicatat sebesar nilai wajarnya, persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (*the lower of cost or net realizable value*). Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan metode akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian dan fungsional yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**2.a. The Statements of Compliance**

The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary for the years ended December 31, 2014 and 2013, have been prepared based on the Indonesia Financial Accounting Standard (IFAS) consisting of statement and interpretations of the statement which were issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and in accordance with the Regulation of Bapepam-LK No. VIII. G.7 enclosed of the Decision Letter No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding "Presentation and Disclosure of Financial Statements for Public Company".

**2.b. Basis of Consolidated Financial Statements Preparation**

The basis of measurement in the preparation of these consolidated financial statements is historical cost method, except for the revaluation of fixed assets in year 2000, investments in shares of stock which are carried at its fair value or accounted for under the equity method, and inventories which are carried at the lower of cost and net realizable value. The consolidated financial statements are prepared using the accrual method, except for the consolidated statements of cash flows.

The consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The functional and presentation currency used in the preparation of these financial statements is Indonesian Rupiah

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan  
Konsolidasian (Lanjutan)**

Standar Akuntansi baru atau penyesuaian atas Standar Akuntansi yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2013, yang relevan terhadap Perseroan adalah penyesuaian atas PSAK 60 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Perseroan telah mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari penyesuaian PSAK 60 tersebut tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Revisi atas PSAK 38, "Kombinasi Bisnis pada Entitas Sepengendali", PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Penyajian", dan pencabutan atas PSAK 51, "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi" yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2013 tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode berjalan atau tahun sebelumnya.

**2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan. Entitas dikonsolidasikan sejak tanggal dimana pengendalian efektif beralih kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasikan sejak Perusahaan tidak mempunyai pengendalian efektif. Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari 50% hak suara suatu entitas, kecuali kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki hak suara 50% atau kurang, jika terdapat:

- (i) Kekuasaan yang melebihi 50% hak suara sesuai perjanjian dengan investor lain;
- (ii) Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
- (iii) Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
- (iv) Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat pengurus.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.b. Basis of Consolidated Financial Statements  
Preparation (Continued)**

New Accounting Standard or improvement on Accounting Standard which is relevant to the Company and mandatory for the first time for the financial period beginning January 1, 2013 is the improvement on PSAK 60 (Revised 2010) "Financial Instrument Disclosures". The Company has evaluated the impact of the improvement on PSAK 60 to be immaterial to the consolidated financial statements.

The revisions to PSAK 38, "Business Combinations on Entities under Common Control", PSAK 60 "Financial Instruments: Disclosure", and withdrawal of PSAK 51, "Quasi Reorganisation" with an effective date of January 1, 2013 did not result in changes to the Company's accounting policies and had no effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

**2.c. Principles of Consolidation**

The consolidated financial statements include the Company's financial statements and entities that directly or indirectly controlled by the Company. The entities were consolidated from the date on which the effective control transferred to the Company and will not be consolidated if the Company no longer have effective control on its Subsidiary. Control is presumed to exist when the parent owns, directly or indirectly through subsidiary, more than 50% of the voting power of an entity unless, in exceptional circumstances, it can be clearly demonstrated that such ownership does not have control. Control also exists when the parent owns 50% or less of voting power of an entity when there is:

- (i) Power over more than 50% of the voting rights by virtue of an agreement with other investors;
- (ii) Power to manage the financial and operating policies of the entity under a statute or an agreement;
- (iii) Power to appoint or replace the majority of the Board of Directors and the Board of Commissioners or equivalent governing body and the entity is controlled by that board or body; or
- (iv) Power to give the majority of votes at meetings of the Board.



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (Lanjutan)**

**2.c. Principles of Consolidation (Continued)**

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan harus dipertimbangkan ketika menilai apakah suatu entitas mempunyai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain.

*The existence and effect of potential voting rights that can be executed or converted at the date of reporting must be considered when assessing whether an entity has the power to govern the financial and operating policy of other entity.*

Pengaruh dari seluruh transaksi dan saldo antara perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang material telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

*The effect of all material transaction and balances between entities within the Group has been eliminated in preparing the consolidated financial statements.*

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan entitas induk dan entitas anak digabungkan satu per satu (*line by line basis*) dengan menjumlahkan pos-pos yang sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban.

*In preparing consolidated financial statements, financial statements of the parent and subsidiary are combined one by one (line by line basis) by adding similar items of assets, liabilities, equities, income and expenses.*

Kepentingan nonpengendali dalam suatu entitas anak dengan defisit ekuitas tidak akan diakui, kecuali pemegang saham minoritas tersebut memiliki utang kontraktual untuk ikut membiayai defisit tersebut.

*Non-controlling interest in a subsidiary with the deficiency of equity will not be recognized, unless the minority shareholder has a contractual debt to finance its deficit.*

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali dihitung menggunakan metode entitas ekonomi, dimana kelebihan atas akuisisi kepentingan non pengendali yang melebihi bagian dari nilai bersih aset yang diperoleh dicatat di ekuitas.

*Transactions with non-controlling interests accounted using economic entity method where the excess of acquisition of non-controlling interests exceeds the net value of assets is recorded in equities.*

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan serupa.

*The consolidated financial statements are prepared using the same accounting policies for transactions and other event in similar circumstances.*

Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan secara khusus.

*The policies have been implemented consistently by the subsidiary, unless stated otherwise.*

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan Perusahaan dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

*Changes in the Company's interests in existing subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Company's interests and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to owners of the Company.*

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (Lanjutan)**

Ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Ketika aset dari entitas anak dinyatakan sebesar nilai revaluasi atau nilai wajar dan akumulasi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan terakumulasi dalam ekuitas, jumlah yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya dan akumulasi ekuitas dicatat seolah-olah Perusahaan telah melepas secara langsung aset yang relevan (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer langsung ke saldo laba sebagaimana ditentukan oleh PSAK yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, jika sesuai, biaya perolehan saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau pengendalian bersama entitas.

**Kombinasi Bisnis**

Akuisisi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar, yang dihitung sebagai hasil penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan kepada Perusahaan, liabilitas yang diakui oleh Perusahaan kepada pemilik sebelumnya dari pihak yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan dalam pertukaran pengendalian dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya yang terkait akuisisi diakui didalam laba rugi pada saat terjadinya.

Pada saat akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih diakui pada nilai wajar, kecuali untuk aset dan liabilitas tertentu yang diukur sesuai dengan standar yang relevan.

Kepentingan non pengendali diukur baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

Pada saat Perusahaan mengakuisisi suatu entitas anak yang bukan merupakan perusahaan sepengendali, selisih lebih antara harga perolehan di atas bagian pemilikan Perusahaan atas nilai wajar aset entitas anak yang dapat diidentifikasi, setelah dikurangi kewajiban, pada tanggal akuisisi diakui sebagai goodwill.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.c. Principles of Consolidation (Continued)**

*When the Company loses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. When assets of the subsidiary are carried at revalued amount or fair values and the related cumulative gain or loss has been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity, the amounts previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are accounted for as if the Company had directly disposed of the relevant assets (i.e. reclassified to profit or loss or transferred directly to retained earnings as specified by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55 (revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.*

**Business Combination**

*Business acquisitions was recorded using the acquisition method. The benefits transferred in a business combination is measured at fair value, which is calculated as the fair value at the acquisition date for all assets transferred to the Company, the liability recognized by the Company to the previous owners from the acquired party and the equity interests issued by the Company of control transfer from the acquired party. The costs related to the acquisition are recognized in profit or loss when incurred.*

*On acquisition, the identifiable assets acquired and liabilities was taken over are recognized at fair value, except for certain assets and liabilities are measured in accordance with the relevant standards.*

*Non-controlling interests are measured either at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of net identifiable assets from the acquired party.*

*At the time the Company acquires a subsidiary that is not an entity under common control, the excess of the acquisition cost over the Company's shares on the fair value of the subsidiaries' assets that can be identified, net of liabilities, at the date of acquisition is recognized as goodwill.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (Lanjutan)**

**2.c. Principles of Consolidation (Continued)**

**Kombinasi Bisnis (Lanjutan)**

**Business Combination (Continued)**

Persyaratan dalam PSAK 55 (revisi 2011) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan goodwill. Jika perlu, jumlah tercatat goodwill diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48.

Requirements in SFAS 55 (revised 2011) Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment with respect to goodwill. If necessary, the carrying amount of goodwill is tested for impairment in accordance with SFAS 48.

**2.d. Setara Kas**

**2.d. Cash Equivalents**

Setara kas terdiri dari deposito jangka pendek yang jangka waktunya kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan dan tidak dijadikan sebagai jaminan.

Cash equivalents consist of short term time deposits with maturity less than or equal to 3 (three) months since the date of placement and are not used as collateralized.

**2.e. Investasi**

**2.e. Investment**

**Investasi Jangka Pendek**

**Short-term Investment**

Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari tiga bulan pada saat penempatan namun dijaminakan, atau telah ditentukan penggunaannya dan deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari tiga bulan setelah tanggal penempatan disajikan sebagai investasi jangka pendek. Deposito disajikan berdasarkan nilai nominal.

Time deposits with maturity less than three months on the date of placement and pledged as collateral, or restricted and time deposits with maturity of more than three months on the date of placement are presented as short-term deposits. The time deposits are presented using par value.

**Investasi pada Entitas Asosiasi**

**Investment in Associates**

Perusahaan mencatat investasi pada entitas asosiasi, yaitu suatu entitas, termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, dimana Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama.

The Company recorded investment in associates, which is an entity, including noncorporate entities such as partnerships, where the Company has significant influence and is not a subsidiary or participation in the joint venture.

Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas asosiasi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung 20% atau lebih hak suara suatu entitas, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan juga ada ketika Perusahaan memiliki kurang dari 20% hak suara suatu entitas namun dapat dibuktikan dengan jelas bahwa Perusahaan memiliki pengaruh signifikan.

Significant influence is the power to participate in the financial and operating policies decisions of the associates company, but does not control or joint control over those policies. Significant influence is presumed to exist when the Company owns directly or indirectly 20% or more of the voting pruer of an entity, unless it can be clearly demonstrated that the Company has no significant influence. Significant influence also exists when the Company has less than 20% of the voting pruer of an entity, but can be clearly demonstrated that the Company has significant influence.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.e. Investasi (Lanjutan)**

**Investasi pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)**

Jika setelah kepentingan Perusahaan sama (menjadi nol) atau melebihi jumlah tercatat investasi, maka tambahan kerugian dicadangkan dan liabilitas diakui hanya sepanjang Perusahaan memiliki Liabilitas konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika selanjutnya entitas asosiasi melaporkan laba, maka Perusahaan akan mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagian Perusahaan atas laba tersebut sama dengan bagian rugi yang belum diakui.

Perusahaan menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Perusahaan tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi.

**2.f. Investasi Jangka Panjang Lainnya**

Merupakan investasi saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi dipasar aktif. Selanjutnya investasi saham yang tidak memiliki kuotasi harga dipasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, diukur dengan biaya perolehan.

Pada setiap tanggal laporan keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif bahwa suatu investasi mengalami penurunan nilai, penurunan tersebut dibebankan dalam laporan laba rugi komprehensif di tahun berjalan.

**2.g. Aset dan Liabilitas Keuangan**

**Aset Keuangan**

Aset keuangan dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.e. Investment (Continued)**

**Investment in Associates (Continued)**

*If after the interests of the Company equal (to zero) or exceed the carrying amount of investment, then the additional loss reserve and liabilities are recognized only to the extent the Company has a constructive or legal liability or make a payment on behalf of associates. If the associate subsequently reports of profit, the Company shall recognize its share of those profits only after the Company's profit is equal to the losses that have not been recognized.*

*The Company stopped using the equity method from the date of the Company no longer has significant influence over the entity association.*

**2.f. Other Long-Term Investment**

*Represent an investment with an ownership of shares less than 20% are recognized initially at fair value plus transaction costs. The best evidence of fair value is the current market price quotations. Furthermore, equity investments that do not have an active market price quotations and their fair values can not be reliably measured, are measured at cost.*

*At each reporting date, the Company evaluates whether there is objective evidence that an investment is impaired. If there is objective evidence that an investment is impaired, the decline is charged to the statement of comprehensive income in the current year.*

**2.g. Financial Assets and Liabilities**

**Financial Assets**

*Financial assets are classified into 4 (four) categories, (i) financial assets at fair value through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held-to-maturity financial assets and (iv) available-to-sale financial assets. This classification depends on the intention of acquisition of financial assets. Management determined the financial assets classification at its initial recognition.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)**

**2.g. Financial Assets and Liabilities (Continued)**

**Aset Keuangan (Lanjutan)**

**Financial Assets (Continued)**

**(i) Pinjaman yang diberikan dan piutang**

**(i) Loans and receivables**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed payments or determinable payments that are not quoted in an active market. At initial recognition, loans and receivables are recognized at fair value plus transaction cost and subsequently measured at amortized cost using effective interest rate method.*

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mempunyai kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi, piutang lain-lain, dan tagihan bruto kepada pengguna jasa yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

*As of December 31, 2014 and 2013, the Company has accounts receivable, retention receivables, other receivables, and gross amount due from customers which were classified as loans and receivables.*

**(ii) Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo**

**(ii) Held-to-maturity financial assets**

Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah investasi *non-derivatif* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

*Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities for which the Company's management has positive intention and ability to hold to maturity.*

Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

*At initial recognition, held to maturity financial assets are recognized on fair value plus transaction cost and subsequently measured at amortized cost using effective interest rates method.*

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mempunyai *promissory notes* yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo.

*As of December 31, 2014 and 2013, the Company has promissory notes which were classified as held to maturity financial assets.*

**Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan**

**Provision for loss on financial assets impairment**

Perusahaan menentukan secara individual jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual, maka perhitungan penurunan nilai dengan menggunakan metode *discounted cash flow* dan/atau nilai wajar jaminan.

*The Company assessed individually if there is objective evidence regarding impairment of financial assets. If there is objective evidence of financial assets impairment individually, the impairment assessed is calculated using discounted cash flows method and/or fair value of the collateral.*

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.g. Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)**

**Penyisihan kerugian penurunan nilai aset  
keuangan (Lanjutan)**

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai, maka Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan dengan formula tertentu. Setiap tahun Perusahaan akan mengkaji basis formula tersebut sampai dengan diperoleh data historis yang memadai.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dikelompokkan ke dalam kategori (i) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (ii) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**Estimasi Nilai Wajar**

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada laporan posisi keuangan. Investasi pada efek ekuitas yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan lain yang tidak diperdagangkan di pasar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu.

Aset keuangan dan Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, disajikan sebesar nilai tercatat yang nilainya mendekati nilai wajar pada 31 Desember 2014 dan 2013.

**2.h. Piutang Retensi**

Piutang retensi merupakan piutang Perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan kontrak. Piutang retensi dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.g. Financial Assets and Liabilities (Continued)**

**Provision for loss on financial assets impairment  
(Continued)**

*For financial assets which do not have objective evidence regarding impairment, the Company will allocate provision for impairment collectively. Collective calculation is exercised using certain formula. Every year, the Company analyzes the basis of percentage until the relevant historical data is obtained.*

**Financial Liabilities**

*Financial liabilities are classified into (i) financial liabilities at fair value through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized acquisition cost.*

*Financial liabilities which are not classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, are categorized and measured at amortized cost using the effective interest rate method.*

*On December 31, 2014 and 2013, the Company has a financial liabilities which measurable by amortized cost.*

**Fair Value Estimation**

*Fair value for financial instruments traded in active market is determined based on market value applicable on the statements of financial position. Investments on equity on which their fair value are not available will be recorded at their cost.*

*Fair values of other financial instruments which are not traded in market are determined using certain valuation techniques.*

*Financial assets and liabilities are measured using amortized acquisition cost are presented based on recorded values which are close to fair value as of December 31, 2014 and 2013.*

**2.h. Retention Receivables**

*Retention receivable represents receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract. Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every account receivable's claim which retained by the owner of project up to certain condition after completion of the contract has been met.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.i. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa**

**2.i. Gross Amount Due From Customers**

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

*Gross amount due from customers represents the Company's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.*

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progress*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

*Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.*

**2.j. Biaya Dibayar di Muka**

**2.j. Prepaid Expenses**

Biaya Dibayar di Muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka, dan sewa dibayar dimuka. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

*Prepaid Expenses are costs that have been paid but will be incurred future periods, such as prepaid insurance premiums, prepaid interest and rent paid in advance. Prepaid expenses are amortized over the periods benefit using the straight-line method.*

**2.k. Persediaan**

**2.k. Inventories**

Persediaan diukur berdasarkan biaya yang meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.

*Inventories are measured according to the cost that covers all of the purchasing cost, conversion cost, and other costs that arisen until the inventories placed in condition and location where it is available for sale or use.*

Biaya persediaan dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP).

*The cost of Inventories using the FIFO (First-in First-Out) method.*

Persediaan tanah kavling untuk usaha sarana papan dinilai dengan menggunakan harga beli ditambah dengan biaya lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan tanah tersebut siap dijual (bersertifikat).

*Land inventories for housing are recorded at costs using the acquisition cost plus other expenditures incurred to make the land are ready for sale (with certificate).*

Persediaan material dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi bersih dan persediaan precast pun menggunakan metode yang sama.

*Material inventories are stated at the lower of the cost or net realizable value and precast inventories using the same method.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.k. Persediaan (Lanjutan)**

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

**2.l. Properti Investasi**

Properti investasi merupakan bangunan dalam penyelesaian yang dimiliki oleh Perusahaan yang akan dikelola untuk kepentingan disewakan untuk memperoleh pendapatan sewa jangka panjang.

Biaya perolehan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya yang berhubungan langsung agar properti tersebut siap untuk digunakan.

Perusahaan memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi properti investasi.

**2.m. Aset Tetap**

Aset tetap dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda dan garis lurus (untuk gedung dan bangunan) dengan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut :

	<b>Masa Manfaat/ Useful Lives</b>	
Gedung	20 Tahun/Year	Buildings
Kendaraan	8 Tahun/Year	Vehicles
Perlengkapan Kantor	2-8 Tahun/Year	Office Supplies
Peralatan Proyek	4-16 Tahun/Year	Project Equipment

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.k. Inventories (Continued)**

*Allowance for decrease in value of inventory is provided based on the physical check of inventory at the end of the period.*

**2.l. Investment Properties**

*Investment properties represent building in progress are owned by the Company which will be managed for the benefit of lease to earn long term rental income.*

*Acquisition cost includes all costs which disbursed for the construction of building and the cost directly related to the property so that the property is ready to use.*

*The Company choose the cost model for investment property accounting policies.*

**2.m. Fixed Assets**

*Fixed assets are accounted for using cost model and stated at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed assets, except for land, are depreciated using the double-declining and straight-line method (for plants and buildings) with the estimated economic life of the assets as follows :*

*Cost of repairs and maintenance is charged to the current statements of comprehensive income as incurred, while the significant expenditures for renewals and improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of fixed assets would be capitalized on the carrying amount of the assets.*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.m. Aset Tetap (Lanjutan)**

**2.m. Fixed Assets (Continued)**

Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

*When assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and its' related accumulated depreciation are removed from the fixed assets account and any resulting gain or loss is recorded or charged in current year statements of comprehensive income.*

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode/tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

*The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the interim statements of comprehensive income in the period/year the asset is derecognized.*

Pada akhir periode/tahun buku pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

*At the end of reporting period/year end, the Company periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.*

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan, dan akan dipindahkan ke aset tetap pada saat sudah selesai pembangunannya dan siap digunakan.

*Construction in progress is stated at cost, and will be reclassified to the respective fixed assets when completed and ready to use.*

**2.n. Aset Lain-lain**

**2.n. Other Assets**

Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset tidak berwujud disajikan dalam aset lain-lain.

*Accounts that cannot be classified into current assets, investment, or intangible assets are presented as the other assets.*

Beban tanggungan berupa hak atas tanah dicatat sebesar biaya perolehan hak atau biaya pembaharuan hak. Semua beban tanggungan terkait hak diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis aset tanah, yang mana yang lebih pendek.

*Deferred expense such as land right is recorded at cost of acquisition or cost of renewal right. Deferred expense of right is amortized over useful life or economic life of land, whichever is shorter.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.o Penurunan Aset Nonkeuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan akan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Jika jumlah terpulihkan suatu aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset harus ditentukan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba atau rugi.

Pemulihan rugi penurunan nilai aset yang telah diakui periode sebelumnya dicatat jika terdapat indikasi penurunan nilai aset tersebut sudah tidak ada lagi atau menurun. Pemulihan rugi penurunan nilai aset diakui dalam laba atau rugi. Namun demikian, kenaikan nilai tercatat aset karena pemulihan rugi penurunan nilai hanya diakui sepanjang tidak melebihi nilai tercatat yang ditentukan (setelah dikurangi penyusutan dan amortisasi) jika rugi penurunan nilai aset tidak diakui pada tahun sebelumnya.

**2.p. Utang Bruto kepada Subkontraktor**

Utang bruto pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberita acaranya, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Utang bruto pihak ketiga disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba atau dikurangi kerugian yang diakui.

**2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dan beban jasa konstruksi diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*) yang diukur berdasarkan kemajuan fisik pada tanggal akhir periode pelaporan yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan eksternal. Jika kemungkinan besar terjadi total beban kontrak akan melebihi pendapatan kontrak, maka taksiran rugi segera diakui sebagai beban

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.o Impairment of Non-Financial Assets**

*At the end of the reporting period, the Company will assess whether there is an indication of assets impairment. If such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the higher amount between the fair value less costs to sell and value in use. If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of an asset should be determined by the amount recoverable. Impairment loss is recognized immediately in profit or loss.*

*Recovery of impairment losses of assets which has been recognized in prior periods are recorded when there is indication of impairment of the asset no longer exists or decreases. Recovery of impairment losses of assets recognized in the statement of comprehensive income. However, the increase in the carrying value of assets due to the recovery of an impairment loss is recognized just along do not exceed the carrying amount that would have been determined (net of depreciation and amortization) if no impairment losses recognized in prior years.*

**2.p. Gross Amount Due to Subcontractors**

*Gross amount due to the third parties represents uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.*

*Gross amount due to the third parties is presented as the differences between costs occurred added by net income or deducted by realized loss.*

**2.q. Revenue and Expense Recognition**

*Revenue from construction services is recognized using percentage of completion method measured based on the physical progress at the end of reporting period which is stated on the minutes of external progress of completion works. If the most likely to occur the total contract expenses will exceed contract revenue, the estimated loss is recognized immediately as an expense.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)**

**2.q. Revenue and Expense Recognition (Continued)**

Pendapatan dari usaha perdagangan diakui hanya jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas berdasarkan metode tahap penyerahan barang kepada pembeli, yang dinyatakan dalam PSAK 23 (Revisi 2010) Pendapatan. Pendapatan dari jasa penyewaan gedung diakui berdasarkan jumlah waktu pemakaian yang telah direalisasikan.

*to the extent that the economic benefits associated with the transaction will flow to the entity base on the method of the shipment of good to the buyer stage, state in PSAK 23 (Revised 2010) Revenue. Revenue from rental services is recognized based on the amount of time use that has been realized.*

Pendapatan dari usaha sarana papan (properti) diakui dengan metode *full accrual*, yang dinyatakan dalam PSAK 44 (Revisi 2010) "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat", jika seluruh syarat berikut dipenuhi :

*Revenue from sales of housing is recognized by the full accrual method, as stated in PSAK 44 (Revised 2010) "Accounting for Real Estate Development Activies", if all the following criterias are met :*

- (i) Pengikatan jual beli telah berlaku;
- (ii) Harga jual akan tertagih, dimana jumlah pembayaran yang diterima sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual yang telah disepakati;
- (iii) Tagihan penjual terhadap pembeli pada masa yang akan datang bebas dari subordinasi terhadap utang lain dari pembeli;
- (iv) Penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli sebagai berikut :
  - Untuk penjualan bangunan rumah beserta tanah jika telah terjadi pengalihan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan yang umum terdapat pada suatu transaksi penjualan, dan penjual selanjutnya tidak mempunyai liabilitas atau terlibat lagi secara signifikan dengan aset (properti) tersebut. Dalam hal ini bangunan tersebut telah siap ditempati/digunakan, dan
  - Untuk penjualan tanah yang pendirian bangunannya akan dilaksanakan oleh pembeli jika selesainya pengembangan lingkungan dimana tanah tersebut berada, yaitu penjual tidak mempunyai liabilitas yang signifikan lagi untuk menyelesaikan lingkungan seperti pematangan tanah yang dijual, pembangunan fasilitas yang dijanjikan ataupun yang menjadi liabilitas dan beban penjual, sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli yang bersangkutan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (i) Binding sale and purchase has been accepted;*
- (ii) the sales price will be collectible, where in the amount of payments already collected at least 20% of the agreed sale price;*
- (iii) the seller's receivable from buyers will not be subordinated in the future against another loan of the buyer;*
- (iv) the seller has transferred the risks and of ownership benefits to the buyer as follow :*
  - For the sale of houses with land, if the seller has transferred to the buyer the risks and rewards of ownership in a transaction that is in substance a sale and does not have a substantial continuing involvement with the property. In this case the building is ready for use at least, and*
  - For sale of land where the building will be developed by the buyer when the development of the land is completed whereas the seller is not obligated to complete improvements of land sold or to construct other facilities applicable to the land sold, development agreed facilities or liability and expenses of the seller in accordance with the agreement between seller and buyer or related regulation.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)**

Apabila semua persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang muka dari pelanggan dengan menggunakan metode deposit (*deposit method*), sampai semua persyaratan dipenuhi. Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

**2.r. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban, yang dinyatakan dalam PSAK 26 Biaya Pinjaman (Revisi 2011).

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasikan adalah seluruh biaya pinjaman (bunga, diskonto, biaya-biaya yang terkait), selisih kurs dari pinjaman yang tidak dilindungi nilai (*hedging*) yang timbul selama peminjaman dana tersebut dikurangi dengan pendapatan bunga yang diperoleh dari investasi sementara atas nama dana hasil pinjaman yang belum digunakan.

Konstruksi yang termasuk dalam perolehan aset tertentu adalah proyek-proyek *pre-financing* yang pembangunannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.

**2.s. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan  
Dalam Mata Uang Asing**

Perusahaan dan entitas anak telah menentukan mata uang fungsionalnya dan mengukur hasil operasi dan posisi keuangannya dalam mata uang tersebut. Selanjutnya menyertakan transaksi mata uang asing dan operasi luar negeri dalam laporan keuangan Perusahaan dan mentranslasikan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.q. Revenue and Expense Recognition (Continued)**

*If all the above conditions are not met, all payment received from buyers are recognized as unearned revenue using the deposit (deposit method), until all conditions are met. Expenses are recognized when incurred, with accrual method basis.*

**2.r. Borrowing Costs**

*Borrowing costs that can be directly attributable to the selection, construction, or production of a qualifying asset are capitalized at the cost of the assets inventories. Other borrowing costs are recognized as an expense, stated in PSAK 26 Borrowing cost (Revised 2011).*

*The amount of capitalized borrowing costs covers all costs of borrowing (interest, discount, related costs), and exchange rate loss from loan that is not (hedged) that incurred during borrowing period less interest income received from temporary investment of unused loan.*

*Construction included in acquisition of certain assets is the pre-financing project whose construction time is required more than one year.*

**2.s. Transaction and Translation Financial Statement  
in Foreign Currency**

*The Company and Subsidiary has determine its functional currency and measure the results of operations and financial position in that currency. Furthermore, this standard also determine how to include foreign currency transactions and foreign operations in the financial statements of the company and translate the financial statements into a presentation currency.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.s. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan  
Dalam Mata Uang Asing (Lanjutan)**

1. Mata uang fungsional dan penyajian  
Penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah, sedangkan penyajian laporan keuangan Perusahaan atas kegiatan diluar negeri menggunakan mata uang negara setempat. Setiap periode dilakukan penggabungan laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri dengan laporan keuangan unit bisnis di Indonesia.

2. Transaksi dan Saldo  
Transaksi-transaksi dalam tahun berjalan yang menggunakan mata uang yang bukan Rupiah dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang yang bukan Rupiah disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian akibat penyesuaian kurs tersebut dicatat sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Kantor cabang Perusahaan di Dubai menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Negara tempat kedudukannya, yaitu dalam mata uang Arab Emirat Dirham (AED) dan Saudi Arab Real (SAR). Untuk tujuan penggabungan, laporan keuangan kantor cabang luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs Reuters Sedangkan kantor cabang Timor Leste menggunakan mata uang Amerika Dolar (USD) dengan kurs BI.

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, kurs konversi yang digunakan Perusahaan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebagai berikut:

	2014	2013
	Rp.	Rp.
USD	12.440,00	12.189,00
SGD	-	9.627,98
YEN	104,25	116,17
EURO	15.133,26	16.821,44
AED	3.377,12	3.172,29
SAR	3.302,75	3.319,79
MYR	3.541,91	-

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.s. Transaction and Translation Financial Statement  
in Foreign Currency (Continued)**

1. Functional Currency and Presentation  
*Presentation of consolidated financial statements uses Rupiah currency, while the presentation of the Company financial statements of its overseas using local currency. Each financial reporting period, the financial statement of overseas branches are combined with the financial statements of the business unit in Indonesia.*

2. Transaction and Balance  
*Transaction in current year that does not use Rupiah currency are recorded at the prevailing exchange rates at the transaction date. At each reporting date, the assets and liabilities monetary that are not in Rupiah currency are adjusted to reflect the exchange rates prevailing at that date.*

*On the statements of financial position, assets and liabilities monetary foreign currencies are adjusted to Rupiah based on a middle rate of Bank Indonesia. Gains or losses from foreign exchange adjustment is recorded as a gain or loss for the year.*

*The accounting records of the Company's branch office in Dubai are maintained in local currency where the branch office domiciled, which is in Arab Emirat Dirham (AED) and Saudi Arab Real (SAR). For combining purpose, the financial statements of the branch office are translated into Rupiah based on Reuters Rate. While Timor Leste Branch maintained in United Stated Dollar (USD) using BI rate.*

*As of December 31, 2014 and 2013, the conversion which were used by The Company and Subsidiary, respectively as follow:*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.t Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Entitas atau individu yang dikategorikan sebagai pihak berelasi memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

- i Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

- i Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
- ii Suatu Entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii Kedua entitas tersebut adalah Ventura Bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.t Transactions with Related Parties**

Entities or individuals who are classified as related parties meet the following requirements :

a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person :

- i Has control or joint control over the reporting entity;
- ii Has significant influence over the reporting entity; or
- iii Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) An Entity is related to the reporting entity if it meets one of the following :

- i The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
- ii One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a group of which the other entity is a member);
- iii Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of parent of the entity).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.t Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)**

**2.t Transactions with Related Parties (Continued)**

Entitas Berelasi dengan Pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut adalah :

*Related Parties with Government classified as follows :*

- Entitas yang dikendalikan secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham Entitas.
- Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

- *Entities which significantly controlled by the Ministry of Finance or Local Government that representing as the shareholders of the entity.*
- *The Government of Republic of Indonesia, represented by the SOE's Ministry as shareholder's representative.*

Perusahaan telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Catatan 47).

*The Company has disclosed all the nature and transactions unit related parties (Note 47).*

**2.u. Pajak Penghasilan**

**2.u. Income Taxes**

Pajak penghasilan dalam laporan laba rugi komprehensif periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau pendapatan komprehensif lainnya, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau pendapatan komprehensif lainnya.

*Income tax in the statements of comprehensive income for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in the statements of comprehensive income, except for transactions related to a transaction which is recognized directly in equity or other comprehensive income, in which case it is recognized in equity or in other comprehensive income.*

Pajak Penghasilan Final

Final Income Tax

Beban pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasian, diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak. Bila penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset dan liabilitas tangguhan.

*Final tax expense is recognized in proportion with the revenue according to recognized accounting practices during the current year. The difference between the total final income tax paid and the amount charged to the consolidated profit and loss calculation is recognized as prepaid taxes or tax payable. When income has been subject to final tax, the difference between the carrying value of assets and liabilities and the tax bases are not recognized as deferred assets and liabilities.*

Pajak Penghasilan Tidak Final

Non Final Income Tax

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*).

*All temporary differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes are recognized as deferred income tax with the liability method.*

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yakni pajak yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

*Current tax is recognized based on the taxable income for the year, computed in accordance with the current tax regulation.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.u. Pajak Penghasilan (Lanjutan)**

Pajak Penghasilan Tidak Final (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.

**2.v. Liabilitas Imbalan Kerja**

Perusahaan mengikuti program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Sesuai dengan UU 13/2003, Perusahaan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup menutupi kewajiban sesuai dengan UU 13/2003.

Liabilitas imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan *Projected Unit Credit Method*. Dalam menghitung imbalan pasca kerja, aktuaris independen telah memperhitungkan kontribusi yang telah dilakukan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi dalam mata uang Rupiah, sama dengan mata uang dimana imbalan tersebut dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang mendekati jangka waktu liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian, perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti, dibebankan atau komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan tersebut. Perusahaan memilih mempertahankan kebijakan yang ada untuk mengakui keuntungan atau kerugian aktuarial, yang mana menggunakan pendekatan koridor.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mengharuskan karyawan tersebut tetap bekerja selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan hak tersebut (periode *vesting*).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.u. Income Taxes (Continued)**

Non Final Income Tax (Continued)

*Deferred tax assets and liability mutually write-off if there is a right that can be enforced by law to do another write-off current tax asset and current tax liability and tax deferred assets and liability related to income taxes that applied by the same taxation authority, both on the same entity's taxable or different entity's and there is an intention to settle the outstanding net balance.*

**2.v. Employee Benefits Liabilities**

*The Company has pension insurance program which organized by PT Asuransi Jiwasraya (Persero). In accordance with the Law No. 13/2003, the Company is obliged to cover the shortage of pension payments when the pension plans is currently not sufficient to cover liabilities in accordance with the Law 13/2003.*

*Employee benefit liability is calculated by independent actuaries using Projected Unit Credit Method. In calculating the retirement benefit, an independent actuary has calculated the contribution made by PT Asuransi Jiwasraya (Persero).*

*The present value of benefit liability is determined by discounting the estimated future cash flows using interest rates of bonds denominated in Rupiah, the same as the currency in which remuneration is paid and which have long periods of time liabilities approaching retirement benefits are concerned.*

*Actuarial gains and losses arising from the adjustments, changes in actuarial assumptions in excess of the greater of 10% of the fair value of plan assets or 10% of the present value of the defined benefit, charged or credited to the statements of comprehensive income for the rest of the average expected remaining working lives of employees. The Company chose to maintain the existing policy to recognize gains or losses, which uses the corridor approach.*

*Past service cost is recognized immediately, except for the changes to the pension plan requires the employee to keep working during the period of time to get those rights (vesting period).*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.v. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)**

Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan.

**2.w. Akuntansi untuk Ventura Bersama**

Dalam melaksanakan pemberian jasa konstruksi, Perusahaan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian, dengan membentuk pengelola proyek secara bersama-sama untuk melaksanakan pekerjaan proyek dari pemberi kerja. Bentuk kerjasama operasi (KSO) yang dilakukan Perusahaan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Proyek kerja sama operasi *Integrated* di mana masing-masing partisan memiliki kendali yang signifikan atas aset dan operasi KSO (*integrated*).
- b. Proyek kerja sama operasi *Job Allocation* di mana masing-masing partisan memiliki pembagian yang tegas atas aset dan operasi KSO.

Bagian Perusahaan atas aset bersih dan laba bersih KSO dibukukan berdasarkan metode ekuitas. Bagian Perusahaan atas aset bersih dibukukan dalam akun "Aset pada Ventura Bersama" dan bagian atas laba/(rugi) bersih dalam akun "Pendapatan Bersih Ventura Bersama Konstruksi".

**2.x. Laba Per Saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar pada tahun yang bersangkutan.

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah sebesar 9.727.504.265 dan 9.632.236.000 lembar untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.v. Employee Benefits Liabilities (Continued)**

*In this case, past service costs shall be amortized on a straight-line basis over the vesting period. The current service cost is recognized as an expense for the period.*

**2.w. Accounting for Joint Venture**

*In delivering construction services, the Company is engaged in cooperations with other parties as stipulated in each agreement, by forming a joint operations to execute the project from the project owner. The type of joint operations (JO) made by the Company are divided into two categories as follows :*

- a. *Joint operations Integrated project where each party has significant control over assets and operations of the JO (integrated).*
- b. *Joint operations Job Allocation project where each party has a clear segregation of assets and operations of the JO.*

*The Company's share in net assets and net income of JO is recognized based on the equity method. The Company's share in net asset is recorded into "Joint Venture Assets" account and share in net income (loss) is recorded into "Net Revenues of Construction Joint Venture".*

**2.x. Earnings per Share**

*Earnings per share are computed by dividing residual net income with weighted average number of ordinary shares during the year.*

*The number of weighted average shares outstanding for the calculation of basic earnings per share amounted to 9,727,504,265 and 9,632,236,000 for the years ended December 31, 2014 and 2013.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.y. Biaya Emisi Obligasi dan Saham**

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang bersangkutan.

Biaya emisi saham disajikan sebagai bagian tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi. Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak disusutkan.

**2.z. Informasi Segmen**

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambil keputusan operasional. Dalam hal ini pengambil keputusan operasional yang mengambil keputusan strategis adalah Direksi dan Kepala Divisi.

Pembuat keputusan operasional adalah Dewan Direksi dan Kepala Divisi. Dewan Direksi dan Kepala Divisi menelaah pelaporan internal Perusahaan untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya. Manajemen menentukan operasi segmen berdasarkan laporan ini.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu.

**2.aa. Program Pengganti Rencana kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (MESOP)**

Perusahaan menyediakan program opsi saham untuk anggota manajemen (MESOP). Program ini terdiri dari program opsi saham bahwa setelah diselesaikan melalui penerbitan saham (pengaturan pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas) dicatat sebagai transaksi ekuitas. Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada anggota manajemen dan layanan sejenis lainnya diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian opsi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.y. Bond and Shares Issuance Costs**

*Bond issuance costs are transaction costs to be deducted from the proceeds in order to determine the net proceeds of bonds. The difference between the net proceeds and the nominal value is a discount or premium and will be amortized over the term of the bonds.*

*Share issuance costs are deducted from additional paid in capital and not amortized. Share issuance costs are presented as a deduction of additional paid-in capital and not amortized.*

**2.z. Segment Information**

*The segment reported operating in a manner consistent with internal reporting provided to operational decision makers. In this case the operational decision makers that strategic decisions are the Board of Directors and Head of Divisions.*

*Operational decision have made by the Board of Directors and Head of Divisions. Board of Directors and Head of Divisions review of the Company's internal reporting to assess performance and allocate resources. Management determines the operating segments based on this report.*

*Geographic segment is component that can be differentiated in produce a product or service on the environment (region) specific economic.*

**2.aa. Management and Employee Stock Ownership Plan (MESOP) Replacement Program**

*The Company provides stock option program to their eligible employees and members of management (MESOP). The program consists of stock option plan that upon exercise is settled through issuance of shares (equity –settled share based payment arrangement) which is accounted as equity transaction. Equity-settled share-based payments to member of management and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.aa. Program Pengganti Rencana kepemilikan Saham  
Manajemen dan Karyawan (MESOP) (Lanjutan)**

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian opsi pembayaran saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dicatat sebagai beban dengan metode garis lurus sepanjang periode vesting, berdasarkan estimasi instrumen ekuitas Perusahaan yang akhirnya akan diberikan, dengan peningkatan yang sesuai pada ekuitas.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengubah estimasi dari jumlah instrumen ekuitas yang diharapkan akan diberikan. Dampak dari perubahan atas estimasi awal, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai biaya kumulatif yang mencerminkan perubahan estimasi, dengan penyesuaian berdasarkan cadangan imbalan kerja yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas.

**2.ab. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan dan Entitas Anak sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Nilai aset, liabilitas, pendapatan dan beban sebenarnya kemungkinan berbeda.

**Estimasi Umur Manfaat**

Perusahaan melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor serta kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor tersebut.

**Imbalan Pascakerja**

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pascakerja.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.aa. Management and Employee Stock Ownership Plan  
(MESOP) Replacement Program (Continued)**

*The fair value determined at the grant date of the equity-settled share-based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Company's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity.*

*At the end of each reporting period, the Company revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest. The impact of the revision of the original estimates, if any, is recognised in statements of comprehensive income such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.*

**2.ab. Use of Estimates**

*The preparation of the Company and Subsidiary financial statements in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia requires management to make estimations and assumptions that affect to total assets and liabilities and disclosures of contingent assets and liabilities at the balance sheet dates and the total revenue and expenses during the period of reporting. Actual results may differ with estimates.*

**Estimation of Useful Life**

*The Company conducted a review of the useful lives of the assets based on these factors as well as technical conditions and technological developments in the future. The results of future operations will be affected by the change in estimate resulting from the change in these factors.*

**Post-employment Benefits**

*The present value of post-employment benefit liabilities depends on several factors that are determined by an actuarial basis based on several assumptions. The assumptions used to determine the cost (income) net pensions include the discount rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN  
(Lanjutan)**

**2.ab. Penggunaan Estimasi (Lanjutan)**

**Penyisihan Penurunan Nilai Piutang**

Nilai wajar piutang ditentukan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan penilaian secara individual atas piutang masing-masing debitur (pemberi kerja).

**Pajak Penghasilan**

Menentukan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**Provisi dan Kontinjensi**

Perusahaan saat ini sedang terlibat dalam proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Perusahaan yang menangani proses hukum dan pajak tersebut.

Perusahaan mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau liabilitas konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisi. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES  
(Continued)**

**2.ab. Use of Estimates (Continued)**

**Allowance for Impairment of Receivables**

*The fair value of accounts receivable is determined by calculating permanent impairment and the carrying value is reduced to recognize the decline. The assumptions used to determine the allowance for impairment of receivables based on an individual assessment of each receivable debtor (employer).*

**Income Tax**

*Determine the provision for corporate income taxes requires significant judgment by management. There are certain transactions and computations end tax determination is uncertain during the normal business activities. The Company recognizes income tax liabilities based on estimates of whether there will be an additional income tax.*

**Provisions and Contingencies**

*The company is currently involved in legal proceedings and tax. Management assessment to distinguish between provisions and contingencies primarily through consultation with legal counsel handling the Company's legal and tax.*

*The Company prepares the appropriate provisions for legal proceedings current or constructive liability, if any, in accordance with the policy provision. In recognition and measurement of provisions, the management took a risk and uncertainties.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. KAS DAN SETARA KAS**

**3. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Kas</b>	1.055.562.542	1.017.088.856	<b>Cash on hand</b>
<b>Bank</b>			<b>Cash in Banks</b>
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	166.379.645.174	122.912.014.096	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	209.594.528.948	35.108.167.503	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	15.702.416.889	10.543.476.097	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83.187.006.155	3.243.648.231	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Indonesia Eximbank	2.162.645.461	4.405.466.742	Indonesia Eximbank
PT Bank Syariah Mandiri	44.330.641	41.629.482	PT Bank Syariah Mandiri
<b>US Dollar</b>			<b>US Dollar</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.326.855.432	43.899.608.306	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.866.067.641	8.540.085.747	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.975.071.410	62.640.245	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<b>Japan Yen</b>			<b>Japan Yen</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.240.414.143	1.382.243.750	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
<b>Singapore Dollar</b>			<b>Singapore Dollar</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	362.617.393	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
<b>Euro</b>			<b>Euro</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.725.989	156.187.238	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
<b>Jumlah</b>	<u>518.487.707.884</u>	<u>230.657.784.830</u>	<b>Total</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
PT Bank Panin Tbk	33.217.279.445	72.837.045.306	PT Bank Panin Tbk
PT Bank UOB	33.123.308.302	493.742.581	PT Bank UOB
PT Bank Bukopin Tbk	23.187.287.330	529.461.561	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank BPD Kaltim	9.561.789	4.126.977	PT Bank BPD Kaltim
PT Bank Nusa Tenggara Barat	35.332.546	35.592.061	PT Bank Nusa Tenggara Timur
PT Bank Nusa Tenggara Timur	12.949.279	12.949.404	PT Bank Nusa Tenggara Timur
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	10.172.363.572	677.034.810	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Papua	5.488.747.234	--	PT Bank Papua
PT CIMB Niaga Tbk	4.830.275	--	PT CIMB Niaga Tbk
PT BPD Riau	18.423.299.299	40.578.884.672	PT BPD Riau
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	--	586.498.269	The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
PT Bank ChinaTrust	--	706.000	PT Bank ChinaTrust
<b>US Dollar</b>			<b>US Dollar</b>
The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd	--	203.494.137	The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd
<b>Arab Emirat Dirham (AED)</b>			<b>Arab Emirat Dirham (AED)</b>
Mashreq Bank - Dubai	--	543.128.999	Mashreq Bank - Dubai
<b>Saudi Arab Real (SAR)</b>			<b>Saudi Arab Real (SAR)</b>
The National Commercial Bank - Jeddah	4.498.069.140	4.996.472.263	The National Commercial Bank - Jeddah
<b>Malaysian Ringgit</b>			<b>Malaysian Ringgit</b>
Maybank	2.438.973.394	--	Maybank
<b>Jumlah</b>	<u>130.612.001.605</u>	<u>121.499.137.040</u>	<b>Total</b>
<b>Deposito Berjangka</b>			<b>Time Deposits</b>
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	355.128.000.000	355.820.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	265.000.000.000	30.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	220.000.000.000	147.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	56.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
<b>Jumlah</b>	<u>840.128.000.000</u>	<u>588.820.000.000</u>	<b>Total</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
<b>Rupiah</b>			<b>Rupiah</b>
PT BPD Jabar dan Banten Tbk	175.000.000.000	136.000.000.000	PT BPD Jabar dan Banten Tbk
PT Bank Panin Tbk	10.000.000.000	30.000.000.000	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	--	11.700.000.000	PT Bank Bukopin Tbk
<b>Jumlah</b>	<u>185.000.000.000</u>	<u>177.700.000.000</u>	<b>Total</b>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<u><u>1.675.283.272.031</u></u>	<u><u>1.119.694.010.726</u></u>	<b>Total Cash and Cash Equivalents</b>
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka per Tahun (%)	6.7% - 10.50%	2.5% - 10.50%	Interest rate on Time Deposits per Annum (%)
Jangka Waktu	1-3 bulan/Month	1-3 bulan/Month	Time Period

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**4. INVESTASI JANGKA PENDEK**

**4. SHORT-TERM INVESTMENTS**

	2014 Rp	2013 Rp	
Sertifikat Deposito Berjangka	24.276.133.745	24.276.133.745	Certificate of Time Deposits
Jumlah	<u>24.276.133.745</u>	<u>24.276.133.745</u>	Total

Merupakan sertifikat deposito berjangka senilai Rp 5.469.000.000, Rp 8.143.200.000 dan Rp 2.215.733.745 atau total senilai Rp 15.827.933.745 yang ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Rp 8.448.200.000 yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 19.4 dan 19.2) pada 31 Desember 2014 dan 2013. Sertifikat deposito tersebut dijadikan jaminan atas pinjaman bank pada masing-masing bank tersebut.

Represent certificate of time deposits amounted to Rp 5,469,000,000, Rp 8,143,200,000 and Rp 2,215,733,745 or the total amount of Rp 15,827,933,745 were placed in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Rp 8,448,200,000 were placed at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 19.4 and 19.2) on December 31, 2014 and 2013. The certificates of time deposits are pledged as collateral for bank loans at each bank.

**5. PIUTANG USAHA**

**5. ACCOUNT RECEIVABLES**

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	384.821.626.763	390.317.532.632	Construction Service Receivables
Piutang Ventura Bersama	455.085.805.665	518.684.285.391	Joint Venture Receivable
<i>Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang</i>	<i>(7.748.255.674)</i>	<i>(7.748.255.674)</i>	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b><u>832.159.176.754</u></b>	<b><u>901.253.562.349</u></b>	<b>Total Related Parties</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
Piutang Usaha Jasa Konstruksi	691.828.707.760	710.585.642.082	Construction Receivables
Piutang Dagang	803.441.396.564	119.523.560.153	Trade Receivables
Piutang Sewa Gedung	47.283.637	28.748.000	Buildings Rental Receivables
<i>Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang</i>	<i>(20.718.167.026)</i>	<i>(21.018.167.026)</i>	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b><u>1.474.599.220.935</u></b>	<b><u>809.119.783.209</u></b>	<b>Total Third Parties</b>
<b>Jumlah Piutang Usaha</b>	<b><u>2.306.758.397.689</u></b>	<b><u>1.710.373.345.558</u></b>	<b>Total Accounts Receivables</b>

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut :

The details of related parties account receivables are as follows:

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Kertas Leces (Persero)	86.707.725.121	86.707.725.121	PT Kertas Leces (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	120.385.986.139	44.471.955.015	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	40.543.487.015	86.865.312.300	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
JO Kawahapejaya Indonesia	31.662.926.384	--	JO Kawahapejaya Indonesia
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	26.260.305.600	26.260.305.600	PT Dok Kodja Bahari (Persero)
PT Rekayasa Industri (Persero)	19.767.340.499	11.957.173.681	PT Rekayasa Industri (Persero)
PT Transmarga Jatim Pasuruan	17.012.684.634	17.748.706.526	PT Transmarga Jatim Pasuruan
KSO Waskita Karya - Trinititi	15.799.723.216	--	JO Waskita Karya - Trinititi
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	--	24.295.994.303	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Semen Padang (Persero)	--	35.650.111.907	PT Semen Padang (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	--	29.109.989.445	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Lainnya (di bawah Rp 10 Miliar)	26.681.448.155	27.250.258.734	Others (less than Rp 10 Billion each)
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b><u>384.821.626.763</u></b>	<b><u>390.317.532.632</u></b>	<b>Total Related Parties</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

**5. ACCOUNT RECEIVABLES (Continued)**

Rincian saldo piutang usaha kepada pihak-pihak ketiga adalah sebagai berikut :

The details of third parties account receivables are as follows:

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
Pemerintah - pemerintah Daerah	217.407.221.962	238.893.673.244	District Governments
PT Tapin Coal Terminal	75.581.475.462	106.192.997.745	PT Tapin Coal Terminal
Bin Ladin Contractor Group LLC	51.417.821.416	48.379.420.222	Bin Ladin Contractor Group LLC
PT Pembangunan Jaya Ancol	37.750.870.445	--	PT Pembangunan Jaya Ancol
PT Mega Pasanggrahan Indah	30.532.345.872	24.015.123.316	PT Mega Pasanggrahan Indah
PT Sentul City Tbk	30.460.976.803	--	PT Sentul City Tbk
PT Bangun Investa Graha	27.829.499.997	--	PT Bangun Investa Graha
Konsorsium Interchange STA 11	27.626.586.180	--	Interchange Consortium of STA 11
Kementerian Pekerjaan Umum	17.357.866.895	57.269.546.788	The Ministry of Public Works
PT Broadbiz Asia	13.943.649.470	--	PT Broadbiz Asia
PT Ade Pede Realty	13.457.452.366	14.340.334.341	PT Ade Pede Realty
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	12.193.646.698	--	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Telkom Property (PT graha Sarana Duta)	11.273.037.009	--	Telkom Property (PT Graha Sarana Duta)
Universitas Trunojoyo	--	11.972.475.650	University of Trunojoyo
PT Mandara Permai	--	17.692.857.355	PT Mandara Permai
PT Indonesian Paradise Island	--	20.652.714.355	PT Indonesian Paradise Island
PT Hermes Realty Indonesia	--	11.457.752.070	PT Hermes Realty Indonesia
PT Pardika Wisthi Sarana	--	17.170.354.992	PT Pardika Wisthi Sarana
Lainnya (di bawah Rp 10 Miliar)	124.996.257.185	142.548.392.004	Others (less than Rp 10 Billion each)
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>691.828.707.760</b>	<b>710.585.642.082</b>	<b>Total Third Parties</b>

Rincian saldo piutang ventura bersama adalah sebagai berikut :

The details of Joint Venture account receivables are as follows:

Kemitraan/ Venturer	Nama Proyek / Name of Projects	2014 Rp	2013 Rp
KSO/JO Waskita - Yasa	Bandara Kualanamu	109.695.627.460	97.882.641.492
KSO/JO Waskita - PAL	PLTU Malinau	80.692.936.693	53.833.916.806
KSO/JO Waskita - Adhi - HK - Wika	Suramadu CIC	29.903.658.585	29.903.658.585
KSO/JO Waskita - Brantas	Pandan Duri Thp II	28.641.392.244	27.369.876.554
KSO/JO Waskita - JPC	SMM Muara Teweh Div.2	25.847.946.463	--
KSO/JO Waskita - ZUG	PLTU Rote	22.156.903.020	22.808.737.531
KSO/JO Waskita - GXED	Genyem Div.2	16.352.352.216	12.560.590.691
KSO/JO Waskita - Andesmont	Jl. Kebayan - Simpang Kraft	13.986.753.342	--
KSO/JO Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	Jl Talisayan - Batu Lepok	12.480.112.300	--
KSO/JO Waskita - Sinar Intan	PDAM Tanah Grogot	12.107.649.114	--
KSO/JO Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	10.207.643.882	43.747.385.556
KSO/JO Waskita - Brantas - Wika	Bendung Gerak Sembayat	8.961.837.296	--
KSO/JO Waskita - Brantas	Civil Work of Jabung	8.780.575.957	--
KSO/JO Waskita - Daya Mulia Turangga	Ipuh Bantal Roads	7.530.203.468	--
KSO/JO Waskita - GXED	Genyem Div EPC	6.871.187.977	6.871.135.006
KSO/JO Waskita - Brantas	Jl Bulukumba Mks	6.785.542.298	7.403.332.454
KSO/JO Waskita - Wijaya - PP - Adhi	Jatigede Sumedang	5.456.799.700	26.924.221.581
KSO/JO Waskita - Adhi	Bojonegoro Barrage	5.384.124.836	5.576.549.996
KSO/JO Waskita - Yodya Karya	Bandara Husein	5.142.933.660	--
KSO/JO Waskita - Kajima	E2 Cilincing - Jampea	--	64.960.847.662
KSO/JO Waskita - Indah Karya	Ciasem Pamanukan	--	24.047.616.469
KSO/JO Waskita - Arkonin	Renov. Bandara Ngurah Rai	--	5.880.387.270
KSO/JO Waskita - Brantas	Terminal Selatan Bandara Djuanda (Thp 2)	--	39.314.816.292
KSO/JO Waskita - IHC	Pengadaan Dredger	--	11.535.173.304
KSO/JO Waskita - Kumodo Intan	Waduk Rajui	--	4.472.201.292
KSO/JO Waskita - CPA	Spam Samarinda Utara	--	2.730.254.503
KSO/JO Waskita - Adhi	ENB-03 Jl. Dompu Banggo (EINRIP)	--	1.818.471.835
Lainnya (di bawah Rp 5 Miliar)/Others (less than Rp 5 Billion each)		38.099.625.154	29.042.470.512
<b>Total</b>		<b>455.085.805.665</b>	<b>518.684.285.391</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
Sampai dengan 12 bulan		
Belum Jatuh Tempo	1.838.645.860.466	1.347.717.290.070
Sudah Jatuh Tempo	279.256.241.873	202.040.685.331
> 13 - 24 Bulan - Sudah Jatuh Tempo	208.258.925.603	180.318.000.410
> 25 - 36 Bulan - Sudah Jatuh Tempo	--	--
> 36 Bulan - Sudah Jatuh Tempo	9.063.792.447	9.063.792.447
<b>Jumlah</b>	<b><u>2.335.224.820.389</u></b>	<b><u>1.739.139.768.258</u></b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
Saldo Awal Tahun	(28.766.422.700)	(24.626.427.605)
Penambahan di Tahun Berjalan	--	(5.946.341.095)
Pemulihan di Tahun Berjalan	300.000.000	1.806.346.000
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b><u>(28.466.422.700)</u></b>	<b><u>(28.766.422.700)</u></b>

Manajemen telah membentuk penyisihan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individual atas masing-masing pelanggan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 28.466.422.700. Terdapat pemulihan atas penyisihan nilai piutang usaha pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 300.000.000 dari PT Sijiro.

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pada 31 Desember 2013 sebesar Rp 5.946.341.095 meliputi piutang-piutang kepada, PT Putera Mataram Indah Wisata, PT Pertamina Bina Medika, PT Iglas (Persero).

Pemulihan atas penyisihan nilai piutang usaha pada 31 Desember 2013 merupakan penerimaan termin atas piutang yang telah disisihkan kepada Perum Perumnas sebesar Rp 1.806.346.000 (Catatan 37).

Piutang usaha dijamin pada bank-bank pemberi pinjaman, dengan rincian sebagai berikut :

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 19.2), piutang yang dijamin terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Universitas Sebelas Maret sebesar Rp 170.775.000.000, Proyek Waduk Gondang sebesar Rp 617.280.400.000 dan Proyek Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sebesar Rp 710.610.540.000.
- PT Bank BRI (Persero) Tbk (Catatan 19.5), piutang yang dijamin terhadap proyek yaitu tagihan termin atas proyek Aji Tulus Jejangkat sebesar Rp 341.010.474.999, Proyek Gedung & Sarana Penunjang di Kompleks INA DRTG Sentul – Bogor sebesar Rp 36.784.000.000, Proyek Hotel Tangram & Sadira Pekanbaru sebesar Rp 167.200.000.000, Proyek Pembangunan Kompleks Perkantoran Paser Lanjutan sebesar Rp 88.237.342.000.

**5. ACCOUNT RECEIVABLES (Continued)**

The accounts receivable by age (day) category are as follows:

Up to 12 Months  
Not Yet Due  
Past Due  
>13 - 24 Months - Past Due  
>25 - 36 Months - Past Due  
>36 Months - Past Due  
**Total**

The movements of allowance for impairment losses of receivable are as follows:

Beginning Balance of the Year  
Addition in the Current Year  
Recovery in Current Year  
Ending Balance of the Year

The management has allocated the allowance for impairment losses of receivable, based on individual assessment of each customers.

The allowance for impairment losses of receivable as of December 31, 2014 amounted to Rp 28,466,422,700. There is recovery of the allowance for impairment losses of receivable as of December 31, 2014 amounted to Rp 300,000,000 from PT Sijiro.

The allowance for impairment losses of receivable as of December 31, 2013 amounted to Rp 5,946,341,095, including accounts receivable from PT Putera Mataram Indah Wisata, PT Pertamina Bina Medika, PT Iglas (Persero).

There were recovery of the allowance for impairment of receivable as of December 31, 2013 to Perum Perumnas amounted to Rp 1,806,346,000 (Note 37).

Accounts receivable as collateral on bank lenders, are as follows :

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 19.2), accounts receivable which is used as collateral are University of Sebelas Maret Project amounted to Rp 170,775,000,000, Gondang Reservoir Project amounted to Rp 617,280,400,000 and Raknamo Dam Project in Kupang District amounted to Rp 710,610,540,000.
- PT Bank BRI (Persero) Tbk (Note 19.5), accounts receivable which is used as collateral are Aji Tulus Jejangkat project amounted to Rp 341,010,474,999, Building and Supporting Facilities Project in INA DRTG Sentul – Bogor Complex amounted to Rp 36,784,000,000, Hotel Tangram & Sadira Pekanbaru Project amounted to Rp 167,200,000,000, Development Paser Office Complex Advanced Project amounted to Rp 88,237,342,000.



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**5. PIUTANG USAHA (Lanjutan)**

- PT BPD Jabar dan Banten Tbk (Catatan 19.3), piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Stadion Balikpapan Tahap III sebesar Rp 599.500.000.000, Proyek Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket Banyu Urip 2) sebesar Rp 102.600.139.000 dan Proyek Gedung Kantor PGN Area Palembang sebesar Rp 56.810.000.000.
- Indonesia Eximbank (Catatan 19.1), piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Upgrading of Existing Suai Airport sebesar USD 67.671.189,95, Proyek Perluasan Gedung T3 Ultimate Bandara Soekarno – Hatta sebesar Rp 1.786.950.000.000, Proyek Pekerjaan Desain & Build Bandara Husein Sastranegara Bandung sebesar Rp 139.900.032.000.
- PT Bank Panin Tbk (Catatan 19.6), piutang yang dijaminan terhadap proyek yaitu tagihan termin atas Proyek Jaringan Transmisi Brastagi – Kutacane sebesar Rp 36.705.430.577, Proyek Pelaksanaan Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Fase I sebesar Rp 29.155.500.000, Proyek Gedung SKPD Kalimantan Utara sebesar Rp 62.394.014.709, Proyek Jaringan Irigasi di Sangkub Kiri sebesar Rp 10.428.067.655, Proyek PLTU Tenayan Paket I sebesar Rp 67.638.931.000, Proyek PLTU Tenayan (Paket II) sebesar Rp 13.784.489.600, Proyek Menara Proteksi Indonesia sebesar Rp 130.130.000.000 dan Proyek Jalan Simpang Langgam – Langgam sebesar Rp 76.230.766.400.

Piutang ventura bersama merupakan piutang termin atas prestasi pekerjaan fisik yang telah ditagihkan untuk proyek Kerja Sama Operasi (KSO) dan biaya-biaya proyek yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan.

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan dari PT Jakarta Monorail untuk pembangunan monorail Jakarta Sta. Dukuh Atas - Sta. Setiabudi Utara (Green Line) No. 022/JM-CTR/PRA-C&S/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp 4.102.767.273. Saldo piutang usaha Perusahaan terhadap PT Jakarta Monorail sebesar Rp 5.102.115.148 terdiri dari pembayaran pertama sebesar Rp 3.727.115.148 dan pembayaran *idle bored pile* sebesar Rp 1.375.000.000. Pada 31 Desember 2014 Perusahaan belum membentuk penyisihan penurunan nilai piutang.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang usaha kepada pihak ketiga adalah cukup untuk menutupi yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. ACCOUNT RECEIVABLES (Continued)**

- PT BPD Jabar dan Banten Tbk (Note 19.3), accounts receivable which is used as collateral are Development of Balikpapan Stadium Project Phase III amounted to Rp 599,500,000,000, Gunungsari Primary Drainage System Project (Banyu Urip 2 Package) amounted to Rp 102,600,139,000 and PGN Office Building Palembang Project amounted to Rp 56,810,000,000.
- Indonesia Eximbank (Note 19.1), accounts receivable which is used as collateral are Upgrading of Existing Suai Airport Project amounted to USD 67,671,189.95, Building Expansion T3 Ultimate Soekarno – Hatta Project amounted to Rp 1,786,950,000,000, Design & Build Works of Bandung Husein Sastranegara Airport Project amounted to Rp 139,900,032,000.
- PT Bank Panin Tbk (Note 19.6), accounts receivable which is used as collateral are Transmission Network Brastagi - Kutacane Project amounted to Rp 36,705,430,577, Implementation of Wastewater Pipeline Network Optimization Phase I Project amounted to 29,155,500,000, SKPD Building North Kalimantan Project amounted to Rp 62,394,014,709, Irrigation Project in Sangkub Kiri amounted to Rp 10,428,067,655, PLTU Tenayan Package I Project amounted to Rp 67,638,931,000, PLTU Tenayan Project (Package II) amounted to Rp 13,784,489,600, Indonesia Protection Tower Project amounted to Rp 130,130,000,000 and Simpang Langgam – Langgam Street Project amounted to Rp 76,230,766,400.

Joint venture receivable represents an accounts receivable in the terms on the completion of physical work that has been billed for the project Co-operation (KSO) and project costs are paid in advance by the Company.

The company entered into a work contract of PT Jakarta Monorail work for the construction of the Jakarta monorail Sta. Dukuh Atas - Sta. North Setiabudi (Green Line) No. 022/JM-CTR/PRA-C&S/XII/2013 dated December 11, 2013 with a value of Rp 4.102.767.273. The balance of account receivables to PT Jakarta Monorail Company amounting to Rp 5,102,115,148 consisting of the first payment of Rp 3,727,115,148 and payment *idle bored pile* Rp 1,375,000,000. On December 31, 2014 the Company has not provided an allowance for impairment of receivables.

Management believes that allowance for impairment losses of accounts receivable to third parties are sufficient to cover the possible losses on uncollectible receivables.

Management also believes that there is no significant risk concentrated in third party receivables.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG RETENSI**

**6. RETENTION RECEIVABLES**

	2014 Rp	2013 Rp	
Pihak-pihak Berelasi	222.415.352.457	169.934.138.125	Related Parties
<i>Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai piutang</i>	<i>(633.868.682)</i>	<i>(582.732.318)</i>	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>
Jumlah Pihak-pihak Berelasi	<u>221.781.483.775</u>	<u>169.351.405.807</u>	Total Related Parties
Pihak-pihak Ketiga	422.089.118.826	447.406.024.804	Third Parties
<i>Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai piutang</i>	<i>(24.853.072.166)</i>	<i>(10.979.157.852)</i>	<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Retention Receivables</i>
Jumlah Pihak-pihak Ketiga	<u>397.236.046.660</u>	<u>436.426.866.952</u>	Total Third Parties
Jumlah	<u><b>619.017.530.435</b></u>	<u><b>605.778.272.759</b></u>	Total

Rincian saldo piutang retensi pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

*The details of retention receivables to related parties are as follows:*

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Trans Marga Jateng - Proyek Tol Semarang-Solo	35.164.810.538	35.164.810.538	PT Trans Marga Jateng - Project Toll Semarang-Solo
PT Trans Marga Jateng - Proyek Tol Semarang-Bawen	26.760.467.888	24.408.241.177	PT Trans Marga Jateng - Project Toll Semarang-Bawen
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - Proyek PLTA Genyem	25.714.646.132	16.005.414.457	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - Project PLTA Genyem
PT Trans Marga Jateng - Proyek Tol Bawen Paket 3	17.716.659.680	17.716.659.680	PT Trans Marga Jateng - Project Toll Bawen Package 3
PT Jasa Marga (Persero) Tbk - Proyek Tol Gempol-Porong	14.679.896.278	--	PT Jasa Marga (Persero) Tbk - Project Toll Gempol-Porong
PT Transmarga Jatim Pasuruan - Proyek Tol Gempol-Porong	12.419.572.371	--	PT Transmarga Jatim Pasuruan - Project Toll Gempol-Porong
PT Jasa Marga Bali Tol - Proyek Tol Benoa Paket 4	10.446.298.813	18.803.360.487	PT Jasa Marga Bali Tol - Project Toll Package 4
PT Jasa Marga Bali Tol - Proyek Tol Benoa Paket 2	--	12.835.050.143	PT Jasa Marga Bali Tol - Project Toll Package 2
Lainnya (di bawah Rp 10 Milyar)	79.513.000.757	45.000.601.643	Others (less than Rp 10 Billions each)
<b>Jumlah Piutang Retensi Pihak-pihak Berelasi</b>	<u><b>222.415.352.457</b></u>	<u><b>169.934.138.125</b></u>	<b>Total Related Parties Retention Receivables</b>

Rincian saldo piutang retensi pihak-pihak ketiga sebagai berikut:

*The details of retention receivables to third parties are as follows:*

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Marga Lingkar Jakarta - Proyek Tol JORR W2	17.695.468.320	17.700.113.010	PT Marga Lingkar Jakarta - Project Toll JORR W2
PT Pardika Wisthi Sarana - Proyek Woodland Park	15.826.858.352	--	PT Pardika Wisthi Sarana - Project Woodland Park
DPU Balai Besar Wil Sungai Cimanuk - Proyek Jatigede Sumedang	15.045.768.655	15.045.768.655	DPU Balai Besar Wil Sungai Cimanuk - Project Jatigede Sumedang
PT Mega Pasanggrahan Indah - Proyek Urbana Cinere	13.761.747.811	--	PT Mega Pasanggrahan Indah - Project Urbana Cinere
Dirjen Bina Marga - Proyek Bulukumba-Sinjai	13.212.248.621	--	Dirjen Bina Marga - Project Bulukumba-Sinjai
Dirjen SDA - Proyek Kali Pesanggrahan 1	12.923.094.546	10.435.064.253	Dirjen SDA - Project Pesanggrahan River 1
PT Mandara Permai - Proyek Jemb. Kapuk Naga	12.303.796.696	--	PT Mandara Permai - Project Kapuk Naga Bridge
PT Indonesian Paradise Island - Proyek Sahid Kuta Bali	12.210.199.089	12.210.199.089	PT Indonesian Paradise Island - Project Sahid Kuta Bali
PT Broadbiz Asia - Proyek Paragon Square	11.266.491.081	--	PT Broadbiz Asia - Project Paragon Square
Dinas PU Kota Balikpapan - Stadion Balikpapan 2	--	16.944.184.080	Dinas PU Kota Balikpapan - Stadion Balikpapan 2
Universitas Indonesia - Proyek World Class	--	14.600.000.000	University of Indonesia - Project World Class
PT Multi Artha Pratama - Proyek SS Penjaringan PIK	--	11.454.587.711	PT Multi Artha Pratama - Project SS Penjaringan PIK
Lainnya (di bawah Rp 10 Milyar)	297.843.445.655	349.016.108.007	Others (less than Rp 10 Billions each)
<b>Jumlah Piutang Retensi Pihak-pihak Ketiga</b>	<u><b>422.089.118.826</b></u>	<u><b>447.406.024.804</b></u>	<b>Total Third Parties Retention Receivables</b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi adalah sebagai berikut:

*The movements of allowance for impairment losses of retention receivables are as follows:*

	2014 Rp	2013 Rp	
Saldo Awal Tahun	(11.561.890.170)	(12.580.996.476)	Beginning Balance of the Year
Penambahan di Tahun Berjalan	(13.925.050.678)	(919.127.329)	Addition in the Current Year
Pemulihan di Tahun Berjalan	--	1.938.233.635	Recovery in Current Year
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<u><b>(25.486.940.848)</b></u>	<u><b>(11.561.890.170)</b></u>	<b>Ending Balance of the Year</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG RETENSI (Lanjutan)**

Manajemen telah membentuk penyisihan penurunan nilai piutang, berdasarkan penilaian secara individual atas masing-masing pemberi kerja

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang retensi pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 13.925.050.678 yaitu kepada PT Indonesia Paradise Island Rp 12.210.199.089, Pemda-pemda Daerah sebesar Rp 1.064.957.056, PT Sari Dumai Sejati Rp 76.112.534, PT Graha Santika Dyandra Rp 522.645.635 dan RS Pertamina sebesar Rp 51.136.364. Tidak terdapat pemulihan atas penyisihan nilai piutang retensi pada 31 Desember 2014.

Penyisihan penurunan nilai piutang retensi per 31 Desember 2013 sebesar Rp 919.127.329 meliputi piutang-piutang kepada Perum Perumnas, PT Putera Mataram Indah Wisata dan beberapa perusahaan lainnya. Terdapat pemulihan atas penyisihan penurunan nilai piutang retensi per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.938.233.635 kepada PT Citra Buana Prakarsa sebesar Rp 1.070.504.062 dan PT Elita Prima Utama sebesar Rp 867.729.573.

Manajemen berpendapat bahwa piutang retensi dapat ditagihkan.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang retensi di kemudian hari.

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga.

**7. PIUTANG LAIN-LAIN**

**a. Piutang Lain-lain Jangka Pendek**

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Pihak-Pihak Berelasi</b>		
Piutang Bunga PT PPTR	1.513.377.720	-
Piutang Bunga Deposito	289.083.467	391.360.000
Piutang Bunga PT PPA (Persero)	43.749.999	2.318.750.000
Koperasi PT Waskita Karya	94.072.547	94.072.547
Piutang Karyawan	3.486.420	17.734.000
Lain-Lain	10.355.488.357	-
<b>Jumlah Pihak-Pihak Berelasi</b>	<b>12.299.258.510</b>	<b>2.821.916.547</b>
<b>Pihak-Pihak Ketiga</b>		
Lain-lain	10.089.881.358	23.110.295.840
<b>Jumlah Pihak-Pihak Ketiga</b>	<b>10.089.881.358</b>	<b>23.110.295.840</b>
<b>Jumlah</b>	<b>22.389.139.868</b>	<b>25.932.212.387</b>

Piutang bunga kepada PT Pejagan Pemalang Tol Road adalah piutang bunga kepada entitas asosiasi untuk modal kerja.

Piutang bunga deposito adalah piutang bunga dari penempatan deposito oleh Perusahaan.

**6. RETENTION RECEIVABLES (Continued)**

Management has provided an allowance for impairment losses of receivables, based on individual assessment of each owner of the project.

The allowance for impairment losses of retention receivable as of December 31, 2014 amounted to Rp 13,925,050,678 such as to PT Indonesia Paradise Island amounted to Rp 12,210,199,089, District Government amounted to Rp 1,064,957,056, PT Sari Dumai Sejati amounted to Rp 76,112,534, PT Graha Santika Dyandra amounted to Rp 522,645,635 and RS Pertamina amounted to Rp 51,136,364. There is no recovery of the allowance for impairment losses of retention receivable as of December 31, 2014.

Allowance for impairment losses of retention receivables as of December 31, 2013 amounted to Rp 919,127,329, including receivables to Perum Perumnas, PT Putera Mataram Indah Wisata and several other companies. There were recovery of the allowance for impairment losses of receivables as of December 31, 2013 amounted to Rp 1,938,233,635 including to PT Citra Buana Prakarsa amounted to Rp 1,070,504,062 and PT Elita Prima Utama amounted to Rp 867,729,573.

Management believes that retention receivables possible to collect.

Management believes that allowance for impairment losses of receivables is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible retention receivables in the future.

Management also believes that there is no significant risk concentrated in third party receivables.

**7. OTHER RECEIVABLES**

**a. Other Receivables Short Term**

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Related Parties</b>		
Interest Receivable from PT PPTR	-	-
Interest from Time Deposits	391.360.000	391.360.000
Interest Receivable from PT PPA (Persero)	2.318.750.000	2.318.750.000
Koperasi PT Waskita Karya	94.072.547	94.072.547
Employee Receivables	17.734.000	17.734.000
Others	-	-
<b>Total Related Parties</b>	<b>2.821.916.547</b>	<b>2.821.916.547</b>
<b>Third Parties</b>		
Others	23.110.295.840	23.110.295.840
<b>Total Third Parties</b>	<b>23.110.295.840</b>	<b>23.110.295.840</b>
<b>Total</b>	<b>25.932.212.387</b>	<b>25.932.212.387</b>

Other receivable to PT Pejagan Pemalang Tol Road represent interest receivable to associate entity for working capital.

Other receivable to Interest represent interest receivable from Time Deposits.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)**

**a. Piutang Lain-lain Jangka Pendek (Lanjutan)**

Piutang bunga kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero) adalah piutang bunga bunga *Promissory Notes*.

Piutang lain-lain terutama merupakan biaya provisi/bank garansi yang dibayar terlebih dahulu oleh Perusahaan atas Kredit Modal kerja (KMK) untuk subkontraktor.

**b. Piutang Lain-lain Jangka Panjang**

	2014 Rp	2013 Rp
Pihak-Pihak Berelasi		
PT Istaka Karya (Persero)	75.144.307.748	75.144.307.748
PT Pejagan Pemalang Toll Road	33.251.526.498	-
PT Kertas Lece (Persero)	9.092.268.560	-
<b>Jumlah</b>	<b>117.488.102.806</b>	<b>75.144.307.748</b>
<i>Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang</i>	<i>(75.144.307.748)</i>	<i>(75.144.307.748)</i>
<b>Jumlah Pihak-Pihak Berelasi</b>	<b>42.343.795.058</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>42.343.795.058</b>	<b>-</b>

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
Saldo Awal Tahun	(75.144.307.748)	(47.552.388.629)
Penambahan Tahun Berjalan	-	(27.591.919.119)
Pemulihan Tahun Berjalan	-	-
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b>(75.144.307.748)</b>	<b>(75.144.307.748)</b>

Piutang lain-lain PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914 merupakan piutang Perusahaan kepada PT Istaka Karya (Persero) yang diberikan berdasarkan keputusan para Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk diluar RUPS Nomor KEP-83/MBU/2011 dan KEP-PS04/PPA/0411 tanggal 1 April 2011. Pada tanggal 21 Mei 2011 Perusahaan menerima Surat Pengakuan Utang No. L.05B/P/WK/2011 dan No. DU-SP/2011.01B dari PT Istaka Karya (Persero) sebesar Rp 64.169.976.914.

Pada tanggal 12 April 2011 PT Istaka Karya (Persero) bermohon kepada PT Waskita Karya (Persero) sesuai surat Nomor: DK/2011-323 untuk menerbitkan Garansi Bank Proyek Bandar Lampung ByPass senilai Rp 10.661.885 dan biaya provisi penerbitan Garansi Bank sebesar Rp 312.445.834. Pada tanggal 30 Maret 2012 telah dicairkan Garansi Bank Nomor: 2011/JPU/GB/068/6148/Monday oleh pemilik proyek, sehingga piutang PT Waskita Karya (Persero) kepada PT Istaka Karya (Persero) menjadi sebesar Rp 75.144.307.748.

**7. OTHER RECEIVABLES (Continued)**

**a. Other Receivables Short Term (Continued)**

*Other receivable to PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero) represent interest receivable of Promissory Notes.*

*The Company's other receivables mainly represent provision fee/ bank guarantee has been paid in advance by the Company for the Working Capital Loan (WCL) to the subcontractor.*

**b. Other Receivables Long Term**

	2014 Rp	2013 Rp
Related Parties		
PT Istaka Karya (Persero)	75.144.307.748	75.144.307.748
PT Pejagan Pemalang Toll Road (PT PPTR)	-	-
PT Kertas Lece (Persero)	-	-
<b>Total</b>	<b>75.144.307.748</b>	<b>75.144.307.748</b>
<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Receivables</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Total Related Parties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*The movements of allowance for impairment losses of other receivables are as follows:*

	2014 Rp	2013 Rp
Beginning Balance of the Year	(47.552.388.629)	(47.552.388.629)
Addition in Current Year	-	(27.591.919.119)
Recovery in Current Year	-	-
<b>Ending Balance of the Year</b>	<b>(75.144.307.748)</b>	<b>(75.144.307.748)</b>

*Other receivables PT Istaka Karya (Persero) originally amounted to Rp 64,169,976,914 is receivable to PT Istaka Karya (Persero) that was given in accordance with the Shareholders of the Company decision outside the RUPS No. KEP-83/MBU/2011 and Kep-PS04/PPA /0411 dated April 1, 2011. On May 21, 2011, The Company received a Letter of acknowledgment Debt No. L.05B/P/WK/2011 and No. DU-SP/2011.01B of PT Istaka Karya (Persero) amounted of Rp 64,169,976,914.*

*On April 12, 2011 PT Istaka Karya (Persero) requested to PT Waskita Karya (Persero) Tbk through letter No: DK/2011-323 to issue bank guarantee for Bandar Lampung Bypass project amounted to Rp 10,661,885,000 and the cost of provision for issued Bank Guarantee amounted to Rp 312,445,834. On March 30, 2012 the bank guarantee No: 2011/JPU/GB/068/6148/Monday has been executed by the owner of the project, so that the receivables of PT Waskita Karya (Persero)Tbk to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 75,144,307,748.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)**

**b. Piutang Lain-lain Jangka Panjang (Lanjutan)**

Ketidakmampuan PT Istaka Karya (Persero) dalam memenuhi pembayaran utangnya maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara *Debt to Equity Swap*, yaitu para kreditur mendapat posisi sebagai pemegang ekuitas PT Istaka Karya (Persero) sebagai pengganti pembayaran atas utang PT Istaka Karya (Persero) kepada para kreditur.

Pada tanggal 23 Januari 2013 terdapat Putusan Pengesahaan Perdamaian (Homologasi) No.23/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.jo atas PT Istaka Karya (Persero).

Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Desember 2012 sebagai berikut:

- a. Khusus hutang kreditur konkuren akan dilakukan pembayaran sebagian diawal sebesar 3%;
- b. Sisa hutang sebesar 97% dikonversi menjadi penyertaan saham sementara tanpa hak suara, dan
- c. Saham dapat ditarik kembali pada tahun ke 9 sesuai dengan proyeksi PT Istaka Karya (Persero)

Pembayaran piutang akan dilakukan secara bertahap ditahun ke 9 sampai maksimal 5 tahun.

Pada 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan membukukan penyisihan penurunan piutang kepada PT Istaka Karya (Persero) masing-masing sebesar Rp 75.144.307.748 atau sebesar 100% dari nilai piutang.

Berdasarkan surat dari Perusahaan No. 483/WK/Dir/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. pihak perusahaan meminta PT Istaka Karya untuk menyelesaikan utangnya dengan skema penyelesaian sbb:

1. Pembayaran awal senilai 3% atau sebesar Rp 2.549.586.465.
2. Pemenuhan sisa pembayaran senilai 97% dari jumlah utang dalam bentuk penyertaan saham sementara (*Debt to Equity Swap*) sebesar Rp 82.436.629.045.

Berdasarkan surat di atas diterima jawaban PT Istaka Karya dengan nomor surat DU/2013-131 tanggal 15 Mei 2013 yang berisi :

1. Pembayaran awal 3% bersumber dari pencairan piutang atas Eskalasi Proyek SKSD.
2. Sisa pembayaran sebesar 97% dalam bentuk penyertaan saham, sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Keuangan dan Instansi terkait.

**7. OTHER RECEIVABLES (Continued)**

**b. Other Receivables Long Term (Continued)**

*Inability of PT Istaka Karya (Persero) in fulfilling its debt payments, caused the settlement of debt using Debt to Equity Swap for solving its debt, means the creditors get a position as an equity holder of PT Istaka Karya (Persero) in line of of payment for a debt PT Istaka Karya (Persero) to the creditors.*

*On the date January 23, 2013, there is an Approval of the ratification Peace (Homologation) No. 23/PKPU/2012/ PN.Niaga. JktPst.jo of PT Istaka Karya (Persero).*

*Peaceful Agreement dated December 19, 2012 as follows:*

- a. Specially unsecured creditor's liability will be settled in the early part of 3%;*
- b. Remaining liability of 97% will be converted to be the temporary stock investment with no voting right, and*
- c. The stock may be withdrawn at the 9th year in accordance with the projection of PT Istaka Karya (Persero).*

*The payment of receivables will be settled partially at the 9th year for a maximum of 5 years.*

*As of December 31, 2014 and 2013, the Company recorded allowance for Impairment receivable to PT Istaka Karya (Persero) amounted to Rp 75,144,307,748, respectively or by 100 of value of accounts receivable.*

*According to the Company's letters No. 483/WK/Dir/2013 dated May 7, 2013 that concerns to The Execution of Decision to Ratification of Peace (Homologation) No. 23/PKPU/2012/PN.Niaga.JKT.PST. The Company asked to PT Istaka Karya to resolve the debt with this settlement scheme:*

- 1. The initial payment valued at 3% or in amount Rp 2,549,586,465.*
- 2. The fulfillment of the remaining payment valued at 97% from the total debt in the form of temporary investments in share of stocks (Debt to Equity Swap) for Rp 82,436,629,045.*

*Based on the letters above, the company has received the answer from PT Istaka Karya with the letters No. DU/2013-131 dated May 15, 2013 that contains:*

- 1. The initial payment of 3% from the disbursement of receivables of the escalation SKSD project.*
- 2. The remaining payment of 97% in the form of investments in share of stocks, is being reviewed by the Ministry of Finance and related institutions.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PIUTANG LAIN-LAIN (Lanjutan)**

**b. Piutang Lain-lain Jangka Panjang (Lanjutan)**

Piutang lain-lain kepada PT Pejagan Pemalang Tol Road adalah piutang kepada entitas asosiasi untuk modal kerja.

Piutang lain-lain kepada PT Kertas Leces (Persero) adalah piutang bunga atas pembayaran angsuran termin.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai piutang cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya piutang lain-lain di kemudian hari.

**7. OTHER RECEIVABLES (Continued)**

**b. Other Receivables Long Term (Continued)**

Other receivable to PT Pejagan Pemalang Tol Road represent receivable to associate entity for working capital.

Other receivable to PT Kertas Leces (Persero) represent interest receivable of receivable installment.

Management believes that the allowance for impairment of receivables is adequate to cover possible uncollectible other receivables in the future.

**8. PERSEDIAAN**

	2014 Rp	2013 Rp
Bahan Baku		
Bahan Baku Kontruksi	327.086.547.389	281.318.864.784
Beton Precast	21.178.898.885	9.892.431.826
Jumlah Bahan Baku	348.265.446.274	291.211.296.610
Persediaan dalam Pengembangan		
Tanah Belum Dikembangkan	795.739.844	795.739.844
Aset Real Estat	254.619.734.630	--
Total Persediaan dalam Pengembangan	255.415.474.474	795.739.844
Persediaan untuk Dijual		
Tanah Kavling Siap Bangun	598.345.228	598.345.228
Total Persediaan untuk Dijual	598.345.228	598.345.228
Jumlah	604.279.265.976	292.605.381.682
Dikurangi: Penurunan Nilai Persediaan	--	(378.727.364)
<b>Jumlah</b>	<b>604.279.265.976</b>	<b>292.226.654.318</b>

**8. INVENTORIES**

Raw Material
Construction Raw Material
Precast Concrete
Total Raw Material
Inventory in Progress
Undeveloped Land
Real Estate Assets
Total Inventory in Progress
Inventory Ready for Sale
Land Ready for Sale
Total Inventory Ready for Sale
Total
Less: Impairment of Inventories
<b>Total</b>

Persediaan precast merupakan persediaan produk beton unit usaha precast yang terdiri dari persediaan barang jadi produk beton, persediaan bahan baku dan bahan penolong serta persediaan bahan dalam proses.

Persediaan bahan baku konstruksi merupakan persediaan material dan perlengkapan proyek yang masih tersedia di gudang proyek yang dimiliki oleh Perusahaan. Persediaan material terdiri dari persediaan besi, semen, solar, tiang pancang, keramik/marmer, traveler form, geotextile, aspal dan batu.

Persediaan tanah kavling merupakan persediaan tanah Perusahaan di Perumahan Bukit Diponegoro (Semarang) yang memiliki luas tanah sebesar 2.469 m2 dengan status kepemilikan tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dengan masa berlaku sampai dengan tahun 2030. Seluruh kepemilikan atas tanah tersebut atas nama Perseroan.

Terdapat reklasifikasi properti investasi menjadi aset real estat yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 48.1/WK/DK/2014 tanggal 15 Juli 2014, mengenai pengalihan properti investasi tanah dan bangunan menjadi aset real estat untuk dijual. Nilai buku atas tanah dan bangunan yang dialihkan menjadi aset real estat pada tanggal 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 107.994.333 dan Rp 43.540.861.450. Reklasifikasi tersebut dilakukan sehubungan dengan perubahan tujuan kepemilikan tanah dan gedung Cawang. Semula Manajemen memperuntukkan gedung tersebut sebagai properti investasi, akan tetapi berubah menjadi aset real estat untuk dijual (Catatan 16).

The precast inventories represents inventory of concrete products of precast business unit consisting of concrete finished good, raw materials and supporting materials and materials in the process.

The raw material inventories represent construction materials and equipment supply projects which still available at the warehouse of existing project owned by the Company. The raw material consists of iron, cement, diesel, pile, ceramic/marble, traveler form, geotextile, asphalt, and stone.

Land inventories are land owned by the Company in Bukit Diponegoro Housing (Semarang), which has a land area of 2,469 sgm with a certificate of land ownership status Right to Build (HGB), valid until year 2030. The entire ownership of land on behalf of the Company.

There reclassification of investment properties into real estate assets undertaken by the Decree of Commissioners No 48.1 / WK / DK / 2014 dated July 15, 2014, regarding the transfer of land and building investment properties into real estate assets for sale. The book value of land and buildings are transferred to property, real estate on December 31, 2014 amounted to Rp 107 994 333 and Rp 43,540,861,450, respectively. The reclassification is done with respect to the change of ownership of Cawang land and building purposes. Originally Management consign the building as an investment property, but changing to be real estate assets held for sale (Note 16).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**8. PERSEDIAAN (Lanjutan)**

Biaya persediaan dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP).

Berdasarkan penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun, Manajemen membentuk penurunan terhadap nilai persediaan pada 31 Desember 2014 adalah Rp Nihil dan per 31 Desember 2013 sebesar Rp 378.727.364.

Nilai bersih yang dapat di realisasikan adalah taksiran harga jual wajar dikurangi taksiran biaya untuk memperoleh atau menjual barang jadi.

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA**

**a. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Pendek**

	2014 Rp	2013 Rp
Pihak-pihak Berelasi	1.442.130.580.567	1.083.452.352.377
<i>Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang</i>	--	--
Jumlah Pihak-pihak Berelasi	<u>1.442.130.580.567</u>	<u>1.083.452.352.377</u>
Pihak-pihak Ketiga	2.451.544.875.217	2.145.743.116.214
<i>Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang</i>	--	--
Jumlah Pihak-pihak Ketiga	<u>2.451.544.875.217</u>	<u>2.145.743.116.214</u>
<b>Jumlah Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa</b>	<b><u>3.893.675.455.784</u></b>	<b><u>3.229.195.468.591</u></b>

Rincian saldo Tagihan Bruto Kepada Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Pihak-Pihak Berelasi</b>		
PT Pejagan Pemalang Toll Road	600.003.720.995	--
JO Waskita - Trinita	159.511.463.577	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	70.835.430.374	135.493.909.965
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	89.185.514.438	180.749.014.161
JO Kawahapejaya Indonesia	85.849.612.073	--
PT Semen Padang (Persero)	75.587.337.455	23.124.315.252
PT Rekayasa Industri (Persero)	68.984.134.954	102.292.499.074
PT Angkasa Pura Hotel	49.333.352.741	--
PT Jasa Marga Bali Tol	--	120.132.210.867
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	38.973.870.992	135.234.080.871
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	35.978.088.761	--
PT Kereta Api (Persero)	32.986.232.121	41.531.551.077
PT Angkasa Pura II (Persero)	25.223.115.833	12.578.598.641
PT Transmarga Jatim Pasuruan	21.255.111.828	90.643.232.631
PT Trans Marga Jateng	19.863.818.558	24.016.582.842
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	--	--
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	14.441.805.828	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.825.530.839	--
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	13.397.614.311	--
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	12.799.348.781	66.383.757.798
PT PN III	12.046.160.344	--
PT Angkasa Pura I (Persero)	--	118.864.054.209
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)	--	22.201.568.000
Lainnya (di bawah Rp 10 Milyar)	2.049.315.764	10.206.976.989
<b>Jumlah Pihak-Pihak Berelasi</b>	<b><u>1.442.130.580.567</u></b>	<b><u>1.083.452.352.377</u></b>

**8. INVENTORIES (Continued)**

The cost of inventories using the FIFO (First in First Out) method.

Based on the review of inventories at the end of the year, Management has provided an allowance for impairment losses of inventory as of December 31, 2014 amounted to Rp Nil and December 31, 2013 amounted to Rp 378,727,364.

The net value that can be realized is the estimate selling price less the estimated reasonable cost to acquire or sell goods.

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS**

**a. Gross Amount Due From Customers  
Short Term**

Related Parties
<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Gross Amount Due From Customers</i>
<b>Total Related Parties</b>
Third Parties
<i>Less: Allowance for Impairment Losses of Gross Amount Due From Customers</i>
<b>Total Third Parties</b>
<b>Total Gross Amount Due from Customers</b>

The details of gross amount due from customers to related parties are as follows:

<b>Related Parties</b>
PT Pejagan Pemalang Toll Road
JO Waskita - Trinita
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
JO Kawahapejaya Indonesia
PT Semen Padang (Persero)
PT Rekayasa Industri (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel
PT Jasa Marga Bali Tol
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
PT Kereta Api (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Transmarga Jatim Pasuruan
PT Trans Marga Jateng
PT Dok Kodja Bahari (Persero)
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT PN III
PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)
Others (less than Rp 10 Billions each)
<b>Total Related Parties</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**a. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Pendek (Lanjutan)**

Rincian saldo Tagihan Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga sebagai berikut:

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**a. Gross Amount Due From Customers  
Short Term (Continued)**

The details of gross amount due from customers to third parties are as follows:

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
Kementerian Pekerjaan Umum	359.924.081.238	434.261.861.176	Ministry of Public Works
Pemerintah - pemerintah Daerah	516.122.850.749	411.891.447.204	District Governments
The Ministry of Transport and Communication of Republica Democratica De Timor Leste	295.202.306.538	--	The Ministry of Transport and Communication of Republica Democratica De Timor Leste
The Ministry of Public Work of Republica Democratica De Timor Leste	17.192.017.800	--	The Ministry of Transport and Communication of Republica Democratica De Timor Leste
PT Daya Radar Utama	138.548.936.219	73.762.727.906	PT Daya Radar Utama
PT Basko Minang	--	118.181.818.182	PT Basko Minang
PT Ade Pede Realty	73.924.522.169	35.671.338.950	PT Ade Pede Realty
PT Pembangunan Jaya Ancol	72.135.833.435	--	PT Pembangunan Jaya Ancol
PT Broadbiz Asia	56.800.184.419	125.800.499.114	PT Broadbiz Asia
PT Harmas Jalesveva	53.262.678.071	22.961.736.818	PT Harmas Jalesveva
Universitas Sebelas Maret	53.028.005.063	--	University of Sebelas Maret
PT Toba Pengembang Sejahtera	144.103.338.820	--	PT Toba Pengembang Sejahtera
PT BPD Riau	--	242.166.380.177	PT BPD Riau
PT Sinoma Engineering Indonesia	44.289.376.613	--	PT Sinoma Engineering Indonesia
PT Citra Abadi Mandiri	40.430.558.773	12.852.400.000	PT Citra Abadi Mandiri
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	40.241.585.000	--	The National Library of Republic of Indonesia
Telkom Property (PT graha Sarana Duta)	38.410.660.392	--	Telkom Property (PT graha Sarana Duta)
Konsorsium Interchange STA 11	34.387.906.644	--	Consortium of Interchange STA 11
PT Halla Mohana	29.560.808.000	--	PT Halla Mohana
PT ITC Polonia	29.011.745.455	--	PT ITC Polonia
PT Bhumyamca	26.069.075.871	--	PT Bhumyamca
PT Mega Pasanggrahan Indah	25.569.491.974	105.006.116.533	PT Mega Pasanggrahan Indah
PT PGE	25.013.920.000	--	PT PGE
PT Trikarya Graha Utama	90.642.178.264	--	PT Trikarya Graha Utama
Hubei Hongyuan Power Engineering, Co. Ltd.	--	22.535.531.999	Hubei Hongyuan Power Engineering, Co. Ltd.
PT Banyu Daya Perkasa	21.607.836.860	--	PT Banyu Daya Perkasa
PT Pardika Wisthi Sarana	19.969.007.994	102.984.631.130	PT Pardika Wisthi Sarana
PT Hidro Rizki Ilahi	18.651.652.728	--	PT Hidro Rizki Ilahi
Bin Laden Contractor Group LLC	17.176.111.375	54.904.933.982	Bin Laden Contractor Group LLC
PT Sarana Teluk Sumber	16.979.704.454	--	PT Sarana Teluk Sumber
Mahkamah Agung RI	16.774.149.892	--	The Supreme Court of Justice of Republic Indonesia
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	16.000.604.096	--	PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk
PT Metropolitan Karyadeka Development	13.552.154.954	--	PT Metropolitan Karyadeka Development
PT Sentul City, Tbk	13.526.612.835	15.602.580.000	PT Sentul City, Tbk
Samsung C&T Corporation	13.220.476.521	--	Samsung C&T Corporation
PT P3MPI	12.947.343.500	--	PT P3MPI
PT Mandara Permai	12.165.465.689	99.887.041.210	PT Mandara Permai
PT Bangun Investa Graha	11.696.170.912	--	PT Bangun Investa Graha
Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	--	28.381.161.238	Procurement Policy Institute Goods / Services of Government
PT Puriampora Intipratama	--	45.530.334.749	PT Puriampora Intipratama
PT Suryamas Dutamakmur Tbk	--	20.744.431.038	PT Suryamas Dutamakmur Tbk
PT Bosowa Terminal Mataram	--	12.104.398.773	PT Bosowa Terminal Mataram
PT Inti Utama Dharma RE	--	14.053.679.988	PT Inti Utama Dharma RE
PT Indonesia Paradise Island	--	13.441.919.499	PT Indonesian Paradise Island
PT Gapura Kencana Abadi	--	17.314.680.450	PT Gapura Kencana Abadi
PT Sumber Mesin Raya	--	30.957.720.696	PT Sumber Mesin Raya
PT Patria Maritim Industry	--	11.758.234.583	PT Patria Maritim Industry
Lainnya (di bawah Rp 10 Miliar)	43.405.521.900	72.985.510.819	Others (less than Rp 10 Billions each)
<b>Jumlah Pihak-Pihak Ketiga</b>	<b>2.451.544.875.217</b>	<b>2.145.743.116.214</b>	<b>Total Third Parties</b>



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**a. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Pendek (Lanjutan)**

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan Tagihan Bruto Pemberi Kerja Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

**1. Pemerintah The Democratic of Timor Leste – Proyek  
Upgrading Existing Suai Airport**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan No 1045.2/WK/Dir/2013 untuk Pembangunan Upgrading Of Existing Suai Airport Proyek di Timor Leste tanggal 11 Maret 2014 dengan nilai sebesar USD 67.671.189,95.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 247.012.288.316, dan laba yang diakui sebesar Rp 41.598.986.019, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan belum ada.

**2. Kementerian Pekerjaan Umum - Proyek  
Pembangunan Bendungan Raknamo**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan No HK.02.03/SNVT-PJSA-NTT.II/PKSDA-I/223/XI/2014 untuk Proyek Pembangunan Bendungan Raknamo tanggal 4 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 646.009.581.818.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 52.202.250.000, dan laba yang diakui sebesar Rp 13.044.717.764, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan belum ada.

**3. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga – Proyek  
Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung  
Melayu**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan No 01/SPP-KKDM/XI/2014 untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu tanggal 4 Desember 2014 dengan nilai sebesar Rp 1.167.705.617.273.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 31.878.388.250, dan laba yang diakui sebesar Rp 4.099.700.511, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan belum ada.

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**a. Gross Amount Due From Customers  
Short Term (Continued)**

Other important informations regarding to gross amount due from customers as of December 31, 2014 are as follows:

**1. The Government of The Democratic of Timor Leste -  
Upgrading Existing Suai Airport Project**

The Company entered into a work contract No 1045.2/WK/Dir/2013 on Development of Upgrading of Existing Suai Airport Project in Timor Leste dated March 11, 2014 with the amount of USD 67,671,189.95.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 247,012,288,316, and the gross margin which recognized is amounted to Rp 41,598,986,019, while there is no account receivable which has been charged.

**2. The Ministry of Public Work – Development of  
Raknamo Dam Project**

The Company entered into a work contract No HK.02.03 /SNVT-PJSA-NTT.II/PKSDA-I/223/XI/2014 for Development of Raknamo Dam Project dated December 4, 2014 with the amount of Rp 646,009,581,818.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 52,202,250,000, and the gross margin which recognized is amounted to Rp 13,044,717,764, while there is no account receivable which has been charged.

**3. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga –  
The Development of Bekasi-Cawang-Kampung  
Melayu Toll Road Project**

The Company entered into a work contract No 01/SPP-KKDM/XI/2014 on The Development of Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Toll Road Project dated December 4, 2014 with the amount of Rp 1,167,705,617,273.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 31,878,388,250, and the gross margin which recognized is amounted to Rp 4,099,700,511, while there is no account receivable which has been charged.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**a. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Pendek (Lanjutan)**

**4. PT Pejagan Pemalang Toll Road – Proyek Jalan Tol  
Pejagan – Pemalang Seksi I**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan No 01/KJP/PPTR/2014 untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi I tanggal 25 Agustus 2014 dengan nilai sebesar Rp 1.123.112.137.232.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 337.156.602.137, dan laba yang diakui sebesar Rp 65.244.379.088, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan belum ada.

**5. KSO Waskita – Trinititi – Proyek Brooklyn Alam  
Sutera**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Brooklyn (Suite, Soho, Office) Alam Sutera tanggal 20 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp 517.010.413.829.

Realisasi beban pokok pendapatan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 237.312.827.971, dan laba yang diakui sebesar Rp 32.553.195.606, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 99.534.374.268.

**6. PT Daya Radar Utama – Proyek Graving Dock  
Noahtu**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Graving Dock dan Penyeberangan Dermaga Noahtu Bandar Lampung No. 1129/SPERJ/DRU-WKA pada tanggal 25 Juni 2013 dengan nilai sebesar Rp 243.448.984.057

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 157.078.635.753, dan laba yang diakui sebesar Rp 19.013.275.100, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 41.297.272.097.

**7. PT Mega Pesanggrahan Indah – Proyek Urbana  
Cinere**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk pekerjaan Proyek Urbana Cinere berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor: 0956/MPI/OPRS-2-a-456/X/12 tanggal 1 Februari 2013 sebesar Rp 239.920.909.901.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 268.118.692.456, dan laba yang diakui sebesar Rp 36.007.820.560, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 242.457.916.834.

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**a. Gross Amount Due From Customers  
Short Term (Continued)**

**4. PT Kresna Kusuma Dyandra Marga – The  
Development of Bekasi-Cawang-Kampung Melayu  
Toll Road Project**

The Company entered into a work contract No 01/KJP/PPTR/2014 on Pejagan Pemalang Toll Road-Section I Project dated August 25, 2014 with the amount of Rp 1,123,112,137,232.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 337,156,602,137 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 65,244,379,088, while there is no account receivable which has been charged.

**5. JO Waskita – Trinititi –Brooklyn Alam Sutera Project**

The Company entered into a work contract on Development of Brooklyn (Suite, Soho, Office) Alam Sutera Project dated December 20, 2013 with the amount of Rp 517,010,413,829.

The realization of cost of good sold in 2014 for this project is amounted to Rp 237,312,827,971 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 32,553,195,606, while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 99,534,374,268.

**6. PT Daya Radar Utama –Graving Dock Noahtu  
Project**

The Company entered into works contract on Development of Graving Dock and Penyeberangan Dermaga Noahtu Bandar Lampung Project, No. 1129/SPERJ/DRU-WKA dated June 25, 2013 amounted to Rp 243,448,984,057.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 157,078,635,753 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 19,013,275,100, while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 41,297,272,097.

**7. PT Mega Pesanggrahan Indah – Urbana Cinere  
Project**

The Company entered into a work contract of Urbana Cinere Project No: 0956/MPI/OPRS-2-a-456/X/12 dated February 1, 2013 amounted to Rp 239,920,909,901.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 268,118,692,456 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 36,007,820,560, while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 242,457,916,834.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**a. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Pendek (Lanjutan)**

**8. PT Mandara Permai – Proyek Jembatan Kapuk  
Naga**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Jembatan Kapuk Naga No. KNI-1301 001 D0-1 dengan nilai sebesar Rp 238.181.818.182 tanggal 9 Januari 2013.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 199.947.118.307, dan laba yang diakui sebesar Rp 58.294.281.303, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 226.554.058.859.

**9. PT Pardika Wisthi Sarana – Proyek Woodland Park**

Perusahaan memperoleh beberapa kontrak pekerjaan proyek untuk Pembangunan Woodland Park salah satunya pekerjaan No. 030/PWS-SPK/MAINCON/IX /2012 pada tanggal 3 September 2012 dengan nilai sebesar Rp 355.877.272.727.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 290.416.200.063, dan laba yang diakui sebesar Rp 38.547.912.958, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 270.117.501.674.

**10. PT Ade Pede Realty – Proyek Royal Olive  
Residences**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Apartemen The Royal Olive pada tanggal 30 Januari 2013 dengan nilai kontrak menjadi Rp 139.350.000.000.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 217.181.858.838, dan laba yang diakui sebesar Rp 28.019.329.794, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 145.585.166.494.

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**a. Gross Amount Due From Customers  
Short Term (Continued)**

**8. PT Mandara Permai – Kapuk Naga Bridge Project**

*The Company conducted work of Kapuk Naga Bridge Project based on job contract No: KNI-1301 001 D0-1 amounted to Rp 238,181,818,182 dated January 9, 2013.*

*The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 199,947,118,307 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 58,294,281,303, while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 226,554,058,859.*

**9. PT Pardika Wisthi Sarana – Woodland Park Project**

*The Company entered into several works contract of Pembangunan Woodland Park Project one of agreement No: 030/PWS-SPK/MAINCON/IX/2012 dated September 3, 2012 amounted to Rp 355,877,272,727.*

*The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 290,416,200,063 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 38,547,912,958 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 270,117,501,674.*

**10. PT Ade Pede Realty – Royal Olive Residences  
Project**

*The Company entered into work agreement to Development The Royal Olive Apartment dated January 30, 2013 with the value of the contract amounted to Rp 139,350,000,000.*

*The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 217,181,858,838 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 28,019,329,794 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 145,585,166,494.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**b. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Panjang**

	2014	2013
	Rp	Rp
Pihak-pihak Berelasi	88.153.619.011	20.596.117.612
<i>Dikurangi</i> : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	<u>(5.058.797.015)</u>	<u>(5.058.797.015)</u>
Jumlah Pihak-pihak Berelasi	<u>83.094.821.996</u>	<u>15.537.320.597</u>
Pihak-pihak Ketiga	366.073.169.088	86.254.687.144
<i>Dikurangi</i> : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	<u>(72.323.935.184)</u>	<u>(18.711.661.837)</u>
Jumlah Pihak-pihak Ketiga	<u>293.749.233.904</u>	<u>67.543.025.307</u>
Jumlah Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	<u><u>376.844.055.900</u></u>	<u><u>83.080.345.904</u></u>

*Related Parties*  
Less: Allowance for Impairment Losses of Gross  
Amount Due From Customers  
*Total Related Parties*

*Third Parties*  
Less: Allowance for Impairment Losses of Gross  
Amount Due From Customers  
*Total Third Parties*  
**Total Gross Amount Due from Customers**

Rincian saldo Tagihan Bruto Kepada Pihak-pihak Berelasi sebagai berikut:

*The details of gross amount due from customers to related parties are as follows:*

	2014	2013
	Rp	Rp
Pihak-Pihak Berelasi		
PT Jasa Marga Bali Tol	48968176099	--
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	18108525890	--
PT Dok Kodja Bahara (Persero)	16467837642	16467837642
Perum Perumnas	--	4128279970
Lainnya (di bawah Rp 10 Milyar)	4609079380	--
Jumlah Pihak-Pihak Berelasi	88153619011	20596117612

*Related Parties*  
  
  
  
  
  
**Total Related Parties**

Rincian saldo Tagihan Bruto Kepada Pihak-pihak Ketiga sebagai berikut:

*The details of gross amount due from customers to third parties are as follows:*

	2014	2013
	Rp	Rp
Pihak-Pihak Ketiga		
Kementerian Pekerjaan Umum	1,14172E+11	--
PT Basko Minang	83181818182	--
PT BPD Riau	46740016540	--
Hubei Hongyuan Power Engineering, CO. Ltd	22535531999	--
PT Putera Mataram Indah Wisata	19543699607	19543699607
Kopkar PT IDEC Awi Tarakan	--	18570928760
PT Hermes Realty Indonesia	18023402070	--
PT Prolindo Cipta Nusantara	--	12717472863
Lainnya (di bawah Rp 10 Milyar)	61876860790	35422585914
Jumlah Pihak-Pihak Ketiga	3,66073E+11	86254687144

*Third Parties*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
**Total Third Parties**

Mutasi penyisihan penurunan nilai tagihan bruto adalah sebagai berikut:

*The movements of allowance for impairment losses of gross amount due from customers are as follows:*

	2014	2013
	Rp	Rp
Saldo Awal Tahun	(23.770.458.852)	(15.734.738.162)
Penambahan Penyisihan	(53.612.273.347)	(8.035.720.690)
Pemulihan Penyisihan	--	--
Saldo Akhir Tahun	<u><u>(77.382.732.199)</u></u>	<u><u>(23.770.458.852)</u></u>

*Beginning Balance of the Year*  
*Addition in the Current Year*  
*Recovery in Current Year*  
**Ending Balance of the Year**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**b. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Panjang (Lanjutan)**

Penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan bruto pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 53.612.273.347 meliputi tagihan bruto kepada PT Bank BPD Riau atas putusan perkara hukum (Catatan 49) sebesar Rp 46.740.016.540, kepada PT Indonesia Paradise sebesar Rp 4.710.119.108, Pemda-pemda Daerah Rp 892.458.408, Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 318.551.962, PT Candi Baru sebesar Rp 415.484.991 dan PT Saipem Indonesia sebesar Rp 535.642.338. Tidak terdapat pemulihan atas penyisihan nilai tagihan bruto pada 31 Desember 2014.

Penyisihan penurunan nilai tagihan bruto pada 31 Desember 2013 sebesar Rp 8.035.720.690, meliputi tagihan bruto kepada PT Putera Mataram Indah Wisata Rp 1.816.143.122, PT Saipem Indonesia Rp 1.874.704.447, PT Tria Talang Emas Rp 1.213.218.364, Pemda Bintan Rp 1.122.926.832, PT Dok Kodja Bahari (Persero) Rp 930.517.045, Dinas Cipta Karya Pemkab Paser Rp 625.000.000 dan PU Kimpraswil Rp 453.210.880. Pada 31 Desember 2013 tidak terdapat pemulihan tagihan bruto.

Manajemen berpendapat bahwa tagihan bruto dapat ditagihkan. Manajemen juga berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai tagihan bruto adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya tagihan bruto di kemudian hari.

Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan Tagihan Bruto Pemberi Kerja Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

**1. PT Bank Riau Kepri – Proyek Menara Dang Merdu**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk Pembangunan Menara Dang Merdu No. 06/PKS/2010; 418/WK/KONT/WB/2010 dengan nilai sebesar Rp 195.426.363.636. Terdapat addendum I, berdasarkan Akta Notaris Yuvita Adriana No. 14 tanggal 14 Januari 2012 dengan perubahan pada nilai kontrak menjadi sebesar Rp 202.503.636.364.

Berdasarkan Surat Sanggup Bayar tanggal 29 Februari 2012, PT Bank Riau Kepri berjanji tanpa syarat untuk melakukan pembayaran 14 (empat belas) hari setelah Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST I).

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**b. Gross Amount Due From Customers  
Long Term (Continued)**

*The allowance for impairment losses of gross amount due from customers as of December 31, 2014 amounted to Rp 53,612,273,347 including law case decision (Note 49) amounted to Rp 46,740,016,540, to PT Indonesia Paradise amounted to Rp 4,710,119,108, District Government amounted to Rp 892,458,408, Public Work Department amounted to Rp 318,551,962, PT Candi Baru amounted to Rp 415,484,991 and PT Saipem Indonesia amounted to Rp 535,642,338. There is no recovery of the allowance for impairment losses of gross amount due from customers as of December 31, 2014.*

*The allowance for impairment losses of gross amount due from customers as of December 31, 2013 amounted to Rp 8,035,720,690, including gross amount from PT Putera Mataram Indah Wisata Rp 1,816,143,122, PT Saipem Indonesia Rp 1,874,704,447, PT Tria Talang Emas Rp 1,213,218,364, Pemda Bintan Rp 1,122,926,832, PT Dok Kodja Bahari (Persero) Rp 930,517,045, Dinas Cipta Karya Pemkab Paser Rp 625,000,000 and PU Kimpraswil Rp 453,210,880. As of December 31, 2013 there is no recovery of gross amount due from customers.*

*Management believes that gross amount due from customers possible to collect. Management also believes that allowance for impairment losses of gross amount due from customers is sufficient to cover the possible losses on the uncollectible gross amount due from customers in the future.*

*Other important informations regarding to gross amount due from customers as of December 31, 2014 are as follows:*

**1. PT Bank Riau Kepri – Proyek Menara Dang Merdu**

*The Company entered into a work contract of Pembangunan Menara Dang Merdu Project No. 06/PKS/2010; 418/WK/KONT/WB/2010 amounting to Rp 195,426,363,636. There is an addendum I, based on Notarial Yuvita Adriana Deed No.14, dated January 14, 2012 with the change in the value of the contract to Rp 202,503,636,364.*

*Based on Promissory Notes dated February 29, 2012, PT Bank Riau committed to make payment 14 (fourteen) days after the Official Project Handover I (BAST I).*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**b. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Panjang (Lanjutan)**

**1. PT Bank Riau Kepri – Proyek Menara Dang Merdu  
(Lanjutan)**

PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemohon untuk diadakan arbitrase melawan PT Bank Riau Kepri sebagai termohon. Arbitrase ini diajukan berdasarkan pekerjaan Pemohon yang telah selesai 100% atas proyek Menara Dang Merdu sesuai dengan kontrak perjanjian pekerjaan No. 65/PKS/2010- No. 418/WK/KONT/WB/2010 tanggal 26 Juli 2010, dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 222.715.898.000

Sebelumnya telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun upaya mediasi tersebut mengalami kegagalan. Sesuai dengan klausul penyelesaian perkara yang tercantum dalam kontrak perjanjian, maka perkara ini diselesaikan melalui arbitrase di BANI.

Nilai tuntutan yang diajukan Perusahaan melalui arbitrase ini merupakan ganti rugi biaya operasional gedung dan beban bunga yang telah ditanggung oleh pemohon, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai Pekerjaan sebesar Rp 222.715.898.000.
- b. Ganti rugi, biaya dan bunga sebesar Rp 85.858.538.006.

Pada tanggal 6 Maret 2014, BANI mengeluarkan amar putusannya melalui keputusan No. 14.369/III/BANI/ED atas perkara permohonan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pemohon melawan PT Bank Riau Kepri sebagai termohon untuk proyek Menara Dang Merdu, dengan bunyi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan arbitrase untuk sebagian.
- Menghukum dan/ atau memerintahkan termohon untuk sekaligus membayar kepada pemohon harga pekerjaan sebesar Rp 214.969.000.000 (dua ratus empat belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak putusan ini dibacakan.

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**b. Gross Amount Due From Customers  
Long Term (Continued)**

**1. PT Bank Riau Kepri – Proyek Menara Dang Merdu  
(Continued)**

PT Waskita Karya (Persero) Tbk has filed an arbitration appeal to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) as an applicant to conduct the arbitration against PT Bank Riau Kepri as respondent. The arbitration is proposed based on the work of the applicant is completed 100% of Menara Dang Merdu Project according to the work agreement No. 65/PKS/2010-No.418/WK/KONT/WB/2010 dated July 26, 2010 with the contract value after addendum amounted to Rp 222,715,898,000.

Previously has been attempted peace through mediation which facilitated by the State Attorney (JPN). But the mediation efforts have failed. The completion of the case in accordance with clause contained in the contract agreement, then the case is settled by arbitration in BANI.

The value of claims which filed by the Company through arbitration is the compensation of building operating costs and interest expense which has been incurred by the applicant, with the following details :

- a. The work value of Rp 222,715,898,000.
- b. The compensation, costs and interest amounted to Rp 85,858,538,006.

On the date of March 6, 2014, BANI issued its decision through decision No 14.369/III/BANI/ED on the application case of PT Waskita Karya (Persero) Tbk as the applicant against PT Bank Riau Kepri as the respondent for Menara Dang Merdu Project which the following decisions:

- Accept partially of arbitration application.
- Punish and/ or order the respondent to pay the entire payment to applicant the price of work amounted to Rp 214,969,000,000 (two hundred fourteen billion nine hundred sixty nine million rupiah) within 30 (thirty) days since the verdict was read.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**b. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Panjang (Lanjutan)**

**1. PT Bank Riau Kepri – Proyek Menara Dang Merdu  
(Lanjutan)**

Pada tanggal 2 Juni 2014, PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menerima 95% dari Rp. 214.969.000.000 (dua ratus empat belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) atau sebesar Rp. 204.220.550.000 (dua ratus empat milyar dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Saldo Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa PT BPD Riau per 30 Juni 2014 sebesar Rp. 46.470.016.540 (empat puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh juta enam belas ribu lima ratus empat puluh rupiah) merupakan saldo Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa yang besar kemungkinan sudah tidak dapat ditagih lagi. Perusahaan telah membukukan penyisihan penurunan nilai piutang sebesar 100% terhadap saldo Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa PT BPD Riau.

Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan Perusahaan belum melakukan penghapusan piutang dikarenakan harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah,

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 235.513.209.503, dan laba yang diakui sebesar Rp 6.653.170.674, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 195.426.363.637.

**2. PT Jasamarga Bali Tol - Proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2 dan Paket 4**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk No. 002/SPP-JBT/2012 dengan nama paket STA 2+970 sd STA 5+3,8 (Main Road) tanggal 8 Februari 2012. Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan untuk No. 004/SPP-JBT/2012 dengan nama paket STA 6+092 sd STA 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Pelebaran Akses Pelabuhan STA 0+000 s.d STA 2+200, dan Persimpangan Pesanggaran di Ngurah Rai By Pass tanggal 8 Februari 2012.

Perusahaan telah menyampaikan surat No. 43/WK/DS/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Klaim Tiang Pancang akibat deviasi ketidaksesuaian data tender dengan kondisi aktual dimana Perusahaan mengajukan sebesar Rp. 43.201.574.139.

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**b. Gross Amount Due From Customers  
Long Term (Continued)**

**1. PT Bank Riau Kepri – Proyek Menara Dang Merdu  
(Continued)**

On June 2, 2014, PT Waskita Karya (Persero) Tbk has received 95% of the Rp. 214,969,000,000 (two hundred and fourteen billion nine hundred and sixty-nine million rupiah), or Rp. 204 220 550 000 (two hundred and four billion two hundred and twenty million five hundred fifty thousand rupiah).

Gross Amount Due from Customers balance to the Customer PT BPD Riau as of June 30, 2014 amounted to Rp. 46,470,016,540 (forty-six billion four hundred seventy million sixteen thousand five hundred and forty rupiah) is the Gross Amount Due from Customers balance has a great possibility can not be billed again. The Company has recorded a allowance for impairment receivable amounted to 100% of the gross receivables balance to the Customers PT BPD Riau.

As of the date this report the Company has not made the elimination of receivables due to the need to pay attention to the provisions in Regulation of the Minister of Finance Republic of Indonesia (PMK) No. 31/PMK.07/2005 Procedures for Submission of Proposal, Research, and Determination Elimination receivables State Company.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 235,513,209,503 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 6,653,170,674 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 195,426,363,637.

**2. PT Jasamarga Bali Tol - Toll Road Project Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Package 2 and Package 4**

The Company entered into a work contract No. 002/SPP-JBT/2012 with a package name STA 2+970 to STA 5+3.8 (Main Road) dated February 8, 2012. The Company entered into a work contract No. 004 /SPP-JBT/2012 with a package name STA 6+092 to STA 8+122 (Main Road), Simpang Susun Benoa, Widening Access Port STA 0+000 to STA 2+200, and Intersections Pesanggaran at Ngurah Rai Bypass date February 8, 2012.

The Company has submitted a letter No. 43/WK/DS/2013 dated May 13, 2013 on Claims Piles due to deviation of the data mismatch tender with the actual conditions in which the Company filed a Rp. 43,201,574,139.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**b. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Panjang (Lanjutan)**

**2. PT Jasamarga Bali Tol - Proyek Jalan Tol Nusa Dua-  
Ngurah Rai-Benoa Paket 2 dan Paket 4 (Lanjutan)**

Perusahaan dan PT Jasamarga Bali Tol telah menandatangani Berita Acara Penunjukkan Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah/Kurang No. 028/BA-JBT/VIII/2014 dan No. 01/BA/DS/BN2/2014 tanggal 19 Agustus 2014, dan No. 029/BA-JBT/VIII/2014 dan No. 01/BA/DS/BN4/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang penunjukkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali sebagai Pihak Penengah Untuk Penyelesaian Usulan Pekerjaan Tambah/Kurang.

Berdasarkan Surat No. S-1635/PW22/5/2014 dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali tanggal 30 September 2014 bahwa evaluasi hambatan kelancaran pembangunan penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak pada Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, direncanakan berlangsung selama 20 (Dua Puluh) hari kerja di mulai sejak tanggal 1 Oktober 2014. Sampai tanggal laporan ini diterbitkan, Perusahaan belum menerima hasil evaluasi dimaksud.

Saldo Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa PT Jasamarga Bali Tol Proyek Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2 dan Paket 4 per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 27.948.040.014 dan Rp 21.020.136.085.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 649.989.369.649, dan laba yang diakui sebesar Rp 107.307.456.233, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 660.958.004.110.

**3. PT Palarudhibi Teguh Makmur**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan PTM-WK/MFP/X/02/2011 untuk struktur arsitektur, finishing & landscape tanggal 27 Oktober 2011 sebesar Rp 38.250.000.000. Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan PTM-WK/MFP/IV/4/2013 untuk mekanikal & elektrikal tanggal 9 April 2013 sebesar Rp 11.700.000.000.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama No. 289B/STTP/MFP/IX/13 tanggal 23 September 2013 untuk pekerjaan struktur, arsitektur, finishing & landscape dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama No. 289/BA/STTP/MFP/IX/13 tanggal 23 September 2013 untuk pekerjaan mekanikal & elektrikal, telah dilakukan serah terima pekerjaan antara Perusahaan dengan PT Palarudhibi Teguh Makmur.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**b. Gross Amount Due From Customers  
Long Term (Continued)**

**2. PT Jasamarga Bali Tol - Toll Road Project Nusa Dua-  
Ngurah Rai-Benoa Package 2 and Package 4  
(Continued)**

*The Company and PT Jasamarga Bali Toll has signed the Minutes of Appointment of Mediator The Proposed Settlement Work For Add/Less No. 028 / BA-JBT / VIII / 2014 and No. 01 / BA / DS / BN2 / 2014 dated August 19, 2014, and No. 029 / BA-JBT / VIII / 2014 and No. 01 / BA / DS / BN4 / 2014 dated August 19, 2014 on the appointment of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Representatives of the Province of Bali as The Mediator For Work Proposed Settlement Add/Less.*

*Based on the Letter No. S-1635 / PW22 / 5/2014 from the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) dated 30 September 2014 that the evaluation of barriers to the smooth execution of the contract dispute settlement construction on Highway Development Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, planned to last for 20 (twenty) working days, started on October 1, 2014 . As of the date of this report was released, the Company has not received such evaluations.*

*Balance Gross Claims to User Services PT Jasamarga Bali Toll Highway Project Nusa Dua-Benoa-Ngurah Rai Package Package 2 and 4 per December 31, 2014 amounting to Rp 27,948,040,014 and Rp 21,020,136,085.*

*The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 649,989,369,649 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 107,307,456,233 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 660,958,004,110.*

**3. PT Palarudhibi Teguh Makmur**

*The Company obtained a job contract PTM-WK / MFP / X / 02/2011 for the architectural structure, finishing and landscape October 27, 2011 amounted to Rp 38,250,000,000. The Company obtained a job contract PTM-WK / MFP / IV / 4/2013 for mechanical & electrical April 9, 2013 amounted to Rp 11,700,000,000.*

*Based Handover First No. 289B / STTP / MFP / IX / 13 dated September 23, 2013, to work structure, architecture, and landscape finishing and based handover First No. 289 / BA / STTP / MFP / IX / 13 dated September 23, 2013 in mechanical & electrical work has been carried out handover between the Company and PT Palarudhibi Teguh Makmur.*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**b. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Panjang (Lanjutan)**

**3. PT Palarudhibi Teguh Makmur (Lanjutan)**

Perusahaan telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT Palarudhibi Teguh Makmur, yang terakhir adalah surat No. 115/WK/DG/MFP/214 tanggal 12 September 2014 tentang permintaan serah terima ke-2, *final account*, tagihan progress yang belum dibayarkan, perhitungan pekerjaan tambah kurang dan perhitungan klaim.

Saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa PT Palarudhibi Teguh Makmur per 31 Desember 2014 sebesar Rp 3.940.221.629.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 38.164.663.843, dan laba yang diakui sebesar Rp 5.138.963.430, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 33.171.648.512.

**4. PT Hermes Realty Indonesia**

Perusahaan memperoleh kontrak dari PT Hermes Realty Indonesia untuk pekerjaan pembangunan hotel, parkir & sky bridge Hermes Place Polonia.

Sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Cut Off pekerjaan No. 01/BAPCOP/HPP/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013 dan Laporan Kemajuan Pekerjaan No. 004/HPP/LKP/WK/Div.Reg I/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 bahwa Perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan 92,844%.

Sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Bersama Progress Tagihan Pekerjaan No. BAPB/TCI-HPP/IX/2014/01 tanggal 22 September 2014, bahwa total nilai yang harus dibayarkan adalah Rp 11.641.000.000.

Sesuai kontrak addendum III No. HRI/ADD III-WK/003/2013 tanggal 23 Juli 2013, Perusahaan menagihkan denda keterlambatan pelaksanaan pembayaran.

Perusahaan juga menagihkan kepada PT Hermes Realty Indonesia perihal beban bunga bank/cost of money yang diakibatkan belum ada kejelasan tertahannya proses pembayaran sisa tagihan.

Saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa PT Hermes Realty Indonesia per 31 Desember 2014 sebesar Rp 18.023.402.070..

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**b. Gross Amount Due From Customers  
Long Term (Continued)**

**3. PT Palarudhibi Teguh Makmur (Continued)**

The company has several times sent letters to Palarudhibi Teguh PT Makmur, the latter is the letter No. 115 / WK / DG / MFP / 214 dated 12 September 2014 concerning the request handover to-2, *final accounts*, bills unpaid progress, the calculation of additional work less and calculation of the claim.

The balance of the gross bill to service users Palarudhibi Teguh PT Makmur per December 31, 2014 amounted to Rp 3.940.221.629.

The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 38,164,663,843 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 5,138,963,430 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 33,171,648,512.

**4. PT Hermes Realty Indonesia**

The company secured a contract from PT Hermes Realty Indonesia to work construction of hotels, parking & sky bridge Hermes Place Polonia.

In accordance with the Minutes of Calculation Cut Off employment No. 01 / BAPCOP / HPP / XI / 2013 dated November 29, 2013 and the Work Progress Report No. 004 / HPP / CGC / WK / Div.Reg I / XII / 2013 dated December 2, 2013 that the Company has completed the work of 92.844%.

In accordance with the Minutes of the Joint Calculations Works Progress Billing No. BAPB / TCI-HPP / IX / 2014/01 dated September 22, 2014, that the total value to be paid is Rp 11,641,000,000.

Under the contract addendum III No. HRI / ADD III-WK / 003/2013 dated July 23, 2013, the Company billed a late fee payment execution.

The company also billed to PT Hermes Realty Indonesia concerning bank interest expense / cost of money as a result there is no clarity retention of residual bill payment process.

The balance of the gross amount due from customer for PT PT Hermes Realty Indonesia as of December 31, 2014 amounted to Rp 18,023,402,070.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. TAGIHAN BRUTO KEPADA PENGGUNA JASA  
(Lanjutan)**

**b. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa  
Jangka Panjang (Lanjutan)**

**4. PT Hermes Realty Indonesia (Lanjutan)**

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 55.604.001.474, dan laba yang diakui sebesar Rp 7.094.972.869, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 36.918.585.770.

**5. PT XL Axiata Tbk**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan dari PT XL Axiata Tbk No. 0421-12-HRSS tanggal 25 Januari 2013.

Berdasarkan Berita Acara Pertemuan Jaksa Pengacara Negara (JPN) tanggal 15 Januari 2015 bahwa PT XL Axiata Tbk setuju untuk penyelesaian outstanding 35% nilai kontrak dan retensi 5%.

Saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa PT XL Axiata Tbk per 31 Desember 2014 sebesar Rp 9.492.439.114.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 26.906.923.645, dan rugi yang diakui sebesar Rp 5.661.084.033, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 15.181.475.643.

**6. PT Sari Dumai Sejati**

Perusahaan memperoleh kontrak pekerjaan ekspansi pabrik pengolahan kelapa sawit dari PT Sari Dumai Sejati pada tahun 2012.

Saldo tagihan bruto kepada pengguna jasa PT Sari Dumai Sejati per 31 Desember 2014 sebesar Rp 6.771.825.079.

Realisasi beban pokok pendapatan sampai dengan tahun 2014 atas proyek tersebut adalah sebesar Rp 26.993.503.142, dan laba yang diakui sebesar Rp 1.884.821.416, sedangkan nilai termin yang sudah ditagihkan sebesar Rp 17.302.026.969.

**9. GROSS AMOUNT DUE FROM CUSTOMERS  
(Continued)**

**b. Gross Amount Due From Customers  
Long Term (Continued)**

**4. PT Hermes Realty (Continued)**

*The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 55,604,001,474 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 7,094,972,869 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 36,918,585,770.*

**5. PT XL Axiata Tbk**

*The Company obtained a job contract of PT XL Axiata Tbk No. 0421-12-HRSS dated January 25, 2013.*

*Based on the state attorney Meeting (JPN) dated January 15, 2015 that PT XL Axiata Tbk agreed to the settlement of the outstanding 35% of the contract value and retention of 5%.*

*The balance of the gross amount due from customer for PT XL Axiata Tbk as of December 31, 2014 amounted to Rp 9,492,439,114.*

*The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 26,906,923,645 and the gross loss which recognized is amounted to Rp 5,661,084,033 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 15,181,475,643.*

**6. PT Sari Dumai Sejati**

*The Company obtained a job contract expansion of palm oil mills of PT Sari Dumai True in 2012.*

*The balance of the gross amount due from customer for PT Sari Dumai Sejati as of December 31, 2014 amounted to Rp 6,771,825,079.*

*The realization of cost of good sold until 2014 for this project is amounted to Rp 26,993,503,142 and the gross margin which recognized is amounted to Rp 1,884,821,416 while the account receivable which has been charged is amounted to Rp 17,302,026,969.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PERPAJAKAN**

**10. TAXES**

**a. Pajak Dibayar Dimuka**

**a. Prepaid Taxes**

	2014 Rp	2013 Rp	
Pajak Penghasilan			<i>Income Taxes</i>
Pasal 22 - Tahun 2014	170.154.919	--	<i>Article 22 - 2014</i>
Pasal 22 - Tahun 2013	--	931.227.797	<i>Article 22 - 2013</i>
Pasal 23 - Tahun 2014	2.733.644.449	--	<i>Article 23 - 2014</i>
Pasal 25 - Tahun 2014	256.000.000	--	<i>Article 25 - 2014</i>
Pasal 25 - Tahun 2013	128.000.000	128.000.000	<i>Article 25 - 2013</i>
Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014	197.937.807.199	--	<i>Value Added Tax - 2014</i>
Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013	353.365.790.167	353.365.790.167	<i>Value Added Tax - 2013</i>
Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2012	--	142.859.194.786	<i>Value Added Tax - 2012</i>
<b>Jumlah</b>	<b>554.591.396.734</b>	<b>497.284.212.750</b>	<b>Total</b>

**b. Utang Pajak**

**b. Tax Payables**

	2014 Rp	2013 Rp	
Pasal 21	8.082.711.573	5.645.728.129	<i>Article 21</i>
Pasal 22	--	668.725	<i>Article 22</i>
Pasal 23	2.040.744.933	2.105.553.659	<i>Article 23</i>
Pajak Pertambahan Nilai	75.834.054.462	69.962.465.458	<i>Value Added Tax</i>
Pasal 4 (2) - Final	10.614.169.562	18.004.032.608	<i>Article 4 (2) - Final</i>
Pajak Kini Non Final			<i>Current Tax - Non Final</i>
Perusahaan	5.109.190.152	1.508.966.714	<i>The Company</i>
Entitas Anak	2.498.480.729	--	<i>Subsidiaries</i>
<b>Jumlah</b>	<b>104.179.351.411</b>	<b>97.227.415.293</b>	<b>Total</b>

**c. Beban Pajak**

**c. Taxes Expenses**

	2014 Rp	2013 Rp	
Pajak Kini			<i>Current Tax Expense</i>
Pajak atas Pendapatan Final			<i>Final Income Tax</i>
Perusahaan	241.951.772.143	241.721.438.858	<i>The Company</i>
Kerja Sama Operasi	1.642.926.616	--	<i>Joint Operation</i>
Pajak atas Pendapatan Non Final			<i>Non Final Income Tax</i>
Perusahaan	5.109.000.152	1.508.966.714	<i>The Company</i>
Luar Negeri	3.293.108.702	--	<i>Overseas</i>
Entitas Anak	2.392.360.034	--	<i>Subsidiary</i>
<b>Jumlah Beban Pajak</b>	<b>254.389.167.647</b>	<b>243.230.405.572</b>	<b>Total Current Tax Expense</b>

**d. Pajak Non Final**

**d. Non Final Tax**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

*The reconciliation between profit before income tax as per statements of comprehensive income and taxable income are as follows :*

Perusahaan	2014 Rp	2013 Rp	
Bagian Laba (rugi) Penghasilan Non Final			<i>The Company</i>
Produksi Beton	7.349.037.286	4.376.480.040	<i>Profit (Loss) Sharing of Non Final Income Tax</i>
Rugi Bersih Non Beton	12.982.851.165	(5.690.259.783)	<i>Domestic (Precast Production)</i>
Total Bagian Laba (Rugi) Penghasilan Non Final	20.331.888.451	(1.313.779.743)	<i>Net Losses- Non Precast</i>
Perbedaan Temporer	--	--	<i>Total Profit (Loss) Sharing of Non Final Income Tax</i>
Perbedaan Tetap			<i>Deductible Differences</i>
Beban Sumbangan	55.161.790	9.924.203	<i>Non Deductible Differences</i>
Beban Kantor	48.741.324	--	<i>Donation Expenses</i>
Beban Pegawai	38.006.838	--	<i>Office Expenses</i>
Beban Perjalanan / Kendaraan	35.060.803	--	<i>Employees Expenses</i>
Beban Jasa Giro	14.039.541	7.246.071	<i>Transport/Vehicles Expenses</i>
Beban Representasi	12.618.017	11.741.101	<i>Interest Expenses</i>
Rugi Luar Negeri	--	5.690.259.783	<i>Representation Expenses</i>
Beban Bunga Pinjaman	--	1.676.501.626	<i>Loss from Overseas</i>
Pendapatan Bunga Jasa Giro	(99.516.154)	(46.026.185)	<i>Loan Interest Expenses</i>
Total	104.112.159	7.349.646.599	<i>Interest Income</i>
Laba Kena Pajak	20.436.000.610	6.035.866.856	<i>Total</i>
Beban Pajak Non Final			<i>Total Taxable Income</i>
25% x 2014: Rp 20.436.000.610	5.109.000.152	--	<i>Non Final Tax Expenses</i>
25% x 2013 : Rp 6.035.866.856	--	1.508.966.714	<i>25% x 2014 : Rp 20,436,000,010</i>
<b>Jumlah Beban Pajak Non Final</b>	<b>5.109.000.152</b>	<b>1.508.966.714</b>	<i>25% x 2013 : Rp 6,035,866,856</i>
Dikurangi Pajak Dibayar Dimuka			<b>Total Current Non Final Tax Expenses</b>
PPh 22	170.154.919	--	<i>Non Final Tax Expenses</i>
PPh 23	2.733.644.449	--	<i>Article 22</i>
PPh 25	384.000.000	--	<i>Article 23</i>
Jumlah	3.287.799.368	--	<i>Article 2</i>
<b>Utang Pajak Kini Non Final</b>	<b>1.821.200.784</b>	<b>1.508.966.714</b>	<b>Total</b>
			<i>Non Final Income Tax Payable</i>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**10. TAXES (Continued)**

**d. Pajak Non Final (Lanjutan)**

Entitas Anak - PT WBP

	2014 Rp	2013 Rp	Subsidiary - PT WBP
Bagian Laba Penghasilan Non Final			Profit Sharing of Non Final Income Tax
Laba Bersih - Produksi Beton	142.697.195.530	--	Domestic (Precast Production)
Total Bagian Laba Penghasilan Non Final	142.697.195.530	--	Total Profit Sharing of Non Final Income Tax
Perbedaan Temporer			Deductible Differences
Pendapatan Usaha - Pesanan Metode Turnkey	(400.011.053.972)	--	Sales - Turnkey Method Job Order
Beban Pokok Usaha - Pesanan Metode Turnkey	264.592.497.582	--	Cost of Sales - Turnkey Method Job Order
Beban Umum & Administrasi - Pesanan Metode Turnkey	2.992.449.631	--	General and Adm Expenses - Turnkey Method Job Order
Total Perbedaan Temporer	(132.426.106.759)	--	
Perbedaan Tetap			Deductible Differences
Beban Pegawai	101.775.000	--	Office Expenses
Beban Jasa Giro	89.356.277	--	Interest Expenses
Beban Sumbangan	33.000.000	--	Donation Expenses
Beban Representasi	82.747.342	--	Representation Expense
Beban Kantor	916.500	--	Office Expenses
Beban Perjalanan/Kendaraan	14.400.000	--	Transport/Vehicles Expenses
Pendapatan Lain - lain	(1.023.843.754)	--	Interest Income
Total	(701.648.635)	--	Total
Laba Kena Pajak	9.569.440.136	--	Taxable Income
Beban Pajak Non Final			Non Final Tax Expenses
25% x 2014 : Rp 9.569.440.136	2.392.360.034	--	25% x 2014 : Rp 9,569,440,136
<b>Jumlah Beban Pajak Non Final</b>	<b>2.392.360.034</b>	<b>--</b>	<b>Total Non Final Tax Expenses</b>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut :

The reconciliation between income before income tax as per statements of comprehensive income and taxable income are as follows:

Perusahaan	2014 Rp	2013 Rp	The Company
Pendapatan Perusahaan	9.503.371.762.785	9.559.122.605.712	Revenues
Pendapatan Jasa Konstruksi			Construction Revenues
Ditambah/(Dikurangi)			Add/(Deduct)
Pendapatan Usaha yang Dibiayai oleh Pinjaman Luar Nege	(389.241.491.403)	(258.629.382.012)	Revenues that Funded by Foreign Loan
Pendapatan Usaha Luar Negeri tidak Kena Pajak dan KSO	(562.600.338.419)	(344.208.567.246)	Non Taxable Foreign Revenues and JO
Pendapatan Beda Waktu Pengenaan Pajak - Net	(487.530.391.423)	(899.771.454.521)	Time Differences Taxable Revenue - Net
Pendapatan Jasa Konstruksi Kena Pajak	8.063.999.541.540	8.056.513.201.933	Taxable Income from Construction
Pendapatan Gedung yang Disewakan	317.858.966	260.428.000	Building Rental Revenues
Jumlah Pendapatan Perusahaan Kena Pajak	8.064.317.400.506	8.056.773.629.933	Total Taxable Income
Beban Pajak Final			Final Tax Expenses
Pendapatan Jasa Konstruksi			Construction Revenues
3% x 2014 : Rp	241.919.986.246	--	3% x 2014 : Rp
3% x 2013 : Rp 8.056.513.201.933	--	241.695.396.058	3% x 2013 : Rp 8,056,513,201,933
Pendapatan Gedung yang Disewakan			Building Rent Revenues
10% x 2014 : Rp 31.785.897	31.785.897	--	10% x 2014 : Rp 31,785,897
10% x 2013 : Rp 260.428.000	--	26.042.800	10% x 2013 : Rp 260,428,000
<b>Jumlah Beban Pajak Final</b>	<b>241.951.772.143</b>	<b>241.721.438.858</b>	<b>Total Current Tax Expenses</b>

Tidak ada perbedaan nilai pajak final dan non final antara yang dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

There is no differences of the total final tax and non final tax between total amount which recorded in the consolidated financial statement with tax return which is submitted to the General Directorate of Tax.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian "Surat Pemberitahuan (SPT)" Pajak Badan Perusahaan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

The estimated taxable income in reconciliation become the basis for the "the annual tax return (SPT)" reported to the General Directorate of Tax.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PERPAJAKAN (Lanjutan)**

**e. Surat Ketetapan Pajak**

Pada 31 Desember 2014, Perusahaan menerima restitusi atas SPT PPN masa 2010 sampai dengan 2014:

No	Jenis Pajak / Type of Taxes	Masa Pajak/ Tax period	Nomor SKP/ SKP Number	Tanggal/ Date	SKPLB/(SKPKB) (Overpayment/Under Payment)	Terima (Bayar)/ Cash Receipt (Payment)
1	PPN	Januari 2010	80027/093-0027-2014	14-Mar-14	50.128.848	Terima / Receipt
2	PPN	Desember 2012	00035/407/12/098/14	2-Sep-14	193.206.496.106	Terima / Receipt
3	PPN	Desember 2012	00078/107/12/093/14	2-Sep-14	(20.077.726)	Bayar / Payment
4	PPN	Januari 2012	00202/207/12/093/14	2-Sep-14	(94.087.570)	Bayar / Payment
5	PPN	Februari 2012	00203/207/12/093/14	2-Sep-14	(396.104.656)	Bayar / Payment
6	PPN	Maret 2012	00204/207/12/093/14	2-Sep-14	(46.861.586)	Bayar / Payment
7	PPN	April 2012	00205/207/12/093/14	2-Sep-14	(109.635.326)	Bayar / Payment
8	PPN	Mei 2012	00206/207/12/093/14	2-Sep-14	(43.714.110)	Bayar / Payment
9	PPN	Juni 2012	00207/207/12/093/14	2-Sep-14	(33.964.380)	Bayar / Payment
10	PPN	Juli 2012	00208/207/12/093/14	2-Sep-14	(130.457.138)	Bayar / Payment
11	PPN	Agustus 2012	00209/207/12/093/14	2-Sep-14	(338.886.012)	Bayar / Payment
12	PPN	September 2012	00210/207/12/093/14	2-Sep-14	(235.742.310)	Bayar / Payment
13	PPN	Oktober 2012	00211/207/12/093/14	2-Sep-14	(393.711.808)	Bayar / Payment
14	PPN	Nopember 2012	00212/207/12/093/14	2-Sep-14	(103.168.386)	Bayar / Payment
15	PPN	Juli 2014	00030/406/12/093/14	22-Jul-14	1.694.601.481	Terima / Receipt
	<b>Jumlah</b>				<b>193.004.815.427</b>	

**10. TAXES (Continued)**

**e. Tax Assessment**

On December 31, 2014, the Company received VAT refunds on tax returns during 2010 until 2014 :

**11. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA**

	2014 Rp	2013 Rp
Uang Muka Pihak Ketiga	118.402.336.139	105.410.331.671
PPN Keluaran yang belum diterima	60.882.175.024	38.627.592.214
Biaya Dibayar di Muka	46.968.898.856	43.936.307.058
Sewa Jangka Pendek	2.625.909.958	2.356.992.144
Uang Muka Beban Umum dan Operasional	164.697.475	--
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	102.838.500	--
Lain-lain	562.606.147	3.241.234.209
<b>Jumlah</b>	<b>229.709.462.098</b>	<b>193.572.457.296</b>

**11. ADVANCES AND PREPAYMENT**

Cash Advance from Third Parties
VAT Out Not Yet Received
Prepaid Expenses
Prepaid Rental - Short Term
Advance for General and Administration Expenses
Unearned Revenue
Others
<b>Total</b>

Uang muka pihak ketiga diberikan kepada sub kontraktor, pemasok dan mandor borong yang bekerja pada proyek yang dilaksanakan oleh Perusahaan. Penyelesaian uang muka akan diperhitungkan dengan termin yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga yang bersangkutan.

Advances to third parties are given to subcontractors, suppliers and the entire stock who worked on the Company's projects. The settlement of advance will be offset by the invoice that will be paid to third parties concerned.

Biaya Dibayar Dimuka adalah biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek belum berjalan, biaya profesi L/C dan SKBDN. Penyelesaian biaya dibayar dimuka diperhitungkan pada saat proyek sudah berjalan, untuk biaya provisi di akui setiap bulan.

Prepaid expense are the cost incurred for project not yet started, provision of LC/SKBDN. Completion prepayments calculated when the projects start, for a fee provision is recognized each month.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran belum diterima merupakan pengakuan PPN Keluaran atas termin yang telah ditagihkan, namun belum dibayar oleh Pemberi Kerja.

Value Added Tax (VAT) Out which not yet received represent recognition of VAT Out on receivable, but the Customers have not paid yet.

**12. ASET KEUANGAN DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO**

Perusahaan memiliki Promissory Notes yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PT PPA) tanggal 22 Juli 2011 senilai Rp 175.000.000.000, sesuai surat utang No. SU-01/PPA/0711 dengan bunga 3% dan jangka waktu 2 (dua) tahun, sampai dengan tanggal 22 Juli 2013.

**12. HELD TO MATURITY FINANCIAL STATEMENTS**

The Company has Promissory Notes issued by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dated on July, 22, 2011 amounted to Rp 175,000,000,000, based on Debt Letter No. SU-01/PPA/0711 with 3% interest and 2 (two) years period, until July 22, 2013.

Berdasarkan surat No. S-2247/PPA/PD/0713 tanggal 15 Juli 2013, PT PPA memperpanjang PN tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 22 Juli 2014 dan menerbitkan surat PN baru No. SU-02/PPA/0713. Kemudian berdasarkan surat No S-2065/PPA/BAD/0814 tanggal 6 Agustus 2014, PT PPA kembali memperpanjang PN tersebut dan menerbitkan PN baru tanggal 22 Juli 2014, dan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2014.

Based on letter No. S-2247/PPA/PD/0713 dated July 15, 2013, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) extended the PN for a period of 1 (one) year to July 22, 2014 and issuing new PN No. SU-02/PPA/0713. Also based on letter No S-2065/PPA/BAD/0814 dated August 6, 2014, PT PPA extending the PN and issuing new PN dated July 22, 2014, and will be matured on December 31, 2014.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET VENTURA BERSAMA**

**13. JOINT VENTURE ASSETS**

Rincian saldo aset ventura bersama pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

The details of joint venture assets related parties are as follows:

		2014				
Proyek / Projects	Persentase / Percentage	Saldo Awal / Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi / Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi) / Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir / Ending Balance	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak Berelasi / Related Parties</b>						
KSO/JO Waskita - Wika	Sabo Dam Paket 1	57,00%	19.957.992.830	--	11.532.413	19.969.525.243
KSO/JO Waskita - Indah Karya	Ciasem Pamanukan	97,43%	(6.721.212.506)	--	(229.857.363)	(6.951.069.869)
KSO/JO Waskita - Brantas	Sabo Dam Merapi	49,00%	20.800.427.055	--	(1.154.647.401)	19.645.779.654
KSO/JO Waskita - Wika	RSUD Pasar Minggu	40,00%	--	6.240.249.592	5.815.708.678	12.055.958.270
KSO/JO Waskita - Brantas - Wika	Bendung Gerak Sembayat	33,00%	8.953.674.969	--	436.661.394	9.390.336.363
KSO/JO Waskita - PP	BPK RI	56,00%	8.264.937.797	324.063.163	(376.952.504)	8.212.048.456
KSO/JO Waskita - PP - Hutama	Jembt. Siak IV	35,00%	--	8.074.177.465	--	8.074.177.465
KSO/JO Waskita - Brantas	Civil Work of Jabung	51,00%	578.540.461	1.929.433.465	5.374.197.036	7.882.170.962
KSO/JO Waskita - Wika - PP - HK	Jatigede Sumedang	25,00%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
KSO/JO Waskita - Brantas	Rekons. Sabo Dam Merapi	51,00%	--	--	6.322.123.452	6.322.123.452
KSO/JO Waskita - PP	Jembatan Sungai Brantas	42,50%	--	(2.949.130.435)	7.797.795.695	4.848.665.260
KSO/JO Waskita - Wika	Run Way SSK II	51,00%	--	--	4.782.875.756	4.782.875.756
KSO/JO Waskita - Adhi	Kali Lamong	55,00%	3.644.332.790	--	--	3.644.332.790
KSO/JO Waskita - HK	Normalisasi Kali Ciliwung	51,50%	684.071.518	(663.000.000)	3.072.681.379	3.093.752.897
KSO/JO Waskita - Brantas	Klawing	49,00%	2.972.342.312	--	--	2.972.342.312
KSO/JO Waskita - Adhi - PP	Jl. SS Karawang	32,75%	2.933.562.102	--	--	2.933.562.102
KSO/JO Waskita - PP - HK	Jl. Tol Depok-Antasari (Desari)	34,00%	--	--	1.478.536.558	1.478.536.558
KSO/JO Waskita - Brantas	Bendung Gerak Tempe	49,50%	1.226.486.420	--	--	1.226.486.420
KSO/JO Waskita - Yodya Karya	Bandara Husein	97,50%	--	--	27.519.525.400	27.519.525.400
KSO/JO Waskita - Adhi - HK - Wika	Suramadu CIC	25,00%	88.166.171	--	--	88.166.171
KSO/JO Waskita - PP	Bendung Batang Sinamar	40,00%	799.279.481	(799.279.481)	--	--
KSO/JO Waskita - Adhi	Bendung Sei Ular Paket 7	49,00%	175.000	(175.000)	--	--
KSO/JO Waskita - Adhi	Irigasi Sampean (Pirimp) Situbondo	45,00%	(921.076.153)	833.169.699	--	(87.906.454)
KSO/JO Waskita - Brantas	Pandan Duri II	51,00%	17.429.740.019	--	(20.312.758.706)	(2.883.018.687)
KSO/JO Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	34,00%	(1.617.494.599)	--	(10.323.274.117)	(11.940.768.716)
<b>Jumlah Pihak Berelasi / Related Parties</b>			<b>86.522.119.653</b>	<b>12.989.508.468</b>	<b>30.214.147.670</b>	<b>129.725.775.791</b>

		2013				
Proyek / Projects	Persentase / Percentage	Saldo Awal / Beginning Balance	Setoran (Penarikan)/ Koreksi / Placement (Withdrawal)/ Correction	Pengakuan Laba (Rugi) / Gain (Loss) Recognition	Saldo Akhir / Ending Balance	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak Berelasi / Related Parties</b>						
Waskita - Brantas	Sabo Dam Merapi	57,00%	--	20.800.427.055	20.800.427.055	
Waskita - Wika	Sabo Dam Paket 1	57,00%	--	(733.895.352)	19.957.992.830	
Waskita - Brantas	Bendungan Pandan Duri II	51,00%	8.940.241.814	--	8.489.498.205	17.429.740.019
Waskita - Brantas - Wika	Bendung Gerak Sembayat	33,00%	--	1.446.489.626	7.507.185.343	8.953.674.969
Waskita - PP	Gedung BPK RI	56,00%	8.683.022.348	(324.063.163)	(94.021.388)	8.264.937.797
Waskita - Wika - PP - HK	Bendungan Jatigede Sumedang	25,00%	7.448.173.986	--	--	7.448.173.986
Waskita - Adhi	Kali Lamong	55,00%	--	3.644.332.790	--	3.644.332.790
Waskita - Brantas	Pengendali Banjir Klawing	49,00%	--	3.639.502.592	(667.160.280)	2.972.342.312
Waskita - Adhi - PP	Jalan SS Karawang	32,75%	2.933.562.102	--	--	2.933.562.102
Waskita - Brantas	Bendung Gerak Tempe	49,50%	4.292.574.658	(3.066.088.238)	--	1.226.486.420
Waskita - PP	Bendung Batang Sinamar	40,00%	799.279.481	--	--	799.279.481
Waskita - HK	Normalisasi Kali Ciliwung	51,50%	--	--	684.071.518	684.071.518
Waskita - Brantas	Civil Work of Jabung	51,00%	--	--	578.540.461	578.540.461
Waskita - Adhi - HK - Wika	Jembatan Suramadu CIC	25,00%	88.166.171	--	--	88.166.171
Waskita - Adhi	Bendung Sei Ular Paket 7	49,00%	846.843.924	(846.868.924)	--	175.000
Waskita - Brantas - Wika	Waduk Jatibarang	33,00%	621.059.569	(621.059.569)	--	--
Waskita - Adhi	Kali Lamong	55,00%	3.644.332.790	(3.644.332.790)	--	--
Waskita - Adhi	Irigasi Sampean	45,00%	--	(921.076.153)	--	(921.076.153)
Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	34,00%	4.661.025.350	--	(6.278.519.949)	(1.617.494.599)
Waskita - Indah Karya	Jalan Ciasem Pamanukan	97,43%	--	--	(6.721.212.506)	(6.721.212.506)
<b>Jumlah Pihak Berelasi / Total Related Parties</b>			<b>42.958.282.193</b>	<b>19.998.924.353</b>	<b>23.564.913.107</b>	<b>86.522.119.653</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET VENTURA BERSAMA (Lanjutan)**

**13. JOINT VENTURE ASSETS (Continued)**

Rincian saldo aset ventura bersama pihak-pihak ketiga sebagai berikut:

The details of joint venture assets third parties are as follows:

Proyek / Projects	Persentase / Percentage	2014				Saldo Akhir / Ending Balance
		Saldo Awal / Beginning Balance	Setoran (Penarikan) / Koreksi / Placement (Withdrawal) / Correction	Pengakuan Laba (Rugi) / Gain (Loss) Recognition		
		Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak Ketiga/ Third parties</b>						
KSO/JO Waskita - Wika - PP - Jaya	38,00%	21.332.765.115	(17.158.666.638)	72.221.427.410	76.395.525.887	
KSO/JO Waskita - Brantas	80,00%	21.393.652.855	--	19.574.259.089	40.967.911.944	
KSO/JO Waskita - Darmo Permai	51,00%	--	164.872.162.500	48.759.112	164.920.921.612	
KSO/JO Waskita - Tniti	51,00%	75.358.786.956	(35.700.000.000)	34.869.767.058	74.528.554.014	
KSO/JO Waskita - Kajima	40,00%	5.619.874.797	80.893.471.000	(14.919.001.205)	72.982.553.332	
KSO/JO Waskita - JPC	67,75%	54.920.976.122	13.107.901.882	--	68.028.878.004	
KSO/JO Waskita - Arkonin	70,00%	2.048.679.307	--	27.679.496.987	29.728.176.294	
KSO/JO Waskita - Sinar Intan	75,00%	7.119.332.551	--	6.982.958.848	14.102.291.399	
KSO/JO Waskita - Statika Mitrasarana	80,00%	9.093.592.949	--	--	9.093.592.949	
KSO/JO Waskita - Wika - Shanghai	10,00%	3.215.276.126	--	4.450.464.185	7.665.740.311	
KSO/JO Waskita - Wika - IPA	33,00%	--	1.842.520.371	4.258.945.794	6.101.466.165	
KSO/JO Waskita - IHC	99,00%	6.135.597.755	--	(77.725.390)	6.057.872.365	
KSO/JO Waskita - Lombok I.P	51,00%	--	--	5.722.234.086	5.722.234.086	
KSO/JO Waskita - Baswara - Mahir Jaya	100,00%	8.445.118.112	(3.217.906.690)	--	5.227.211.422	
KSO/JO Waskita - Luhribu	55,00%	8.723.218.139	(777.600.000)	(3.266.781.502)	4.678.836.637	
KSO/JO Waskita - Andesmont	70,00%	1.195.306.402	--	3.311.404.475	4.506.710.877	
KSO/JO Waskita - Usaha Batanghari	63,00%	4.144.397.943	--	--	4.144.397.943	
KSO/JO Waskita - Ricky Kencana	70,00%	1.158.529.434	(14.842.861)	2.636.832.305	4.140.518.878	
KSO/JO Waskita - Witada Bangun Gemilang	55,00%	4.458.033.456	--	(948.820.503)	3.509.212.953	
KSO/JO Waskita - Siwa Prestasi	55,00%	3.043.145.621	--	(51.579.586)	2.991.566.035	
KSO/JO Waskita - Lombok I.P	51,00%	--	--	2.863.467.010	2.863.467.010	
KSO/JO Waskita - Panca Duta	51,00%	1.254.226.451	--	1.575.127.859	2.829.354.310	
KSO/JO Waskita - Adi Jaya Lima Pradana	55,00%	2.790.349.272	--	--	2.790.349.272	
KSO/JO Waskita - Lombok I.P	51,00%	--	--	2.632.049.232	2.632.049.232	
KSO/JO Waskita - JPC	67,75%	1.495.854.457	(13.107.901.882)	14.146.693.514	2.534.646.089	
KSO/JO Waskita - PP - Deltamarga	46,00%	163.347.134	(254.534.799)	2.336.940.500	2.245.752.835	
KSO/JO Waskita - Lombok I.P	51,00%	--	--	2.185.571.198	2.185.571.198	
KSO/JO Waskita - Kega	70,00%	(790.345.205)	2.679.459.556	(36.919.457)	1.852.194.894	
KSO/JO Waskita - Yasa	100,00%	(166.897.923)	--	1.927.565.777	1.760.667.854	
KSO/JO Waskita - Daya Mulia Turangga	60,00%	--	--	1.375.016.504	1.375.016.504	
KSO/JO Waskita - Nindya - Saona	40,00%	1.296.132.700	--	--	1.296.132.700	
KSO/JO Waskita - Tepat Guna	51,00%	1.194.804.072	--	--	1.194.804.072	
KSO/JO Waskita - Rindang	55,00%	1.052.050.539	--	--	1.052.050.539	
KSO/JO Waskita - Usaha Batanghari	55,00%	771.992.567	2.328.623.465	(2.114.732.177)	985.883.855	
KSO/JO Waskita - Modern	40,00%	2.196.651.591	(1.653.825.001)	(39.482.371)	503.344.219	
KSO/JO Waskita - CPA	65,00%	385.921.816	--	--	385.921.816	
KSO/JO Waskita - Eka Praya	51,00%	--	200.000.000	--	200.000.000	
KSO/JO Waskita - Feberco	60,00%	92.341.155	(300.000)	--	92.041.155	
KSO/JO Waskita - Wika - IPA	33,00%	1.842.520.371	(1.842.520.371)	--	--	
KSO/JO Waskita - Menumbang Jaya	40,00%	865.916.112	(782.184.682)	(83.731.430)	--	
KSO/JO Waskita - Bugak Brawang	55,00%	506.152.856	(506.152.856)	--	--	
KSO/JO Waskita - Larasati	55,00%	409.513.000	(409.513.000)	--	--	
KSO/JO Waskita - Tirta	67,42%	793.725.360	(793.770.248)	--	(44.888)	
KSO/JO Waskita - CPA	65,00%	330.666.114	(331.100.040)	--	(433.926)	
KSO/JO Waskita - Jaya - Nusantara	80,00%	(1.325.959)	--	1.388.208.740	(1.325.959)	
KSO/JO Waskita - Bina Baraga	55,00%	4.441.435.677	(2.313.780.604)	(2.376.749.027)	(249.093.954)	
KSO/JO Waskita - Kumodo Intan	70,00%	--	--	(285.434.202)	(285.434.202)	
KSO/JO Waskita - Indopenta	60,00%	591.737.051	(118.640.000)	(768.850.178)	(295.753.127)	
KSO/JO Waskita - Yasa	70,00%	(336.862.936)	--	(212.693.652)	(549.556.588)	
KSO/JO Waskita - Larasati	55,00%	(635.897.948)	--	(968.687.852)	(1.604.585.800)	
KSO/JO Waskita - Rimba - Marinda	51,00%	(4.928.537.163)	--	2.797.633.913	(2.130.903.250)	
KSO/JO Waskita - Pangkho	75,00%	--	(3.672.764.832)	518.102	(3.672.246.730)	
KSO/JO Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	30,00%	2.806.348.392	--	(8.279.182.667)	(5.472.834.275)	
KSO/JO Waskita - ZUG	40,00%	(4.250.873.409)	--	(3.610.802.122)	(7.861.675.531)	
KSO/JO Waskita - PAL	75,00%	(4.188.060.406)	--	(10.042.642.083)	(14.230.702.489)	
<b>Jumlah Pihak Ketiga/ Third parties</b>		<b>247.749.169.378</b>	<b>183.268.134.270</b>	<b>166.901.526.294</b>	<b>597.918.829.942</b>	
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>334.271.289.031</b>	<b>196.257.642.738</b>	<b>197.115.673.963</b>	<b>727.644.605.732</b>	

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET VENTURA BERSAMA (Lanjutan)**

**13. JOINT VENTURE ASSETS (Continued)**

		2013				
Proyek /	Persentase /	Saldo Awal /	Setoran (Penaikan)/	Pengakuan Laba	Saldo Akhir /	
Projects	Percentage	Beginning	Placement (Withdrawal)/	Gain (Loss)	Ending	
		Balance	Correction	Recognition	Balance	
		Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Pihak Ketiga / Third Parties</b>						
Waskita - Trinitii	Apartemen Brooklyn Alam Sutra	51,00%	--	76.576.500.000	(1.217.713.044)	75.358.786.956
Waskita - JPC	SMM Muara Teweh Div.Sipil	67,75%	28.427.364.543	--	26.493.611.579	54.920.976.122
Waskita - Brantas	Terminal Selatan Bandara Djuanda (Thp 2)	80,00%	--	--	21.393.652.855	21.393.652.855
Waskita - Wika - PP - Jaya	Gedung Terminal 3	38,00%	--	11.171.746.669	10.161.018.446	21.332.765.115
Waskita - Mitra Statika	Jalan Sicincin - Malalak	80,00%	--	--	9.093.592.949	9.093.592.949
Waskita - Luhribu	Reservoir Bendung MA Kayu	55,00%	12.222.358.814	(7.868.188.985)	4.369.048.310	8.723.218.139
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	Tulur Aji Jangkat	100,00%	7.092.458.296	2.000.876.644	(648.216.828)	8.445.118.112
Waskita - Sinar Intan	PDAM Tanah Grogot	75,00%	903.173.240	3.760.493.177	2.455.666.134	7.119.332.551
Waskita - IHC	Pengadaan Dredger	99,00%	--	--	6.135.597.755	6.135.597.755
Waskita - Kajima	E2 Cilincing - Jamepa	40,00%	(1.388.198.646)	16.000.000.000	(8.991.926.557)	5.619.874.797
Waskita - Witada Bangun Gemilang	Timbunan Tanah Bandara Mutiara	55,00%	--	--	4.458.033.456	4.458.033.456
Waskita - Bina Baraga	Kantor Pemda Ogan Hilir	55,00%	--	2.313.780.604	2.127.655.073	4.441.435.677
Waskita - Usaha Batanghari	Jembatan Muara Sabak	63,00%	4.144.397.943	--	--	4.144.397.943
Waskita - Wika - Shanghai	Jalan Tol Cisumdawu	10,00%	--	--	3.215.276.126	3.215.276.126
Waskita - Siwa Prestasi	Faspela Pantoloan 2013	55,00%	--	--	3.043.145.621	3.043.145.621
Waskita - Perdana - Buluh - Larasati	Jalan Talisayan - Batu Lepok	30,00%	21.111.316	--	2.785.237.076	2.806.348.392
Waskita - Adi Jaya Lima Pradana	Pengendalian Sedimen Bawakaraeng	55,00%	--	--	2.790.349.272	2.790.349.272
Waskita - Modern	Dermaga Peti Kemas (CY-01)	40,00%	454.434.895	--	1.742.216.696	2.196.651.591
Waskita - Arkonin	Renov. Bandara Ngurah Rai	70,00%	--	--	2.048.679.307	2.048.679.307
Waskita - Wika - IPA	Dermaga Peti Kemas CY-Lanjutan	33,00%	--	--	1.842.520.371	1.842.520.371
Waskita - Ricky Kencana	Underpass Simpang Patai-Pusri	70,00%	--	14.842.861	1.503.686.573	1.518.529.434
Waskita - JPC	SMM Muara Teweh Div EPC	67,75%	274.067.367	--	1.221.787.090	1.495.854.457
Waskita - Nindya - Sacna	Irigasi Sapon	40,00%	(1.320.291.597)	2.616.424.297	--	1.296.132.700
Waskita - Panca Duta	Peningktn Jalan Kambuaya-Klamono	51,00%	224.332.818	(992.232.818)	2.022.126.451	1.254.226.451
Waskita - Andesmont	Jalan Kebayan - Simpang Kraft	70,00%	--	959.666.560	235.639.842	1.195.306.402
Waskita - Tepat Guna	Pelebaran Jalan Ampenan-Pemenang	51,00%	2.194.804.072	(1.000.000.000)	--	1.194.804.072
Waskita - Rindang	Jalan T Besar Bujung Tenuk	55,00%	1.052.050.539	--	--	1.052.050.539
Waskita - Menumbang Jaya	SMK N 2 Palembang	40,00%	995.522.241	(863.874.594)	734.268.465	865.916.112
Waskita - Tirta	Struktur Dalam Jalan Pontianak	67,42%	829.396.970	(28.388.436)	(7.283.174)	793.725.360
Waskita - Usaha Batanghari	FO Jalan Gajah Mada - Juanda	55,00%	(4.116.779.810)	1.788.156.345	3.100.616.032	771.992.567
Waskita - Indopenta	Drainase Pekalongan	60,00%	1.020.821.211	(300.000.000)	(129.084.160)	591.737.051
Waskita - Bugak Brawang	Pasar Atjeh Phase VI	55,00%	1.619.878.755	(1.060.397.505)	(49.328.394)	506.152.856
Waskita - Larasati	Sesayap Tanah Tidung	55,00%	613.155.000	(203.642.000)	--	409.513.000
Waskita - CPA	Spam Samarinda Utara	65,00%	4.239.503.165	24.227.877	(3.877.809.226)	385.921.816
Waskita - CPA	Sandai Nanga Tayap Kalbar	65,00%	298.583.753	--	32.082.361	330.666.114
Waskita - Eka Praya	Jalan Akses Bill Thp II	51,00%	--	--	--	--
Waskita - PP - Deltamarga	Jalan Pesisir (Coastal Road Construction)	46,00%	--	--	163.347.134	163.347.134
Waskita - Feberco	PLN Curup	60,00%	--	92.341.155	--	92.341.155
Waskita - Bugak Brawang	Pasar Aceh	55,00%	1.970.155.261	(1.970.155.261)	--	--
Waskita - Conblok	Beno Simpang Libas	55,00%	750.000.000	(750.000.000)	--	--
Waskita - Panca Duta	Kantor Gubernur Monokwari	51,00%	79.611.337	(79.611.337)	--	--
Waskita - Passokorang	Jalan Salubatu - Aralle III	55,00%	150.874.788	(150.874.788)	--	--
Waskita - Jaya - Nusantara	Jalan Arteri Siring - Porong Paket 1	80,00%	--	(1.325.959)	--	(1.325.959)
Waskita - Yasa	Jalan Galing Aruk	100,00%	--	--	(166.897.923)	(166.897.923)
Waskita - Yasa	Bandara Kuala namu	70,00%	13.122.899.012	--	(13.459.761.948)	(336.862.936)
Waskita - Larasati	Pengendali Banjir Karang Asam	55,00%	1.352.704.896	(912.782.627)	(1.075.820.217)	(635.897.948)
Waskita - Kega	Harris Hotel Yogya	70,00%	402.193.142	(1.157.092.723)	(35.445.624)	(790.345.205)
Waskita - PAL	PLTU Malinau	75,00%	--	(2.616.424.296)	(1.571.636.110)	(4.188.060.406)
Waskita - ZUG	PLTU Rote	40,00%	1.761.324.915	--	(6.012.198.324)	(4.250.873.409)
Waskita - Rimba - Marinda	Tol Balikpapan-Samarinda	51,00%	(5.862.546.584)	(1.250.182.974)	2.184.192.395	(4.928.537.163)
<b>Jumlah Pihak Ketiga / Total Third Parties</b>			<b>73.525.361.652</b>	<b>96.113.881.886</b>	<b>78.109.925.840</b>	<b>247.749.169.378</b>
<b>Jumlah/ Total</b>			<b>116.483.643.845</b>	<b>116.112.806.239</b>	<b>101.674.838.947</b>	<b>334.271.289.031</b>

**14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI**

**14. INVESTMENT IN ASSOCIATES**

	2014	2013	
	Rp	Rp	
PT Waskita Bumi Wira	7.314.904.399	--	PT Waskita Bumi Wira
PT Ismawa Trimitra	--	8.391.719.214	PT Ismawa Trimitra
<b>Jumlah</b>	<b>7.314.904.399</b>	<b>8.391.719.214</b>	<b>Total</b>



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)**

**14. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)**

Rincian investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut :

The detail investment in associates entities as follows :

	2014 Rp	2013 Rp	
PT Ismawa Trimitra	8.391.719.214	7.825.767.785	PT Ismawa Trimitra
Bagian Laba Bersih	--	1.153.156.256	Net Portion of Income
Penerimaan Dividen	(1.149.844.769)	(587.204.827)	Dividend Receipt
Penjualan Penyertaan	(7.241.874.445)	--	Sale of Investments
<b>Jumlah PT Ismawa Trimitra</b>	<b>--</b>	<b>8.391.719.214</b>	<b>Total PT Ismawa Trimitra</b>

Berikut ini keuangan dari entitas asosiasi per 31 Desember 2013:

The following are financial information of associate entity as of December 31, 2013:

Entitas / Asosiasi /  Associates Entity	Domisili /  Domicile	Jenis Usaha /  Type of Business	Tahun Operasi Komersial / Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership  %	31 Des/Dec 31, 2014		31 Des/Dec 31, 2013	
					Jumlah Aset / Total Asset Rp	Jumlah Laba (Rugi) Bersih / Total Net Income (Loss) Rp	Jumlah Aset / Total Asset Rp	Jumlah Laba (Rugi) Bersih / Total Net Income (Loss) Rp
PT Ismawa Trimitra (Persero)	Jakarta	Pembangunan dan Jasa/ Construction and Service	1995	25,00	--	--	45.207.819.387	4.612.625.025

**PT Ismawa Trimitra**

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 25% atas dari modal disetor PT Ismawa Trimitra (PT IT). Perusahaan asosiasi didirikan tahun 1995, bergerak di bidang properti, perdagangan, dan keagenan dan merupakan pemilik sekaligus pengelola gedung perkantoran Graha Iskandarsyah di Jalan Iskandarsyah Raya nomor 66C Kebayoran Baru, Jakarta. Pada tanggal 27 Juni 2014 Perusahaan menjual kepemilikannya pada PT IT kepada PT Bank Bukopin sebesar Rp 39.583.000.000 dan membukukan laba atas penjualan investasi asosiasi Rp 32.341.125.555.

**PT Ismawa Trimitra**

The Company owns investment in PT Ismawa Trimitra (PT IT) equivalent to 25% of its paid in capital. This associate entity was established in 1995, engaged in property, trading, and agency and also the owner and operator of office buildings of Graha Iskandarsyah Office on Jalan Graha Iskandarsyah No. 66C Kebayoran Baru, Jakarta. The Company sold its share in PT IT to PT Bank Bukopin on June 27, 2014 amounted to Rp 39,583,000,000 and recorded gain on sale of associate entity's share amounted to Rp 32.341.125.555.

	2014 Rp	2013 Rp	
PT Waskita Bumi Wira			PT Waskita Bumi Wira
Penambahan	7.500.000.000	--	Additional
Bagian Laba Bersih	(185.095.601)	--	Net Portion of Income
<b>Jumlah PT Waskita Bumi Wira</b>	<b>7.314.904.399</b>	<b>--</b>	<b>Total PT Waskita Bumi Wira</b>

Berikut ini keuangan dari entitas asosiasi per 31 Desember 2013

The following are financial information of associate entity as of

Entitas / Associates Entity	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Type of Business	Tahun Operasi Komersial / Year of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership  %	31 Des/Dec 31, 2014			31 Des/Dec 31, 2013		
					Jumlah Aset / Total Assets Rp	Jumlah Liabilitas (Rugi) Bersih / Total Liabilities (Loss) Rp	Jumlah Laba (Rugi) Bersih / Total Net Income (Loss) Rp	Jumlah Aset / Total Assets Rp	Jumlah Liabilitas (Rugi) Bersih / Total Liabilities (Loss) Rp	Jumlah Laba (Rugi) Bersih / Total Net Income (Loss) Rp
PT Waskita Bumi Wira	Jakarta	Pengusahaan Jalan Tol/ Toll Road Concession	Dalam Tahap Pengembangan/ Development	48,00	15.239.404.164	20.000	(385.615.836)	--	--	--

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (Lanjutan)**

**PT Waskita Bumi Wira**

PT Waskita Toll Road (PT WTR) (Entitas Anak) memiliki penyertaan sebesar 60% atas modal disetor PT Waskita Bumi Legundi (PT WBL) atau sebesar Rp 7.500.000.000. Atas penyertaan tersebut, WTR melakukan konsolidasi atas laporan keuangan PT WBL.

Sejak bulan Nopember 2014, PT WTR menghentikan melakukan konsolidasi atas laporan keuangan PT WBL, berdasarkan Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn No 43 tanggal 28 Oktober 2014. PT WBL menambah setoran modal ditempatkan dan disetor, yang semula Rp 12.500.000.000 menjadi Rp 15.625.000.000, dengan rincian kepemilikan PT WTR sebesar Rp 7.500.000.000, PT Energi Bumi Mining sebesar Rp 5.000.000.000 dan PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Rp 3.125.000.000. Dengan adanya perubahan ini, maka kepemilikan PT WTR semula sebesar 60% menjadi 48%. Selain itu, berdasarkan akta tersebut PT Waskita Bumi Legundi merubah nama menjadi PT Waskita Bumi Wira.

Manajemen berpendapat karena tidak terdapat harga kuotasi di pasar aktif atas nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan teknik penilaian tidak dapat digunakan, sehingga nilai wajar investasi diukur dengan biaya perolehan.

**14. INVESTMENT IN ASSOCIATES (Continued)**

**PT Waskita Bumi Wira**

PT Waskita Toll Road (PT WTR) (Subsidiary) has a participation of 60% on the paid in capital of PT Waskita Bumi Legundi (PT WBL) or Rp 7.500.000.000. For that investment, PT WTR consolidate the financial statements of PT WBL.

Since November 2014, PT WTR stop to consolidate the financial statements of PT WBL, based on the Notarial Deed of Jose Dima Satria, SH, M.Kn No. 43 dated October 28, 2014. PT WBL increased its issued and paid in capital, which from Rp 12,500,000,000 to Rp 15,625,000,000, with details of ownership of PT WTR Rp 7,500,000,000, PT Energi Bumi Mining Rp 5,000,000,000 and PT Panca Wira East Java Enterprise Rp 3,125,000,000. With this change, the ownership of PT WTR original by 60% to 48%. In addition, based on the deed of PT Waskita Bumi Legundi become PT Waskita Bumi Wira.

Management believes that since there is not quoted prices in an active market the fair value of investment in associate entity and assessment techniques can not be used, so that the fair value of the investment is measured at acquisition cost.

**15. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA**

**15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS**

	2014 Rp	2013 Rp	
PT Citra Wasphutowa	50.000.000.000	37.500.000.000	PT Citra Wasphutowa
PT Prima Multi Terminal	26.100.000.000	--	PT Prima Multi Terminal
PT Pejagan Pemalang Toll Road	299.999.473.502	--	PT Pejagan Pemalang Toll Road
PT Jasa Marga Kualanamu Tol	12.000.000.000	--	PT Jasa Marga Kualanamu Tol
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	240.000.000.000	--	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
<b>Jumlah</b>	<b>628.099.473.502</b>	<b>37.500.000.000</b>	<b>Total</b>

**PT Citra Wasphutowa**

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 12,5% dari modal PT Citra Wasphutowa (PT CW). Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Drs. Soegeng Santosa, SH, MH, Nomor 10 tanggal 13 Januari 2006, bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. Pada tahun 2014 telah dilakukan tambahan modal sebesar Rp 12.250.000.000, sehingga jumlah setoran modal sampai dengan 30 September 2014 sebesar Rp 50.000.000.000.

**PT Prima Multi Terminal**

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 15% dari modal PT Prima Multi Terminal (PT PMT) atau sebesar Rp 26.100.000.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Tuti Sumarni, SH, MH, Nomor 04 tanggal 26 September 2014, bergerak di bidang perdagangan dan jasa.

**PT Pejagan Pemalang Tol Road**

PT WTR (entitas anak) memiliki penyertaan sebesar 99,99% dari modal PT Pejagan Pemalang Toll Road (PT PPTR). Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Bonardo Nasution, SH, No 9 tanggal 15 Juni 2006, bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.

**PT Citra Wasphutowa**

The Company owns investment equivalent to 12.5% of PT Citra Wasphutowa (PT CW) paid in capital. This entity was established based on the Notarial Deed of Drs. Soegeng Santosa, SH, MH, No. 10 dated January 13, 2006 engaged in highway concessions. On the year 2014 The Company have made the additional capital amounted to Rp 12,250,000,000, so the total paid in capital until September 30, 2014 amounted to Rp 50,000,000,000.

**PT Prima Multi Terminal**

The Company has investments amounted to 15% of the paid in capital of PT Prima Multi Terminal (PT PMT) or Rp 26,100,000,000. The company was established under the Notarial Deed of Establishment of Notary Tuti Sumarni, SH, MH, No. 04, September 26, 2014, engaged in trading and services.

**PT Pejagan Pemalang Tol Road**

PT WTR (subsidiaries) has an investment of 99.99% of the paid in capital of PT Pejagan Pemalang Toll Road (PT PPTR). The company was established under the Notarial Deed of Establishment of Notary Bonardo Nasution, SH, No. 9 dated June 15, 2006, is engaged in the concession.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (Lanjutan)**

**PT Pejalan Pemalang Tol Road (Lanjutan)**

Sejak bulan Nopember 2014, PT WTR menghentikan melakukan konsolidasi atas laporan keuangan PT PPTR, meskipun memiliki kepemilikan mayoritas. Hal ini berdasarkan Perjanjian Penambahan (Addendum) No 12 tanggal 28 Nopember 2014 dari Notaris Yusdin Fahim S.H, Notaris di Jakarta atas Perjanjian Jual Beli Bersyarat Dengan Hak Membeli Kembali Atas Saham-saham (lihat catatan 51),.. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT PPTR wajib meminta persetujuan tertulis sebelumnya dari Direksi dan anggota Komisaris yang merupakan perwakilan dari PT Global Selaras Dunia, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap perubahan anggaran dasar PPTR;
- b. Pembagian dividen tahunan dan interim kepada pemegang saham Perseroan;
- c. Pengesahan, penerbitan, penjualan atau pelepasan lainnya mengenai setiap modal saham PPTR;
- d. Perubahan material sehubungan dengan persyaratan ketenagakerjaan dari setiap karyawan PPTR;
- e. Pemberian atau setiap perjanjian memberikan pinjaman atau bantuan keuangan lainnya;
- f. Pengalihan aset-aset PPTR;
- g. Mengadakan atau membuat perjanjian antara PPTR dengan pihak lain dengan nilai diatas Rp 100 Juta;
- h. Memperoleh pinjaman baru;
- i. Melakukan perubahan apapun atas kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar;
- j. Melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap karyawan inti;
- k. Melakukan pengeluaran uang kas kecuali terkait dengan pengeluaran untuk kegiatan usaha sehari-hari;
- l. Melakukan suatu transaksi dengan tujuan untuk membentuk joint venture, kemitraan atau perjanjian untuk berbagi keuntungan atau aset;
- m. Dan beberapa pengaturan lainnya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 4 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri (Revisi 2009) paragraf 29 disebutkan bahwa entitas induk dapat kehilangan pengendalian atas entitas anak dengan atau tanpa perubahan absolut atau relatif tingkat kepemilikan akibat suatu perjanjian kontraktual. Manajemen PT WTR berpendapat bahwa PT WTR kehilangan pengendalian atas entitas anak PT PPTR sebagai akibat perjanjian tersebut diatas (perjanjian kontraktual). Oleh sebab itu PT WTR menghentikan melakukan konsolidasi atas laporan keuangan PT PPTR, termasuk menghentikan pengakuan goodwill atas transaksi akuisisi PT PPTR.

**PT Kresna Kusuma Dyandra Marga**

PT Waskita Toll Road (PT WTR) (Entitas Anak) memiliki penyertaan sebesar 60 % dari modal disetor PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (PT KKDM). Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Mudofir Hadi SH, No.94 tanggal 20 Desember 1996.

**15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS (Continued)**

**PT Pejalan Pemalang Tol Road (Continued)**

Since November 2014, PT WTR has discontinued to consolidate the financial statements of PT PPTR, although it has a majority ownership. It is based on the Addition of Agreement (Addendum) No. 12 dated November 28, 2014 from Notary Yusdin Fahim SH, Notary in Jakarta on the Conditional Sale and Purchase Agreement with the Right to Buy Back on Shares (see note 51). In the agreement it was agreed that the PT PPTR shall obtain prior written approval of the Board of Directors and Commissioners which is representative of PT Global Harmony World, for the following matters:

- a. Any changes to the articles of association of PPTR;
- b. The annual and interim dividend payment to shareholders of the Company;
- c. Ratification, publication, sale or other disposition of any share capital PPTR;
- d. Material changes in connection to the terms of employment of each employee PPTR;
- e. Giving Or any agreement granting loans or other financial assistance;
- f. The transfer of assets PPTR;
- g. Entered into or made an agreement between PPTR with other parties with a value above Rp 100 million;
- h. Obtaining a new loan;
- i. Make any changes on the business activities in accordance with the articles of association;
- j. Doing the termination of the employment of key employees;
- k. Spending cash except for the expenses associated with daily business activities;
- l. Conduct a transaction for the purpose of forming a joint venture, partnership or agreement to share the profits or assets;
- m. And some other arrangements.

Based on Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No 4 of the consolidated financial statements and separate financial statements (Revised 2009) paragraph 29 stated that the parent can lose control of a subsidiary with or without a change in absolute or relative levels of ownership as the result of a contractual agreement. Management PT WTR believes PT WTR lose control of PT PPTR as the result of the above agreement (the contractual agreement). Therefore PT WTR discontinued to consolidate the financial statements of PT PPTR, including discontinuing the recognition of goodwill on acquisitions of PT PPTR.

**PT Kresna Kusuma Dyandra Marga**

PT Waskita Toll Road (PT WTR) (Subsidiary) has an investment of 60% of the paid in capital of PT Kresna Kusuma Dyandra Highways (KKDM). The company was established under the Deed of Establishment of Notary Mudofir Hadi SH, No 94 dated December 20, 1996.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (Lanjutan)**

**PT Kresna Kusuma Dyandra Marga**

PT WTR tidak melakukan konsolidasi atas laporan keuangan PT KKDM, meskipun memiliki kepemilikan mayoritas. Hal ini berdasarkan Perjanjian Tambahan (Addendum) tanggal 9 Desember 2014 dari Notaris Jose Dima Satria S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta, atas Perjanjian Jual Beli Bersyarat Dengan Hak untuk Membeli Kembali Atas Saham-saham (lihat catatan 51). Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pengendalian atas PT KKDM tetap berada pada PT Tirtobumi Prakarsatama (PT Tirta), meliputi aspek keuangan, operasional dan sumber daya manusia PT KKDM, menunjuk atau mengganti organ PT KKDM dan tindakan lainnya harus meminta persetujuan tertulis sebelumnya dari Direksi dan anggota komisaris dari PT Tirta.

**PT Jasa Marga Kualanamu Tol**

Perusahaan memiliki penyertaan sebesar 15% dari modal PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JKMT) atau sebesar Rp 12.000.000.000. Perusahaan ini didirikan sesuai Akta Pendirian dari Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH, Nomor 56 tanggal 25 Nopember 2014, bergerak di bidang jalan tol.

Manajemen berpendapat tidak terdapat harga kuotasi dipasar aktif atas nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan teknik penilaian tidak dapat digunakan, sehingga nilai wajar investasi diukur dengan biaya perolehan.

**16. PROPERTI INVESTASI**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Tanah	--	107.994.333	Land
Bangunan dalam Penyelesaian	--	14.999.364.774	Building in Progress
Jumlah	--	<b>15.107.359.107</b>	<b>Total</b>

Merupakan bangunan dalam penyelesaian yang berlokasi di Jl MT Haryono Kav No 10 Cawang. Pembangunan tersebut diperkirakan akan diselesaikan pada tahun 2015.

Perusahaan melakukan reklasifikasi properti investasi menjadi aset real estat yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perusahaan No. 48.1/WK/DK/2014 tanggal 15 Juli 2014, mengenai pengalihan properti investasi tanah dan bangunan menjadi aset real estat. Gedung tersebut telah disetujui untuk dijual berdasarkan keputusan Komisaris Perusahaan tersebut. Nilai buku atas tanah dan bangunan yang dialihkan menjadi aset real estat pada tanggal 15 Juli 2014 masing-masing sebesar Rp 107.994.333 dan Rp 43.540.861.450 (Catatan 17). Reklasifikasi tersebut dilakukan sehubungan dengan perubahan tujuan kepemilikan tanah dan gedung Cawang. Semula Manajemen memperuntukkan gedung tersebut sebagai properti investasi, akan tetapi berubah menjadi aset real estat untuk dijual.

**15. OTHER LONG-TERM INVESTMENTS (Continued)**

**PT Kresna Kusuma Dyandra Marga**

PT WTR has not consolidated the financial statements of PT KKDM, although it has a majority ownership. It is based on the Addition of Agreement (Addendum) dated December 9, 2014 from Jose Dima Satria SH, M.Kn, Notary in Jakarta, on the Conditional Sale and Purchase Agreement with the Right to Buy Back on Shares (see note 51). In the agreement it was agreed that control over PT KKDM remain on PT Tirtobumi Prakarsatama (PT Tirta), includes the aspects of financial, operational and human resources of PT KKDM, appoint or change the organs of PT KKDM and other decision shall obtain prior written approval of the Board of Directors and members commissioner of PT Tirta.

**PT Jasa Marga Kualanamu Tol**

The Company has investments amounted to 15% of the paid in capital of PT Jasa Marga Kualanamu Tol (JKMT) or Rp 12,000,000,000. The company was established under the Notarial Deed of Establishment of Notary Ni Nyoman Rai Sumawati, SH,, No. 25, November 25, 2014, engaged in toll road.

Management believes there is no active market price quotations in the fair value of long term investment and valuation techniques can not be used, so fair value of the investment is measured at acquisition cost.

**16. INVESTMENT PROPERTIES**

Represent property investment in progress which located in Jl MT Haryono Kav No 10, Cawang. This development is estimated to be completed on 2015.

The Company has reclassified investment properties into real estate assets undertaken by the Decree of Commissioners No. 48.1 / WK / DK / 2014 dated July 15, 2014, regarding the transfer of land and building investment properties into real estate assets. The building has been approved for sale by the Company's Commissioner decision. The book value of land and buildings are transferred to property, real estate on July 15, 2014 amounting to Rp 107,994,333 and Rp 43,540,861,450 (Note 17). Reclassification is done with respect to the change of ownership of Cawang land and building purposes. Originally Management consign the building as an investment property, but changing to be real estate assets for sale.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. ASET TETAP**

**17. FIXED ASSETS**

	2014						
	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Pengurangan	Hapusbuku/	Saldo Akhir	
	Beginning Balance	Addition	Reclassification	Deduction	Written Off	Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Biaya Perolehan Langsung</b>							<b>Acquisition Cost</b>
Tanah	76.257.075.093	36.469.690.038	--	1.405.453.721	83.830.000	111.237.481.410	Land
Gedung	82.328.211.256	9.066.107.075	--	9.667.330.001	74.206.000	81.652.782.330	Building
Perlengkapan Kantor	13.406.099.689	2.585.985.946	(639.233.600)	--	29.487.000	15.323.365.035	Office Supplies
Peralatan Proyek	408.053.977.665	281.206.456.475	639.233.600	191.324.724.303	--	498.574.943.437	Project Equipments
Kendaraan	12.205.960.847	9.654.688	--	173.250.000	--	12.042.365.535	Vehicles
Jumlah	592.251.324.550	329.337.894.222	--	202.570.758.025	187.523.000	718.830.937.747	Total
<b>Aset Tetap Dalam Pelaksanaan</b>							<b>Assets in Progress</b>
Gedung dan Pabrik	35.533.862.985	43.654.925.156	--	--	--	79.188.788.141	Building and Plant
Jalan Tol	--	2.129.822.976	--	--	--	2.129.822.976	Toll Road
Tanah & Peralatan Proyek	--	71.188.101.364	--	--	--	71.188.101.364	Land & Project Equipment
<b>Akumulasi Penyusutan:</b>							<b>Accumulated Depreciation</b>
Gedung	48.675.763.662	4.024.228.327	--	601.222.926	74.205.999	52.024.563.064	Building
Perlengkapan Kantor	7.482.675.645	1.566.956.024	(302.840.039)	--	--	8.746.791.630	Office Supplies
Peralatan Proyek	146.217.462.410	79.758.965.148	302.840.039	47.863.281.684	--	178.415.985.913	Project Equipments
Kendaraan	9.969.332.657	552.736.720	--	163.595.312	--	10.358.474.065	Vehicles
Jumlah	212.345.234.374	85.902.886.219	--	48.628.099.922	74.205.999	249.545.814.672	Total
<b>Nilai Buku</b>	<b>415.439.953.161</b>					<b>621.791.835.556</b>	<b>Net Book Value</b>

	2013				
	Saldo Awal /	Penambahan /	Pengurangan /	Saldo Akhir /	
	Beginning Balance	Addition	Deduction	Ending Balance	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Biaya Perolehan:</b>					<b>Acquisition Cost</b>
Tanah	59.367.538.524	16.997.530.901	107.994.333	76.257.075.092	Land
Gedung	74.628.015.345	8.383.925.791	683.729.880	82.328.211.256	Building
Perlengkapan Kantor	10.978.666.602	2.514.561.292	87.128.205	13.406.099.689	Office Supplies
Peralatan Proyek	242.596.756.350	165.498.083.718	40.862.400	408.053.977.668	Project Equipments
Kendaraan	13.035.122.665	--	829.161.820	12.205.960.845	Vehicles
Jumlah	400.606.099.486	193.394.101.702	1.748.876.638	592.251.324.550	Total
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>					<b>Assets in Progress</b>
Gedung dan Pabrik	--	35.533.862.985	--	35.533.862.985	Building and Plant
<b>Akumulasi Penyusutan:</b>					<b>Accumulated Depreciation</b>
Gedung	45.382.934.518	3.717.449.476	424.620.332	48.675.763.662	Building
Perlengkapan Kantor	6.206.976.506	1.324.700.464	49.001.325	7.482.675.645	Office Supplies
Peralatan Proyek	99.106.354.119	47.135.447.509	24.339.218	146.217.462.410	Project Equipments
Kendaraan	9.976.211.829	749.124.166	756.003.338	9.969.332.657	Vehicles
Jumlah	160.672.476.972	52.926.721.615	1.253.964.213	212.345.234.374	Total
<b>Nilai Buku</b>	<b>239.933.622.514</b>			<b>415.439.953.161</b>	<b>Net Book Value</b>

Aset tetap, berupa tanah dan bangunan dijadikan jaminan atas perolehan kredit dari bank. Sebagian tanah berikut bangunannya dijadikan jaminan kepada Bank BNI (Catatan 19.4), Bank Mandiri (Catatan 19.2), Bank BRI (Catatan 19.5) dan Indonesia Eximbank (Catatan 19.1) masing-masing sebesar Rp 109.135.230.000, Rp 6.750.000.000, Rp 16.186.000.000 dan Rp 5.153.000.000, dengan nilai keseluruhan Rp 137.224.230.000, dan nilai pasar tanah dan bangunan yang dijamin sebesar Rp 367.571.040.000.

Fixed assets, such as land and buildings are used as collateral for bank loans. Some land and buildings are used as collaterals to Bank BNI (Note 19.4), Bank Mandiri (Note 19.2), Bank BRI (Note 19.5) and Indonesia Eximbank (Note 19.1) amounted to Rp 109,135,230,000, Rp 6,750,000,000, Rp 16,186,000,000 and Rp 5,153,000,000, respectively, with total amount of Rp 137,224,230,000, and the market value of the lands and buildings as collateral amounted to Rp 367,571,040,000.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**17. ASET TETAP (Lanjutan)**

Jalan tol dalam penyelesaian merupakan biaya feasibility study untuk investasi jalan tol baru oleh PT WTR (Entitas Anak) yang akan dibebankan jika proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Gedung dan pabrik dalam penyelesaian per 31 Desember 2014 sebesar Rp 79.698.194.142 terutama terdiri dari pabrik listrik tenaga hydro dalam penyelesaian dari PT Waskita Sangir Energi (Entitas Anak) sebesar Rp 42.548.807.879, pabrik beton dalam penyelesaian yang berlokasi di Sadang sebesar Rp 36.761.576.712, PT WBP sebesar Rp 44.362.440 dan gedung arsip dalam penyelesaian berlokasi di Ciputat sebesar Rp 387.809.551. Progres penyelesaian PT Waskita Sangir Energi dan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar 26,12%, 99% dan 99%, sedangkan estimasi penyelesaian masing-masing 2016, 2015, dan 2015.

Pengurangan aset tetap tahun per 31 Desember 2014 dengan nilai buku sebesar 153.942.658.103 merupakan aset tetap yang diinbrengkan menjadi tambahan setoran modal di PT Waskita Beton Precast (PT WBP) (Entitas Anak) berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH, No 60 tanggal 21 Nopember 2014.

Penghapusbukuan aset tetap per 31 Desember 2014 dengan nilai buku Rp 83.830.001 dan Rp 74.206.000 merupakan penghapusbukuan aset tetap di Timor Leste (eks Kantor Cabang Timor Timur) berdasarkan Berita Acara Penghapusan Aset Tetap No 239/WK/DIV.REG.III/2014 tanggal 24 Maret 2014. Penghapusbukuan aset tetap dilakukan karena Perusahaan tidak dapat menguasai aset tetap tersebut lagi, sedangkan penghapusbukuan sebesar Rp 29.487.000 merupakan penghapusbukuan perlengkapan kantor pada PT Waskita Sangir Energi (Entitas Anak).

Pengurangan aset tetap per 31 Desember 2013 sebesar Rp 1.748.876.638 terdiri dari nilai perolehan sebesar Rp 763.181.818 atau dengan nilai buku Rp 53.721.813 yang dijual senilai Rp 275.000.000. Nilai perolehan sebesar Rp 683.729.880 atau dengan nilai buku Rp 259.109.551 dipindahbukukan sebagai aset tetap dalam pengembangan, tanah Kav 10 Cawang senilai Rp 107.994.333 dipindahbukukan sebagai properti investasi (Catatan 16) dan nilai perolehan sebesar Rp 193.970.607 merupakan aset tetap milik proyek KSO.

Aset tetap dalam penyelesaian per 31 Desember 2013 sebesar Rp 35.533.862.985 terutama terdiri dari pabrik listrik tenaga hydro dalam penyelesaian dari PT Waskita Sangir Energi (Entitas Anak) sebesar Rp 22.418.359.358 dan pabrik beton dalam penyelesaian yang berlokasi di Sadang sebesar Rp 12.727.694.076. Progres penyelesaian PT Waskita Sangir Energi dan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2013 masing-masing sebesar 14,78% dan 60,37%.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. FIXED ASSETS (Continued)**

*Toll road under construction represent feasibility study expenses for the new toll road investment by PT WTR (Subsidiary Entity), which will be expenses if the project is not built.*

*The building and plant under construction as of December 31, 2014 amounted to Rp 79,698,194,142 mainly represents hydro electricity power plant in progress belongs to PT Waskita Sangir Energi (Subsidiary Entity) amounting to Rp 42,548,807,879, precast plant in progress located in Sadang amounted to Rp 36,761,576,712, PT WBP (Subsidiary Entity) amounted to Rp 44,362,440 and filing building located in Ciputat amounted to Rp 387,809,551. Progress completion of PT Waskita Sangir Energi and Company until December 31, 2014 are 26.12, 99%, and 99%, while the estimation of completion are 2016, 2015, and 2015, respectively.*

*Deduction of fixed assets as of December 31, 2014 amounted to Rp 153,942,658,108 represent fixed assets which is given as an additional capital in PT Waskita Beton Precast (PT WBP) (Subsidiary) based on Notarial Deed, Fathiah Helmi, SH, No 60 dated November 21, 2014.*

*Write-off of fixed assets at December 31, 2014 with a book value of Rp 83,830,001 and Rp 74,206,000 represent a write-off of fixed assets in Timor-Leste (formerly East Timor Branch Office) based Minutes of Meeting Write off of Fixed Assets No. 239/WK/ DIV.REG.III / 2014 dated March 24, 2014. The write off of fixed assets because the Company cannot control the fixed assets anymore, while the write off amounted to Rp 29,487,000 represent is a write-off office equipment at PT WSE (Subsidiary).*

*Deduction of fixed assets as of December 31, 2013 amounted to Rp 1,748,876,638 consisting of the acquisition value of Rp 763,181,818 or the book value of Rp 53,721,813, which is sold at Rp 275,000,000. The acquisition value of Rp 683,729,880 or the book value Rp 259,109,551 has been transferred as a fixed asset under construction, Kav 10 Cawang land amounted to Rp 107,994,333 is reclassified as investment property (Note 16), acquisition value of Rp 193,970,607 is fixed assets of project which is owned by JO.*

*The fixed assets under construction as of December 31, 2013 amounted to Rp 35,533,862,985 mainly represents hydro electricity power plant in progress belongs to PT Waskita Sangir Energi (Subsidiary Entity) amounting to Rp 22,418,359,358 and precast plant in progress located in Sadang amounting to Rp 12,727,694,076. Progress completion of PT Waskita Sangir Energi and the Company until December 31, 2013 are 14.78% and 60.37%, respectively.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. ASET TETAP (Lanjutan)**

**17. FIXED ASSETS (Continued)**

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

*Depreciation expenses are allocated as follows:*

	2014 Rp	2013 Rp	
Beban Pokok Pendapatan	79.739.494.133	47.135.447.509	<i>Cost of Revenues</i>
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 38)	6.163.392.086	5.791.274.106	<i>General and Administration Expenses (Note 38)</i>
Jumlah	85.902.886.219	52.926.721.615	<i>Total</i>
Pengurangan	(48.628.099.922)	--	<i>Deduction</i>
Hapus buku	(74.205.999)	--	<i>Written Off</i>
<b>Jumlah setelah pengurangan dan hapus buku</b>	<b>37.200.580.298</b>	<b>52.926.721.615</b>	<b><i>Total after deduction and written off</i></b>

Penjualan aset tetap untuk kendaraan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

*Sale of fixed assets for vehicles for the years ended December 31, 2014 and 2013, are as follows:*

Tahun/ Year	Nilai Penjualan Aset Tetap/ Selling Price of Fixed Assets	Nilai Buku Aset Tetap/ Book Value of Fixed Assets	Kerugian atas Penjualan (Penghapusan) Aset Tetap/Loss on Sales (Disposal) of Fixed Assets
2013	275.000.000	53.721.813	221.278.187

Aset gedung, sarana untuk seluruh unit bisnis serta kantor pusat dan mesin dan peralatan pabrik precast telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 155.432.851.630 terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Himalaya Pelindung, PT Asuransi Staco Mandiri dan PT Asuransi Ramayana Tbk untuk jenis pertanggungan property all risk, gempa bumi, dan kebakaran.

*Buildings, facilities for all business units and head office and machineries and precast plant equipments were insured in the amount of Rp 155,432,851,630 against fires and other risks to PT Asuransi Tripakarta, PT Asuransi Himalaya Pelindung, PT Asuransi Staco Mandiri and PT Asuransi Ramayana Tbk for property all risks, earthquakes, and fires.*

Nama Asurandur Insurer	Jenis Aset/ Type of Assets	Periode Asuransi/ Insurance period		Nilai Pertanggungan/ The Sum Insured Rp	
PT Asuransi Himalaya Pelindung	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	1.679.300.000
PT Asuransi Himalaya Pelindung	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	1.679.300.000
PT Asuransi Tri Pakarta	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	764.300.000
PT Asuransi Tri Pakarta	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	764.300.000
PT Asuransi Tri Pakarta	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	539.800.000
PT Asuransi Tri Pakarta	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	36.255.110.000
PT Asuransi Tri Pakarta	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	36.394.000.000
PT Asuransi Staco Mandiri	Bangunan dan Sarana	01/08/2014	s.d	01/08/2015	2.580.000.000
PT Asuransi Ramayana Tbk	Truck Mixer	17/09/2014	s.d	17/09/2015	26.905.950.000
PT Asuransi Ramayana Tbk	Mesin dan Peralatan	17/09/2014	s.d	17/09/2015	29.517.585.000
PT Asuransi Ramayana Tbk	Peralatan	17/09/2014	s.d	17/09/2015	1.933.570.000
PT Asuransi Ramayana Tbk	Truck Mixer	17/09/2014	s.d	17/09/2015	16.419.636.630
<b>Jumlah</b>					<b>155.432.851.630</b>

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset tetap yang diasuransikan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi.

*Management believes that insurance coverage for fixed assets which have been insured are adequate to cover the possible losses.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**18. ASET LAIN-LAIN**

**18. OTHER ASSETS**

	2014 Rp	2013 Rp	
Perangkat Lunak	11.504.653.124	9.435.894.563	Software
Beban Kontrak yang Ditangguhkan	13.689.566.373	6.230.599.833	Contract Deferred Charges
Kontrak Sewa Jangka Panjang	6.176.028.328	3.437.143.129	Long Term Rent Contract
Tanah dan Bangunan	1.467.200.000	1.890.993.032	Lands and Buildings
Aset Tetap Tidak Digunakan Untuk Dijual	185.172.515	185.172.516	Fixed Assets are Not Used for Sale
<b>Jumlah</b>	<b>33.022.620.340</b>	<b>21.179.803.073</b>	<b>Total</b>

Perangkat lunak merupakan pembayaran sampai dengan tahap enam atas pembelian ERP MS Dynamics AX2012 yaitu perangkat lunak yang akan digunakan untuk sistem akuntansi Perusahaan.

*Software represents the payment until the sixth phases for the purchasing of ERP MS Dynamics AX2012 which will be used for the Company's accounting system.*

Beban kontrak yang ditangguhkan merupakan beban yang ditangguhkan atas proyek-proyek yang sedang berjalan, yang akan dibebankan sebagai beban kontrak pada saat proyek tersebut dilaksanakan.

*Contract deferred charges represent deferred expense of the on-going project, which will be charged as expense when the project contract is executed.*

Kontrak sewa jangka panjang merupakan biaya sewa dibayar dimuka jangka panjang dengan jangka waktu 2 - 5 tahun.

*Long-term rent contracts represent long term prepaid rent with a period of 2 - 5 years.*

Aset lain-lain tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:

*Other assets land and building as follows:*

1. Tanah di Cengkareng senilai Rp 423.793.032, tanah tersebut dibeli oleh Perusahaan pada tanggal 21 Mei 1991. Kemudian ditahun 1996 Perusahaan menyampaikan Surat kepada Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat mengenai peruntukkan tanah tersebut. Kemudian Perusahaan memperoleh jawaban berdasarkan Surat Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat Suku Dinas Tata Kota No 288/17125 tanggal 18 Juli 1996, yang menyebutkan sesuai dengan Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Kalideres tahun 2005 lokasi tanah tersebut diperuntukkan untuk Penyempurnaan Hijau Umum (PHU). Sehingga Perusahaan tidak dapat memproses sertifikat kepemilikan lebih lanjut.
2. Apartemen sahid berlokasi di Jalan K.H. Mansur Jakarta dengan nilai sebesar Rp 1.467.200.000. Apartemen Sahid merupakan kompensasi pembayaran piutang retensi dari PT Sahid Inti Dinamika pada tanggal 22 Oktober 1997.

1. *Land located in Cengkareng with value of Rp 423,793,032, this land was purchased by the Company on May 21, 1991. Then in 1996, the Company submitted a letter to the Head of City Planning, West Jakarta regarding the designation of the land. Then the Company received the answer by letter from the Sub Department of City Planning, West Jakarta District No 288/17125 dated July 18, 1996, which stated that in accordance with the planning of the Kalideres District year 2005, the land is allocated for the Public Green Improvement (PHU). So that the Company can not process the certificated of ownership furthermore.*
2. *Apartment Sahid located in K.H.Mansur Street Jakarta with value of Rp 1,467,200,000. Sahid Apartement represents the payment compensation of retention receivables of PT Sahid Inti Dinamika on the date of October 22, 1997.*

Apartemen tersebut telah dinilai oleh penilai properti independen Toto Suharto dan Rekan melalui laporan tanggal 14 Januari 2015 dengan nilai sebesar Rp 3.925.500.000. Penilaian tersebut menggunakan cara-cara penilaian yang lazim, serta memperhatikan semua keterangan, faktor-faktor yang terdapat dalam laporan ini dan berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku.

*Apartment has been appraised by an Independent Property Appraiser Toto Suharto and Partners through a report dated Januari 14, 2015 with a fair value of Rp 3,925,500,000. The assessment using common methods assessments, and considering all informations, the factors contained in this report based on assumptions and limiting conditions.*

Perusahaan tidak menggunakan tanah dan apartemen tersebut dalam proses produksi ataupun menyewakannya kepada pihak ketiga, sehubungan aset tersebut tidak terkait dengan kegiatan utama Perusahaan.

*The Company does not use the land and the apartment in the process of producing or rent to the third parties in line with those assets are not related to the main activities of the Company.*

Perusahaan berpendapat bahwa apartemen tanah tersebut tidak memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai aset tetap, sehingga mencatat aset tersebut diatas sebagai aset lain-lain.

*Management believes that the land and the apartment do not meet the criteria to be classified as fixed assets, so that those assets are recorded as other assets.*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK**

**19. SHORT-TERM BANK LOANS**

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
Indonesia Eximbank	829.404.051.615	511.886.892.166	Indonesia Eximbank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	357.976.371.750	263.170.888.811	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	255.229.949.478	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>1.442.610.372.843</b>	<b>775.057.780.977</b>	<b>Total Related Parties</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT BPD Jabar dan Banten	174.519.121.449	99.750.000.000	PT BPD Jabar and Banten
PT Bank Panin Tbk	300.000.000.000	--	PT Bank Panin Tbk
PT Bank UOB Indonesia	--	--	PT Bank UOB Indonesia
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>474.519.121.449</b>	<b>99.750.000.000</b>	<b>Total Third Parties</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.917.129.494.292</b>	<b>874.807.780.977</b>	<b>Total</b>

Suku bunga per tahun :

*Interest rate per annum :*

	2014	2013	
Indonesia Eximbank	9,25%	8,00%	Indonesia Eximbank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,00%	9,00%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11,00%	9,00%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10,50%	9,75%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT BPD Jabar dan Banten	9,86%	8,75%	PT BPD Jabar dan Banten
PT Bank Panin Tbk	JIBOR + 3,0%	7,60%	PT Bank Panin Tbk
PT Bank UOB Indonesia	10,50%	8,50%	PT Bank UOB Indonesia

**1. Indonesia Eximbank**

**1. Indonesia Eximbank**

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Export (KMKE) sebesar Rp 900.000.000.000 sesuai surat No. PBD/SP3/11/03/2014 tanggal 20 Maret 2014. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo tanggal 27 Maret 2015.

*The Company obtained an Export Working Capital Facility (KMKE) amounted to Rp 900,000,000,000, according to the Letter No. PBD/SP3/11/2014 dated March 20, 2014. The facility will be due until March 27, 2015.*

Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) yang akan diterima dari proyek Upgrading Existing Suai Airport dari Ministry of Transport and Communication Government of the Democratic Republic of Timor Leste dan proyek Perluasan Gedung Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta (Catatan 5) dijaminkan atas utang bank Indonesia Eximbank. Serta tanah dan bangunan SHGB No. 592 a/n PT Waskita Karya (Persero) Tbk diikat Hak Tanggungan I sebesar Rp 5.153.000.000 (Catatan 17).

*The entire project bills (accounts receivable) will be received from Upgrading Existing Suai Airport project from the Ministry of Transport and Communication Government of the Democratic Republic of Timor Leste and Extended Terminal 3 Building Ultimate Project Soekarno Hatta Airport (Note 5) were pledged against bank loans of Indonesia Eximbank. And a plot of land and building with land right (SHGB) No. 592 on behalf of PT Waskita Karya (Persero) Tbk tied amounted to Rp 5,153,000,000 (Note 17).*

Total pinjaman kepada Indonesia Eximbank pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 829.404.051.615.

*The Company's loan to Indonesia Eximbank as of December 31, 2014 amounted to Rp 829,404,051,615.*

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada bank; memperoleh pinjaman baru atas proyek yang telah dibiayai oleh bank; memperluas atau mempersempit usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian pinjaman; penggunaan fasilitas kredit selain daripada untuk tujuan pembiayaan fasilitas kredit; mengajukan permohonan kepailitan kepada pengadilan; menjual atau memindahkan aset yang dijadikan jaminan; meminjamkan uang kepada siapapun, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal; bertindak sebagai penjamin atau menjaminkan harta kekayaan kepada pihak lain.

*This agreement also includes restrictions that are not allowed to be done by the Company without the prior written consent of the Bank among others, a merger, acquisition can be impact to pay the obligation to the bank; obtaining new loans on projects that have been financed by the bank; expand or narrow the business that may affect the repayment of loans; the usage of credit facilities for purposes other than financing credit facilities purposes; filed the bankruptcy petition to the court; sell or transfer assets used as collateral; lend money to anyone, except the result of normal business activities; act as a guarantor or pledge assets property to another party.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**1. Indonesia Eximbank (Lanjutan)**

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan dan dievaluasi oleh Bank setiap periode.

**2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai berikut :

Jenis-jenis Fasilitas	Limit/Plafond
Kredit Modal Kerja Rekening Koran	Rp 35 Milyar
Kredit Modal Kerja Transaksional	Rp 765 Milyar
Fasilitas <i>Supply Chain Financing (SCF)</i>	Rp 1.006 Milyar
Fasilitas Kredit ( <i>Non Cash Loan</i> )	Rp 2.000 Milyar
LC/SKBDN ( <i>Sub limit dari NCL</i> )	Rp 500 Milyar
Trust Receipt ( <i>Sub limit dari NCL</i> )	Rp 115 Milyar
Fasilitas <i>Treasury Line</i>	USD 2 Juta

Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada tanggal 14 Nopember 2014 sesuai dengan surat perjanjian No. CBG.CB1/SPPK.062/2013 tanggal 29 Oktober 2013. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- Cash collateral/*Deposito Berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 8.448.200.000 yang telah diikat gadai (Catatan 4).
- 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan kantor cabang Pekanbaru, yang telah diserahkan dan telah diikat Hak Tanggungan (HT) dengan nilai Rp 6.750.000.000 (Catatan 17).
- Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) per 31 Desember 2014 yang dijamin atas utang bank PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 5) adalah tagihan termin atas proyek tagihan termin atas proyek tagihan termin atas proyek Universitas Sebelas Maret, Proyek Waduk Gondang dan Proyek Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; memindah tangankan barang jaminan; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lain termasuk obligasi; mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang telah dijamin kepada pihak lain; menjaga rasio keuangan aset tetap yang akan diperoleh/dibeli oleh Perusahaan di kemudian hari, maka akan dijadikan agunan kredit di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; Perusahaan akan memprioritaskan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan afiliasinya untuk menjadi *arranger*, *underwriter*, dan lain-lain dalam hal perusahaan melakukan *corporate action* dalam rangka *raising fund* di dalam negeri.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**1. Indonesia Eximbank (Continued)**

The Company is required to maintain the *debt to equity ratio* maximum 3 (three) times. The fulfillment of bank lending restrictions reported by the Company and will be evaluated by the Bank each reporting period.

**2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

The Company entered into the credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as follows :

Jatuh Tempo/Due Date	The Facilities
14/11/2015	Bank Statement Working Capital
14/11/2015	Transactional Working Capital
14/11/2015	Supply Chain Financing Facility (SCF)
14/11/2015	Credit Facility (Non Cash Loan)
14/11/2015	LC/SKBDN (Sub limit from NCL)
14/11/2015	Trust Receipt (Sub limit from NCL)
14/11/2015	Treasury Line Facility

The facilities will be due on November 14, 2014 in accordance to agreement letter No. CBG.CB1/SPPK.062/2013 date on October 29, 2013. The loan facilities are secured and tied with:

- Collateral cash/ Time Deposit* in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk deposits amounted to Rp 8,448,200,000 which is tied by pledge (Note 4).
- 3 (three) lots of land and buildings at Pekanbaru Branch offices, which have been submitted and tied with a Guarantee Rights amounted to Rp 6,750,000,000 (Note 17).
- The total project claims (accounts receivable) as of December 31, 2014 were pledged against bank loan to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 5) are accounts receivables of University of Sebelas Maret Project, Gondang Reservoir Project and Raknamo Dam Project in Kupang District.

This agreement also includes restrictions that are not allowed to be done by the Company without the prior written consent of the Bank, among others; transfer the collateral; obtain other credit facilities or loans from other financial institutions including the bonds; bind itself as guarantor of the debt or pledge the Company's assets that have pledged to another party; maintain the financial ratios of fixed assets to be acquired/purchased by the Company in the future, it will be used as collateral for loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk The Company will be give the priority to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and its affiliates to be an arranger, underwriter, and others in terms of the Company doing corporate action in order to fund raising in the country.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanjutan)**

**2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Continued)**

Total pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 31 Desember 2014 sebesar Rp 357.976.371.750.

Total loan to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as of December 31, 2014 amounted to Rp 357,976,371,750.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt equity ratio* maksimal 4 (empat) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

The Company is required to maintain the following financial ratios: *current ratio* at least 1 (one) time, *loan to equity ratio* of a maximum 4 (four) times and *debt service coverage* of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

**3. PT BPD Jabar dan Banten Tbk**

**3. PT BPD Jabar dan Banten Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja sub limit *non cash loan* yang dapat digunakan untuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), LC, dan Bank Garansi sebesar Rp 250.000.000.000 sesuai surat Nomor: 286/Bdg-Kom/An/XI/2014 tanggal 5 Nopember 2014. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan 2 Februari 2015. Pada 31 Desember 2014 total pinjaman Perusahaan adalah sebesar Rp 174.519.121.449.

The Company obtained a sub-limit non cash loan working capital loan facility that can be used for Domestic Letters of Credit Documented (SKBDN), LC, and the Bank Guarantee amounted to Rp 250,000,000,000 according to the Letter No. 286/Bdg-Kom/An/XI/2014 dated November 5, 2014. The facility can be used until February 2, 2015. As of December 31, 2014 the Company's total loan amounted to Rp 174,519,121,449.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; memindah tangganan agunan/tagihan termin; mengubah bentuk objek agunan/kredit; memperoleh fasilitas kredit investasi atau pinjaman lain dari pihak ketiga untuk proyek yang sama; mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dibiayai kepada pihak lain; melakukan merger, akuisisi yang dapat menghambat kewajiban pembayaran kredit kepada kreditur dan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan selain untuk kegiatan usaha sehari-hari; mengajukan permohonan dan atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang, menjual atau memindahtangankan dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan yang sudah diserahkan sebagai Agunan kepada Kreditur selain dalam rangka memperdagangkan hasil produksi, meminjamkan uang kepada siapapun juga, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Debitur; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajiban atas fasilitas kredit kepada pihak lain.

This agreement also includes restrictions that are not allowed to be done by the Company without the prior written consent of the Bank, among others; transfer the collateral / billing terms; change the type of the object of credit collateral; obtain an investment credit facility or other loans from third parties for the same project; bind itself as guarantor of the debt or mortgage the Company's financed assets that financed the property to another party; mergers, acquisitions that could impact to the credit payment obligations to creditors and the sale or transfer or release the rights to the property in addition to the daily business activities; to apply and or encouraging others to apply to the Court to be declared bankrupt or delay payment of the debt, sell or transfer in any way or waive some or all of the assets that have been submitted as collateral to the lender except in order to trade in addition to production, lend money to anybody, except result of normal business activities in the Debtor's business; to give up some or all of the rights and obligations of the credit facility or to another party.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**3. PT BPD Jabar dan Banten Tbk (Lanjutan)**

Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) per 31 Desember 2014 yang dijaminan atas utang bank PT BPD Jabar dan Banten Tbk adalah yaitu tagihan termin atas Proyek Pembangunan Stadion Balikpapan Tahap III, Proyek Sistem Drainase Primer Gunungsari (Paket Banyu Urip 2) dan Proyek Gedung Kantor PGN Area Palembang (Catatan 5).

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank BNI (Persero) Tbk sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja Revolving Rp 200.000.000.000.
- b. Kredit Modal Transaksional Rp 800.000.000.000.
- c. Kredit Modal Kerja *Supply Chain Financing* (SCF) Rp 200.000.000.000.
- d. Bank Garansi Rp 3.000.000.000.000.
- e. *Letter of Credit* (L/C) atau SKBDN USD 40.000.000.

Berdasarkan surat No BIN/2.2/039/R tanggal 17 Maret 2014, jangka waktu pinjaman sejak tanggal 27 Maret 2014 dan jatuh tempo 26 Maret 2015. Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan:

- a. Barang-barang stock telah diikat Fidusia Akta Nomor 5 tanggal 13 Agustus 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia; Sertifikat Jaminan Fidusia No C2-4831 HT.04.06.TH.2001/NTSD tanggal 26 Januari 2001 senilai Rp 8.268.049.363.
- b. Satu bidang tanah SHGB No.2001 tanggal 1 Juni 2006 dan berakhir haknya pada tanggal 1 Januari 2026, seluas 5.798 m2, terletak di Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 5.191.600.000 sesuai dengan Sertifikat Hak Tanah (SHT) I No. 323 (Catatan 17).
- c. Satu bidang tanah SHGB No 724 tanggal 29 Maret 1988 s/d 1 Desember 2027 seluas 2.098 m2 terletak di Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, a.n. PT Waskita karya (Persero) Tbk senilai Rp 1.500.000.000 sesuai dengan SHT No.397/T/1988 dan senilai Rp 31.000.000.000 sesuai dengan SHT.II No.408/2004 (Catatan 17).

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**3. PT BPD Jabar dan Banten Tbk (Continued)**

*The entire project bills (accounts receivable) as of December 31, 2014 were pledged against bank loans PT BPD Jabar dan Banten is Development of Balikpapan Stadium Project Phase III, Gunungsari Primary Drainage System Project (Banyu Urip 2 Package) and PGN Office Building Palembang Project (Note 5).*

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk**

*The Company entered into the credit facilities from PT Bank BNI (Persero) Tbk as follows :*

- a. *Revolving Working Capital Loan of Rp 200,000,000,000.*
- b. *Transactional Capital Loan of Rp 800,000,000,000.*
- c. *Supply Chain Financing (SCF) Working Capital Loan of Rp 200,000,000,000.*
- d. *Bank Guarantee of Rp 3,000,000,000,000.*
- e. *Letter of Credit (L/C) or SKBDN of US\$ 40,000,000.*

*According to letter No BIN/2.2/039/R dated March 17, 2014, the term of loan since date March 27, 2014 and will be due on March 26, 2015. The loan facilities are secured and bounded with:*

- a. *Inventory which has been tied by Fiduciary Deed Number 5 dated August 13, 1998 and was registered at the Fiduciary Registration Office; the Fiduciary Certificate No. C2-4831 HT.04.06.TH.2001/NTSD dated January 26, 2001 amounted to Rp 8,268,049,363.*
- b. *A plot of land with land right (SHGB) No.2001 dated June 1, 2006 and the right will expire on January 1, 2026, an area of 5,798 m2, located at Kelurahan Kuta Alam, Banda Aceh, Aceh, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 5,191,600,000 according to Land Right Certificate (SHT) I No.323 (Note 17).*
- c. *A plot of land with land right (SHGB) No. 724 dated March 29, 1988 until December 1, 2027, an area of 2,098 m2 located at Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, East Java under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 1,500,000,000 according to SHT No. 397/T/1988 and amounted to Rp 31,000,000,000 according to SHT .II No.408/2004 (Note 17).*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Lanjutan)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Continued)**

- d. Satu bidang tanah SHGB No. 38, tanggal 21 April 2003 s/d 20 April 2022, seluas 1.332 m2, terletak di Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, a/n PT Waskita Karya (Persero) Tbk Cabang NTB senilai Rp 1.332.000.000 sesuai dengan SHT.I No.687/2007 (Catatan 17).
- e. Satu bidang tanah SHGB No. 01/Tanjung tanggal 13 Nopember 1987 s/d 13 Oktober 2027, seluas 1.095 m2, terletak di Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 30.000.000 sesuai dengan S.Hip. No.3181 dan senilai Rp 2.222.100.000 diikat SHT II No. 01057/2007 (Catatan 17).
- f. Satu Bidang tanah SHGB No. 4 tanggal 10 Oktober 1998 sampai dengan 19 Desember 2028 seluas 2.511 m2, terletak di Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, Sumatera barat, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 651.430.000 (Catatan 17).
- g. Satu bidang tanah SHGB No. 7 tanggal 10 Pebruari 1993 sampai dengan 7 Pebruari 2013, seluas 806 m2, terletak di Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 1.270.880.000 sesuai dengan SHT.I. No. 3129/2001 dan senilai Rp 460.020.000 sesuai dengan SHT.II. No.1151/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 7 Pebruari 2033 (Catatan 17).
- h. Satu bidang tanah SHGB No. 436 tanggal 10 Maret 1998 sampai dengan 19 Juni 2036, seluas 1.004 m2, terletak di Desa Sungai Raya, Kodya Pontianak, Kalimantan Barat, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 464.850.000 sesuai dengan SHT.I.No. 356/2001 dan senilai Rp 747.850.000 sesuai dengan SHT.II.No. 169/2007 (Catatan 17).
- i. Satu bidang tanah SHGB No. 1085 tanggal 18 Desember 2006 sampai dengan 23 Nopember 2026, seluas 1.404 m2, terletak di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya Jawa Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2.665.700.000 sesuai dengan SHT.I. No. 2952/2007 (Catatan 17).

- d. A plot of land with land right (SHGB) No. 38, April 21, 2003 until April 20, 2022, an area of 1,332 m2, located at Jl. Langko Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram, West Nusa Tenggara, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk NTB Branch amounted to Rp 1,332,000,000 according to SHT.I No.687/2007 (Note 17).
- e. A plot of land with land right (SHGB) No. 01/Tanjung dated November 13, 1987 until October 13, 2027, an area of 1,095 m2, located at Desa/Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Lampung, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 30,000,000 according to S.Hip. No.3181 and amounted to Rp 2,222,100,000 tied by SHT II No. 01057/2007 (Note 17).
- f. A plot of land with land right (SHGB) No. 4 dated October 10, 1998 until December 19, 2028 an area of 2,511 m2, located at Desa/Kelurahan Betung-Tebal, Kecamatan Lubuk-Begalung, Padang, West Sumatra, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 651,430,000 (Note 17).
- g. A plot of land with land right (SHGB) No. 7 dated February 10, 1993 until February 7, 2013, an area of 806 m2, located at Kelurahan Belakanolo, Kecamatan Padang Barat, Padang, West Sumatra, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 1,270,880,000 according to SHT.I.No. 3129/2001 and amounted to Rp 460,020,000 according to SHT.II.No.1151/2007. The land right has been extended until February 7, 2033 (Note 17).
- h. A plot of land with land right (SHGB) No. 436 dated March 10, 1998 until June 19, 2036, an area of 1,004 m2, located at Sungai Raya, Pontianak, West Kalimantan, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 464,850,000 according to SHT.I.No. 356/2001 and amounted to Rp 747,850,000 according to SHT.II.No. 169/2007 (Note 17).
- i. A plot of land with land right (SHGB) No. 1085 dated December 18, 2006 until November 23, 2026, an area of 1,404 m2, located at Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya East Java, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 2,665,700,000 according to SHT.I.No 2952/2007 (Note 17).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Lanjutan)**

- j. Satu bidang tanah SHGB No. 82 tanggal 20 Oktober 1988 sampai dengan 13 April 2028, seluas 2.013 m2, terletak di Kelurahan Kalirungkut, Kodya Surabaya, Jawa Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 2.027.710.000 sesuai dengan SHT.I No. 4772/2001 dan senilai Rp 2.474.390.000 sesuai dengan SHT.II No. 2948/2007 (Catatan 17).
- k. Satu bidang tanah SHGB No. 2 tanggal 25 Juni 1997 sampai dengan 25 Juni 2017, seluas 1.000 m2, terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 402.860.000 sesuai dengan SHT.I. No. 390/2001 dan senilai Rp 636.540.000 sesuai dengan SHT.II. No. 239/2007 (Catatan 17).
- l. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 24 Oktober 1997 sampai dengan 24 Oktober 2017, seluas 595 m2, terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, Nusa Tenggara Timur, a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 49.260.000 sesuai dengan SHT.I.No. 374/2001 dan senilai Rp 39.740.000 sesuai dengan SHT.II. No. 240/2007 (Catatan 17).
- m. Satu bidang tanah SHGB No. 13 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 Juli 2023, seluas 4.830 m2, terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 457.590.000 sesuai dengan SHT.I. No. 375/2001 (Catatan 17).
- n. Satu bidang tanah SHGB No. 14 tanggal 22 Juli 1993 sampai dengan 22 April 2023, seluas 4.800 m2, terletak di Jl. Eltari II Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 288.000.000 sesuai dengan SHT.I. No. 375/2001 dan senilai Rp 602.410.000 sesuai dengan SHT.II. No. 238/2007 (Catatan 17).
- o. Satu bidang tanah SHGB No. 24 tanggal 11 Juni 1993 sampai dengan 25 Mei 2013, seluas 276 m2, terletak di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Wenang, Kodya Manado, Sulawesi Utara, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 263.530.000, sesuai dengan SHT.I.No. 737/2001 dan senilai Rp 121.670.000, sesuai dengan SHT.II. No. 667/2007. SHGB tersebut telah diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2033 (Catatan 17).

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Continued)**

- j. A plot of land with land right (SHGB) No. 82 dated October 20, 1988 to April 13, 2028, an area of 2,013 m2, located at Kelurahan Kalirungkut, Kodya Surabaya, East Java, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 2,027,710,000 according to SHT.I.No. 4772/2001 and amounted to Rp 2,474,390,000 according to SHT.II. No. 2948/2007 (Note 17).
- k. A plot of land with land right (SHGB) No. 2 dated June 25, 1997 until June 25, 2017, an area of 1,000 m2, located at Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, East Nusa Tenggara, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 402,860,000 according to SHT.I. No. 390/2001 and amount to Rp 636,540,000 according to SHT.II. No. 239/2007 (Note 17).
- l. A plot of land with SHGB No. 24 dated October 24, 1997 until October 24, 2017, an area of 595 m2, located at Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kodya Kupang, East Nusa Tenggara, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 49,260,000 according to SHT.I. No. 374/2001 and amounted to Rp 39,740,000 according to SHT.II. No. 240/2007 (Note 17).
- m. A plot of land with land right (SHGB) No. 13 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,830 m2, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 457,590,000 according to SHT.I. No. 375/2001 (Note 17).
- n. A plot of land with land right (SHGB) No. 14 dated July 22, 1993 until July 22, 2023, an area of 4,800 m2, located at Jl. Eltari II, Kecamatan Kupang Tengah, Kupang, East Nusa Tenggara, under the name of the Company amounted to Rp 288,000,000 according to SHT.I. No. 375/2001 and amounted to Rp 602,410,000 according to SHT.II. No. 238/2007 (Note 17).
- o. A plot of land with land right (SHGB) No. 24 dated June 11, 1993 until May 25, 2013, an area of 276 m2, located at Kelurahan Tikala Ares, Wenang district, Manado, North Sulawesi, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 263,530,000 according to SHT.I. No. 737/2001 and amounted to Rp 121,670,000 according to SHT.II. No. 667/2007. The land right has been extended until May 25, 2033 (Note 17)

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Lanjutan)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Continued)**

- p. Satu bidang tanah SHGB No. 1 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020, seluas 4.040 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 1.516.520.000, sesuai dengan SHT.I.No.2927/2001 dan senilai Rp 994.180.000 sesuai dengan SHT.II.No. 1613/2007 (Catatan 17).

- p. A plot of land with land right (SHGB) No. 1 dated January 7, 1992 until December 28, 2020, an area of 4,040 m<sup>2</sup>, located at Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, West Java, under the name PT Waskita Karya (Persero) amounted to Rp 1,516,520,000 according to SHT.I. No. 2927/2001 and amounted to Rp 994,180,000 according to SHT.II. No. 1613/2007 (Note 17).

- q. Satu bidang tanah SHGB No. 30 tanggal 26 Januari 2007 sampai dengan 26 Januari 2027, seluas 1.250 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, a/n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk senilai Rp 3.404.000.000 sesuai dengan SHT.I. No. 2012/2007 (Catatan 17).

- q. A plot of land with land right (SHGB) No. 30 dated January 26, 2007 until January 26, 2027, an area of 1,250 m<sup>2</sup>, located at Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Bali, under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to Rp 3,404,000,000 according to SHT.I.No. 2012/2007 (Note 17).

Tanah yang dijaminkan termasuk bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Land which is pledged as collateral consist of buildings and related things already exist in the land, or to will be exist there.

- r. Kendaraan bermotor yang terdiri dari 2 (dua) unit Toyota New Camry tahun 2010, yang diikat fidusia sesuai Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Nomor (3) 18 tanggal 6 Pebruari 2012 senilai Rp 404.000.000 (Catatan 17).

- r. Vehicles consist of 2 (two) unit 2010 year Toyota New Camry tied by fiduciary in accordance to Fiduciary Guarantee Deed Number (3) 18 dated February 6, 2012 amounted to Rp 404,000,000 (Note 17).

- s. Deposito Berjangka a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang ditempatkan di BNI senilai Rp 5.469.000.000 Bilyet Deposito No. Seri AA 548877 tanggal 23 Nopember 2004 diikat secara gadai sesuai Perjanjian Gadai No. 2005.002 tanggal 29 April 2005 (Catatan 4).

- s. Time Deposits under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk which is placed in BNI amounted to Rp 5,469,000,000, Deposit Series No. AA 548877 dated November 23, 2004 bound by pledge in accordance with Pledge Agreement No. 2005.002 dated April 29, 2005 (Note 4).

- t. Deposito Berjangka a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang ditempatkan di BNI senilai Rp 8.143.200.000 Bilyet Deposito No. Seri AB 621858 tanggal 15 Januari 2008/Gadai/002 tanggal 12 Pebruari 2008 (Catatan 4).

- t. Time Deposits under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk which is placed in BNI amounted to Rp 8,143,200,000, Deposit No. AB Series 621858 dated January 15, 2008/Gadai/002 dated February 12, 2008 (Note 4)

- u. Deposito Berjangka a.n. PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang ditempatkan di BNI senilai Rp 2.215.733.745 Bilyet Deposito No. Seri PAA 0360531 dan PAA 0361348 sesuai Surat No. 538/BK/WK/2011 tanggal 27 Mei 2011 (Catatan 4).

- u. Time Deposits under the name of PT Waskita Karya (Persero) Tbk which is placed in BNI amounted to Rp 2,215,733,745, Deposit No. PAA Series 0360531 and 0361348 based on No. 538/BK/WK/2011 dated May 27, 2011 (Note 4).

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Lanjutan)**

**4. PT Bank BNI (Persero) Tbk (Continued)**

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; melakukan perubahan kegiatan usaha; menjual atau memindahkan hak atau mengalihkan seluruh atau sebagian kekayaan/aset milik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi kecuali; menjual atau mengalihkan aset kecuali yang bersifat *arm's length*; menjual atau mengalihkan aset sebagai ganti atau digantikan aset lainnya yang sebanding atau lebih baik tipe sifat dan kualitasnya; menjual atau mengalihkan aset dalam rangka pelaksanaan reorganisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang penjualan aset tersebut tidak mempunyai akibat material; dilakukan dengan syarat akan menjadi badan hukum yang bertahan (*surviving legal entity*); melakukan perubahan anggaran dasar yang dapat menimbulkan akibat material; mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada instansi yang berwenang.

*This agreement also includes restrictions that are not allowed by the Company without the prior written consent of the Bank among others, to change business activities; sell or transfer the rights or transfer all or part of the property / assets owned in a single transaction or in a transaction unless; sell or transfer assets unless that is arm's length; sell or transfer assets in exchange for or replacement of other assets that are comparable or better type of the nature and quality; sell or transfer assets in the context of the reorganization by the Government of Republic of Indonesia through the sale of these assets do not have the effect of material; perform the separation of the dissolution of the merger amalgamation or reconstruction company other than reorganisasi to do by the Government of the Republic of Indonesia as long as no material effect; corporate actions with other members of the corporation provided that the action was done on the condition will be the surviving corporation (the surviving legal entity; make amendments to it may cause due to the material; filed a petition for bankruptcy or suspension of payment obligation payable to the relevant authorities.*

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: *current ratio* minimal 1 (satu) kali, *debt equity ratio* maksimal 8 (delapan) kali dan *debt service coverage* minimal 100%. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

*The Company is required to maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one), debt to equity ratio of a maximum 8 (eight) and debt service coverage of at least 100%. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.*

Pada 31 Desember 2014 pinjaman ke PT Bank BNI (Persero) Tbk telah dilunasi.

*As of December 31, 2014 the loan to PT Bank BNI (Persero) Tbk has been settled.*

**5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

**5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Transaksional sebesar Rp 300.000.000.000 sesuai surat nomor R.II.170-ADK/DKR-2/07/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan fasilitas *non cash loan* Rp 1.000.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 15 Juli 2015.

*The Company entered into a working capital credit line facility amounted to Rp 300,000,000,000 according to letter number R.II.170-ADK/DKR-2/07/2014 dated July 15, 2014 and non cash loan facility amounted to Rp 1,000,000,000,000. This facility can be used until date July 15, 2015.*

Fasilitas pinjaman ini dijamin dan diikat dengan sebidang tanah SHGB No.655 tanggal 7 Januari 1992 sampai dengan 28 Desember 2020 yang telah diikat Hak Tanggungan dengan nilai Rp 16.186.000.000

*Loan facilities are secured and tied with a piece of land SHGB No. 655 dated January 7, 1992 until December 28, 2020 that have been tied amounted to Rp 16,186,000,000.*

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain; mengajukan pernyataan kepailitan kepada pengadilan; menyewakan aset yang dijaminkan kepada bank; melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.

*This agreement also includes restrictions that are not allowed to be done by the Company without the prior written consent of the Bank among others, filed for bankruptcy to the court, leased assets as collateral to the bank; to pay interest on shareholder loans.*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
(Lanjutan)**

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *current ratio* minimal 1 (satu) kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2014 pinjaman ke PT Bank BRI (Persero) Tbk sebesar Rp 255.229.949.478.

**6. PT Bank Panin Tbk**

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Money Market* sebesar Rp 300.000.000.000, dan Garansi Bank sebesar Rp 100.000.000.000 dan fasilitas *foreign exchange* USD 5.000.000 sesuai dengan surat No 085/IBD/EXT/14 tanggal 18 Juni 2014. Fasilitas dapat digunakan sampai dengan tanggal 24 Mei 2015.

Perjanjian ini juga mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain menerima pinjaman atau kredit baru dari bank lain atau pihak ketiga yang jumlahnya dapat menyebabkan dilanggarnya rasio keuangan pada *financial covenant*; mengikatkan diri sebagai pinjaman terhadap pihak ketiga; membuka usaha baru selain dari usaha yang telah ada; membubarkan atau melikuidasi Perusahaan; merubah bidang/jenis usahanya; mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas utang-utangnya (*surseance van betaling*); merubah bentuk hukum atau status hukum Perusahaan; merubah anggaran dasar Perusahaan; menyewakan Perusahaan kepada pihak ketiga; menyewakan/memindah tangankan barang-barang yang dipergunakan sebagai jaminan; memindahtangankan Perusahaan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga; mengeluarkan saham-saham baru dan menjual saham-saham yang telah ada; membayar hutangnya kepada para pemegang saham dan atau para perseronya dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari; melakukan merger atau penggabungan usaha sehingga merubah komposisi kepemilikan saham; memperbolehkan pemegang saham untuk menarik kembali modal yang telah disetor, menjaminkan atau menggadaikan saham Perusahaan.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: Pinjaman berbunga dibagi total ekuitas tidak melebihi 2,5 kali, *EBITDA* dibagi beban bunga pinjaman lebih besar dari 2 kali dan aset lancar dibagi liabilitas lancar lebih besar 1 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**5. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
(Continued)**

*The Company is required to maintain the following financial ratios: current ratio at least 1 (one) times. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.*

*As of December 31, 2014 the loan to PT Bank BRI (Persero) Tbk is amounted to Rp 255,229,949,478.*

**6. PT Bank Panin Tbk**

*The Company obtained credit facilities market Rp 300,000,000,000 and the Bank Guarantee is amounted to Rp 100,000,000,000 and foreign exchange facility amounted to USD 5,000,000 according to letter No 085/IBD/EXT/14 dated June 18, 2014. This facility can used until date May 24, 2015.*

*This agreement also includes restrictions that are not allowed to be done by the Company without the prior written consent of the Bank, among others, received a loan or new credit from another bank or a third party whose numbers can lead to the violation of financial covenants on financial ratios; bind themselves as a loan against the third parties, new businesses opening other than an existing business; dissolve or liquidate the Company; change fields / types of business; to apply for bankruptcy or delayed payment of its debts (van surseance betaling); change the legal form or legal status of the Company; change the Company's articles of association; leasing the Company to a third party; lease / transfer the goods used as collateral; transfer the Company in any form to any third party; issuing new shares and selling existing shares; to pay their debts to shareholders and shares or the shareholder in any form for now existing or that will be arise in the future; a merger or business combination that change the composition of share ownership; allow the shareholders to withdraw the capital that has been deposited, pledged or mortgaged of the Company's shares.*

*The Company is required to maintain the following financial ratios: loan to equity ratio maximum 2.5 (two point five) times, time interest earned ratio at least 2 (two) times and current ratio at least 1 (one) times. The fulfillment of bank lending restrictions will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (Lanjutan)**

**6. PT Bank Panin Tbk (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2014 pinjaman ke PT Bank Panin Tbk sebesar Rp 300.000.000.000.

Seluruh tagihan proyek (piutang usaha) per 31 Desember 2014 yang dijaminan atas utang bank PT Bank Panin adalah Proyek Jaringan Transmisi Brastagi – Kutacane, Proyek Pelaksanaan Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah Fase I, Proyek Gedung SKPD Kalimantan Utara, Proyek Jaringan Irigasi di Sangkub Kiri, Proyek PLTU Tenayan Paket I, Proyek PLTU Tenayan (Paket II), Proyek Menara Proteksi Indonesia dan Proyek Jalan Simpang Langgam – Langgam (Catatan 5).

**7. PT Bank UOB Indonesia**

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit *Working Capital Loan* sebesar Rp 300.000.000.000 sesuai dengan surat No 13/CPB/0283 tanggal 19 Desember 2013 dan fasilitas non cash Rp 350.000.000.000. Fasilitas tersebut dapat digunakan sampai dengan tanggal 19 Desember 2014. Sampai dengan saat ini masih dalam proses perpanjangan perjanjian kredit.

Perjanjian ini mencakup batasan-batasan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh Perusahaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank antara lain: tidak mengubah bisnis Perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan lisensi penting terkait dengan bisnis Perusahaan (jika ada). Tidak melakukan pelepasan aset secara signifikan, tidak terdapat perubahan yang merugikan kondisi keuangan Perusahaan. Menjaga rata-rata kepemilikan langsung atau tidak langsung oleh Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 51% sepanjang periode. Menyampaikan progres pekerjaan bulanan atas proyek yang dibiayai. Menyerahkan seluruh tagihan yang dikeluarkan atas proyek yang dibiayai. Menyampaikan seluruh perkara hukum, arbitrase atau perkara administrasi lainnya. Memberitahukan bank atas setiap perubahan komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Memberitahukan bank atas setiap kegagalan atau potensi kegagalan dan menyampaikan informasi lainnya sesuai dengan permintaan bank.

Perusahaan diwajibkan untuk mempertahankan *debt equity ratio* maksimal 3 (tiga) kali, *debt service coverage ratio* maksimal 1,5 kali dan *current ratio* maksimal 1,0 kali. Pemenuhan pembatasan pinjaman bank dilaporkan oleh Perusahaan setiap akhir tahun dan akan dievaluasi oleh Bank.

Pinjaman kepada PT Bank UOB Indonesia pada 31 Desember 2014 belum digunakan.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (Continued)**

**6. PT Bank Panin Tbk (Continued)**

As of December 31, 2014 the loan to PT Bank Panin Tbk is amounted to Rp 300,000,000,000.

The entire project bills (accounts receivable) as of December 31, 2014 were pledged against bank loans of PT Bank Panin Tbk is the Transmission Network Berastagi - Kutacane Project, implementation Wastewater Pipeline Network Optimization Phase 1, SKPD Building on North Kalimantan, Irrigation network Project in Sangkub Kiri, Power Plant Tenayan Package I & II Project, Protection of Indonesian Tower Project and Simpang Langgam Road Project - Langgam (Note 5).

**7. PT Bank UOB Indonesia**

The Company obtained Working Capital Loan Facility amounted to Rp 300,000,000,000 according to the letter of credit No 13/CPB/0283 dated December 19, 2013 and non cash facility amounted to Rp 350,000,000,000. This facility can be used until December 19, 2014. Currently, the extension of credit agreement is still in process.

This agreement also includes restriction is not allowed to be done by the Company without prior written consent from the Bank among others: not change the core business of the Company. The Company should maintained important licence regarding with the Company's business (if any). Do not release of significant assets, there is no adverse changes to the Company's financial condition. Maintain the average of direct ownership averages or indirect ownership of Government of Republic of Indonesia at least 51% during the period. To submit the monthly progress of projects funded. To submit all the litigation, arbitration or other administrative suit. To inform bank for every changes of the composition of the board of directors and the board of commissioners. To inform the bank for any failure or potential failure and to inform of other information according to the bank's request.

The Company is required to maintain debt equity ratio maximum 3 (three) times, debt service coverage ratio maximum 1.5 times and current ratio maximum 1.0 times. The fulfillment of bank lending restriction will be reported by the Company at the end of the year and will be evaluated by the Bank.

The loan facility from PT Bank UOB Indonesia as of Desember 31, 2014 has not been used.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG USAHA**

**20. ACCOUNTS PAYABLE**

	2014 Rp	2013 Rp
Pemasok	1.518.140.183.666	1.239.359.860.921
Subkontraktor	709.762.856.563	751.664.435.749
Ventura Bersama	193.463.651.794	173.818.061.038
Sewa Alat	89.320.672.864	58.429.320.126
Upah Kerja	47.399.500.390	49.351.986.045
Lain-lain	13.708.578.653	18.643.852.683
<b>Jumlah</b>	<b>2.571.795.443.930</b>	<b>2.291.267.516.562</b>

*Suppliers  
Subcontractors  
Joint Ventures  
Rental Equipment  
Wages  
Others  
Total*

Rincian saldo utang usaha sebagai berikut :

*Following the details of accounts payables :*

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Pihak-Pihak Berelasi</b>		
PT Wijaya Karya Beton	37.678.005.520	44.934.282.620
PT Aneka Gas Industri	1.334.671.482	9.609.375.342
PT Amarthakarya	597.070.995	663.971.069
PT Wijaya Karya Intrade	529.039.341	--
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	335.289.669	6.843.974.987
PT Pertamina Patra Niaga	328.490.962	--
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	88.079.702	2.015.026.346
Koperasi Waskita	13.082.864.365	1.051.742.586
Lain-lain	33.495.225.023	--
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>87.468.737.059</b>	<b>65.118.372.950</b>

*Related Parties  
PT.Wijaya Karya Beton  
PT Aneka Gas Industri  
PT Amarthakarya  
PT Wijaya Karya Intrade  
PT Adhi Karya (Persero) Tbk  
PT Pertamina Patra Niaga  
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)  
Koperasi Waskita  
Others  
Total Related Parties*

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>		
PT Adhimix Precast Indonesia	96.433.495.514	64.282.904.569
PT Sekasa Inti Perkasa	62.986.195.177	--
PT Hanil Jaya Metal	60.730.073.773	27.137.433.517
PT Master Steel	35.980.794.021	39.498.739.910
PT Indoperkasa Mandiri	32.835.889.800	--
PT Purnama Sejahtera	24.402.108.254	17.919.548.551
PT Bhirawa Steel	24.218.360.423	66.370.737.239
PT Cakra Tunggal Steel	23.634.344.161	--
PT Dwipratama Teknik	23.484.913.088	--
PT Krakatau Wajutama	20.122.103.130	--
PT Alista Termulya	17.627.803.968	--
PT SCG Readymix Indonesia	17.623.192.434	--
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	17.533.246.789	--
PT Swamtri Panca Sunu	17.179.417.404	--
PT Mitra Pemuda	16.531.165.982	--
PT Multi Trading Pratama	16.282.085.899	--
PT Kingdom Indah	15.592.665.139	24.108.411.852
PT Jaya Sentrikon Indonesia	14.674.227.626	10.878.791.041
PT Bayu Maju Jaya	14.431.079.501	--
PT Waagner Biro Indonesia	14.333.716.298	--
PT Panata Bayu Nugraha	14.111.259.356	--
PT Agung Beton Persadautan	13.612.779.894	--
PT Megah Bangun Baja Semesta	13.397.329.015	--
PT Berdikari Pondasi Perdana	12.577.586.987	13.016.413.926
PT Putra Baja Deli	11.302.039.005	--
PT Anugerah Maha Karya	11.274.927.156	--
PT Grant Surya Multisarana	11.220.134.724	19.733.531.616
PT Motive Mulia	10.791.606.004	--
PT Naga Surya Indah	10.588.430.656	--
PT Interworld Steel Mills	10.449.861.946	21.250.011.463
PT Sinar Indahjaya Kencana	10.065.632.548	14.805.686.635
PT Sekasa Mitra Utama	--	31.451.354.420
PT Subur Buana Raya	--	25.205.969.413
PT Indal Steel Pile	--	25.138.621.406
PT Janti Sarana Material Beron	--	24.919.954.890
PT Oriental Sheet Piling	--	21.783.008.000
PT Mitra Jaya	--	19.979.982.391
PT Swarna Baja Pacific	--	19.792.992.461
PT Pioneer Beton Industri	--	18.014.364.153
PT Adiguna Karya Jaya	--	17.488.178.154
PT Penata Payu Nugraha	--	15.133.369.007
PT Mega Cipta Sentrapersada	--	14.481.135.352
PT Lingga Indoteknik Utama	--	14.451.982.240
PT Waja Perdana	--	14.013.305.661
CV Rado Utama	--	13.058.349.164
PT Balikpapan Ready Mix	--	11.816.990.000
PT Amindo Catur Pratama	--	11.017.030.264
PT Bumirejo Tirta Kencana	--	11.012.808.584
PT Mitra Mandala Jaya	--	10.966.803.923
PT Holcim Beton	--	10.527.731.518
PT Pelita Maju Multiswakarsa	--	10.294.443.711
PT Sinarbali Binakarya	--	10.273.770.594
Lainnya (di bawah Rp 10 Milyar)	1.788.298.241.199	1.556.324.787.987
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>2.484.326.706.871</b>	<b>2.226.149.143.612</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.571.795.443.930</b>	<b>2.291.267.516.562</b>

*Third Parties  
PT Adhimix Precast Indonesia  
PT Sekasa Inti Perkasa  
PT Hanil Jaya Metal  
PT Master Steel  
PT Indoperkasa Mandiri  
PT Purnama Sejahtera  
PT Bhirawa Steel  
PT Cakra Tunggal Steel  
PT Dwipratama Teknik  
PT Krakatau Wajutama  
PT Alista Termulya  
PT SCG Readymix Indonesia  
PT Lancarjaya Mandiri Abadi  
PT Swamtri Panca Sunu  
PT Mitra Pemuda  
PT Multi Trading Pratama  
PT Kingdom Indah  
PT Jaya Sentrikon Indonesia  
PT Bayu Maju Jaya  
PT Waagner Biro Indonesia  
PT Panata Bayu Nugraha  
PT Agung Beton Persadautan  
PT Megah Bangun Baja Semesta  
PT Berdikari Pondasi Perdana  
PT Putra Baja Deli  
PT Anugerah Maha Karya  
PT Grant Surya Multisarana  
PT Motive Mulia  
PT Naga Surya Indah  
PT Interworld Steel Mills  
PT Sinar Indahjaya Kencana  
PT Sekasa Mitra Utama  
PT Subur Buana Raya  
PT Indal Steel Pile  
PT Janti Sarana Material Beron  
PT Oriental Sheet Piling  
PT Mitra Jaya  
PT Swarna Baja Pacific  
PT Pioneer Beton Industri  
PT Adiguna Karya Jaya  
PT Penata Payu Nugraha  
PT Mega Cipta Sentrapersada  
PT Lingga Indoteknik Utama  
PT Waja Perdana  
CV Rado Utama  
PT Balikpapan Ready Mix  
PT Amindo Catur Pratama  
PT Bumirejo Tirta Kencana  
PT Mitra Mandala Jaya  
PT Holcim Beton  
PT Pelita Maju Multiswakarsa  
PT Sinarbali Binakarya  
Others (less than Rp 10 Billions each)  
Total Third Parties  
Total*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**20. UTANG USAHA (Lanjutan)**

**20. ACCOUNTS PAYABLE (Continued)**

Utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:

The accounts payables by age (day) category is as follows:

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Utang Pemasok</b>			<b>Suppliers Payable</b>
> 30 - 90 hari			> 30 - 90 days
Belum Jatuh Tempo	821.108.585.703	745.958.643.257	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	489.825.106.944	359.605.021.224	After due date
> 90 - 180 hari - Sudah Jatuh Tempo	165.529.547.052	99.000.352.219	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	26.036.376.461	32.307.499.857	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	15.640.567.507	2.488.344.364	> 360 days - After due date
<b>Total</b>	<b>1.518.140.183.666</b>	<b>1.239.359.860.921</b>	<b>Total</b>
<b>Utang Subkontraktor</b>			<b>Subcontractors Payable</b>
> 30 - 90 hari			> 30 - 90 days
Belum Jatuh Tempo	370.261.443.892	465.845.344.844	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	230.132.730.016	204.236.839.713	After due date
> 90 - 180 hari - Sudah Jatuh Tempo	75.348.374.826	49.593.588.548	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	18.146.283.619	24.229.885.785	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	15.874.024.210	7.758.776.859	> 360 days - After due date
<b>Total</b>	<b>709.762.856.563</b>	<b>751.664.435.749</b>	<b>Total</b>
<b>Utang Sewa Alat</b>			<b>Rental Equipments Payable</b>
> 30 - 90 hari			> 30 - 90 days
Belum Jatuh Tempo	39.801.399.335	44.975.259.137	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	31.279.701.773	8.991.154.238	After due date
> 90 - 180 hari - Sudah Jatuh Tempo	13.442.533.731	2.066.066.818	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	4.363.470.715	1.969.220.491	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	433.567.310	427.619.442	> 360 days - After due date
<b>Total</b>	<b>89.320.672.864</b>	<b>58.429.320.126</b>	<b>Total</b>
<b>Utang Upah</b>			<b>Wages Payable</b>
> 30 - 90 hari			> 30 - 90 days
Belum Jatuh Tempo	32.640.041.371	38.291.504.539	Before due date
Sudah Jatuh Tempo	4.743.371.513	9.257.022.059	After due date
> 90 - 180 hari - Sudah Jatuh Tempo	8.674.060.575	1.248.015.529	> 90 - 180 days - After due date
> 180 - 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	1.323.226.931	477.839.762	> 180 - 360 days - After due date
> 360 hari - Sudah Jatuh Tempo	18.800.000	77.604.156	> 360 days - After due date
<b>Total</b>	<b>47.399.500.390</b>	<b>49.351.986.045</b>	<b>Total</b>

**21. UTANG BRUTO SUBKONTRAKTOR PIHAK KETIGA**

**21. GROSS AMOUNT DUE TO THIRD PARTIES  
SUBCONTRACTOR**

Utang bruto pihak ketiga merupakan utang prestasi kerja subkontraktor yang belum diberita acaranya, baik dari subkontraktor atau material yang diakui sebagai prestasi karena belum memenuhi syarat pembayaran sesuai kontrak.

Gross amount due to the third parties represents uncertified subcontractor's working progress, either from subcontractor or materials which are recognized as progress as it has not fulfilled the certain payment condition as stated in the contract.

	2014 Rp	2013 Rp	
Divisi Gedung	1.046.408.219.926	850.371.697.210	Building Division
Divisi Sipil	736.808.802.501	383.960.325.189	Civil Division
Divisi Regional I	222.121.847.610	202.455.559.320	Regional Division I
Divisi Regional II	108.036.281.056	170.304.645.543	Regional Division II
Divisi Regional III	173.168.489.067	15.957.224.209	Regional Division III
Divisi Regional IV	70.457.092.961	95.211.313.899	Regional Division IV
Divisi EPC	58.620.815.666	76.479.131.609	EPC Division
PT Waskita Beton Precast	284.915.294.547	--	PT Waskita Beton Precast
<b>Jumlah</b>	<b>2.700.536.843.335</b>	<b>1.794.739.896.979</b>	<b>Total</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. UTANG BRUTO SUBKONTRAKTOR PIHAK KETIGA  
(Lanjutan)**

**21. GROSS AMOUNT DUE TO THIRD PARTIES  
SUBCONTRACTOR (Continued)**

Utang bruto subkontraktor pihak ketiga berdasarkan pihak kreditur adalah sebagai berikut:

Gross amount due to third parties subcontractor by creditor category is as follows:

	2014 Rp		2013 Rp
PT Lancarjaya Mandiri Abadi	85.506.925.053	--	PT Lancarjaya Mandiri Abadi
PT Kridatama	80.707.347.737	--	PT Kridatama
PT Pakubumi	73.369.829.523	--	PT Pakubumi
PT Dwiberkah Argakencana	60.153.914.056	--	PT Dwiberkah Argakencana
PT WTJ Contractor Unipessoal	57.057.879.599	--	PT WTJ Contractor Unipessoal
CV Brebes Putra	53.745.821.234	--	CV Brebes Putra
PT Bauer Pratama Indonesia	25.604.338.616	--	PT Bauer Pratama Indonesia
PT Cahaya Berlian	50.020.436.655	--	PT Cahaya Berlian
PT Jaido Metal Industries	44.210.646.869	--	PT Jaido Metal Industries
PT Apora Indusma	41.867.456.104	--	PT Apora Indusma
PT The Master Steel	40.661.618.352	--	PT The Master Steel
PT Pelita Maju Multiswakarsa	37.632.267.983	--	PT Pelita Maju Multiswakarsa
PT Aluphi Hijau Lumina	34.221.482.894	--	PT Aluphi Hijau Lumina
PT Panayata Bayunugraha	32.980.084.039	--	PT Panayata Bayunugraha
PT Kovalen Mining	28.976.225.000	--	PT Kovalen Mining
PT Intiniaga Sukses Abadi	26.896.716.893	--	PT Intiniaga Sukses Abadi
PT Wana Indah Asri	24.358.337.742	--	PT Wana Indah Asri
PT Dwi Pratama Teknik	24.328.115.186	8.934.333.485	PT Dwi Pratama Teknik
PT Alstom Grid	20.993.226.365	29.189.123.928	PT Alstom Grid
PT Sendico Utama	19.915.882.267	--	PT Sendico Utama
PT Naga Surya Indah	19.692.652.771	--	PT Naga Surya Indah
PT Alma Cia Sejahtera	18.797.878.293	--	PT Alma Cia Sejahtera
PT Krakatau Wajatama	18.508.815.150	--	PT Krakatau Wajatama
PT Alwindo Nusantara	17.847.785.889	--	PT Alwindo Nusantara
PT Graha Rejeki Santoso	17.379.399.819	--	PT Graha Rejeki Santoso
PT Andalas Terang Nusantara	17.235.805.179	--	PT Andalas Terang Nusantara
PT Galid Medan Perkasa	16.083.000.233	--	PT Galid Medan Perkasa
CV Sukses Jaya Mandiri	15.304.999.849	--	CV Sukses Jaya Mandiri
PT Karimun Megah Abadi	15.267.526.878	22.456.612.067	PT Karimun Megah Abadi
PT Suprajaya Duaribusatu	14.515.064.847	--	PT Suprajaya Duaribusatu
PT Uxil Alumindo Indonesia	14.450.000.000	--	PT Uxil Alumindo Indonesia
PT Adhimix Precast Indonesia	13.961.554.445	19.893.682.586	PT Adhimix Precast Indonesia
Rico	13.901.612.513	--	Rico
CV Sejahtera Mandiri	13.091.764.742	--	CV Sejahtera Mandiri
PT Luxon Mandiri Elektrik	13.067.157.791	--	PT Luxon Mandiri Elektrik
PT Acset Indonusa	11.879.364.011	--	PT Acset Indonusa
PT Lianta Surya	11.762.020.000	--	PT Lianta Surya
PT Archiconasiando	11.758.408.590	--	PT Archiconasiando
PT Wijaya Karya Beton	11.655.407.754	31.920.829.132	PT Wijaya Karya Beton
PT Cahaya Metal Perkasa	11.393.574.900	--	PT Cahaya Metal Perkasa
PT Neksusindo	11.045.760.000	--	PT Neksusindo
PT Swamitri Panca Sunu	10.732.839.623	--	PT Swamitri Panca Sunu
CV Berkah Jaya	9.685.950.000	--	CV Berkah Jaya
PT Berdikari Pondasi Perdana	9.238.394.165	7.083.045.081	PT Berdikari Pondasi Perdana
PT Wiswani Karya Mandiri	9.176.010.930	--	PT Wiswani Karya Mandiri
PT Saawibawa	8.414.340.000	--	PT Saawibawa
PT Makaetri Engineering	8.335.562.727	--	PT Makaetri Engineering
PT Ciakreasi Estetika	8.252.964.024	--	PT Ciakreasi Estetika
PT Basuki Ramanta Putra	8.201.887.261	--	PT Basuki Ramanta Putra
PT Eurotech	8.156.101.421	--	PT Eurotech
PT Saeti Concretindo Wahana	8.077.200.000	--	PT Saeti Concretindo Wahana
PT Surya Pertiwi	8.016.195.740	--	PT Surya Pertiwi
PT Megah Bangun Baja Semesta	8.008.930.928	9.268.415.821	PT Megah Bangun Baja Semesta
PT Bintang Perdana	7.962.541.943	--	PT Bintang Perdana
PT Namora Cia Mas	7.902.655.479	--	PT Namora Cia Mas
PT Clarindo Djaya Semesta	7.756.106.200	8.263.513.411	PT Clarindo Djaya Semesta
PT Widodo Karya Sejahtera	7.684.510.972	5.622.594.345	PT Widodo Karya Sejahtera
PT Girikon Agung Nugraha	7.666.667.421	--	PT Girikon Agung Nugraha
PT Pelitamaju Multiswakarsa	7.652.938.684	--	PT Pelitamaju Multiswakarsa
PT Dubron	7.618.333.076	--	PT Dubron
PT Mondila Bersaudara	7.262.500.000	--	PT Mondila Bersaudara
PT Bumiloka UMILOKA	7.251.790.000	--	PT Bumiloka UMILOKA
PT Aremix Planindo	6.895.034.236	--	PT Aremix Planindo
PT Bayu Maju Jaya	6.744.201.685	17.444.157.503	PT Bayu Maju Jaya
PT Bilah Baja Makmur Abadi	6.678.261.005	--	PT Bilah Baja Makmur Abadi
PT Diastri Mandiri	6.671.242.345	--	PT Diastri Mandiri
PT Danatel	6.538.506.013	--	PT Danatel
PT Melati Technofo Indonesia	6.433.921.634	--	PT Melati Technofo Indonesia

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. UTANG BRUTO SUBKONTRAKTOR PIHAK KETIGA  
(Lanjutan)**

**21. GROSS AMOUNT DUE TO THIRD PARTIES  
SUBCONTRACTOR (Continued)**

	<b>2014 Rp</b>	<b>2013 Rp</b>	
PT Tata Kreasindojaya	6.268.181.540	--	PT Tata Kreasindojaya
PT Karya Nurindo Cemerlang Sakti	6.199.758.942	--	PT Karya Nurindo Cemerlang Sakti
PT Dwiprakasatamajaya	6.099.526.702	--	PT Dwiprakasatamajaya
PT Interindo Dutatekno	6.086.587.096	--	PT Interindo Dutatekno
CV Wetang Mandiri	6.009.973.376	--	CV Wetang Mandiri
PT Sari Jati Adhitama	5.648.259.481	8.136.590.220	PT Sari Jati Adhitama
PT Farika Beton	5.558.874.678	--	PT Farika Beton
PT Tunggal Jaya Steel	5.456.909.998	--	PT Tunggal Jaya Steel
PT Innasah	5.125.562.922	--	PT Innasah
PT Venus Ceramica International	5.072.795.756	--	PT Venus Ceramica International
CV Widodo Karya Sejahtera	5.065.654.841	--	CV Widodo Karya Sejahtera
PT Alrista Teramulya	5.046.649.626	16.714.930.205	PT Alrista Teramulya
PT The Master Steel	--	23.005.857.351	PT The Master Steel
PT Griyaton Indonesia	--	7.494.489.381	PT Griyaton Indonesia
PT Wahyu Pratama	--	15.908.089.500	PT Wahyu Pratama
PT SCG Pipe and Precast	--	21.339.334.135	PT SCG Pipe and Precast
PT Oriental Sheet Piling	--	13.234.837.797	PT Oriental Sheet Piling
PT Penata Bayu Nugraha	--	9.906.692.649	PT Penata Bayu Nugraha
PT Jagat Interindo	--	12.268.987.420	PT Jagat Interindo
PT Marwan Gemilang Mekanikal	--	12.511.181.128	PT Marwan Gemilang Mekanikal
PT Megacipta Sentrapersada	--	12.349.207.284	PT Megacipta Sentrapersada
PT Pelita Maju Multiswakarsa	--	10.046.166.362	PT Pelita Maju Multiswakarsa
PT Interworld Steel Mills	--	7.071.905.041	PT Interworld Steel Mills
PT Semaputra	--	7.318.071.286	PT Semaputra
PT Sapta Wibawa	--	8.804.015.000	PT Sapta Wibawa
PT Asri Cipta D	--	7.276.883.282	PT Asri Cipta D
PT Airsindo Multi Selaras	--	10.360.376.589	PT Airsindo Multi Selaras
PT Karya Citra Sejahtera	--	9.171.645.373	PT Karya Citra Sejahtera
PT Adhiguna Karya Jaya	--	5.620.234.653	PT Adhiguna Karya Jaya
PT Hanil Jaya Steel	--	14.720.546.724	PT Hanil Jaya Steel
PT Alima Artha Jaya	--	11.154.350.017	PT Alima Artha Jaya
PT Alrista	--	8.548.503.153	PT Alrista
PT Asri Citra Dinamika	--	5.788.890.757	PT Asri Citra Dinamika
PT Bagus Cemerlang	--	6.150.000.000	PT Bagus Cemerlang
PT Bina Usaha Mandiri	--	6.760.365.824	PT Bina Usaha Mandiri
PT Biru International	--	5.938.184.100	PT Biru International
PT BRM	--	10.999.718.810	PT BRM
PT Bukaka	--	5.287.903.025	PT Bukaka
PT Bumi Borneo Cemerlang	--	6.131.039.310	PT Bumi Borneo Cemerlang
PT Bumiloka Tegar Perkasa	--	5.164.350.400	PT Bumiloka Tegar Perkasa
Citarum Paket V	--	20.077.309.092	Citarum Paket V
PT Citra Bhakti Semestajaya	--	10.392.000.000	PT Citra Bhakti Semestajaya
PT Citra Cakra Pendawa	--	5.747.120.000	PT Citra Cakra Pendawa
PT Citrapersadamas Engineering	--	8.986.253.742	PT Citrapersadamas Engineering
PT Disam Jaya	--	5.467.678.250	PT Disam Jaya
PT Dwi Berkah Arga Kencana	--	31.313.967.830	PT Dwi Berkah Arga Kencana
PT Fortuna Konstrindo	--	7.912.066.206	PT Fortuna Konstrindo
PT Galaxy Persada	--	6.357.291.125	PT Galaxy Persada
PT Graving Dock Noahtu	--	20.852.310.930	PT Graving Dock Noahtu
PT Maju Mandiri Multikreasi	--	5.222.589.062	PT Maju Mandiri Multikreasi
PT Metalindo Esthetika Dimensi	--	6.964.684.707	PT Metalindo Esthetika Dimensi
PT Mitra Abadi	--	10.235.552.974	PT Mitra Abadi
PT Multi Sentosa Pratama	--	6.087.403.725	PT Multi Sentosa Pratama
PT Nit Meke Sukses Mandiri	--	36.084.600.000	PT Nit Meke Sukses Mandiri
PT NKE	--	20.043.575.678	PT NKE
PT Polejiwa	--	6.121.351.624	PT Polejiwa
PT Rado Utama	--	12.229.157.332	PT Rado Utama
PT Sejahtera Utama	--	19.531.819.972	PT Sejahtera Utama
PT Sekasa	--	9.419.107.881	PT Sekasa
PT Sentral Perkasa Buana	--	8.108.207.076	PT Sentral Perkasa Buana
PT Subiyanto	--	5.538.787.657	PT Subiyanto
PT Superhelindo Jaya Perkasa	--	6.479.330.532	PT Superhelindo Jaya Perkasa
PT Tetrasetia Indonesia	--	9.829.207.043	PT Tetrasetia Indonesia
PT Tujuh Pilar Perkasa	--	5.223.966.114	PT Tujuh Pilar Perkasa
PT Wetna Jaya	--	6.456.789.120	PT Wetna Jaya
PT Yekra	--	5.512.345.889	PT Yekra
Lain-lain di bawah Rp 5 Milyar	1.248.074.415.043	1.033.285.769.283	Others (less than Rp 5 Billions each)
<b>Jumlah</b>	<b>2.700.536.843.335</b>	<b>1.794.739.896.979</b>	<b>Total</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**22. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PENDEK**

Uang muka kontrak diterima merupakan uang muka pelaksanaan proyek yang diterima dari pemberi kerja sesuai kontrak pekerjaan konstruksi jangka pendek; uang muka tersebut akan dikompensasikan dengan progres pekerjaan dan termin pembayaran sesuai dengan progres lapangan.

**22. ADVANCES ON SHORT-TERM CONTRACT**

Advance received for contracts represents an advance of project implementation which is received from the owners of projects on short-term construction contracts; the advances will be off-set with the progress of work and terms of payment in accordance with the progress of work.

	2014 Rp	2013 Rp	
Divisi Gedung	73.040.125.951	127.456.545.319	Building Division
Divisi Sipil	33.409.825.478	35.118.560.806	Civil Division
Divisi Regional I	64.329.765.660	40.241.248.877	Regional I Division
Divisi Regional II	61.378.529.752	49.533.315.253	Regional II Division
Divisi Regional III	10.020.196.874	788.892.582	Regional III Division
Divisi Regional IV	4.924.081.776	25.821.577.965	Regional IV Division
Divisi EPC	26.780.717.781	22.239.627.904	EPC Division
Divisi Precast	15.552.502.500	659.165.600	Precast Division
<b>Jumlah</b>	<b>289.435.745.772</b>	<b>301.858.934.306</b>	<b>Total</b>

Uang muka kontrak jangka pendek berdasarkan pihak-pihak pemberi kerja sebagai berikut:

Advance received for short term contracts based on the owner of projects are as follows:

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Kapuk Naga Indah	17.137.769.087	5.746.258.871	PT Kapuk Naga Indah
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	14.296.246.500	--	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Rekayasa Industri (Persero)	11.956.520.100	11.956.520.100	PT Rekayasa Industri (Persero)
PT Transmarga Jatim Pasuruan	5.104.975.071	--	PT Transmarga Jatim Pasuruan
PT Semen Padang (Persero)	--	10.933.723.740	PT Semen Padang (Persero)
Kawahapejaya Indonesia	--	10.285.465.296	Kawahapejaya Indonesia
Lain-lain dibawah Rp 5 Milyar	7.760.746.339	4.755.731.042	Others (less than Rp 5 Billions each)
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>56.256.257.097</b>	<b>43.677.699.049</b>	<b>Total Related Parties</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
Pemerintah Daerah	60.129.359.266	62.020.375.243	District Governments
Kementerian Pekerjaan Umum	36.091.950.993	27.442.941.782	The Ministry of Public Work
PT Toba Pengembang Sejahtera	19.420.454.546	--	PT Toba Pengembang Sejahtera
PT ITC Polonia	16.534.714.091	--	PT ITC Polonia
Telkom Property (PT graha Sarana Duta)	12.072.933.409	--	Telkom Property (PT graha Sarana Duta)
PT Hidro Rizki Ilahi	10.179.135.419	--	PT Hidro Rizki Ilahi
PT Sinergy Pecatu Indah	9.000.000.000	--	PT Sinergy Pecatu Indah
PT Putra Mataram Indah Wisata	8.701.186.658	8.701.186.658	PT Putra Mataram Indah Wisata
PT Harmas Jalesveva	7.800.317.091	14.221.945.818	PT Harmas Jalesveva
Mahkamah Agung Republik Indonesia	6.909.009.214	17.884.269.663	The Supreme Court of the Republic of Indonesia
PT Hermes Realty Indonesia	6.565.650.000	--	PT Hermes Realty Indonesia
PT Citra Abadi Mandiri	6.484.018.936	--	PT Citra Abadi Mandiri
PT Sinoma Engineering Indonesia	6.052.661.864	--	PT Sinoma Engineering Indonesia
PT Sentul City Tbk	5.744.500.000	--	PT Sentul City Tbk
PT Ade Pade Realty	--	23.405.019.095	PT Ade Pade Realty
PT Broadbiz Asia	--	12.097.569.857	PT Broadbiz Asia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	--	13.171.590.975	The National Public Procurement Agency Government Services.
PT Daya Radar Utama	--	24.344.898.406	PT Daya Radar Utama
PT Puriampora Intipratama	--	9.190.249.624	PT Puriampora Intipratama
PT Bosowa Terminal Indonesia	--	9.449.258.000	PT Bosowa Terminal Indonesia
PT Indonesia Paradise Island	--	7.827.262.809	PT Indonesia Paradise Island
Lain-lain dibawah Rp 5 Milyar	21.493.597.188	28.424.667.326	Others (less than Rp 5 Billions each)
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>233.179.488.675</b>	<b>258.181.235.256</b>	<b>Total Third Parties</b>
<b>Jumlah</b>	<b>289.435.745.772</b>	<b>301.858.934.306</b>	<b>Total</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. BEBAN AKRUAL**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Beban Umum	8.389.206.858	11.014.715.842
Beban Bunga Obligasi	11.438.194.444	5.227.083.333
Beban Kantor	23.177.082.847	4.723.098.514
Beban Pegawai	3.856.016.855	1.445.269.389
Beban Operasional Proyek	476.030.064	310.289.144
Beban Gedung	457.079.415	--
<b>Jumlah</b>	<b>47.793.610.483</b>	<b>22.720.456.222</b>

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari operasional proyek adalah utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan operasional proyek perusahaan, beban gedung, beban kantor, beban pegawai dan beban umum.

Beban bunga merupakan beban bunga obligasi yang belum dibayar per 31 Desember 2014 untuk periode tanggal 6 Desember sampai 31 Desember 2014 untuk Obligasi tahun 2012 dan untuk periode tanggal 18 Nopember sampai dengan 31 Desember 2014 untuk Obligasi tahun 2014. Sedangkan per 31 Desember 2013 untuk periode 5 Desember sampai dengan 31 Desember 2013.

**23. ACCRUED EXPENSES**

General Expenses
Bonds Interest Payables
Office Expenses
Employee Expenses
Projects Operational Charges
Building Expenses
<b>Total</b>

Accrued expenses of operational projects represent payables to third parties in line with the project operations of the Company and others are for employee expense, office equipment and travel allowance.

Bonds interest payables represent interest expense on the Company's bonds which has not paid yet as of December 31, 2014 for the period of December 6 until December 31, 2014 for Obligation 2012 Year and for the period of November 18 until December 31, 2014 for Obligation 2014 Year. While as of December 31, 2013 for the period of December 5, until December 31, 2013.

**24. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Jasa Produksi dan Tantiem	41.750.000.000	34.000.000.000
Iuran Dana Pensiun	3.051.972.651	1.806.190.397
Jamsostek	1.257.427.562	1.327.809.012
Jaminan Sewa Gedung	108.589.627	108.589.625
Utang kepada Pemberi Kerja	50.934.633.037	7.274.819.486
Lain-lain	180.443.777	--
<b>Jumlah</b>	<b>97.283.066.654</b>	<b>44.517.408.520</b>

Berdasarkan Risalah Rapat Direksi tanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian jasa produksi tahun 2014 kepada pegawai Perusahaan, estimasi jasa produksi kepada karyawan dan tantiem untuk Direksi tahun 2014 yang ditetapkan adalah sebesar Rp 41.750.000.000.

Berdasarkan Risalah Rapat Direksi tanggal 17 Desember 2013 tentang pemberian jasa produksi tahun 2013 kepada pegawai Perusahaan, estimasi jasa produksi kepada karyawan dan tantiem untuk Direksi tahun 2013 yang ditetapkan adalah sebesar Rp 34.000.000.000.

**24. OTHER SHORT-TERM LIABILITIES**

Production Benefits and Tantiem
Pension Fund
Jamsostek
Building Rent Deposit
Payable to Owners
Others
<b>Total</b>

Based on Minutes of Meeting of Directors dated December 23, 2014 related to the production benefit for the year 2014 to the Company's employees, the estimation of production benefits to the Company's employees and tantiem for Director in 2014 year is determined of Rp 41,750,000,000.

Based on Minutes of Meeting of Directors dated December 17, 2013 related to the production benefit for the year 2013 to the Company's employees, the estimation of production benefits to the Company's employees and tantiem for Director in 2013 year is determined of Rp 34,000,000,000.

**25. UTANG OBLIGASI**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Nominal	1.250.000.000.000	750.000.000.000
Biaya Emisi Obligasi	(5.968.957.306)	(2.868.723.464)
Akumulasi Amortisasi	1.625.561.273	913.360.745
<b>Jumlah</b>	<b>1.245.656.603.967</b>	<b>748.044.637.281</b>
Biaya Emisi Obligasi	5.968.957.306	2.868.723.464
Dikurangi : Akumulasi Amortisasi	(1.625.561.273)	(913.360.745)
<b>Biaya Emisi Obligasi Belum Diamortisasi</b>	<b>4.343.396.033</b>	<b>1.955.362.719</b>

Face Value
Bonds Issuance Cost
Accumulated Amortization
<b>Total</b>

Bonds Issuance Cost
Accumulated Amortization
<b>Unamortized Bond Issuance Costs</b>



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**25. UTANG OBLIGASI (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No 20 tanggal 19 September 2014 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No 26 tanggal 13 Oktober 2014 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi Berkelanjutan I tahun 2014, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4%, senilai Rp 500.000.000.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 11 tanggal 4 April 2012 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan No. 98 tanggal 26 April 2012 juncto Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan No. 58 tanggal 23 Mei 2012 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Perusahaan telah menerbitkan "Obligasi II Waskita Karya Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap" senilai Rp 750.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut:

Seri A : Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Jumlah pokok Obliasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Seri B : Obligasi dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Jumlah pokok Obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima milyar Rupiah).

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi Seri A dan Seri B pertama akan dilakukan pada tanggal 5 September 2012. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2015 dan Seri B akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2017. Sedangkan untuk Obligasi berkelanjutan I tahun 2014 akan jatuh tempo pada tanggal 10 Nopember 2017.

Biaya Emisi Obligasi sebesar Rp 5.928.957.306 diamortisasi setiap bulan sampai dengan jatuh tempo masa Obligasi II tahun 2017.

Berdasarkan pengumuman peringkat obligasi tanggal 13 Agustus 2014, PT PEFINDO memberikan peringkat efek Perusahaan idA (Single A) terhadap Obligasi II Seri A dan Seri B Tahun 2012 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Utang obligasi mencakup persyaratan tertentu antara lain:

- *Current ratio* tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
- *Debt to Equity* tidak lebih dari 3 : 1 (tiga koma lima berbanding satu), dan
- *EBITDA* dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).

Evaluasi pemenuhan atas persyaratan rasio dari penerbitan obligasi dilakukan pada setiap akhir tahun.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. BONDS PAYABLE (Continued)**

Based on the Trustee Agreement Deed No. 20 dated September 19, 2014 in conjunction with the Deed of Amendment I Trustee Agreement No. 26 dated October 13, 2014 that all are made in front of Fathiah Helmi, S.H. The Company has issued "The continuing Bonds I 2014 Year with Fixed Interest Rate" amounted to 10.4% with the value of Rp 500,000,000,000.

Based on the Trustee Agreement Deed No. 11 dated April 4, 2012 in conjunction with the Deed of Amendment I Trustee Agreement No. 98 dated April 26, 2012 in conjunction with the Deed of Amendment II Trustee Agreement No. 58 dated May 23, 2012 that all are made in front of Fathiah Helmi, S.H., The Company has issued "Bonds II Waskita Karya 2012 with Fixed Interest Rate" amounted to Rp 750,000,000,000, with the following details:

Serie A : Bonds with fixed interest rate of 8.75% (eight point seventy five percent) per year for period of 3 (three) years. Principal amount of Serie A Bonds amounted to Rp 75,000,000,000 (seventy five billion Rupiah).

Serie B : Bonds with fixed interest rate of 9.75% (nine point seventy five percent) per year for a period of 5 (five) years. Principal amount of Serie B Bonds were offered at Rp 675,000,000,000 (six hundred and seventy five billion Rupiah).

Bonds interest is paid every 3 (three) months, in accordance with the payment date of each bond interest. Interest payments Bond Serie A and Serie B first will be held on September 5, 2012. Bonds Serie A will mature on June 5, 2015 and Serie B will mature on June 5, 2017. While for the Continuing Bonds I on 2014 will be mature on November 10, 2017.

Bonds issuance cost II amounted to Rp 5,928,957,306 are monthly amortized until maturity period in 2017.

According to press release dated August 13, 2014, the Committee of PT PEFINDO Rating Agency has been given the rating idA (Single A) to II Bonds Series A and Series B of 2012 PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Bonds payable includes certain requirements, as follows:

- *Current ratio* of not less than 1 : 1 (one is to one);
- *Debt to Equity* no more than 3 : 1 (three is to one), and
- *EBITDA* to Interest Expense are not less than 1.5 : 1 (one point five is to one).

The evaluation of the fulfillment of these requirements is held on each year end.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA - PIHAK BERELASI**

PT Waskita Toll Road (Entitas Anak) memiliki utang kepada PT Waskita Bumi Wira (Entitas Asosiasi) atas penggantian biaya feasibility study, dan biaya konsultan lainnya yang dibayarkan terlebih dahulu. Atas tagihan tersebut tidak dikenakan bunga.

**27. UANG MUKA KONTRAK JANGKA PANJANG**

Rincian saldo uang muka kontrak jangka panjang sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>		
Waskita - Trinititi	20.548.057.732	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12.795.177.382	21.188.232.583
PT Rekayasa Industri (Persero)	7.414.970.000	15.650.000.000
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	8.334.493.553	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	886.363.636	-
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	288.636.364	14.592.727.272
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)	-	2.220.256.800
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>50.267.698.667</b>	<b>53.651.216.655</b>

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Pihak-pihak Ketiga</b>		
Republica Democratica De Timor Leste	168.415.680.720	-
Kementerian Pekerjaan Umum	167.771.319.446	43.886.078.352
Pemerintah - Pemerintah Daerah	52.050.487.391	90.182.684.009
PT Mardika Artha Upaya	34.365.314.000	-
PT Halla Mohana	24.091.361.600	-
Samsung C & T Corporation	18.149.483.100	-
PT Ade Pede Realty	10.372.333.354	-
PT Bangun Investa Graha	14.822.410.909	-
PT Bali Seminyak Resort	4.401.818.182	-
Perpustakaan Nasional RI	64.464.600.000	-
PT Bhumyamca	18.898.443.847	-
PT Sentul City Tbk	8.000.000.000	-
Universitas Sebelas Maret	17.342.783.437	-
PT P3MPI	17.745.000.000	-
PT Broadbiz Asia	5.803.136.728	-
PT Rezki Curah Prima	4.318.181.818	-
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	8.187.644.790	-
PT Hidro Rizki Ilahi	10.000.000.000	-
PT Banyu Daya Perkasa	8.257.393.400	-
PT Pardika Wisthi Sarana	6.027.474.272	23.137.569.253
PT Mega Pesanggrahan Indah	1.654.734.511	13.060.334.609
Lainnya (di bawah Rp 2 Milyar)	341.877.572	5.764.246.722
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>665.481.479.077</b>	<b>176.030.912.945</b>
<b>Jumlah</b>	<b>715.749.177.744</b>	<b>229.682.129.600</b>

**28. LIABILITAS MANFAAT KARYAWAN**

Perusahaan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial, dalam rangka penerapan PSAK nomor 24 (Revisi 2004) tentang Imbalan Kerja.

**26. OTHER LONG-TERM PAYABLES - RELATED PARTIES**

PT Waskita Toll Road (Subsidiary) has outstanding balance from PT Waskita Bumi Wira (Associate) for reimbursement of feasibility study expense and other consultant expenses which was paid in advance. The payable is non interest bearing payable.

**27. ADVANCES ON LONG-TERM CONTRACT**

The details of outstanding long-term contract advances were as follows:

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Related Parties</b>		
Waskita - Trinititi	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-
PT Rekayasa Industri (Persero)	-	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	-	-
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)	-	-
<b>Total Related Parties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Third Parties</b>		
Republica Democratica De Timor Leste	-	-
The Ministry of Public Utilities	-	-
District Governments	-	-
PT Mardika Artha Upaya	-	-
PT Gandaria Prima	-	-
Samsung C & T Corporation	-	-
PT Ade Pede Realty	-	-
PT Bangun Investa Graha	-	-
PT Bali Seminyak Resort	-	-
National Library of Indonesia	-	-
PT Bhumyamca	-	-
PT Sentul City Tbk	-	-
University of Sebelas Maret	-	-
PT P3MPI	-	-
PT Broadbiz Asia	-	-
PT Rezki Curah Prima	-	-
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk	-	-
PT Hidro Rizki Ilahi	-	-
PT Banyu Daya Perkasa	-	-
PT Pardika Wisthi Sarana	-	-
PT Mega Pesanggrahan Indah	-	-
Others (less than Rp 2 billions each)	-	-
<b>Total Third Parties</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES**

The Company has recorded liabilities of employee benefits in accordance with Law number 13 Year 2003 regarding to matter pertaining to man power, using actuarial techniques, within the framework of the implementation of Indonesian PSAK No.24 (Revised 2004) of Employee Benefits.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. LIABILITAS MANFAAT KARYAWAN (Lanjutan)**

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pasca kerja tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuarial PT Praptasentosa Gunajasa. Penggunaan teknik aktuarial atas imbalan pasca kerja dilakukan dengan cara mendiskontokan imbalan dalam menentukan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini, berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)*, dan dilakukan berdasarkan pengukuran pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahunnya.

**28. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)**

Actuarial valuation of post employee benefits as of December 31, 2014 and 2013 were conducted by the actuarial consulting firm of PT Praptasentosa Gunajasa. Using of actuarial techniques to calculate the benefits has been done by discounting benefits in determining the present value of defined benefit obligations and current service costs, based on the Projected Unit Credit Method (PUC Method), and using the measurements as of December 31, for each year.

Asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

Actuarial assumptions as of December 31, 2014 and 2013 was as follows:

	2014 Rp	2013 Rp	
Mortalitas ( <i>Mortality Rate</i> )	TMI 2011	TMI 2011	<i>Mortality Rate</i>
Tingkat Kenaikan Gaji - per Tahun	8%	8%	<i>Annual Salary Increasing Rate</i>
Tingkat Bunga/Diskonto ( <i>Interest Rate</i> )	8%	8%	<i>Discount Rate</i>
Metode	PUC	PUC	<i>Method</i>

Beban imbalan kerja sebagai berikut:

Employee benefit expenses were as follows:

	2014 Rp	2013 Rp	
Biaya Jasa Kini	15.448.610.635	10.517.535.867	<i>Current Service Cost</i>
Biaya Bunga	14.133.564.329	8.893.708.422	<i>Interest Expense</i>
Hasil yang Diharapkan dari Aset Program	(9.439.124.599)	(6.376.914.662)	<i>Expected Return on Plan Asset</i>
Kerugian (Keuntungan) Bersih Aktuarial yang Diakui	5.462.424.356	4.755.633.779	<i>Recognized Actuarial Loss (Gain)</i>
<b>Beban Manfaat Karyawan Tahun Berjalan</b>	<b>25.605.474.721</b>	<b>17.789.963.406</b>	<b><i>Current Year Pension Benefit</i></b>

Rekonsiliasi Liabilitas (Aset):

Reconciliation of Liabilities (Assets):

	2014 Rp	2013 Rp	
Saldo Awal	(37.502.554.256)	(33.368.676.224)	<i>Beginning Balance</i>
Beban Manfaat Karyawan Iuran	25.605.474.721	17.789.963.406	<i>Employee Benefit Expense</i>
Pembayaran Pasca Kerja dan Penyesuaian	(28.925.096.737)	(19.999.971.746)	<i>Contribution Payment</i>
Saldo Akhir	<b>(42.397.418.365)</b>	<b>(37.502.554.257)</b>	<b><i>Benefit Payment and Adjustment</i></b> <b><i>Ending Balance</i></b>

Rekonsiliasi Perubahan Liabilitas (Aset):

Reconciliation Changes of Liabilities (Assets):

	2014 Rp	2013 Rp	2012 Rp	2011 Rp	2010 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Kerja	240.337.599.324	176.669.554.122	161.703.789.500	127.759.202.505	113.461.275.847	<i>Present Value of Funded Obligation</i>
Nilai Wajar Aktiva Program	(156.486.407.760)	(117.989.057.488)	(115.943.902.952)	(99.595.249.580)	(84.493.211.758)	<i>Fair Value of Plan Asset</i>
Status Pendanaan	83.851.191.564	58.680.496.634	45.759.886.548	28.163.952.925	28.968.064.089	<i>Funding</i>
Keuntungan (Kerugian) Bersih Aktuarial yang Belum Diaku	(126.248.609.929)	(96.183.050.891)	(79.128.562.772)	(63.293.906.018)	(60.877.698.897)	<i>Unrecognized Actuarial Net Gain (Loss)</i>
<b>Liabilitas (Aset) Program</b>	<b>(42.397.418.365)</b>	<b>(37.502.554.257)</b>	<b>(33.368.676.224)</b>	<b>(35.129.953.093)</b>	<b>(31.909.634.808)</b>	<b><i>Liabilities (Assets) Program</i></b>

Pada tahun 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian kerja sama nomor WK: L.20/P/WK/2006 dan nomor AJS: 079.SJ.U 076 antara PT Waskita Karya (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 28 Juli 2006 tentang Pengelolaan Program Asuransi Pesangon Kumpulan dan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. L. 20/P/WK/2006; No. 079 Sj. U. 0706 tanggal 25 April 2008.

In 2006, the Company signed a cooperation agreement numbers: WK L.20/P/WK/2006 and numbers. AJS: 079.SJ.U 076 between PT Waskita Karya (Persero) and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) on July 28, 2006 concerning to Management of Severance Group Insurance Program and Addendum I to Cooperation Agreement No. L.20/P/WK/2006; No. 079 S.J. U. 0706 dated April 25, 2008.

Liabilitas manfaat karyawan pada 31 Desember 2014 dan 2013 adalah surplus atau menjadi Aset Program. Tidak terdapat manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana dari program atau pengurangan iuran masa datang di tahun 2015, sehingga Aset Program tersebut tidak dibukukan oleh Perusahaan.

Employee benefits liabilities as of December 31, 2014 and 2013 are surplus or becoming Programs Assets. There are no economic benefits available in the form of refundable fund from the plan or deduction of future contributions in the years 2015, therefore the Assets Program were not recorded by the Company.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. MODAL SAHAM**

Sesuai daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan, PT Datindo Entrycom, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

**29. SHARE CAPITAL**

According to shareholders list from Biro Administrasi Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, the composition of the Company's capital were as follows:

		2014			
		Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ percentage of Ownership	Jumlah Modal disetor/ Total Paid - Up Capital	
Modal Dasar		26.000.000.000		100	Authorized Capital
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)					Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
Pemerintah Republik Indonesia	1		0,00%	100	Government of Republic of Indonesia
Saham Biasa (Seri B)					Common Stock (Serie B)
Pemerintah Republik Indonesia		6.549.920.999	67,33%	654.992.099.900	Government of Republic of Indonesia
Masyarakat (kepemilikan dibawah 0.5%)		3.177.583.205	32,67%	317.758.320.500	Public (each holding 0.5%)
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>9.727.504.205</b>	<b>100,00%</b>	<b>972.750.420.500</b>	<b>Total Issued and Fully Paid</b>
		2013			
		Jumlah Saham/ Total Shares	Persentase Kepemilikan/ percentage of Ownership	Jumlah Modal disetor/ Total Paid - Up Capital	
Modal Dasar		26.000.000.000		100	Authorized Capital
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna)					Preferred Stock (Dwi Warna Serie A)
Pemerintah Republik Indonesia	1		0,00%	100	Government of Republic of Indonesia
Saham Biasa (Seri B)					Common Stock (Serie B)
Pemerintah Republik Indonesia		6.549.920.999	68,00%	654.992.099.900	Government of Republic of Indonesia
Masyarakat (kepemilikan dibawah 5%)		3.082.315.000	32,00%	308.231.500.000	Public (each holding 5%)
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>		<b>9.632.236.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>963.223.600.000</b>	<b>Total Issued and Fully Paid</b>

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) No. 36 tanggal 21 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah SH, ditetapkan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 240.000.000.000 menjadi Rp 720.000.000.000 yang terbagi atas 720.000 saham dan masing-masing saham mempunyai nominal Rp 1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 180.000 saham dengan nilai Rp 180.000.000.000 oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Based on the Deed of Amendment PT Waskita Karya (Persero) No. 36 dated October 21, 2005 of Imas Fatimah, SH, the Company determined an increase in the authorized capital from Rp 240,000,000,000 to Rp 720,000,000,000 divided into 720,000 shares and each share has a par value of Rp 1,000,000. The authorized capital has been subscribed and paid up capital of 180,000 shares with a value of Rp 180,000,000,000 by the Government of the Republic of Indonesia.

Berdasarkan Akta No. 140 tanggal 20 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, terdapat perubahan anggaran dasar mengenai perubahan Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp 720.000.000.000, terbagi atas 20.186.900 saham, yang terbagi dari 186.900 saham seri A Dwi Warna, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000, dan Rp 20.000.000 saham seri B masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 26.655. Dari modal dasar telah ditempatkan sebesar Rp 654.992.100 dan diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia sebanyak 180.000 saham seri A Dwi Warna atau sebesar Rp 180.000.000.000 dan Perusahaan Pengelola Asset sebanyak 17.820.000 saham seri B atau sebesar Rp 474.992.100.000. Seluruh saham tersebut berjumlah Rp 654.992.100.000, telah disetor penuh ke kas Perusahaan.

Based on Deeds no 140 dated July 20, 2010, of Sutjipto, SH, Notary in Jakarta, there are amendments regarding changes to the Company of Capital Rp 720,000,000,000, divided into 20,186,900 shares, consisting of 186,900 shares of serie A Dwi Warna, each share with a par value of Rp 1,000,000, and Rp 20,000,000 shares of serie B each shares with a par value of Rp 26,655. From the authorized capital of Rp 654,992,100 has been placed and taken part by the Republic of Indonesia about 180,000 shares of A serie Dwi Warna or Rp 180,000,000,000 and Perusahaan Pengelola Aset of 17.820.000 shares of serie B or Rp 474,992,100,000. All shares amounted to Rp 654,992,100,000, have been fully paid into the treasury of the Company.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. MODAL SAHAM (Lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 57 Tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH di Jakarta, terdapat perubahan anggaran dasar mengenai perubahan Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp 2.600.000.000.000, terbagi atas 1 (satu) saham seri A Dwiwarna dan 25.999.999.999 saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100. Dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.549.921.000 saham dengan nilai Rp 654.992.100.000.

Berdasarkan Akta No 29 tanggal 29 Januari 2013 dari Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, terdapat perubahan anggaran dasar mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan menjadi 9.632.236.000 lembar, yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 9.632.235.999 lembar saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100 atau dengan nilai seluruhnya sebesar Rp 963.223.600.000.

Berdasarkan Akta No 11 tanggal 13 Agustus 2014 dari Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, terdapat perubahan anggaran dasar mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari 9.632.236.000 menjadi 9.666.340.100 yaitu meningkat sebanyak 34.104.100 lembar atau setara dengan Rp 966.634.010.000 sebagai akibat dari pelaksanaan program Opsi Saham (Mesop). Perubahan tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-051114.40.21.2014.

Selama bulan Nopember dan Desember 2014 terdapat penambahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar 61.164.105 lembar atau setara Rp 61.164.105 disebabkan eksekusi Mesop tahap I.

**30. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Tambahan modal disetor agio saham merupakan agio saham yang berasal dari penawaran umum perdana saham Perusahaan setelah dikurangi dengan biaya emisi saham, dengan perincian sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
Tambahan modal disetor dari penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat sebesar 3.082.315.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham, yang ditawarkan Rp 380 per saham	863.048.200.000	863.048.200.000
Tambahan modal disetor dari eksekusi opsi saham karyawan	49.651.537.771	--
Jumlah	912.699.737.771	863.048.200.000
Dikurangi dengan biaya emisi saham	(31.910.365.455)	(31.910.365.455)
<b>Saldo Tambahan modal disetor</b>	<b>880.789.372.316</b>	<b>831.137.834.545</b>

Biaya emisi efek ekuitas merupakan biaya yang berkaitan dengan penerbitan efek ekuitas Perusahaan. Biaya ini mencakup fee dan komisi yang dibayarkan kepada penjamin emisi, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan biaya pencetakan dokumen pernyataan pendaftaran, biaya pencatatan efek ekuitas dibursa efek, serta biaya promosi sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pasar Modal No. Kep-97/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 yang diubah dengan Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000, peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Bab Ekuitas pasal Tambahan Modal Disetor. Biaya Emisi Efek Ekuitas berasal dari penawaran perdana tahun 2012 sebesar Rp 31.910.365.455.

**29. SHARE CAPITAL (Continued)**

Based on Deeds no 57 dated October 24, 2012, of Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, there are amendments regarding changes to the Company of Capital Rp 2,600,000,000,000, consisting of 1 shares of A series Dwiwarna and 25,999,999,999 shares of B series, each share with a par value of Rp 100. Part of the authorized capital have been subscribed and fully paid is amounted to 6,549,921,000 shares with total value of Rp 654,992,100,000.

Based on the Deeds no 29 dated January 29, 2013 of Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, there are amendments regarding to the changes of increasing the Company's issued and paid up capital become 9,632,236,000 consisting of 1 share of A series Dwiwarna and 9,632,235,999 shares of B series, with par value of Rp 100 or the total value amounted to Rp 963,223,600,000.

Based on the Deeds No 11 dated August 13, 2014 of Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, there are amendments regarding to the changes of increasing the Company's issued and paid up capital from 9,632,236,000 become 9,666,340,100 such as increasing amounted 34,104,100 shares or equivalent with Rp 966,634,010,000 as impact of implementation of stock option program (Mesop). This change has been approved by Ministry of Law and Human Rights No AHU-051114.40.21.2014.

During November and December 2014 there are increasing of paid in capital of the Company amounted to 61,164,105 shares or equivalent with Rp 61,164,105 due to the execution of Mesop phase I.

**30. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

Additional paid in capital agio per share represent share premium that come from initial public offering by the Company net off share issuance cost, were as follow:

	2014 Rp	2013 Rp
Additional paid-in capital of a public offering of shares to the public at 3,082,315,000 shares with a nominal value of Rp 100 per share, which offered USD 380 per share	863.048.200.000	863.048.200.000
Additional paid-in capital from the exercise of employee stock options	49.651.537.771	--
Total	912.699.737.771	863.048.200.000
Less: Share Issuance Cost	(31.910.365.455)	(31.910.365.455)
<b>Total Paid In Capital</b>	<b>880.789.372.316</b>	<b>831.137.834.545</b>

Share Issuance Cost are cost related to the issuance of equity securities. These costs include fees and commissions paid to the underwriter, supporting institutions and professionals in capital markets, and the registration document printing costs, cost of equity securities listing on the stock exchange, as well as promotional cost in accordance with the Decision of the Chairman of the Capital Market Board No. Kep-97/PM/1996 dated May 28, 1996 as amended by Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000, regulation number VIII.G.7 of Guidelines for the Preparation of Financial Statements Chapter Equity article Additional Paid-in Capital. Share Issuance Costs derived from the initial public offering in 2012 amounted to Rp 31,910,365,455.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. TAMBAHAN MODAL DISETOR (Lanjutan)**

Biaya emisi saham telah di audit oleh Akuntan Independen Soejatna, Mulyana & Rekan tanggal 05 Pebruari 2013 dengan laporan Nomor : 007/SMR/LAI-VIPO/WK/III/2013.

**30. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (Continued)**

Issuance costs have been audited by an Independent Accountant Soejatna, Mulyana & Partners dated February 5, 2013 with report number: 007/SMR/LAI/VIPO/WK/III/2013.

**31. OPSI SAHAM**

**31. STOCK OPTION**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>	
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>	
Saldo Awal	28.929.895.523	--	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan	31.883.726.376	28.929.895.523	<i>Additional</i>
Pengurangan (Eksekusi)	(17.450.884.481)	--	<i>Deduction (Execution)</i>
	<b>43.362.737.418</b>	<b>28.929.895.523</b>	

**Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (MESOP)**

**Plant for Management and Employee Stock Option (MESOP)**

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. S-576/MBU/2012 tanggal 23 Oktober 2012 mengenai Persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*), menyetujui penawaran umum perdana saham paling banyak 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, termasuk program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*MESOP*) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Based on the letter from the Minister of State Owned Company (BUMN) No. S-576/MBU/2012 dated October 23, 2012 related to Approval for Initial Public Offering (IPO), it is agreed that initial public offering is for a maximum 30% of paid up capital after IPO, including plant for Management and Employee Stock Option Plan program (*MESOP*) from paid up capital after IPO.

Pernyataan Persetujuan Menteri BUMN tersebut telah diaktakan melalui Akta Notaris No. 57 tanggal 24 Oktober 2012, Notaris Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan untuk memperoleh pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-54929.AH.01.02 tahun 2012, tanggal 24 Oktober 2012.

The Statement of Consent from the Minister of State Owned enterprise has been notarized through Notarial deed No 57 dated October 24, 2012 of Fathiah Helmi SH, Notary in Jakarta and has been registered to get approval from the Minister of Human Rights and Justice with its decre No. AHU 54929.AH.01.02 dated October 24, 2012.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 023/SK/WK/2012 dan Nomor 08/SK/WK/PEN/2013, Direksi memutuskan tentang Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management & Employee Stock Plan (MESOP)*) untuk Manajemen dan Pegawai Perusahaan. Manajemen dan Pegawai yang berhak untuk mengikuti program *MESOP* terdiri dari:

Based on the decision of the Directors of PT Waskita Karya (Persero) Tbk No: 023/SK/WK/2012 and No. 08/SK/WK/PEN/2013, the Board of Directors decided on the Stock Purchase Option Granting Program to Management and Employees (*Management & Employee Stock Plan (Programme)*) for the management and employees of the Company. management and employees are eligible to participate *MESOP* program consists of:

- Komisaris Perusahaan (tidak termasuk Komisaris Independen)
- Direksi Perusahaan
- Pegawai Tetap (PT)
- Pegawai Tetap Unit Kerja/Unit Bisnis (PTU)
- Pegawai Tidak Tetap

- The Commissioner of the Company (not including the Independent Commissioner)
- The Directors of the Company
- Permanent employees (PT)
- Permanent employees Unit / Business Unit (PTU)
- Non Permanent employees

Pelaksanaan program *MESOP* akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 2 (dua) tahap dengan rincian sebagai berikut:

*MESOP* program implementation will be done by issuing option rights in two (2) phases with the detail are as follows:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**31. OPSI SAHAM (Lanjutan)**

**Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada  
Manajemen dan Karyawan (MESOP) (Lanjutan)**

**MESOP Tahap I**

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah hak opsi yang diterbitkan dalam program MESOP atau sebesar 173.380.000 saham seri B. Harga eksekusi sebesar Rp 438, dengan periode eksekusi setiap bulan Mei dan Nopember dengan umur opsi selama 5 tahun, dihitung dari tanggal pendistribusian 21 Januari 2013 sampai dengan 20 Januari 2018. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun sejak 21 Januari 2013 yang berakhir pada tanggal 20 Januari 2014.

Nilai wajar dari MESOP diestimasi dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binominal Lattice*, sesuai dengan laporan penilaian KJPP Yanuar BEY dan Rekan, tanggal 30 April 2013, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	MESOP 1 Tahap I/ Phase I	MESOP 1 Tahap II/ Phase II	
Suku Bunga Bebas Risiko	4,7%	6,8%	Risk Free Rate
Ekspektasi Periode Opsi (Tahun)	5	5	Expected Term (Year)
Ekspektasi Faktor Ketidakstabilan Harga Saham	50,99%	46%	Expected Volatility of Share Price Term (Year)
Ekspektasi Dividen yang Dihasilkan	3,48%	1,2%	Expected Dividend Yield

Jumlah beban opsi saham yang tercatat pada beban pegawai per 30 September 2014 adalah sebesar Rp 2.629.990.502.

Sesuai dengan surat Perusahaan No. 177/WK/DIR/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 kepada PT Bursa Efek Indonesia, Perusahaan menyampaikan rencana pelaksanaan MESOP PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk Opsi Tahap I sejumlah 173.380.000 saham seri B dengan umur 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan dan terkena vesting yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Harga pelaksanaan untuk Tahap I sebesar Rp 438 (empat ratus tiga puluh delapan) per saham mengacu pada harga rata-rata perdagangan saham WSKT di BEI pada penutupan perdagangan tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2013

Berdasarkan surat No. S-0470/BEI.PPJ/02-2013 tanggal 26 Pebruari 2013 Bursa Efek Indonesia menyetujui pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management & Employee Stock Plan (MESOP)*) sejumlah 173.380.000 saham seri B.

**31. STOCK OPTION (Continued)**

**Plant for Management and Employee Stock Option  
(MESOP) (Continued)**

**MESOP Phase I**

The total shares to be issued in phase I is 60% (sixty percent) of the number of option rights issued in MESOP program, or amounted to 173,380,000 shares of B Series. The exercise price amounted to Rp 438, with the period of exercises of each May and November with 5 years option period, starting from the distribution date January 21, 2013 until January 20, 2018. Stock option has vesting period for one year starting January 1, 2013 will be ended on the date January 20, 2014.

Fair Value of MESOP is estimated with using Binominal Lattice model, according to valuated report by KJPP Yanuar BEY and Partner, dated April 30, 2013, with the assumptions as follows:

The stock option expenses which recorded in the employees expenses as of September 30, 2014 is amounted to Rp 2,629,990,502.

Based on the Company's letter No. 177/WK/DIR/2013 dated February 22, 2013 to the Indonesia Stock Exchange, the Company submitted an implementation plan MESOP PT Waskita Karya (Persero) Tbk for Phase I Option number 173,380,000 shares of series B with the age of 5 (five) years from the date of issuance and exposed to the vesting of 1 (one) year from the date of publication. The exercise price for Phase I of Rp 438 (four hundred and thirty-eight) per share refers to the average trading price of shares on the share trading WSKT in BEI at the close of trading on January 17, 2013 until the date of February 21, 2013.

Based on letter No. S-0470/BEI.PPJ/02-2013 dated February 26, 2013 Indonesia Stock Exchange approved the listing of shares on the Indonesia Stock Exchange from the Stock Purchase Option Granting Program to management and employees (*Management & Employee Stock Plan*) amounted to 173,380,000 shares of B series.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**31. OPSI SAHAM (Lanjutan)**

**Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada  
Manajemen dan Karyawan (MESOP) (Lanjutan)**

**MESOP Tahap II**

Jumlah Saham yang diterbitkan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang diterbitkan dalam program MESOP atau sebesar 115.587.000 saham seri B Harga eksekusi sebesar 396, dengan periode eksekusi setiap bulan Maret dan Nopember dengan umur opsi selama 5 tahun, dihitung dari tanggal pedistribusian 21 Januari 2014 sampai dengan 20 Januari 2019. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama satu tahun sejak 21 Januari 2014 yang berakhir pada tanggal 20 Januari 2015.

Nilai wajar dari MESOP diestimasi dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binominal Lattice*, sesuai dengan laporan penilaian KJPP Yanuar BEY dan Rekan, tanggal 1 Juli 2014.

Melalui surat No. S.00091/BEL.PPJ/01-2014 tanggal 8 Januari 2014 Bursa Efek Indonesia menyetujui pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (*Management & Employee Stock Plan (MESOP)*) sejumlah 115.587.000 saham seri B.

Mutasi opsi saham selama tahun 2014 sebagai berikut:

	2014	
	Mesop Tahap II / Phase I	
	Jumlah Opsi/ Total Option	Rata-rata /Weighted Tertimbang /Average Harga Eksekusi/ Execution Price
	Lembar	Rp
<b>Opsi Beredar Awal Tahun</b>	--	
Opsi yang diberikan Periode Berjalan	173.380.000	438
Opsi yang Dieksekusi Selama Periode Berjalan	(95.268.205)	(438)
Opsi yang telah Lewat Masa Berlakunya	--	438
<b>Opsi yang Bisa Dieksekusi Sepanjang Periode</b>	<b>78.111.795</b>	<b>438</b>

Opsi saham yang dieksekusi selama periode berjalan:

**Seri Opsi/ Option Series**

Diberikan pada Mei 2014/ <i>Granted on May 2014</i>
<b>Jumlah Eksekusi Mei 2014/ Total Execution on May 2014</b>

**31. STOCK OPTION (Continued)**

**Plant for Management and Employee Stock Option  
(MESOP) (Continued)**

**MESOP Phase II**

The total shares to be issued in phase II is 40% (forty percent) of the number of option rights issued in MESOP program, or amounted to 115,587,000 shares of B Serie. The exercise price amounted to Rp 396, with the period of exercises of each May and November with 5 years option period, starting from the distribution date January 21, 2014 until January 20, 2019. Stock option has vesting period for one year starting January 1, 2014 will be ended on the date January 20, 2015.

Fair Value of MESOP is estimated with using Binominal Lattice model, according to valuated report by KJPP Yanuar BEY and Partner, dated July 1, 2014.

Through letter No.S.00091/BEL.PPJ/01-2014 dated January 8, 2014 Indonesia Stock Exchange approved the listing of shares on the Indonesia Stock Exchange originating from Distribution Options of Stock Purchase Program to management and Employees (*Management & Employee Stock Plan (MESOP)*) amounted to 115,587,000 B series shares.

Stock option mutation during 2014 Year as follows:

	2014
	Mesop Tahap II / Phase I
	Jumlah Opsi/ Total Option
	Lembar
<b>Outstanding Option at the Beginning of the Year</b>	
Option granted in the Period	173.380.000
Option Executed During the period	(95.268.205)
The Expired option	--
<b>Option can be Executed During the Period</b>	<b>78.111.795</b>

Execution of stock option during the period:

	Jumlah yang Dilaksanakan/ Total Implementation	Tanggal Pelaksanaan/ Date of Implementation
Diberikan pada Mei 2014/ <i>Granted on May 2014</i>	5.937.500	19/5/2014
	1.036.050	20/5/2014
	1.151.500	21/5/2014
	1.303.000	22/5/2014
	276.500	23/5/2014
	824.500	26/5/2014
	1.042.000	28/5/2014
<b>Jumlah Eksekusi Mei 2014/ Total Execution on May 2014</b>	<b>11.571.050</b>	



PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)

31. OPSI SAHAM (Lanjutan)

31. STOCK OPTION (Continued)

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (MESOP) (Lanjutan)	Plant for Management and Employee Stock Option (MESOP) (Continued)	
Diberikan pada Juni 2014/ Granted on June 2014	896.500	30/5/2014
	537.000	06/02/2014
	690.000	06/03/2014
	253.900	06/04/2014
	1.000.000	06/05/2014
	37.500	06/06/2014
	179.500	06/09/2014
	387.000	06/10/2014
	107.500	06/11/2014
	197.500	06/12/2014
	104.000	13/6/2014
	763.000	16/6/2014
	235.500	17/6/2014
	2.979.500	18/6/2014
	125.000	19/6/2014
	697.000	20/6/2014
	627.500	23/6/2014
	1.145.500	24/6/2014
	4.049.250	25/6/2014
	452.000	26/6/2014
<b>Jumlah Eksekusi Juni 2014</b> <b>Total Execution on June 2014</b>	<b>15.464.650</b>	
Diberikan pada Juli 2014/ Granted on July 2014	528.000	27/6/2014
	2.603.000	30/6/2014
	1.760.000	07/01/2014
	2.177.400	07/02/2014
<b>Jumlah Eksekusi Juli 2014</b> <b>Total Execution on July 2014</b>	<b>7.068.400</b>	
Diberikan pada Nopember 2014/ Granted on November 2014	1.205.000	11/03/2014
	3.601.000	11/04/2014
	2.494.000	11/05/2014
	1.211.000	11/06/2014
	2.139.400	11/07/2014
	852.250	11/10/2014
	1.865.000	11/11/2014
	2.732.400	11/12/2014
	2.264.450	13/11/2014
	2.960.000	14/11/2014
	1.175.250	17/11/2014
	3.062.500	18/11/2014
	1.718.000	19/11/2014
	2.359.000	20/11/2014
	2.163.745	21/11/2014
	609.000	24/11/2014
	922.600	25/11/2014
	1.384.500	26/11/2014
	1.826.000	27/11/2014
<b>Jumlah Eksekusi Nopember 2014</b> <b>Total Execution on November 2014</b>	<b>36.545.095</b>	
Diberikan pada Desember 2014/ Granted on December 2014	605.000	28/11/2014
	1.261.500	12/01/2014
	655.500	12/02/2014
	1.874.405	12/03/2014
	4.252.000	12/04/2014
	1.534.834	12/05/2014
	5.983.866	12/08/2014
	3.152.455	12/09/2014
	3.424.500	12/10/2014
	1.874.950	12/11/2014
<b>Jumlah Eksekusi Desember 2014</b> <b>Total Execution on December 2014</b>	<b>24.619.010</b>	
<b>Jumlah Eksekusi per 31 Desember 2014/ Total Execution as of December 31, 2014</b>	<b>95.268.205</b>	

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**32. SALDO LABA**

**32. RETAINED EARNINGS**

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Telah Ditetapkan Penggunaannya</b>			<b>Appropriated</b>
Saldo Awal Tahun	194.820.273.829	192.279.960.913	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan Dana Cadangan	73.611.996.499	2.540.312.916	<i>Addition on Reserved Fund</i>
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b>268.432.270.328</b>	<b>194.820.273.829</b>	<b>Ending Balance</b>
<b>Belum Ditetapkan Penggunaannya</b>			<b>Unappropriated</b>
Saldo Awal Tahun	368.090.741.292	22.893.575.038	<i>Beginning Balance</i>
Dividen	(110.417.994.749)	(20.322.503.326)	<i>Dividend</i>
Pembentukan Cadangan Umum	(73.611.996.499)	(2.540.312.916)	<i>Allocation to General Reserve</i>
Laba (Rugi) Bersih	501.530.512.401	368.059.982.496	<i>Net Income</i>
<b>Saldo Akhir Tahun</b>	<b>685.591.262.445</b>	<b>368.090.741.292</b>	<b>Ending Balance</b>

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 18 Maret 2014, disetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba perusahaan tahun 2013 sebesar Rp 73.611.996.499 dan pembagian dividen tunai sebesar Rp 110.417.994.749.

*Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) dated March 18, 2014, agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2013 amounted to Rp 73,611,996,499 and distribution of cash dividend amounted to Rp 110,417,994,749.*

Berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 18 April 2013, disetujui untuk membentuk cadangan umum atas penggunaan laba Perusahaan tahun 2012 sebesar Rp 2.540.312.916 dan pembagian dividen tunai sebesar Rp 20.322.503.326.

*Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders (AGM) dated April 18, 2013, agreed to establish the general reserve for the use of the Company's profits in 2012 amounted to Rp 2,540,312,916 and distribution of cash dividend amounted to Rp 20,322,503,326.*

Perusahaan membuat penyisihan untuk cadangan umum sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 mengenai Perusahaan Terbatas. Undang-undang tersebut mengharuskan perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dana cadangan diadakan untuk menutupi kerugian yang diderita dan dapat dipergunakan sebagai modal kerja dan tujuan lain menurut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

*The Company has provided the provision of general reserve in accordance with the Law number 40 year 2007 concerning to Limited Company. The Law requires companies in Indonesia to provide a general reserve at least 20% of the issued and fully paid capital. Reserve funds have to be held to cover suffered losses and can be used as working capital and other purposes by the decision of the general meeting of shareholders.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. PENDAPATAN USAHA**

**33. REVENUES**

	2014 Rp	2013 Rp	
Jasa Konstruksi	9.483.889.771.605	9.559.122.605.712	Construction Services
Penjualan Precast	802.605.653.433	127.227.268.152	Sales Precast
Sewa Gedung	317.858.966	260.428.000	Buildings Rental
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>10.286.813.284.004</b>	<b>9.686.610.301.864</b>	<b>Total</b>

Rincian pendapatan usaha berelasi :

*The details of the revenues related parties:*

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>Pihak-pihak Berelasi</b>			<b>Related Parties</b>
PT Pejagan Pemalang Toll Road	600.003.720.995	--	PT Pejagan Pemalang Toll Road
PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	400.011.053.972	--	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
JO Waskita Karya - Trinit	269.866.023.577	--	JO Waskita Karya - Trinit
PT Pelindo II (Persero)	260.677.928.824	365.520.595.136	PT Pelindo II (Persero)
JO Kawahapejaya Indonesia	196.302.064.769	--	JO Kawahapejaya Indonesia
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	148.924.567.020	157.962.601.451	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	128.212.244.668	316.804.080.873	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
PT ReKayasa Industri (Persero)	127.313.917.488	169.707.621.217	PT ReKayasa Industri (Persero)
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	91.999.645.198	202.594.857.050	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Transmarga Jatim Pasuruan	86.170.150.073	162.024.420.521	PT Transmarga Jatim Pasuruan
PT Semen Padang (Persero)	74.750.156.804	82.608.172.662	PT Semen Padang (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	71.841.043.261	18.987.298.629	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Angkasa Pura Hotel	70.827.059.606	--	PT Angkasa Pura Hotel
PT Bank Mandiri Tbk (Persero)	66.141.074.154	--	PT Bank Mandiri Tbk (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	40.534.694.184	103.930.622.830	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kresma Kusuma Dyandra Marga	35.978.088.761	--	PT Kresma Kusuma Dyandra Marga
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)	23.370.601.091	--	PT Perusahaan Gas Negara (Persero)
PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)	23.096.743.831	--	PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)
PT Trans Marga Jateng	19.369.502.826	120.972.360.608	PT Trans Marga Jateng
KSO Waskita-PP-HK	18.486.473.500	--	JO Waskita-PP-HK
PT Angkasa Pura I (Persero)	15.390.201.882	342.806.561.792	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT PN III	12.046.160.344	--	PT PN III
KSO Waskita-Hutama	10.913.311.187	--	JO Waskita-Hutama
PT Jasa Marga Tol Bali	--	197.425.270.834	PT Jasa Marga Tol Bali
PT Pertamedika Sentul	--	19.066.000.496	PT Pertamedika Sentul
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)	--	122.886.200.000	PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)
PT Trans Lingkar Kita Jaya	--	14.528.561.409	PT Trans Lingkar Kita Jaya
PT Pertamina (Persero)	--	23.945.545.474	PT Pertamina (Persero)
Lainnya (di bawah Rp 10 Milyar)	9.096.413.077	13.870.795.770	Others (less than Rp 5 Billions each)
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi</b>	<b>2.801.322.841.092</b>	<b>2.435.641.566.752</b>	<b>Total Related Parties</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)**

**33. REVENUES (Continued)**

Rincian pendapatan usaha ketiga :

The details of the revenues third parties:

Pihak-pihak Ketiga	2014	2013	Third Parties
	Rp	Rp	
Pemerintah-pemerintah Daerah Kementerian Pekerjaan Umum	2.290.412.167.141 920.304.962.975	2.262.682.768.294 1.539.210.188.587	District Governments The Ministry of Public Work
The Ministry of Transport and Communication of Republica Democratica De Timor Leste	288.611.274.332	--	The Ministry of Transport and Communication of Republica Democratica De Timor Leste
The Ministry of Public Work of Republica Democratica De Timor Leste	16.808.168.689	--	The Ministry of Public Work of Republica Democratica De Timor Leste
Kementerian Perumahan Rakyat	273.264.881.707	161.421.383.468	The Ministry of Public Housing
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	264.051.596.447	93.667.190.000	The Ministry of Education and Culture
PT Pembangunan Jaya Ancol	174.672.565.600	--	PT Pembangunan Jaya Ancol
PT Ade Pede Realty	168.580.040.632	76.621.148.000	PT Ade Pede Realty
PT Sinoma Engineering Indonesia	158.356.758.000	--	PT Sinoma Engineering Indonesia
Kementerian Hukum & HAM	138.296.508.670	--	The Ministry of Law and Human Rights
Mahkamah Agung RI	116.549.244.886	--	The Supreme Court of Justice of Republic Indonesia
Konsorsium Interchange STA 11	111.781.295.161	--	Consortium of Interchange STA 11
Bin Ladin Contractor Group	111.625.161.442	123.413.221.015	Bin Ladin Contractor Group
PT Daya Radar Utama	102.329.182.947	73.762.727.906	PT Daya Radar Utama
PT Sentul City Tbk	101.512.041.557	--	PT Sentul City Tbk
Kementerian Kesehatan	100.100.114.446	138.140.445.772	The Ministry of Health
PT Pardika Wisthi Sarana	95.215.403.704	230.932.234.543	PT Pardika Wisthi Sarana
PT Harmas Jalesveva	94.517.228.527	--	PT Harmas Jalesveva
Universitas Sebelas Maret	92.659.448.813	--	University of Sebelas Maret
PT Mega Pasanggrahan Indah	89.802.833.466	190.247.607.200	PT Mega Pasanggrahan Indah
PT Citra Abadi Mandiri	81.161.890.000	--	PT Citra Abadi Mandiri
PT Bangun Investa Graha	73.008.425.454	--	PT Bangun Investa Graha
PT Broadbiz Asia	66.421.813.045	139.291.000.000	PT Broadbiz Asia
PT Halla Mohana	61.104.000.000	--	PT Halla Mohana
Telkom Property (PT graha Sarana Duta)	60.207.535.448	--	Telkom Property (PT graha Sarana Duta)
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	55.149.543.421	--	PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	49.021.972.531	62.736.981.207	Procurement Policy Institute Goods /Services of Government
PT Toba Pengembang Sejahtera	144.103.338.820	--	PPK Poltek Negeri Kupang
Universitas Pendidikan Ganesha	44.544.602.725	--	University of Pendidikan Ganesha
PT ITC Polonia	41.507.590.910	--	PT ITC Polonia
Perpustakaan Nasional RI	40.241.585.000	--	The National Library of RI
Kementerian Perhubungan	39.721.936.363	53.405.442.516	The Ministry of Transportation
Yayasan Pendidikan Gunadarma	36.496.195.455	--	Gunadarma Education Foundation
PT Sarana Teluk Sumber	34.948.593.664	--	PT Sarana Teluk Sumber
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk	34.165.527.364	--	PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk
Samsung C&T Corporation	32.181.469.761	--	Samsung C&T Corporation
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	31.736.965.000	123.612.618.112	The National Board for Disaster Management
PT Hidro Rizki Ilahi	31.375.572.000	--	PT Hidro Rizki Ilahi
PT Mandara Permai	30.682.722.998	227.558.676.612	PT Mandara Permai
PT Bhumyamca	30.084.637.400	--	PT Bhumyamca
PT Metropolitan Karyadeka Development	28.097.609.415	--	PT Metropolitan Karyadeka Development
PT PGE	25.013.920.000	--	PT PGE
PT Trikarya Graha Utama	90.642.178.264	--	PT Trikarya Graha Utama
PT Marga Sarana Raya	23.600.000.000	--	PT Marga Sarana Raya
PT Banyu Daya Perkasa	21.607.836.860	--	PT Banyu Daya Perkasa
PT Kapuk Naga Indah	41.394.041.003	--	PT Kapuk Naga Indah
PT Suryamas Dutamakmur Tbk	19.567.058.747	--	PT Suryamas Dutamakmur Tbk
PT Patria Maritime Industry	18.950.232.014	--	PT Patria Maritime Industry
PT Puriampora Intiptama	17.565.763.172	55.143.335.869	PT Puriampora Intiptama
PT Gandaria Prima	15.659.571.304	--	PT Gandaria Prima
PT Mardhika Artha Upaya	14.574.675.057	--	PT Mardhika Artha Upaya
PT P3MPI	12.947.343.500	--	PT P3MPI
PT Bosowa Terminal Mataram	12.570.069.973	--	PT Bosowa Terminal Mataram
PT Medisafe Technologies	12.180.383.609	55.179.395.139	PT Medisafe Technologies
PT Adhityya Seroyakorita	--	66.289.063.792	PT Adhityya Seroyakorita
PT Basko Minang Plaza	--	57.626.707.563	PT Basko Minang Plaza
PT Sumber Mesin Raya	--	98.787.710.130	PT Sumber Mesin Raya
PT Marga Lingkar Jakarta	--	73.388.835.653	PT Marga Lingkar Jakarta
PT Gapura Kencana Abadi	--	57.037.445.497	PT Gapura Kencana Abadi
UIN Alaudin Makassar	--	16.953.122.728	UIN Alaudin Makassar
Lainnya (di bawah Rp 50 Miliar)	403.802.963.493	1.273.859.485.509	Others (less than Rp 5 Billions each)
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga</b>	<b>7.485.490.442.912</b>	<b>7.250.968.735.112</b>	<b>Total Third Parties</b>
<b>Jumlah</b>	<b>10.286.813.284.004</b>	<b>9.686.610.301.864</b>	<b>Total</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. PENDAPATAN USAHA (Lanjutan)**

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi 10% dari pendapatan usaha Perusahaan untuk tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
Pemerintah-pemerintah Daerah	2.290.412.167.141	1.539.210.188.587
Kementerian Pekerjaan Umum	920.304.962.975	2.262.682.768.294
<b>Jumlah Bersih</b>	<b>3.210.717.130.116</b>	<b>3.801.892.956.881</b>

**33. REVENUES (Continued)**

Details of the project owners with value exceeding 10% of the Company revenues for December 31, 2014 and 2013 were as follows:

District Governments  
The Ministry of Public Work  
**Total**

**34. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

	2014 Rp	2013 Rp
Jasa Konstruksi		
Bahan Baku	3.427.968.434.985	3.851.590.936.900
Upah	830.866.083.530	770.737.836.714
Subkontraktor	2.783.680.818.694	2.614.377.502.389
Beban Tidak Langsung	1.478.866.058.602	1.423.794.688.994
<b>Jumlah Jasa Konstruksi</b>	<b>8.521.381.395.812</b>	<b>8.660.500.964.997</b>
Produk Beton		
Persediaan Awal	9.892.431.826	21.150.635.020
Pembelian	568.591.886.057	73.373.017.383
Barang tersedia untuk Dijual	578.484.317.883	94.523.652.403
Persediaan Akhir	45.491.012.865	9.892.431.826
Beban Bahan Baku	532.993.305.018	84.631.220.577
Beban Upah	33.124.582.717	7.349.496.586
Beban Overhead	90.417.535.528	23.432.282.837
<b>Jumlah Produk Beton</b>	<b>656.535.423.263</b>	<b>115.413.000.000</b>
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>9.177.916.819.076</b>	<b>8.775.913.964.997</b>

**34. COST OF REVENUES**

Construction Services  
Raw Material  
Wages  
Sub contractor  
Indirect Costs  
Total Constructions  
Concrete Products  
Beginning Balance  
Purchases  
Goods Available for Sale  
Ending Balance  
Raw Material Expenses  
Direct Labour Expenses  
Overhead Expenses  
Total Concrete Products  
Total Cost of Revenues

**35. PENDAPATAN BERSIH VENTURA BERSAMA**

Rincian bagian laba ventura bersama pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

**35. NET REVENUES CONSTRUCTION JOINT VENTURES**

The details of the related parties revenues are as follows:

Kemitraan / <i>Venturers</i>	Nama Proyek / <i>Project Name</i>	2014 Rp	2013 Rp
<b>Pihak-pihak Berelasi / <i>Related Parties</i></b>			
Waskita - PP	Jembatan Sungai Brantas	7.797.795.695	--
Waskita - Indah Karya	Jalan Ciasem Pamanukan	(229.857.363)	(6.721.212.506)
Waskita - Brantas	Rekons. Sabo Dam Merapi	6.322.123.452	--
Waskita - Wika	RSUD Pasar Minggu	5.815.708.678	--
Waskita - Brantas	Civil Work of Jabung	5.374.197.036	578.540.461
Waskita - Wika	Run Way SSK II	4.782.875.756	--
Waskita - HK	Normalisasi Kali Ciliwung	3.072.681.379	684.071.518
Waskita - PP - HK	Jalan Tol Depok-Antasari (Desari)	1.478.536.558	--
Waskita - Yodya Karya	Bandara Husein Sastranegara	27.519.525.400	--
Waskita - Brantas - Wika	Bendung Gerak Sembayat	436.661.394	7.507.185.343
Waskita - Wijaya	Sabo Dam Paket 1	11.532.413	(733.895.352)
Waskita - Brantas	Kali Klawing	--	(667.160.280)
Waskita - PP	Gedung BPK RI	(376.952.504)	(94.021.388)
Waskita - Brantas	Sabo Dam Merapi	(1.154.647.401)	20.800.427.055
Waskita - PP - Wika	Jembatan Merah Putih	(10.323.274.117)	(6.278.519.949)
Waskita - Brantas	Pandan Duri II	(20.312.758.706)	8.489.498.205
<b>Jumlah Pihak-pihak Berelasi / <i>Total Related Parties</i></b>		<b>30.214.147.670</b>	<b>23.564.913.107</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PENDAPATAN BERSIH VENTURA BERSAMA (Lanjutan)**

Rincian bagian laba ventura bersama pihak-pihak ketiga sebagai berikut:

<b>Kemitraan / Venturers</b>	<b>Nama Proyek / Project Name</b>	<b>2014 Rp</b>	<b>2013 Rp</b>
<b>Pihak-pihak Ketiga / Third Parties</b>			
Waskita - Wika - PP - Jaya	Gedung Terminal 3	72.221.427.410	10.161.018.446
Waskita - Brantas	Terminal Selatan Bandara Djuanda (Thp 2)	19.574.259.089	21.393.652.855
Waskita - Trinita	Apartemen Brooklyn Alam Sutra	34.869.767.058	(1.217.713.044)
Waskita - Arkonin	Renovasi Bandara Ngurah Rai	27.679.496.987	2.048.679.307
Waskita - JPC	SMM Muara Teweh	14.146.693.514	27.715.398.669
Waskita - Sinar Intan	PDAM Tanah Grogot	6.982.958.848	2.455.666.134
Waskita - Lombok I.P	Jalan Gerung - Mataram 4	5.722.234.086	--
Waskita - Wika - Shanghai	Jalan Tol Cismudawu	4.450.464.185	3.215.276.126
Waskita - Wika - IPA	Dermaga Semarang	4.258.945.794	--
Waskita - Andesmont	Jalan Kebayan - Simpang Kraft	3.311.404.475	235.639.842
Waskita - Lombok I.P	Jalan Lembar - Sekotong - Pelangan	2.863.467.010	--
Waskita - Rimba - Marinda	Tol Balikpapan-Samarinda	2.797.633.913	2.184.192.395
Waskita - Ricky Kencana	Underpass Simpang Patal-Pusri	2.636.832.305	1.503.686.573
Waskita - Lombok I.P	Jembatan Padolo Cs	2.632.049.232	--
Waskita - PP - Deltamarga	Jalan Pesisir (Coastal Road Construction)	2.336.940.500	163.347.134
Waskita - Lombok I.P	Jembatan Sori Lan Cs	2.185.571.198	--
Waskita - Yasa	Jalan Galing Aruk	1.927.565.777	(166.897.923)
Waskita - Panca Duta	Peningktn Jalan Kambuaya-Klamono	1.575.127.859	2.022.126.451
Waskita - Daya Mulia Turangga	Ipuh Bantal Roads	1.375.016.504	--
Waskita - Darmo Permai	Segi 88 Avenue	48.759.112	--
Waskita - Pangkho	BNN Makassar	518.102	--
Waskita - Adi Jaya Lima Pradana	Pengendalian Sedimen Bawakaraeng	--	2.790.349.272
Waskita - CPA	Sandai Nanga Tayap Kalbar	--	32.082.361
Waskita - Mitra Statika	Jalan Sicincin - Malalak	--	9.093.592.949
Waskita - Modern	Dermaga Peti Kemas CY-Lanjutan	--	1.842.520.371
Waskita - Bugak Brawang	Pasar Atjeh Phase IV Thp II	--	(49.328.394)
Waskita - Tirta	Struktur Dalam Jl. Pontianak	--	(7.283.174)
Waskita - Baswara - Mahir Jaya	Tulur Aji Jangkat	--	(648.216.828)
Waskita - CPA	Spam Samarinda Utara	--	(3.877.809.226)
Waskita - Kega	Harris Hotel Yogya	(36.919.457)	(35.445.624)
Waskita - Modern	Dermaga Peti Kemas	(39.482.371)	1.742.216.696
Waskita - Siwa Prestasi	Faspela Pantoloan 2013	(51.579.586)	3.043.145.621
Waskita - IHC	Pengadaan Dredger	(77.725.390)	6.135.597.755
Waskita - Menumbang Jaya	SMK N 2 Palembang	(83.731.430)	734.268.465
Waskita - Yasa	Bandara Kuala namu	(212.693.652)	(13.459.761.948)
Waskita - Kumodo Intan	Waduk Rajui	(285.434.202)	--
Waskita - Indopenta	Drainase Pekalongan	(768.850.178)	(129.084.160)
Waskita - Witada Bangun Gemilang	Timbunan Tanah Bandara Mutiara	(948.820.503)	4.458.033.456
Waskita - Larasati	Pengend Banjir Karang Asam	(968.687.852)	(1.075.820.217)
Waskita - Usaha Batanghari	FO Jalan Gajah Mada - Juanda	(2.114.732.177)	3.100.616.032
Waskita - Bina Baraga	Kantor Pemda Ogan Hilir	(2.376.749.027)	2.127.655.073
Waskita - Luhribu	Reservoir Bdg MA Kayu	(3.266.781.502)	4.369.048.310
Waskita - ZUG	PLTU Rote	(3.610.802.122)	(6.012.198.324)
Waskita - Perdasa - Buluh - Larasati	Jalan Talisayan - Batu Lepok	(8.279.182.667)	2.785.237.076
Waskita - PAL	PLTN Malinau	(10.042.642.083)	(1.571.636.110)
Waskita - Kazima	E2 Cilincing	(14.919.001.205)	(8.991.926.557)
Waskita - Jaya - Nusantara	Jalan Arteri Siring - Porong Paket 1	1.388.208.740	--
<b>Jumlah Pihak-pihak Ketiga / Total Third Parties</b>		<b>166.901.526.294</b>	<b>78.109.925.840</b>
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>197.115.673.963</b>	<b>101.674.838.947</b>

**35. NET REVENUES CONSTRUCTION JOINT VENTURES  
(Continued)**

The details of the related parties revenues are as follows:

**36. BEBAN PENJUALAN DAN ADMINISTRASI UMUM**

	<b>2014 Rp</b>	<b>2013 Rp</b>
<b>Beban Penjualan</b>		
Tender	15.986.424.737	12.786.868.637
Pemasaran	8.471.323.934	10.009.138.804
Iklan	1.057.778.826	1.098.196.797
Jumlah	25.515.527.498	23.894.204.238

**36. SELLING AND ADMINISTRATIVE GENERAL EXPENSES**

**Selling Expenses**  
Tender  
Advertising  
Marketing  
Total

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. BEBAN PENJUALAN DAN ADMINISTRASI UMUM  
(Lanjutan)**

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>		
Pegawai	167.653.765.783	141.306.545.367
Penyisihan Piutang	67.537.324.027	42.493.108.234
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 17)	6.163.392.086	5.791.274.106
Umum	28.686.153.202	18.868.775.941
Perjalanan Dinas	21.094.687.219	20.882.325.734
Pesangon	33.492.094.168	21.923.841.437
THR/Bonus	10.050.007.751	8.696.550.928
Kantor	14.401.872.345	13.329.451.587
Gedung	7.859.239.424	6.230.872.877
Jamsostek	4.601.978.562	2.767.702.913
DPLK	149.146.731	--
Jasa Produksi dan Tantiem	41.750.000.000	34.000.000.000
Lain-lain	1.603.459.864	--
Jumlah	<u>405.043.121.161</u>	<u>316.290.449.124</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>430.558.648.659</u></b>	<b><u>340.184.653.362</u></b>

**36. SELLING AND ADMINISTRATIVE GENERAL EXPENSES  
(Continued)**

	2014 Rp	2013 Rp
<b>General and Administrative Expenses</b>		
Employee		
Allowance for Doubtful Accounts		
Depreciation of Fixed Assets (Notes 17)		
General		
Travelling		
Severance		
THR Allowance		
Office		
Building		
Jamsostek		
DPLK		
Production and Tantiem		
Others		
Total		
<b>Total</b>		

**37. BEBAN KEUANGAN**

Merupakan beban bunga atas kredit bank/non bank, beban provisi, dan beban administrasi bank yang terkait dengan perolehan pinjaman selama periode berjalan setelah dikurangi biaya bunga yang secara langsung dapat diatribusikan dengan biaya perolehan suatu proyek tertentu yang memenuhi syarat.

**37. FINANCIAL CHARGES**

Represent interest expenses of bank loans/non banks, fees, and administrative expenses related to the acquisition of bank loans during the current period after deducting the interest costs which are directly attributable to the cost of a qualifying project.

**38. PENDAPATAN LAIN-LAIN**

	2014 Rp	2013 Rp
Keuntungan Penjualan Saham Entitas Asosiasi	32.341.125.555	--
Pendapatan lain-lain Proyek	3.264.891.488	217.556.774
Pendapatan Pemulihan Piutang	300.000.000	3.744.579.635
Pendapatan Klaim Asuransi	140.775.141	--
Pendapatan Lain-lain KSO	591.688.937	--
Lain-lain	381.186.361	1.400.352.696
Jumlah	<u>37.019.667.482</u>	<u>5.362.489.105</u>

**38. OTHERS INCOME**

Gain on Sale of Associates's Share	
Project Other Income	
Income from Recovery of Receivables	
Insurance Claims Income	
Others JO	
Others	
<b>Total</b>	

**39. BEBAN LAIN-LAIN**

	2014 Rp	2013 Rp
Beban dan Denda Pajak	6.010.512.314	12.593.521.443
Beban Lain-lain Proyek	5.017.846.216	5.950.650.352
Beban Lain-lain KSO	2.047.288.624	--
Lain-lain	--	400.220
Jumlah	<u>13.075.647.154</u>	<u>18.544.572.015</u>

**39. OTHERS EXPENSES - NET**

Tax Expenses and Penalty	
Other Project Expenses	
Others JO Expenses	
Others	
<b>Total</b>	

**40. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

	2014 Rp	2013 Rp
PT Shalawat Power	5.856.327.838	1.035.246.799
Koperasi Waskita	3.198.623	--
Jumlah	<u>5.859.526.461</u>	<u>1.035.246.799</u>

**40. NON-CONTROLLING INTEREST**

PT Shalawat Power	
Koperasi Waskita	
<b>Total</b>	

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**40. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI (Lanjutan)**

**40. NON-CONTROLLING INTEREST (Continued)**

Rincian kepentingan non pengendali adalah sebagai berikut:

The details of non controlling interest are as follows:

Entitas/Entity	2014				
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) for The Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Disposal)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Shalawat Power (untuk/for PT WSE)	15,00%	1.035.246.799	(317.918.962)	5.139.000.000	5.856.327.838
<b>Jumlah</b>		<b>1.035.246.799</b>	<b>(317.918.962)</b>	<b>5.139.000.000</b>	<b>5.856.327.838</b>

Entitas/Entity	2014				
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) for The Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Disposal)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Koperasi Waskita (Untuk/for PT WKR)	0,001%	--	(57.200)	1.000.000	942.800
<b>Jumlah</b>		<b>--</b>	<b>(57.200)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>942.800</b>

Entitas/Entity	2014				
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) for The Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Disposal)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Koperasi Waskita (untuk/for PT WBP)	0,001%	--	249.714	1.000.000	1.249.714
<b>Jumlah</b>		<b>--</b>	<b>249.714</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.249.714</b>

Entitas/Entity	2014				
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) for The Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Disposal)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
Koperasi Waskita (untuk/for PT WTR)	0,001%	--	6.109	1.000.000	1.006.109
<b>Jumlah</b>		<b>--</b>	<b>6.109</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.006.109</b>

Entitas/Entity	2013				
	Kepemilikan/ Ownership	Nilai Tercatat Awal Tahun/ Beginning Balance	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ Profit (Loss) for The Year	Penambahan (Pengurangan)/ Additional (Disposal)	Nilai Tercatat Akhir Tahun/ Ending Balance
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
PT Shalawat Power (untuk/for PT WSE)	15,00%	1.125.000.000	(89.753.201)	--	1.035.246.799
<b>Jumlah</b>		<b>1.125.000.000</b>	<b>(89.753.201)</b>	<b>--</b>	<b>1.035.246.799</b>



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. LABA PER SAHAM**

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	2014 Rp	2013 Rp	
Laba Bersih	501.212.792.063	367.970.229.296	Net Income
Jumlah awal periode	9.632.236.000	9.632.236.000	Beginning Balance
Penawaran Perdana Saham			Initial Public Offering
Tambahan saham beredar berasal dari Program Mesop	25.447.327	--	Additional outstanding shares from Mesop Program
Jumlah Rata-rata tertimbang saham	9.657.683.327	9.632.236.000	Weighted Average Number of Ordinary Shares
Laba Bersih per Saham	51,90	38,20	Earning per Shares

**41. EARNING PER SHARE**

Following the details of the calculation of earning per share:

**42. BANK GARANSI DAN LETTER OF CREDIT (LC)**

Perusahaan memiliki fasilitas Bank Garansi dari PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, dan PT BRI (Persero) Tbk masing-masing dengan jumlah maksimum Rp, 1.731.800.000.000 Rp 3.006.000.000.000, Rp 100.000.000.000, dan Rp 1.000.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2014 Perusahaan telah menggunakan Bank Garansi masing-masing Rp 2.398.430.595.561 Rp 10.704.972.184.567,30, Rp Nihil dan Rp 1.231.872.742.787.

Pada tanggal 31 Desember 2013 Perusahaan telah menggunakan Bank Garansi masing-masing Rp 1.364.480.686.098, Rp 2.450.879.421.221, Rp Nihil dan Rp 544.359.300.810.

Perusahaan juga memiliki fasilitas *Letter Of Credit* dan Surat Kredit Bank Dalam Negeri (SKBDN) dari PT Bank BNI Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan penggunaan per 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 276.670.334.933 dan USD 9.364.415,45, Rp 156.931.405.557 dan Rp 27.591.757.371. Sedangkan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp 104.235.444.950, Rp 27.193.548.000 dan USD 696,321 dan Rp 149.720.617.440

**42. BANK GUARANTEE AND LETTER OF CREDIT (LC)**

The Company obtained Bank Guarantee facilities from PT Bank BNI (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Panin Tbk, and PT Bank BRI (Persero) Tbk with maximum of Rp, 1.731.800.000.000 Rp 3.006.000.000.000, Rp 100.000.000.000, and Rp 1.000.000.000.000, respectively.

On December 31, 2014 the Company had been used Bank Guarantee, amounted to Rp 2.398.430.595.561, Rp 10.704.972.184.567, Rp Nil and Rp 1.231.872.742.787, respectively each.

On December 31, 2013 the Company had been used Bank Guarantee, amounted to Rp 1,364,480,686,098, Rp 2,450,879,421,221, Rp Nil and Rp 544,359,300,810, respectively.

The Company also has Letter of Credit and Letter of Local Bank Credit (L/C) from PT Bank BNI Tbk, PT Bank BRI (Persero) Tbk and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with the total usage as of December 31, 2014 amounted to Rp 276,670,334,933 and USD 9,364,415.45, Rp 156,931,405,557 and Rp 27,591,757,371, respectively. While as of December 31, 2013 amounted to Rp 104,235,444,950, Rp 27,193,548,000 and USD 696,321 and Rp 149,720,617,440

**43. FASILITAS KREDIT MODAL KERJA (KMK) DAN SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)**

Perusahaan memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan *Supply Chain Financing (SCF)* yang digunakan untuk membayar tagihan mitra kerja sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp	
Pihak-pihak Berelasi			Related Parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.006.000.000.000	550.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF	750.000.000.000	515.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF
Jumlah Pihak-pihak Berelasi	1.756.000.000.000	1.065.000.000.000	Total Related Parties
Pihak-pihak Ketiga	--	--	Third Parties
<b>Jumlah</b>	<b>1.756.000.000.000</b>	<b>1.065.000.000.000</b>	<b>Total</b>

**43. WORKING CAPITAL LOANS FACILITY AND SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF)**

The Company has Working Capital Loans Facility and Supply Chain Financing (SCF) were used to pay partners bill were as follow:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**43. FASILITAS KREDIT MODAL KERJA (KMK) DAN SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF) (Lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, jumlah penggunaan fasilitas tersebut sebagai berikut :

	2014 Rp	2013 Rp	
Pihak-pihak Berelasi			<i>Related Parties</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	522.930.645.396	543.508.220.106	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF	707.364.233.457	504.085.605.617	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - OAF</i>
Jumlah Pihak-pihak Berelasi	<u>1.230.294.878.853</u>	<u>1.047.593.825.723</u>	<i>Total Related Parties</i>
Pihak-pihak Ketiga	--	--	<i>Third Parties</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.230.294.878.853</u></b>	<b><u>1.047.593.825.723</u></b>	<b>Total</b>

**43. WORKING CAPITAL LOANS FACILITY AND SUPPLY CHAIN FINANCING (SCF) (Continued)**

*As of December 31, 2014 and 2013, the total use that facility, were as follow :*

**44. TRANSAKSI NON KAS**

	2014 Rp	2013 Rp	
Penambahan Aset Tetap Melalui Utang Usaha	117.482.255.497	36.823.475.096	<i>Acquisition of Fixed Asset through Accounts Payables</i>
Amortisasi Biaya Obligasi	(1.625.561.273)	(913.360.745)	<i>Amortisation Bonds Expenses</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>115.856.694.224</u></b>	<b><u>35.910.114.351</u></b>	<b>Total</b>

**44. NON CASH TRANSACTIONS**

**45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Perusahaan mempunyai aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2014 Rp		2013 Rp			
	Mata Uang Asing / <i>Foreign Currency</i>	Ekuivalen Rupiah / <i>Equivalent</i>	Mata Uang Asing / <i>Foreign Currency</i>	Ekuivalen Rupiah / <i>Equivalent</i>		
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>	
Kas dan Setara Kas	USD	3.228.938	40.167.994.484	6.179.940	59.921.459.639	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
	SGD	--	--	5.451	43.102.106	
	YEN	11.898.457	1.240.414.143	11.898.457	1.332.270.230	
	EURO	576,61	8.725.989	9.302	119.153.730	
	AED	--	--	163.764	428.159.966	
	SAR	1.361.916	4.498.069.140	30.861.151	18.358.961.586	
	MYR	688.604	2.438.973.394	--	--	
		--	--	--	--	
Piutang Usaha	SAR	15.568.185	51.417.821.416	--	--	<i>Accounts Receivables</i>
Piutang Retensi	SAR	7.281.637	24.049.426.559	7.335.779	17.949.252.706	<i>Retention Receivables</i>
	AED	--	--	--	--	
Tagihan Bruto	SAR	5.200.548	17.176.111.375	--	--	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
	USD	25.112.084	312.394.324.338	--	--	
<b>Jumlah</b>		<b><u>70.340.946</u></b>	<b><u>453.391.860.838</u></b>	<b><u>56.453.844</u></b>	<b><u>98.152.359.963</u></b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Utang Usaha	SAR	--	--	585.617	1.465.600.241	<i>Accounts Payables</i>
	USD	11.673.718	145.221.054.159	--	--	
Utang Bruto Subkontraktor Pihak Ketiga	SAR	--	--	14.748.525	36.910.543.577	<i>Gross Amount Due to Third Parties Subcontractors</i>
<b>Jumlah</b>		<b><u>11.673.718</u></b>	<b><u>145.221.054.159</u></b>	<b><u>15.334.142</u></b>	<b><u>38.376.143.818</u></b>	<b>Total</b>
<b>Jumlah Aset Bersih</b>		<b><u>58.667.229</u></b>	<b><u>308.170.806.679</u></b>	<b><u>41.119.702</u></b>	<b><u>59.776.216.145</u></b>	<b>Total Net Assets</b>

**45. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY**

*As of December 31, 2014 dan 2013, the Company have monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were as follow:*

**46. INFORMASI SEGMENT**

**a. Segmen Operasi**

Segmen operasi Perusahaan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan.

Informasi Segmen berdasarkan jenis usaha / produk adalah sebagai berikut:

**46. SEGMENT INFORMATION**

**a. Operation Segment**

*The Company's operating segments are grouped based on the work performed.*

*Details information of segment based on the type of business/product were as follow:*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)**

**46. SEGMENT INFORMATION (Continued)**

**a. Segmen Operasi (Lanjutan)**

**a. Operation Segment (Continued)**

	2014						
	Konstruksi / Constructions	Sewa Gedung / Building Rentals	Properti / Property	Precast	Energi / Energy	Jumlah / Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	9.483.889.771.605	317.858.966	--	802.605.653.433	--	10.286.813.284.004	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	8.521.381.395.812	--	--	656.535.423.263	--	9.177.916.819.076	Cost of Revenues
Laba Bruto	962.508.375.792	317.858.966	--	146.070.230.170	--	1.108.896.464.928	Gross Profit
Pendapatan Bersih Ventura Bersama Konstruksi	162.245.906.905	--	34.869.767.058	--	--	197.115.673.963	Net Revenue of Construction Joint Venture
Beban Usaha	--	--	--	--	--	(430.558.648.659)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	80.459.748.838	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	(16.529.817.117)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	939.383.421.954	Income Before Tax and Financial Charges
Beban keuangan	--	--	--	--	--	(183.596.366.642)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	--	--	--	--	--	(185.095.601)	Equity in Net Income of Associates
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	755.601.959.711	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	(254.389.167.647)	--	--	--	--	(254.389.167.647)	Net Income for the Year
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>						<b>501.212.792.063</b>	<b>Net Income in Current Year</b>

	2014						
	Konstruksi / Constructions	Sewa Gedung / Building Rentals	Properti / Property	Precast	Energi / Energy	Jumlah / Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Piutang Usaha	1.503.317.001.125	--	--	803.441.396.564	--	2.306.758.397.689	Accounts Receivable
Piutang Retensi	619.017.530.435	--	--	--	--	619.017.530.435	Retention Receivables
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	4.270.519.511.684	--	--	--	--	4.270.519.511.684	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	583.100.367.091	--	--	21.178.898.885	--	604.279.265.976	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	4.741.466.639.064	Unallocated Assets
<b>Jumlah Aset</b>						<b>12.542.041.344.848</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang Usaha	2.571.696.443.930	--	99.000.000	--	--	2.571.795.443.930	Accounts Payable
Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga	2.700.536.843.335	--	--	--	--	2.700.536.843.335	Gross Amount Due to Third Parties
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	4.420.879.178.967	Unallocated Liabilities
<b>Jumlah Kewajiban</b>						<b>9.693.211.466.232</b>	<b>Total Liabilities</b>

	2013						
	Konstruksi / Constructions	Sewa Gedung / Building Rentals	Properti / Property	Precast	Energi / Energy	Jumlah / Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan Usaha	9.559.122.605.712	260.428.000	--	127.227.268.152	--	9.686.610.301.864	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	8.660.500.964.997	--	--	115.413.000.000	--	8.775.913.964.997	Cost of Revenues
Laba Bruto	898.621.640.715	260.428.000	--	11.814.268.152	--	910.866.336.867	Gross Profit
Pendapatan Bersih Ventura Bersama Konstruksi	101.674.838.947	--	--	--	--	101.674.838.947	Net Revenue of Construction Joint Venture
Beban Usaha	--	--	--	--	--	(340.184.653.363)	Operating Expenses
Penghasilan Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	53.256.365.165	Other Revenues - Net
Beban Lain-lain - Bersih	--	--	--	--	--	(18.544.572.015)	Other Expenses - Net
Laba Sebelum Pajak dan Beban Keuangan	--	--	--	--	--	706.898.315.601	Income Before Tax and Financial Charges
Beban keuangan	--	--	--	--	--	(96.850.836.990)	Financial Charges
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	--	--	--	--	--	1.153.156.256	Equity in Net Income of Associates
Laba Sebelum Pajak	--	--	--	--	--	611.200.634.868	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan	(241.695.396.058)	(26.042.800)	--	(1.508.966.714)	--	(243.230.405.572)	Net Income for the Year
<b>Laba Bersih Tahun Berjalan</b>						<b>367.970.229.296</b>	<b>Net Income in Current Year</b>

	2013						
	Konstruksi / Constructions	Sewa Gedung / Building Rentals	Properti / Property	Precast	Energi / Energy	Jumlah / Total	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
<b>Aset</b>							<b>Assets</b>
Piutang Usaha	1.590.849.785.405	--	--	119.523.560.153	--	1.710.373.345.558	Accounts Receivable
Piutang Retensi	605.778.272.759	--	--	--	--	605.778.272.759	Retention Receivables
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	3.312.275.814.495	--	--	--	--	3.312.275.814.495	Gross Amount Due from Customers
Persediaan	282.712.949.856	--	--	9.513.704.462	--	292.226.654.318	Inventories
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	2.867.649.150.490	Unallocated Assets
<b>Jumlah Aset</b>						<b>8.788.303.237.620</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Utang Usaha	2.291.267.516.562	--	--	--	--	2.291.267.516.562	Accounts Payable
Utang Bruto Kepada Pihak Ketiga	1.794.739.896.979	--	--	--	--	1.794.739.896.979	Gross Amount Due to Third Parties
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	--	--	--	--	--	2.318.858.762.199	Unallocated Liabilities
<b>Jumlah Kewajiban</b>						<b>6.404.866.175.740</b>	<b>Total Liabilities</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)**

**46. SEGMENT INFORMATION (Continued)**

**b. Segmen Geografis**

**b. Geographic Segment**

Segmen sekunder Perusahaan dikelompokkan berdasarkan daerah geografis. Informasi segmen berdasarkan daerah geografis adalah sebagai berikut:

Secondary Segment of the Company classified by geographical area. Information segment based on geographical area were as follow:

	Rp	2014	Rp	2013	
<b>Aset</b>					<b>As:</b>
Konstruksi					Construction
Divisi Sipil - Jakarta		2,5598E+12		2,04655E+12	Civil Division - Jakarta
Divisi Gedung - Jakarta		2,96243E+12		2,36865E+12	Building Division - Jakarta
Divisi EPC - Jakarta		5,8338E+11		4,24487E+11	EPC Division - Jakarta
Divisi Regional I - Pekanbaru		1,05908E+12		9,73403E+11	Regional Division I - Pekanbaru
Divisi Regional II - Balikpapan		7,06354E+11		5,52251E+11	Regional Division II - Balikpapan
Divisi Regional III - Denpasar		6,5873E+11		2,00893E+11	Regional Division III - Denpasar
Divisi Regional IV - Makassar		5,14606E+11		3,95946E+11	Regional Division IV - Makassar
		9,04439E+12		6,96218E+12	
Properti					Property
Divisi Realty - Jakarta		5,08967E+11		94551233638	Realty Division - Jakarta
PT WKR		2,04608E+11		0	PT WKR
		7,13575E+11		94551233638	
Sewa Gedung					Building Rent
Kantor Pusat - Jakarta		3,50879E+12		2,4817E+12	Head Office - Jakarta
		3,50879E+12		2,4817E+12	
Precast					Precast
Divisi Precast - Jakarta		3,85368E+11		4,43359E+11	Precast Division - Jakarta
PT WBP		1,20261E+12		0	PT WBP
		1,58798E+12		4,43359E+11	
Energi					Energy
PT WSE		81053241722		29626481730	PT WSE
		81053241722		29626481730	
Jalan Tol					Toll Road
PT WTR		6,46024E+11		0	PT WTR
		6,46024E+11		0	
Jumlah Sebelum Eliminasi		1,55818E+13		1,00114E+13	Total Before Elimination
Eliminasi		-3,03976E+12		-1,22311E+12	Elimination
Jumlah Setelah Eliminasi		1,2542E+13		8,7883E+12	Tc
	Rp	2014	Rp	2013	
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>					<b>Li:</b>
Konstruksi					Construction
Divisi Sipil - Jakarta		2,5598E+12		2,04655E+12	Civil Division - Jakarta
Divisi Gedung - Jakarta		2,96243E+12		2,36865E+12	Building Division - Jakarta
Divisi EPC - Jakarta		5,8338E+11		4,24487E+11	EPC Division - Jakarta
Divisi Regional I - Pekanbaru		1,05908E+12		9,73403E+11	Regional Division I - Pekanbaru
Divisi Regional II - Balikpapan		7,06354E+11		5,52251E+11	Regional Division II - Balikpapan
Divisi Regional III - Denpasar		6,5873E+11		2,00893E+11	Regional Division III - Denpasar
Divisi Regional IV - Makassar		5,14606E+11		3,95946E+11	Regional Division IV - Makassar
		9,04439E+12		6,96218E+12	
Properti					Property
Divisi Realty - Jakarta		5,08967E+11		94551233638	Realty Division - Jakarta
PT WKR		2,04608E+11		0	PT WKR
		7,13575E+11		94551233638	
Sewa Gedung					Building Rent
Kantor Pusat - Jakarta		3,50879E+12		2,4817E+12	Head Office - Jakarta
		3,50879E+12		2,4817E+12	
Precast					Precast
Divisi Precast - Jakarta		3,85368E+11		4,43359E+11	Precast Division - Jakarta
PT WBP		1,20261E+12		0	PT WBP
		1,58798E+12		4,43359E+11	
Energi					Energy
PT WSE		81053241722		29626481730	PT WSE
		81053241722		29626481730	
Jalan Tol					Toll Road
PT WTR		6,46024E+11		0	PT WTR
		6,46024E+11		0	
Jumlah Sebelum Eliminasi		1,55818E+13		1,00114E+13	Total Before Elimination
Eliminasi		-3,03976E+12		-1,22311E+12	Elimination
Jumlah Setelah Eliminasi		1,2542E+13		8,7883E+12	Tc

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)**

**46. SEGMENT INFORMATION (Continued)**

**b. Segmen Geografis**

**b. Geographic Segment**

	2014	2013	
	Rp	Rp	Rt
Pendapatan Usaha			
Konstruksi			Construction
Divisi Sipil - Jakarta	3,26094E+12	3,31528E+12	Civil Division - Jakarta
Divisi Gedung - Jakarta	2,0333E+12	2,37286E+12	Building Division - Jakarta
Divisi EPC - Jakarta	6,15094E+11	4,44704E+11	EPC Division - Jakarta
Divisi Regional I - Pekanbaru	1,10053E+12	1,62977E+12	Regional Division I - Pekanbaru
Divisi Regional II - Balikpapan	8,39506E+11	8,6104E+11	Regional Division II - Balikpapan
Divisi Regional III - Denpasar	7,77204E+11	4,22676E+11	Regional Division III - Denpasar
Divisi Regional IV - Makassar	8,76798E+11	5,12792E+11	Regional Division IV - Makassar
	9,50337E+12	9,55912E+12	
Properti			Property
Divisi Realty - Jakarta	0	0	Realty Division - Jakarta
PT WKR	0	0	PT WKR
	0	0	
Sewa Gedung			Building Rent
Kantor Pusat - Jakarta	317858966	260728000	Head Office - Jakarta
	317858966	260728000	
Precast			Precast
Divisi Precast - Jakarta	3,82671E+11	3,94176E+11	Precast Division - Jakarta
PT WBP	6,41931E+11	0	PT WBP
	1,0246E+12	3,94176E+11	
Jumlah Sebelum Eliminasi	1,05283E+13	9,95356E+12	Total Before Elimination
Eliminasi	-2,41478E+11	-2,66949E+11	Elimination
Jumlah Setelah Eliminasi	1,02868E+13	9,68661E+12	Tt

**47. PERKARA HUKUM**

**47. LEGAL CASES**

1. Pada tahun 1999 Joint Venture SAE Waskita yang terdiri dari Sociate Euxilliare D'Enterprise International dan Perusahaan (Pemohon) menggugat PT Angkasa Interland (responden) dalam perkara klaim atas wasprestasi yang dilakukan oleh responden untuk proyek kondominium Puri Casablanca.

Perkara ini sudah dalam tahap Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA) yang pada putusan PK No. 229./PK/Pdt.2005 tanggal 23 Pebruari 2006 memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali PT Angkasa Interland.

2. PT Angkasa Interland kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Sehubungan Perkara I Casablanca telah diputus pada tingkat PK dengan nomor putusan No. 229 PK/Pdt/2005 dan Perkara II Casablanca juga telah diputus pada tingkat PK dengan nomor putusan No. 46 PK/Pdt/2010, maka untuk kedua perkara tersebut sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan, untuk itu telah ditunjuk Nengah Sujana & Rekan Law Firm (NSR) sebagai kuasa hukum guna mengajukan Permohonan Sita Eksekusi sebagaimana Surat Kuasa nomor: 33/SKU/WK/2011 tanggal 8 April 2011.

1. In 1999 Joint Venture SAE Waskita consist of Sociate Euxilliare D'entreprise International and the Company (Applicant) sued PT Angkasa Interland (Respondent) in the case of claim on failed that was performed by respondent on Condominium Puri Casablanca project.

This law suit has been filled an appeal for a review (PK) to the Supreme Court which in its Decision No. 229/PK/Pdt.2005 dated February 23, 2006 decided to dismiss the appeal of PT Angkasa Interland.

2. PT Angkasa Interland has filed a lawsuit to District Court thereafter filed an appeal to High Court.

In accordance Casablanca Case I has decided on the level of Judicial Review (PK) with decision No.229.PK/Pdt/2005 and Casablanca Case II also has been decided at the Judicial Review (PK) with the decision number 46 PK/Pdt/2010, then for the second case there is no other legal effort that can be done, for it has been appointed Nengah Sujana & Associates law Firm (NSR) as a lawyer to file an application for Confiscation Application Execution as the Power of Attorney Letter No. 33/SKU/WK/2011 dated April 8, 2011.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**47. PERKARA HUKUM (Lanjutan)**

2. PT Angkasa Interland (Lanjutan)  
Perusahaan telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui surat No 889/WK/DIR/2013 tanggal 4 Oktober 2013 untuk menanyakan status kepemilikan aset tanah dan bangunan Puri Casablanca, yang ditindaklanjuti pertemuan Perusahaan dengan DJKN. DJKN telah memberikan jawaban tertulis pada tanggal 20 Februari 2014 untuk meminta dokumen terkait untuk penelaahan lebih lanjut. Perusahaan pada tanggal 8 April 2014 telah memberikan dokumen terkait permintaan DJKN. Saat ini menunggu hasil penelaahan dari Tim DJKN.
  
3. Perkara No. 208/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 25 Juni 2012, antara PT Albok Boiler Industri sebagai Penggugat melawan Konsorsium PAL-Waskita sebagai tergugat dan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Jakarta sebagai Turut Tergugat I, serta PT Jasaraharja Putera Cabang Jakarta sebagai Turut Tergugat II, dengan isi gugatan Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pemutusan kontrak pekerjaan dengan Penggugat pada pekerjaan Proyek PLTU Malinau 2x3 MW.

Perkara ini telah diputus di tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Oktober 2012, dimana di dalam Putusannya Majelis Hakim menerima keberatan (Eksepsi) Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang secara mutlak (Absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 11 Oktober 2012.

Pada tanggal 26 Juli 2013, telah diterima putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta No 36/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 30 Mei 2013 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terhadap putusan banding tersebut, penggugat menyatakan kasasi dengan memberikan Memori Kasasi. Pada tanggal 24 Maret 2014, Mahkamah Agung (MA) RI bersurat ke PN Jakarta Timur menyampaikan bahwa adanya ketidaklengkapan berkas perkara kasasi. Sampai saat ini Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. LEGAL CASES (Continued)**

2. PT Angkasa Interland (Continued)  
*The Company has sent a letter to the Director General of State Assets through letter No 889/WK/DIR/2013 dated October 4, 2013 to inquire the status of ownership of land and building assets of Puri Casablanca, which followed with Company's meeting with DJKN. DJKN has given a written answer on February 20, 2014 to request the documents for further review. The Company on April 8, 2014 has provided relevant documents as DJKN's request. Currently awaiting for the results of Team DJKN's review.*
  
3. *Court in Case No: 208/Pdt.G/2012/PN.Jak.Tim dated June 25, 2012, between PT Albok Boiler Industry as a plaintiff againsts Consortium PAL-Waskita as defendant and PT Bank Pembangunan Daerah South of Sumatra and Bangka Belitung Jakarta Branch as Co-defendant I, as well as PT Jasaraharja Putera Jakarta Branch as Co-defendant II, with a lawsuit that Defendant has committed on unlawful act to terminate the employment contract with Plaintiff at the work Malinau 2x3 MW Power Plant Project.*

*This case was decided in the first instance by the East Jakarta District Court on October 2, 2012, which in its decisions the judges received objections (Exception) Defendant and stated that East Jakarta District Court was not authorized to be absolute to examine and judge that case. Against the decision, the Attorney of plaintiffs filed an appeal on October 11, 2012.*

*On July 26, 2013, has accepted the decision of the High Court (PT) Jakarta No. 36/Pdt/2013/PT.DKI dated May 30, 2013 which the verdict upheld verdict of East Jakarta District Court. Against the decision of the appeal, the plaintiff claimed an appeal by giving the memory of Cassation. On the date March 24, 2014, the Indonesia Supreme Court has been sent a letter to the East Jakarta District Court stated there is incomplete of cassation case files. Until now the Company is still waiting for the verdict of the Indonesia Supreme Court of Cassation.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. PERKARA HUKUM (Lanjutan)**

**47. LEGAL CASES (Continued)**

4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya persekongkolan horisontal dan vertikal pada Proyek Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara antara Panitia (Terlapor I), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Terlapor II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Terlapor III) dalam register KPPU No 04/KPPU-L/2012.

KPPU memutuskan untuk menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 3.168.820.000. Atas putusan tersebut Terlapor II mengajukan upaya hukum keberatan kepada PN Jakarta Timur. Pada waktu yang bersamaan Terlapor III melakukan upaya hukum yang sama pada PN Jakarta Timur. Oleh sebab itu, sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi ini, masih menunggu Fatwa Mahkamah Agung RI untuk penggabungan kedua perkara tersebut.

Pada tanggal 1 April 2014 telah dikeluarkan penetapan dari Mahkamah Agung No.01/Pen/Pdt.Sus/2014 (penetapan diterima Perusahaan pada tanggal 18 Nopember 2014) yang menyatakan bahwa MA RI telah menunjuk dan menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Adhi Karya (Persero) Tbk. Saat ini masih dalam proses di PN Jakarta Timur.

5. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemohon, melawan Subkontraktor PT Jaya Wahana Lestari (JWL) pada proyek Jalan Tol Semarang-Bawen seksi III sebagai Termohon dalam perkara No: 498/XII/ARB-BANI/2012. Pemohon menuntut pengembalian uang muka sebesar Rp 1.526.778.000.

BANI dalam amar putusannya memerintahkan Termohon untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp 742.544.300. Kemudian Termohon melakukan upaya pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Semarang. Pada tanggal 23 Januari 2014 Pengadilan Negeri mengeluarkan amar putusannya menolak seluruh permohonan termohon.

4. *The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) suspects a conspiracy and vertical horizontal on Building Project Care and Service Class I and VIP Hospital of South East Sulawesi between the Organizing Committee (Reported I), PT Waskita Karya (Persero) (Reported II), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (Reported III) in the register of KPPU No. 04/KPPU-L/2012.*

*KPPU decided to punish Reported II pay a penalty of Rp 3,168,820,000. Against the verdict Party II filed an objection to the East Jakarta District Court. At the same time Reported III do the same remedy in the East Jakarta District Court. Therefore, as of the date of this consolidated financial statement, still waiting decision from the Supreme Court of Republic of Indonesia for the merger of the two cases.*

*On April 1, 2014, it has been issued the decision from the Supreme Court No 01/Pen/Pdt.Sus/2014 (the decision has been accepted by the Company on November 18, 2014) containing that the Supreme Court of the Republic of Indonesia has appointed and determined the East Jakarta District Court to verify and decide the objection as filed by PT Waskita Karya (Persero) Tbk and PT Adhi Karya (Persero). Currently, this case is still in process at East Jakarta District Court*

5. *PT Waskita Karya (Persero) Tbk apply for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) as Petitioner, against Subcontractor of PT Jaya Wahana Lestari (JWL) on Semarang - Bawen Toll Road section III project as the Respondent in the case No: 498/XII/ARB -BANI/2012. The applicant demanded an advance refund of Rp 1,526,778,000.*

*BANI in its verdict ordered the Respondent to return the down payment of Rp 742,544,300. Then the Respondent made efforts to cancell the BANI's decision to Semarang District Court. On the date of January 23, 2014 the District Court issued its decision to refuse all the respondent's appeal.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**47. PERKARA HUKUM (Lanjutan)**

6. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (DPN AKSI) sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Tergugat I, Dinas PU Propinsi Riau sebagai Tergugat II dalam perkara No: 70/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 16 April 2013 atas proyek Jembatan Siak III yang mengalami kejanggalaan konstruksi dengan kondisi bergelombang pada baja penvanana.

Penggugat menuntut denda terhadap Tergugat I sebesar 5% dari nilai kontrak sebesar Rp 136.000.000.000. Pada tanggal 27 Pebruari 2014, Pengadilan Negeri mengeluarkan amar putusannya menolak seluruh permohonan penggugat.

7. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemohon melawan PT Asuransi Central Asia (ACA) dalam perkara No: 539/IX/ARB-BANI/2013 tanggal 13 September 2013 karena adanya klaim asuransi Pemohon sebesar Rp 26.954.646.368 yang belum dibayar oleh Termohon pada Proyek Pembangunan Waduk Jatigede.

Pada tanggal 14 Mei 2014, BANI mengeluarkan putusannya dengan menghukum termohon untuk membayar kepada pemohon sebesar Rp 13.000.000.000.

8. Pada saat PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyiapkan permohonan arbitrase ke ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), PT Indonesian Paradise Island (PT IPI) tanpa mengajukan somasi terlebih dahulu mengajukan permohonan arbitrase ke BANI sebagai pemohon melawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Termohon dalam perkara No. 545/X/ARB-BANI/2013 tanggal 17 Oktober 2013 karena pekerjaan Termohon pada Proyek Pembangunan Sahid Kuta Lifestyle Resort – Bali telah mengalami kegagalan konstruksi.

Pemohon menuntut Termohon sebesar Rp 115.481.793.594. Namun dalam perkara ini juga Termohon mengajukan gugatan balik dengan tuntutan sebesar Rp 65.416.029.648. Majelis Arbiter telah membacakan putusan BANI pada tanggal 23 Juni 2014, yang amar putusannya menghukum termohon untuk membayar kepada Pemohon sebesar Rp 1.909.453.540,50. Dalam Rekopensi, Majelis Arbiter memutuskan untuk menghukum Termohon Rekopensi untuk membayar kepada Pemohon rekopensi Termin bulan September 2013, Oktober 2013, November 2013, sebagian pembayaran progress 100% dan sebagian pekerjaan Tambah Kurang dengan total sebesar Rp 31.930.875.000 yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. LEGAL CASES (Continued)**

6. *The National Board of Construction Contractors Association of Indonesia (DPN AKSI) as the plaintiff filed a lawsuit against PT Waskita Karya (Persero) Tbk as Defendant I and the Department of Public Works of Riau province as Defendant II, in case No: 70/PDT.G/2013/PN.PBR date 16 April 2013 for the Siak Bridge III project that experienced the improper of construction with the bumpy steel buffer conditions.*

*The Plaintiff claim a penalty against Defendant I of 5% of the contract value of Rp 136,000,000,000. On the date of February 27, 2014, the District Court issued its decision to refuse all the plaintiff's appeal.*

7. *PT Waskita Karya (Persero) Tbk submit an appeal for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) as the applicant against PT Asuransi Central Asia (ACA) in case No: 539/IX/ARB-BANI/2013 dated September 13, 2013 due to an insurance claim Applicant amounting to Rp 26,954,646,368 which have not been paid by the Respondent on Jatigede Reservoir Development Project.*

*On the date May 14, 2014 BANI issued its decision to punish the Respondent to pay amounted to Rp 13,000,000,000 to the applicant.*

8. *At the time PT Waskita Karya (Persero) Tbk preparing an arbitration appeal to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI), PT Indonesian Paradise Island (PT IPI) without submission a subpoena, has been submitted an appeal for arbitration to BANI as the applicant against PT Waskita Karya (Persero) Tbk in case No. 545/X/ARB-BANI/2013 dated October 17, 2013 due to the work of Respondent on the Sahid Kuta Lifestyle Resort Development - Bali project has been experiencing a construction failure.*

*The Applicant claim to the Respondent amounted to Rp 115,481,793,594. But in this case also the Respondent filed the counterclaim with the claim of Rp 65,416,029,648. As of the date of this consolidated financial statements, the court proces is in the mediation phase among the parties which facilitated by the panel of arbitrators. The Panel of BANI Arbiter has read the verdict on June 23, 2014, whose ruling to punish the defendant to pay to Applicant amounted to Rp 1,909,453,540.50. In Rekopensi, Arbiter Assembly decided to punish the Respondent to pay the Rekopensi Applicant receivables in September 2013, October 2013, November 2013, and part payment of 100% progress and partly work Added Less with a total of Rp 31.930.875.000 that must be implemented by the parties in within 45 days after the verdict was read.*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. PERKARA HUKUM (Lanjutan)**

**47. LEGAL CASES (Continued)**

9. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemohon melawan PT Prolindo Cipta Nusantara dalam perkara No. 556/XII/ARB-BANI/2013 tanggal 20 Desember 2013 karena adanya tagihan progress pekerjaan yang tidak dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp 13.670.588.539 sudah termasuk tagihan progres pekerjaan, biaya mobilisasi dan demobilisasi, biaya idle kapal dan administrasi serta denda keterlambatan pembayaran.

9. *PT Waskita Karya (Persero) Tbk submit an appeal for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) as Applicant against PT Prolindo Cipta Nusantara in case No. 556/XII/ARB-BANI/2013 dated December 20, 2013 due to the invoice of progress of work is not paid by the Respondent amounted to Rp 13.670.588.539 has included the invoice of progress of work, the cost of mobilization and demobilization, idle ships expenses and administration costs and late payment penalties.*

Pada tanggal 20 Juni 2014, BANI mengeluarkan putusannya dengan menghukum termohon untuk membayar kepada pemohon nilai kekurangan pembayaran progress sebesar Rp 10.071.358.075 dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 1.150.000.000.000 yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan.

*On June 20, 2014, BANI issued its decision with punishing the defendant to pay to the applicant the value of remaining progress payment amounted to Rp 10.071.358.075 and delay work penalty of Rp 1.150.000.000.000 which shall be conducted by the parties within 45 (forty five) days as of this decision is declared.*

Pemohon telah mengirim beberapa somasi, somasi terakhir dikirim tanggal 7 Nopember 2014 dan saat ini dalam proses penyusunan perjanjian Pelaksanaan Putusan BANI.

*The applicant has sent several subpoena, the last on November 7, 2014. Currently the parties are in the process of composing the BANI Decision Execution Agreement.*

10. PT Jasuka Bangun Pratama dan PT Amarta Karya (Persero) (KSO) telah mengajukan gugatan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Paket Pembangunan Sistem Petanu dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN. Jak.Tim tanggal 12 Pebruari 2013.

10. *PT Jasuka Bangun Pratama and PT Amarta Karya (Persero) (JO) has filed a lawsuit against the Committing Officer (PPK) Patanu System Development Package Development and the Company at the East Jakarta District Court Case Registration Number: 09/Pdt.G/2012/PN. Jak.Tim dated February 12, 2013.*

PT Jasuka Bangun Pratama dan PT Amarta Karya (Persero) (KSO) sebagai Penggugat, PPK Pengembangan Paket Pembangunan Sistem Petanu sebagai Tergugat I dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Tergugat II, dengan isi gugatan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian serta telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat.

*PT Jasuka Bangun Pratama and PT Amarta Karya (Persero) (JO) as Plaintiff, PPK Patanu System Development Package as Defendant I and the Company as the second defendant, the lawsuit that the Defendant I and II have done Unlawful acts and violate the principles of fairness, accuracy and prudence, and has caused loss to the defendant.*

Penggugat dinyatakan tidak lulus Spesifikasi Teknis oleh tergugat I dengan alasan penggugat tidak lulus ambang batas total disebabkan metode pelaksanaan dan spek tek mendapat nilai kurang dari yang disyaratkan. Sehingga yang dimenangkan adalah Penawar terendah kedua, dalam hal ini adalah tergugat II.

*The Plaintiff didn't pass the Technical Specifications by Plaintiff Defendant I for the reason did not pass the threshold of the total due to the implementation of the method and spec tek scored less than required. So who won was the second lowest bidder, in this case is the second defendant.*

Tuntutan yang diajukan kepada Tergugat II adalah kerugian materiil sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah amar putusan dibacakan dan kerugian imateriil sebesar Rp 31.736.126.000 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah amar putusan dibacakan.

*Lawsuit filed to the defendant II is a material loss of Rp 10,000 (ten thousand Rupiah) to be paid in cash and at the same to the Plaintiff after the decisions was read and the non-material loss amounting to Rp 31,736,126,000 (thirty one billion seven hundred three twenty-six million one hundred twenty-six thousand dollars) to be paid in cash and at the same to the Plaintiff after the verdict was read.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**47. PERKARA HUKUM (Lanjutan)**

10. PT Jasuka Bangun Pratama dan PT Amarta Karya (Persero) (KSO) (Lanjutan)  
Pada tanggal 16 Desember 2013 PN mengeluarkan putusannya dengan amar putusan menolak seluruh gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan banding dan sampai saat ini masih dalam proses pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi.
11. PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemohon untuk diadakan arbitrase melawan PT Bank Riau Kepri sebagai termohon. Arbitrase ini diajukan berdasarkan pekerjaan Pemohon yang telah selesai 100% atas proyek Menara Dang Merdu (Catatan 9) sesuai dengan kontrak perjanjian pekerjaan No. 65/PKS/2010- No. 418/WK/KONT/WB/2010 tanggal 26 Juli 2010, dengan nilai kontrak setelah addendum Rp 222.715.898.000.

Sebelumnya telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun upaya mediasi tersebut mengalami kegagalan. Sesuai dengan klausul penyelesaian perkara yang tercantum dalam kontrak perjanjian, maka perkara ini diselesaikan melalui arbitrase di BANI.

Nilai tuntutan yang diajukan Perusahaan melalui arbitrase ini merupakan ganti rugi biaya operasional gedung dan beban bunga yang telah ditanggung oleh pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai Pekerjaan sebesar Rp 222.715.898.000.
- Ganti rugi, biaya dan bunga sebesar Rp 85.858.538.006.

Pada tanggal 6 Maret 2014, BANI mengeluarkan amar putusannya melalui keputusan No. 14.369/III/BANI/ED atas perkara permohonan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pemohon melawan PT Bank Riau Kepri sebagai termohon untuk proyek Menara Dang Merdu, dengan bunyi putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan arbitrase untuk sebagian.
- Menghukum dan/ atau memerintahkan termohon untuk sekaligus membayar kepada pemohon harga pekerjaan sebesar Rp 214.969.000.000 (dua ratus empat belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta Rupiah) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini dibacakan.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. LEGAL CASES (Continued)**

10. PT Jasuka Bangun Pratama and PT Amarta Karya (Persero) (JO) (Continued)  
On December 16, 2013, the District Court has issued its decision reject the entire claim of Plaintiff. The Plaintiff appealed and currently is still in process of handovering the files to the High Court.
11. PT Waskita Karya (Persero) Tbk has filed an arbitration appeal to the Indonesian National Arbitration Board (BANI) as an applicant to conduct the arbitration against PT Bank Riau Kepri as respondent. The arbitration is proposed based on the work of the applicant is completed 100% of Menara Dang Merdu Project (Note 9) according to the work agreement No. 65/PKS/2010- No. 418/WK/KONT/WB/2010 dated July 26, 2010 with the contract value after addendum amounted to Rp 222,715,898,000.

Previously has been attempted peace through mediation which facilitated by the State Attorney (JPN). But the mediation efforts have failed. The completion of the case in accordance with clause contained in the contract agreement, then the case is settled by arbitration in BANI.

The value of claims which filed by the Company through arbitration is the compensation of building operating costs and interest expense which has been incurred by the applicant, with the following details:

- The work value of Rp 222,715,898,000.
- The compensation, costs and interest amounted to Rp 85,858,538,006.

On the date of March 6, 2014, BANI issued its decision through decision No 14.369/III/BANI/ED on the application case of PT Waskita Karya (Persero) Tbk as the applicant against PT Bank Riau Kepri as the respondent for Menara Dang Merdu Project which the following decisions:

- Accept partially of arbitration application.
- Punish and/ or order the respondent to pay the entire payment to applicant the price of work amounted to Rp 214,969,000,000 within 30 (thirty) days since the verdict was read.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**47. PERKARA HUKUM (Lanjutan)**

12. PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Yasa Patria Perkasa tergabung dalam suatu kerjasama operasi dengan nama KSO Waskita-Yasa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Deli Serdang sebagai penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Medan Baru sebagai Tergugat dalam perkara No. 15/PDT.G/2014/PN.LP tanggal 25 Pebruari 2014 karena adanya biaya eskalasi, tambahan biaya pajak galian C, overhead dan ganti rugi kerugian immaterial dengan total sebesar Rp 168.147.023.440 ditambah bunga sebesar 2% per bulan sejak gugatan ini didaftarkan.

PN Lubuk Pakam telah mengeluarkan putusannya pada tanggal 23 Oktober 2014 yang amar putusannya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar Rp 97.383.218.000.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Saat ini tergugat telah mengajukan Banding dan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Desember 2014.

13. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Pemohon melawan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 6626656 Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) – Lembaga Administrasi Negara Samarinda sebagai Termohon dalam Perkara No. 590/V/ARB-BANI/2014 tanggal 23 Mei 2014 atas adanya klaim Penyesuaian Harga sebesar Rp 2.634.273.400 ditambah bunga sebesar Rp 750.767.919. Majelis Arbiter BANI telah dibentuk, sampai saat ini masih dalam proses persiapan penyampaian replik oleh Perusahaan.
14. PT Waskita Karya (Persero) Tbk, mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pemohon melawan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser, sebagai termohon dalam perkara No. 602/VII/ARB-BANI/2014 tanggal 17 Juli 2014 atas adanya klaim penyesuaian harga (eskalasi) sebesar Rp 14.629.114.327 pada proyek Pematangan Lahan dan Pembangunan Komplek Perkantoran – *Multi Years*.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. LEGAL CASES (Continued)**

12. *PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Yasa Patria Perkasa incorporated in a joint venture named JO Waskita-Yasa submitted a law suit to District Court of Lubuk Pakam in Deli Serdang as plaintiff againts the Government of Republic of Indonesia cq the Ministry of Transportation cq Direktorat General of Air Transportation cq the Officer of Committing of Business Unit of Medan Baru Airport as respondent in the case No 15/PDT.G/2014/PN.LP dated February 25, 2014 because of the escalation expenses, additional C excavation tax expenses, overhead and immaterial compensation with total of Rp 168,147,023,440 with interest amounted to 2% per month since this case was filed.*

*Lubuk Pakam District Court has been issued its decision on October 23, 2014, by its the decision as follows:*

- Accept partially of arbitration application.*
- Declare that the Defendant has made a default which caused losses to the Plaintiff.*
- Punish the Respondent to pay material compensation amounted to Rp 97,383,218.*
- Punish the Respondent to pay the case cost.*
- Refuse other Plaintiff's lawsuit and else.*

*Currently, the Respondent appealed and has submitted the summary of Appeals Statement Notification on December 9, 2014.*

13. *PT Waskita Karya (Persero) Tbk apply for arbitration to the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) as the Applicant against Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja 6626656 Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) – Lembaga Administrasi Negara Samarinda as Respondent in Case No. 590 / V / ARB-BANI / 2014 dated May 23, 2014 for the claim adjustment price of Rp 2.634.273.400 plus interest of USD 750 767 919. The Panel of Arbitrators BANI has been formed, currently is still in the process of preparation of the delivery by the Company's replic.*
14. *PT Waskita Karya (Persero) Tbk, apply for arbitration to Indonesian National Board of Arbitration (BANI) as the applicant against Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser, as the defendant in case No. 602 / VII / ARB-BANI / 2014 dated July 17, 2014 on the claim of price adjustment (escalation) of Rp 14.629.114.327 on maturation land project and Development Office Complex - Multi Years. Until now is still in the process of compliance and administration costs in BANI Arbiter and waiting for the formation of Arbiter Panel.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**47. PERKARA HUKUM (Lanjutan)**

14. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser (Lanjutan)  
Majelis Arbiter telah membacakan Putusan BANI pada tanggal 19 Desember 2014, yang amar putusannya mewajibkan Termohon untuk membayar Penyesuaian Harga (Eskalasi) kepada Pemohon sebesar Rp2.634.273.400 termasuk PPN 10 % yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan.
15. PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Sumatera Barat sebagai Penggugat melawan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Agam sebagai Tergugat atas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Sport Centre Bukit Bunian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan nilai pekerjaan Rp 33.595.000.000.

Pada tanggal 24 Juli 2014 gugatan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Perkara 16/PDT.G/2014/PN.LBB dengan nilai gugatan atas sisa pembayaran termin Rp 2.150.080.000. Telah diadakan sidang pada tanggal 17 Desember 2014 dengan agenda Pembuktian dengan Tambahan alat bukti Penggugat & Tegugat. Sidang akan dilanjutkan tanggal 7 Januari 2015

16. PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) berdasarkan Rapat di Kementerian BUMN dengan Pimpinan Rapat Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis pada tanggal 16 Juli 2014 bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan atas Kontrak Pekerjaan Pengurukan Lahan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) di Distrik Kabil Pulau Batam ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Saat ini permohonan Arbitrase telah didaftarkan ke BANI dengan No.perkara:627/XI/ARB-BANI/2014 tanggal 4 November 2014 dengan nilai gugatan sebesar Rp 36.646.444.340,55.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**47. LEGAL CASES (Continued)**

14. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser (Continued)  
The Panel of Arbitrators has read out the Decision of BANI on December 19, 2014, by its decision to order the Respondent to pay the adjustment price (escalation) to the applicant amounted to Rp 2,634,273,400 including the 10% VAT which shall be conducted by the parties within 45 (forty five) days since the decision is declared.
15. PT Waskita Karya (Persero) Tbk filed a lawsuit to Lubuk Basung District Court, West Sumatera as the Plaintiff against the Public Works Administration Office, Agam District as the Defendant upon the Development of Sport Centre Infrastructure Construction of Bukik Bunian Lubuk Basung, Agam District with the work value amounted to Rp 33,595,000,000.

On July 24, 2014, the Lawsuit has been registered to the Lubuk Basung District Court under Case No 16/PDT.G/2014/PN.LBB with the lawsuit value of the outstanding accounts receivables amounted to Rp 2,150,080,000. Cuurrently, the court has been conducted on December 17, 2014, with the agenda to prove the additional evidence of the Plaintiff and Defendant. The court will be continued on next January 7, 2015.

16. PT. Waskita Karya (Persero) Tbk and PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) pursuant to the Meeting at the Ministry of State-Owned Enterprise lead by the Deputy of Agrobusiness and Strategic Industry Division on July 16, 2014 agreed to settle dispute the Landfilling Works Contract of PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) in Kabil District, Batam Island, to to Indonesian National Arbitration Agency (BANI). Currently the Arbitration request has been registered at BANI under the case number: 627/XI/ARB-BANI/2014 dated November 4, 2014 with the total lawsuit value of Rp 36,646,444,340.55.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**48. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Berikut ini adalah entitas berelasi dengan Pemerintah yang merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah:

**48. NATURE AND TRANSACTION RELATED PARTIES**

The following is a Government entity to relate to an entity controlled, controlled with, or significant influence by Government:

<u>Pihak-pihak Berelasi / Related Parties</u>	<u>Transaksi</u>	<u>Transactions</u>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Bank Exim Indonesia	Kas dan Setara Kas, Utang Bank	Cash and cash equivalent, Bank Loan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank	Cash and cash equivalent, Bank Loan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank	Cash and cash equivalent, Bank Loan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas, Utang Bank	Cash and cash equivalent, Bank Loan
PT Bank Syariah Mandiri (Persero)	Kas dan Setara Kas	Cash and cash equivalent
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Kas dan Setara Kas	Cash and cash equivalent
PT Bukit Asam (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Dok Kodja Bahari (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Jasa Marga Bali Tol	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Lece (Persero)	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Revenues
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Utang Muka Jangka Panjang, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Long term Advance, Revenues
PT Semen Padang (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Trans Marga Jateng	Piutang Usaha, Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Utang Muka Jangka Panjang, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Long term Advance, Revenues
PT Translingkar Kita Jaya	Piutang Retensi, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Retention Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Transmarga Jatim Pasuruan	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Rekayasa Industri (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Utang Muka Jangka Panjang, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Long term Advance, Revenues
PT Angkasa Pura I (Persero)	Piutang Usaha, Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Account Receivable, Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Tagihan Bruto, Utang Muka Jangka Panjang, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Long term Advance, Revenues
PT Krakatau Bandar Samudera (KBS)	Tagihan Bruto, Utang Muka Jangka Panjang, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Long term Advance, Revenues
PT Pertamedika Sentul	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Pertamina (Persero)	Tagihan Bruto, Pendapatan Usaha	Gross Amount due to from Customer, Revenues
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo, Piutang lain-lain	Held to Maturity Financial Assets, Other Receivable
PT Istaka Karya (Persero)	Piutang Lain-lain	Other Receivable

Rincian Item yang terkait dengan Transaksi Pihak-pihak yang Berelasi:

Detail of items associated with the Related Parties Transaction:

<u>Aset</u>	<u>2014 Rp</u>	<u>2013 Rp</u>	<u>2014 Rp</u>	<u>2013 Rp</u>	<u>Asset</u>
Kas dan Setara kas	783.487.707.884	819.477.784.830	6,25%	9,80%	Cash and cash equivalent
Piutang Usaha	832.159.176.754	901.253.562.349	6,63%	10,77%	Account Receivable
Piutang Retensi	221.781.483.775	169.351.405.807	1,77%	2,02%	Retention Receivable
Piutang Lain-lain	12.299.258.510	2.821.916.547	0,10%	0,03%	Others Receivable
Tagihan Bruto	1.525.225.402.563	1.098.989.672.974	12,16%	13,14%	Gross Amount due to from Customer
Aset Ventura Bersama	129.725.775.791	86.522.119.653	1,03%	1,03%	Joint Ventures Assets

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset.

Above percentage is a comparison with total assets.

<u>Liabilitas</u>	<u>2014 Rp</u>	<u>2013 Rp</u>	<u>2014 Rp</u>	<u>2013 Rp</u>	<u>Liabilities</u>
Utang Bank	1.442.610.372.843	822.776.203.700	11,50%	9,83%	Bank Loan
Utang Muka Kontrak Jangka Panjang	50.267.698.667	93.378.356.335	0,40%	1,12%	Long Term Advance

Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset.

Above percentage is a comparison with total assets.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**48. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI  
(Lanjutan)**

	2014 Rp	2013 Rp	2014 Rp	2013 Rp	
Pendapatan Usaha	2.801.322.841.092	1.549.215.925.449	27,23%	81,86%	Revenue
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total aset.					<i>Above percentage is a comparison with total assets.</i>
	2014 Rp	2013 Rp	2014 %	2013 %	
Remunerasi Direksi	17.934.714.286	14.941.585.714	10,70%	10,57%	<i>Remuneration of Board of Directors</i>
Remunerasi Komisaris	7.193.160.714	5.304.714.286	4,29%	3,75%	<i>Remuneration of Board of Commissioners</i>
Persentase diatas merupakan perbandingan dengan total beban pegawai.					<i>Above percentage is a comparison with total personnel expenses.</i>

**48. NATURE AND TRANSACTION RELATED PARTIES  
(Continued)**

**49. PERIKATAN DAN PERJANJIAN**

**Kontrak Konstruksi**

Perusahaan telah mengikat kontrak konstruksi dengan berbagai pihak. Kontrak ini mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu kontrak. Perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak, diantaranya sebagai berikut:

**49. COMMITMENT AND AGREEMENTS**

**Construction Contract**

*The Company has entered into several construction contracts with various parties. This contract is binding of both parties to fulfill their obligations within the contract period. The Company has a commitment to carry out construction works with contract values, including the following:*

No	Nama Proyek / Project Name	Nomor Kontak / Contract Number	Nilai Kontrak / Contract Value	Pemberi Kerja / Owner	Jangka Waktu / Period Mulai / Start	Selesai / Finish	Remarks
1	Coal Fired Steam Turbine Power Project 2 x 30 MW (unit 1 & 2) Amurang, Minahasa	03/MDT/EPC/AMURANG 2 x 30 MW/ 2013	Rp 551.096.490.000	PT Megah Daya Tangguh	26 Agst 2013	26 Agst 2014	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
2	Woodland Residence	030/PWS- SPK/MAINCON/IX/2012	Rp 391.465.000.000	PT Pardika Wisthi Sarana	12-Sep-12	11-Sep-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
3	Pekerjaan Kaili Pesanggrahan Paket 1	HK.02.03/PPKSP-SNVT PJSACC/X/1888	Rp 342.038.156.000	SNVT Pelaksanaan Jaringan	27-Oct-11	12-Aug-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
4	Pembangunan Jalan Habema - Mugi (MYC)	KU.08.08/PJN- WIL.IV/PPK-19/145	Rp 288.166.732.000	Direktorat Jendral Binamarga	2-Oct-12	30-Nov-14	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
5	Pelabuhan Laut Sangata	552.3/239/Hubkominfo.0 3	Rp 271.999.903.000	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	8-Dec-11	12-Apr-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
6	Graving Dock Pengembangan Dermaga Noahtu Bandar Lampung	1129/SPERJ/DRU- WK/VI/2013	Rp 243.448.984.057	PT Daya Radar Utama	25 Juni 2013	4 Juli 2015	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
7	Pembangunan Jembatan Kapuknaga Indah Pantai Indah Kapuk - DKI Jakarta	130108 DO	Rp 238.181.818.181	PT Mandara Permai	9-Jan-13	29-Jan-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
8	Pekerjaan Struktur Arsitektur, Plumbing & STP The Gianetti @ Casa Goya Park Residence	1032/WK/Dir/2013	Rp 212.727.272.727	PT Bangun Investa Graha	22 Nop 2013	7 Maret 2015	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
9	Rehabilitasi Tambak Garam Indramayu	HK.02.03/AI-3/12/01- 07/2012	Rp 184.558.675.000	SNVT PJPA Cimanuk Cisanggarung	28-Aug-12	15-Dec-14	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
10	Pelebaran Jln. Bulu-Tuban	KU.03.01/4136/498631.2 3/2012	Rp 178.624.341.000	Pemerintah Republik Indonesia cq. Dirjen Bina	1-Oct-12	28-Feb-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due
11	Jalan Dalam Kota Soffi	602.604/PA-TJ/02	Rp 162.457.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Propinsi Maluku Utara	18-Nov-12	8-Nov-14	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
12	Pembangunan Jembatan Padamaran II Kec Bangko Rohil	602.1/KONT/BM&AIR/01/ 2013	Rp 133.276.808.182	Bina Marga & Pengairan Rohil	15-May-13	21-Dec-14	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
13	Jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama	600/138-SP/BM- 2013/PUD	Rp 129.782.684.504	DPU Kab Kotawaringin	25 Nop 2013	28 May 2015	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
14	Renovasi Gedung Kantor Pelaksana Tanjung Priok PT Pelindo II (Persero)	HK.566/9/13/PI.11-13 & HK.556/C.TPK-13	Rp 118.702.955.756	PT Pelindo II (Persero)	13 Juni 2013	13 Juni 2014	Sudah Jatuh Tempo / Past Due

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**49. PERIKATAN DAN PERJANJIAN (Lanjutan)**

**49. COMMITMENT AND AGREEMENTS (Continued)**

**Kontrak Konstruksi (Lanjutan)**

**Construction Contract (Continued)**

No	Nama Proyek / Project Name	Nomor Kontak / Contract Number	Nilai Kontrak / Contract Value	Pemberi Kerja / Owner	Mulai / Start	Selesai / Finish	Remarks
15	Pembangunan Gedung Kantor LKPP Jakarta	04.2-2/PPK.IV/07/2013	Rp 111.758.953.742	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	15 Juli 2013	10 Nop 2014	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
16	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kawasan Pesisir Utara (Coastal Area) Kecamatan Tebing	02/SP/COASTAL-THP II/IBM - MY/DPU/2013	Rp 107.882.848.679	DPU Karimun	Jangka Waktu / Period 8 Feb 2013	2 Agst 2014	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
17	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kawasan Pesisir Utara (Coastal Area) Kecamatan Tebing	02/SP/COASTAL-THP II/IBM-MY/DPU/2013	Rp 107.882.848.679	DPU Karimun	8-Feb-13	2-Aug-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
18	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang Tahap 2 - Tangerang	09/PPL/Bang/DTK/2013	Rp 106.880.000.000	Dinas Tata Kota	13-Jan-13	29-Jul-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
19	Pembangunan Bendung Aklamo	KU.08.08/IR/PJPA-MU/08/2013	Rp 102.700.378.182	SNVT P.JPA Maluku	29 Nop 2013	18 Nop 2015	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
20	AD Primier Jakarta Paket Pek Struktur dan Arsitektur	492/WK/Dir/2013	Rp 91.902.496.364	PT Puriampera Intipratama	1-May-13	1-Jul-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
21	Pek Pemb Prasarana & Sarana OR Kab Buton Utara	503/06/KTRK-SOR/PUBUTURV/2013	Rp 85.342.261.818	DPU Kab Buton Utara	15-May-13	8-Jul-14	Sudah Jatuh Tempo / Due Date
22	Pekerjaan Tower 9 CIBIS 9 Development	BS-CIBIS/119/IX/14	Rp 193.000.000.000	PT Bhummyamca	18-Sep-14	18-Nov-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
23	Pembangunan Menara Proteksi Indonesia	002/SPKP2MPI/IX/2014	Rp 118.300.000.000	PT P3MPI	30-Sep-14	30-Sep-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
24	Pekerjaan Konstruksi dan Struktur Atas Bangunan Sipil Paket CC-1 Proyek Indarung VI	929/WK/DIR/2014	Rp 153.900.000.000	PT Semen Padang	10-Feb-14	4-Feb-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
25	Pekerjaan Rancang Bangun Pembangunan Hotel Grand Inna Putri Bali	956/WK/DIR/2014	Rp 122.484.545.455	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	14-May-14	31-Oct-14	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
26	Pekerjaan Design & Build Regitha Setiabudi Apartemen Bandung	08/SPK.ACM-WK/10-14	Rp 220.000.904.216	PT Adi Cipta Mediatama	27-Oct-14	27-10-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
27	Tanjung Selor - Tanjung Palas ; Tanjung Palas - Sekatak (Section 1)	01-34/RCP/LOAN/PJN.III/11.14	Rp 172.700.225.455	Dirjen Bina Marga	11-Mar-14	11-Feb-16	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
28	Proposed Development Improvement/Rehabilitation and Maintenance of Oecusse Roads & Bridges using Design and Build, and Performance Based Maintenance Scheme for Package I		501.870.718.080	Pemerintah The Democratic of Timor Leste	25-Nov-14	15-Sep-16	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
29	Paket Pekerjaan Pengembangan Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	643/J.4.1/PPK VIII/IX/2014	Rp 390.694.545.455	Perpustakaan Nasional RI	26-Nov-14	3-Sep-16	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
30	Pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang	HK.02.03/SNVT-PJSA-NTT.II/PKSDA-I/223/XI/2014	Rp 646.009.581.818	Kemen PU-Dirjen SDA	4-Dec-14	11-Feb-19	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
31	Proyek Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi I	01/KJP/PPTR/2014	Rp 1.123.112.137.232	PT Pejagan Pemalang Tol Road	25-Aug-14	24-Aug-16	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
32	Proyek Jalan Tol Pejagan - Pemalang Seksi II	02/KJP/PPTR/2014	Rp 556.224.846.484	PT Pejagan Pemalang Tol Road	25-Aug-14	24-Aug-16	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
33	Pembangunan Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1 : Sta. 1+011 - Sta. 11 + 501	01/SPP-KKDM/XI/2014	Rp 1.167.705.617.273	PT Kresma Kusuma Dyandra Marga	28-Nov-14	28-Nov-17	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
34	Package 13 Sp. Rukis - Tanjung Kemuning Bengkulu	01-26/13/CE/A/8043/1214	Rp 266.090.909.091	PU-Dirjen Bina Marga	18-Dec-14	28-Apr-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
35	Paket Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat Ruas Karawang-Cikampek-Pemanukan	HK.02.02/PMTD.KCP/PJ N-KCP/IV/14/82.3	Rp 8.837.853.636	DPU Dirjen Bina Marga	15-Apr-14	15-Aug-14	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
36	Pembangunan Jalan layang Kapt. Tendean-Blok M-Cileduk, Paket Adam Malik	45382-1.792	Rp 230.277.800.000	DPU Prop. DKI	15-Dec-14	15-Dec-16	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
37	Paket I (satu) Peningkatan Jalan Simpang Langgam - Langgam (Sta 19+000) s/d (Sta 26+644) dan Jalan Ponton RAPP - Jalan Langgam (Multi Years) Kab. Pelalawan	1089/WK/DIR/2014	Rp 69.300.696.727	DPU Bina Marga - Pemkab Pelalawan	3-Dec-14	3-Dec-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
38	Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Sisi Darat di Kabupaten Penajam Paser Utara (Multi Years)	027/788/DISHUBUDPA R/XII/2014	# Rp 264.486.363.636	DISHUBUDPAR Kab. Penajam	17-Dec-14	1-Dec-17	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
39	Upgrading Of Existing Suai Airport	1045.2/WK/Dir/2013	USD 67.671.189.95	Pemerintah The Democratic of Timor Leste	27-Nov-14	27-Nov-16	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet
40	Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Kenyamukan - Sangatta (Multi Years)	552.3872/Hubkominfo.03	# Rp 43.511.106.364	Dishubkominfo Kab. Kutai Timur	22-Dec-14	17-Dec-15	Belum Jatuh Tempo / Not Due Yet

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**50. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Dalam pengelolaan keuangan, Perusahaan telah melakukan analisa risiko terhadap persaingan dan ketidakpastian yang dapat berpengaruh pada aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut:

**a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Perbedaan nilai wajar dengan nilai tercatat pada 31 Desember 2014 dan 2013 tidak signifikan.

	2014 Rp	2013 Rp
<b>Aset Keuangan - Pinjaman yang Diberikan dan Piutang</b>		
Kas dan Setara Kas	1.675.283.272.031	1.119.694.010.726
Piutang Usaha dan Retensi	2.925.775.928.124	2.316.151.618.317
Piutang Lain-lain	22.389.139.868	25.932.212.387
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	3.893.675.455.784	3.312.275.814.495
Aset Keuangan - yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	175.000.000.000	175.000.000.000
Aset yang Tidak Dapat Dialokasikan	3.849.917.549.041	1.839.249.581.695
<b>Jumlah Aset</b>	<b>12.542.041.344.848</b>	<b>8.788.303.237.620</b>
<b>Liabilitas Keuangan - Biaya yang Diamortisasi</b>		
Utang Usaha	2.571.795.443.930	2.291.267.516.562
Utang Bruto Subkontraktor Pihak Ketiga		
	2.700.536.843.335	1.794.739.896.979
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasikan	4.420.879.178.967	2.318.858.762.199
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>9.693.211.466.232</b>	<b>6.404.866.175.740</b>

**b. Kebijakan Manajemen Risiko**

Bisnis Perusahaan mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.

Perusahaan mendefinisikan risiko keuangan sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perusahaan.

Tujuan Perusahaan dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian serta meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko perubahan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi dan sosial politik. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia dan internasional.

**50. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT**

*In financial management, the Company has conducted risk analysis on competition and uncertainties that could affect the financial assets and financial liabilities as follows:*

**a. Classification of Financial Assets and Liabilities**

*The difference between the fair value and the carrying value at December 31, 2014 and 2013 was not significant.*

2014 Rp	2013 Rp
	<b>Financial Assets- Loan and Receivables</b>
	Cash and Equivalents
	Trade Receivable and Retention
	Other Receivables
	Gross Amount Due from Customers
	Held-to-Maturity Financial Assets
	Unallocated Assets
	<b>Total Assets</b>
	<b>Financial Liabilities- Unamortized Cost</b>
	Accounts Payables
	Gross Amount Due to Third Parties
	Subcontractor
	Unallocated Liabilities
	<b>Total Liabilities</b>

**b. Risk Management Policy**

*The Company's business includes risk-taking activities with specific objectives with professional management. The main function of the Company's risk management is to identify all key risks, measure these risks and manage risk positions. The Company regularly reviews policies and risk management system to adjust to changes in markets, products and best market practices.*

*The Company defines financial risk as the possibility of loss or lost profit, caused by factors both internal and external factors that potentially negative impact on achievement of Company goals.*

*The purpose of the Company in managing financial risks is to achieve an appropriate balance between risk and returns and minimize potential adverse effects of the Company's financial performance.*

*The main financial risks facing the company is credit risk, interest rate risk, liquidity risk, foreign currency exchange rates and the risk of changes in government policy, socio-economic and political conditions. Attention to risk management has increased significantly with the changes and consider the financial market volatility in Indonesia and internationally.*



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**50. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

**50. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT**

**b. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)**

**b. Risk Management Policy**

**(i) Risiko Kredit**

**(i) Credit Risk**

Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari pelanggan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

*Credit risk is the loss arising from customers who fail to meet their contractual obligations.*

Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang retensi dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. Rincian umur piutang usaha dapat dilihat pada Catatan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian.

*The Company's financial instruments that have the potential for credit risk consist of cash and cash equivalents, accounts receivable, retention and other receivables. Total maximum credit risk exposure equal to the carrying value of these accounts. The aging of trade receivables can be seen on notes to Consolidated Financial Statements.*

Pada tanggal 31 Desember 2014 piutang usaha Perusahaan tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

*On December 31, 2014 accounts receivable of the Company is not concentrated on a particular customer.*

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank dan institusi keuangan, yaitu hanya bank-bank dan institusi keuangan ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

*The Company manages credit risk by setting limits the amount of acceptable risk for each customer and be more selective in the choice of banks and financial institutions, that is, only banks and financial institutions are predicated famous and well chosen.*

Tabel Risiko Kredit

Credit Risk Tables

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan eksposur maksimum risiko kredit yang tercemin dari nilai tercatat masing-masing kategori yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

*The following table analyze financial assets based on the maximum exposure to credit risk represented by carrying amount of each class presented in the consolidated statements of financial position.*

	2014			
	Belum Jatuh Tempo/Not Due Rp	Sudah Jatuh Tempo/Due Date Rp	Jumlah/ Total Rp	
Piutang Usaha	1.852.911.763.614	453.846.634.075	2.306.758.397.689	Accounts Receivable
Piutang Retensi	505.621.795.040	113.395.735.395	619.017.530.435	Retention Receivables
	<b>2.358.533.558.654</b>	<b>567.242.369.470</b>	<b>2.925.775.928.124</b>	
	2013			
	Belum Jatuh Tempo/Not Due Rp	Sudah Jatuh Tempo/Due Date Rp	Jumlah/ Total Rp	
Laporan Posisi Keuangan	1.330.260.070.443	380.113.275.115	1.710.373.345.558	Statement of Financial Position
Aset Lancar	558.002.418.178	47.775.854.581	605.778.272.759	Current Assets
	<b>1.888.262.488.621</b>	<b>427.889.129.696</b>	<b>2.316.151.618.317</b>	

50. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

(ii) Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan memiliki pinjaman jangka pendek dengan bunga mengambang. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi dan terjadi secara tiba-tiba dapat berpengaruh terhadap menurunnya laba Perusahaan.

Berikut ini merupakan rincian dari liabilitas keuangan berdasarkan jenis tingkat suku bunga:

	2014 Rp	2013 Rp	
Liabilitas Keuangan			<i>Financial Liabilities</i>
Suku bunga mengambang	1.917.129.494.292	874.807.780.977	<i>Floating Interest Rate</i>

Dampak dari pergerakan suku bunga di pasar tidak signifikan. Perusahaan mengelola risiko suku bunga dan melalui pengawasan terhadap dampak pergerakan suku bunga untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap Perusahaan. Perusahaan akan mengawasi secara ketat pergerakan suku bunga dipasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan para lender.

(iii) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perusahaan diharapkan dapat membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Dalam memenuhi liabilitas tersebut, maka Perusahaan harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.

Berikut ini merupakan liabilitas keuangan non-derivatif berdasarkan nilai sisa jatuh tempo yang tidak didiskonto:

50. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

b. Risk Management Policy (Continued)

(ii) Interest Rate Risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument fluctuate due to changes in market interest rates. The Company has short-term loans with floating interest. The interest rate which is quite high and occurs in sudden decrease in income can affect the Company.

The following is a breakdown of financial liabilities based on the type of interest rate:

The impact of interest rate movements in the market is not significant. The Company manages interest rate risk and through monitoring of the impact of interest rate movements to minimize the negative impact on the Company. The Company will closely monitor interest rate movements in the market and when interest rates increased significantly, and then the Company will negotiate the interest rates with the lenders.

(iii) Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk in which the positions of cash flows show short-term revenues are not sufficient to cover short term expenses.

Liquidity risk is an exposure of the Company difficulties in meeting financial obligations that must be paid with cash or other financial assets. The company is expected to pay all its obligations in accordance with contractual maturities. In fulfilling this obligation, then the Company must generate sufficient cash inflows.

These are non-derivative financial liabilities based on residual maturity value which was not discounted:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**50. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)**

**50. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)**

**b. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)**

**b. Risk Management Policy (Continued)**

**(iii) Risiko Likuiditas (Lanjutan)**

**(iii) Liquidity Risk (Continued)**

	2014							
	Jatuh Tempo/ Due Date				Total	Biaya Emisi/ Issuance Costs	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
	< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years				
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Usaha	2.571.795.443.930	--	--	--	2.571.795.443.930	--	2.571.795.443.930	Accounts Payable
Pinjaman Bank Jangka Pendek	1.917.129.494.292	--	--	--	1.917.129.494.292	--	1.917.129.494.292	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	46.349.033.616	--	--	--	46.349.033.616	--	46.349.033.616	Other Short Term Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>4.535.273.971.838</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4.535.273.971.838</b>	<b>--</b>	<b>4.535.273.971.838</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>
	2013							
	Jatuh Tempo/ Due Date				Total	Biaya Emisi	Nilai Tercatat/ Carrying Amount	
	< 1 Tahun/ < 1 Year	>1-2 Tahun/ >1-2 Years	>2-3 Tahun/ >2-3 Years	>3 Tahun/ >3 Years				
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Utang Usaha	2.291.267.516.562	--	--	--	2.291.267.516.562	--	2.291.267.516.562	Accounts Payable
Pinjaman Bank Jangka Pendek	874.807.780.977	--	--	--	874.807.780.977	--	874.807.780.977	Short Term Bank Loan
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	44.517.408.520	--	--	--	44.517.408.520	--	44.517.408.520	Other Short Term Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>3.210.592.706.060</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.210.592.706.060</b>	<b>--</b>	<b>3.210.592.706.060</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan Liabilitas keuangan.

The Company manages liquidity risk by maintaining cash and cash equivalents sufficient to meet the commitments of the Company for normal operation and regularly evaluates cash flow projections and actual cash flows, and the schedule date of maturity of assets and financial liabilities.

**(iv) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing**

**(iv) Foreign Exchange Risk Foreign Currency**

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing merupakan bagian dari kegiatan operasi normal Perusahaan dan cabang Luar Negeri.

Risk exposure of foreign currency exchange rate is part of normal operations of the Company and the branches of Foreign Affairs.

Dengan demikian pengaruh dari selisih nilai tukar mata uang asing tidak signifikan.

Thus the effect of foreign exchange currency differences is not significant.

**(v) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik**

**(v) Risk of Changes in Government Policy, Economic and Social Politics**

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Perusahaan.

Government policies concerning economic and monetary, and social and political conditions that are less conducive to result in decreased investment and development. This can lead to delays in projects that have been or will be acquired by the Company.

50. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

(v) Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah,  
Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik (Lanjutan)

Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistemik dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variable yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perusahaan menurun risiko ini bahkan diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

**Manajemen Permodalan**

Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari.

Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: utang neto dibagi modal yang disesuaikan. Utang neto merupakan total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas.

Ditahun 2014, strategi Perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada batas bawah dari kisaran 3,58, sedangkan tahun 2013 pada batas bawah 6,53 sampai dengan 6,79. Rasio utang terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

	2014 Rp	2013 Rp
Total Liabilitas	9.693.211.466.232	6.404.866.175.740
Dikurang: Kas dan Setara Kas	1.675.283.272.031	1.119.694.010.726
Liabilitas Bersih	8.017.928.194.201	5.285.172.165.014
Total Ekuitas	2.848.829.878.616	2.007.075.228.694
Rasio Utang terhadap Modal	2,81	2,63

50. FINANCIAL RISKS MANAGEMENT (Continued)

b. Risk Management Policy (Continued)

(v) Risk of Changes in Government Policy,  
Economic and Social Politics (Continued)

This risk is systemic risk whereby if this happens then the risk will negatively affect all the variables involved, thus make the performance of the Company decrease. The risk diversification is not even able to eliminate this risk.

**Capital Management**

The purpose of the Company in managing capital is to protect the ability of the entity in maintaining business continuity, so that entities can still deliver results for shareholders and benefits for other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by pricing products and services that are commensurate with the level of risk.

The Company set a number of capital in proportion to the risk. The Company manage sits capital structure and makes adjustments taking into account changes in economic conditions and risk characteristics of the underlying asset.

Consistent with other companies in the industry, the Company monitors capital on the basis of the ratio of debt to adjusted capital. This ratio is calculated as follows: net debt divided by adjusted capital. Net debt is total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and cash equivalents.

During the year 2014, the Company's strategy is to maintain the ratio of debt to adjusted capital at the lower limit with the range of 3.58, meanwhile for the 2013 year at lower limit of the range of 6.53 to 6.79. Debt ratio to capital at December 31, 2014 and 2013 are as follows:

Total Liabilities
Deduct: Cash and Cash Equivalents
Net Liabilities
Total Equity
Net Payables to Equity Ratio

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**51. KOMITMEN**

1. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan Hak Membeli Kembali atas Saham-saham PT Pejagan Pemalang Tol Road (PT PPTR) No 84 tanggal 27 Juni 2014 oleh Notaris Jose Dima Satria, notaris di Jakarta, disebutkan bahwa PT Global Selaras Dunia dan PT Rekatunggal Abadi masing-masing pemilik 1 lembar saham PT PPTR atau 0,01% dan 633.576 lembar atau 99,99% menjual dan mengalihkan saham-saham yang dimiliki kepada PT Waskita Toll Road dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01% dari kepemilikan saham pada PT PPTR sebesar nilai yang disepakati bersama.

PT Global Selaras Dunia dan PT Rekatunggal Abadi memiliki hak membeli kembali atas saham-saham tersebut selama jangka waktu beli yaitu sejak ditandatangani perjanjian jual beli bersyarat ini sampai dengan ulang tahun ketiga akta pengambilalihan saham.

2. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat Dengan Hak Untuk Membeli Kembali Atas Saham – Saham PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (PT KKDM) No. 24 tanggal 17 Oktober 2014 oleh Notaris Jose Dima Satria, Notaris di Jakarta, disebutkan bahwa PT Waskita Toll Road memiliki 447.188.659 lembar saham atau 60% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Tirtobumi Prakarsatama memiliki 111.600.309 lembar saham atau sebesar 14,97% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Citra Mandiri Sukses Sejati memiliki 89.437.732 lembar saham atau sebesar 12 % dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Indadi Utama memiliki 44.718.866 lembar saham atau sebesar 6% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM. PT Remaja Bangun Kencana memiliki 44.718.866 lembar saham atau sebesar 6% dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 7.650.000 lembar saham atau sebesar 1,03 % dari seluruh saham yang dikeluarkan PT KKDM.

PT Tirtobumi Prakarsatama, PT Citra Mandiri Sukses Sejati, PT Indadi Utama, dan PT Remaja Bangun Kencana memiliki hak membeli kembali atas saham-saham tersebut selama jangka waktu beli yaitu sejak ditandatangani perjanjian jual beli bersyarat ini sampai dengan ulang tahun ketiga akta pengambilalihan saham.

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**51. COMMITMENTS**

1. *Based on Conditional Sale and Purchase Agreement with the Right to Buy Back on shares of PT Pejagan Pemalang Toll Road (PT PPTR) No 84 dated June 27, 2014 by Jose Dima Satria Notary, Notary in Jakarta, stated that PT Global Selaras Dunia and PT Rekatunggal Abadi which the owner of one share of PT PPTR or 0.01% and 633,576 shares or 99.99% sell and transfer its shares to PT Waskita Toll Road and PT Waskita Karya (Persero) Tbk amounted to 99.99% and 0.01% of the shares on PT PPTR with the agreed value.*

*PT Global Selaras Dunia dan PT Rekatunggal Abadi has the right to buy back the shares during that purchase period since signing the conditional purchase agreement until the third anniversary of the acquisition of shares agreement.*

2. *Based on Conditional Sale and Purchase Agreement with the Right to Buy Back on shares of PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (PT KKDM) No 24 dated October 17, 2014 by Jose Dima Satria Notary, Notary in Jakarta, stated that PT Waskita Toll Road which owner of 447.188.659 shares stock or 60% of all stocks has been issued by PT KKDM. PT Tirtobumi Prakarsatama which owner of 111.600.309 shares stock or 14.97% of all stocks has been issued by PT KKDM. PT Citra Mandiri Sukses Sejati which owner of 89.437.732 shares stock or 12 % of all stocks has been issued by PT KKDM. PT Indadi Utama which owner of 44.718.866 shares stock or 6% of all stocks has been issued by PT KKDM. PT Remaja Bangun Kencana which owner of 44.718.866 shares stock or 6% of all stocks has been issued by PT KKDM and PT Jasa Marga (Persero) Tbk which owner of 7.650.000 shares stock or 1.03 % of all stocks has been issued by PT KKDM.*

*PT Tirtobumi Prakarsatama, PT Citra Mandiri Sukses Sejati, PT Indadi Utama, dan PT Remaja Bangun Kencana has the right to buy back the shares during that purchase period since signing the conditional purchase agreement until the third anniversary of the acquisition of shares agreement.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**52. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN**

1. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Waskita Sangir Energi No.13 oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2015 terdapat peningkatan modal dasar semula Rp 30.000.000.000 menjadi Rp 167.056.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan semula Rp 30.000.000.000 menjadi Rp 41.764.000.000 dengan mengeluarkan 11.764 lembar saham baru atau sebesar Rp 11.764.000.000 dimana Perusahaan memiliki 10.000 lembar saham atau senilai Rp 10.000.000.000 dan PT Shalawat Power sebesar 1.764 lembar saham atau senilai Rp 1.764.000.000, sehingga Perusahaan memiliki 35.500 atau sebesar 85 % kepemilikan di PT Waskita Sangir Energi dan PT Sholawat Power sejumlah 6.264 lembar atau sebesar 15 % kepemilikan di PT Waskita Sangir Energi.
2. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS Perseroan Terbatas PT Waskita Karya Realty No.6 oleh Notaris Fathiah Helmi di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015, terdapat peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar 820.000 lembar saham atau senilai Rp 820.000.000.000. Serta peningkatan modal disetor menjadi sebesar 205.000 lembar saham atau senilai Rp 205.000.000.000. Peningkatan modal tersebut terbagi dua yaitu sebesar Rp 25.000.000.000 merupakan setoran lama sedangkan Rp 180.000.000.000 merupakan setoran tunai. Maka Perusahaan memiliki 204.999 lembar saham atau senilai Rp 204.999.000.000 dan Koperasi Waskita memiliki 1 lembar saham atau Rp 1.000.000.
3. Berdasarkan keputusan BANI tanggal 29 Januari 2015 tentang putusan perkara hukum No 602 antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai Pemohon melawan Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser sebagai Termohon memutuskan Dinas Cipta Karya wajib membayar Rp 12.434.747.178 kepada Pemohon atau 85% dari tuntutan yang diajukan. Selanjutnya Termohon wajib mengembalikan setengah biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp 237.321.500 kepada Pemohon.
4. Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 3 Februari 2015 dari Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, terdapat perubahan anggaran dasar mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan sebesar 61.164.105 lembar, dari 9.666.340.100 lembar menjadi 9.727.504.205 lembar atau setara dengan Rp. 972.750.420.500 sebagai akibat dari pelaksanaan program Opsi Saham (Mesop). Perubahan tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH 01.03-0007316, tanggal 4 Februari 2015.
5. Terdapat perpanjangan perjanjian pinjaman antara Perusahaan dengan PT Indonesia Exim Bank berdasarkan surat persetujuan perpanjangan fasilitas No. PBD/SP3/18/2015 tanggal 18 Maret 2015 dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2016.

**52. SUBSEQUENT EVENTS**

1. *Based on the Statement of Changes in Shareholders' Articles of Association of PT Waskita Sangir Energi No 13 by Notary Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notary in Jakarta on January 19, 2015, there was increasing of authorized capital from Rp 30,000,000,000 to Rp 167,056,000,000 and increasing of the Company's issued and paid in capital from Rp 30,000,000,000 to Rp 41,764,000,000 by issuing 11,764 new shares or Rp 11,764,000,000 which the Company has 10,000 stock shares or Rp 10,000,000,000 and PT Shalawat Power amounted to 1,764 stock shares or Rp 1,764,000,000, so that the Company has 35,500 stock shares or 85% ownership and PT Sholawat Power has 6,264 stock shares or 15% ownership in PT Waskita Sangir Energi.*
2. *Based on Circular Substitutes General Meeting Statement of PT Waskita Karya Realty No 6 by Fathiah Helmi Notary in Jakarta on January 12, 2015, there is an increase in the authorized capital of the Company was increased to 820,000 shares or Rp 820,000,000,000. As well as an increase of paid in capital amounted to 205,000 shares or Rp 205,000,000,000. The capital increase is divided into two, Rp 25,000,000,000 represent the existing capital while Rp 180,000,000,000 is new paid in capital. The Company has 204,999 shares or Rp 204,999,000,000 and the Koperasi Waskita has 1 shares or Rp 1,000,000.*
3. *Based on BANI decision dated January 29, 2015 concerning to the decision of the legal case No. 602 between PT Waskita Karya (Persero) Tbk as the applicant against Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser as Respondent decided that Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Perumahan Kabupaten Paser shall pay Rp 12,434,747,178 to the Applicant or 85% of the claims proposed. Furthermore, the Respondent shall pay a half of the administration costs, inspection costs and the cost of the arbitrator amounted to Rp 237,321,500 to the Applicant.*
4. *Based on the Deeds No 2 dated February 3, 2015 of Fathiah Helmi, Sh, Notary in Jakarta, there are amendments regarding to the changes of increasing the Company's issued and paid up capital amounted to 61,164,105 shares, from 9,666,340,100 shares become 9,727,504,205 shares or equivalent with Rp. 972,750,420,500 as impact of implementation of stock option program (Mesop). This change has been approved by Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH 01.03-0007316, dated February 4, 2015*
5. *There is an extension of the loan agreement between the Company and PT Indonesia Exim Bank is based on the extension of the facility approval letter No. PBD/SP3/18/2015 dated March 18, 2015 and will mature on March 27, 2016.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**52. KEJADIAN SETELAH PERIODE PELAPORAN (Lanjutan)**

**52. SUBSEQUENT EVENTS (Continued)**

6. Perusahaan memberikan persetujuan untuk perpanjangan *Promissory Notes* kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan surat pada tanggal 30 April 2015, dengan rincian sebagai berikut:

6. *The Company has given the approval for extending the Promissory Notes of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) based on letter dated April 30, 2015, with the following details:*

No.	No. Surat Utang/ No. Promissory Notes	Nominal/ Amount Rp	Tgl Jatuh Tempo/ Due Date	Bunga/ Rate
1.	--	25.000.000.000	Sudah Lunas/Paid	--
2.	SU-02/PPA/0415	25.000.000.000	31 Juli 2015	9% p.a.
3.	SU-03/PPA/0415	25.000.000.000	31 Oktober 2015	9% p.a.
4.	SU-04/PPA/0415	25.000.000.000	31 Januari 2016	9% p.a.
5.	SU-05/PPA/0415	25.000.000.000	31 April 2016	9% p.a.
6.	SU-06/PPA/0415	25.000.000.000	31 Juli 2016	9% p.a.
7.	SU-07/PPA/0415	25.000.000.000	31 Oktober 2016	9% p.a.
<b>Jumlah/Total</b>		<b>175.000.000.000</b>		

**53. STANDAR AKUNTANSI BARU**

**53. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

Beberapa interpretasi baru berikut ini berlaku sejak 1 Januari 2014 terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan namun kurang relevan atau tidak berdampak material terhadap Perusahaan:

- ISAK No. 27 : Pengalihan Aset dari pelanggan

*The following new Interpretation is effective on January 1, 2014 to the Company's consolidated financial statements but is not relevant or has not have material impact to the Company:*

- *ISAK No. 27 : Transfer of Assets from Customers*

Intepretasi baru standar baru berikut ini berlaku sejak 1 Januari 2014 terhadap laporan keuangan konsolidasian Perusahaan namun tidak berdampak material terhadap Perusahaan:

- ISAK No. 28 : Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas

*The following new Interpretation is effective on 1 January 2014 to the Company's consolidated financial statements and is relevant but has not have material impact to the Company:*

- *ISAK No. 28 : Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments*

Disamping itu, pada bulan Desember 2013, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa standar akuntansi baru dan revisian yang akan berlaku efektif pada tahun buku yang dimulai 1 Januari 2015. Penerapan dini atas standar-standar tersebut tidak di perkenankan. Standar-standar tersebut adalah sebagai berikut:

- PSAK 65 "Laporan keuangan konsolidasian"
- PSAK 66 "Pengaturan bersama"
- PSAK 67 "Pengungkapan kepentingan dalam entitas"
- PSAK 68 "Pengukuran nilai wajar"
- PSAK 1 (revisi 2013) "Penyajian laporan keuangan"
- PSAK 4 (revisi 2013) "Laporan keuangan tersendiri"
- PSAK 15 (revisi 2013) "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama"
- PSAK 24 (revisi 2013) "Irnbalan kerja"

*In addition, in December 2013, the Accounting Standards Board of The Indonesian Institute of Accountants issued a number of new and revised accounting standards that will become effective for the annual period beginning of January 1, 2015. Early adoption of these standards is not permitted. The new standards are:*

- *PSAK 65 "Consolidated financial statements"*
- *PSAK 66 "Joint arrangements"*
- *PSAK 67 "Disclosure of interests in other entities"*
- *PSAK 68 "Fair value measurement"*
- *PSAK 1 (revised 2013) "Presentation of financial statements"*
- *PSAK 4 (revised 2013) "Separate financial statements"*
- *PSAK 15 (revised 2013) "investment in associates and joint ventures"*
- *PSAK 24 (revised 2013) "Employee benefits"*

Hingga tanggal pengesahan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari intepretasi standar serta PSAK baru dan revisian tersebut.

*As at the authorisation date of this consolidated of financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these interpretations and new revised PSAK.*

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013  
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
For The Years Ended  
December 31, 2014 and 2013  
(Expressed in Full of Rupiah, unless otherwise stated)**

**54. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Berikut ini adalah rincian akun-akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 sebelum dan sesudah disajikan kembali:

	2014			
	Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Disajikan Kembali/ After Restatement	
	Rp	Rp	Rp	
Laporan Posisi Keuangan				<b>Statement of Financial Position</b>
Aset Lancar				Current Assets
Piutang lain-lain	64.732.934.926	(42.343.795.058)	22.389.139.868	Other Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	4.270.519.511.684	(376.844.055.900)	3.893.675.455.784	Gross Amount Due From the Customers
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Piutang lain-lain	-	42.343.795.058	42.343.795.058	Other Receivable
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	-	376.844.055.900	376.844.055.900	Gross Amount Due From the Customers
Liabilitas Jangka Pendek				Current Liabilities
Beban Akruai	98.727.643.520	(50.934.633.037)	47.793.010.483	Accrued Expenses
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	46.349.033.617	50.934.633.037	97.283.666.654	Other Current Liabilities

	2013			
	Sebelum Disajikan Kembali/ Before Restatement	Penyesuaian/ Adjustment	Sesudah Disajikan Kembali/ After Restatement	
	Rp	Rp	Rp	
Laporan Posisi Keuangan				<b>Statement of Financial Position</b>
Aset Lancar				Current Assets
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	3.312.275.814.495	(83.080.345.904)	3.229.195.468.591	Gross Amount Due From the Customers
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	-	83.080.345.904	83.080.345.904	Gross Amount Due From the Customers

**55. PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013**

Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dengan tambahan pengungkapan sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan Konsolidasian, yaitu tagihan bruto kepada pengguna jasa jangka panjang, piutang lain-lain jangka panjang, beban akrual, dan liabilitas jangka pendek lainnya.
- Catatan atas laporan keuangan Konsolidasian, yaitu tambahan pengungkapan pada Catatan 2c, 6, 7a, 7b, 9a, 9b, 10d, 14, 17, 23, 24, 29, 40, 46, dan 50.b.(i).

**56. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas isi dan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 25 Mei 2015.

**54. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS**

The Company has restated its financial statements for the year ended December 31, 2014. Following are details of the accounts in the financial statements for the year ended December 31, 2014 before and after the restatement:

**55. RESTATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014 AND 2013**

For Right Issue, the Company has restated the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2014 and 2013, with additional disclosures as follows:

- The Consolidated Statements of financial position, such as other receivables, gross amount due from the customers, accrued expenses, and other short term liabilities.
- Notes to the Consolidated financial statements, the additional disclosure in Note 2c, 6, 7a, 7b, 9a, 9b, 10d, 14, 17, 23, 24, 29, 40, 46, and 50.b.(i).

**56. RESPONSIBILITY AND AUTHORITY TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS ISSUANCE**

Management of the Company is responsible for contents and the preparation of these consolidated financial statements and authorized for issuing on May 25, 2015.



**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**INFORMASI TAMBAHAN**  
**LAMPIRAN 1 : LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**ENTITAS INDUK**

**Per 31 Desember 2014 dan 2013**

**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**ADDITIONAL INFORMATION**  
**APPENDIX 1 : STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**PARENT ENTITY**

**As of December 31, 2014 and 2013**

**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2014 Rp	2013 Rp	1 Jan 2013/ 31 Des 2012/ Jan 1, 2013/ Dec 31, 2012*) Rp	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan Setara Kas	1.120.112.969.530	1.112.619.831.191	2.183.783.098.228	Cash and Cash Equivalents
Investasi Jangka Pendek	24.276.133.745	24.276.133.745	24.276.133.745	Short-Term Investments
Piutang Usaha				Accounts Receivable
Pihak-pihak Berelasi				Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 7.748.255.674, Rp 7.748.255.674 dan Rp. 3.859.427.446)</i>	858.643.752.188	901.253.562.349	857.072.216.150	<i>(Net of allowance for impairment losses as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 7.748.255.674, Rp 7.748.255.674 and Rp. 3.859.427.446, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga				Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 20.718.167.026, Rp 21.018.167.026 dan Rp. 20.767.000.159)</i>	834.126.756.208	809.119.783.209	607.197.604.777	<i>(Net of allowance for impairment losses as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 20.718.167.026, Rp 21.018.167.026 and Rp. 20.767.000.159, respectively)</i>
Piutang Retensi				Retention Receivables
Pihak-pihak Berelasi				Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 633.868.682, Rp 582.732.318 dan Rp. 488.244.169)</i>	223.309.434.918	169.351.405.807	145.666.855.182	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 633.868.682 and Rp 582.732.318 and Rp. 488.244.169, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga				Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 24.853.072.166, Rp 10.979.157.852 dan Rp. 12.092.752.307)</i>	397.236.046.660	436.426.866.952	329.722.130.433	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 24.853.072.166, Rp 10.979.157.852 and Rp. 12.092.752.307, respectively)</i>
Piutang Lain Lain Jangka Pendek				Other Receivables Short Term
Pihak-pihak Berelasi				Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil)</i>	241.893.722.135	2.821.916.547	30.032.355.937	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga	10.089.881.358	23.377.390.413	2.305.658.489	Third Parties
Persediaan				Inventories
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil, Rp 378.727.364 dan Rp. 2.802.733.157)</i>	583.100.367.091	292.226.654.318	412.538.363.464	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, Rp 378.727.364 and Rp. 2.802.733.157, respectively)</i>
<i>Gross Amount Due from Customers Short Term</i>				<i>Gross Amount Due from Customers Short Term</i>
Pihak-pihak Berelasi				Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil)</i>	1.435.635.216.563	1.105.870.711.736	879.342.546.622	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga				Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp Nihil)</i>	2.469.381.566.896	2.145.743.116.214	1.801.623.891.700	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp Nil, respectively)</i>
Pajak Dibayar di Muka	518.847.542.632	497.282.915.550	276.032.203.979	Prepaid Taxes
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	218.498.353.120	193.499.948.659	161.919.595.591	Advances and Prepayments
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	175.000.000.000	--	--	Held-to-Maturity Financial Assets
Jumlah Aset Lancar	<u>9.110.151.743.044</u>	<u>7.713.870.236.690</u>	<u>7.711.512.654.297</u>	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	--	175.000.000.000	175.000.000.000	Held-to-Maturity Financial Assets
Penyertaan	1.258.069.473.502	6.375.000.000	--	Investment in Equity
Investasi Pada Entitas Asosiasi	--	8.391.719.217	7825767785	Investment in Associates
Piutang Lain Lain Jangka Panjang				Other Receivables Long Term
Pihak-pihak Berelasi				Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 75.144.307.748, Rp 75.144.307.748 dan Rp. 47.552.388.629)</i>	42.343.795.058	--	--	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 75.144.307.748, Rp 75.144.307.748 and Rp. 47.552.388.629, respectively)</i>
<i>Gross Amount Due from Customers Long Term</i>				<i>Gross Amount Due from Customers Long Term</i>
Pihak-pihak Berelasi				Related Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 5.058.797.015, Rp 5.058.797.015, dan Rp 4.128.279.970.)</i>	83.094.821.996	15.537.320.597	--	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 5,058,797,015, Rp 5,058,797,015 and Rp 4,128,279,970, respectively)</i>
Pihak-pihak Ketiga				Third Parties
<i>(Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 72.323.935.184, Rp 18.711.661.837 dan sebesar Rp 11.606.458.192)</i>	293.749.233.904	67.543.025.307	78.202.138.897	<i>(Net of allowance for impairment losses as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 72,323,935,184, Rp 18,711,661,837 and Rp 11,606,458,192, respectively)</i>
<i>Joint Ventures Assets</i>				<i>Joint Ventures Assets</i>
Pihak-pihak Berelasi	129.725.775.791	86.522.119.653	42.958.282.193	Related Parties
Pihak-pihak Ketiga	597.918.829.942	247.749.169.378	73.525.361.652	Third Parties
Properti Investasi		15.107.359.107	--	Investment in Property
Investasi Jangka Panjang Lainnya	88.100.000.000	37.500.000.000	18.250.000.000	Other Long-Term Investments
Aset Tetap				Fixed Assets
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per per 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp 249.545.814.672, Rp 212.345.234.374 dan Rp. 160.672.476.972)</i>	312.014.933.785	392.961.456.801	239.933.622.514	<i>(Net of accumulated depreciation as of as of December 31, 2014, 2013 and 2012 amounting to Rp 249,545,814,672, Rp 212,345,234,375 and Rp. 160.672.476.972 respectively)</i>
Aset Lain-lain	72.684.370.617	21.179.803.071	19.036.260.700	Other Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>2.877.701.234.594</u>	<u>1.073.866.973.130</u>	<u>654.731.433.741</u>	Total Non Current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<u><b>11.987.852.977.639</b></u>	<u><b>8.787.737.209.820</b></u>	<u><b>8.366.244.088.038</b></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**INFORMASI TAMBAHAN**  
**LAMPIRAN 1 : LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**ENTITAS INDUK**  
**Per 31 Desember 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**ADDITIONAL INFORMATION**  
**APPENDIX 1 : STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**  
**PARENT ENTITY**  
**As of December 31, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2014	2013	1 Jan 2013/ 31 Des 2012/ Jan 1, 2013/ Dec 31, 2012*)	
	Rp	Rp	Rp	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang Bank Jangka Pendek				Short-Term Bank Loans
Pihak-pihak Berelasi	1.442.610.372.843	775.057.780.977	822.776.203.700	Related Parties
Pihak-Pihak Ketiga	474.519.121.449	99.750.000.000	349.077.277.915	Third Parties
Utang Usaha				Accounts Payable
Pihak - pihak Berelasi	40.890.647.671	65.118.372.950	41.708.785.424	Related Parties
Pihak - pihak Ketiga	2.343.992.182.653	2.226.133.485.261	1.961.106.631.985	Third Parties
Utang Bruto Subkontraktor Pihak ketiga	2.415.621.548.786	1.794.739.896.979	1.564.997.856.733	Gross Amount Due to Third Party Subcontractors
Beban Masih harus Dibayar	27.225.264.226	22.704.139.600	27.993.453.168	Accrued Expenses
Utang Pajak dan Liabilitas Pajak Kini	123.092.814.871	97.220.007.796	95.086.201.879	Taxes Payable
Uang Muka Kontrak Jangka Pendek	289.435.745.772	301.858.934.306	405.128.300.805	Advances on Short-Term Contract
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	97.168.499.754	44.517.408.521	23.951.446.633	Other Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>7.254.556.198.025</u>	<u>5.427.100.026.390</u>	<u>5.291.826.158.242</u>	Total Current Liabilities
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON CURRENT LIABILITIES</b>
Uang Muka Kontrak Jangka Panjang				Advances on Long-Term Contract
Pihak-pihak Berelasi	63.253.278.241	53.651.216.655	93.378.356.335	Related Parties
Pihak-Pihak Ketiga	665.481.479.077	176.030.912.945	226.510.505.054	Third Parties
Utang Obligasi - Bersih	1.245.656.603.967	748.044.637.281	747.453.839.713	Bonds Payable- Net
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>1.974.391.361.285</u>	<u>977.726.766.881</u>	<u>1.067.342.701.102</u>	Total Non Current Liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<u>9.228.947.559.310</u>	<u>6.404.826.793.271</u>	<u>6.359.168.859.344</u>	<b>Total Liabilities</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Modal Saham				Share Capital
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 100 dan Rp 1.000.000 masing-masing pada 31 Desember 2014 dan 2013				Capital Stock - Rp 100 and Rp 1.000.000 par Value per Share for December 31, 2014 and 2013, respectively
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 25.999.999.999 Saham Seri B pada 31 Desember 2013 dan 2014				Authorized Capital - 1 share of Dwi Warna Serie A and 25,999,999,999 shares of Serie B for December 31, 2014 and 2013
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1 Saham Seri A Dwi Warna dan 9.727.504.265 Saham Seri B pada 31 Desember 2014 dan 9.632.325.999 Saham Seri B pada 31 Desember 2013	972.750.420.500	963.223.600.000	963.223.600.000	Subscribed and Fully Paid Capital - 1 share of Dwi Warna Serie A and 9,727,504,265 shares of Serie B in December 31, 2014 and 9,632,325,999 shares of Serie B in December 31, 2013)
Tambahan Modal Disetor	936.500.037.155	831.137.834.545	831.137.834.545	Additional Paid-in Capital
Opsi Saham	43.362.737.418	28.929.895.523	-	Stock Option
Saldo Laba				Retained Earnings
Telah Ditentukan Penggunaannya	268.432.270.328	194.820.273.829	192.279.960.913	Appropriated
Belum Ditentukan Penggunaannya	545.815.663.780	368.599.342.760	22.893.575.038	Unappropriated
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(7.955.710.852)	(3.800.530.108)	(2.459.741.802)	Other Comprehensive Income
Jumlah Ekuitas	<u>2.758.905.418.329</u>	<u>2.382.910.416.549</u>	<u>2.007.075.228.694</u>	Total Equity
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u>11.987.852.977.639</u>	<u>8.787.737.209.820</u>	<u>8.366.244.088.038</u>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**INFORMASI TAMBAHAN**  
**LAMPIRAN 2 :**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF**  
**ENTITAS INDUK**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada**  
**31 Desember 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**ADDITIONAL INFORMATION**  
**APPENDIX 2 :**  
**STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME**  
**PARENT ENTITY**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2014 Rp	2013 Rp	
Pendapatan Usaha	9.763.660.013.361	9.686.610.301.864	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(8.801.568.635.077)	(8.775.913.964.997)	Cost of Revenues
<b>Laba Bruto</b>	<b>962.091.378.284</b>	<b>910.696.336.867</b>	<b>Gross Profit</b>
Pendapatan Bersih Ventura Bersama	197.115.673.963	101.674.838.947	Net Revenue of Joint Ventures
<b>Laba Bruto Setelah Ventura Bersama</b>	<b>1.159.207.052.247</b>	<b>1.012.371.175.814</b>	<b>Gross Profit After Joint Ventures</b>
Beban Penjualan	(25.261.286.596)	(23.894.204.238)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	(396.220.334.948)	(315.589.757.099)	General and Administrative Expenses
Pendapatan Bunga	39.926.275.017	27.046.177.397	Interest Income
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - Bersih	(3.314.041.800)	20.507.937.030	Gain (Loss) on Foreign Exchange - Net
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	--	231.278.047	Gain on Sale of Fixed Assets
Pendapatan Lain-Lain	35.422.925.558	5.362.489.105	Other Income
Beban Lain-lain	(12.921.102.954)	(18.538.425.783)	Other Expenses
<b>Laba Sebelum Pajak dan Beban Pinjaman</b>	<b>796.839.486.524</b>	<b>707.496.670.273</b>	<b>Income Before Tax and Finance Costs</b>
Beban Pinjaman	(183.596.366.642)	(96.850.836.990)	Finance Costs
Bagian Laba Bersih Entitas Asosiasi	-	1.153.156.256	Equity in Net Income of Associates
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>613.243.119.882</b>	<b>611.798.989.539</b>	<b>Income Before Tax</b>
Beban Pajak Penghasilan	(251.996.807.613)	(243.230.405.572)	Income Tax Expenses
<b>Laba Bersih Periode Berjalan</b>	<b>361.246.312.268</b>	<b>368.568.583.967</b>	<b>Net Income for the Period</b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lain</b>			<b>Other Comprehensive Income</b>
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	(4.155.180.744)	(138.879.482)	Exchange Difference From Financial Statements Translation
<b>Laba Komprehensif Periode Berjalan</b>	<b>357.091.131.524</b>	<b>368.429.704.485</b>	<b>Total Comprehensive Income for the Period</b>
<b>LABA USAHA PER SAHAM DASAR</b>	<b>83</b>	<b>92</b>	<b>INCOME BEFORE TAX PER SHARE</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>EARNINGS PER SHARE</b>

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 INFORMASI TAMBAHAN  
 LAMPIRAN 3 : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 ENTITAS INDUK  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
 31 Desember 2014 dan 2013  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk  
 ADDITIONAL INFORMATION  
 APPENDIX 3 : STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
 PARENT ENTITY  
 For the Years Ended  
 December 31, 2014 and 2013  
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo Laba / Retained Earnings		Saldo Laba / Retained Earnings		Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing/ Exchange Difference From Financial Statements Translation	Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated				
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2012</b>	<b>963.223.600.000</b>	<b>831.137.834.545</b>	<b>--</b>	<b>192.279.960.913</b>	<b>22.893.575.038</b>	<b>(2.459.741.802)</b>	<b>2.007.075.228.694</b>	<b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2012</b>
Cadangan Umum	--	--	--	2.540.312.916	(2.540.312.916)	--	--	General Reserves
Dividen Tunai	--	--	--	--	(20.322.503.329)	--	(20.322.503.329)	Dividend
Penawaran Umum Saham	--	--	--	--	--	--	--	Public Offering
Biaya Emisi Saham	--	--	--	--	--	--	--	Stock Issuance Cost
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	--	368.588.583.967	--	368.588.583.967	Net Income For The Year
Kepentingan Non Pengendali	--	--	--	--	--	--	--	Non Controlling Interest
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	--	--	--	--	--	(1.340.788.306)	(1.340.788.306)	Exchange Difference From Financial Stock Option
Opsi Saham	--	--	28.929.895.523	--	--	--	28.929.895.523	
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2013</b>	<b>963.223.600.000</b>	<b>831.137.834.545</b>	<b>28.929.895.523</b>	<b>194.820.273.829</b>	<b>368.599.342.760</b>	<b>(3.800.530.108)</b>	<b>2.382.910.416.549</b>	<b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2013</b>
Dividen	--	--	--	--	--	(110.417.994.749)	(110.417.994.749)	Dividend
Cadangan Umum	--	--	--	73.611.996.499	(73.611.996.499)	--	--	General Reserves
Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan dalam Valuta Asing	--	--	--	--	--	(4.155.180.744)	(4.155.180.744)	Exchange Difference From Financial Statements Translation
Selatan Modal Saham dari Mesop	9.526.820.500	49.651.537.771	--	--	--	--	59.178.358.271	Additional Paid in Capital Mesop
Inbreng Aset Tetap	--	55.710.684.839	--	--	--	--	55.710.684.839	Fixed Assets Paid in Capital
Opsi Saham	--	--	14.432.841.895	--	--	--	14.432.841.895	Stock Option
Laba Bersih Tahun Berjalan	--	--	--	--	361.246.312.288	--	361.246.312.288	Net Income For The Year
<b>SALDO PER 31 DESEMBER 2014</b>	<b>972.750.420.500</b>	<b>936.500.037.155</b>	<b>43.362.737.418</b>	<b>268.432.270.328</b>	<b>545.815.663.780</b>	<b>(7.355.710.882)</b>	<b>2.758.905.418.329</b>	<b>BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2014</b>

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**INFORMASI TAMBAHAN**  
**LAMPIRAN 4 :**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**ENTITAS INDUK**  
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada**  
**31 Desember 2014 dan 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk**  
**ADDITIONAL INFORMATION**  
**APPENDIX 4 :**  
**STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**PARENT ENTITY**  
**For the Years Ended**  
**December 31, 2014 and 2013**  
**(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	2014 Rp	2013 Rp	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari Pelanggan	8.947.607.545.833	8.504.761.394.399	Receipt from Customers
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(8.388.162.741.079)	(8.292.235.424.584)	Payment to Suppliers and Third Parties
Pembayaran Kepada Karyawan	(241.929.660.063)	(208.452.297.063)	Payment to Employees
Penerimaan Rekening Giro dan Deposito Berjangka	41.155.774.914	9.974.621.263	Interest Income from Current Account and Time Deposit
Penerimaan Restitusi Pajak	193.004.815.427	114.753.703.160	Receipt from Tax Restitutions
Pembayaran Beban Pinjaman	(183.596.366.642)	(96.850.836.990)	Payment for Finance Cost
Pembayaran Pajak Penghasilan	(443.833.709.822)	(440.341.628.588)	Payment for Income Taxes
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>(75.754.341.432)</u>	<u>(408.390.468.403)</u>	Net Cash Used in Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari Ventura Bersama	87.067.589.420	30.628.463.140	Receipt from Joint Ventures
Penempatan pada Ventura Bersama	(283.325.232.159)	(146.741.269.379)	Placement of Joint Ventures
Perolehan Properti Investasi	--	(15.107.359.107)	Acquisition Of Investment Properties
Penempatan pada Entitas Anak	(1.012.967.473.502)	--	Placement of Investment on Subsidiary Entity
Perolehan Aset Tetap	(191.486.771.390)	(206.449.468.328)	Acquisition of Fixed Assets
Hasil Penjualan Aset Tetap	--	231.278.047	Proceeds from Sale of Fixed Assets
Penerimaan Penjualan Investasi pada Entitas Asosiasi dan Investasi Jangka Panjang Lainnya	39.583.000.000	--	Receipt from Sale of Associates and Long Term Investments
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi	1.149.844.769	587.204.824	Dividend Receipt from Associates Entity
Penempatan Investasi Entitas Asosiasi dan Jangka Panjang Lainnya	(50.600.000.000)	(25.625.000.000)	Acquisition of Property Investment
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	<u>(1.410.579.042.862)</u>	<u>(362.476.150.803)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan Utang Obligasi	500.000.000.000	--	Receipt from Bonds Payable
Biaya Emisi Obligasi	(3.100.233.842)	--	Bonds Issuance Costs
Penerimaan Pinjaman Bank	16.036.595.683.317	15.298.731.492.298	Receipt from Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank	(14.994.273.970.002)	(15.595.777.192.936)	Payment of Bank Loans
Penerimaan Setoran Modal Saham	9.526.820.500	--	Receipt from Share Capital Issuance
Penerimaan Tambahan Setoran Modal	49.651.537.771	--	Receipt from Paid in Capital
Pembayaran Dividen Tunai	(110.417.994.749)	(20.322.503.326)	Payment of Cash Dividend
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>1.487.981.842.995</u>	<u>(317.368.203.964)</u>	Net Cash Provided by Financing Activities
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	1.648.458.701	(1.088.234.823.170)	<b>NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>	1.119.694.010.726	2.183.783.098.227	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE PERIOD</b>
<b>KEUNTUNGAN SELISIH KURS YANG BELUM DIREALISASI</b>	(1.229.499.897)	17.071.556.134	<b>UNREALIZED GAIN ON FOREIGN EXCHANGE RATE</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	<u>1.120.112.969.530</u>	<u>1.112.619.831.191</u>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE PERIOD</b>
<b>Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode terdiri dari:</b>			<b>Cash and Cash Equivalents at End of the Period consist of:</b>
Kas	972.594.259	1.011.467.456	Cash on Hand
Bank	536.012.375.271	345.088.363.735	Cash in Banks
Deposito Berjangka	583.128.000.000	766.520.000.000	Time Deposits
<b>Jumlah</b>	<u>1.120.112.969.530</u>	<u>1.112.619.831.191</u>	<b>Total</b>

## XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Akta Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Nomor: 85 tanggal 24 April 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0928411 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499092.AH.01.11.Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015, dan akta Akta Nomor: 46 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Mei 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0934821 serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3509393.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 26 Mei 2015  
Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk** atau disingkat **PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk** selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di kota Jakarta Timur.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris

### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

#### Pasal 2

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 15-03-1973 (lima belas maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan memperoleh status badan hukum sejak tanggal 20-08-1973 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

### MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

#### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Contruction* : EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip - prinsip Perseroan Terbatas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
  - A. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi;
    1. Pekerjaan Sipil dan Gedung (seluruh sektor Pembangunan);
      - a. Drainase dan Jaringan Pengairan ;
      - b. Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
      - c. Jalan dan Jembatan Kereta Api;
      - d. Gedung, Pabrik dan Bangunan Industri;
      - e. Bangunan Pengelolaan Air Bersih dan Limbah;
      - f. Reklamasi dan Pengerukan;
      - g. Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah (Break Water dan Talud);
      - h. Perumahan dan Pemukiman;
      - i. Percetakan Sawah dan Pembukaan Lahan;
      - j. Pembukaan Areal/Transmigrasi;
      - k. Bendung, Bendungan dan Terowongan;
      - l. Perpipaan termasuk perpipaan air dan limbah;
      - m. Interior;
      - n. Pengeboran;
      - o. Pengupasan termasuk *land clearing*;
      - p. Penggalian/Penambangan;
      - q. Pekerjaan Pancang;
      - r. Tambang dan Pembangkit;
      - s. Pertamanan;
      - t. Pekerjaan Sipil dan Gedung Lainnya;
    2. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal termasuk jaringan dan instalasi :
      - a. Kelistrikan dan pembangkit;
      - b. Tata udara /AC dan Pelindung Kebakaran;
      - c. Transmisi dan Distribusi Kelistrikan;

- d. Pemasangan Alat Angkut;
  - e. Pemasangan Fasilitas Produksi;
  - f. Konstruksi Alat Angkat dan Fasilitas Lepas Pantai;
  - g. Lift dan Escalator;
  - h. Industri dan Pembangkit;
  - i. Termal/Bertekanan;
  - j. Minyak/Gas/Geotermal/Energi/Air;
  - k. Kontrol dan Instrumentasi;
  - l. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal lainnya;
3. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi termasuk Jaringan dan Instalasi;
    - a. Sinyal dan telekomunikasi Kereta api;
    - b. Sentral telekomunikasi;
    - c. Telekomunikasi;
    - d. Pemasangan Telekomunikasi;
    - e. Pemancar Radio Sarana Bantu Navigasi Udara dan Laut.
  4. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi bangunan;
- B. Jasa Pertambangan;
- C. Pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction* : EPC) dalam bidang:
- a. Perminyakan;
  - b. Agro industri;
  - c. Kelistrikan;
  - d. Telekomunikasi;
  - e. Petrokimia;
- D. Rancang Bangun (*Design and Build*);
- E. Building Manajemen;
- F. Pabrikasi bahan dan komponen bangunan;
- G. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi;
- H. Pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik;
- I. Penyewaan peralatan konstruksi;
- J. Layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi;
- K. Investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang :
  1. Prasarana dan sarana dasar (infrastruktur);
  2. Industri;
- L. Ekspor Impor;
- M. Perdagangan umum;
- N. System Development;
- O. Pengeloaan Kawasan;
- P. Pengembangan;
  - a. Properti;
  - b. Realty;
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha untuk :
    - A. Layanan jasa konsultasi (konsultan) manajemen;
    - B. Melakukan usaha dibidang agro industri;
    - C. Layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan.

## MODAL

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp2.600.000.000.000,00 - (dua triliun enam ratus miliar Rupiah) terbagi atas 26.000.000.000 (dua puluh enam miliar) saham, yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah);
  - b. 25.999.999.999 (dua puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) Saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.599.999.099.900,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah --disetor penuh sebanyak 9.913.975.360 (sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah), atau dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 991.397.536.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna

dengan jumlah nilai nominal Rp 100,00- (seratus Rupiah) dan 9.913.975.359 (sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan) saham Seri B dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 991.397.535.900,- (sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.

3. 100 % (seratus persen) dari modal ditempatkan tersebut, yaitu sebesar Rp 991.397.536.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah), telah disetor dengan rincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp 972.750.420.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus dua puluh lima ratus Rupiah) sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 2 tanggal 03-02-2015, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0007316 tanggal 04-02-2015 (empat Februari dua ribu lima belas), merupakan setoran lama;
  - b. Sebesar Rp 18.647.115.500,- (delapan belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus lima belas ribu lima ratus Rupiah) disetor dengan uang tunai yang merupakan hasil pelaksanaan *Management Stock Option Plan* (MESOP).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut "**RUPS**").
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut **OJK**) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 5.
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, dengan syarat pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - b.1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;
    - b.2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - b.3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - b.4. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD .
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
  - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.



- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
  - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau penggantinya).
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri, dengan ketentuan:
- a. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - a.2. telah memperoleh persetujuan Menteri;
    - a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri.
    - a.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi;
    - a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.4.
  - b. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek menentukan lain.
9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna .

## SAHAM

### Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari :
  - Saham Seri A Dwiwarna;
  - Saham Seri B;
2. Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang -saham lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya khusus dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.  
Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Masyarakat.
3. a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna, mempunyai hak-hak istimewa untuk:
  - a.1. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
  - a.2. menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal;
  - a.3. menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran; dan
  - a.4. meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
4. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana tersebut dalam ayat 3 butir a pasal ini, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 25. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "**Saham**" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "**Pemegang Saham**" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
5. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B mempunyai hak -yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
6. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau didasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang berhak untuk mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

7. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham atau saham-saham tersebut.
8. Setiap Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
9. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **SURAT SAHAM**

### **Pasal 6**

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham.
5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor surat saham yang bersangkutan.
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus memuat tandatangan tandatangan dari Direktur -Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

## **PENGGANTI SURAT SAHAM**

### **Pasal 7**

1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham rusak wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

## **PENITIPAN KOLEKTIF**

### **Pasal 8**

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :-
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau -Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang -rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;
  - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk-kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk -kontrak investasi kolektif tersebut ;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -dalam butir c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
  - f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau -Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
  - g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
  - h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan -bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
  - j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  - l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPS;
  - m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan- Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
  - o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - p. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak -untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**

### **Pasal 9**

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta menyediakannya di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
  - b. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para- Pemegang Saham; -
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal -pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat -tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam kerja.
7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
8. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia .

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

### **Pasal 10**

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.  
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih karena hukum, dapat mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek, kecuali untuk hak atas Saham Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada siapapun juga.
8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 butir (15) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.

## **DIREKSI**

### **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Yang dapat diangkat sebagai Direksi Perseroan adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    1. tidak pernah dinyatakan pailit;
    2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
4. Selain persyaratan yang diatur dalam ayat 3 pasal ini, anggota Direksi wajib pula memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 Pasal ini.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagai anggota Direksi adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini.
8. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
9. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar inidan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
10. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.  
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
11. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi, maka pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
12. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

13. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota -Direksi yang bersangkutan:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 13 butir a sampai dengan d pasal ini, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 12 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 13 butir c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
17. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
19. Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/ atau tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
20. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang atau tidak adanya Direktur Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat 1, makadalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut.
21. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:
  - a. dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut;
  - b. Selama jabatan seluruh anggota Direksi tersebut lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
22. a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
  - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir a. ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
  - e. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
23. Jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - d. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat - 22 pasal ini; atau
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal.
24. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung jawabannya oleh RUPS.
25. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dewan Komisaris mengambil keputusan pemberhentian sementara waktu anggota Direksi, dengan menyebutkan alasannya;
  - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi.
  - c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut.

- d. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan perseroan serta mewakili perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
  - e. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir d berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - i. terdapat keputusan RUPS yang membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir g; atau
    - ii. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir f.
  - f. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - g. Dengan lampainya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir f ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini menjadi batal.
  - h. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir f ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
  - i. RUPS sebagaimana dimaksud pada butir f ayat ini dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang dipilih oleh dan dari antara Pemegang Saham yang hadir.
  - j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - k. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini.
  - l. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada butir g ayat ini, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
  - m. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
    - 1) Keputusan pemberhentian sementara; dan
    - 2) Hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
26. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sebagaimana dimaksud ayat 10 butir a Pasal ini, kecuali RUPS menentukan lain.
27. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi maka masa jabatan anggota Direksi tersebut adalah sebagaimana dimaksud ayat 10 butir a pasal ini, kecuali RUPS menentukan lain.
28. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; dan/atau
  - b. anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
  - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
  - d. pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
  - e. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,
29. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 28 pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

## **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI**

### **Pasal 12**

1. a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a ayat ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :
  - a. Direksi berwenang untuk:
    - a.1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
    - a.2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain dan mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan kepada Kepala Cabang atau Kepala Perwakilan di dalam atau di luar negeri;

- a.3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- a.4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
- a.5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan;
- a.6. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
- b. Direksi berkewajiban untuk:
  - b.1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
  - b.2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
  - b.3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Komisaris mengenai Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan.
  - b.4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
  - b.5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
  - b.6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
  - b.7. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
  - b.8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
  - b.9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b.10. memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir b.4 dan b.5 ayat ini, dan dokumen Perseroan lainnya;
  - b.11. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan : Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
  - b.12. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
  - b.13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
  - b.14. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
  - b.15. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Perseroan.
  - b.16. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
5. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;



- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
- a. memindahtangankan dan menghapuskan aktiva tetap milik Perseroan dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama, yang jangka waktunya melebihi dari jangka waktu, yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
  - c. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan atau tanpa jaminan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
  - d. melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - e. menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
  - f. membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak finansial bagi Perseroan;
  - g. membebaskan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;
  - h. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - i. tidak lagi menagih piutang macet yang telah dihapusbukukan, dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - j. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
  - k. melakukan penyertaan modal pada perseroan lain dalam nilai yang melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sepanjang penyertaan modal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
  - l. mendirikan anak perusahaan, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
  - m. melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan, sepanjang hal tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
  - n. menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
  - o. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
9. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini.
10. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk :
- a. melakukan transaksi material sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
  - b. melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
  - c. melakukan transaksi lain, guna memenuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- a. mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku ; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
12. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perseroan;
- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Apabila tidak ditentukan lain oleh Direksi dengan Keputusan Direksi, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

13. Direksi untuk perbuatan tertentu, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. -
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara -Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
15. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan keputusan yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan/atau Anggaran Dasar ini.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
  - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 16 butir b pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

## **RAPAT DIREKSI**

### **Pasal 13**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila :
  - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
7. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Panggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
9. Dalam panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini harus menjelaskan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
10. Panggilan Rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
11. Dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
12. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
13. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir memimpin rapat Direksi.
14. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
15. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
16. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
17. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, 9 dan 11 pasal ini, kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
18. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
19. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

20. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat.
21. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
22. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
24.
  - a. Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
  - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Direksi menyampaikan kepada Dewan Komisaris apabila diminta untuk diketahui.
  - c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir b dan butir c ayat ini yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  - e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir b dan butir c ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

## DEWAN KOMISARIS

### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, dalam hal Dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Utama dan harus ada Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, maka harus diangkat Komisaris independen dengan jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
5. Selain persyaratan yang diatur dalam ayat 4 pasal ini, anggota Dewan Komisaris wajib pula memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3 Pasal ini.
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 3 dan 4 pasal ini, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perseroan.
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 pasal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 pasal ini.

9. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
10. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.  
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.
11. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, maka pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
12. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 10 butir a pasal ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; dan/atau
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan/atau ketentuan Anggaran Dasar ini; dan/atau
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara; dan/atau
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
13. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 12 butir a sampai dengan d pasal ini, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.
14. Rencana pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 10 butir a pasal ini diberitahukan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.
15. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
16. Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 12 butir c dan d pasal ini merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
17. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
18. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17 pasal ini, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.
19. Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
20. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.
21. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga menyebabkan anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, atau tidak adanya Komisaris Utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1, maka RUPS harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut;
22. Apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong tersebut;
23. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.  
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengundurandiri tersebut.  
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ayat ini.  
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

24. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - d. pengunduran dirinya efektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 23 Pasal ini;
  - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar modal.
25. Ketentuan sebagaimana ayat 24 butir e pasal ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.
26. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, -maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.
27. Apabila seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sebagaimana dimaksud ayat 10 butir a pasal ini, kecuali RUPS -menentukan lain.
28. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris maka masa - jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sebagaimana dimaksud ayat 10 butir a pasal ini, kecuali RUPS menentukan lain.
29. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
  2. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
  3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

## **TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau -keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka :
  - a. Dewan Komisaris berwenang untuk:
    - a.1. memeriksa buku-buku, surat-surat, dokumen lainnya, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
    - a.2. memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
    - a.3. meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan dan Direksi harus memberikan semua keterangan/penjelasan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris;
    - a.4. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
    - a.5. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
    - a.6. mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris (jika dianggap perlu);
    - a.7. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
    - a.8. membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
    - a.9. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
    - a.10. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
    - a.11. menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
    - a.12. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS;
  - b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
    - b.1. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan ;
    - b.2. menelaah, memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;
    - b.3. mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
    - b.4. melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

- b.5. mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
  - b.6. meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
  - b.7. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
  - b.8. membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya ;
  - b.9. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
  - b.10. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
  - b.11. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundangundangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;
3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:
    - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
    - b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
  4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
  5. (1) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.  
(2) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 butir (1) Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
    - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
    - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 16**

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
5. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis atau sarana lainnya oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
10. Panggilan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini harus menjelaskan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
11. Panggilan rapat tersebut tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris, kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
13. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

14. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
15. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.
16. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
17. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
18. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
19. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 18 pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
20. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
21. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak biasa
22. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
23. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
24. Dalam hal usulan lebih dari dua alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
25. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris, kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
26. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
27.
  - a. Dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah Rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Dewan Komisaris, jika ada) dan hal-hal yang diputuskan.
  - b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
  - c. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada butir b dan butir c ayat ini yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  - e. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir b dan butir c ayat ini wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
28. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
29. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan -melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media - elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan - dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

## RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

### Pasal 17

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
  - b. Anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
  - c. Proyeksi keuangan Perseroan dan anak perusahaannya; dan
  - d. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
3. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani oleh Direksi selanjutnya disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Rancangan Rencana Kerja dan dan Anggaran Tahunan Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran Perseroan berjalan.
5. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan
6. Perusahaan belum disetujui Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan sebelumnya yang diberlakukan.

## **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

### **Pasal 18**

1. Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim, dan pada akhir bulan Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas Laporan Keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
  - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
  - g. gaji dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan/fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau (tahun buku yang bersangkutan).
3. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
4. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani Laporan Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
5. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
6. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan - keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
7. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan -keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir.
8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia yang berlaku. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS persetujuannya untuk kepentingan Pemegang Saham.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

## **PELAPORAN**

### **Pasal 19**

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Pasal 20

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
  - b. RUPS lainnya yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
2. Yang dimaksud dalam RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. RUPS dengan mata acara lain lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
4. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
  - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah ;
  - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

### Pasal 21

1. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan tiap tahun, dalam jangka waktu - paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS Tahunan tersebut Direksi menyampaikan :
  - a. Laporan Tahunan, sebagaimana tersebut pada Pasal 18 ayat 2 ;
  - b. usulan penggunaan laba Perseroan;
  - c. usulan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik;
4. Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 dan 7 pasal ini.
5. Dalam RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
7. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham:
  - (1). Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
  - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
    1. dilakukan dengan itikad baik;
    2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    3. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    4. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    5. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
  - (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
  - (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 4 ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
  - (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
  - (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 7 pasal ini; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  - (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat 7 pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) dan butir (6) ayat ini.
  - (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan;
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) butir c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) butir a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat 7 pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat 7 pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ayat 7 pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
- a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberituahannya sebagaimana dimaksud pada butir b kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat 7 pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

##### **Pasal 22**

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

#### **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN**

##### **WAKTU PENYELENGGARAAN**

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

##### **Pasal 23**

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa didahului oleh Pemberitahuan RUPS kepada OJK, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.
4. Pemberitahuan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - (1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
  - (2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
  - (3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
  - (4). Ketentuan butir (1), (2), (3) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 butir (13).

5. Pengumuman RUPS:

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat:
  - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
  - d. tanggal pemanggilan RUPS.
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, paling kurang melalui:
  - a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
- (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 butir (2).
- (9) Pengumuman RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- (10) Ketentuan butir 1 sampai dengan 9 ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 butir (13).

6. Usulan Mata Acara Rapat :

- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
  - d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam butir (3) ayat ini.

Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

7. Pemanggilan RUPS:

- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

- e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
- (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang melalui:
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) butir c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) butir a ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
- (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
- (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
- (9). Ketentuan butir (1) sampai dengan butir (9) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 butir (13).
8. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
  - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
  - (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (3) sampai dengan butir (6) ayat 7 dan ayat 11 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
9. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- (1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - (2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
10. Bahan Mata Acara Rapat:
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham;
  - (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
  - (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
  - (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.
  - (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
  - (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan
  - (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

11. Ralat Pemanggilan:

- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (2) pasal ini.
- (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 7 pasal ini.
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
- (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.
- (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir (3), ayat 7 butir (4), dan ayat 7 butir (7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 24**

**1. Pimpinan RUPS:**

- (1). RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -
- (2). Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- (3). Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (4). Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (5). Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.
- (6). Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (7). Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

**2. Tata Tertib RUPS :**

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
- (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**3. Risalah RUPS:**

- (1). Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
- (2). Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (3). Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
- (4). Risalah RUPS yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam butir (3) ayat ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
- (5). Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
- (6). Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

#### 4. Ringkasan Risalah RUPS :

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang:
  - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
  - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
  - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
  - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
  - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - h. keputusan RUPS; dan
  - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui:
  - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
  - b. situs web Bursa Efek; dan
  - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (3) c pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (3) pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.
- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (2) pasal ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir (2) pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
- (8) Ketentuan ayat 4 butir (2), butir (4), butir (5), dan butir (6) Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk:
  - a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
  - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 butir (13).

### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 25**

- 1 Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir a pasal ini tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir b ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan, harus mendapat persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 butir a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS; dan
  - c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 butir b pasal ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan .
4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir b pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
  - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 butir c pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
5. Perubahan Direksi dan/atau perubahan Dewan Komisaris dan/atau Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Diikuti oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
  - b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 butir a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
- 6 RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 6 butir a pasal ini tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian

- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 6 butir b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
7. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 butir a pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan disetujui oleh para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 7 butir b pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.
8. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 11 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
10. Ketua RUPS berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
11. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
12. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
14. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.
15. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
16. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 15 wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
18. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

## PENGUNAAN LABA

### Pasal 26

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.



4. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk pegawai, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
5. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
6. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
7. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampauan target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk pegawai sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
8. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan.
9. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia, dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan serta peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11 pasal ini.
12. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
13. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 12 pasal ini.

## **PENGGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 27**

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

## **ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 28**

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal .
2. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
3. Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
6. Ketentuan mengenai pengurangan modal mengikuti peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

## **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**

### **Pasal 29**

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 7.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM**

### **Pasal 30**

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 7.
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh Likuidator.
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Likuidator atau setelah Pengadilan menerima pertanggungjawaban Likuidator yang ditunjuknya.
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan adalah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## **PERATURAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka mengacu pada Peraturan OJK dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dan mengacu pada RUPS yang akan memutuskannya.

## XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 100.000 (seratus ribu) Saham Lama berhak atas antara 36.852 (tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.450 (seribu empat ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD, atau daftar pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia/Asing sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 22 Juni 2015 pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

### 2. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 22 Juni 2015. Prospektus Final, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya tersedia dan dapat diperoleh pemegang saham di kantor BAE, yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo, Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav.34-35 Jakarta 10220, dengan menunjukkan bukti identitas atas nama pemegang saham yang tercatat dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 24 Juni 2015 hingga 1 Juli 2015 dengan membawa:

- a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- b) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

### 3. Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 1 Juli 2015

A. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- (i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- (ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- B. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- (i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
  - (ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - (iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);
  - (iv) Asli Surat Kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan penerima kuasa;
  - (v) Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
    - Asli Surat Kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
    - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 24 Juni 2015 sampai 1 Juli 2015 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### 4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
- b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
- c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/ Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
- b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
- d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2015 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### **5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dilakukan pada tanggal 6 Juli 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
- c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PUT I dan dengan asumsi bahwa opsi berdasarkan program MESOP telah dilaksanakan seluruhnya, dengan komposisi Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% dari modal ditempatkan dan disetor dan masyarakat sebesar 40% dari modal ditempatkan dan disetor.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.1.

#### **6. Persyaratan Pembayaran**

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

**Bank: Bank Mandiri**  
**Cabang: KK Jakarta Waskita Karya**  
**No. Rekening: 166-00-3466666-9**  
**Atas Nama: PT Waskita Karya**

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 3 Juli 2015.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

#### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan menerima pengajuan pemesanan pembelian saham akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap di tandatangani yang merupakan bukti pada saat mengambil saham dan pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak dipenuhi.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui pemegang rekening KSEI.

#### **8. Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT I yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2015. Pengembalian uang dilakukan dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan ke rekening Pemesan. Uang yang dikembalikan dalam bentuk cek dapat diambil di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan cek setelah tanggal 8 Juli 2015 hanya bisa dilakukan di kantor Perseroan.

Uang pengembalian hanya dapat diambil dengan menunjukkan KTP asli atau bukti jati diri lainnya dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank maupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Bila pemesan berhalangan untuk mengambil sendiri, maka pemesan dapat memberikan kuasa kepada orang yang ditunjuk dengan melampirkan surat kuasa bermeterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa serta menunjukkan aslinya.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT I berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Terbatas I sampai dengan tanggal pengembalian uang pemesanan saham (*refund*).

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan kedalam rekening efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

## 10. Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau Saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun Formulir Konfirmasi Penjatahan dan Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Tambahan bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat dalam Penitipan Kolektif, SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat) antara pukul 09.00 - 15.00 WIB mulai tanggal 24 Juni 2015 hingga 1 Juli 2015. Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen – dokumen sebagai berikut :

- a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- c. Asli surat kuasa yang sah (bagi Lembaga/Badan Hukum) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
- d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

## 11. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang Sertifikat Bukti HMETD porsi publik, maka sisa saham Baru akan dialokasikan kepada para pemegang saham publik lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Saham Baru tersebut akan diserap oleh Pembeli Siaga.

## 12. Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 melalui Bursa Efek Indonesia atau dapat dilaksanakan di luar Bursa sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya setelah pelaksanaan HMETD dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) sampai dengan maksimum 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen).

## 13. Pendaftaran Sertifikat Bukti HMETD

Pendaftaran dilakukan sendiri atau dikuasakan dengan dilengkapi dokumen-dokumen tersebut di bawah ini melalui:

**PT Datindo Entrycom**  
**Puri Datindo-Wisma Sudirman**  
**Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta**  
**Telp. 021 – 5709009**  
**Fax. 021 – 5709026**

dengan membawa:

- a. Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
- b. Bukti pembayaran asli dari bank berupa bukti transfer bilyet giro/cek/tunai asli dari bank
- c. Fotokopi KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan) yang masih berlaku, fotokopi Anggaran Dasar (bagi badan hukum/ lembaga)
- d. Surat kuasa (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi fotokopi KTP yang memberi dan diberi kuasa. Bagi pemesan berkewarganegaraan asing, di samping mencantumkan nama dan alamat pemberi kuasa secara lengkap dan jelas, juga wajib mencantumkan nama dan alamat luar negeri domisili hukum yang sah dari pemberi kuasa secara lengkap dan jelas (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperhatikan).

Waktu pendaftaran:

Tanggal : 24 Juni 2015 hingga 1 Juli 2015.

Pukul : 09.00 – 16.00 WIB

FPPS tambahan asli yang diisi lengkap dan ditandatangani (jika memesan saham tambahan).

## **XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, FPPS Tambahan dan Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD akan tersedia dan dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB di:

**PT Datindo Entrycom  
Puri Datindo  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta  
Telp. 021 – 5709009  
Fax. 021 – 5709026**

Apabila sampai dengan tanggal 1 Juli 2015 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan Sertifikat Bukti HMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.